DAFTAR ISI

DAFTAR ISI			**i**
DEFINISI DAN SINGKATAN			**iii**
RINGKASAN			**xii**
I.	**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**		**1**
II.	**RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM**		**15**
III.	**PERNYATAAN HUTANG**		**16**
IV.	**ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN**		**25**
V.	**RISIKO USAHA**		**53**
VI.	**KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**		**59**
VII.	**KETERANGAN TENTANG PERSEROAN**		**60**
	1.	Riwayat Singkat Perseroan	60
	2.	Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	61
	3.	Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Yang Memiliki 5% atau Lebih Saham Perseroan	63
	4.	Keterangan Mengenai Anak Perusahaan Dan Perusahaan Penyertaan	67
	5.	Kepengurusan dan Pengawasan	77
	6.	Hubungan Pengurusan dan Pengawas Dalam Perseroan dan Pemegang Saham Utama Serta anak Perusahaan Dan Perusahaan Penyertaan	84
	7.	Hubungan Afiliasi Antara Pengurus Dan Pengawas Perseroan Dengan Pengurus dan Pengawasan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	85
	8.	Hubungan Afiliasi Pengurus dan Pengawas Dalam Perseroan dan Pemegang Saham Utama Serta Anak Perusahaan Dan Perusahaan Penyertaan	85
	9.	Sumber Daya Manusia	86
	10.	Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga	88
	11.	Perkara-perkara yang sedang dihadapi Perseroan	89
VIII.	**KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN**		**157**
IX.	**IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING**		**210**
X.	**EKUITAS**		**214**
XI.	**PERPAJAKAN**		**215**
XII.	**PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI**		**216**
XIII.	**LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**		**218**
XIV.	**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**		**221**
XV.	**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN**		**238**
XVI.	**KETERANGAN TENTANG PEMERINGKAT EFEK**		**447**
XVII.	**ANGGARAN DASAR PERSEROAN**		**450**
XVIII.	**KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI**		**477**
	1.	Umum	477
	2.	Jumlah Pokok, Harga Penawaran, Bunga Obligasi dan Satuan Pemindahbukuan	477
	3.	Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi	478
	4.	Jaminan	478
	5.	Pembelian kembali Obligasi (*Buy Back*)	478
	6.	Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan	480
	7.	Kelalaian Perseroan	484
	8.	Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)	485
	9.	Hak-hak Pemegang Obligasi	489
	10.	Penyisihan Dana.	490
	11.	Pemberitahuan	490
	12.	Hukum Yang Berlaku	490

XIX.	**KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI SUBORDINASI**		**491**
	1.	Umum	491
	2.	Jumlah Pokok, Harga Penawaran, Bunga Obligasi Subordinasi dan Satuan Pemindahbukuan	491
	3.	Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi	491
	4.	Jaminan	492
	5.	Pembelian kembali Obligasi Subordinasi (*Buy Back*)	493
	6.	Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan	493
	7.	Kelalaian Perseroan	495
	8.	Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi (RUPO)	497
	9.	Hak-hak Pemegang Obligasi Subordinasi	501
	10.	Penyisihan Dana	502
	11.	Pemberitahuan	502
	12.	Hukum Yang Berlaku	503
XX.	**PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI**		**504**
XXI.	**KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT**		**509**
XXII.	**AGEN PEMBAYARAN**		**517**
XXIII.	**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI**		**518**

DEFINISI DAN SINGKATAN

Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi	:	Berarti perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.
Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi	:	Berarti perubahan dan/atau tambahan dan/atau pembaharuannya pada Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat yang syarat dan ketentuannya harus disetujui bersama oleh Perseroan dan Wali Amanat.
ALCO	:	Adalah singkatan dari "*Asset Liabilities Committee*" yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan dibidang pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan yang diketuai oleh Presiden Direktur.
Afiliasi	:	Berarti: a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat ke dua baik secara horizontal maupun vertikal; b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; c. Hubungan antara dua perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
Aset Tetap	:	Berarti harta tetap berwujud yang digunakan dalam kegiatan sebuah usaha.
Agen Pembayaran	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta. beserta penerima dan/atau pengganti haknya, yang ditunjuk oleh Perseroan serta berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan Bunga serta denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan, setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana akan diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran (sebagaimana didefinisikan dibawah ini).
Anak Perusahaan atau Entitas Anak	:	Berarti perusahaan yang dimiliki Perseroan dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia.
ATM	:	Berarti Anjungan Tunai Mandiri (*Automated Teller Machine*) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi *teller* seperti penarikan uang tunai, pemeriksaaan saldo dan pemindahbukuan.
BAI	:	Berarti PT Bank ANZ Indonesia.
Bagian Penjaminan	:	Berarti bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan Oblgasi Subordinasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada Masyarakat dan akan membeli sisa Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi pada tanggal penutupan Masa Penawaran, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.

Bank Kustodian	:	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan BAPEPAM dan LK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Bapepam dan LK	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Bursa Efek	:	Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (atau penggantinya atau penerus haknya) dimana Obligasi dicatatkan.
Bunga Obligasi	:	Berarti tingkat bunga Obligasi pertahun yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Bunga Obligasi Subordinasi	:	Berarti tingkat bunga Obligasi Subordinasi pertahun yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
CAR	:	Berarti *Capital Adequacy Ratio.*
CFI	:	Berarti PT Clipan Finance Indonesia Tbk.
Daftar Pemegang Rekening	:	Berarti daftar yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi oleh seluruh Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dokumen Emisi	:	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus Awal, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini.
Efek	:	Berarti Surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersil, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Infestasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Efektif	:	Berarti Terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Ketentuan angka 4 Peraturan nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. Atas dasar lewatnya waktu yaitu: (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam & LK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran, (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi, atau, b. Atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	:	Berarti penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi oleh Perseroan untuk ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

Force Majeure	:	Berarti berarti suatu kejadian di luar kemampuan dan kekuasaan suatu pihak sehingga pihak yang bersangkutan tidak mungkin melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana gelombang pasang tsunami, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia atau adanya tindakan terorisme di dalam dan/atau di luar Indonesia, atau keadaan darurat atau bencana nasional atau internasional yang dapat mempunyai akibat negatif secara Material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, atau (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar keuangan di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri, dan diberlakukannya peraturan di bidang valuta asing yang dapat mempunyai akibat negatif secara Material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, atau (iii) saat dan pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang, peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintahan yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.
Formulir Konfirmasi Penjatahan	:	Berarti formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi	:	Berarti formulir pemesanan yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau Agen Penjualan yang ditunjuk oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam rangka Emisi.
Grup Bank Panin	:	Berarti Perseroan dan Anak Perusahaan.
GWM	:	Berarti Giro Wajib Minimum.
Hari Bank	:	Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	:	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam satu tahun tanpa kecuali.
Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Harga Pasar Yang Wajar	:	Berarti harga tunai dari suatu aset yang dapat dinegosiasikan dalam suatu transaksi komersial yang wajar antara penjual dan pembeli.
Jumlah Terhutang	:	Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi sehubungan dengan Emisi, yakni berupa jumlah Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
Jadwal Emisi	:	Berarti jadwal waktu Penawaran Umum yang ditentukan bersama oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Konfirmasi Tertulis	:	Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR)	:	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi di KSEI.
Kustodian	:	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
LDR	:	Berarti *Loan to Deposit Ratio*.
Likuidasi	:	Berarti pemberesan harta benda/harta kekayaan (aset-aset) sebagai tindak lanjut dari Penutupan Usaha.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan hukum baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Material	:	Berarti kejadian atau peristiwa yang mempunyai nilai materiil, yakni sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan (*revenues*) atau 20% (dua puluh persen) dari modal sendiri yang diperhitungkan dari Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan Perseroan.
Masa Penawaran	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Prospektus.
Manajer Penjatahan	:	Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam hal ini PT Evergreen Capital.
NPL	:	Berarti *Non Performing Loan*.
Obligasi Berkelanjutan	:	Berarti Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah)

Obligasi	:	Berarti surat hutang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Obligasi Subordinasi	:	Berarti surat hutang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dengan nama Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi, yang akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan	:	Berarti Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah)
Pemegang Obligasi	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan: (i) dalam Rekening Efek pada KSEI, atau (ii) dalam Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Obligasi Subordinasi	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan: (iii) dalam Rekening Efek pada KSEI, atau (iv) dalam Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI.
Penawaran Awal (*book building*)	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
Pemeringkat	:	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di Bapepam dan LK sebagai penggantinya yang ditunjuk oleh Perseroan.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi oleh Perseroan untuk menjual Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya, dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Penawaran Umum Berkelanjutan	:	Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi
Pengakuan Hutang	:	Berarti pengakuan Perseroan atas hutang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, dengan syarat dan ketentuan yang termaktub dalam akta Pengakuan Hutang yang dibuat dalam Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. • tanggal • 2012 dan Akta Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. • tanggal • 2012 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH. Notaris di Jakarta dan berikut segala perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi	:	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan (masing-masing) menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai Perjanjian ini. Penjamin Emisi Obligasi terdiri dari PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Evergreen Capital, dan PT Indo Premier Securities dan penambahan anggota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi	:	Berarti PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Evergreen Capital, dan PT Indo Premier Securities, kesemuanya berkedudukan di Jakarta yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Emisi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penutupan Usaha	:	Berarti keadaan dimana Perseroan dinyatakan atau diperintahkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan atau Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang, yang mempunyai kewenangan terhadap Perseroan untuk membubarkan, membekukan atau menutup atau dengan suatu keputusan pengadilan yang berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan dalam keadaan pailit.
Perjanjian Agen Pembayaran	:	Berarti perjanjian antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi No. 47 tanggal 18 Oktober 2012 untuk Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dan No. 51 tanggal 18 Oktober 2012 untuk Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dan Addendum I Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi masing-masing No. 105 dan No. 109 tanggal 14 November 2012 yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah dan dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi	:	Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 45 tanggal 18 Oktober 2012 dan Addendum Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No.103 tanggal 14 November 2012, Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 49 tanggal 18 Oktober 2012 dan Addendum Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No.107 tanggal 14 November 2012 yang keseluruhannya dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo S.H., MH, Mkn, Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi	:	Berarti perjanjian perwaliamanatan yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat dengan syarat dan ketentuan yang dibuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 44 tanggal 18 Oktober 2012 dan Addendum Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 102 tanggal 14 November 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo S.H., MH, Mkn, Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi	:	Berarti perjanjian perwaliamanatan yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat dengan syarat dan ketentuan yang dibuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No.48 tanggal 18 Oktober 2012 dan Addendum Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No.106 tanggal 14 November 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo S.H., MH, Mkn, Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi di KSEI	:	Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam akta Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI dengan No. SP-0056/PO/KSEI/1012 tanggal 18 Oktober 2012 dan Addendum Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0028/PI-PO/KSEI/1112 tanggal 14 November 2012 dan akta Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI dengan No. SP-0055/PO/KSEI/1012 tanggal 18 Oktober 2012 dan Addendum Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI No. SP-0029/PI-PO/KSEI/1112 tanggal 14 November 2012yang dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah dan dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen-dokumen yang wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sesuai ketentuan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Perusahaan Efek	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan UUPM.
Perseroan	:	Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Bank Pan Indonesia Tbk., disingkat PT Bank Panin Tbk., suatu bank yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya telah diuraikan pada bagian komparisi akta ini.
Persyaratan Obligasi dan Obligasi Subordinasi	:	Berarti ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan tingkat Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasidengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM.
Prospektus Awal	:	Berarti prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.8 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-41/PM/2000 Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.A.8 Tentang Prospektus Awal dan Info Memo yang merupakan dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada BAPEPAM dan LK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Obligasi dan Obligasi Subordinasi, Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, tingkat suku bunga obligasiobligáis dan Obligasi Subordinasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	:	Berarti prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-43/PM/2000 Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.3 Tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum, ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Perseroan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan diumumkan dalam sekurang kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan yang diterbitkan di tempat kedudukan Perseroan.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
RUPO	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
Satuan Pemindahbukuan	:	Berarti satuan jumlah Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp.1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	:	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif KSEI yang diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi	:	Berarti bukti penerbitan Obligasi Subordinasi yang disimpan dalam penitipan kolektif KSEI yang diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi.
Sindikasi Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi	:	Berarti Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang secara bersama-sama bertindak selaku para pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini.
Tanggal Emisi	:	Berarti tanggal distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterima KSEI dari Perseroan, yang jatuh pada tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk diperdagangkan di Bursa Efek yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Tanggal Pembayaran	:	Berarti Tanggal Emisi yang merupakan tanggal pembayaran seluruh nilai pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada Perseroan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek (*in good funds*) dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti tanggal di mana Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi menetapkan penjatahan Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Tanggal yang mana selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal berakhirnya Masa Penawaran yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi	:	Berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang termuat dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yaitu pada ulang tahun ke-5 (lima) dan ke-7 (tujuh) sejak Tanggal Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan apabila tanggal tersebut jatuh pada bukan Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 dari Perjanjian Perwaliamanatan.
Undang-Undang Pasar Modal (UUPM)	:	Berarti Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3608 Tahun 1995) yang diundangkan pada tanggal 10 Nopember 1995 dan peraturan pelaksanaannya.
VTL	:	Berarti Votraint No. 1103 Pty, Ltd.
Wali Amanat	:	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang pada saat ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam jutaan Rupiah dan secara konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, serta disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. PERSEROAN

Perseroan memulai kegiatan operasi perbankan sebagai bank umum pada tanggal 18 Agustus 1971 dan memperoleh status Bank Devisa pada tanggal 2 April 1972. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan yang berkantor pusat di Jakarta dan per 31 Agustus 2012 memiliki 450 jaringan kantor cabang, dimana 54 kantor merupakan kantor cabang yang berlokasi di Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Sukabumi. Garut, Sumedang, Solo, Semarang, Surabaya Coklat, Malang, Bojonegoro, Medan, Pematang Siantar, Pekanbaru, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Palmerah, Palembang, Batam, Lampung, Manado, Kuta-Bali, Padang, Yogyakarta, Serang, Jambi, Purwokerto, Tegal, Balikpapan, Samarinda, Palu, Kendari, Jakarta Menara Imperium, Jakarta CBD Pluit, Jakarta Pecenongan, Jakarta Kopi, Tasikmalaya, Surabaya Cendana, Banda Aceh, Jayapura, Pangkal Pinang, Ambon, Lhokseumawe, Kediri, Jakarta Gading Serpong, Jakarta Sangaji, Jakarta Plaza Pasifik, Bengkulu, Gorontalo, Mataram, Jakarta Bekasi Square dan Jakarta Puri Tirta dan yang berdomisili di luar negeri merupakan Kantor Cabang unit yakni di Cayman Islands dan Kantor Perwakilan di Singapura serta didukung oleh 388 kantor cabang pembantu dan 6 kantor kas.

Perluasan jaringan kantor didasarkan atas beberapa kriteria, antara lain: a) meningkatkan jaringan guna memenuhi kebutuhan kegiatan usaha nasabah, b) perkembangan perekonomian daerah yang bersangkutan, c) situasi dan kondisi sosial ekonomi daerah yang bersangkutan dan d) mempermudah akses internasional (khusus untuk kantor di luar negeri).

PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2012, yang dikeluarkan oleh PT Blue Chip Mulia pada tanggal 1 Oktober 2012, susunan para pemegang saham Perseroan per tanggal 30 September 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	96.000.000.000	9.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	24.087.645.998	2.408.764.599.800	
Pemegang Saham :			
1.PT Panin Financial Tbk (d/h PT Panin Life Tbk)	11.065.846.285	1.106.584.628.500	45,94
2.Votraint No. 1103 Pty Ltd	9.349.793.152	934.979.315.200	38,82
3.Masyarakat lainnya masing-masing dengan Kepemilikan dibawah 5%	3.672.006.561	367.200.656.100	15,24
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh	24.087.645.998	2.408.764.599.800	100,00%
Saham Dalam Portepel	71.912.354.002	7.191.235.400.200	

RIWAYAT *CORPORATE ACTION* PERSEROAN

Sejak Penawaran Umum pada tahun 1982, Perseroan telah melakukan beberapa *corporate action* yang dilakukan melalui Penawaran Umum dan Dividen Saham, sebagai berikut :

Keterangan	Tanggal Pelaksanaan	Pencatatan pada Bursa Efek	Jumlah (Saham)
A. Penerbitan Saham			
Penawaran Umum Perdana	28 Oktober 1982	29 Desember 1982	1.637.500
Penawaran Umum Kedua	18 Mei 1983	17 Juni 1983	3.162.500
Penawaran Umum Terbatas I	1 Oktober 1989	2 Nopember 1989	914.655
Penawaran Umum Terbatas II	1 Juni 1990	26 Juni 1990	2.614.410
Dividen Saham		30 Agustus 1990	416.305
Penawaran Umum Terbatas III	10 Juni 1995	29 Juni 1995	60.180.462
Pemecahan Nilai Nominal Saham		26 Mei 1997	601.804.624
Penawaran Umum Terbatas IV	10 Juni 1997	27 Juni 1997	300.902.312
Penawaran Umum Terbatas V	24 Juni 1998	13 Juli 1998	702.105.395
Penawaran Umum Terbatas VI	30 Juni 1999	05 Juli 1999	1.210.406.221

Keterangan	Tanggal Pelaksanaan	Pencatatan pada Bursa Efek	Jumlah (Saham)
Pemecahan Nilai Nominal Saham		1 Oktober 1999	2.977.753.764
Pemecahan Nilai Nominal Saham		1 Agustus 2002	8.933.605.053
Saham Bonus/Dividen Saham		28 Juni 2004	1.176.091.818
Penawaran Umum Terbatas VII	28 Juni 2006	13 Juli 2006	4.016.358.393
Pelaksanaan Konversi Waran Seri IV	s.d 10 Juli 2009	13 Juli 2006	4.005.854.032

Jumlah total Waran Seri IV yang telah dikonversi sampai dengan tanggal 10 Juli 2009 adalah sebesar 4.005.854.032 dan yang tidak di konversi adalah sebesar 10.504.361.
Rasio Perbandingan antara Waran Seri IV yang sudah dikonversi dan total waran yang tidak dikonversi adalah sebesar 0,262%
Masa berlaku Waran Seri IV adalah sampai dengan tanggal 10 Juli 2009.

Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan Perseroan sebelum diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal Efektif	Pencatatan pada Bursa Efek	Jumlah Obligasi (juta Rp)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terhutang (juta Rp)
B. Penerbitan Surat Utang					
Obligasi Bank Panin I Tahun 2000	28 Desember 1999	15 Maret 2000	500.000	6 Maret 2005	Lunas
Obligasi Subordinasi Bank Panin I Tahun 2003	5 Juni 2003	23 Juni 2003	1.300.000	18 Juni 2008	Lunas
Obligasi Bank Panin II Tahun 2007 :					
▪ Seri A	7 Juni 2007	20 Juni 2007	50.000	19 Juni 2010	Lunas
▪ Seri B	7 Juni 2007	20 Juni 2007	1.400.000	19 Juni 2012	Lunas
▪ Seri C	7 Juni 2007	20 Juni 2007	200.000	19 Juni 2014	200.000
Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008	27 Maret 2008	10 April 2008	1.500.000	9 April 2018	1.500.000
Obligasi Bank Panin III Tahun 2009	29 September 2009	7 Oktober 2000	800.000	6 Oktober 2015	800.000
Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010	29 Oktober 2010	10 November 2010	540.000	9 November 2015	540.000
Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010	29 Oktober 2010	10 November 2010	2.460.000	9 November 2017	2.460.000

Maka jumlah Obigasi Terhutang Perseroan adalah sebesar Rp5.500.000 juta.

2. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan entitas anak secara konsolidasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 14 November 2012, 15 Maret 2012, 29 Maret 2011, 25 Maret 2010, 20 Maret 2009 dan 25 Maret 2008 serta laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2011 yang tidak diaudit. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 tertanggal 14 November 2012 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan standar akuntansi keuangan yang relevan dan efektif berlaku 1 Januari 2012 dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan obligasi dan obligasi subordinasi. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tahun 2011 tertanggal 15 Maret 2012 memuat paragraf penjelasan mengenai perubahan akuntansi atas penyisihan penghapusan aset non-produktif dan transaksi rekening administratif sedangkan laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tahun 2010 tertanggal 29 Maret 2011 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan awal PSAK No.50 (Revisi 2006) dan No.55 (Revisi 2006) dan penerapan ketentuan transisi sesuai ketentuan Bank Indonesia untuk estimasi penurunan nilai atas kredit secara kolektif.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni		Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember				
	2012	2011 (Tidak diaudit)	2011	2010	2009	2008	2007
Jumlah Pendapatan	6.349.396	5.644.318	12.055.941	9.545.431	8.324.397	6.598.783	4.949.548
Jumlah Beban	(4.803.055)	(4.533.229)	(9.427.878)	(7.689.542)	(6.922.966)	(5.539.337)	(3.464.700)
Laba Bersih	1.241.430	865.712	2.053.115	1.448.937	1.079.833	761.445	1.020.941

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Jumlah Aset	135.793.538	124.754.179	108.995.334	77.915.717	64.409.075	53.532.110
Jumlah Liabilitas	118.690.774	108.866.048	95.498.580	66.118.993	55.577.712	45.071.253
Jumlah Ekuitas	17.102.764	15.888.131	13.496.754	11.796.724	8.831.363	8.460.857
Total Kredit yang diberikan (net)	81.380.824	69.079.311	55.682.562	39.967.098	35.282.456	28.290.884
Total Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	2.490.476	2.105.927	1.620.548	1.364.004	1.439.239	815.485
Dana Pihak Ketiga	92.787.245	85.748.532	75.279.720	56.234.487	46.043.679	31.321.133
Laba sebelum pajak penghasilan / rata-rata jumlah aset (%)[1]	2,13	2,02	1,76	1,75	1,75	3,14
Laba bersih / rata-rata jumlah ekuitas (%)[1]	16,31	14,63	11,62	11,03	10,16	13,98
CAR dengan Risiko Pasar (%)	16,59	17,45	16,65	21,79	20,31	21,58
CAR tanpa Risiko Pasar (%)	16,66	17,53	16,66	21,93	20,65	23,34
NPL Netto (%)	0,74	0,92	2,68	1,60	2,15	1,76
Kredit yang diberikan / Dana pihak ketiga (%)	87,83	80,36	74,22	73,28	78,93	92,36

Catatan:

1. *Laba-Rugi 30 Juni 2012 tidak disetahunkan sehingga rasio-rasio yang menyangkut laba-rugi tidak dapat diperbandingkan dengan periode tahun-tahun sebelumnya.*
2. *Yang berakhir 30 Juni 2011 tidak diaudit*

3. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG AKAN DITERBITKAN

Ringkasan Penawaran Umum Obligasi adalah sebagai berikut:

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012.
Jumlah Nilai Obligasi	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
Jangka Waktu	:	5 (lima) tahun. Jatuh tempo tanggal • 2017.
Harga Penawaran	:	Harga penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Tingkat Bunga	:	Obligasi tanpa warkat yang diadministrasikan pada penitipan kolektif di PT KSEI. Besarnya bunga tetap Obligasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-5 (lima) adalah sebesar •% (• persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan).
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah).
Satuan Perdagangan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannnya.
Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*)	:	1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara pari passu berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, sesuai pasal 1131 dan 1132 kitab undang undang hukum perdata
Wali Amanat	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan (*covenants*)	:	Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dan biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi ini. Perseroan diwajibkan mematuhi pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban tersebut yang diuraikan dalam Bab XVIII Prospektus ini.

Hasil Pemeringkatan	:	Berdasarkan surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) No. 1654/PEF-Dir/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 untuk periode 5 Oktober 2012 sampai dengan 1 Oktober 2013 adalah: id AA (*Double A*)

Ringkasan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut:

Nama Obligasi Subordinasi	:	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012.
Jumlah Nilai Obligasi Subordinasi	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah)
Jangka Waktu	:	7 (tujuh) tahun. Jatuh tempo tanggal • 2019.
Harga Penawaran	:	Harga penawaran Obligasi Subordinasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi.
Tingkat Bunga	:	Obligasi Subordinasi tanpa warkat yang diadministrasikan pada penitipan kolektif di PT KSEI. Besarnya bunga tetap Obligasi Subordinasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) adalah sebesar •% (• persen) per tahun. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan).
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah).
Satuan Perdagangan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannnya.
Pembelian Kembali Obligasi Subordinasi (*Buy Back*)	:	Obligasi Subordinasi ini tidak mempunyai opsi untuk pembelian kembali (*buy back*) sampai dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi.
Jaminan	:	Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi Subordinasi ini secara pari passu berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, sesuai pasal 1131 dan 1132 kitab undang undang hukum perdata.
Wali Amanat	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan (*covenants*)	:	Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dan biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Subordinasi ini. Perseroan diwajibkan mematuhi pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban tersebut yang diuraikan dalam Bab XIX Prospektus ini.
Hasil Pemeringkatan	:	Berdasarkan surat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) No. 1655/PEF-Dir/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012, hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 untuk periode 5 Oktober 2012 sampai dengan 1 Oktober 2013 adalah: id AA- (*Double A Minus*)

Sifat-sifat Khusus : PBI NO.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 mengatur mengenai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu obligasi subordinasi untuk dapat diperlakukan sebagai modal pelengkap level bawah (*lower tier* 2 *capital*) suatu bank, yang pada pokoknya mencakup bahwa telah memperoleh persetujuan BI untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal, bersifat subordinasi untuk memperoleh seluruh pelunasan pembayaran pada saat terjadi likuidasi dan memiliki jangka waktu minimal 5 (lima) tahun serta hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan BI.

Terkait dengan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi, PBI NO.10/15/PBI/2008 memuat ketentuan bahwa pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi juga dapat ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cummulative*), termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila :

a. Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dapat menyebabkan kewajiban Modal Minimum secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
b. Perseroan dalam keadaan rugi; atau
c. Kondisi profitabilitas Perseroan tidak memungkinkan untuk membayar Bunga Obligasi Subordinasi tersebut.

Obligasi Subordinasi merupakan obligasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, hal tersebut tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamantan, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tersedia untuk menyerap kerugian pada saat likuidasi dan bersifat subordinasi yang merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi terhadap pemegang hutang senior.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk memperbaiki struktur pendanaan Perseroan dan meningkatkan aktiva produktif, terutama dalam bentuk kredit dan penanaman dalam surat-surat berharga, sebagai berikut:

- Sekitar 90% (sembilan puluh persen) untuk pemberian kredit, yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR), pembiayaan proyek infrastruktur dan kredit investasi jangka panjang.
- Sekitar 10% (sepuluh persen) untuk penanaman dalam surat-surat berharga.

Obligasi Subordinasi ini akan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap Level Bawah (*Lower Tier* 2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

5. RISIKO USAHA

Risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit yaitu ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali kredit yang diberikan Perseroan, dimana apabila terjadi dalam jumlah yang cukup material akan mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan Perseroan dan mempengaruhi tingkat kesehatan Perseroan.

Selain itu Perseroan juga menghadapi risiko-risiko usaha lainnya, antara lain:

- Risiko likuiditas
- Risiko pasar (risiko suku bunga dan risiko valuta asing)
- Risiko operasional
- Risiko teknologi
- Risiko persaingan pangsa pasar
- Risiko makro ekonomi
- Risiko perubahan kebijakan Pemerintah
- Risiko anak perusahaan
- Risiko atas kepemilikan terhadap anak perusahaan

6. STRATEGI USAHA

Perseroan terus melanjutkan fokus strategi usahanya pada sektor ritel dan komersial, selaras dengan visi-misinya. Strategi tersebut terbukti mampu mendorong pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) sejak tahun 2007. Rata-rata pertumbuhannya mencapai sekitar 30%. Selain itu, strategi ini juga membuat Bank lebih tahan krisis. Terbukti pada mega-krisis 1997, Perseroan menjadi salah satu bank yang tidak masuk dalam program rekapitalisasi pemerintah.

Sektor perbankan ritel memiliki prospek yang baik bagi arah pengembangan usaha Bank ke depan. Beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari sektor ini antara lain:

- Potensi pasar yang luas dan terus berkembang
- *Interest spread* yang relatif besar
- Penyebaran risiko kredit yang lebih luas
- Potensi untuk melakukan *cross selling* produk, dan
- Sumber peningkatan *fee based income*.

Pemberian kredit ke sektor-sektor riil yang produktif dengan risiko terkendali menjadi kegiatan utama Bank dalam menyalurkan dana sesuai fungsi intermediasi perbankan. Demi tujuan tersebut, Perseroan melanjutkan proses transformasi menjadi Bank Ritel dan Bisnis terkemuka melalui pemasaran produk jasa perbankan ritel dan sekaligus melayani dunia usaha di Indonesia.

Perseroan terus mempertahankan momentum pertumbuhan kuat yang telah dicanangkan manajemen. Hal tersebut menjadi kian penting pada saat marjin bunga diperkirakan relatif akan terus berkurang di tengah upaya otoritas menekan turun suku bunga kredit sementara suku bunga dana agak berpotensi naik menyusul kenaikan suku bunga jangka pendek belakangan ini. Tren suku bunga kredit yang cenderung turun dan suku bunga dana yang kurang lebih stabil menyebabkan marjin diperkirakan akan tertekan turun. Konsekuensi kondisi ini adalah Perseroan akan terdorong untuk terus meningkatkan penyaluran kredit guna meningkatkan pendapatan bunga bersih.

Di sisi lain, Perseroan akan terus memperkuat struktur pendanaannya dengan tingkat bunga sangat kompetitif dan memperpanjang jangka waktu simpanan DPK. Di samping deposito, produk-produk pendanaan yang menjadi andalan Bank antara lain *GiroPanin*, *Tabungan Panin*, *Tabungan Junior*, *Tabungan Bisnis*, *Tabungan Rencana*, dan *PanDollar*. Produk pengembangan seperti *Tabungan Power Saver* dan *E-Saver* yang menawarkan tingkat bunga menarik serta *Giro Multicurrency* juga disiapkan dan terus dikembangkan. Didukung dengan sumber pendanaan jangka panjang lain seperti dari surat utang, strategi menahan dana selama mungkin merupakan upaya Perseroan untuk terus mengurangi ketidaksesuaian jatuh tempo (*maturity missmatch*) demi lebih meningkatkan ketahanan internal, tingkat kesehatan dan kinerja Bank secara umum.

Dalam strategi pertumbuhan kredit, penggerak utama pertumbuhan akan ditekankan pada segmen usaha kecil dan menengah (*Small-Medium Business*/SMB). Pengembangan produk seperti *asset-based finance* dan *dealer financing* diharapkan mampu melengkapi portofolio produk segmen komersial. Dalam *consumer banking*, penjualan produk unggulan seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Mobil (KPM) terus digenjot untuk melanjutkan momentum pertumbuhannya yang kuat melalui jaringan distribusi Bank yang lebih luas.

Perluasan jaringan distribusi masih menjadi program yang penting guna meraih pangsa pasar yang lebih besar dengan basis nasabah yang lebih luas. Perluasan jaringan dilakukan dengan terus membuka kantor-kantor cabang dan layanan *automated teller machine* (ATM) di seluruh kota-kota penting di Indonesia. Jaringan cabang sebanyak sekitar 500 kantor akan dioptimalkan juga mendekatkan pelayanan yang prima kepada nasabah. Pada saat yang sama, perseroan terus melakukan inovasi produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk *service* yang disediakan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, seperti layanan *cash management, wealth management,* kartu kredit, serta layanan *e-channel* ataupun *e-banking, mobile banking*, dan sebagainya.

Selain itu, Perseroan menetapkan strategi pertumbuhan secara organik, maupun non-organik melalui penyertaan ke lembaga-lembaga keuangan tertentu yang dinilai prospektif dan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai. Struktur permodalan yang kokoh menjadi landasan utama dalam menjalankan seluruh strategi tersebut.

KEGIATAN PENYERTAAN

Tabel berikut ini menguraikan penyertaan Perseroan pada pihak-pihak berelasi pada posisi 30 Juni 2012 sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Jumlah Penyertaan (Rp Juta)	Kepemilikan (%)	Kegiatan Usaha	Penyertaan Sejak
Anak Perusahaan				
PT Bank Panin Syariah (d/h PT Bank Harfa)	449.512	99,99	Bank Syariah	2008
PT Clipan Finance Indonesia Tbk.	512.858	54,34	Lembaga Pembiayaan	1982
PT Verena Multi Finance Tbk. (d/h PT Verena Oto Finance Tbk.)	42.953	42,87	Lembaga Pembiayaan	2003
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.	38.800	13,50	Asuransi Umum	1980
Perusahaan Penyertaan				
PT Sarana Kalsel Ventura	40	1,04	Modal Ventura	1997
PT Bank ANZ Indonesia (d/h PT ANZ Panin Bank)	16.500	1,00	Bank Umum	1990
PT Panin Sekuritas Tbk	152.422	29,00	Perantara Pedagang Efek. Manajer Investasi. Penjaminan Emisi Efek	1989
PT First Asia Capital	750	2,50	Perantara Pedagang Efek	1989
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	625	9,33	Lembaga Pembiayaan	1981

7. PROSPEK USAHA

Kondisi perbankan nasional dinilai semakin kuat dan mampu mengarungi masa-masa krisis dengan baik, termasuk krisis ekonomi dan utang Amerika Serikat dan Eropa pada tahun-tahun ini. Target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2013 oleh pemerintah ditetapkan sebesar 6,8% atau lebih tinggi dari realisasi semester I-2012 yang 6,3% memberi potensi pertumbuhan bisnis yang masih positif tahun depan (sumber: Kemenkau, RAPBN 2013; dan Berita Resmi Statistik BPS).

Potensi pasar perbankan nasional masih sangat luas. Rasio Kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio DPK terhadap PDB sampai akhir 2011 tercatat masing-masing 30% dan 37%. Dari sisi profitabilitas, *Net Interest Margin* (NIM) maupun *Return on Asset* (ROA) perbankan nasional tertinggi di kawasan ASEAN maupun Asia. Tren penurunan suku bunga kredit dan marjin mendorong peningkatan penyaluran kredit perbankan, termasuk oleh Perseroan demi pertumbuhan pendapatan bunga bersih (sumber: BI dan BPS).

Melihat realisasi pertumbuhan ekonomi terakhir, pendorong dari sisi pengeluaran konsumsi swasta/rumah tangga dan investasi dengan kontribusi masing-masing 53,5% dan 32,9% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Hal tersebut diharapkan mampu mendukung bisnis Perseroan yang fokus pada segmen ritel dan komersial skala mikro, kecil dan menengah. Porsi kredit UMKM terhadap tota kredit perbankan nasional baru sekitar 20%. Realisasi penyaluran Kredit Investasi oleh Perseroan sampai akhir semester I-2012 tumbuh 30% sejalan dengan dengan perbankan nasional. Terkendalinya inflasi dan penurunan suku bunga kredit diharapkan meningkatkan permintaan kredit. Meningkatkan usia muda dan kalangan menengah dalam komposisi penduduk menjadi pasar potensial bagi perbankan ritel. Kinerja industri otomotif dan semen juga mengindikasikan pasar produk KPM dan KPR Bank berpotensi untuk terus meningkat (sumber: BI, BPS dan Perseroan).

Perseroan menyalurkan kredit terbesar pada sektor yang dinilai bagus dan kompetensinya dikuasai oleh sumber daya manusia yang ada. Empat sektor ekonomi penerima kredit terbesar dari Perseroan adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Rumah Tangga, Perantara Keuangan, dan Manufaktur. Sedangkan penyaluran terbesar kredit nasional adalah ke sektor Lain-lain/Bukan Lapangan Usaha (porsi 30% dari total kredit), Perdagangan (20%), dan Manufaktur (16%). Sektor Perdagangan merupakan salah satu sektor yang mencatat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektoral tertinggi setelah sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Listrik, Gas dan Air Bersih; dan Konstruksi.

Likuiditas perekonomian juga diperkirakan masih cukup besar yang didukung arus investasi asing dan regulasi kewajiban repatriasi devisa hasil ekspor dan pinjaman luar negeri. Hal tersebut akan mendukung pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan nasional maupun Perseroan. DPK nasional menurut data per Juli 2012 naik sekitar 20% sedangkan DPK Bank naik sekitar 21% (sumber: BI dan Perseroan).

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK PANIN
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN
SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2012
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA
SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI
SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK PANIN
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR
Rp4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2012
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini ditawarkan pada nilai nominal berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi diterbitkan dengan tingkat bunga tetap untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-5 (lima) adalah sebesar • % (• persen) per tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal • 2013 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal • 2017. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I.

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan pada nilai nominal berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tingkat bunga tetap untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) adalah sebesar •% (• persen) per tahun. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal • 2013 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal • 2019. Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang kepada Pemegang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I.

Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap selanjutnya dan/atau Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap selanjutnya akan ditentukan kemudian.

1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh pemeringkat Obligasi dan Obligasi Subordinasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yaitu:

id AA (*Double A*) untuk Obligasi dan id AA- (*Double A Minus*) untuk Obligasi Subordinasi

Untuk keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkat tersebut dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus ini

PaninBank

PT BANK PAN INDONESIA Tbk
(PT BANK PANIN Tbk)
Kegiatan Usaha :
Jasa Perbankan

Kantor Pusat :
Bank Panin Pusat. Jl. Jend. Sudirman. Jakarta 10270. Indonesia
Telp. : (021) 270-0545. Fax. : (021) 270-0340.
Telex : 47384, 47394 PIBHO IA
www.panin.co.id

Kantor Cabang:
Dengan 54 Kantor Cabang, 388 Kantor Cabang Pembantu, 6 Kantor Kas, 1 Kantor Cabang dan 1 Kantor Perwakilan di Luar Negeri, dengan alamat lengkap yang disajikan pada Bab VII Prospektus ini.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, DIMANA APABILA TERJADI DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL AKAN MENGAKIBATKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI TERKAIT DENGAN ADANYA PENGATURAN PASAL 17.(2).d PERATURAN BANK INDONESIA NO.10/15/PBI/2008 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2008 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM ADALAH PEMBAYARAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ATAS POKOK DAN/ATAU BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI DITANGGUHKAN DAN DIAKUMULASI ANTARA PERIODE (*CUMMULATIVE*) APABILA (i) PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT MENYEBABKAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SECARA INDIVIDUAL ATAU KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SECARA KONSOLIDASI TIDAK MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU, (ii) PERSEROAN DALAM KEADAAN RUGI, ATAU (iii) KONDISI PROFITABILITAS PERSEROAN TIDAK MEMUNGKINKAN UNTUK MEMBAYAR BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI TERSEBUT.

PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tanggal 17 Agustus 1971 sebagai hasil penggabungan (merger) 3 (tiga) buah bank swasta, yaitu Bank Kemakmuran, Bank Industri & Dagang Indonesia dan Bank Industri Djaja Indonesia dengan tujuan memperkuat struktur permodalan mereka. Dengan Akta Notaris Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., Notraris di Jakarta No. 85, tanggal 17 Agustus 1971, yang kemudian diubah dengan Akta Notaris No. 48 tanggal 10 April 1972 dan No. 66 tanggal 13 April 1972, keduanya Notaris Adrian Jimmie Tumonggor, S.H., pengganti Notaris Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora,Notaris di Jakarta, Ketiga akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 April 1972, Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A.5/81/24, tanggal 19 April 1972, pendaftaran pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No 1121, 1122, 1123, tanggal 22 April 1972 , Berita Negara Republik Indonesia No. 45, tanggal 6 Juni 1972, Tambahan Berita Negara No. 210.

Perseroan telah beberapa kali mengadakan perubahan anggaran dasar. Perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Notaris Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta No. 45 tanggal 4 April 1997, persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan mulai berlaku sejak tanggal 17 April 1997, surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2783.HT.01.04.TH'97 tanggal 17 April 1997 dan penerimaan laporan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 17 April 1997, surat Direktur Perdata Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C2-HT.01.04.A-5852 tanggal 17 April 1997, Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Pusat, agenda pendaftaran No. 677/BH.09.05/V/1997 tanggal 5 Mei 1997. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 1997 No. 55, Tambahan No. 2740 dan kemudian beberapa kali diubah serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentan Perseroan Terbatas dan Peraturan nomor IX.J.1. tentang pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik, lampiran keputusan ketua Bapepam-LK Nomor Kep.-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 sebagaimana termaktub dalam akta Akta Notaris Benny Kristianto, S.H.,, Notaris di Jakarta No. 81 tanggal 25 Juli 2008, persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tanggal 27 Oktober 2008, surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.78480.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 27 Oktober 2008, Daftar Perseroan Nomor AHU-0101237.AH.01.09. Tahun 2008, tanggal 27 Oktober 2008, Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 Pebruari 2009 No.13, Tambahan nomor 4248, kemudian perubahan pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Notaris Benny Kristianto,S.H., Notaris di Jakarta No. 11 tanggal 10 September 2009, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Oktober 2009,surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris tersebut Nomor: AHU-AH.01.10.18383 tanggal 22 Oktober 2009, Daftar Perseroan Nomor AHU-0069259.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009, Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 September 2010 No.76, Tambahan No. 1433 dan perubahan terakhir mengenai peningkatan modal dasar dari Rp 5.900.000.000.000,- (lima triliun sembilan ratus miliar Rupiah) menjadi Rp9.600.000.000.000,- (sembilan triliun enam ratus miliar Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta No. 9 tanggal 9 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Benny Kristianto,S.H., Notaris di Jakarta, persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 Oktober 2010, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU.46590.AH.01.02 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Daftar Perseroan Nomor: AHU 0071414.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010, Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2 Maret 2012 No.18, Tambahan No. 5579.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2012, yang dikeluarkan oleh PT Blue Chip Mulia pada tanggal 1 Oktober 2012, susunan para pemegang saham Perseroan per tanggal 30 September 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	96.000.000.000	9.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	24.087.645.998	2.408.764.599.800	
Pemegang Saham :			
1.PT Panin Financial Tbk (d/h PT Panin Life Tbk)	11.065.846.285	1.106.584.628.500	45,94
2.Votraint No. 1103 Pty Ltd	9.349.793.152	934.979.315.200	38,82
3.Masyarakat lainnya masing-masing dengan Kepemilikan dibawah 5%	3.672.006.561	367.200.656.100	15,24
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh	24.087.645.998	2.408.764.599.800	100,00
Saham Dalam Portepel	71.912.354.002	7.191.235.400.200	

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG AKAN DITERBITKAN

OBLIGASI

Nama Obligasi

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2012

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo Obligasi dan Bunga Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Obligasi berjangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) sejak Tanggal Emisi.

Besarnya bunga tetap Obligasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-5 (lima) adalah sebesar •% (•persen) per tahun.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal • 2013 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal • 2017.

Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harga Penawaran

Harga penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

Satuan Perdagangan

Satuan perdagangan adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-1	:	Bunga Ke-11	:
Bunga Ke-2	:	Bunga Ke-12	:
Bunga Ke-3	:	Bunga Ke-13	:
Bunga Ke-4	:	Bunga Ke-14	:
Bunga Ke-5	:	Bunga Ke-15	:
Bunga Ke-6	:	Bunga Ke-16	:
Bunga Ke-7	:	Bunga Ke-17	:
Bunga Ke-8	:	Bunga Ke-18	:
Bunga Ke-9	:	Bunga Ke-19	:
Bunga Ke-10	:	Bunga Ke-20	:

Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*)

1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara pari passu berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, sesuai pasal 1131 dan 1132 kitab undang undang hukum perdata

Wali Amanat

Berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan dengan ini menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk menjalankan tugas selaku wali amanat dalam rangka Emisi Obligasi.

Alamat Wali Amanat:
Plaza Mandiri Lt. 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12910

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan (*Covenants*)

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi ini, Perseroan diwajibkan mematuhi pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban tersebut yang diuraikan dalam Bab XVIII Prospektus ini.

Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan Obligasi harus dilakukan dalam jumlah minimal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai Perpajakan diuraikan dalam Bab XI Prospektus ini.

Rapat Umum Pemegang Obligasi

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab XVIII Prospektus ini.

Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi Peraturan No. IX.C.1 lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-04/PM/2000, tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah memperoleh pemeringkatan Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan surat No. 1654/PEF-Dir/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 untuk periode 5 Oktober 2012 sampai dengan 1 Oktober 2013 adalah:

id AA (*Double A*)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.

Rating Rationale

Pefindo menetapkan kembali peringkat "idAA" untuk PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin atau Perusahaan) serta obligasi-obligasi yang telah diterbitkan Perusahaan. Pefindo juga menetapkan kembali peringkat "idAA-" untuk Obligasi Subordinasi yang telah diterbitkan Perusahaan. Prospek dari peringkat Perusahaan adalah "stabil". Peringkat mencerminkan posisi Perusahaan yang sangat kuat di segmen kredit komersial, tingkat permodalan yang sangat baik dan profil likuiditas yang sehat. Pefindo juga mengakui dukungan yang kuat dari kelompok ANZ Banking Group sebagai salah satu pemegang saham Perusahaan. Namun peringkat tersebut dibatasi oleh tingkat profitabilitas Perusahaan yang moderat dan potensi tekanan pada kualitas aset.

Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

Hak Senioritas Atas Hutang

Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Tambahan Hutang yang Dapat Diperoleh Perseroan pada masa Yang Akan Datang

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (dimana ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar dan jika Wali Amanat tidak memberikan tanggapan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen pendukung yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya kelengkapan dokumen terakhir dan Perseroan tidak menerima tanggapan apa pun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya), Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi atau *medium term notes* yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan hutang Obligasi.

Hak-hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas Jumlah Terhutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tigaratus enampuluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku. RUPO dapat diselenggarakan bilamana:
    i. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (duapuluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan/atau milik Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
    ii. Wali Amanat atau Bapepam dan LK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.

5. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari poin ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:

   a. berkaitan menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat;
   b. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
   c. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang yang dimuat dalam lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010, tanggal 6 September 2010
   d. mengambil keputusan sehubungan dengan usaha Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, persyaratan dari Perjanjian Perwaliamanatan khusus untuk perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
   e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.
   f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan
   g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Rapat Umum Pemegang Obligasi

a. RUPO dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.

b. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO

c. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.

d. Setelah KTUR dikeluarkan hingga RUPO ditutup, tidak diperkenankan melakukan pemindahan hak atas Obligasi yang dimiliki seseorang yang menghadiri RUPO tersebut.

e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta berita acara RUPO.

Keterangan selengkapnya tentang Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat Bab Keterangan Tentang Obligasi.

OBLIGASI SUBORDINASI

Nama Obligasi Subordinasi

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2012

Jenis Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi dan Bunga Obligasi Subordinasi

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Obligasi Subordinasi berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dan jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) sejak Tanggal Emisi. Besarnya bunga tetap Obligasi Subordinasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (tujuh) adalah sebesar • % (• persen) per tahun.

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal • 2013 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal • 2019. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harga Penawaran

Harga penawaran Obligasi Subordinasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi.

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

Satuan Perdagangan

Satuan perdagangan adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-1	:	Bunga Ke-15	:
Bunga Ke-2	:	Bunga Ke-16	:
Bunga Ke-3	:	Bunga Ke-17	:
Bunga Ke-4	:	Bunga Ke-18	:
Bunga Ke-5	:	Bunga Ke-19	:
Bunga Ke-6	:	Bunga Ke-20	:
Bunga Ke-7	:	Bunga Ke-21	:
Bunga Ke-8	:	Bunga Ke-22	:
Bunga Ke-9	:	Bunga Ke-23	:
Bunga Ke-10	:	Bunga Ke-24	:
Bunga Ke-11	:	Bunga Ke-25	:
Bunga Ke-12	:	Bunga Ke-26	:
Bunga Ke-13	:	Bunga Ke-27	:
Bunga Ke-14	:	Bunga Ke-28	:

Pembelian Kembali Obligasi Subordinasi (*Buy Back*)

Obligasi Subordinasi ini tidak mempunyai opsi untuk pembelian kembali (*buy back*) sampai dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi.

Jaminan

Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi Subordinasi ini secara pari passu berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, sesuai pasal 1131 dan 1132 kitab undang undang hukum perdata.

Wali Amanat

Berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan dengan ini menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk menjalankan tugas selaku wali amanat dalam rangka Emisi Obligasi Subordinasi.

Alamat Wali Amanat:
Plaza Mandiri Lt. 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12910

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan (*Covenants*)

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi dan biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan diwajibkan mematuhi pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban tersebut yang diuraikan dalam Bab XIX Prospektus ini.

Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi Subordinasi

Pemesanan Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah minimal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi Subordinasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai Perpajakan diuraikan dalam Bab XI Prospektus ini.

Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi

Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi (RUPO) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab XVIII Prospektus ini.

Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi Peraturan No. IX.C.1 lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-04/PM/2000, tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah memperoleh pemeringkatan Obligasi Subordinasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan surat No. 1655/PEF-Dir/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012 untuk periode 5 Oktober 2012 sampai dengan 1 Oktober 2013 adalah:

idAA- (*Double A Minus*)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.

Rating Rationale

Pefindo menetapkan kembali peringkat “idAA” untuk PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin atau Perusahaan) serta obligasi-obligasi yang telah diterbitkan Perusahaan. Pefindo juga menetapkan kembali peringkat “idAA-” untuk Obligasi Subordinasi yang telah diterbitkan Perusahaan. Prospek dari peringkat Perusahaan adalah “stabil”. Peringkat mencerminkan posisi Perusahaan yang sangat kuat di segmen kredit komersial, tingkat permodalan yang sangat baik dan profil likuiditas yang sehat. Pefindo juga mengakui dukungan yang kuat dari kelompok ANZ Banking Group sebagai salah satu pemegang saham Perusahaan. Namun peringkat tersebut dibatasi oleh tingkat profitabilitas Perusahaan yang moderat dan potensi tekanan pada kualitas aset.

Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

Hak Senioritas Atas Hutang

Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur subordinasi Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari tetapi menempati prioritas terhadap hak tagih para pemegang semua kelompok modal sendiri Perseroan, termasuk para pemegang saham preferen Perseroan.

Tambahan Hutang yang Dapat Diperoleh Perseroan pada masa Yang Akan Datang

Di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamantan tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan hutang pada masa yang akan datang namun Perseroan berkewajiban menjaga jumlah aktiva yang tidak diagunkan minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Hutang Perseroan yang belum dibayar lunas (*outstanding*) dalam bentuk obligasi dan *medium term note* dalam mata uang rupiah yang diperdagangkan di pasar modal.

Hak-hak Pemegang Obligasi Subordinasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi.
2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Subordinasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi Subordinasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi tersebut sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi yang berlaku atas Jumlah Terhutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
4. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku. RUPO dapat diselenggarakan bilamana:
    i. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (duapuluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.Pencabutan pembekuan Obligasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat
    ii. Wali Amanat atau Bapepam dan LK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.
5. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:
    a. berkaitan menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat;
    b. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
    c. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang yang dimuat dalam lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010, tanggal 6 September 2010.

d. mengambil keputusan sehubungan dengan usaha Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, tingkat Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, persyaratan dari Perjanjian Perwaliamanatan khusus untuk perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, tingkat Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat, untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.
f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan
g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi

(a) RUPO dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain dimana Obligasi Subordinasi dicatatkan atau yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat.
(b) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO
(c) Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.
(d) Panggilan harus dengan tegas memuat tanggal, jam, tempat dan acara-acara RUPO.
(e) RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseraon atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPO.
(f) Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO
(g) Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
(h) Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi Subordinasi memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

Keterangan selengkapnya tentang Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi (RUPO) dapat dilihat Bab Keterangan Tentang Obligasi Subordinasi.

Sifat-sifat Khusus Obligasi Subordinasi

PBI NO.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 mengatur mengenai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu obligasi subordinasi untuk dapat diperlakukan sebagai modal pelengkap level bawah (lower tier 2 capital) suatu bank, yang pada pokoknya mencakup bahwa telah memperoleh persetujuan BI untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal, bersifat subordinasi untuk memperoleh seluruh pelunasan pembayaran pada saat terjadi likuidasi dan memiliki jangka waktu minimal 5 (lima) tahun serta hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan BI.

Terkait dengan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi, PBI NO.10/15/PBI/2008 memuat ketentuan bahwa pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi juga dapat ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cummulative*), termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila:

a. Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dapat menyebabkan kewajiban Modal Minimum secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
b. Perseroan dalam keadaan rugi; atau
c. Kondisi profitabilitas Perseroan tidak memungkinkan untuk membayar Bunga Obligasi Subordinasi tersebut.

Obligasi Subordinasi merupakan obligasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, hal tersebut tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamantan, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tersedia untuk menyerap kerugian pada saat likuidasi dan bersifat subordinasi yang merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi terhadap pemegang hutang senior.

Tata Cara Pembayaran Bunga Pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dilakukan oleh Perseroan kepada Agen Pembayaran tersebut dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi atas Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang terhutang dan telah jatuh tempo.

Dengan dilakukannya pembayaran kepada Agen Pembayaran tersebut, maka tanggung jawab pembayaran kepada Pemegang Obligasi beralih kepada Agen Pembayaran, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.

Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dari jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan.

Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang telah lewat), sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

PEMENUHAN KETENTUAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.15 yaitu :

a. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
b. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan No. 335/DIR/EXT/12 tanggal 3 Oktober 2012 dan Akuntan Publik No. SR112 0104 PIB IBH pada tanggal 27 September 2012 2012 yang mendukung pernyataan Perseroan Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan;
c. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk memperbaiki struktur pendanaan Perseroan dan meningkatkan aktiva produktif, terutama dalam bentuk kredit dan penanaman dalam surat-surat berharga, sebagai berikut:

- Sekitar 90% (sembilan puluh persen) untuk pemberian kredit, yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR), pembiayaan proyek infrastruktur dan kredit investasi jangka panjang.
- Sekitar 10% (sepuluh persen) untuk penanaman dalam surat-surat berharga.

Obligasi Subordinasi ini akan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap Level Bawah (*Lower Tier* 2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini digunakan seluruhnya, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini kepada Bapepam dan LK serta Wali Amanat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi digunakan, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan juga kepada para Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Wali Amanat.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu oleh Perseroan kepada Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO, sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Sesuai dengan Surat Edaran BAPEPAM dan LK nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan meliputi :

- Biaya jasa untuk penjamin emisi Obligasi: • % dari nilai emisi Obligasi, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) : •%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : •%; biaya jasa penjualan (*selling fee*) : •%
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal : • % (yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik : • %, Konsultan Hukum : •% dan Notaris : •%)
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal : •% (yang terdiri dari biaya Wali Amanat : •%, Perusahaan Pemeringkat Efek : •%.
- Biaya lain-lain: (barang cetakan, iklan dan public expose) sekitar •%.

Penggunaan dana atas penerbitan Penawaran Umum Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010 dan Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya telah habis dipergunakan sesuai rencana penggunaan dana seperti yang telah diungkapkan dalam prospektus Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010 dan Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010 dan telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan melalui surat, No. 055/DIR/EXT/11 Tanggal 13 April 2011 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

III. PERNYATAAN HUTANG

Jumlah liabilitas dalam pernyataan hutang diambil dari angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan standar akuntansi keuangan yang relevan dan efektif berlaku 1 Januari 2012 dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan obligasi dan obligasi subordinasi. Perseroan dan Entitas Anak mempunyai (A) Liabilitas sebesar Rp 118.690.774 juta dan (B) Liabilitas karena Komitmen dan Kontinjensi sebesar Rp 22.398.062 juta dengan perincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah Liabilitas
LIABILITAS	
Liabilitas segera	374.837
Simpanan	
Giro	15.572.153
Tabungan	40.697.496
Deposito Berjangka	36.517.596
Jumlah Simpanan	**92.787.245**
Simpanan dari bank lain	8.581.204
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali - bersih	3.062.667
Liabilitas derivatif	3.419
Liabilitas akseptasi	1.155.912
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	3.879.993
Pinjaman yang diterima	3.269.645
Utang pajak	239.974
Liabilitas Pajak Tangguhan	209
Liabilitas lain-lain	1.441.064
Obligasi Subordinasi - Bersih	3.894.605
Jumlah Liabilitas	**118.690.774**
LIABILITAS KOMITMEN & KONTINJENSI	
Liabilitas Komitmen	21.502.862
Liabilitas Kontinjensi	895.200
Jumlah Liabilitas Komitmen & Kontinjensi	**22.398.062**

LIABILITAS

1. Liabilitas Segera

Posisi liabilitas segera pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp 374.837 juta.

2. Simpanan

Liabilitas dalam bentuk penempatan simpanan sebesar Rp 92.787.245 juta yang terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Giro	6.179.867	9.392.286	15.572.153
Tabungan	40.697.496	-	40.697.496
Deposito Berjangka	33.559.110	2.958.486	36.517.596
Jumlah	**80.436.473**	**12.350.772**	**92.787.245**

Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun :

Keterangan	Rupiah	Valuta Asing
Giro	3,73%	0,17%
Tabungan	2,79%	-
Deposito Berjangka	5,95%	0,80%

Giro sebesar Rp 13.275 juta, tabungan sebesar Rp 39.240 juta dan deposito berjangka sebesar Rp 1.671.620 juta diblokir dan dijadikan jaminan kredit.

Deposito berjangka yang dimiliki Perseroan berdasarkan jangka waktunya adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
1 bulan	23.838.445	1.789.509	25.627.954
3 bulan	5.539.540	446.773	5.986.313
6 bulan	2.597.456	327.211	2.924.667
12 bulan	1.572.265	394.993	1.967.258
Lebih dari 12 bulan	11.404	-	11.404
Jumlah	**33.559.110**	**2.958.486**	**36.517.596**

3. Simpanan dari Bank Lain

Liabilitas dalam bentuk simpanan dari bank lain sebesar Rp 8.581.204 juta terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Giro	111.120	327	111.447
Tabungan	68.121	-	68.121
Deposito Berjangka	1.608.328	-	1.608.328
Call Money	5.051.000	1.742.308	6.793.308
Jumlah	**6.838.569**	**1.742.635**	**8.581.204**

Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun :

Keterangan	Rupiah	Valuta Asing
Giro	3,07%	0,10%
Tabungan	5,26%	-
Deposito	4,24%	-
Call Money	4,27%	1,24%

4. Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jangka waktu	Tanggal jatuh tempo	Jumlah
Obligasi Pemerintah Republik Indonesia	21 – 33 hari	2 – 30 Juli 2012	3.062.667
Jumlah			

5. Liabilitas Derivatif

Posisi liabilitas derivatif pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp 3.419 juta yang terdiri dari transaksi swap sebesar Rp 681 juta dan transaksi forward sebesar Rp 2.738 juta.

6. Liabilitas Akseptasi

Posisi liabilitas akseptasi pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp 1.155.912 juta yang terdiri dari liabilitas dalam Rupiah sebesar Rp 51.348 juta dan liabilitas dalam mata uang asing sebesar Rp 1.104.564 juta.

7. Surat Berharga yang Diterbitkan – Bersih

Surat berharga yang diterbitkan-bersih pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp 3.879.993 juta terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah Liabilitas
Nilai nominal	
Perseroan	
Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010	540.000
Obligasi Bank Panin III Tahun 2009	800.000
Obligasi Bank Panin II Tahun 2007 Seri C	200.000
Entitas Anak	
Obligasi Clipan Finance III Tahun 2011	
Seri A	248.000
Seri B	123.000
Seri C	629.000
Medium Term Note I Clipan Finance Tahun 2012	800.000
Obligasi Verena Multi Finance I Tahun 2011	
Seri B	135.000
Seri C	300.000
Medium Term Note I Verena Multi Finance I Tahun 2011	200.000
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	50.000
Jumlah	4.025.000
Obligasi yang dibeli kembali	(119.406)
Diskonto yang belum diamortisasi	(25.601)
Surat Berharga Yang Diterbitkan-Bersih	3.879.993

- **Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010**

Merupakan obligasi nilai nominal sebesar Rp 540 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi, berjangka waktu 5 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 9 Nopember 2015.

Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 9 Pebruari 2011 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 9 Nopember 2015.

Berdasarkan surat PT Pefindo tanggal 8 Agustus 2011 No. 1026/PEF-Dir/VIII/2011, peringkat Obligasi Bank Panin IV tahun 2010 untuk periode 5 Agustus 2011 sampai dengan 1 Agustus 2012 adalah idAA.

Setelah ulang tahun ke – 1 (satu) sejak tanggal emisi, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruhnya untuk disimpan yang di kemudian hari dapat dijual kembali atau sebagai pelunasan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perseroan telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal obligasi melalui KSEI sesuai dengan jadwal.

- **Obligasi Bank Panin III Tahun 2009**

Merupakan obligasi nilai nominal sebesar Rp 800 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,5% yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi, berjangka waktu 5 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 6 Oktober 2014.

Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 6 Januari 2010 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2014.

Berdasarkan surat PT Pefindo tanggal 8 Agustus 2011 No. 1026/PEF-Dir/VIII/2011, peringkat Obligasi Bank Panin III tahun 2009 untuk periode 5 Agustus 2011 sampai dengan 1 Agustus 2012 adalah idAA.

Setelah ulang tahun ke – 1 (satu) sejak tanggal emisi, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruhnya untuk disimpan yang di kemudian hari dapat dijual kembali atau sebagai pelunasan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perseroan telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal obligasi melalui KSEI sesuai dengan jadual.

- **Obligasi Bank Panin II tahun 2007**

Merupakan obligasi nilai nominal sebesar Rp 1.650 miliar dengan tingkat bunga tetap yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari:

- Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 50.000 juta berjangka waktu 3 tahun dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,75% per tahun. Obligasi ini telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 19 Juni 2010.

- Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.400.000 juta berjangka waktu 5 tahun dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,75% per tahun. Obligasi ini telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 19 Juni 2012.

- Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 200.000 juta berjangka waktu 7 tahun dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2014.

Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 19 September 2007 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 19 Juni 2010 untuk Seri A, tanggal 19 Juni 2012 untuk Seri B dan tanggal 19 Juni 2014 untuk Seri C.

Berdasarkan surat PT Pefindo tanggal 8 Agustus 2011 No. 1026/PEF-Dir/VIII/2011, peringkat Obligasi Bank Panin II tahun 2007 untuk periode 5 Agustus 2011 sampai dengan 1 Agustus 2012 adalah idAA.

Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perseroan telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal obligasi melalui KSEI sesuai dengan jadwal.

- **Obligasi Clipan Finance III tahun 2011**

Merupakan obligasi nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 juta dengan tingkat bunga tetap yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari:

- Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 248.000 juta berjangka waktu 370 hari dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,75% per tahun. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 13 Nopember 2012.

- Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 123.000 juta berjangka waktu 24 bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,75% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 8 Nopember 2013.

- Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 629.000 juta berjangka waktu 36 bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,25% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 8 Nopember 2014.

Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 8 Pebruari 2012 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 13 Nopember 2012 untuk Seri A, tanggal 8 Nopember 2013 untuk Seri B dan tanggal 8 Nopember 2014 untuk Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan PT. Pefindo No. 910/PEF-Dir/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, Obligasi Clipan Finance III tahun 2011 mendapat peringkat A+ (*Single A Plus*) untuk periode 14 Juli 2011 sampai dengan 1 Juni 2012.

Berdasarkan hasil pemeringkatan PT. Pefindo No. 953/PEF-Dir/VI/2012 tanggal 29 Mei 2012, Obligasi Clipan Finance III tahun 2011 mendapat peringkat A+ (*Single A Plus*) untuk periode 28 Mei 2012 sampai dengan 1 Mei 2013.

CFI memberikan jaminan fidusia berupa investasi neto sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen dan anjak piutang yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar 60% dari jumlah utang pokok obligasi (Catatan 13 dan 14).

Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk. CFI telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal obligasi melalui KSEI sesuai dengan jadwal.

- **Medium Term Notes I Clipan Finance Tahun 2012 (MTN)**

Pada tanggal 30 Maret 2012, CFI menerbitkan MTN dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun dengan jumlah pokok sebesar Rp 800.000 juta dengan cara penawaran penempatan terbatas dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2015.

MTN ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen yang dimiliki CFI (Catatan 13 dan 14).

Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 30 Juni 2012 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 30 Maret 2015.

Berdasarkan surat PT Pefindo No. 952/PEF-Dir/VI/2012 tanggal 29 Mei 2012, peringkat MTN I adalah idA+ (*Single A Plus*) untuk periode 28 Mei 2012 sampai dengan 1 Mei 2013.

Wali amanat untuk penerbitan MTN ini adalah PT Bank Mega Tbk. CFI telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal MTN melalui KSEI sesuai jadwal.

- **Obligasi Verena Multifinance I Tahun 2011**

Merupakan obligasi nilai nominal sebesar Rp 500 miliar dengan tingkat bunga tetap yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari:

- Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 65 miliar berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,50% per tahun. Obligasi ini telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 22 Maret 2012.

- Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 135 miliar berjangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,50% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2013.

- Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 300 miliar berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11,25% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2014.

Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 18 Juni 2011 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 18 Maret 2012 untuk Seri A, tanggal 18 Maret 2013 untuk Seri B dan tanggal 18 Maret 2014 untuk Seri C.

Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang yang dimiliki VMF sebesar Rp 50 miliar pada tanggal emisi, Rp 200 miliar pada satu bulan sejak tanggal emisi, Rp 350 miliar pada dua bulan sejak tanggal emisi dan menjadi Rp 500 miliar atau minimal 110% dari nilai pokok obligasi pada 3 bulan sejak tanggal emisi (Catatan 14).

Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah Bank Mandiri Tbk. VMF telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal obligasi melalui KSEI sesuai jadwal.

Berdasarkan surat No. 1610/PEF-Dir/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 dari Pefindo, peringkat obligasi Seri A adalah idA (*Single A*) untuk periode 22 Desember 2011 sampai dengan 22 Maret 2012.

Berdasarkan surat No. 1608/PEF-Dir/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 dari Pefindo, peringkat obligasi Seri B dan C adalah idA (*Single A*) untuk periode 22 Desember 2011 sampai dengan 1 Desember 2012.

- **Medium Term Notes I Verena Multi Finance Tahun 2011 (MTN)**

Pada tanggal 14 Desember 2011, VMF menerbitkan MTN dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% per tahun dengan jumlah pokok sebesar Rp 200.000 juta dengan cara penawaran penempatan terbatas dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2014.

Surat utang jangka menengah ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan investasi neto sewa pembiayaan yang dimiliki VMF dengan jumlah jaminan sebesar Rp 50 miliar pada tanggal emisi, Rp 125 miliar pada satu bulan sejak tanggal emisi, Rp 200 miliar atau 100% dari nilai pokok MTN setelah 2 bulan sejak tanggal emisi (Catatan 13 dan 14).

VMF wajib menambah jaminan jika hasil pemeringkatan dari Pefindo mengalami penurunan, dengan perincian sebagai berikut:

Peringkat	Jaminan
id A-	110% dari jumlah pokok MTN
id BBB+	120% dari jumlah pokok MTN
id BBB	125% dari jumlah pokok MTN

Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 15 Maret 2012 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 15 Desember 2014.

Berdasarkan surat PT Pefindo No.1607/PEF-Dir/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011, peringkat MTN I adalah idA (*Single A*) untuk periode 22 Desember 2011 sampai dengan 1 Desember 2012.

Wali amanat untuk penerbitan MTN ini adalah Bank Sinarmas. VMF telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal MTN melalui KSEI sesuai jadwal.

- **Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank**

Merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh BPS yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dengan akad *mudharabah*.

8. Pinjaman Yang Diterima

Posisi pinjaman yang diterima pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp 3.269.645 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jangka waktu	Tingkat bunga rata-rata per tahun	Jumlah
Perseroan			
Rupiah			
Bank Indonesia	3-20 tahun	7,00%	35
Pinjaman dari Departemen Keuangan Republik Indonesia	12 tahun	-	17
Dollar Amerika Serikat			
Pinjaman dari bank lain	3 bulan – 3 tahun	1,56%	1.314.950
Pinjaman dari lembaga keuangan non bank	5 tahun	LIBOR 6 bulan + 3,60%	279.425
	7 tahun	LIBOR 6 bulan + 3,00%	234.683

Sub jumlah			1.829.110
Entitas Anak			
Clipan			
Rupiah			
PT Bank Central Asia	3 tahun	10,36%	177.359
PT Bank Negara Indonesia	1-3 tahun	10,33%	123.318
PT Bank Danamon Indonesia	3 tahun	10,77%	122.919
PT Bank Mandiri	2-3 tahun	10,68%	105.246
PT Bank International Indonesia	3 tahun	10,75%	79.993
PT Bank Permata	3 tahun	10,47%	58.312
PT Bank ICBC Indonesia	3 tahun	10,21%	49.829
PT Bank Hana	3 tahun	11,00%	35.600
PT Bank Victoria International	3 tahun	10,39%	21.863
PT Bank CIMB Niaga	3 tahun	11,00%	6.645
VMF			
Rupiah			
PT Bank Negara Indonesia	1 tahun	11,125%	465.393
PT Bank Permata	1 tahun	10,50%	112.624
PT Bank Resona Perdania	3-4 tahun	5,00%	44.730
PT Bank Sinarmas	3 tahun	13,00%	20.385
PT Bank ICBC Indonesia	3 tahun	11,50%	16.319
Jumlah			**3.269.645**

Pinjaman dari Bank Indonesia merupakan kredit likuiditas dalam rangka Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS), Kredit Koperasi Kepada Para Anggota (KKPA) dan pinjaman dalam rangka *Agricultural Financing Project* (AFP). Pinjaman dari Departemen Keuangan merupakan pinjaman untuk KPRS.

Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu dan jumlah serta telah memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam perjanjian utang.

9. Utang Pajak

Posisi utang pajak pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 239.974 juta yang terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Perseroan	
Pajak Kini (pajak penghasilan badan)	142.351
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	6.521
Pasal 23/26	54.744
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	213
Entitas Anak	
Pajak Kini (pajak penghasilan badan)	18.629
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	1.107
Pasal 23/26	945
Pasal 25	15.376
Pajak Pertambahan Nilai – Bersih	88
Jumlah	**239.974**

10. Liabilitas Pajak Tangguhan

Posisi liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp 209 juta.

11. Liabilitas Lain-lain

Liabilitas lain-lain per tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 1.441.064 juta yang terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	**Jumlah**
Perseroan	
Bunga yang masih harus dibayar	230.124
Pendapatan ditangguhkan	217.654
Setoran Jaminan	129.581
Liabilitas imbalan pasca kerja	83.730
Pendapatan diterima di muka	44.745
Liabilitas pada pihak ketiga	21.464
Lainnya	26.268
Entitas Anak	
Liabilitas kontrak asuransi	437.647
Liabilitas imbalan pasca kerja	42.296
Lainnya	207.555
Jumlah	**1.441.064**

12. Obligasi Subordinasi – Bersih

Posisi Obligasi subordinasi bersih pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 3.894.605 juta yang terdiri atas:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Nilai nominal	
Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010	2.460.000
Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008	1.500.000
Jumlah	3.960.000
Obligasi yang dibeli kembali	(38.500)
Diskonto yang belum diamortisasi	(26.895)
Bersih	**3.894.605**

- **Obligasi Subordinasi Bank Panin III tahun 2010**

Pada tanggal 9 Nopember 2010, Perseroan menerbitkan Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010 sebesar Rp 2.460 miliar. Wali amanat dari penerbitan obligasi subordinasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Obligasi subordinasi berjangka waktu 7 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 Nopember 2017. Tingkat bunga obligasi subordinasi menggunakan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% per tahun.

Perseroan tidak mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali seluruh atau sebagian pokok obligasi subordinasi.

Bunga obligasi subordinasi ini dibayarkan setiap triwulanan mulai tanggal 9 Pebruari 2011 dan terakhir pada tanggal 9 Nopember 2017.

Dalam hal terjadi penutupan usaha, pembagian harta kekayaan Perseroan hasil likuidasi untuk pembayaran jumlah terutang oleh Perseroan kepada pemegang obligasi subordinasi hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh liabilitas pembayaran Perseroan kepada utang senior. Hak tagih sehubungan dengan obligasi subordinasi menempati peringkat paripassu tanpa preferensi di antara para pemegang obligasi subordinasi.

Berdasarkan surat PT Pefindo tanggal 8 Agustus 2011 No. 1027/PEF-Dir/VIII/2011, peringkat Obligasi Subordinasi Bank Panin III tahun 2010 untuk periode 5 Agustus 2011 sampai dengan 1 Agustus 2012 adalah idAA- (*Double A Minus*).

- **Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008**

Pada tanggal 9 April 2008, Perseroan menerbitkan Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008 sebesar Rp 1,5 triliun. Wali amanat dari penerbitan obligasi subordinasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Obligasi subordinasi berjangka waktu 10 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 April 2018 atau dalam jangka waktu lebih awal yaitu pada tanggal 9 April 2013 jika dilaksanakan opsi beli. Tingkat bunga obligasi subordinasi menggunakan tingkat bunga tetap sebesar 11,6% per tahun untuk tahun ke-1 sampai dengan ke-5, dan sebesar 20,6% per tahun untuk tahun ke-6 sampai ke-10.

Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pelunasan awal seluruh pokok obligasi subordinasi melalui wali amanat (opsi beli) pada ulang tahun ke-5 sejak tanggal emisi, setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Bunga obligasi subordinasi ini dibayarkan setiap triwulanan mulai 9 Juli 2008 dan terakhir pada tanggal 9 April 2018, atau tanggal yang lebih awal jika terjadi opsi beli pada ulang tahun tanggal emisi tahun ke-5.

Dalam hal terjadi penutupan usaha, pembagian harta kekayaan Perseroan hasil likuidasi untuk pembayaran jumlah terutang oleh Perseroan kepada pemegang obligasi subordinasi hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh liabilitas pembayaran Perseroan kepada utang senior. Hak tagih sehubungan dengan obligasi subordinasi menempati peringkat paripassu tanpa preferensi di antara para pemegang obligasi subordinasi tetapi menempati prioritas terhadap hak tagih para pemegang semua kelompok modal sendiri Perseroan termasuk para pemegang saham preferen Bank (jika ada).

Berdasarkan surat PT Pefindo tanggal 8 Agustus 2011 No. 1027/PEF-Dir/VIII/2011, peringkat Obligasi Subordinasi Bank Panin II tahun 2008 untuk periode 5 Agustus 2011 sampai dengan 1 Agustus 2012 adalah idAA- (*Double A Minus*).

Pada tahun 2012, 2011, 2010 dan 2009, Perseroan sudah memenuhi semua pembatasan-pembatasan dalam perjanjian wali amanat dan telah membayar bunga sesuai dengan jadwal.

Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi	
Liabilitas Komitmen	
- Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	20.850.834
- L/C yang *irrevocable* dan masih berjalan dalam rangka impor & ekspor	652.028
Jumlah Liabilitas Komitmen	21.502.862
Liabilitas Kontinjensi	
- Bank Garansi	834.682
- *Standby* L/C	60.518
Jumlah Liabilitas Kontinjensi	895.200
Jumlah Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi	22.398.062

Liabilitas-liabilitas yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan serta liabilitas-liabilitas yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus ini.

Perseroan tidak memiliki liabilitas-liabilitas lain selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan yang disajikan dalam Bab XVI Prospektus ini.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang obligasi dan pemegang saham publik, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan dan liabilitas serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang, manajemen Perseroan menyatakan kesanggupannya untuk dapat menyelesaikan seluruh liabilitasnya yang telah diungkapkan dalam prospektus ini sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

Seluruh liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 telah diungkapkan dalam Prospektus ini, sampai dengan tanggal terbitnya Prospektus ini, Perseroan telah melunasi seluruh liabilitas yang telah jatuh tempo.

Setelah tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran, Perseroan tidak memiliki liabilitas-liabilitas lain, kecuali liabilitas-liabilitas yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan serta liabilitas-liabilitas yang telah dinyatakan dalam Prospektus ini dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

A. UMUM

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki jaringan pelayanan perbankan yang terdiri dari 54 Kantor Cabang, 388 Kantor Cabang Pembantu, 6 Kantor Kas yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk melayani nasabah-nasabah Perseroan di luar negeri, Perseroan memiliki 1 kantor cabang di Cayman Islands dan 1 kantor perwakilan di Singapura. Perseroan juga memiliki hubungan korespondensi dengan bank-bank di luar negeri, yaitu antara lain dengan Australia & New Zealand Bank (Australia),, Overseas-Chinese Banking Corporation dan United Overseas Bank Ltd., (Singapura), The Bank of New York, American Express Bank, Standard Chartered Bank, JP Morgan Chase Bank, Wachovia Bank dan Citibank NA (Amerika Serikat), Mizuho Corporate Bank (Jepang), Toronto Dominion Bank (Kanada), UBS AG (Switzerland), Commerzbank (Frankfurt), ANZ Bank (New Zealand) dan lain-lain.

Kondisi ekonomi makro Indonesia yang sangat positif mendukung kinerja perbankan nasional, di samping karena stabilnya situasi politik dan sosial. Perekonomian nasional sepanjang semester I-2012 tumbuh sekitar 6,3%. Realisasi tersebut sedikit terkoreksi dari pertumbuhan tahun 2011 yang tercatat 6,5% namun masih lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 6,1%. Kredit perbankan umum nasional sampai dengan Juni 2012 tercatat tumbuh 25,7% (*yoy*).

Kendati diselingi gejolak akibat sentimen negatif global dari krisis Eropa, arus masuk dana asing masih meningkat yang terutama berupa investasi langsung. Tetapi surplus Transaksi Modal dan Finansial (*capital and financial account*) tersebut masih lebih kecil dari defisit Transaksi berjalan (*current account*) akibat menipisnya surplus perdagangan ekspor-impor nasional. Neraca Pembayaran Indonesia pun mengalami defisit yang mengakibatkan tekanan pada nilai tukar rupiah sepanjang tahun ini.

Berbagai pengembangan dilakukan baik dalam jaringan pelayanan, teknologi informasi dan sumber daya manusia. Perseroan berusaha lebih kompetitif dalam persaingan dengan memanfaatkan perubahan kemajuan teknologi. Sedang tim penjual terus dibentuk dan dibina serta dilatih sejalan dengan pertumbuhan jumlah cabang untuk menjaring nasabah-nasabah baru secara nasional. Dari sisi produk Perseroan akan terus mengembangkan dan menambah produk dan jasa baru untuk melayani nasabah-nasabah dengan menerapkan konsep *consumer centric*.

Cabang-cabang baru telah dibuka di lokasi-lokasi yang potensial dan teknologi yang lebih mutakhir telah digunakan sebagai *platform* teknologi yang lebih kokoh, handal dan fleksibel dalam mendukung operasi Perseroan. Setelah menerapkan *disaster recovery center*, *core banking* dan *teller system* telah selesai diimplementasikan di seluruh cabang pada tahun 2011. Pengakuan atas keberhasilan ini dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan "*Country and Regional Awards, Best Improved Bank in Asia*" untuk ketegori Bank Ritel, dari *The Asian Banker*.

Kemajuan yang menggembirakan juga berhasil dicapai dalam pengembangan sumber daya manusia, tidak saja di bidang kompetensi pelayanan nasabah dan pengembangan produk tetapi juga di bidang-bidang penting lainnya seperti pengelolaan risiko dan aspek kepatuhan. Tidak kalah pentingnya adalah komitmen Perseroan pada praktek tata kelola perusahaan yang sehat.

Walau kondisi ketidakpastian nampaknya masih mewarnai kondisi ekonomi dunia, terutama akibat krisis finansial yang melanda sebagian negara-negara Eropa dan belum pulihnya perekonomian Amerika hingga saat ini. Namun demikan, Perseroan telah memantapkan diri untuk terus mempertahankan fokus strategi yang telah terbukti kehandalannya dalam lingkungan yang semakin dinamis dan global ini. Kami percaya bahwa pengalaman, jaringan, kemitraan dan kepercayaan yang telah kami bina selama bertahun-tahun akan terus menjadi kunci keunggulan yang menempatkan Perseroan pada posisi yang menguntungkan di industri perbankan.

Dengan semakin meningkatnya kehadiran pemegang saham baru dalam bank-bank nasional memberikan dampak yang cukup signifikan antara lain semakin baiknya produk jasa, pelayanan dan praktek perbankan nasional. Dalam situasi tersebut Perseroan berusaha lebih kompetitif dalam persaingan dengan memanfaatkan perubahan kemajuan teknologi. Perseroan sudah menyediakan *internet banking*, *SMS banking*, *telephone banking, Call Panin* dan jaringan ATM dengan fitur yang lengkap dan terintegrasi dalam suatu paket layanan *Panin One Access*. Perseroan juga telah menyediakan layanan *Cash Management* bagi nasabah korporasi serta mengembangkan layanan *Wealth Management* bagi nasabah Prioritas. Sedang tim penjual terus dikembangkan dan dibina serta dilatih sejalan dengan pertumbuhan jumlah cabang untuk menjaring nasabah-nasabah baru secara nasional.

B. KEUANGAN

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan entitas anak secara konsolidasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 14 November 2012, 15 Maret 2012, 29 Maret 2011 dan 25 Maret 2010 serta laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2011 yang tidak diaudit. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 tertanggal 14 November 2012 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan standar akuntansi keuangan yang relevan dan efektif berlaku 1 Januari 2012 dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan obligasi dan obligasi subordinasi. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tahun 2011 tertanggal 15 Maret 2012 memuat paragraf penjelasan mengenai perubahan akuntansi atas penyisihan penghapusan aset non-produktif dan transaksi rekening administratif sedangkan laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tahun 2010 tertanggal 29 Maret 2011 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan awal PSAK No.50 (Revisi 2006) dan No.55 (Revisi 2006) dan penerapan ketentuan transisi sesuai ketentuan Bank Indonesia untuk estimasi penurunan nilai atas kredit secara kolektif.

IKHTISAR DATA KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah dan %)

Uraian	Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni		Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember		
	2012	2011 (Tidak diaudit)	2011	2010	2009
Pendapatan bunga	5.434.212	4.828.410	9.945.650	8.183.967	7.375.667
Beban bunga	2.868.787	2.445.439	4.982.909	3.981.493	4.150.677
Pendapatan bunga - Bersih	2.565.425	2.382.971	4.962.741	4.202.474	3.224.990
Pendapatan operasional lainnya	915.184	815.908	2.110.291	1.361.464	948.730
Beban - kerugian penurunan nilai / penyisihan penghapusan	434.054	457.463	961.867	1.216.590	949.928
Beban operasional lainnya	1.500.214	1.630.327	3.483.102	2.491.459	1.822.361
Beban operasional lainnya - bersih	(1.019.084)	(1.271.882)	(2.334.678)	(2.346.585)	(1.823.559)
Laba operasional	1.546.341	1.111.089	2.628.063	1.855.889	1.401.431
Pendapatan - non operasional - bersih	83.816	35.569	108.303	87.937	65.124
Laba sebelum pajak penghasilan	1.630.157	1.146.658	2.736.366	1.943.826	1.466.555
Beban- pajak	(388.727)	(280.946)	(683.251)	(494.889)	(386.722)
Laba bersih	1.241.430	865.712	2.053.115	1.448.937	1.079.833

(dalam jutaan Rupiah dan %)

Uraian	30 Juni	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
Jumlah Aset	135.793.538	124.754.179	108.995.334	77.915.717
Jumlah Liabilitas	118.690.774	108.866.048	95.498.580	66.118.993
Jumlah Ekuitas	17.102.764	15.888.131	13.496.754	11.796.724
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	135.793.538	124.754.179	108.995.334	77.915.717
Jumlah Liabilitas / Jumlah aset	87,41	87,26	87,62	84,86
Jumlah Liabilitas / Jumlah ekuitas	693,99	685,20	707,57	560,49
Jumlah Kredit yang diberikan - bersih / Jumlah aset	59,93	55,37	51,09	51,30
Kredit yang diberikan-bersih / Jumlah aset produktif - bersih	66,91	61,94	56,58	56,33
Jumlah Aset Produktif - bersih / Jumlah aset	89,57	89,40	90,29	91,06
Jumlah Simpanan / Jumlah aset	68,33	68,73	69,07	72,17
Rasio Usaha [1]				
Pendapatan bunga / jumlah aset produktif-bersih	n.a[3]	8,92	8,32	10,40
Laba bersih / jumlah pendapatan bunga	n.a[3]	20,64	17,70	14,64
Laba bersih / rata-rata jumlah aset	n.a[3]	1,76	1,50	1,46
Laba bersih / rata-rata jumlah ekuitas	n.a[3]	13,97	11,56	10,86
Laba bersih / rata-rata jumlah aset produktif -bersih	n.a[3]	1,96	1,64	1,61
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan Bunga	n.a[3]	21,53	10,96	22,69
Pendapatan Operasional - bersih	n.a[3]	41,61	32,43	32,28
Laba Bersih	n.a[3]	41,70	34,18	41,81
Jumlah Aset	n.a[3]	14,46	39,89	20,97
Jumlah Liabilitas	n.a[3]	14,00	44,43	18,97
Jumlah Ekuitas	n.a[3]	17,72	14,41	33,58
Rasio Likuiditas				
LDR	87,83	80,36	74,22	73,28
Rasio Kualitas Aset				
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Kredit yang diberikan	2,73	2,81	2,73	2,81
Rasio Permodalan				
Rasio Kecukupan Modal - (CAR) [2]	16,59	17,45	16,65	21,53

Catatan:

1. *Rata-rata jumlah Aset. Ekuitas dan Aset Produktif-bersih dihitung dari penjumlahan saldo awal dan akhir tahun dibagi dua. Aset Produktif-bersih meliputi Giro pada Bank Lain Penempatan pada Bank Lain, Efek-efek, Tagihan Derivatif, Kredit, Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali, Investasi Neto Pembiayaan Sewa, Piutang Pembiayaan Konsumen, Tagihan Akseptasi, Tagihan Anjak Piutang dan Penyertaan, masing-masing setelah dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/Penyisihan kerugian Aset Produktif. Laba-Rugi Juni 2012 dan Juni 2011 tidak disetahunkan sehingga rasio-rasio yang menyangkut laba-rugi tidak dapat diperbandingkan dengan periode tahun-tahun sebelumnya.*
2. *Perhitungan telah disesuaikan dengan surat edaran Bank Indonesia No.11/I/DPNP tahun 2009, PBI No.10/15/PBI/2008. PBI No.9/13I/PBI/2007, PBI No.9/16/PBI/2007. Peraturan Bank Indonesia 6/10/PBI/2004 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP yang mengatur tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Perhitungan CAR tersebut telah memperhitungkan risiko pasar.*
3. *Tidak disajikan karena data tidak dapat diperbandingkan*

1. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 5.434,21 miliar. Hal ini terutama berasal dar i pendapatan bunga kredit sebesar Rp 3.902,38 miliar atau menopang 71,81% dari total pendapatan bunga, dengan porsi terbesar berasal dari hasil kredit pinjaman tetap sebesar Rp 2.525,62 miliar. Sampai dengan semester I 2012, Perseroan telah meningkatkan kredit hingga mencapai 17,70% atau Rp 12.582,55 miliar menjadi Rp 83.662,35 miliar sehingga dapat memberikan kontribusi pendapatan bunga sebesar Rp 3.902,38 miliar. Peningkatan kredit terutama pada sektor ritel dan komersial. Kontribusi lainnya berasal dari pendapatan efek-efek yang menyumbang sebesar Rp 876,42 miliar atau 16,67% dari total pendapatan bunga.

Pendapatan bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp 605,80 miliar atau 12,55% dari Rp 4.828,41 miliar pada 30 Juni 2011 menjadi Rp 5.434,21 miliar pada 30 Juni 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga atas kredit yang diberikan sebesar Rp 729,17 miliar atau 22,98% yang sebagian besar berasal dari peningkatan pendapatan bunga atas kredit pinjaman tetap yaitu sebesar Rp 470,66 miliar atau 22,90%.

Pendapatan bunga untuk tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.761,68 miliar atau 21,53% dari Rp 8.183,97 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp 9.945,65 miliar pada tahun 2011. Kenaikan ini terutama sebagai hasil dari penyaluran kredit, dimana kredit memberikan yield yang tinggi sehingga akan memberikan kontribusi kepada pendapatan bunga dan juga strategi Perseroan yang menambah jumlah kantor cabang untuk meningkatkan kinerja Perseroan melalui distribusi, produk-produk baru yang beragam yang ditawarkan ke masyarakat serta memberikan pelayanan yang lebih baik. Strategi tersebut berhasil meningkatkan penyaluran kredit menjadi Rp 71.079,80 miliar atau meningkat 24,17% pada tahun 2011 dan meningkatkan pendapatan bunga kredit sebesar 19,27% atau Rp 1.085,21 miliar menjadi Rp 6.717,17 miliar atau menopang 67,54% dari total pendapatan bunga.

Pendapatan bunga untuk tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp 808,30 miliar atau 10,96% dari Rp7.375,67 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 8.183,97 miliar pada tahun 2010. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga atas kredit yang diberikan sebesar 16,37 % atau sebesar Rp 792,07 miliar menjadi Rp 5.631,96 miliar pada tahun 2010 dari Rp 4.839,89 miliar pada tahun 2009 seiring dengan peningkatan penyaluran kredit sebesar 39,21% atau Rp 16.124,60 miliar menjadi Rp 57.246,02 miliar. Pendapatan bunga yang berasal dari kredit yang diberikan mengambil porsi 68,82% pada tahun 2010 dan 65,62% pada tahun 2009 terhadap seluruh pendapatan bunga Perseroan.

2. Beban Bunga

Beban bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 2.868,79 miliar. Komposisi terbesar berasal dari beban bunga simpanan sebesar Rp 1.659,06 miliar atau sebesar 57,83% dari total beban bunga. Selain itu, beban bunga surat berharga yang diterbitkan juga menyumbang sebesar 16,60% atau Rp 476,30 miliar dari total beban bunga. Beban bunga simpanan dari bank lain memberikan kontribusi terhadap total beban bunga sebesar Rp 115,46 miliar atau sebesar 4,02%.

Beban bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp 423,35 miliar atau naik sebesar 17,31% dari Rp 2.445,44 miliar pada 30 Juni 2011 menjadi Rp 2.868,79 miliar pada 30 Juni 2012. Peningkatan beban bunga terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga dari surat berharga yang diterbitkan sebesar 22,59% atau sebesar Rp 87,77 miliar dan beban bunga dari simpanan sebesar 2,18% atau sebesar Rp 35,40 miliar . Peningkatan ini diimbangi juga dengan adanya penurunan beban bunga dari efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar 62,20% atau sebesar Rp 61,64 miliar.

Beban bunga untuk tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.001,42 miliar atau 25,15% dari Rp 3.981,49 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp 4.982,91 miliar pada tahun 2011. Kenaikan beban bunga terutama disebabkan oleh kenaikan biaya dana pihak ketiga sebesar 13,50% atau Rp 392,95 miliar dan kenaikan beban bunga dari surat berharga yang diterbitkan Perseroan sebesar 68,73% atau Rp 329,17 miliar. Komposisi dana berbiaya relatif murah yaitu giro dan tabungan pada tahun 2011 mencapai 55,87% dari total seluruh simpanan, Perseroan berusaha menjaga komposisi dana yang optimal untuk meningkatkan performa Perseroan.

Beban bunga untuk tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp 169,18 miliar atau 4,08% dari Rp 4.150,68 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 3.981,49 miliar pada tahun 2010. Walaupun beban bunga mengalami penurunan, akan tetapi komposisi dana semakin baik terlihat dari meningkatnya dana murah berupa giro dan tabungan sebesar Rp 11.492,28 miliar atau sebesar 44,72% menjadi Rp 37.192,98 miliar pada tahun 2010 dari Rp 25.700,70 miliar pada tahun 2009. Penurunan beban bunga tersebut dikarenakan turunnya suku bunga efektif terutama deposito berjangka dimana suku bunga efektif rata-rata per tahun deposito berjangka Rupiah mengalami penurunan sebesar 2,49% dari 9,48% pada tahun 2009 menjadi 6,99% pada tahun 2010.

3. Pendapatan Bunga – Bersih

Pendapatan bunga bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 2.565,43 miliar dengan komposisi terbesar dari pendapatan bunga kredit dan beban bunga simpanan.

Pendapatan bunga bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp 182,45 miliar atau 7,66% dari Rp 2.382,97 miliar pada 30 Juni 2011 menjadi Rp 2.565,43 miliar pada 30 Juni 2012. Peningkatan tersebut berasal dari pendapatan bunga Rp 605,80 miliar atau meningkat 12,55% terutama dari pendapatan bunga kredit yang berhasil tumbuh sebesar Rp 729,17 miliar atau 22,98% walaupun beban bunga mengalami peningkatan sebesar Rp 423,35 miliar atau 17,31%.

Pendapatan bunga bersih untuk tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp 760,27 miliar atau 18,09% dari Rp 4.202,47 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp 4.962,74 miliar pada tahun 2011. Kenaikan tersebut berasal dari pendapatan bunga sebesar Rp 1.761,68 miliar atau meningkat 21,53% terutama dari pendapatan bunga kredit yang berhasil tumbuh sebesar Rp 1.085,21 miliar atau meningkat 19,27% walaupun beban bunga mengalami kenaikan sebesar Rp 1.001,42 miliar atau sebesar 25,15%.

Pendapatan bunga bersih untuk tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp 977,48 miliar atau sebesar 30,31% dari Rp 3.224,99 miliar pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp 4.202,47 miliar pada tahun 2010. Kenaikan yang cukup tinggi tersebut berasal dari peningkatan pendapatan bunga sebesar Rp 808,30 miliar atau naik 10,96% sedangkan beban bunga mengalami penurunan 4,08% atau sebesar Rp 169,18 miliar.



4. Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 915,18 miliar dengan pendapatan terbesar dari pendapatan operasional lain-lainnya yang mencapai Rp 481,89 miliar terutama dari pendapatan lainnya sebesar Rp 247,32 miliar yang sebagian besar dari penerimaan kembali kredit yang dihapusbuku sebesar Rp 188,25 miliar dan kontribusi lainnya dari pendapatan jasa administrasi sebesar Rp 206,02 miliar.

Pendapatan operasional lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp 99,28 miliar atau 12,17% dari Rp 815,91 miliar pada periode 30 Juni 2011 menjadi Rp 915,18 miliar pada periode 30 Juni 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan dari pendapatan transaksi valuta asing – bersih sebesar Rp 51,27 miliar atau 50,46% dan pendapatan operasional lain-lainnya sebesar Rp 40,75 miliar atau 9,24% yang sebagian besar berasal dari pendapatan jasa administrasi sebesar 87,63%. Sedangkan komponen pendapatan operasional lainnya yang mengalami penurunan adalah nilai efek yang diperdagangkan sebesar Rp 63,27 miliar atau 838,90%..

Pendapatan operasional lainnya untuk tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp 748,83 miliar atau 55,00% dari Rp 1.361,46 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp 2.110,29 miliar pada tahun 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan operasional lain-lainnya sebesar Rp 765,42 miliar yang berasal dari penerimaan kembali kredit yang dihapusbuku sebesar Rp 372,36 miliar serta dari pendapatan jasa administrasi sebesar Rp 134,26 miliar dari Rp 157,54 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp 291,80 miliar pada tahun 2011.

Pendapatan operasional lainnya untuk tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp 412,73 miliar atau sebesar 43,50% dari Rp 948,73 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 1.361,46 miliar pada tahun 2010. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan operasional lain-lainnya sebesar Rp 216,28 miliar yang berasal dari pendapatan jasa administrasi sebesar Rp 46,23 miliar atau naik 41,54% dari Rp 111,31 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 157,54 miliar pada tahun 2011.

5. Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 1.500,21 miliar dengan komposisi terbesar berasal dari beban umum dan administrasi yang mencapai Rp 766,68 miliar seiring dengan ekspansi bisnis Perseroan. Sejak Januari hingga Juni 2012 Perseroan telah membuka 1 kantor dan menambah 48 ATM.

Beban operasional lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 mengalami penurunan sebesar Rp 130,11 miliar atau 7,98% dari Rp 1.630,33 miliar pada periode 30 Juni 2011 menjadi Rp 1.500,21 miliar pada periode 30 Juni 2012. Penurunan ini terutama berasal dari beban umum dan administrasi sebesar Rp 272,49 miliar atau 26,22% diantaranya berasal dari beban iklan sebesar Rp 318,33 miliar atau 65,58%. Selain itu, terdapat komponen beban operasional lainnya yang mengalami peningkatan, yaitu beban tenaga kerja sebesar Rp 82,28 miliar atau 24,66% yang sebagian besar berasal dari gaji dan tunjangan sebesar Rp 80,15 miliar atau 27,17%.

Beban operasional lainnya untuk tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp 991,64 miliar atau 39,80% dari Rp 2.491,46 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp 3.483,10 miliar pada tahun 2011. Peningkatan ini terutama berasal dari meningkatnya beban umum dan administrasi sebesar Rp 697,47 miliar atau 50,49%, diantaranya berasal dari beban iklan sebesar Rp 524,83 miliar atau 150,01%. Peningkatan beban iklan ini terkait dengan berbagai program *advertising* yang dilakukan dalam rangka pemasaran produk kepada masyarakat. Selain dari beban umum dan administrasi, peningkatan lainnya berasal dari beban tenaga kerja sebesar Rp 169,55 miliar atau 24,04% dan juga dari beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya yang meningkat sebesar Rp 36,94 miliar atau 44,04%.

Beban operasional lainnya untuk tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp 669,10 miliar atau sebesar 36,72% dari Rp 1.822,36 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 2.491,46 miliar pada tahun 2010. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban umum dan administrasi sebesar Rp 414,48 miliar dari Rp 967,02 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 1.381,50 miliar pada tahun 2010. Beban tenaga kerja juga mengalami peningkatan sebesar Rp 171,46 miliar atau 32,12% dimana sebagian besar berasal dari gaji dan tunjangan sebesar Rp 111,04 miliar atau 25,67%.

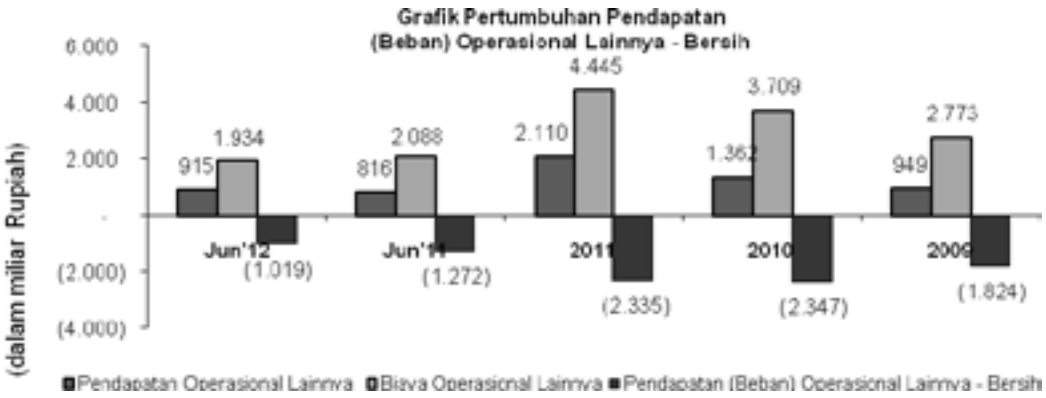
6. Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya – Bersih

Beban operasional lainnya - bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 1.019,08 miliar dengan komposisi terbesar adalah beban kerugian penurunan nilai sebesar Rp 434,05 miliar dan beban umum dan administrasi sebesar Rp 766,68 miliar serta pendapatan transaksi valuta asing – bersih sebesar Rp 152,86 miliar.

Beban operasional lainnya – bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 mengalami penurunan sebesar Rp 252,80 miliar atau 19,88% dari Rp 1.271,88 miliar pada periode 30 Juni 2011 menjadi Rp 1.019,08 miliar pada periode 30 Juni 2012. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan dari beban operasional lainnya sebesar Rp 130,11 miliar atau 7,98% dan peningkatan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp 99,28 miliar atau 12,17%.

Beban operasional lainnya - bersih untuk tahun 2011 mengalami penurunan sebesar Rp 11,91 miliar atau 0,51% dari Rp 2.346,59 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp 2.334,68 miliar pada tahun 2011. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan beban kerugian penurunan nilai sebesar Rp 254,72 miliar atau 20,94% kenaikan beban operasional lainnya sebesar Rp 991,64 miliar atau naik 39,80% yang diimbangi juga dengan kenaikan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp 748,83 miliar atau sebesar 55,00%.

Beban operasional lainnya - bersih untuk tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp 523,03 miliar atau sebesar 28,68% dari Rp 1.823,56 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 2.346,59 miliar pada tahun 2010. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban penurunan nilai sebesar Rp 266,66 miliar atau 28,07%, kenaikan beban operasional lainnya sebesar Rp 669,10 miliar atau meningkat 36,72% dan diimbangi dengan kenaikan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp 412,73 miliar atau sebesar 43,50%.



7. Laba Operasional

Laba operasional untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 1.546,34 miliar dengan komposisi pendapatan operasional mencapai Rp 6.349,40 miliar dan beban operasional mencapai Rp 4.803,06 miliar.

Laba operasional untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp 435,25 miliar atau 39,17% dari Rp 1.111,09 miliar pada periode 30 Juni 2011 menjadi Rp 1.546,34 miliar pada periode 30 Juni 2012. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan dari pendapatan bunga bersih sebesar Rp 182,45 miliar atau 7,66% dan penurunan beban operasional lainnya – bersih sebesar Rp 252,80 miliar atau 19,88%. Peningkatan pendapatan bunga bersih terutama berasal dari peningkatan pendapatan bunga kredit terkait dengan meningkatnya jumlah kredit pada 30 Juni 2012 sebesar Rp 12.582,55 miliar atau 17,70% sehingga meningkatkan pendapatan bunga kredit sebesar Rp 729,17 miliar atau 22,98%. Sedangkan penurunan beban operasional lainnya – bersih pada 30 Juni 2012 sebesar Rp 257,80 miliar berasal dari penurunan beban operasional lainnya sebesar Rp 130,11 miliar, terutama berasal dari beban umum dan administrasi sebesar Rp 272,49 miliar atau 26,22%.

Laba operasional untuk tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp 772,17 miliar atau 41,61% dari Rp 1.855,89 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp 2.628,06 miliar pada tahun 2011 Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga – bersih sebesar Rp 760,27 miliar atau 18,09% dan penurunan beban operasional lainnya – bersih sebesar Rp 11,91 miliar atau 0,51%.

Laba operasional untuk tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp 454,46 miliar atau sebesar 32,43% dari Rp 1.401,43 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 1.855,89 miliar pada tahun 2010. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga bersih sebesar Rp 977,48 miliar atau sebesar 30,31% dari Rp3.224,99 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 4.202,47 miliar pada tahun 2010 dan peningkatan beban operasional lainnya sebesar Rp 669,10 miliar atau sebesar 36,72% dari Rp1.822,36 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 2.491,46 miliar pada tahun 2010.



8. Laba Bersih

Laba bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 1.241,43 miliar, yang dihasilkan dari pendapatan operasional sebesar Rp 1.546,34 miliar, pendapatan non operasional sebesar Rp 83,82 miliar dan beban pajak sebesar Rp 388,73 miliar.

Laba bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp 375,72 miliar atau 43,40% dari Rp 865,71 miliar pada 30 Juni 2011 menjadi Rp 1.241,43 miliar pada 30 Juni 2012. Hal ini terkait dengan peningkatan laba operasional sebesar Rp 435,25 miliar atau 39,17% dari Rp 1.111,09 miliar pada periode 30 Juni 2011 menjadi Rp 1.546,34 miliar pada periode 30 Juni 2012 yang diimbangi dengan peningkatan beban pajak sebesar Rp 107,78 miliar atau 38,36%.

Laba bersih untuk tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp 604,18 miliar atau 41,70% dari Rp 1.448,94 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp 2.053,12 miliar pada tahun 2011. Hal ini terkait dengan peningkatan laba operasional sebesar Rp 772,17 miliar atau 41,61% dari Rp 1.855,89 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp 2.628,06 miliar pada tahun 2011, yang diimbangi dengan peningkatan beban pajak sebesar Rp 188,36 miliar atau 38,06%.

Laba bersih untuk tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp 369,10 miliar atau sebesar 34,18% dari Rp 1.079,83 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 1.448,94 miliar pada tahun 2010. Hal ini terkait dengan kenaikan laba operasional sebesar Rp 454,46 miliar atau sebesar 32,43% dari Rp 1.401,43 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 1.855,89 miliar pada tahun 2010, yang diimbangi dengan peningkatan beban pajak sebesar Rp 108,17 miliar atau 27,97%.



9. Aset

Jumlah aset pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 135.793,54 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp 11.039,36 miliar atau 8,85% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2011 yang berjumlah Rp 124.754,18 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan kredit sebesar Rp 12.301,51 miliar atau sebesar 17,81% dari Rp 69.079,31 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp 81.380,82 miliar pada tanggal 30 Juni 2012.

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar Rp 124.754,18 miliar, Rp 108.995,33 miliar dan Rp 77.915,72 miliar. Pada tahun 2011 total aset meningkat sebesar Rp 15.758,85 miliar atau sebesar 14,46% jika dibandingkan tahun 2010. Peningkatan ini ditopang oleh peningkatan kredit yang diberikan sebesar Rp 13.396,75 miliar atau 24,06% dari Rp 55.682,56 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp 69.079,31 miliar pada tanggal 31 Desember 2010.

Pada tahun 2010 total aset meningkat sebesar Rp 31.079,62 miliar atau sebesar 39,89% jika dibandingkan tahun 2009. Peningkatan ini terutama ditopang oleh peningkatan kredit yang diberikan sebesar Rp 15.715,46 miliar atau 39,32% dari Rp 39.967,10 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp 55.682,56 miliar pada tanggal 31 Desember 2010. Kredit memberikan yield yang tinggi kepada Perseroan, oleh karena itu Perseroan tetap berupaya untuk memberikan yield yang kompetitif kepada masyarakat sehingga akan dapat meningkatkan kredit yang pada akhirnya akan memberikan pendapatan bunga kepada Perseroan. Peningkatan juga terjadi pada penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar Rp 8.881,99 miliar atau 109,56% dari Rp 8.107,08 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp 16.989,08 miliar pada tanggal 31 Desember 2010.

a. Kas

Saldo kas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp 1.127,09 miliar, mengalami penurunan sebesar 19,05% dibandingkan dengan saldo kas pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 1.392,33 miliar. Saldo kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 1.392,33 miliar, mengalami peningkatan sebesar 22,71% dibandingkan dengan saldo kas pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 1.076,07 miliar.Saldo kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 1.076,07 miliar, mengalami peningkatan sebesar 19,44% dibandingkan dengan saldo kas pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 900,90 miliar.

b. Giro pada Bank Indonesia

Saldo giro pada Bank Indonesia Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp 8.395,20 miliar, mengalami peningkatan sebesar 12,08% dibandingkan dengan saldo giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 7.490,08 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya GWM Rupiah pada Bank Indonesia dari 8,01% pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi 8,07% pada tanggal 30 Juni 2012.Saldo giro pada Bank Indonesia Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 7.490,08 miliar, mengalami peningkatan sebesar 38,61% dibandingkan dengan saldo giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 5.403,66 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh GWM dalam Dollar Amerika Serikat ditetapkan sebesar 8% sejak tanggal 1 Juni 2011, 5% sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 31 Mei 2011 dan 1% yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2010 sampai dengan 28 Februari

2011.Saldo giro pada Bank Indonesia Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 5.403,66 miliar, mengalami peningkatan sebesar 117,81% dibandingkan dengan saldo giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 2.480,94 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh GWM dalam Dollar Amerika Serikat per tanggal 28 Februari 2011 naik menjadi 5% dari sebelumnya sebesar 1%.

c. Giro pada Bank Lain

Saldo giro pada bank lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp 617,75 miliar, mengalami penurunan sebesar 47,88% dibandingkan dengan saldo giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 1.185,22 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penempatan giro pada bank lain, antara lain di J.P Morgan Chase, New York dan United Overseas Bank Ltd., Singapura. Saldo giro pada bank lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 1.185,22 miliar, mengalami peningkatan sebesar 36,43% dibandingkan dengan saldo giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 868,75 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penempatan giro pada bank lain di J.P Morgan Chase, New York. Saldo giro pada bank lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 868,75 miliar, mengalami peningkatan sebesar 1,36% dibandingkan dengan saldo giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 857,14 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penempatan giro pada bank lain, antara lain di J.P Morgan Chase, New York dan United Overseas Bank Ltd., Singapura.

d. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Saldo penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp 9.450,12 miliar, mengalami penurunan sebesar 40,82% dibandingkan dengan saldo penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 15.968,56 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penempatan pada Bank Indonesia dan pada bank lain, yaitu pada Bank Mega.Saldo penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 15.968,56 miliar, mengalami penurunan sebesar 6,01% dibandingkan dengan saldo penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 16.989,08 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penempatan pada Bank Indonesia. Saldo penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 16.989,08 miliar, mengalami peningkatan sebesar 109,56% dibandingkan dengan saldo penempatan pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 8.107,08 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penempatan pada Bank Indonesia.

e. Efek-Efek

Saldo efek-efek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 16.635,43 miliar, mengalami peningkatan sebesar 7,06% dibandingkan dengan saldo efek-efek pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar

Rp 15.537,78 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya efek-efek yang tersedia untuk dijual terutama dari reksadana dan SBI yang tersedia untuk dijual. Saldo efek-efek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 15.537,78 miliar, mengalami penurunan sebesar 24,89% dibandingkan dengan saldo efek-efek pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 20.687,70 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya efek-efek yang tersedia untuk dijual terutama dari surat utang jangka menengah dan SBI yang tersedia untuk dijual. Saldo efek-efek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 20.687,70 miliar, mengalami peningkatan sebesar 8,39% dibandingkan dengan saldo efek-efek pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 19.086,47 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan pada tahun 2010 terdapat pembelian Surat Perbendaharaan Negara.

f. Tagihan Derivatif

Saldo tagihan derivatif Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 8.839 juta, mengalami peningkatan sebesar 166,56% dibandingkan dengan saldo tagihan derivatif pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 3.316 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya transaksi swap.Saldo tagihan derivatif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 3.316 juta, mengalami penurunan sebesar 32,82% dibandingkan dengan saldo tagihan derivatif pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 4.936 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya transaksi swap.Saldo tagihan derivatif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 4.936 juta, mengalami peningkatan sebesar 58,10% dibandingkan dengan saldo tagihan derivatif pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 3.122 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya transaksi swap.

g. Kredit

Saldo kredit Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 81.380,82 miliar, mengalami peningkatan sebesar 17,81% dibandingkan dengan saldo kredit pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 69.079,31 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kredit rupiah terutama dari kredit konsumsi, kredit modal kerja, pinjaman rekening Koran, dan kredit investasi. Saldo kredit Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 69.079,31 miliar, mengalami peningkatan sebesar 24,06% dibandingkan dengan saldo kredit pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 55.682,56 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kredit rupiah terutama dari kredit konsumsi, kredit modal kerja, pinjaman rekening Koran, dan kredit investasi. Saldo kredit Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 55.682,56 miliar, mengalami peningkatan sebesar 39,32% dibandingkan dengan saldo kredit pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 39.967,10 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kredit rupiah terutama dari kredit konsumsi, kredit modal kerja, pinjaman rekening Koran, dan kredit investasi.

h. Tagihan Anjak Piutang

Saldo tagihan anjak piutang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 1.044,31 miliar, mengalami penurunan sebesar 3,13% dibandingkan dengan saldo tagihan anjak piutang pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 1.078,02 miliar yang disebabkan menurunnya pemberian piutang anjak piutang. Saldo tagihan anjak piutang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 1.078,02 miliar, mengalami peningkatan 90,09% dibandingkan dengan saldo tagihan anjak piutang pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 567,09 miliar yang disebabkan meningkatnya pemberian piutang anjak piutang. Saldo tagihan anjak piutang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 567,09 miliar, mengalami peningkatan 109,77% dibandingkan dengan saldo tagihan anjak piutang pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 270,35 miliar yang disebabkan meningkatnya pemberian piutang anjak piutang.

i. Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Saldo efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar

Rp 5.789,02 miliar, mengalami peningkatan sebesar 106,89% dibandingkan dengan saldo efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 2.798,16 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian efek yang dibeli dengan janji dijual kembali kepada pihak ketiga. Saldo efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 2.798,16 miliar, mengalami peningkatan sebesar 100% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2010. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian efek yang dibeli dengan janji dijual kembali kepada pihak ketiga. Saldo efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 0, mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan dengan saldo efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 8.000 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penjualan kembali efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada saat jatuh tempo.

j. Investasi Neto Sewa Pembiayaan

Saldo investasi neto sewa pembiayaan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 1.419,56 miliar, mengalami peningkatan sebesar 23,15% dibandingkan dengan saldo investasi neto sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 1.152,71 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pemberiaan sewa pembiayaan. Saldo investasi neto sewa pembiayaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 1.152,71 miliar, mengalami peningkatan sebesar 24,43% dibandingkan dengan saldo investasi neto sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 926,38 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pemberian sewa pembiayaan. Saldo investasi neto sewa pembiayaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 926,38 miliar, mengalami peningkatan sebesar 7,11% dibandingkan dengan saldo investasi neto sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 864,91 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pemberian sewa pembiayaan.

k. Piutang Pembiayaan Konsumen

Saldo piutang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 3.696,27 miliar, mengalami peningkatan sebesar 7,01% dibandingkan dengan saldo piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 3.454,10 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pemberiaan pembiayaan konsumen kepada pihak ketiga.Saldo piutang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 3.454,10 miliar, mengalami peningkatan sebesar 81,29% dibandingkan dengan saldo piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 1.905,26 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pemberiaan pembiayaan konsumen kepada pihak ketiga.Saldo piutang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 1.905,26 miliar, mengalami peningkatan sebesar 78,06% dibandingkan dengan

saldo piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 1.070,01 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pemberian pembiayaan konsumen kepada pihak ketiga.

l. Tagihan Akseptasi

Saldo tagihan akseptasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 1.155,13 miliar, mengalami peningkatan sebesar 36,09% dibandingkan dengan saldo tagihan akseptasi pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 848,83 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya tagihan akseptasi dalam valuta asing.Saldo tagihan akseptasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 848,83 miliar, mengalami peningkatan sebesar 68,47% dibandingkan dengan saldo tagihan akseptasi pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 503,85 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya tagihan akseptasi dalam valuta asing. Saldo tagihan akseptasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 503,85 miliar, mengalami penurunan sebesar 1,54% dibandingkan dengan saldo tagihan akseptasi pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 511,74 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya tagihan akseptasi dalam rupiah.

m. Penyertaan dalam Bentuk Saham

Saldo penyertaan dalam bentuk saham pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 429,41 miliar, mengalami peningkatan sebesar 2,36% dibandingkan dengan saldo penyertaan dalam bentuk saham pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 419,53 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penyertaan pada PT Panin Sekuritas Tbk yang berasal dari laba bersih periode berjalan.Saldo penyertaan dalam bentuk saham pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 419,53 miliar, mengalami peningkatan sebesar 51,50% dibandingkan dengan saldo penyertaan dalam bentuk saham pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 276,93 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penyertaan pada PT Panin Sekuritas Tbk yang berasal dari laba bersih tahun berjalan dan pada tanggal 31 Desember 2011 terdapat penyertaan modal pada entitas anak yaitu PT Clipan Finance Indonesia Tbk dan PT Verena Multi Finance Tbk. Saldo penyertaan dalam bentuk saham pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 276,93 miliar, mengalami peningkatan sebesar 36% dibandingkan dengan saldo penyertaan dalam bentuk saham pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 203,63 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penyertaan pada PT Panin Sekuritas Tbk yang berasal dari laba bersih tahun berjalan

n. Aset Tetap

Saldo aset tetap Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 1.893,96 miliar, mengalami peningkatan sebesar 4,90% dibandingkan dengan saldo aset tetap pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 1.805,41 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penambahan kepemilikan atas bangunan. Saldo aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 1.805,41 miliar, mengalami peningkatan sebesar 2,39% dibandingkan dengan saldo aset tetap pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 1.763,28 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penambahan kepemilikan atas bangunan. Saldo aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 1.763,28 miliar, mengalami peningkatan sebesar 3,55% dibandingkan dengan saldo aset tetap pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 1.702,83 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penambahan kepemilikan atas bangunan.

o. Aset Pajak Tangguhan

Saldo aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 96,86 miliar, mengalami peningkatan sebesar 122,74% dibandingkan dengan saldo aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 43,49 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pajak tangguhan yang berasal dari peningkatan beban cadangan aset produktif selain kredit dan beban pensiun.

Saldo aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 43,49 miliar, mengalami penurunan sebesar 18,20% dibandingkan dengan saldo aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 53,16 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pajak tangguhan yang berasal dari kenaikan nilai efek yang belum direalisasi dan beban pensiun.

Saldo aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 53,16 miliar, mengalami penurunan sebesar 31,23% dibandingkan dengan saldo aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 77,29 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pajak tangguhan yang berasal dari penurunan beban cadangan aset produktif selain kredit.

p. Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 2.653,77 miliar, mengalami peningkatan sebesar 6,26% dibandingkan dengan saldo aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 2.497,36 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang premi dan reasuransi entitas anak.

Saldo aset lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 2.497,36 miliar, mengalami peningkatan sebesar 9,22% dibandingkan dengan saldo aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 2.286,63 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya uang muka pendirian cabang.

Saldo aset lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 2.286,63 miliar, mengalami peningkatan sebesar 26,74% dibandingkan dengan saldo aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 1.804,22 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya dibayar di muka.

10. Liabilitas

Jumlah liabilitas pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 118.690,77 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp 9.824,73 miliar dari Rp 108.866,05 miliar pada tanggal 31 Desember 2011. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan simpanan yaitu tabungan sebesar Rp 8.896,11 miliar atau 27,97%, sedangkan giro dan deposito berjangka mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp 536,22 miliar atau 3,33% dan Rp 1.321,18 miliar atau 3,49% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2011.

Disamping dari simpanan, sumber pendanaan Perseroan juga berasal dari simpanan dari bank lain, pinjaman yang diterima dan penerbitan surat berharga. Simpanan dari bank lain terdiri dari giro, tabungan, deposito dan *call money* sebesar Rp 8.581,20 miliar pada tanggal 30 Juni 2012 atau meningkat sebesar Rp 3.265,98 miliar atau 61,45% dibandingkan tanggal 31 Desember 2011, Pinjaman yang diterima sebesar Rp 3.269,65 miliar pada tanggal 30 Juni 2012 atau meningkat sebesar Rp 284,49 miliar atau 9,53% dibandingkan tanggal 31 Desember 2011 dan surat berharga yang diterbitkan - bersih sebesar Rp3.879,99 miliar pada tanggal 30 Juni 2012 atau menurun sebesar Rp 711,71 miliar atau 15,50% dibandingkan tanggal 31 Desember 2011.

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar Rp 108.866,05 miliar, Rp 95.498,58 miliar dan Rp 66.118,99 miliar. Pada tahun 2011 jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp 13.367,47 miliar atau 14% yang disebabkan terutama oleh simpanan yang meningkat Rp 10.468,81 miliar atau 13,91% dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 75.279,72 miliar pada tanggal 31 Desember 2010, surat berharga yang diterbitkan meningkat Rp 1.801,86 miliar atau 64,59% dari Rp 2.789,84 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp 4.591,70 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 dan simpanan dari bank lain yang meningkat sebesar Rp 1.747,90 miliar atau 49,00% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 3.567,33 miliar.

Secara total simpanan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp 10.468,81 miliar atau 13,91%, terutama dari tabungan yang meningkat Rp 9.377,20 miliar atau 41,82% dari Rp 22.424,18 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp 31.801,39 miliar pada tanggal 31 Desember 2011. Giro juga mengalami peningkatan Rp 1.339,58 miliar atau 9,07% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 14.768,80 miliar. Sedangkan deposito berjangka mengalami sedikit penurunan sebesar Rp 247,97 miliar atau turun 0,65% dari Rp 38.086,74 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp 37.838,77 miliar pada tanggal 31 Desember 2011.

Pada tahun 2010 jumlah liabilitas meningkat sebesar Rp 29.379,59 miliar atau 44,43% yang disebabkan terutama oleh simpanan yang meningkat sebesar Rp 19.045,23 miliar atau 33,87% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 56.234,49 miliar, efek yang dijual dengan janji dibeli kembali – pihak ketiga yang meningkat sebesar Rp 4.150,01 miliar atau 823,60% dibandingkan tahun sebelumnya Rp 503,89 miliar serta obligasi subordinasi meningkat sebesar Rp 2.394,26 miliar atau 160,49% dari Rp 1.491,86 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp 3.886,11 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 dikarenakan adanya penerbitan obligasi subordinasi III pada tahun 2010.

Deposito berjangka pada 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp 7.552,95 miliar atau 24,74% dari Rp 30.533,79 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp 38.086,74 miliar pada tanggal 31 Desember 2010. Giro dan tabungan sebagai dana murah meningkat sebesar Rp 11.492,28 miliar atau 44,72%.

a. Simpanan

Saldo simpanan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 92.787,25 miliar, mengalami peningkatan sebesar 8,21% dibandingkan dengan saldo simpanan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 85.748,53 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya tabungan.Saldo simpanan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 85.748,53 miliar, mengalami peningkatan sebesar 13,91% dibandingkan dengan saldo simpanan pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 75.279,72 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya tabungan.Saldo simpanan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 75.279,72 miliar, mengalami peningkatan sebesar 33,87% dibandingkan dengan saldo simpanan pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 56.234,49 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya tabungan.

b. Simpanan dari Bank Lain

Saldo simpanan dari bank lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 8.581,20 miliar, mengalami peningkatan sebesar 61,45% dibandingkan dengan saldo simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 5.315,23 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya *call money* pihak ketiga.Saldo simpanan dari bank lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 5.315,23 miliar, mengalami peningkatan sebesar 49% dibandingkan dengan saldo simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 3.567,33 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya *call money* pihak ketiga.Saldo simpanan dari bank lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 3.567,33 miliar, mengalami peningkatan sebesar 57,86% dibandingkan dengan saldo simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 2.259,80 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya *call money* pihak ketiga dan deposito berjangka pihak ketiga.

c. Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Saldo efek yang dijual dengan janji dibeli kembali Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 3.062,67 miliar, mengalami penurunan sebesar 16,44% dibandingkan dengan saldo efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 31 Desember 2011 sebesar Rp 3.665,16 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh pembelian kembali efek yang dijual dengan janji dibeli kembali pada saat jatuh tempo.Saldo efek yang dijual dengan janji dibeli kembali Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 3.665,16 miliar, mengalami penurunan sebesar 21,25% dibandingkan dengan saldo efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 31 Desember 2010 sebesar Rp 4.653,89 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh pembelian kembali efek yang dijual dengan janji dibeli kembali pada saat jatuh tempo.Saldo efek yang dijual dengan janji dibeli kembali Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 4.653,89 miliar, mengalami peningkatan sebesar 823,60% dibandingkan dengan saldo efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 31 Desember 2009 sebesar Rp 503,89 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh penjualan efek yang dijual dengan janji dibeli kembali kepada pihak ketiga.

d. Liabilitas Derivatif

Saldo liabilitas derivatif Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 3.419 juta, mengalami peningkatan sebesar 15,86% dibandingkan dengan saldo liabilitas derivatif pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 2.951 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya transaksi *forward*. Saldo liabilitas derivatif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 2.951 juta, mengalami penurunan sebesar 59,10% dibandingkan dengan saldo liabilitas derivatif pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 7.216 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya transaksi *swap*.Saldo liabilitas derivatif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 7.216 juta, mengalami peningkatan sebesar 36,28% dibandingkan dengan saldo liabilitas derivatif pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 5.295 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya transaksi *swap*.

e. Liabilitas Akseptasi

Saldo liabilitas akseptasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 1.155,91 miliar, mengalami peningkatan sebesar 35,99% dibandingkan dengan saldo liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 849,99 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas akseptasi dalam valuta asing. Saldo liabilitas akseptasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 849,99 miliar, mengalami peningkatan sebesar 68,70% dibandingkan dengan saldo liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 503,85 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya liabilitas akseptasi dalam valuta asing. Saldo liabilitas akseptasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 503,85 miliar, mengalami penurunan sebesar 2,53% dibandingkan dengan saldo liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 516,91 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya liabilitas akseptasi dalam valuta asing.

f. Surat Berharga yang DIterbitkan

Saldo surat berhaga yang diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 3.879,99 miliar, mengalami penurunan sebesar 15,50% dibandingkan dengan saldo surat berharga yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 4.591,70 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Obligasi Bank Panin II Tahun 2007 seri B telah jatuh tempo. Saldo surat berhaga yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 4.591,70 miliar, mengalami peningkatan sebesar 64,59% dibandingkan dengan saldo surat berharga yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 2.789,84 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penerbitan obligasi oleh entitas anak, PT Clipan Finance Indonesia Tbk dan MTN dari entitas anak, PT Verena Multi Finance Tbk. Saldo surat berhaga yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 2.798,84 miliar, mengalami peningkatan sebesar 21,10% dibandingkan dengan saldo surat berharga yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 2.303,76 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penerbitan Obligasi Bank Panin IV.

g. Pinjaman yang Diterima

Saldo pinjaman yang diterima Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 3.269,65 miliar, mengalami peningkatan sebesar 9,53% dibandingkan dengan saldo pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 2.985,16 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pinjaman yang diterima dari bank lain dalam valuta asing.Saldo pinjaman yang diterima Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 2.985,16 miliar, mengalami penurunan sebesar 16,67% dibandingkan dengan saldo pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 3.582,39 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pinjaman yang diterima dari bank lain dalam valuta asing. Saldo pinjaman yang diterima Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 3.582,39 miliar, mengalami peningkatan sebesar 119,52% dibandingkan dengan saldo pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 1.631,92 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pinjaman yang diterima dari bank lain dalam valuta asing.

h. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 239,97 miliar, mengalami penurunan sebesar 10,67% dibandingkan dengan saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 268,63 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25. Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 268,63 miliar, mengalami peningkatan sebesar 97,08% dibandingkan dengan saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 136,31 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan laba bersih Perseroan tahun berjalan. Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 136,31 miliar, mengalami penurunan sebesar 39,97% dibandingkan dengan saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 227,05 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25.

i. Liabilitas Pajak Tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 209 juta, mengalami peningkatan sebesar 100% dibandingkan dengan saldo liabilitas pajak tangguhan pada 31 Desember 2011 sebesar Rp 0. Peningkatan ini berasal dari pajak tangguhan entitas anak, PT Clipan Finance Indonesia Tbk

j. Liabilitas Lain-Lain

Saldo liabilitas lain-lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 1.441,06 miliar, mengalami peningkatan sebesar 11,61% dibandingkan dengan saldo liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 1.291,12 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya liabilitas kontrak asuransi entitas anak. Saldo liabilitas lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 1.291,12 miliar, mengalami peningkatan sebesar 35,39% dibandingkan dengan saldo liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 953,66 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan ditangguhkan. Saldo liabilitas lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 953,66 miliar, mengalami peningkatan sebesar 22,37% dibandingkan dengan saldo liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 779,30 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya bunga yang masih harus dibayar.

k. Obligasi Subordinasi

Saldo obligasi subordinasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 3.894,61 miliar, mengalami peningkatan sebesar 0,08% dibandingkan dengan saldo obligasi subordinasi pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 3.891,61 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh penjualan kembali obligasi yang diterbitkan. Saldo obligasi subordinasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 3.891,61 miliar, mengalami peningkatan sebesar 0,14% dibandingkan dengan saldo obligasi subordinasi pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 3.886,11 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh penjualan kembali obligasi yang diterbitkan. Saldo obligasi subordinasi Perseroan

pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 3.886,11 miliar, mengalami peningkatan sebesar 160,49% dibandingkan dengan saldo obligasi subordinasi pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 1.491,86 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penerbitan Obligasi Subordinasi Bank Panin III.

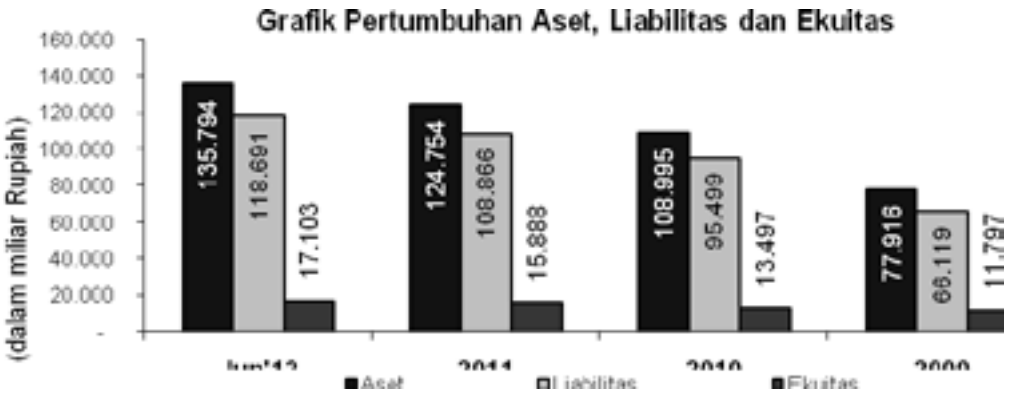
11. Ekuitas

Total ekuitas pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 17.102,76 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp 1.214,63 miliar bila dibandingkan dengan 31 Desember 2011 yang berjumlah Rp 15.888,13 miliar. Hal ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp 1.098,12 miliar.

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 15.888,13 miliar, Rp 13.496,75 miliar dan Rp 11.796,72 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 2011, total ekuitas sebesar Rp 15.888,13 miliar atau meningkat sebesar Rp 2.391,38 miliar atau 17,72% dari Rp 13.496,75 miliar pada tanggal 31 Desember 2010. Peningkatan ini berasal dari peningkatan saldo laba sebesar Rp 1.830,33 miliar atau 27,71% dari Rp 6.605,24 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp 8.435,58 miliar pada tahun 2011.

Pada tanggal 31 Desember 2010, total ekuitas sebesar Rp 13.496,75 miliar atau meningkat sebesar 14,41% dari Rp 11.796,72 miliar pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan ini berasal dari peningkatan saldo laba sebesar Rp 1.692,96 miliar atau 34,46% dari Rp 4.912,29 miliar pada 2009 menjadi Rp 6.605,24 miliar pada tahun 2010.



12. Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dengan menjaga Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai cadangan wajib (perbandingan antara saldo rekening giro Perseroan pada Bank Indonesia dengan dana pihak ketiga) seperti yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. GWM Rupiah Perseroan per Juni 2012, 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar 8,07%, 8,01%, 8,11%, dan 5,02%. GWM valas Perseroan per Juni 2012, 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar 8,04%, 8,14% , 1,04%, dan 1,04%.

Giro pada Bank Indonesia yang dimiliki Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah tercatat sebesar Rp 8.395,20 miliar atau meningkat sebesar Rp 905,12 miliar atau 12,08% dari Rp 7.490,08 miliar pada tanggal 31 Desember 2011. Hal ini juga disebabkan oleh kenaikan jumlah dana pihak ketiga sebesar Rp 7.038,71 miliar atau 8,21% dari Rp 85.748,53 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp 92.787,25 miliar pada tanggal 30 Juni 2012.

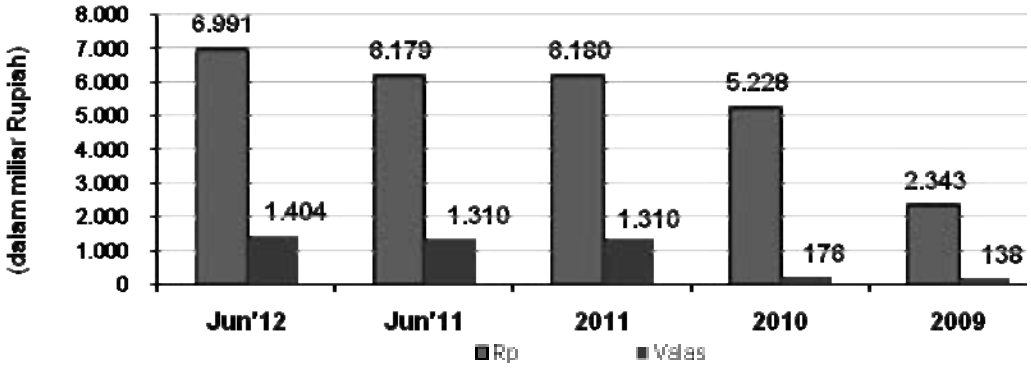
Giro pada Bank Indonesia yang dimiliki Perseroan dalam Rupiah pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp 6.991,03 miliar atau meningkat sebesar Rp 811,20 miliar atau 13,13% dari Rp 6.179,83 miliar pada tanggal 31 Desember 2011, sedangkan giro pada Bank Indonesia yang dimiliki Perseroan dalam valuta asing pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp 1.404,18 miliar (setara USD 149,46 juta dengan kurs Rp 9.395 /1 USD) atau meningkat sebesar 7,17% dari Rp 1.310,25 miliar pada tanggal 31 Desember 2011.

Giro pada Bank Indonesia yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 6.179,83 miliar, Rp 5.227,96 miliar dan Rp 2.342,83 miliar untuk mata uang Rupiah dan Rp 1.310,25 miliar (setara USD 144,50 juta dengan kurs Rp 9.067,5 /1 USD), Rp 175,70 miliar (setara USD 19,50 juta dengan kurs Rp 9.010 /1 USD) dan Rp 138,11 miliar (setara USD 14,70 juta dengan kurs Rp 9.395/1 USD) untuk valuta asing.

GWM Rupiah yang diwajibkan Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar 8%, 8%, 8% dan 5% sedangkan GWM Valas yang diwajibkan Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar 8%, 8%, 1% dan 1%.

Disamping itu, Perseroan juga memiliki *secondary reserve* berupa aset yang cukup likuid ditambah dengan kemampuan Perseroan untuk mengembangkan dana dari pihak ketiga dengan semakin banyaknya jalur distribusi dari jumlah cabang yang meningkat, serta penerbitan Obligasi ini.

Grafik Pertumbuhan Giro pada Bank Indonesia



13. Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan telah memenuhi ketentuan yakni rasio kecukupan modal/KPMM atau CAR di atas aturan BI (8 persen). Solvabilitas Perseroan masih cukup tinggi dibandingkan dengan bank lain, hal ini sebagai respons Perseroan untuk menjalankan sistem perbankan yang prudent serta untuk mengantisipasi risiko yang ada. Rasio KPMM Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah 16,59%, 17,45% , 16,65%, dan 21,79%.

14. Imbal Hasil Aset (ROA) dan Ekuitas (ROE)

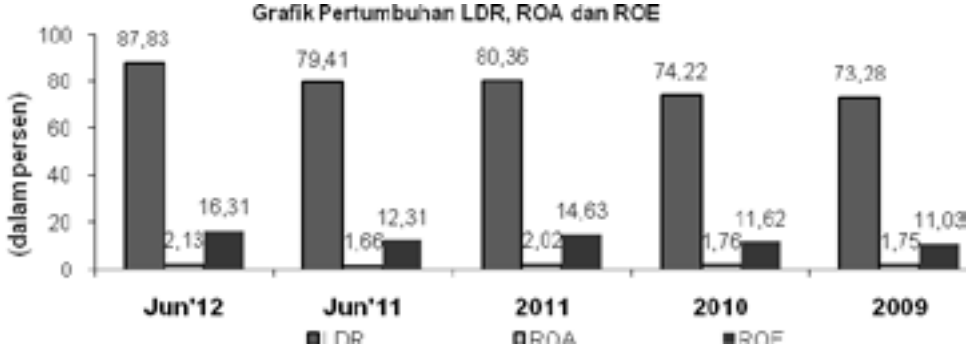
Imbal Hasil Aset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba sebelum pajak dari aset yang dimilikinya. Rasio ini didapat dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan rata-rata jumlah aset (penjumlahan saldo awal dan akhir tahun dibagi dua). Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 rasio laba sebelum pajak penghasilan dengan rata-rata jumlah aset masing-masing sebesar 2,02%, 1,76% dan 1,75%.

Imbal Hasil Ekuitas (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan. Rasio ini didapat dengan membandingkan antara laba bersih dengan rata-rata jumlah ekuitas (penjumlahan saldo awal dan akhir tahun dibagi dua). Untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, rasio laba bersih dengan rata-rata jumlah ekuitas masing-masing sebesar 14,63%, 11,62% dan 11,03%.

Untuk lebih meningkatkan ROA dan ROE dalam tahun 2012 Perseroan telah dan akan melakukan upaya-upaya berikut:

- Meningkatkan *Net Interest Margin* dengan meningkatkan pemberian kredit dan pembiayaan konsumen serta memperbaiki komposisi pendanaan dengan meningkatkan porsi tabungan dan giro.
- Meningkatkan *fee based income* dari transaksi *trade finance*, kiriman uang, transaksi luar negeri, perdagangan surat-surat berharga dan lain-lain.

Grafik Pertumbuhan LDR, ROA dan ROE



15. Aset dan Liabilitas Dalam Mata Uang Asing

Perseroan memperoleh ijin beroperasi sebagai bank devisa pada tanggal 21 April 1972. Posisi kurs pada tanggal 30 Juni 2012 berdasarkan kurs penutupan *Reuters* adalah pada Rp 9.392,50 untuk per 1 USD dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, masing-masing untuk 1 USD adalah Rp 9.067,50 , Rp 9.010 dan Rp 9.395.

Aset

Jumlah aset dalam valuta asing untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 17.599,56 miliar, dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, masing-masing adalah sebesar Rp 16.325,35 miliar, Rp 16.422,22 miliar dan Rp 13.729,50 miliar.

Aset dalam valuta asing yang dimiliki Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 17.599,56 miliar dalam mata uang Rupiah atau meningkat sebesar Rp 1.274,21 miliar dari Rp 16.325,35 miliar pada tanggal 31 Desember 2011. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan kredit dalam valuta asing sebesar Rp 855,36 miliar atau meningkat 9,58% dari Rp 8.929,56 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp 9.784,92 miliar pada tanggal 30 Juni 2012.

Aset dalam valuta asing pada tanggal 31 Desember 2011 mengalami penurunan sebesar Rp 96,87 miliar atau 0,59% dari Rp 16.422,22 miliar pada tanggal 31 Desember 2010. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penempatan pada bank lain dalam valuta asing sebesar Rp 2.077,60 miliar atau menurun 47,77% dari Rp 4.349,56 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp 2.271,96 miliar pada tanggal 31 Desember 2011, yang diimbangi dengan kenaikan giro pada Bank Indonesia dalam valuta asing sebesar Rp 1.134,56 miliar atau meningkat 645,75% dari Rp 175,70 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp 1.310,25 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 dan kenaikan dari tagihan akseptasi dalam valuta asing sebesar Rp 334,23 miliar atau meningkat 67,01% dari Rp 498,80 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp 833,03 miliar pada tanggal 31 Desember 2011.

Aset dalam valuta asing pada tanggal 31 Desember 2010 meningkat sebesar Rp 2.692,72 miliar atau 19,61% dari Rp 13.729,50 miliar pada tanggal 31 Desember 2009. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kredit dalam valuta asing sebesar Rp 3.435,85 miliar atau 63,46% dari Rp 5.414,03 miliar menjadi Rp 8.849,88 miliar, yang diimbangi dengan penurunan dari penempatan pada bank lain dalam valuta asing sebesar Rp 1.000,50 miliar atau 18,70% dari Rp 5.350,06 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp 4.349,56 miliar pada tanggal 31 Desember 2010.

Liabilitas

Liabilitas dalam valuta asing untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, masing-masing sebesar Rp 17.409,68 miliar, Rp 16.207,38 miliar, Rp 16.741,87 miliar dan Rp 13.751,57 miliar.

Liabilitas dalam valuta asing yang dimiliki Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp 17.409,68 miliar dalam mata uang Rupiah atau meningkat sebesar Rp 1.202,31 miliar bila dari Rp 16.207,38 miliar pada tanggal 31 Desember 2011. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan simpanan dari bank lain dalam valuta asing sebesar Rp 687,88 miliar atau 65,22% dari Rp 1.054,75 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi Rp 1.742,64 miliar pada tanggal 30 Juni 2012.

Pada tanggal 31 Desember 2011, penurunan liabilitas dalam valuta asing sebesar Rp 534,49 miliar atau 3,19% dari Rp 16.741,87 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 disebabkan terutama oleh penurunan simpanan dalam valuta asing sebesar Rp 979,60 miliar atau 7,17% dari Rp 13.659,01 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp 12.679,41 miliar pada tanggal 31 Desember 2011 dan penurunan pinjaman yang diterima dalam valuta asing sebesar Rp 916,25 miliar atau 40,71% dari Rp 2.250,93 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp 1.334,68 miliar pada tanggal 31 Desember 2011. Penurunan liabilitas ini juga diimbangi dengan kenaikan pada simpanan dari bank lain dalam valuta asing sebesar Rp 962,64 miliar atau meningkat 1.045,02% dari Rp 92,12 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi Rp 1.054,75 miliar pada tanggal 31 Desember 2011.

Pada tanggal 31 Desember 2010, peningkatan liabilitas dalam valuta asing sebesar Rp 2.990,30 miliar atau meningkat 21,75% dari Rp 13.751,57 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 disebabkan terutama oleh kenaikan simpanan dalam valuta asing sebesar Rp 1.930,74 miliar atau meningkat 16,46% dari Rp 11.728,26 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp 13.659,01 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 dan pinjaman yang diterima dalam valuta asing sebesar Rp 939,50 miliar atau meningkat 139,59% dari Rp 939,50 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp 2.250,93 pada tanggal 31 Desember 2010.

Secara keseluruhan, Perseroan senantiasa berusaha menjaga Posisi Devisa Neto (PDN) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010, yaitu positif atau negatif sebesar maksimum 20% dari ekuitas untuk bank yang telah memperhitungkan risiko pasar untuk perhitungan KPMM. PDN pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010, dan 2009, masing-masing adalah Rp 15.753,02 miliar atau 0,39 % dari ekuitas, Rp 14.475,89 miliar atau 0,60% dari ekuitas, Rp 11.326,86 miliar atau 0,31% dari ekuitas, dan Rp 10.200,08 miliar atau 2,90% dari ekuitas.

C. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, maka Perseroan terus mengidentifikasikan permasalahan yang mungkin timbul dari kegiatan operasionalnya. Penilaian kondisi ini digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu mendatang. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, maka kondisi kesehatan suatu bank dinilai secara kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor berikut:

1. Permodalan (*Capital*)

a. Faktor permodalan ditentukan oleh komponen-komponen berikut: kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku (*Capital Adequacy Ratio*/CAR), komposisi permodalan, proyeksi KPMM. Aset Produktif Yang Diklasifikasi (APYD) dibandingkan dengan modal, kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan), rencana permodalan yang mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan. Semakin kuat modal yang dimiliki oleh bank maka akan membuat bank semakin mampu untuk mengembangkan usaha dan menampung risiko kerugian.

b. Dari komponen-komponen yang menentukan tingkat kekuatan dari faktor permodalan, maka yang memiliki bobot terbesar adalah komponen kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku (*Capital Adequacy Ratio*/CAR). Saat ini Bank Indonesia mewajibkan bank-bank untuk memiliki struktur perbandingan antara jumlah modal dengan aset tertimbang menurut risiko minimum sebesar 8%.

c. Rasio KPMM Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007 berturut-turut adalah 16,59%, 17,45%, 16,65%, 21,53%, 20,31% dan 21,58% yang berarti jauh melampaui batas minimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Berikut ini adalah Tabel perhitungan KPMM Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008, dan 2007:

(dalam jutaan Rupiah dan %)

Perhitungan CAR	30 Juni 2012	31 Desember				
		2011	2010	2009	2008	2007
Modal Inti	13.002.006	11.700.322	9.891.866	9.016.363	7.035.149	6.261.356
Modal pelengkap (max 100% dari Modal Inti)	4.062.372	4.110.013	1.667.363	1.678.364	2.454.848	2.394.836
Total Modal Inti dan Modal Pelengkap (A+B)	17.064.378	15.810.335	11.559.229	10.694.727	9.489.997	8.656.192
Penyertaan (-/-)	(1.302.428)	(1.302.428)	(718.672)	(718.672)	(862.055)	(669.081)
Aset Tertimbang Menurut Risiko	85.442.731	75.586.460	61.201.831	46.023.987	42.490.133	37.003.834
Rasio KPMM untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar	16,59	17,45	16,65	21,53	20,31	21,58
CAR Minimum menurut ketentuan Bank Indonesia	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Dasar kebijakan untuk mempertahankan rasio yang cukup tinggi:

- Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.01/SK-DK/2011 tentang Wewenang dan Prosedur Persetujuan Komite Kredit Tingkat Direksi. Perseroan menerapkan kebijakan untuk memelihara Rasio Kecukupan Modal (CAR) sekurang-kurangnya 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali dari ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- Manfaat yang diperoleh dengan mempertahankan rasio tersebut dibandingkan dengan pengelolaan penempatan aset Perseroan agar pendapatan yang diterima lebih meningkat.

Dengan Rasio CAR yang tinggi Perseroan memperoleh manfaat berupa:

- Kemampuan menyerap risiko yang lebih besar sehingga tidak rentan terhadap perubahan kondisi perekonomian, gejolak pasar dan risiko usaha lainnya.
- Memiliki kesempatan yang lebih besar untuk merebut peluang usaha yang ada tanpa adanya hambatan dari aspek permodalan.
- Kepercayaan yang lebih besar dari nasabah, kreditor dan pasar uang sehingga dapat memperoleh dana dengan suku bunga yang lebih baik.

2. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

a. Faktor kualitas aset ditentukan oleh komponen-komponen berikut: Aset Produktif Yang Diklasifikasi (APYD) dibandingkan dengan total aset produktif, debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit, perkembangan aset produktif bermasalah (*non performing asset*) dibandingkan dengan aset produktif, tingkat kecukupan pembentukan Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai (CKPN), kecukupan kebijakan dan prosedur aset produktif, sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aset produktif, dokumentasi aset produktif dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah. Semakin baik kualitas aset yang dimiliki bank akan meminimalisasi risiko yang harus dihadapi.
b. Komponen yang memiliki bobot terbesar dalam faktor kualitas aset ini adalah tingkat kecukupan pembentukan CKPN. Perseroan telah membentuk CKPN pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008, dan 2007, masing-masing sebesar Rp 2.490,48 miliar, Rp 2.105,93 miliar, Rp 1.620,55 miliar, Rp 1.364 miliar, Rp 1.439,24 miliar dan Rp 815,49 miliar. Rasio CKPN yang telah dibentuk terhadap minimum penyisihan yang harus dibentuk berdasarkan Peraturan Bank Indonesia per tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007 adalah sebesar 100%.
c. Aset produktif Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp 124.117,14 miliar, meningkat sebesar Rp 10.485,69 miliar atau 9,23% dibandingkan tanggal 31 Desember 2011. Komposisi terbesar aset produktif merupakan kredit yaitu sebesar Rp 83.662,35 miliar atau 67,41%, efek-efek sebesar Rp 16.797,65 miliar atau 13,53% dan penempatan pada bank lain sebesar Rp 9.450,12 miliar atau 7,61%.
   Aset produktif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 113.631,45 miliar meningkat Rp 13.598,36 miliar atau 13,59% dari tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 100.033,09 miliar. Komposisi aset produktif sebagian besar merupakan kredit sebesar Rp 71.079,80 miliar atau 62,55%, penempatan pada bank lain sebesar Rp 15.969,06 miliar atau 14,05% dan efek-efek sebesar Rp 15.596,53 miliar atau 13,73%.
   Aset produktif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 meningkat sebesar Rp 27.719,55 miliar dari Rp 72.313,54 miliar pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi Rp 100.033,09 miliar pada tanggal 31 Desember 2010. Peningkatan ini didominasi oleh kredit yang meningkat Rp 16.124,60 miliar atau naik 39,21% menjadi Rp 57.246,02 miliar pada tanggal 31 Desember 2010 dan kenaikan penempatan pada bank lain sebesar Rp 8.804,31 miliar atau meningkat 107,5% menjadi Rp 16.989,68 miliar pada tanggal 31 Desember 2010.

Perkembangan nilai rasio NPL

Berikut tabel perkembangan NPL Perseroan sejak tahun 2007 hingga 30 Juni 2012 adalah sebagai berikut :

(dalam persentase)

Keterangan	30 Jun 2012	2011	2010	2009	2008	2007
NPL - Bersih	0,74	0,92	2,68	1,60	2,15	1,76
NPL – Gross	3,30	3,56	4,37	3,16	4,34	3,06

Sejak tahun 2010, terlihat bahwa NPL baik *gross* maupun *nett* terus mengalami penurunan. Jumlah kredit bermasalah diupayakan terus ditekan melalui sistem dan prosedur penanganan kredit bermasalah termasuk prosedur pelaksanaan restrukturisasi kredit serta pembentukan Satuan Kerja di Kantor Cabang dan Kantor Pusat yang secara khusus bertugas menangani dan mencari solusi atas penyelesaian kredit bermasalah.

NPL Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 menurun sebesar 0,81% dari 4,37% pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi 3,56% pada tanggal 31 Desember 2011. Pada tanggal 31 Desember 2010 NPL meningkat sebesar 1,21% dari 3,16% pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi 4,37% pada tanggal 31 Desember 2010 dan pada tanggal 31 Desember 2009 NPL menurun sebesar 1,18% dari 4,34% pada tanggal 31 Desember 2008 menjadi 3,16% pada tanggal 31 Desember 2009, dimana pada tanggal 31 Desember 2007 NPL sebesar 3,06% dan merupakan NPL terrendah selama 5 tahun terakhir. Kualitas kredit debitur sedikit meningkat walaupun terdapat krisis makro ekonomi global yang memberikan dampak pada perekonomian Indonesia.

Upaya untuk menjaga agar NPL tetap sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia antara lain melalui:

1. Melakukan usaha untuk menerapkan sistem pengawasan dan deteksi dini dalam memonitor kredit, penagihan secara intensif terhadap kredit-kredit yang memiliki tunggakan, serta restrukturisasi dalam rangka penyelamatan kredit.
2. Langkah lain yang bisa ditempuh oleh bank adalah berupaya mencari penyelesaian kredit bermasalah melalui pengambilalihan agunan sehingga total kredit bermasalah dapat menurun.
3. Sebagai langkah terakhir apabila debitur benar-benar sudah tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kreditnya dan apabila diperlukan untuk menjaga nilai NPL, maka bank dapat melakukan hapus buku terhadap kredit bermasalah.

3. Manajemen (*Management*)

a. Komponen-komponen yang menentukan faktor manajemen adalah: manajemen umum, penerapan sistem Manajemen Risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

b. Kemampuan untuk melakukan Manajemen Risiko.

Salah satu proses pelaksanaan prinsip Manajemen Risiko dilakukan melalui rapat *Asset and Liabilities Committee* (ALCO) yang diadakan sekali dalam sebulan. Tim ALCO yang terdiri dari seluruh anggota direksi dan kepala Divisi/Biro terkait mengevaluasi kinerja usaha Perseroan pada periode laporan sebelumnya, seperti kualitas aset, likuiditas, *earnings*, komposisi sumber dan penggunaan dana, kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan internal Perseroan serta melakukan analisa terhadap risiko-risiko potensial, seperti risiko tingkat bunga, risiko likuiditas, risiko perubahan kurs mata uang asing dan lain-lain. Pada saat yang sama juga dirumuskan sasaran usaha untuk masa mendatang serta memformulasikan strategi pencapaiannya.

Di kantor pusat dan di setiap cabang telah dibentuk satuan khusus tim penyelamat kredit bermasalah yang bertugas mengintensifkan penagihan kredit, khususnya atas kredit yang mempunyai potensi bermasalah. Jika penagihan kredit tidak memungkinkan, maka dilakukan upaya restrukturisasi kredit dengan skema yang terbaik bagi kedua belah pihak serta melakukan upaya hukum atas tagihan yang tidak dapat diselesaikan melalui restrukturisasi, sehingga kualitas aset produktif Perseroan semakin membaik.

Untuk memitigasi risiko reputasi, Perseroan telah menunjuk Koordinator Penyelesaian Pengaduan Nasabah di Kantor Cabang dan di Kantor Pusat dengan tugas melakukan pemantauan media untuk memonitor setiap pemberitaan yang berkenaan dengan Perseroan, terutama pemberitaan yang dapat menimbulkan citra negatif bagi Perseroan. Perseroan mengadministrasikan, memfasilitasi dan menyelesaikan setiap pengaduan nasabah yang diterima dengan sebaik mungkin. Dalam mengelola risiko reputasi, Perseroan senantiasa berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Penanganan Pengaduan Nasabah dan Buku Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan seluruh jajaran Komisaris dan Direksi serta sebanyak 1.886 orang pejabat dan staf telah lulus dalam program sertifikasi Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).

c. Jumlah pejabat senior yang melapor pada direktur dan rata-rata lamanya pengalaman dari pejabat senior dibidang perbankan.

Divisi dan Biro yang berjumlah 17 melapor dan berkomunikasi langsung kepada masing-masing direktur terkait yang terdiri dari 11 orang. Setiap bulan diadakan Rapat Koordinasi antar Divisi dan Biro untuk membahas strategi yang akan diimplementasikan dalam menjalankan bisnis dengan mempertimbangkan kondisi eksternal maupun internal. Setiap tahun diadakan Rapat Kerja yang dihadiri oleh seluruh Direksi dan Kepala Divisi/Biro. Pimpinan Cabang dan *Staff Senior* di Kantor Pusat dan Cabang dan diselenggarakan secara bergiliran di kota-kota di mana terdapat Kantor Cabang Perseroan. Pertemuan-pertemuan rutin ini memungkinkan pucuk pimpinan Perseroan dapat mengantisipasi dampak dari perubahan yang terjadi dan mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan terkoordinasikan dengan baik dalam menjalankan Perseroan.

Seluruh anggota Direksi, Kepala Divisi/Biro dan Pimpinan cabang sudah mempunyai pengalaman rata-rata 15 tahun dalam bidang perbankan dan sebagian besar pejabat senior diangkat dari pegawai yang telah lama bergabung dengan Perseroan dan telah menunjukkan *performance* dan loyalitas yang baik.

d. Kebijakan Perseroan dan metode pengendalian transaksi terhadap pihak-pihak terafiliasi.

Semua transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi dilaksanakan dengan persyaratan yang sama dengan yang berlaku bagi pihak ketiga lainnya dan senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh otoritas moneter/ Bank Indonesia.

e. Metode yang digunakan *eksekutif senior* Perseroan dalam mengelola risiko khususnya:

- Pengembangan dan penerapan kebijaksanaan, prosedur dan pelaksanaan berkenaan dengan standar operasi bank yang hati-hati.

  Agar kebijaksanaan, prosedur dan pelaksanaan operasi Perseroan dilaksanakan dengan baik dan hati-hati. Perseroan telah membuat suatu Pedoman Sistem Operasi dan Prosedur yang jelas dan seragam dan senantiasa diperbaharui sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Beberapa ketentuan Bank Indonesia telah disadur dan diterapkan pemberlakuannya bagi kantor-kantor cabang Perseroan serta dimonitor ketaatannya dalam bentuk laporan ke kantor pusat. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh cabang akan dikenakan denda/pinalti yang besarnya disesuaikan dengan denda yang diberlakukan oleh Bank Indonesia terhadap Perbankan pada umumnya. Dengan terpenuhinya ketentuan Bank Indonesia oleh cabang-cabang, maka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia oleh Perseroan secara keseluruhan akan lebih mudah dilaksanakan.
- Program audit intern dan lingkungan pengendalian intern.

  Pengendalian intern dilakukan dengan menerapkan pola kerja "*Maker - Checker – Approval*", yang dilakukan secara hirarkis guna memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi setiap harinya telah terlaksana seluruhnya secara benar. Sebelum suatu transaksi dijalankan haruslah diperiksa oleh petugas yang lebih tinggi dan mendapat *approval* dari pejabat pada bagian tersebut.

Selanjutnya Satuan Kerja Audit Intern Cabang yang tidak terlibat dalam proses transaksi melakukan pemeriksaan guna memastikan kebenaran dan keakuratan pelaksanaan seluruh proses transaksi.

Di tingkat pusat terdapat pula Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) di bawah Biro Pengawasan dan Pemeriksaan yang menerima laporan dan melakukan pengawasan terhadap seluruh cabang dan unit-unit kerja di kantor pusat. Disamping melakukan pengawasan berdasarkan laporan. secara berkala satuan audit intern juga melakukan pemeriksaan langsung ke cabang-cabang dan unit-unit kerja di kantor pusat.

- Pertimbangan Kredit dan Proses Penelaahannya.
  Dalam pemberian kredit Perseroan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan pertimbangan yang sangat *konservatif*. Semua pengajuan kredit harus disertai studi kelayakan. analisa keuangan dan proyeksi untuk mengetahui prospek perusahaan yang akan dibiayai. Sebelum suatu proposal kredit disetujui harus terlebih dahulu dilakukan pembahasan oleh Komite Kredit sesuai dengan batas wewenangnya. Komite Kredit Cabang hanya berwenang memutuskan pemberian kredit sebesar jumlah maksimum yang ditetapkan oleh Direksi bagi masing-masing cabang, sedangkan untuk proposal kredit yang jumlahnya melampaui wewenang Komite Kredit Cabang, selain telah disetujui oleh Komite Kredit Cabang juga harus dimintakan *approval* dari Komite Kredit Pusat.
- Metode Pengelolaan Risiko dengan Kontrak Derivatif dan Valuta Asing.
  Untuk menjaga risiko transaksi kontrak derivatif dan valuta asing, Perseroan senantiasa menjaga Posisi Devisa Netto sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Transaksi derivatif valuta asing hanya boleh dilakukan oleh Divisi *Treasury* yang memiliki keahlian dan prasarana yang lengkap untuk melakukan transaksi tersebut. Analisa risiko dan pengajuan persetujuan kepada Komite Kredit Pusat dilakukan oleh *Financial Institution Department* yang khusus bertugas menganalisa risiko transaksi *Treasury*.
  Kepada masing-masing *dealer* ditetapkan limit transaksi yang dapat dilakukan sesuai dengan senioritas dan pengalaman yang dimilikinya. Demikian pula posisi valuta asing yang terbuka (*open position*) dalam satu hari dibatasi seminimal mungkin.
- Metode Pengelolaan Risiko Harga.
  Penentuan tingkat suku bunga dana maupun kredit dilakukan oleh ALCO melalui rapat ALCO yang dilakukan secara rutin. Suku bunga dana ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat likuiditas Perseroan, suku bunga bank-bank kompetitor, suku bunga SBI dan suku bunga maksimum program penjaminan pemerintah serta *forecast* tim ALCO terhadap arah perkembangan suku bunga pasar uang.
  Setelah ditetapkan suku bunga dana yang dikehendaki, maka ditetapkan suku bunga minimum (*prime lending rate*) untuk kredit dengan menambahkan margin tertentu. Cabang-cabang diperkenankan menetapkan suku bunga untuk masing-masing debiturnya sesuai dengan tingkat risiko usaha dan jenis kredit yang diberikan, sepanjang tidak lebih rendah dari *prime lending rate*.

f. Sertifikasi Manajemen Risiko
Sebagai implementasi dari Peraturan Bank Indonesia No. 7/25/PBI/2005 yang telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomer 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifiaksi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Perseroan telah mengikutsertakan pengurus dan pejabat Perseroan dalam program sertifikasi manajemen risiko oleh lembaga yang ditunjuk.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan seluruh jajaran Komisaris dan Direksi serta sebanyak 1.886 orang pejabat dan staf telah lulus dalam program sertifikasi Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).

4. Rentabilitas (*Earnings*)

a. Faktor rentabilitas ditentukan oleh komponen-komponen berikut: *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM), biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO), perkembangan laba operasional, komposisi portofolio aset produktif dan diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya dan prospek laba operasional.

Return on Asset (ROA) dihitung berdasarkan laba sebelum pajak dalam periode satu tahun dibandingkan dengan rata-rata jumlah aset dalam periode yang sama. Laba sebelum pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp 1.630,16 miliar dan rata-rata aset sebesar Rp 130.273,86 miliar. ROA tahun 2011, 2010 dan 2009, masing-masing sebesar 2,02%, 1,76% dan 1,75%. *Return on equity* (ROE) dihitung dengan membandingkan laba bersih dalam periode satu tahun dengan rata-rata ekuitas (hanya modal inti) dalam periode yang sama. Laba bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp 1.241,43 miliar dan rata-rata modal inti sebesar Rp 12.351,16 miliar. ROE tahun 2011, 2010 dan 2009, masing-masing sebesar 14,63%, 11,62% dan 11,03%.

b. *Net Interest Margin* (NIM) diperoleh dengan membagi total pendapatan bunga bersih dalam satu tahun terhadap rata-rata aset produktif. Pendapatan bunga bersih untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp 2.565,43 miliar dan rata-rata aset produktif yang menghasilkan bunga sebesar Rp 113.576,59 miliar. NIM pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, masing-masing sebesar 4,64%, 4,59% dan 4,43%. Biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO). Biaya operasional untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp 4.803,06 miliar dan total pendapatan operasional sebesar Rp 6.349,40 miliar. BOPO perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 2011, 2010 dan 2009, masing-masing sebesar 80,26%, 83,49% dan 84,74% .

5. Likuiditas (*Liquidity*)

a. Faktor likuiditas ditentukan oleh komponen-komponen berikut: aset likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan. *Loan to Deposit Ratio* (LDR), proyeksi *cash flow* 3 bulan mendatang, ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti, kebijakan dan pengelolaan likuiditas (A*ssets and Liabilities Management* / ALMA), kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya dan stabilitas dana pihak ketiga (DPK).

b. Manajemen Perseroan senantiasa menjaga likuiditas Perseroan agar dapat memenuhi kewajiban terhadap nasabah dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum yaitu 8% untuk mata uang Rupiah (untuk posisi per 30 Juni 2012) dan 8% untuk valuta asing, serta ketentuan mengenai *Loan to Deposit Ratio* yaitu berada di antara 78%-100%.

c. *Loan to Deposit Ratio* pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar 87,83%, dengan kredit sebesar Rp 83.662,35 miliar dan dana pihak ketiga sebesar Rp 92.787,25 miliar. LDR pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, masing-masing adalah sebesar 80,36%, 74,22%, dan 73,28%. Berikut kriteria penetapan peringkat LDR :

- Peringkat 1: 50 < Rasio ≤ 80%, mencerminkan bahwa Bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.
- Peringkat 2: 80% < Rasio < 85%, mencerminkan bahwa bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin.
- Peringkat 3: 85% < Rasio < 95%, mencerminkan bahwa bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif.
- Peringkat 4: 95% < Rasio < 100%, mencerminkan bahwa bank tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.
- Peringkat 5: Rasio ≥ 100%, mencerminkan bahwa bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

d. *Maturity gap* antara kredit dan simpanan nasabah terjadi *gap* yang negatif pada *maturity* sampai dengan 1 bulan yang dikarenakan struktur pendanaan perbankan yang sebagian besar berada pada simpanan yang jatuh tempo kurang dari 1 bulan yang terdiri dari Giro. Tabungan dan sebagian besar Deposito kurang 1 bulan. Sedangkan Kredit memiliki jatuh tempo lebih bersifat jangka panjang, sehingga *gap* positif berada pada jatuh tempo diatas 3 bulan hingga 5 tahun.

6. Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar

a. Faktor sensitivitas terhadap risiko pasar ditentukan oleh komponen-komponen berikut: modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-*cover* fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan *potential loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga, modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-*cover* fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan *potential loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar dan kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.

b. Modal inti pada Juni 2012 yang dialokasikan untuk meng-*cover* risiko pasar adalah Rp 13.002,01 milliar. Modal inti yang dimiliki perseroan cukup untuk meng-*cover* kerugian akibat risiko pasar atas fluktuasi suku bunga dan nilai tukar.

Penilaian tingkat kesehatan Bank dilakukan secara triwulanan. Realisasi penilaian pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebagai berikut:

No.	Komposit	Peringkat	Analisis
1	Profil Resiko	1	Secara keseluruhan trend Risiko Komposit Bank menunjukkan kondisi yang Stabil yaitu berada pada kisaran Low.
2	Good Corporate Governance	2	Kepatuhan bank terhadap regulasi, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal (internal control) yang memadai dan efektif menjadi faktor yang sangat penting dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Good Corporate Governance di Bank.
3	Rentabilitas	2	Kemampuan Bank dalam mengelola rentabilitas dinilai memadai dengan melihat berbagai aspek sebagai berikut: • Laba Bank dapat melebihi target yang telah ditetapkan • Laba Bank dapat mendukung permodalan dengan melihat besarnya pertumbuhan Laba Ditahan Bank. • Sumber utama rentabilitas Bank berasal dari pendapatan inti (core earning) yang terdiri dari NII dan net fee income. • Komponen-komponen yang mendukung core earning Bank seperti NII dan net fee income dinilai cukup stabil dan secara umum memiliki prospek meningkat.
4	Permodalan	1	Kemampuan Bank dalam mengelola permodalan dinilai memadai dengan melihat berbagai aspek sebagai berikut: • Pengelolaan permodalan Bank disesuaikan dengan skala usaha dan kompleksitas usaha Bank. • Tingkat permodalan memadai untuk mengantisipasi semua risiko sesuai dengan profil risiko Bank, serta menunjang kepentingan ekspansi usaha Bank. • Komponen permodalan Bank bersifat permanen, mempunyai kemampuan dalam menyerap kerugian dengan baik. • Bank memiliki manajemen pengelolaan permodalan yang baik yaitu mempunyai prosedur standar dalam menilai kecukupan modalnya, serta telah melakukan stress-test yang hasilnya dapat menutupi kerugian Bank dengan baik. • Bank memiliki akses ke sumber permodalan dengan mudah, baik itu sumber permodalan yang dipupuk dari laba secara internal maupun sumber permodalan yang berasal dari eksternal.

Good Corporate Governance

Bank Indonesia telah menerbitkan peraturan untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance)* bagi bank umum pada tanggal 30 Januari 2006 dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 dan dilengkapi dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang akan mempengaruhi operasi industri perbankan dan kinerja keuangan. Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi peraturan ini dan akan terus bekerja memperbaiki kualitas GCG sehingga memenuhi kewajiban yang ditentukan dan transparansi yang menjadi keharusan.

Dalam bidang kepengurusan, persyaratan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi kewajiban peraturan tersebut, baik dari sisi jumlah, komposisi, kriteria, independensi, peran dan tanggung jawabnya, Direksi dan Komisaris mengadakan rapat secara berkala dan rapat-rapat yang dilakukan senantiasa dibuat risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Untuk menjamin terlaksananya Manajemen Risiko dan pengendalian yang lebih efektif terhadap operasi Perseroan, beberapa komite kerja telah dibentuk, yaitu:

1. Komite Kredit.

- Komite Kredit Kantor Pusat

  Bertanggung jawab atas pemberian dan persetujuan kredit yang diajukan ke tingkat Direksi. Dewan Komisaris menentukan wewenang pemberian kredit kepada Anggota Direksi yang ditunjuk sebagai Komite Kredit Direksi (KKD) melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.

- Komite Kredit Kantor Cabang

  Bertanggung jawab atas pemberian dan persetujuan kredit dalam batasan wewenang Pimpinan Cabang yang ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi.

  Pemberian kredit yang berjumlah diatas batas wewenang pemberian kredit cabang wajib terlebih dahulu diajukan kepada KKD Kantor Pusat melalui Divisi Perkreditan.

2. **Komite *Aset & Liability* (ALCO).**
   Komite ALCO terdiri dari Direktur Bidang dan Kepala Divisi/Biro yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko likuiditas dan risiko pasar, termasuk risiko suku bunga dan nilai tukar, serta memonitor rasio-rasio keuangan penting.

   Komite ALCO menyelenggarakan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota sedikitnya sekali dalam sebulan untuk membahas kondisi pasar dan perubahan-perubahan yang berdampak terhadap keuangan Perseroan, khususnya sumber-sumber dan penggunaan dana, serta rasio-rasio keuangan.
   Kinerja Keuangan tahun berjalan dianalisa mengacu kepada proyeksi yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Perseroan.

3. **Komite Manajemen Risiko.**
   Komite Manajemen Risiko melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama meliputi hal-hal yang terkait dengan tentang hal-hal yang terkait dengan penyusunan kebijakan Manajemen Risiko, penyesuaian dan penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko Perseroan secara keseluruhan. Komite Manajemen Risiko (KMR) terdiri dari Anggota Tetap yaitu Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, Direktur Bidang Perkreditan, Direktur *Treasury*, Direktur *International Banking* dan *Operational Support* dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Anggota Tidak Tetap yaitu para Kepala Divisi (Biro) terkait.

4. **Komite Audit.**
   Bertanggung jawab untuk mengkaji seluruh aspek pengawasan dan untuk memberikan pendapat serta rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Audit memiliki independensi dalam mengevaluasi permasalahan yang terkait dengan *policy* dan mengantisipasi akibat atau risiko yang mungkin timbul sehingga membutuhkan perhatian khusus. Komite Audit juga memastikan bahwa manajemen memahami dan melaksanakan peraturan serta kebijakan yang berlaku termasuk mengawasi persiapan pembuatan laporan keuangan dan independensi dari auditor eksternal.
   Komite Audit terdiri dari 1 orang ketua yang merupakan Komisaris Independen Perseroan serta 2 orang anggota.

5. **Komite Pemantau Risiko.**
   Bertindak mewakili Dewan Komisaris dan bertanggung jawab serta berfungsi memantau dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko bank.
   Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah mengevaluasi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank serta mengevaluasi dan memberikan masukan atas rekomendasi dari Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

6. **Komite Remunerasi dan Nominasi.**
   Bertugas merancang dan mengevaluasi remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif serta menominasikan calon/ kandidat pengurus Bank.
   Komite ini juga berwenang menyampaikan usulan paket remunerasi anggota Direksi dan Komisaris kepada Dewan Komisaris serta memberikan masukan mengenai remunerasi calon Anggota Direksi pada Dewan Komisaris untuk diputuskan dalam RUPS.

7. **Komite Manajemen Risiko.**
   Bertugas memberikan rekomendasi kepada Diresi, yang paling kurang meliputi; Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko; Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud; Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal (*irregularities*).

8. **Komite Pengarah teknologi Informasi**
   Bertugas memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank; antara lain : kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi; kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*), dan lain-lain.

Transparansi

Perseroan menyadari pentingnya transparansi dan penyediaan informasi yang jelas, cepat dan konsisten terutama untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh ketentuan Bank Indonesia, otoritas pasar modal dan Bursa Efek dan otoritas lainnya. Untuk memberikan informasi secara berkala mengenai kinerja, strategi usaha dan data keuangan, Direksi Perseroan menunjuk *Corporate Secretary* dan *Investor Relations Officer* yang melayani pemegang saham publik serta investor asing.

Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan dipublikasikan secara triwulanan sesuai ketentuan yang berlaku dan kewajiban untuk menyelenggarakan *Public Expose* dilakukan sedikitnya sekali dalam setahun. Sebagai bagian dari keterbukaan Perseroan melakukan "*Roadshow*" secara berkala bersama perusahaan sekuritas terkemuka dalam maupun luar negeri.

Belanja Modal *(Capital Expenditure)*

Penggunaan belanja modal terutama ditujukan untuk mendanai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana pendukung operasional, perluasan/perbaikan jaringan kantor secara umum, teknologi informasi, serta saluran distribusi lainnya. Realisasi belanja modal selama lima tahun terakhir tersaji dalam tabel di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2012	2011	2010	2009	2008	2007
Capital expenditure	154.522	261.803	367.304	298.127	318.837	461.118

Berdasarkan Rencana Bisnis tahun 2012 Perseroan menganggarkan belanja modal sekitar Rp 1 triliun. Jumlah terbesar untuk penambahan kantor baru, disusul untuk pengembangan teknologi informasi dan selebihnya untuk aset tetap lainnya. Tetapi, sampai dengan Juni 2012, belanja modal yang terealisasi baru sebesar Rp 180,4 miliar terutama disebabkan belum terealisasinya rencana pembukaan kantor baru.

Capital expenditure seluruhnya menggunakan sumber pendanaan Rupiah yang tidak perlu dilakukan transaksi lindung nilai. Pembelian barang modal yang dilakukan dalam batas yang sesuai dengan kemampuan dan arus kas Perseroan sehingga tidak mengganggu kinerja keuangan Perseroan. Investasi dalam perluasan jaringan kantor dan pengembangan teknologi diharapkan akan meningkatkan volume usaha Perseroan serta meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan nasabah untuk menunjang kinerja Perseroan.

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Dalam kegiatan operasinya Perseroan membutuhkan likuiditas yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi baik pemberian kredit, penanaman dalam surat-surat berharga, transaksi antar bank, pembayaran bunga dan lain-lain. Sesuai Laporan Arus Kas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012, kebutuhan likuiditas diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut:

- Pendapatan bunga, provisi dan komisi yang diterima Rp 5.382,40 milliar
- Kenaikan simpanan Rp 7.038,71 milliar
- Penurunan efek-efek Rp 2.410,05 milliar
- Kenaikan simpanan dari bank lain Rp 3.265,98 milliar
- Penurunan efek yang dijual dengan janji dibeli kembali Rp 602,50 milliar

Peningkatan arus kas dari aktivitas operasi berupa pendapatan bunga yang terus meningkat menunjukkan kemampuan Perseroan dalam mengelola arus kas untuk menjaga likuiditas. Di samping itu untuk meningkatkan pertumbuhan aset Perseroan juga memperoleh likuiditas berupa simpanan dari pihak ketiga, penurunan efek-efek dan penerbitan surat berharga.

Sumber pendanaan Perseroan berasal dari berbagai sumber. Yang terutama adalah berasal dari Deposito Berjangka, Tabungan dan Giro. Disamping itu dengan semakin berkembangnya sektor keuangan di dalam negeri dan kepercayaan dunia luar terhadap Perseroan pada bulan April 2009, Perseroan kembali memperoleh pinjaman dari DEG sebesar USD 30 juta dan dari *Barclays Bank Plc.*, London sebesar USD 50 juta dengan jangka waktu masing-masing 5 tahun. Pada bulan Februari 2011, Perseroan memperoleh pinjaman luar negeri jangka panjang dari PROPARCO sebesar USD 25 juta untuk jangka waktu 7 tahun.

Pada tahun 2008, Perseroan telah menyelesaikan penerbitan Obligasi Subordinasi sebesar Rp 1.500 miliar dan pada tahun 2010 Perseroan kembali menerbitkan Obligasi Subordinasi sebesar Rp 2.460 miliar yang telah mendukung peningkatan permodalan Perseroan disamping memperbaiki *mismatch* dari sumber-sumber dan penggunaan dana jangka panjang.

Sumber-sumber pendanaan Perseroan selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

		Juni 2012		2011		2010		2009	
No.	Produk	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Giro	15.572.153	13,85	16.108.374	15,71	14.768.795	16,58	12.084.495	18,91
2.	Tabungan	40.697.496	36,20	31.801.385	31,02	22.424.183	25,17	13.616.201	21,30
3.	Deposito	36.517.596	32,49	37.838.773	36,90	38.086.742	42,74	30.533.791	47,77
4.	Simpanan dari Bank Lain	8.581.204	7,63	5.315.229	5,19	3.567.326	4,00	2.259.800	3,53
5.	Pinjaman yang diterima	3.269.645	2,91	2.985.155	2,91	3.582.389	4,02	1.631.918	2,55
6.	Surat Berharga yang Diterbitkan + Obligasi Subordinasi	7.774.598	6,92	8.483.315	8,27	6.675.953	7,49	3.795.616	5,94
	Jumlah	**112.412.692**	**100,00**	**102.532.231**	**100,00**	**89.105.388**	**100,00**	**63.921.821**	**100,00**

Penerimaan utama untuk aktivitas operasional terutama diperoleh dari simpanan masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebesar Rp 7.038,71 miliar, Rp 10.468,81 miliar, Rp 19.045,84 miliar dan Rp 10.195,96 miliar. Sedangkan pengeluaran utama aktivitas operasional terutama digunakan untuk kredit masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebesar Rp 12.559,84 miliar, Rp 14.089,60 miliar, Rp 14.831,89 miliar dan Rp 5.705,80 miliar.

Penerimaan utama untuk aktivitas investasi terutama berasal dari hasil penjualan aset tetap masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebesar Rp 5,02 miliar, Rp 9,77 miliar, Rp 38,53 miliar dan Rp 10,22 miliar. Sedangkan untuk pengeluaran utama aktivitas operasional terutama berasal dari perolehan aset tetap masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 sebesar Rp 154,52 miliar, Rp 261,80 miliar, Rp 367,30 miliar dan Rp 295,99 miliar.

Penerimaan utama untuk aktivitas pendanaan terutama berasal dari penambahan modal disetor masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 tidak ada penambahan modal. Pada tanggal 31 Desember 2009 terdapat penambahan modal disetor sebesar Rp 1.500,94 miliar. Sedangkan untuk pengeluaran aktivitas pendanaan terutama berasal dari penerimaan (pembayaran) pinjaman yang diterima masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, Desember 2010 dan Desember 2009 sebesar Rp 284,49 miliar, (Rp 597,23 miliar), Rp 1.950,47 miliar dan (Rp 1.559,69 miliar).

Tabungan merupakan sumber dana yang paling dominan dan mencapai 36,20% dari total pendanaan Perseroan. Selama semester I 2012 ini, dari sisi funding tabungan naik secara signifikan yang mengakibatkan kenaikan total simpanan sebesar Rp 7.038,71 miliar atau meningkat 8,21%dari Rp 85.748,53 miliar pada tanggal 31 Desember 2011. Kenaikan simpanan ini berakibat juga kepada peningkatan kredit yang naik cukup tinggi yaitu Rp 12.301,51 miliar dari Rp 69.079,31 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp 81.380,82 miliar.

SESUAI DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 12/19/PBI/2010 PERIHAL GWM RUPIAH BANK UMUM, GWM UTAMA RUPIAH PERSEROAN YANG DIWAJIBKAN PER POSISI JUNI 2012 ADALAH 8%. PERSEROAN TELAH MEMENUHI KEWAJIBANNYA DENGAN MENYEDIAKAN GWM 8,07%.

D. PROSPEK USAHA

Fundamental ekonomi makro Indonesia yang cukup kuat, di samping situasi politik dan sosial yang stabil, mendukung prospek usaha perbankan di dalam negeri yang positif ke depan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2013 mencapai 6,8%, lebih tinggi dari realisasi Januari sampai Juni 2012 yang sebesar 6,3% maupun sepanjang 2011 yang tercatat 6,5% (sumber: Kemenkeu, RAPBN 2013 dan Berita Resmi Statistik BPS).

Indikator	**Jun-2012** (Real)	**2012 (Proyeksi)**					**2013 (Proyeksi)**				
		APBN	**APBN Revisi**	**BI**	**IMF**	**World Bank**	**RAPBN**	**BI**	**IMF**	**World Bank**	**ADB**
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,3	6,7	6,5	6,1-6,5	6,1	6,0	6,8-7	6,3-6,7	6,6	6,4	6,3-6,7
Inflasi *YoY* (%)	4,53	5,3	7	4,5 ± 1	7,47	5,0	4,4-5,4	4,5±1 (4,8%)	5,14	5,1	-
Kurs rata-rata (Rp/US$)	9.203	8.800	9.000	8.600-9.000	-	-	9.000-9.300	-	-	-	-
Suku bunga acuan* (%)	5,8	6,5	5,0	-	-	-	4,5-5,5	-	-	-	-

Dari berbagai sumber, *) APBN menggunakan suku bunga SPN 3 bulan, data lain menggunakan BI Rate

Kekuatan ekonomi domestik termasuk konsumsi swasta/rumah tangga dan investasi menjadi motor penopang target pertumbuhan tersebut kendati ketidakpastian masih mewarnai perekonomian global akibat belum akan usainya krisis di Eropa. Prospek yang positif tadi juga turut didukung tercapainya *investment grade* yang dapat menarik investasi asing langsung sehingga diharapkan berdampak pada meningkatnya permintaan kredit dan penghimpunan dana serta aktivitas ekonomi secara umum.

Kondisi tersebut akan kian mendorong sektor riil untuk terus tumbuh. Kenaikan impor yang terjadi belakangan ini, berdasarkan golongan penggunaan barang, juga berasal dari impor barang modal serta bahan baku/penolong yang diharapkan menjadi indikasi meningkatnya kegiatan dunia usaha dan investasi secara umum di berbagai sektor terutama sektor produktif.

Melihat realisasi pada tahun ini, pertumbuhan ekonomi tersebut dari sisi pengeluaran dikontribusi oleh Konsumsi Rumah Tangga (53,5%) dan Investasi (32,9%). Hal ini sejalan dengan realisasi penanaman modal yang menurut data BKPM di akhir semester I-2012 mencapai sekitar Rp147 triliun naik 22,7% *yoy* atau lebih dari separuh total target sepanjang 2012 yang ditetapkan Rp283,5 triliun. Secara sektoral, pertumbuhan tertinggi pada triwulan II-2012 terjadi pada sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Perdagangan; disusul sektor Konstruksi. Sedangkan sejak 2005, selain keempat sektor tersebut, Listrik, Gas dan Air Bersih juga termasuk yang tumbuh secara rata-rata di atas 7% per tahun. Sektor yang dinilai paling diminati investor ke depan adalah Manufaktur (sektor kimia dan mineral non-logam); Pertambangan; infrastruktur (Konstruksi; Listrik, Gas dan Air Bersih), serta agroindustri (industri yang terkait pertanian dalam arti luas). (sumber: BPS dan BKPM).

Perkembangan Pertumbuhan PDB per Sektor Ekonomi

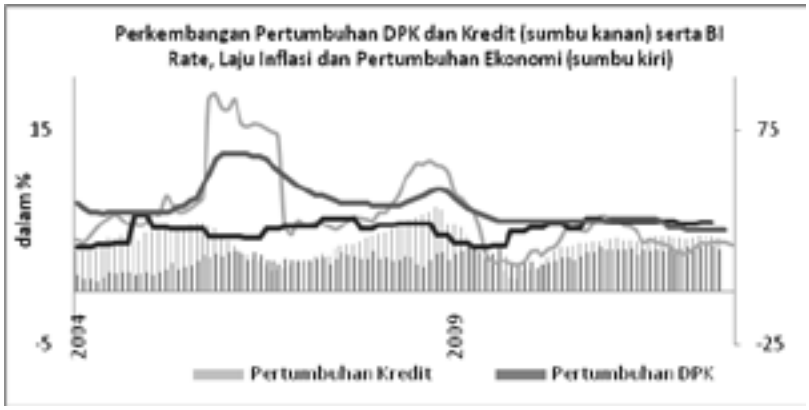
LAPANGAN USAHA	2010				2011				2012		CAGR 2005-2011
	Tw. I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw. I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw. I	Tw.II	
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (*yoy)*	3,0	3,1	1,8	3,8	3,4	3,9	2,7	1,9	3,9	3,7	3,5
qoq growth	18,2	3,4	6,0	-20,3	18,1	3,7	5,0	-20,5	20,9	2,4	2,0
Pertambangan dan Penggalian (*yoy*)	3,1	4,0	2,8	4,2	4,6	0,8	0,3	-0,3	2,9	3,1	2,4
qoq growth	-2,3	2,5	3,6	0,6	-2,0	-1,0	2,9	-0,1	0,7	-0,6	0,5
Industri Pengolahan *(yoy)*	3,7	4,4	4,1	5,3	5,0	6,1	6,6	6,7	5,7	5,4	4,3
qoq growth	-0,9	2,1	2,6	1,4	-1,2	3,1	3,1	1,4	-2,0	2,7	1,1
Listrik, Gas & Air Bersih *(yoy)*	8,2	4,7	3,2	4,3	4,2	3,9	5,2	5,8	6,1	5,9	8,1
qoq growth	-1,9	4,6	0,1	1,7	-1,9	4,0	1,3	2,2	-1,5	4,6	2,0
Konstruksi *(yoy)*	7,1	6,9	6,4	6,7	5,3	7,4	6,4	7,8	7,3	7,3	7,5
qoq growth	-2,4	2,1	4,3	2,5	-3,6	4,2	3,1	3,9	-4,1	4,4	1,9
Perdagangan, Hotel & Restoran *(yoy)*	9,4	9,7	8,8	8,4	7,9	9,6	10,1	10,2	8,5	8,9	7,2
qoq growth	0,1	3,0	3,9	0,7	-0,2	4,8	4,4	1,9	-1,8	5,2	1,8
Pengangkutan dan Komunikasi *(yoy)*	12,0	12,9	13,3	15,5	13,8	10,7	9,5	9,2	10,3	10,1	13,9
qoq growth	1,5	5,0	5,1	3,7	-0,1	2,1	3,6	2,7	1,3	1,9	3,3
Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan *(yoy)*	5,3	6,0	6,3	6,3	7,3	6,9	7,0	6,7	6,3	7,0	6,6
qoq growth	2,3	1,3	1,7	1,3	2,7	1,0	1,8	1,0	2,3	1,7	1,6
Jasa-jasa *(yoy)*	4,6	5,3	6,4	7,5	7,0	5,7	7,8	6,5	5,5	5,7	6,2
qoq growth	0,2	3,7	1,1	2,5	-0,4	2,4	3,1	1,2	-1,3	2,7	1,6
Produk Domestik Bruto *(yoy)*	**5,7**	**6,2**	**5,8**	**6,9**	**6,5**	**6,5**	**6,5**	**6,5**	**6,3**	**6,4**	**5,8**
qoq growth	**1,9**	**2,8**	**3,5**	**-1,4**	**1,5**	**2,9**	**3,5**	**-1,3**	**1,4**	**2,8**	**1,5**
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas	**6,2**	**6,6**	**6,2**	**7,4**	**6,9**	**6,9**	**6,9**	**7,1**	**6,7**	**6,9**	**6,4**

Sumber: BPS

Ket: CAGR = rata-rata pertumbuhan tahunan (yoy) setiap tahun selama periode 2005-2011 tersebut

Pertumbuhan kegiatan ekonomi tadi diharapkan akan menstimulasi permintaan kredit tetap tumbuh di tahun depan. Data Bank Indonesia sampai dengan Juli 2012, kredit bank umum nasional tercatat tumbuh cukup tinggi 25%. Berdasarkan sektornya, penyaluran terbesar adalah ke sektor Perdagangan (porsi 20% dari total kredit), Manufaktur (16%) dan Lain-lain/Bukan Lapangan Usaha (30%) yang mana masing-masing tumbuh di atas 28% (*yoy*). Sedangkan empat sektor ekonomi penerima kredit terbesar dari Perseroan adalah Perdagangan, Rumah Tangga, Perantara Keuangan, dan Manufaktur. Perseroan menyalurkan kredit terutama pada sektor-sektor yang dinilai bagus dan kompetensinya dikuasai oleh sumber daya manusia yang ada. Perseroan akan mencari peluang di sektor-sektor potensial dan menjanjikan pertumbuhan yang sehat.

Menurut penggunaannya, pertumbuhan kredit perbankan umum nasional yang tertinggi terjadi pada Kredit Investasi, disusul Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumsi secara berturut-turut sebesar 30%, 27% dan 19%. Komposisi penyaluran kredit Bank juga selaras dengan tren nasional tersebut. Per akhir semester I-2012, Kredit Investasi tumbuh 29,8% dan menyumbang 27% total kredit Bank. Kredit Modal Kerja meningkat 28,7% (porsi 50%) dan Kredit Konsumsi naik tipis 9,9% (porsi 23%) (sumber: BI).

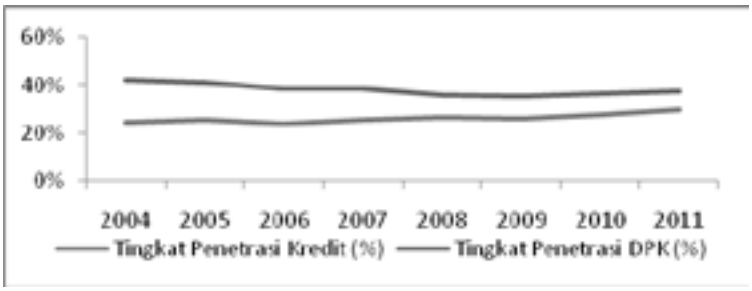


Sumber: Diolah dari BI dan BPS

Fundamental ekonomi makro yang positif tadi juga mendukung kondisi likuiditas pasar diperkirakan akan tetap baik. Arus masuk investasi ke Indonesia, terutama dalam bentuk investasi langsung (FDI), diperkirakan masih berlanjut. Likuiditas perekonomian tersebut diperkirakan akan mendukung pertumbuhan dana perbankan pada tahun depan. DPK nasional menurut data per Juli 2012 naik sekitar 20%. Kebijakan Bank Indonesia tentang kewajiban repatriasi devisa hasil ekspor dan pinjaman luar negeri diharapkan efektif meningkatkan suplai DPK valas bagi perbankan nasional.

Potensi pasar nasional masih sangat luas bagi kegiatan penyaluran kredit ataupun penghimpunan dana perbankan. Rasio Kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio DPK terhadap PDB sampai akhir 2011 tercatat masing-masing 30% dan 37%. Dari sisi profitabilitas, Net Interest Margin (NIM) maupun Return on Asset (ROA) perbankan nasional selama bertahun-tahun menjadi yang tertinggi di kawasan ASEAN maupun Asia. Di tengah upaya otoritas untuk menekan marjin, NIM Bank per Juli 2012 tercatat 4,17% dan ROA 2,19%. (sumber: BI, BPS dan Perseroan).

Grafik Rasio Kredit dan DPK masing-masing terhadap PDB Nasional



Sumber: BI dan BPS

Inflasi pada tahun 2013 oleh pemerintah diperkirakan 4,4%-5,4%. Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebagai indikator suku bunga jangka pendek diproyeksikan 4,5%-5,5% (sumber: Kemenkeu, RAPBN 2013). Suku bunga kebijakan moneter, BI Rate, diproyeksikan tidak banyak berubah. BI diperkirakan memilih jalan tengah antara menaikkan suku bunga acuan untuk menarik dana asing serta menguatkan rupiah atau menurunkan suku bunga acuan untuk mendorong kredit dan pertumbuhan ekonomi. Tren suku bunga kredit yang cenderung turun dan suku bunga dana yang kurang lebih stabil menyebabkan marjin diperkirakan akan tertekan turun. Konsekuensi kondisi ini adalah Perseroan akan terdorong untuk terus meningkatkan penyaluran kredit guna meningkatkan pendapatan bunga bersih.

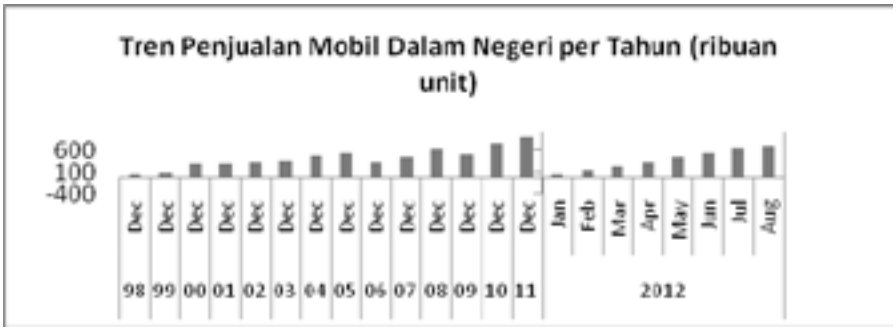
Relatif terkendalinya inflasi mendukung kestabilan daya beli masyarakat. Tren suku bunga kredit yang cenderung menurun dan suku bunga DPK yang stabil di level cukup rendah mendukung pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Kondisi ini diharapkan meningkatkan permintaan akan kredit konsumsi terutama yang menyasar pada segmen nasabah ritel. Kinerja industri otomotif dan semen juga mengindikasikan pasar otomotif dan konstruksi masih tumbuh positif. Sehingga, segmen yang menjadi target produk KPM dan KPR Bank juga berpotensi untuk terus meningkat.

Tabel Konsumsi Semen Nasional (dalam ton)

Area	Jan-Aug 2012	Jan-Aug 2011	growth (yoy)
Jakarta	3,207,483	3,025,229	6.02%
Banten	2,030,276	1,743,273	16.46%
Jawa Barat	4,997,281	4,441,052	12.52%
Jawa Tengah	3,816,070	3,339,706	14.26%
Yogyakarta	513,188	485,560	5.69%
Jawa Timur	4,296,595	3,718,259	15.55%
Total Jawa	18,860,893	16,753,079	12.58%
Sumatera	7,578,181	7,123,395	6.38%
Kalimantan	2,581,785	2,147,580	20.22%
Sulawesi	2,492,746	2,198,042	13.41%
Nusa Tenggara	1,991,450	1,704,467	16.84%
Maluku+ Papua	799,144	545,977	46.37%
Total Indonesia	34,304,199	30,472,540	12.57%

Sumber: Indonesia Cement Association

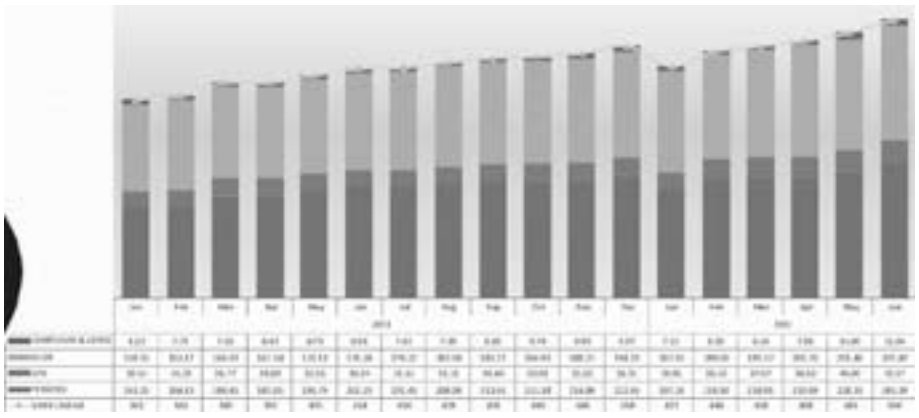
Pertumbuhan industri otomotif terlihat dari tingginya permintaan konsumen yang menyebabkan terjadinya antrian pemesanan mobil (*indent*). Meski ada potensi perlambatan penjualan ke konsumen akhir karena imbas kondisi ekonomi global belakangan ini, pertumbuhan industri otomotif dalam jangka menengah-panjang dinilai masih menjanjikan. Tren struktur demografi Indonesia yang kian didominasi oleh penduduk berusia muda dan termasuk ke dalam kalangan menengah merupakan pasar potensial bagi segmen perbankan ritel baik untuk jenis kredit konsumsi maupun pinjaman usaha produktif.



Sumber: Gaikindo
Ket: data 2012 adalah penjualan kumulatif (ytd) dari bulan-bulan dalam tahun berjalan

Potensi pasar pinjaman produktif termasuk kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Porsi kredit UMKM terhadap tota kredit perbankan nasional baru sekitar 20%. Sedangkan dalam portofolio kredit Perseroan, kredit Small and Medium Business (SMB) menjadi produk yang dominan dengan porsi 36% dari total pinjaman yang disalurkan.

Perkembangan Kredit UMKM per kelompok Bank (triliun rupiah)



Sumber: diolah dari BI

Rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun depan diperkirakan Rp 9.300 per dollar AS atau lebih lemah dibandingkan rata-rata semester I-2012 atau dibandingkan selama 2011 (sumber Kemenkeu, RAPBN 2013, BI dan *yahoo finance*). Kurs rupiah yang lebih lemah diperkirakan akan bisa menstimulasi kegiatan ekspor nasional dengan asumsi perekonomian dunia terus membaik dan pada tahun depan mampu tumbuh lebih tinggi dari tahun ini. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan perekonomian global pada tahun 2013 tumbuh 3,9% dari tahun ini yang diprediksi 3,5% (sumber: World Economic Outlook IMF). Dengan asumsi tersebut, layanan *trade finance* dan bisnis *international banking* secara umum diharapkan mampu tetap tumbuh positif.

E. MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN DAN PENGENDALIAN INTERN

Sistem manajemen risiko Perseroan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum,sesuai Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/23/DPNP, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2011, dan dokumen terkait lainnya dari Komite Basel tentang Pengawasan Perbankan Banking, terutama sesuai dengan Basel II, maka Perseroan melaksanakan pengawasan dan audit intern dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Pembahasan Manajemen Risiko Perseroan secara lengkap terdapat pada Bab VIII Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan.

V. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan usahanya Perseroan tidak lepas dari risiko yang ada. Risiko-risiko yang material yang dihadapi Perseroan yang dapat mempengaruhi pendapatan maupun permodalan Perseroan, telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja adalah sebagai berikut:

A. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN

1. RISIKO KREDIT

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan, sebagian besar dari aset produktif yang dimiliki Perseroan adalah dalam bentuk pemberian kredit kepada para debitur. Risiko kredit dikaitkan dengan ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Semakin besar porsi kredit yang bermasalah (*Non Performing Loans* atau NPL) karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjaman yang diberikan, menurunkan pendapatan dan permodalan Perseroan. Semakin tinggi tingkat NPL, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan kerugian kredit, yang akan menurunkan keuntungan Perseroan. Dimana apabila terjadi dalam jumlah yang cukup material akan mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan Perseroan dan mempengaruhi tingkat kesehatan Perseroan. Untuk posisi 30 Juni 2012, segmen industri terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah bidang komersial terutama bidang usaha perdagangan/distribusi serta kredit ke sector konsumsi terutama Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Mobil .

2. RISIKO LIKUIDITAS

Sebagian besar keperluan pendanaan Perseroan diperoleh melalui sumber-sumber pendanaan jangka pendek, sedangkan sebagian besar kredit yang disalurkan berjangka menengah dan panjang. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa menganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Dengan adanya kesenjangan antara sumber pendanaan dengan pemberian kredit maka terdapat Risiko Likuiditas yang menyebabkan Perseroan mungkin tidak dapat memenuhi komitmennya kepada nasabah (deposan) dan pihak lainnya. Ketidakmampuan Perseroan memenuhi komitmen pada nasabah atau pihak lain akan menyebabkan turunnya kepercayaan Nasabah dan penarikan dana secara besar-besaran oleh Nasabah (*rush*) yang akan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
Ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) sesuai ketentuan Bank Indonesia akan menyebabkan dikenakannya denda yang cukup besar atau jika hal ini terjadi secara berulang akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kesehatan dan dimasukkannya Perseroan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia.

3. RISIKO PASAR

Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portfolio yang dimiliki Perseroan yang dapat merugikan Perseroan (*adverse movement*). Variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivatif (produk turunan) dari kedua jenis risiko tersebut. Risiko pasar melekat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti kegiatan *treasury* dan investasi dalam surat-surat berharga dan pasar uang, penyediaan dana, kegiatan pendanaan dan penerbitan surat hutang. Risiko yang terjadi akibat perubahan suku bunga dan harga pasar surat-surat berharga akan menurunkan pendapatan Perseroan dan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Risiko pasar ini juga mencakup risiko-risiko antara lain:

a. Risiko Tingkat Bunga
   Risiko tingkat bunga adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar portfolio aset akibat perubahan tingkat bunga di pasar uang. Komposisi portofolio termasuk instrumen aset, pasiva dan rekening administratif cukup sensitif terhadap tingkat bunga. Karena sumber-sumber dan penggunaan dana bank seperti deposito pada bank lain, investasi dalam surat berharga, pinjaman, deposito berjangka, pinjaman jangka panjang dan kewajiban-kewajiban pasar uang lainnya memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka perubahan-perubahan pada tingkat bunga mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan bunga bersih. Disamping itu terjadinya kenaikan tingkat suku bunga yang signifikan akan menurunkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sehingga berdampak pada meningkatnya NPL Perseroan.

b. Risiko Valuta Asing
   Sebagai bank devisa, Perseroan memiliki aset dan kewajiban dalam valuta asing, sehingga nilai dari aset dan kewajiban tersebut selalu terkait dengan perubahan kurs valuta asing terhadap Rupiah. Apabila terjadi perubahan pada kurs mata uang asing terhadap Rupiah pada saat Perseroan memiliki posisi mata uang asing yang kurang menguntungkan akan menimbulkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Oleh karena itu kekurang hati-hatian dalam memprediksi perubahan nilai tukar dan mempertahankan keseimbangan jumlah aset dan kewajiban dana valuta asing akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Perseroan.

4. RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.
Sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank maka dalam mengelola risiko operasional termasuk pula pengelolaan risiko lainnya yaitu:

a. Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Adanya risiko hukum yang terjadi pada perseroan akan meningkatkan biaya yang pada akhirnya akan menurunkan kinerja Perseroan.
b. Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank Perseroan mengelola risiko reputasi. Sebagai lembaga kepercayaan publik, Perseroan wajib memberikan perhatian khusus terhadap potensi timbulnya Risiko Reputasi.
c. Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, misalnya seperti pada penetapan strategi investasi yang kurang tepat misalnya dalam melakukan penyertaan modal atau mengakuisisi perusahaan lain akan mengakibatkan peningkatan biaya dan/atau penurunan pendapatan yang akan berpengaruh negatif terhadap keuntungan Perseroan.
d. Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan Bank Indonesia atau Bapepam dan LK dan/atau keterlambatan dalam pelaporan akan menyebabkan dikenakannya denda yang cukup besar terhadap Perseroan atau dibatasinya kegiatan usaha Perseoan atau turunnya reputasi Perseroan yang akan berpengaruh secara negatif terhadap kinerja Perseroan.

Ketidak berhasilan Perseroan dalam menangani risiko operasional yang timbul akan menyebabkan terjadinya kerugian secara finansial maupun non finansial. Kerugian finansial dapat berupa pengenaan denda oleh regulator, fraud, dan tuntutan hukum. Kerugian non finansial dapat berupa menurunnya reputasi dan mengurangi kepercayaan nasabah terhadap Perseroan.

5. RISIKO TEKNOLOGI

Dengan semakin ketatnya persaingan dalam industri perbankan, teknologi merupakan salah satu basis keunggulan persaingan suatu bank. Dengan teknologi yang mendukung, kalangan perbankan mampu menciptakan produk baru dan meningkatkan mutu pelayanan serta kenyamanan kepada nasabah yang semakin kritis dalam menilai kualitas pelayanan bank. Apabila Perseroan tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka hal ini akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada nasabah yang pada gilirannya akan menurunkan daya saing dan kinerja Perseroan.

6. RISIKO PERSAINGAN PANGSA PASAR

Sejalan dengan perkembangan industri perbankan yang pesat terutama dengan masuknya Investor asing yang menguasai mayoritas saham perbankan Indonesia. Perseroan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Masing-masing bank berusaha mempertahankan dan memperluas pangsa pasar dengan memberikan pelayanan yang prima kepada para nasabah dan calon nasabah dalam hal tingkat suku bunga yang ditawarkan dan keunggulan produk-produk lainnya. Kegagalan Perseroan dalam mengembangkan produk yang sesuai kebutuhan nasabah penetapan pricing yang kompetitive dan meningkatkan pelayanan untuk menjaga loyalitas nasabah maupun menarik nasabah baru akan menurunkan portfolio simpanan, pinjaman atau pangsa pasarnya yang pada gilirannya akan menurunkan kinerja Perseroan.

7. RISIKO MAKRO EKONOMI

Industri perbankan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perekonomian nasional maupun internasional. Perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan seperti penurunan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kenaikan suku bunga akan mempengaruhi kegiatan usaha perbankan di dalam penghimpunan dana, pemberian kredit, pengembalian pokok kredit dan bunganya, serta aktivitas lainnya yang berdampak negatif pada pendapatan Perseroan.

8. RISIKO PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Industri perbankan memperoleh pengawasan yang cukup ketat dari pemerintah karena kegiatan-kegiatannya banyak menyangkut kepentingan umum. Pengawasan yang ketat ini tercermin dari banyaknya peraturan-peraturan Pemerintah dan Bank Indonesia yang mengatur penyelenggaraan kegiatan perbankan dan senantiasa dilakukan pembaharuan dari waktu ke waktu. Perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam industri perbankan dari waktu ke waktu ini akan mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha Perseroan karena menuntut dilakukannya penyesuaian-penyesuaian tata cara pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut akan menimbulkan kerugian atau dikenakan sanksi yang berdampak negatif terhadap *performance* Perseroan.

9. RISIKO ANAK PERUSAHAAN

Perseroan telah melakukan manajemen risiko secara terkonsolidasi dengan 3 perusahaan anak, sebagai berikut :

- PT Clipan Finance Indonesia Tbk
- PT Verena Multi Finance Tbk. (d/h PT Verena Oto Finance Tbk.)
- PT Bank Panin Syariah (d/h Bank Harfa)

Risiko-risiko yang material yang dihadapi Anak-anak Perusahaan Perseroan yang dapat mempengaruhi pendapatan maupun permodalan, telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja adalah sebagai berikut:

a. PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFI):

1. Risiko Kredit

CFI yang bergerak di bidang jasa pembiayaan aktif dalam pemberian pembiayaan kepada para nasabah. Semakin besar porsi pembiayaan yang bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjaman yang diberikan, menurunkan pendapatan dan permodalan CFI. Semakin tinggi tingkat jumlah pembiayaan bermasalah, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan kerugian aktifa produktif, yang akan menurunkan keuntungan.

2. Risiko Pasar

Sebagai lembaga pembiayaan CFI menghadapi risiko pasar, khususnya Risiko Tingkat Bunga. Karena sumber-sumber dan penggunaan dana CFI seperti penerbitan surat berharga, pinjaman bank, pembiayaan jangka menengah dan panjang, investasi dalam surat berharga dan deposito berjangka memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka perubahan-perubahan pada tingkat bunga dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan bunga bersih. Disamping itu terjadinya kenaikan tingkat suku bunga yang signifikan akan menurunkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sehingga berdampak pada meningkatnya pembiayaan bermasalah CFI.

3. Risiko Operasional

Risiko Operasional yang dihadapi CFI meliputi risiko lainnya yaitu risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategik berpotensi muncul bilamana ada faktor penyebabnya yaitu ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba usaha. Disamping itu, adanya faktor penyebab risiko operasional secara umum akan mengakibatkan terganggunya kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah dan pada gilirannya akan menurunkan kinerja CFI.

b. PT Verena Multi Finance Tbk. (d/h PT Verena Oto Finance Tbk.) (VMF) :

1. Risiko Kredit

VMF yang bergerak di bidang jasa pembiayaan aktif dalam pemberian pembiayaan kepada para nasabah. Semakin besar porsi pembiayaan yang bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjaman yang diberikan, menurunkan pendapatan dan permodalan VMF. Semakin tinggi tingkat jumlah pembiayaan bermasalah, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan kerugian aktifa produktif, yang akan menurunkan keuntungan.

2. Risiko Pasar

Sebagai lembaga pembiayaan VMF menghadapi risiko pasar, khususnya Risiko Tingkat Bunga. Karena sumber-sumber dan penggunaan dana VMF seperti penerbitan surat berharga, pinjaman bank, pembiayaan jangka menengah dan panjang, investasi dalam surat berharga dan deposito berjangka memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka perubahan-perubahan pada tingkat bunga dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan bunga bersih. Disamping itu terjadinya kenaikan tingkat suku bunga yang signifikan akan menurunkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sehingga berdampak pada meningkatnya pembiayaan bermasalah VMF.

3. Risiko Operasional

Risiko Operasional yang dihadapi VMF meliputi risiko lainya yaitu risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategik berpotensi muncul bilamana ada faktor penyebanya yaitu ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba usaha. Disamping itu, adanya faktor penyebab risiko operasional secara umum akan mengakibatkan terganggunya kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah dan pada gilirannya akan menurunkan kinerja VMF.

c. PT Bank Panin Syariah (BPS):

1. Risiko Kredit

BPS yang bergerak di bidang jasa perbankan Syariah dalam keadaan usaha yang normal akan aktif dalam pemberian pembiayaan kepada para nasabah. Semakin besar porsi kredit yang bermasalah (*Non Performing Loans* atau NPL) karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjaman yang diberikan, menurunkan pendapatan dan permodalan BPS. Semakin tinggi tingkat NPL, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan kerugian kredit, yang akan menurunkan keuntungan.

2. Risiko Likuiditas

Sebagian besar keperluan pendanaan BPS merupakan dana jangka pendek, sedangkan sebagian besar kredit yang disalurkan berjangka menengah dan panjang. Kesenjangan antara sumber pendanaan dengan pemberian kredit maka terdapat Risiko likuiditas yang menyebabkan BPS tidak dapat memenuhi komitmennya kepada nasabah dan pihak lainnya. Ketidakmampuan BPS memenuhi komitmen pada nasabah atau pihak lain akan menyebabkan turunnya kepercayaan Nasabah dan penarikan dana secara besar-besaran oleh Nasabah (rush) yang akan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha BPS.

3. Risiko Pasar

Sebagai Bank Syariah non-devisa BPS menghadapi risiko pasar, khususnya Risiko Tingkat Bunga. Karena sumber-sumber dan penggunaan dana BPS seperti penempatan pada bank lain, investasi dalam surat berharga, deposito berjangka dan kewajiban-kewajiban pasar uang lainnya memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka perubahan-perubahan pada tingkat bunga mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan bunga bersih.

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional yang dihadapi BPS meliputi risiko lainya yaitu risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan berpotensi muncul bilamana ada faktor penyebanya yaitu ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank berpotensi meningkatkan risiko operasional yang dapat memperngaruhi operasional bank Lemahnya sistem operasional akan mengakibatkan peningkatan biaya operasional yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba usaha. Disamping itu, adanya faktor penyebab risiko operasional secara umum akan mengakibatkan terganggunya kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah dan pada gilirannya akan menurunkan kinerja dan daya saing BPS

5. Risiko Makro Ekonomi

Industri perbankan di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perekonomian nasional maupun internasional. Perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan seperti penurunan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kenaikan suku bunga akan mempengaruhi kegiatan usaha perbankan di dalam penghimpunan dana, pemberian kredit, pengembalian pokok kredit dan bunganya, serta aktivitas lainnya yang berdampak negatif pada pendapatan BPS.

6. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam industri perbankan dari waktu ke waktu mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha BPS karena menuntut dilakukannya penyesuaian-penyesuaian tata cara pelaksanaan kegiatan operasional Bank. Ketidakmampuan BPS dalam mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut akan menimbulkan kerugian atau dikenakan sanksi yang berdampak negatif terhadap kinerja BPS.

10. RISIKO ATAS KEPEMILIKAN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN

Disamping melakukan penilaian profil risiko Perseroan dan profil risiko anak perusahaan secara individu. Perseroan juga melakukan penilaian profil risiko secara konsolidasi. Dengan profil risiko anak perusahaan yang sebagian besar dalam kategori *Low*, maka konsolidasi profil risiko anak-anak perusahaan tersebut tidak meningkatkan profil risiko Perseroan atas kepemilikan anak perusahaan tersebut.
Salah satu jenis risiko yang dihadapi Perseroan atas kepemilikan terhadap anak perusahaan adalah Risiko reputasi. Sebagai Bank publik dan mengingat usaha Perseroan berlandaskan kepercayaan masyarakat. Perseroan wajib memberikan perhatian terhadap potensi timbulnya Risiko Reputasi. Reputasi yang tidak baik pada anak perusahaan dapat mempengaruhi reputasi Perseroan secara umum.

B. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Pembeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dalam hal ini bertindak sebagai investor akan menghadapi risiko gagal bayar pokok pada saat jatuh tempo dan atau pembayaran bunga, jika Perseroan mengalami kesulitan keuangan. Selain itu investor pembeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi berpotensi pula menghadapi risiko kesulitan untuk menjual efek tersebut di pasar dalam hal tidak likuidnya efek. Namun risiko investasi ini dapat dimitigasi oleh investor dengan jalan melihat atau menganalisa kondisi dan kinerja keuangan Perseroan.

Dengan adanya pengaturan dalam pasal 17.(2).d PBI No. 10/15/PBI/2008, tanggal 24 September 2008, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum, pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi atas Bunga Obligasi Subordinasi pada setiap tanggal pembayaran bunga maupun pokok Obligasi Subordinasi pada saat jatuh tempo dapat ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cummulative*), apabila:

(i) Pembayaran pokok dan/atau bunga Obligasi Subordinasi dapat menyebabkan kewajiban penyediaan modal minimum secara individual atau kewajiban penyediaan modal miniimum secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan yang berlaku,
(ii) Perseroan dalam keadaan rugi, atau
(iii) Kondisi profitablititas Perseroan tidak memungkinkan untuk membayar bunga Obligasi Subordinasi tersebut.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko-risiko material yang dihadapi oleh Perseroan dan Anak Perusahaan telah disusun dan diungkapkan dalam Prospektus berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak kejadian penting yang mempunyai dampak yang cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah Laporan Auditor Independen tertanggal 14 November 2012 atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (*member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan standar akuntansi keuangan yang relevan dan efektif berlaku 1 Januari 2012 serta laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2011 yang tidak diaudit yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tanggal 17 Agustus 1971 sebagai hasil penggabungan (merger) 3 (tiga) buah bank swasta, yaitu Bank Kemakmuran, Bank Industri & Dagang Indonesia dan Bank Industri Djaja Indonesia dengan tujuan memperkuat struktur permodalan mereka. Dengan Akta Notaris Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., Notraris di Jakarta No. 85, tanggal 17 Agustus 1971, yang kemudian diubah dengan Akta Notaris No. 48 tanggal 10 April 1972 dan No. 66 tanggal 13 April 1972, keduanya Notaris Adrian Jimmie Tumonggor, S.H., pengganti Notaris Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora,Notaris di Jakarta, Ketiga akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 April 1972, Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A.5/81/24, tanggal 19 April 1972, pendaftaran pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No 1121, 1122, 1123, tanggal 22 April 1972 , Berita Negara Republik Indonesia No. 45, tanggal 6 Juni 1972, Tambahan Berita Negara No. 210.

Perseroan telah beberapa kali mengadakan perubahan anggaran dasar. Perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Notaris Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta No. 45 tanggal 4 April 1997, persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan mulai berlaku sejak tanggal 17 April 1997, surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2783.HT.01.04.TH'97 tanggal 17 April 1997 dan penerimaan laporan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 17 April 1997, surat Direktur Perdata Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C2-HT.01.04.A-5852 tanggal 17 April 1997, Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Pusat, agenda pendaftaran No. 677/BH.09.05/V/1997 tanggal 5 Mei 1997. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Juli 1997 No. 55, Tambahan No. 2740 dan kemudian beberapa kali diubah serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentan Perseroan Terbatas dan Peraturan nomor IX.J.1. tentang pokok-pokon anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik, lampiran keputusan ketua Bapepam-LK Nomor Kep.-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 sebagaimana termaktub dalam akta Akta Notaris Benny Kristianto, S.H.,, Notaris di Jakarta No. 81 tanggal 25 Juli 2008, persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tanggal 27 Oktober 2008, surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.78480.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 27 Oktober 2008, Daftar Perseroan Nomor AHU-0101237.AH.01.09. Tahun 2008, tanggal 27 Oktober 2008, Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 Pebruari 2009 No.13, Tambahan nomor 4248, kemudian perubahan pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar sebagaimana termaktiub dalam Akta Notaris Benny Kristianto,S.H., Notaris di Jakarta No. 11 tanggal 10 September 2009, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Oktober 2009,surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris tersebut Nomor: AHU-AH.01.10.18383 tanggal 22 Oktober 2009, Daftar Perseroan Nomor AHU-0069259.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009, Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 September 2010 No.76, Tambahan No. 1433 dan perubahan terakhir mengenai peningkatan modal dasar dari Rp 5.900.000.000.000,- (lima triliun sembilan ratus miliar Rupiah) menjadi Rp9.600.000.000.000,- (sembilan triliun enam ratus miliar Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta Notaris Benny Kristianto,S.H., Notaris di Jakarta No. 09 tanggal 09 Juli 2010, persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 Oktober 2010, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.46590.AH.01.02 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Daftar Perseroan Nomor: AHU 0071414.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010, Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2 Maret 2012 No.18, Tambahan No. 5579.

Untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai bank umum dan sebagai bank devisa, Perseroan memiliki izin untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Kep-205/DDK/II/8/1971, tanggal 18 Agustus 1971 dan izin dari Bank Indonesia sebagai bank devisa dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/2-Kep.Dir, tanggal 21 April 1972.

Sejak Penawaran Umum pada tahun 1982. Perseroan telah melakukan beberapa *corporate action* yang dilakukan melalui Penawaran Umum dan Dividen Saham, sebagai berikut :

Keterangan	Tanggal	Pencatatan pada Bursa Efek	Jumlah (Saham)
A. Penerbitan Saham			
Penawaran Umum Perdana	28 Oktober 1982	29 Desember 1982	1.637.500
Penawaran Umum Kedua	18 Mei 1983	17 Juni 1983	3.162.500
Penawaran Umum Terbatas I	1 Oktober 1989	2 Nopember 1989	914.655
Penawaran Umum Terbatas II	1 Juni 1990	26 Juni 1990	2.614.410
Dividen Saham		30 Agustus 1990	416.305
Penawaran Umum Terbatas III	10 Juni 1995	29 Juni 1995	60.180.462
Pemecahan Nilai Nominal Saham		26 Mei 1997	300.902.312

Keterangan	Tanggal	Pencatatan pada Bursa Efek	Jumlah (Saham)
Penawaran Umum Terbatas IV	10 Juni 1997	27 Juni 1997	300.902.312
Penawaran Umum Terbatas V	24 Juni 1998	13 Juli 1998	702.105.395
Penawaran Umum Terbatas VI	30 Juni 1999	05 Juli 1999	1.210.406.221
Pemecahan Nilai Nominal Saham		1 Oktober 1999	2.977.753.764
Pemecahan Nilai Nominal Saham		1 Agustus 2002	8.933.605.053
Saham Bonus/Dividen Saham		28 Juni 2004	1.176.091.818
Penawaran Umum Terbatas VII	28 Juni 2006	13 Juli 2006	4.016.358.393
Pelaksanaan Konversi Waran Seri IV	s.d 30 Juni 2009	13 Juli 2006	2.250.615.828

Jumlah total Waran Seri IV yang telah dikonversi sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 adalah sebesar 2.250.615.828 dan yang belum dikonversi adalah sebesar 1.765.742.565.
Rasio Perbandingan antara Waran Seri IV yang sudah dikonversi dan total waran yang belum di konversi adalah sebesar 56,04%
Masa berlaku Waran Seri IV adalah sampai dengan tanggal 10 Juli 2009.

Keterangan	Tanggal Efektif	Pencatatan pada Bursa Efek	Jumlah Obligasi (juta Rp)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terhutang (juta Rp)
B. Penerbitan Surat Utang					
Obligasi Bank Panin I Tahun 2000	28 Desember 1999	15 Maret 2000	500.000	6 Maret 2005	Lunas
Obligasi Subordinasi Bank Panin I Tahun 2003	5 Juni 2003	23 Juni 2003	1.300.000	18 Juni 2008	Lunas
Obligasi SubordinasBank Panin II Tahun 2007 :					
▪ Seri A	7 Juni 2007	20 Juni 2007	50.000	19 Juni 2010	Lunas
▪ Seri B	7 Juni 2007	20 Juni 2007	1.400.000	19 Juni 2012	Lunas
▪ Seri C	7 Juni 2007	20 Juni 2007	200.000	19 Juni 2014	200.000
Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008	27 Maret 2008	10 April 2008	1.500.000	9 April 2018	1.500.000
Obligasi Bank Panin III Tahun 2009	29 September 2009	7 Oktober 2000	800.000	6 Oktober 2015	800.000
Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010	29 Oktober 2010	10 November 2010	540.000	9 November 2015	540.000
Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010	29 Oktober 2010	10 November 2010	2.460.000	9 November 2017	2.460.000

Maka jumlah Obigasi Terhutang Perseroan adalah sebesar Rp5.500.000 juta.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Riwayat perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010 sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2010-2012

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir termasuk perubahan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 09 tanggal 09 Juli 2010, dibuat di hadapan Benny Kristianto,S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana termaktub dalam Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-46590.AH.01.02. tahun 2010, tanggal 01 Oktober 2010 dan Penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam database sistim Administrasi Badan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2010 No AHU-AH.01.10-26581 serta telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 02 Maret 2012 No. 18, tambahan Berita Negara No. 5579. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh PT. Blue Chip Mulia, berkedudukan di Jakarta selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 1 Pebruari 2010, susunan para pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Januari 2010 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	59.000.000.000	5.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	24.087.645.998	2.408.764.599.800	
Pemegang Saham :			
1.PT Panin Life Tbk	10.762.771.285	1.076.277.128.500	44,68
2.Votraint No. 1103 Pty Ltd	9.269.562.652	926.956.265.200	38,48
3.Masyarakat lainnya masing-masing dengan Kepemilikan dibawah 5%	4.055.312.061	405.531.206.100	16,64
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh	24.087.645.998	2.408.764.599.800	100,00
Saham Dalam Portepel	34.912.354.002	3.491.235.400.200	

Modal Dasar Perseroan telah ditingkatkan dari Rp5.900.000.000.000,- yang terbagi atas 59.000.000.000 saham menjadi Rp9.600.000.000.000,- yang terbagi atas 96.000.000.000 saham berdasarkan pernyataan keputusan RUPS tanggal 10 Juni 2010 yang dinyatakan dalam akta No. 09 tanggal 9 Juli 2010 dibuat di hadapan Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh PT. Blue Chip Mulia, berkedudukan di Jakarta selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 02 Januari 2011, susunan para pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	96.000.000.000	9.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	24.087.645.998	2.408.764.599.800	
Pemegang Saham :			
1.PT Panin Life Tbk	10.762.771.285	1.076.277.128.500	44,68
2.Votraint No. 1103 Pty Ltd	9.349.793.152	934.979.315.200	38,82
3.Masyarakat lainnya masing-masing dengan Kepemilikan dibawah 5%	3.975.081.561	397.508.156.100	16,50
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh	**24.087.645.998**	**2.408.764.599.800**	100,00
Saham Dalam Portepel	71.912.354.002	7.191.235.400.200	

Kepemilikan saham Perseroan yang memiliki 5% atau lebih sejak Januari 2011 sampai dengan November 2011 tidak mengalami perubahan. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh PT. Blue Chip Mulia, berkedudukan di Jakarta selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 01 Januari 2012, susunan para pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	96.000.000.000	9.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	24.087.645.998	2.408.764.599.800	
Pemegang Saham :			
1.PT Panin Life Tbk	10.950.271.285	1.095.027.128.500	45,46
2.Votraint No. 1103 Pty Ltd	9.349.793.152	934.979.315.200	38,82
3.Masyarakat lainnya masing-masing dengan Kepemilikan dibawah 5%	3.787.581.561	378.758.156.100	15,72
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh	**24.087.645.998**	**2.408.764.599.800**	100,00
Saham Dalam Portepel	71.912.354.002	7.191.235.400.200	

Catatan:
Pada tanggal 31 Desember 2011 tidak terdapat kepemilikan saham dalam Perseroan sejumlah 5% atau lebih selain yang dimiliki oleh PT Panin Financial Tbk dan Votraint No. 1103 Pty Ltd dimana saham milik PT. Panin Financial Tbk sejumlah 250.000.000 saham diantaranya tidak dicatatkan di Bursa Efek.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 29 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh PT. Blue Chip Mulia, berkedudukan di Jakarta selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 01 Maret 2012, susunan para pemegang saham Perseroan per tanggal 29 Februari 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	96.000.000.000	9.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	24.087.645.998	2.408.764.599.800	
Pemegang Saham :			
1.PT Panin Financial Tbk (d/h PT Panin Life Tbk)	11.065.846.285	1.106.584.628.500	45,94
2.Votraint No. 1103 Pty Ltd	9.349.793.152	934.979.315.200	38,82
3.Masyarakat lainnya masing-masing dengan Kepemilikan dibawah 5%	3.672.006.561	367.200.656.100	15,24
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh	**24.087.645.998**	**2.408.764.599.800**	100,00
Saham Dalam Portepel	71.912.354.002	7.191.235.400.200	

Kepemilikan saham Perseroan yang memiliki 5% atau lebih sejak Maret 2012 sampai dengan September 2012 tidak mengalami perubahan dan susunan pemegag saham Perseroan sama dengan bulan Februari 2012. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2012, yang dikeluarkan oleh PT. Blue Chip Mulia, berkedudukan di Jakarta selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 1 Oktober 2012, susunan para pemegang saham Perseroan per tanggal 30 September 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	96.000.000.000	9.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	24.087.645.998	2.408.764.599.800	
Pemegang Saham :			
1.PT Panin Financial Tbk (d/h PT Panin Life Tbk)	11.065.846.285	1.106.584.628.500	45,94
2.Votraint No. 1103 Pty Ltd	9.349.793.152	934.979.315.200	38,82
3.Masyarakat lainnya masing-masing dengan Kepemilikan dibawah 5%	3.672.006.561	367.200.656.100	15,24
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh	**24.087.645.998**	**2.408.764.599.800**	100,00
Saham Dalam Portepel	71.912.354.002	7.191.235.400.200	

Catatan:
Pada tanggal 30 September 2012 tidak terdapat kepemilikan saham dalam Perseroan sejumlah 5% atau lebih selain yang dimiliki oleh PT Panin Financial Tbk dan Votraint No. 1103 Pty Ltd dimana saham milik PT. Panin Financial Tbk sejumlah 250.000.000 saham diantaranya tidak dicatatkan di Bursa Efek.

3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM DALAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM YANG MEMILIKI 5% ATAU LEBIH SAHAM PERSEROAN

1) PT Panin Finansial Tbk ("PF") d/h PT Panin Life Tbk

a. Riwayat Singkat

PF didirikan dengan nama PT Asuransi Jiwa Panin Putra berdasarkan akta Notaris Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta No. 192, tanggal 19 Juli 1974, kemudian diperbaiki dengan akta nomor 226, tanggal 27 Pebruari 1975, Notaris yang sama, persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 4 April 1975, Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 4 April 1975 No.Y.A.5/83/6, pendaftaran pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 14 April 1975 No.1196 dan 1197, dan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15 April 1975 No. 30, Tambahan No. 203. Anggaran dasar PF telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan dalam rangka penyesuaian seluruh anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Nomor IX.J.1. tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, berdasarkan Akta Notaris Erni Rohaini, S.H., MBA, Notaris di Jakarta No. 25, tanggal 30 Juni 2009, persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 2009, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-49691.AH.010.02. Tahun 2009 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 14 Oktober 2009, Daftar Perseroan Nomor AHU-0067248.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 14 Oktober 2009, Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 September 2010 No. 72, Tambahan nomor 17149 dan perubahan nama sebagaimana termaktub dalam Akta Notaris Erni Rohaini, S.H., MBA, Notaris di Jakarta No. 15, tanggal 8 Desember 2009, persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tanggal 14 Januari 2010, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.02074.AH.01.02. Tahun 2010, Tentang Persetujuan Perubahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 14 Januari 2010, Daftar Perseroan Nomor AHU-0003064.AH.01.09. Tahun 2010, tanggal 14 Januari 2010 dan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Oktober 2010 No. 82, Tambahan nomor 30889, perubahan maksud dan tujuan PF sebagaimana termaktub dalam Akta Notaris Adi Triharso, S.H., Notaris di Jakarta No. 60, tanggal 31 Maret 2011, persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 Juni 2011, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-27951.AH.01.02. Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 06 Juni 2011, Daftar Perseroan Nomor AHU-0044808.AH.01..09.Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011 dan untuk pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, perubahan untuk penigkatan modal dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta No. 73, tanggal 30 Juni 2011, persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 2011, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-42326.AH.01.02. Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasdar Perseroan tanggal 22 Agustus 2011, Daftar Perseroan Nomor AHU-0069410.09.Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 dan untuk pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Notaris Erni Rohaini, S.H., MBA, Notaris di Jakarta No. 30, tanggal 7 Maret 2012, penerimaan pemberitauan perubahan anggaran dasar oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Mei 2012, surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10.18312, tanggal 22 Mei 2012, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Panin Financial Tbk, Daftar Perseroan Nomor AHU-0045630.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 22 Mei 2012 dan untuk pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PF berkantor pusat di Jakarta Barat. PF mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1976.

b. Bidang Usaha

Maksud dan Tujuan Perseroan ini, ialah menjalankan usaha sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi serta jasa pengelolaan aset dan pemberian jasa penasehat keuangan.

Kegiatan Usaha :
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
Menjalankan usaha dalam bidang penyediaan jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi kepada masyarakat umum dan memberikan jasa penasehat keuangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan investasi.

Kegiatan Usaha Utama :
Menjalankan usaha dalam bidang penyediaan jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi kepada masyarakat umum.

Kegiatan Usaha Penunjang :

- Melakukan investasi pada aset bergerak maupun tidak bergerak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan jasa penasehat keuangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan investasi dan penempatan dana pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri.

c. Permodalan

Struktur permodalan dan pemegang saham PF pada tanggal 31 Agustus 2012, berdasarkan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta No. 73, tanggal 30 Juni 2011, persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 2011, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-42326.AH.01.02. Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 22 Agustus 2011, Daftar Perseroan Nomor AHU-0069410.09.Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 dan untuk pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo Akta Notaris Erni Rohaini, S.H., MBA, Notaris di Jakarta No. 30, tanggal 7 Maret 2012, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Mei 2012, surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10.18312, tanggal 22 Mei 2012, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Panin Financial Tbk, Daftar Perseroan Nomor AHU-0045630.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 22 Mei 2012 dan untuk pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia akan dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo pelaksanaan waran sejumlah 164 menjadi 164 saham, juncto susunan para pemegang saham Perseroan per tanggal 30 September 2012 berdasarkan Daftar Pemegang Saham PF 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek PF tanggal 3 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp125.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	95.850.000.000	11.981.250.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	28.036.106.891	3.504.513.381.385	
Pemegang Saham :			
1. PT. Panin Insurance Tbk	16.022.245.551	2.002.780.693.875	57,15
2.Masyarakat lainnya*	12.013.861.340	1.501.732.667.500	42,85
Jumlah	**28.036.106.891**	**3.504.513.361.375**	100,00
Jumlah saham dalam portepel	67.813.893.109	8.476.736.638.625	

*saham yang dimiliki PF (pembelian kembali) sejumlah 53.179.500 dengan nilai nominal seluruhnya Rp.6.647.437.500,-

d. Manajemen dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PF Berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 09 April 2012, sebagaimana termaktub dalam Akta pernyataan keputusan Rapat No. 18 tanggal 9 April 2012, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PF adalah sebagai berikut:

Komisaris
Presiden Komisaris : Mu'min Ali Gunawan
Wakil Presiden Komisaris : Suwirjo Josowidjojo
Komisaris/Komisaris Independen : Sophie Soelaiman.

Direksi
Presiden Direktur : Fadjar Gunawan
Wakil Presiden Direktur : Bhindawati Gunawan
Direktur : Marwan Noor

2) Votraint No. 1103 Pty. Ltd. ("VTL")

a. Pendirian

Votraint No. 1103 Pty Limited ("VTL") adalah suatu perusahan terbatas dengan saham (Company Limited By Shares), yang sah didirikan dan mempunyai kantor terdaftar di Level 6.100 Queen Street, Melbourne di Negara Bagian Victoria, Commonwealth Australia, sesuai dengan pernyataan David William Arndell Standish. Bank Manager tanggal 28 Juni 2001 yang dibuat di hadapan Charles Bernard Gore Brent, Notaris Publik di Melbourne, Victoria, Australia. VTL didirikan berdasarkan the Australian Corporations Act 2001 dengan nomor pendirian ACN: 082 564 369 dengan akta pendirian yang tertuang dalam Constitution of Votraint No. 1103 Pty. Limited (adopted by Special Resolution on 6 July 2000). Berdasarkan informasi yang diterima Perseroan dari VTL: Votraint No. 1103 Pty Limited ("VTL") adalah suatu perusahan terbatas dengan saham (Company Limited By Shares), yang sah didirikan berdasarkan hukum Australia dengan Australian Business Number (ABN) 98 082 564 369 dengan kantor terdaftar di Level 9, 833 Collins Street Docklands, Victoria, Australia.

b. Bidang Usaha

VTL adalah merupakan perusahaan industri jasa keuangan.

c. Permodalan

Struktur permodalan VTL berdasarkan Anggaran Dasar VTL dan laporan keuangan 30 September 2009. adalah sebagai berikut:

(dalam ribu AUD)

	Sep 2009	Sep 2008
Modal Dikeluarkan dan Disetor	495.864	249.437

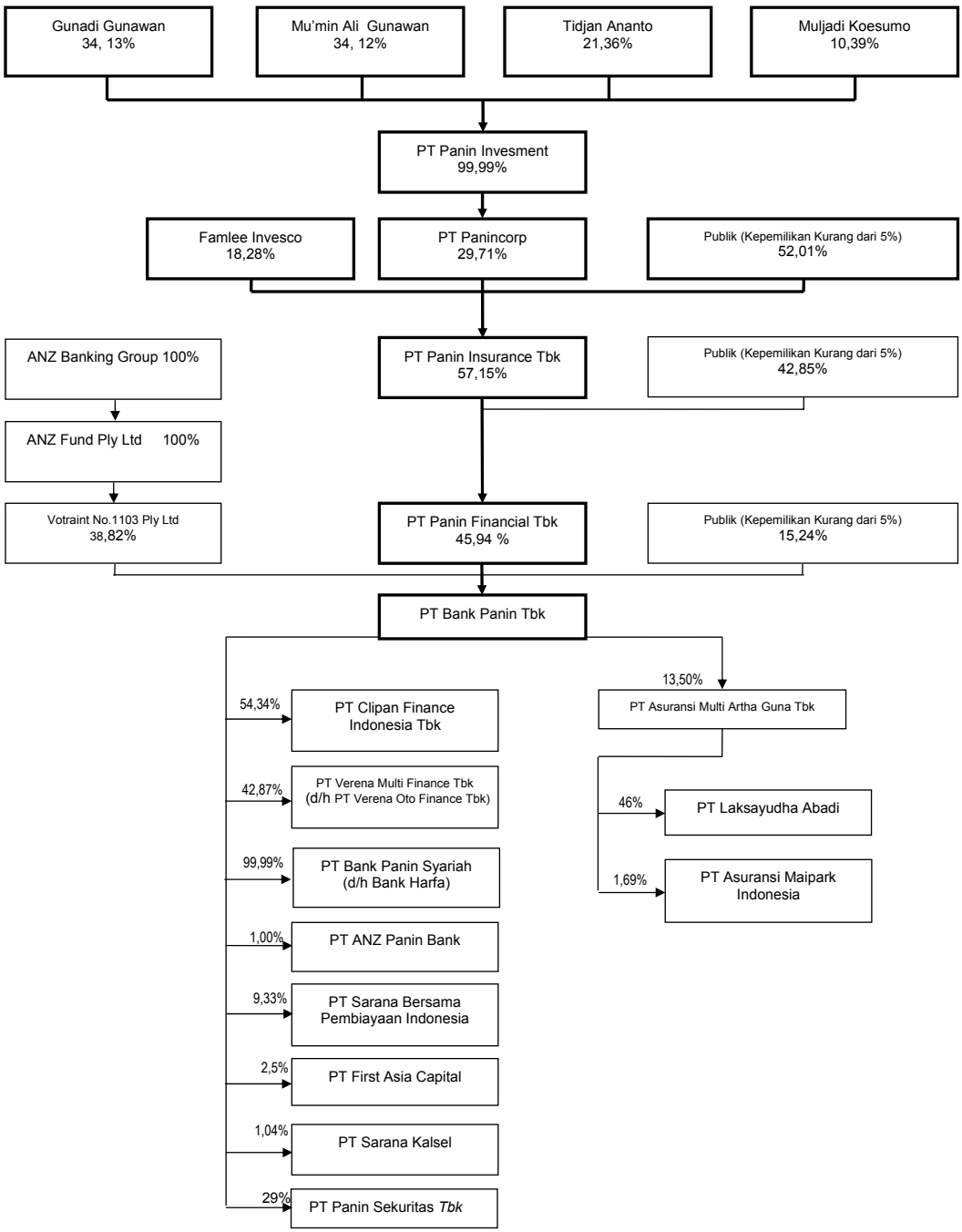
Modal VTL berdasarkan Anggaran Dasar VTL yang fotokopinya disampaikan Perseroan kepada Konsultan Hukum adalah AU$ 100,000,000 terdiri dari 100.000.000 saham masing-masing saham dengan nilai nominal AU$ 1.

Berdasarkan Laporan keuangan 30 September 2009 dan keterangan Senior Finance Manager Asia, Pacific, Europee & America yang fotocopinya disampaikan Perseroan kepada Konsultan Hukum, modal disetor VTL adalah AU$ 495,864,000 terdiri dari 495.864.000 saham masing-masing saham dengan nilai nominal AU$ 1 dan dimiliki oleh ANZ Funds Pty. Ltd., suatu perusahaan 100% subsidiari Australian and New Zealand Banking Group Limited.

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan informasi yang diperoleh Perseroan*Board of Director*" VTL adalah:
- Alistair Bullock
- James Burdett
- Graeme Woods

Berikut ini adalah gambaran mengenai hubungan kepemilikan dalam Perseroan serta penyertaan yang dilakukan oleh Perseroan dalam entitas berelasinya per 31 Agustus 2012:



4. KETERANGAN MENGENAI ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PENYERTAAN

Saat ini Perseroan melakukan penyertaan pada perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha finansial, perbankan, asuransi dan bidang sewa guna usaha (*leasing)*. Beberapa di antara perusahaan-perusahaan tersebut juga menjalin hubungan kerjasama (*partnership*) dengan rekanan luar negeri.

Berikut ini adalah gambaran anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan beserta persentase kepemilikan Perseroan dalam perusahaan-perusahaan tersebut pada tanggal dikeluarkannya Prospektus ini:

Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Tanggal Penyertaan	Penyertaan
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Finansial	22 Agustus 1990	54,34%
PT Bank Panin Syariah (d/h Bank Harfa)	Bank	31 Oktober 2007	99,99%
PT Verena Multi Finance Tbk (d/h PT Verena Oto Finance Tbk)	Finansial	11 Juni 2003	42, 87%
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Asuransi	29 Desember 1989	13,50%

1) PT Clipan Finance Indonesia Tbk ("CFI")

a. Riwayat Singkat

PT Clipan Finance Indonesia Tbk berdasarkan akta Notaris Ny. Kartini Muljadi, S.H., notaris di Jakarta No. 47 tanggal 15 Januari 1982, yang diubah dengan akta Ny. Kartini Muljadi, S.H., notaris di Jakarta No. 363. tanggal 29 Juni 1982, persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Agutus 1982, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-396.HT.01.01.Th.82. tanggal 2 Agustus 1982, pendaftaran pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut No. 2771 dan No. 2772 tanggal 10 Agustus 1982, Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 1 Oktober 1982, Tambahan No. 1189.

Anggaran Dasar CFI dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta No. 37 tanggal 29 Juli 2009, persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tanggal 06 November 2009, Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.53891.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 06 November 2009, Daftar Perseroan No. AHU-0073404.AH.01.09. Tahun 2009, tanggal 06 November 2009, dan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 September 2010 No.77, Tambahan No. 21223 dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Erni Rohaini, S.H., MBA, Notaris diJakarta No. 14 tanggal 21 Oktober 2011, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tanggal 08 Februari 2012, surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-04304 tanggal 08 Februari 2012, Daftar Perseroan Nomor: AHU-0010680.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 08 Februari 2012 dan untuk pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

CFI berkedudukan di Jakarta dengan kantor cabang di Denpasar, Bandung, Medan, Yogyakarta, Lampung, Surabaya, Pekanbaru, Balikpapan, Semarang, Palembang, Jakarta Utara, Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi, Samarinda, Banjarmasin, Makasar dan kantor pemasaran di Manado, Jambi, Jakarta Barat, Kemayoran, Jakarta Timur, Serang, Karawang, Jakarta Selatan, Sukabumi, Pangkal Pinang, Muara Bungo, Palu, Bukittinggi, Kendari dan Bengkulu. Kantor pusat CFI beralamat di Wisma Slipi lantai 6, Jl. Letjen S. Parman Kav 12, Jakarta 11480. Jumlah karyawan CFI per tanggal 30 Juni 2012 adalah 938 karyawan.

b. Bidang Usaha

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar CFI, ruang lingkup kegiatan utama CFI meliputi usaha pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen.

CFI memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. 1402/KMK.013/1990 tanggal 3 Nopember 1990.

c. Permodalan

Struktur permodalan dan pemegang saham CFI berdasarkan akta nomor 14 tanggal 21 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Erni Rohaini, SH, MBA notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat penerimaan pemberitahuan Perubahan anggaran dasar no. AHU-AH.01.10-04304 tanggal 08 Pebruari 2012:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp250,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.412.000.000	2.603.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.774.796.493	943.699.123.250	
Pemegang Saham:			
1. PT Bank Panin Tbk	2.051.431.264	512.857.816.000	54,34
2.Masyarakat (masing-masing kurang dari 5%)	1.723.365.229	430.841.307.250	45,66
Jumlah	3.774.796.493	943.699.123.250	100,00
Saham Dalam Portepel	6.637.203.507	1.659.300.876.750	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan PT Clipan Finance Indonesia Tbk. No. 73 tanggal 28 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo S.H.,MH, M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.10-29343 tanggal 08 Agustus 2012, susunan Komisaris dan Direksi CFI sampai dengan prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris
Presiden Komisaris : Mu'min Ali Gunawan
Komisaris : Roosniati Salihin
Komisaris : Suwirjo Josowidjojo
Komisaris Independen : Veronika Lindawati
Komisaris Independen : Lukman Abdullah

Direksi
Presiden Direktur : Gita Puspa Kirana Darmawan
Direktur : Suhendra

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut disajikan data keuangan pokok CFI yang angka-angkanya berasal dan dihitung dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 yang memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan standar akuntansi keuangan yang relevan dan efektif berlaku 1 Januari 2012. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tahun 2010 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan awal PSAK No.50 (Revisi 2006) dan PSAK No.55 (Revisi 2006).

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010	31 Desember 2009
Laporan Posisi Keuangan				
Kas dan Setara Kas	425.783.975	192.183.355	26.327.186	31.031
Deposito Berjangka	-	-	-	-
Investasi Jangka Pendek	15.406.250	15.261.250	14.906.000	74.372
Investasi Neto Sewa Pembiayaan	1.235.461.22	1.106.504.557	927.021.609	866.294
Piutang Pembiayaan Konsumen	507.072.770	2.317.186.204	1.108.099.154	494.482
Tagihan anjak piutang	1.044.309.872	1.078.014.646	567.093.654	270.345
Piutang Lain-lain	13.209	12.395	6.875	6.235
Biaya Dibayar Di Muka	5.227	5.103	5.063	4.741
Pajak Dibayar Di Muka	-	-	-	-
Aset Pajak Tangguhan	-	412	2.219	1.704
Aset yang disewagunausahakan	16.360	11.683	10.727	8.675
Sinking Fund	-	-	-	-
Aset Tetap	31.065	28.195	17.516	12.891
Aset Lain-Lain	16.659	18.562	8.059	497
Total Aset	5.310.556	4.785.503	2.693.909	1.771.267
Total Liabilitas	3.024.067	2.611.676	1.212.714	459.267
Total Ekuitas	2.286.488	2.173.826	1.481.195	1.312.000

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni		Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember		
	2012	2011 (Tidak diaudit)	2011	2010	2009
Laporan Laba Rugi Komprehensif					
Pendapatan	438.705	316.868	700.357	402.624	329.385
Beban	216.877	139.001	334.589	137.505	127.221
Laba Bersih dan Laba Komprehensif	169.283	133.811	276.257	200.711	150.253
Rasio-Rasio Penting					
Laba Bersih / Total Aset (%)	3,19%		5.77%	7,45%	8,48%
Laba Bersih / Total Ekuitas (%)	7,40%		12,71%	13,55%	11,45%
Total Liabilitas / Total Ekuitas (x)	1,32		1,20	0,82	0,35

Di akhir Desember 2011, jumlah aset CFI sebesar Rp4.786 miliar, mengalami peningkatan sebesar 77,60% dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp2.694 miliar. Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan usaha antara lain dikarenakan peningkatan saldo Piutang Pembiayaan konsumen-bersih sebesar Rp1.209 miliar atau 109,10%.Jumlah aset CFI pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp2.694 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp923 miliar atau sebesar 52,10% dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp1.771 miliar. Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan usaha antara lain dikarenakan peningkatan saldo piutang pembiayaan konsumen-bersih sebesar Rp614 miliar atau 124,10%.

Posisi liabilitas pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp2.612 miliar meningkat Rp 1.399 miliar atau 115,4% dibandingkan posisi liabilitas pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 1.213 miliar. Peningkatan terutama dikarenakan strategi CFI dalam mendukung pertumbuhan pembiayaan konsumen ditandai kenaikan surat berharga yang diterbitkan – bersih sejumlah Rp 989 miliar.Posisi liabilitas CFI pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 1.213 miliar meningkat 164,1% dibandingkan posisi liabilitas pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp459 miliar. Peningkatan terutama dikarenakan strategi perusahaan dalam mendukung pertumbuhan pembiayaan konsumen ditandai dengan peningkatan saldo utang bank sebesar Rp712 miliar.

Saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 meningkat 46,8% dibandingkan saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010 karena adanya tambahan modal disetor.

Pendapatan CFI untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp439 miliar, mengalami peningkatan sebesar 38% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp317 miliar. Peningkatan terutama karena meningkatnya pendapatan pembiayaan konsumen CFI sebesar 39%, yang disebabkan oleh meningkatnya nilai piutang pembiayaan konsumen.Pendapatan CFI untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 mencapai Rp700 miliar, mengalami peningkatan sebesar 74% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp403 miliar. Peingkatan terutama karena meningkatnya pendapatan pembiayaan konsumen CFI sebesar 144%, yang disebabkan oleh meningkatnya nilai piutang pembiayaan konsumen.

Laba bersih dan pendapatan komprehensif lainnya CFI untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 2010 sebesar Rp 201 miliar. Peningkatan terutama karena meningkatnya pendapatan pembiayaan konsumen CFI sebesar 144%, yang disebabkan oleh meningkatnya nilai piutang pembiayaan konsumen.Laba bersih dan pendapatan komprehensif lainnya CFI untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 mencapai Rp201 miliar, mengalami peningkatan sebesar 34% dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar Rp150 miliar. Peningkatan terutama karena meningkatnya pendapatan pembiayaan konsumen CFI sebesar 99%, yang disebabkan oleh meningkatnya nilai piutang pembiayaan konsumen.

2) PT Bank Panin Syariah d/h Bank Harfa ("BPS")

a. Riwayat Singkat

BPS didirikan dengan akta No. 12 tanggal 8 Januari 1972 dari notaris Moeslim Dalidd, S.H. dengan nama P.T. Bank Bersaudara Jaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/284/4 tanggal 11 Desember 1979 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 14 Juni 1994 Tambahan No. 3247/1994. Berdasarkan akta perubahan Notaris Alfian Yahya S.H, notaris di Surabaya No. 27 tanggal 27 Maret 1997 dari, nama Bank diubah menjadi P.T. Bank Harfa. Perubahan nama tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-4004.HT.01.04.Th.97 tanggal 21 Mei 1997. Anggaran Dasar BPS telah mengalami beberapa kali perubahan, sehubungan dengan penurunan modal dalam rangka kuasi reorganisasi Bank dari Rp 168.000.000 ribu menjadi Rp 149.520.000 ribu dan perubahan nilai nominal saham Bank dari semula Rp 5.000 ribu menjadi Rp 4.450, berdasarkan akta Notaris Aulia Taufani, SH, pengganti Sutjipto, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Akta No. 57 tanggal 19 Januari 2010, persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia tanggal 25 Maret 2010, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15639.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Daftar Perseron No. AHU-0022962 Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010, Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Februari 2011 Nomor 13, Tambahan Nomor 1650;, perubahan sehubungan dengan peningkatan modal dasar menjadi Rp712.000.000.000, dan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp178.000.000.000,- sebagaimana termaktub dalam Akta Notaris Aulia Taufani,S.H. pengganti Notaris Sutjipto,S.H., Notaris di Jakarta No. 387 tanggal 28 April 2011, persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 Mei 2011, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-27063.AH.01.02 Tahun 2011 Tentang Perstetujuan Perubahan Anggara Dasar Perseroan, Daftar Persroan No,AHU-0043321,AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 dan penerimaan pemberitahuann oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 Juni 2011, Suratt Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris tersebut No. AHU.AH.01.10-16966 tanggal 6 Juni 2011, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Panin Syariah, Daftar Perseroan No. AHU-004942.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Erni Rohaini,S.H, MH, Notaris di Jakarta No. 36 tanggal 27 Juni 2011, penerimaan pemberitahuann oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2011, Surat Menteri HUkum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris tersebut No. AHU.AH.01.10-33176 tanggal 17 Oktober 2011, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Panin Syariah, Daftar Perseroan No. AHU-0083597.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BPS berkedudukan di Jakarta dan memiliki 7 kantor cabang. Kantor pusat BPS beralamat di Gedung Panin Life Center, Jl. Letjend S. Parman Kav.91, Jakarta. Jumlah karyawan BPS per tanggal 30 Juni 2012 adalah 120 karyawan.

b. Bidang Usaha

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar BPS, ruang lingkup kegiatan BPS adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam.

BPS mendapat ijin usaha sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.1401/KMK.013/1990 tanggal 3 Nopember 1990. Pada tanggal 17 Desember 1998, BPS memperoleh izin usaha sebagai pedagang valuta asing dari Bank Indonesia berdasarkan surat No. 31/147/KEP/DIR, yang berlaku efektif sejak tanggal 15 Januari 1999. BPS mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah. BPS wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban dari kegiatan konvensional selambat-lambatnya 360 hari serta melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan tersebut. BPS mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 2 Desember 2009.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani,S.H. pengganti Notaris Sutjipto,S.H., Notaris di Jakarta No. 387 tanggal 28 April 2011, persetujuan Mnteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 Mei 2011, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-27063.AH.01.02 Tahun 2011 Tentang Perstetujuan Perubahan Anggara Dasar Perseroan, Daftar Perseroan No,AHU-0043321,AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 dan penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 Juni 2011, Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris tersebut No. AHU.AH.01.10-16966 tanggal 6 Juni 2011, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Panin Syariah, Daftar Perseroan No. AHU-004942.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia jo Akta Notaris Erni Rohaini,S.H, MH, Notaris di Jakarta No. 36 tanggal 27 Juni 2011, penerimaan pemberitahuann oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2011, Surat Menteri HUkum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris tersebut No. AHU.AH.01.10-33176 tanggal 17 Oktober 2011, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Panin Syariah, Daftar Perseroan No. AHU-0083597.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp4.450.000.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	160.000	712.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	101.015	449.516.750.000	
Pemegang Saham:			
1. PT Bank Panin Tbk	101.014	449.512.300.000	99.99%
2. H. Ahmad Hidayat	1	4.450.000	0.01%*
Jumlah	**101.015**	**449.516.750.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	58.985	262.483.250.000	

Ket: persentase dari kepemilikan atas nama H. Ahmad Hidayat adalah kurang dari 0,01%

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 05 Oktober 2012 dibuat dihadapan Erni Rohaini, S.H.,MBA, Notaris di Jakarta, susunan Komisaris dan Direksi BPS per tanggal 5 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Aries Mufti
Komisaris Independen	Yumirati Kartina
Komisaris	Jasman Ginting Munthe

Direksi

Direktur Utama	Deny Hendrawati, SH
Direktur	Fathorrahman
Direktur	Sukisari
Direktur Kepatuhan	Budi Prakoso

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	Kyai Haji Ahmad Munif Suratmaputra
Anggota	Amunidin Yakub

Yang mana permohonan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dilaksanakan melalui Notaris tersebut yang pada saat ini masih dalam proses pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut disajikan data keuangan pokok BPS yang angka-angkanya berasal dan dihitung dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2012	31 Desember		
		2011	2010	2009
Laporan Posisi Keuangan				
Kas	2.514	2.005	1.462	1.120
Penempatan pada BI	167.102	94.198	79.140	8.856
Giro pada bank lain	60	177	160	576
Penempatan pada bank lain	-	49.500	59.400	54.450
Efek-efek	138.392	133.723	59.213	59.704
Kredit (bersih)	-	-	-	-
Piutang Murabahah	427.011	378.162	40.733	1.598
Pembiayaan Mudharabah	419.449	269.583	100.792	-
Pembiayaan Musyarakah	82.370	48.663	81.044	-
Aset lainnya	39.279	40.868	36.769	35.345
Total Aset	1.276.177	1.016.879	458.713	161.649
Dana pihak ketiga	49.292	19.925	15.335	303
Liabilitas lainnya	14.632	8.512	4.967	6.541
Total Liabilitas	63.924	28.437	20.302	6.844
Dana Syirkah Temporer	744.910	535.833	295.032	4.253
Total Ekuitas	467.344	452.610	143.379	150.552

Uraian	Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni		Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember		
	2012	2011 (Tidak diaudit)	2011	2010	2009
Laporan Laba Rugi Komprehensif					
Pendapatan Usaha	55.125	25.587	70.288	21.369	8.780
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	18.144	13.780	27.026	9.299	109
Laba (Rugi) Usaha	20.137	(1.912)	12.300	(10.972)	9.955
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	20.111	(1.836)	12.411	(10.523)	1.522
Manfaat (Beban) Pajak	(5.044)	457	(3.177)	3.351	(305)
Laba (Rugi) Bersih	15.067	(1.379)	9.233	(7.173)	1.217
Laba (Rugi) Komprehensif	14.734	(1.379)	9.233	(7.173)	1.217
Rasio-Rasio Penting					
Laba Bersih / Total Aset (%)	1,18		0,91	(1,56)	0,75
Laba Bersih / Total Ekuitas (%)	3,22		2,04	(5,00)	0,81
Total Liabilitas / Total Ekuitas (x)	0,14		0,06	0,14	0,05

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 1.017 miliar, mengalami peningkatan sebesar 122% dibandingkan dengan aset pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 459 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya piutang murabahah. Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 459 miliar, mengalami peningkatan sebesar 184% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 162 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Jumlah Dana Syirkah Temporer pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp 745miliar, mengalami peningkatan sebesar 39,02% dibandingkan dengan dana syirkah temporer pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 536 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya deposito berjangka mudharabah. Jumlah dana Syirkah Temporer pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 536 miliar, mengalami peningkatan sebesar 82% dibandingkan dengan Dana Syirkah Temporer pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 295 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya deposito berjangka mudharabah dan surat berharga yang diterbitkan. Jumlah Dana Syirkah Temporer pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 295 miliar, mengalami peningkatan sebesar 6.836% dibandingkan dengan Dana Syirkah Temporer pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 4 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya deposito berjangka mudharabah dan tabungan mudharabah.

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 452,61 miliar, mengalami peningkatan sebesar 215,67% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 143,38 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya modal yang disetor.

Jumlah pendapatan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 sebesar Rp 55,13 miliar, mengalami peningkatan sebesar 115% dibandingkan dengan pendapatan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp 26 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib. Jumlah Pendapatan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 70 miliar, mengalami peningkatan sebesar 229% dibandingkan dengan pada tahun 2010 sebesar Rp 21 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib. Jumlah Pendapatan pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 21 miliar, mengalami peningkatan sebesar 133% dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2009 sebesar Rp 9 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib.

Jumlah Laba bersih periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp 15 miliar, mengalami peningkatan sebesar 1.193% dibandingkan dengan rugi bersih periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp 1 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya total pendapatan usaha yang berasal dari pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib. Jumlah Laba bersih pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 9 miliar, mengalami peningkatan sebesar 229% dibandingkan dengan rugi bersih pada tahun 2010 sebesar Rp 7 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya total pendapatan yang berasal dari pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib.Jumlah Rugi bersih pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 7 miliar, mengalami penurunan sebesar 800% dibandingkan dengan jumlah laba bersih pada tahun 2009 sebesar Rp 1 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya total beban usaha lainnya diantaranya beban administrasi dan beban kepegawaian.

3) PT Verena Multi Finance Tbk (d/h PT.Verena Oto Finance atau "VMF")

a. Riwayat Singkat

VMF didirikan dengan nama PT. Maxima Perdana Finance berdasarkan Akta Notaris Sri Naning, S.H, Notaris di Jakarta No. 43 tanggal 21 Juli 1993, disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 29 Oktober 1993 , Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-11503 HT.01.01 Th 93 tanggal 29 Oktober 1993, pendaftaran pada i Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Nopember 1993 No. 3071/1993, Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Nopember 1994 No. 88, Tambahan No. 8832 kemudian beberapa kali diubah, perubahan Nama mejadi PT.Victoria Finance Indonesia berdasarkan akta Berita Acara Rapat PT Maxima Perdana Finance Notaris Eliwaty Tjitra S.H, Notaris di Jakarta No. 46 tanggal 14 Pebruari 2003, persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 Mei 2003, surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-11197 HT.01.04.TH.2003 tanggal 21 Mei 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Daftar Perusahaan d pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat agenda pendaftaran No. 0486/RUB.09.05/IX/2003 tanggal 25 September 2003, Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 September 2003 No. 78 Tambahan No. 9255, perubahan nama menjadi PT Verena Oto Finance berdasarkan akta Berita Acara Rapat PT Victoria Finance Indonesia Notaris Herlien Widjaja, S.H, M.Kn.,Notaris di Jakarta No. 6 tanggal 11 Juni 2003, persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggga 7 Juli 2003, surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-15620 HT.01.04.TH.2003 tanggal 7 Juli 2003, Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat No. 2038/RUB.09.05/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003, Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 2003 No. 87, Tambahan No. 10899 dan kemudian beberapa kali diubah serta perubahan penyesuai anggaran dasar dalam rangka penawaran umum saham perdana sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Verena Oto Finance Tbk. Notaris Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta No. 24 tanggal 18 Januari 2008, persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 Januari 2008, Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-02853.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008, Daftar Perseroan No. AHU-0004398.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008, penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Verena Oto Finance Tbk. oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggla 31 Januari 2008, surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-2566 tanggal 31 Januari 2008, Daftar Perseroan No. AHU-0007610.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008, Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 April 2008 No. 33 Tambahan No. 4709 kemudian mengalami dua kali rubahan serta perubahan mana menjadi PT Verena Multi Finance Tbk sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Verena Oto Finance Tbk. Notaris Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta No. 33 tanggal 27 Agusrtus 2010, persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 September 2010, surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-45965 AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 28 September 2010, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan terakhir diubahn dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Verena Multi Finance Tbk. Notaris Fathiah Helmi SH, Motaris di Jakarta No. 40 tanggal 14 Juni 2012, persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 2012, surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-46418 AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012, Daftar Perseroan No. AHU-0078232.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Saat ini VMF mempunyai 23 (dua puluh tiga) kantor cabang yang berlokasi di Pecenongan, Kelapa Gading, Radio Dalam, Tangerang, GKV Tangerang, Serang, Bekasi, Bogor, Bandung, GKV Semarang, Surabaya, GKV Surabaya, Malang, Banda Aceh, Medan, Labuhanbatu, Palembang, Pekanbaru, Samarinda, Makassar,Banjarmasin, Buaran Jakarta Timur, dan Cikarang - Bekasi. Kantor pusat VMF beralamat di Gedung Bank Panin, Lantai 3, Jalan Pecenongan No. 84, Jakarta Pusat. Jumlah karyawan VMF sebanyak 836 karyawan pada tanggal 30 Juni 2012.

b. Bidang Usaha

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar VMF, ruang lingkup kegiatan utama VMF meliputi usaha pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal meliputi bidang sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Saat ini Perusahaan menjalankan usaha utamanya di bidang pembiayaan konsumen.

Perusahaan dengan nama sebelumnya PT Maxima Perdana Finance, memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No. 994/KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993. Selanjutnya berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004, izin usaha tersebut dinyatakan berlaku bagi Perusahaan.

c. Permodalan

Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang diselenggarakan pada tanggal 23 Maret 2007, sebagaimana yang diaktakan dengan akta notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 32 tanggal 26 Maret 2007, para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan nama Perusahaan dari PT Verena Oto Finance menjadi PT Verena Oto Finance Tbk, perubahan nilai nominal saham Perusahaan dari Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 100 per saham, peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 100 miliar menjadi Rp 200 miliar dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 50 miliar menjadi Rp 54,2 miliar. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. W7-03999 HT.01.04-TH.2007 tanggal 12 April 2007.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham yang telah diaktakan dalam akta notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 81 tanggal 30 Mei 2008, para pemegang saham menegaskan kembali penerbitan 460 juta saham baru yang disertai dengan 46 juta Waran Seri I yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana. Struktur permodalan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Verena Multi Finance Tbk. No. 40 tanggal 14 Juni 2012, Notaris Fathiah Helmi SH, persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 2012, surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-46418 AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012, Daftar Perseroan No. AHU-0078232.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Komposisi pemegang saham VMF sampai dengan 30 Juni 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp100.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.002.000.352	100.200.035.200	
Pemegang Saham:			
1. PT Bank Panin Tbk	429.529.600	42.952.960.000	42,87
2. PT Verena Kapital	243.965.040	24.396.504.000	24,35
3.Murniaty Santoso	97.586.016	9.758.601.600	9,74
4. Masyarakat	230.919.696	23.091.969.600	23,04
Jumlah	1.002.000.352	100.200.035.200	100,00
Saham dalam portepel	997.999.648	99.799.964.800	

Komposisi pemegang saham VMF sampai dengan 30 September 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp100.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.002.000.352	100.200.035.200	
Pemegang Saham:			
1. PT Bank Panin Tbk	429.529.600	42.952.960.000	42,87
2. PT Verena Kapital	243.965.040	24.396.504.000	24,35
3.Murniaty Santoso	97.586.016	9.758.601.600	9,74
4. Masyarakat	230.919.696	23.091.969.600	23,04
Jumlah	1.002.000.352	100.200.035.200	100,00
Saham dalam portepel	2.997.999.648	299.799.964.800	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 08 Nopember 2011 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH notaris di Jakarta dan Akta no. 40 tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, yang telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia no. AHU-46418.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012, Susunan anggota Komisaris dan susunan Direksi VMF adalah sebagai berikut:

Komisaris
Komisaris Utama : Murniaty Santoso
Komisaris : Gunawan Santoso
Komisaris Independen : Iqbal Witjaksono

Direksi
Direktur Utama : Hadi Budiman
Direktur : Andreas Sudarto Samiadji
Direktur : Andi Harjono

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut disajikan data keuangan pokok VMF yang angka-angkanya berasal dan dihitung dari laporan keuangan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 yang memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan standar akuntansi keuangan yang relevan dan efektif berlaku 1 Januari 2012 dan penerbitan kembali laporan keuangan sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan obligasi. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tahun 2010 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan awal PSAK No.50 (Revisi 2006) dan PSAK No.55 (Revisi 2006).

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
Laporan Posisi Keuangan				
Kas dan Bank	45.019	160.341	27.831	4.089
Tagihan Anjak Piutang	-	-	-	-
Investasi Neto Sewa Pembiayaan	1.189.193	1.136.914	797.164	575.525
Piutang Lain-lain	2.580	1.285	1.615	1.842
Biaya Dibayar Dimuka	5.146	3.818	4.010	3.794
Investasi Pada Efek	-	-	-	-
Aset Pajak Tangguhan	4.678	4.694	3.000	1.322
Aset Tetap	30.403	26.496	22.473	12.589
Aset Lain-lain	137.971	120.951	85.061	44.302
Total Aset	1.619.536	1.521.028	961.243	643.464
Total Liabilitas	1.419.779	1.335.521	800.388	508.564
Total Ekuitas	199.756	185.507	160.855	134.900

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni		Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember		
	2012	2011 (Tidak diaudit)	2011	2010	2009
Laporan Laba Rugi Komprehensif					
Pendapatan Usaha	151.031	1 15.964	245.433	195.452	154.578
Beban Usaha	132.283	95.821	212.754	160.136	131.210
Taksiran Pajak Penghasilan	(4.498)	(4.803)	(8.027)	(9.403)	(7.145)
Laba bersih dan Pendapatan Komprehensif	14.249	1 5.340	24.652	2 5.912	16.223
Rasio-Rasio Penting					
Laba Bersih / Total Aset (%)			1,6	2,7	2,5
Laba Bersih / Total Ekuitas (%)			13,3	16,1	12,0
Total Liabilitas / Total Ekuitas (x)			7,2	5,0	3,8

Di akhir Desember 2011, jumlah aset VMF sebesar Rp1.521 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp560 miliar atau sebesar 58,24% dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp961 miliar. Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan usaha antara lain dikarenakan peningkatan saldo Piutang Pembiayaan konsumen-bersih sebesar Rp340 miliar, adanya investasi neto sewa pembiayaan-bersih sebesar Rp46 miliar, peningkatan saldo Aset Tetap Rp4 miliar, serta peningkatan saldo Kas dan Setara Kas sebesar Rp132 miliar yang dikarenakan adanya penerimaan hasil obligasi di bulan Maret 2011 dan Medium Term Notes (MTN) di pertengahan Desember 2011. Posisi aset VMF pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp961 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp318 miliar atau sebesar 49,39% dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp643 miliar. Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan usaha antara lain dikarenakan peningkatan saldo piutang pembiayaan konsumen-bersih sebesar Rp222 miliar, peningkatan saldo Kas dan Setara Kas sebesar Rp24 miliar serta adanya investasi pada perusahaan asosiasi, PT IBJ Verena Finance, sebesar Rp20 miliar.

Posisi liabilitas pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 1.336 miliar meningkat Rp 536 miliar atau 67% dibandingkan posisi liabilitas pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 800 miliar. Peningkatan terutama dikarenakan strategi VMF dalam mendukung pertumbuhan pembiayaan konsumen ditandai dengan peningkatan utang usaha sebesar Rp 11 miliar, penurunan utang bank sebesar Rp 170 miliar dan kenaikan surat berharga yang diterbitkan – bersih sejumlah Rp 697 miliar berupa Obligasi sebesar Rp 500 miliar dan Medium Term Notes (MTN) Rp200 miliar di tahun 2011.Posisi liabilitas VMF pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp800 miliar meningkat Rp292 miliar atau 57,17% dibandingkan posisi liabilitas pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp509 miliar. Peningkatan terutama dikarenakan strategi perusahaan dalam mendukung pertumbuhan pembiayaan konsumen ditandai dengan peningkatan saldo utang bank sebesar Rp270 miliar.

Pendapatan VMF untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp151 miliar, mengalami peningkatan sebesar 30,24% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp116 miliar. Peningkatan terutama karena meningkatnya pendapatan pembiayaan konsumen VMF untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp104 miliar, atau 20,39% dibanding periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2011 yang sebesar Rp86 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai piutang pembiayaan konsumen.

Laba bersih tahun berjalan dan pendapatan komprehensif lainnya VMF untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2010 mencapai Rp26 miliar, mengalami kenaikan sebesar 59,72% dibanding dengan tahun sebelumnya Rp16 miliar. Kenaikan laba bersih dikarenakan peningkatan pada pendapatan pembiayaan konsumen dan pendapatan lain yang terkait dengan transaksi pembiayaan konsumen.

5. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. ("AMAG")

a. Riwayat Singkat

PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk didirikan di Surabaya berdasarkan Akta pendirian PT Asuransi Multi Artha Guna Notaris Haji Bebasa Daeng Lalo, S.H., Notaris di Jakarta, No. 87 tanggal 14 Nopember 1980, persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 29 Januari 1981,Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indnesia No. Y.A.5/28/5 tanggal 29 Januari 1981, pendaftaran pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Pebruari 1981 No. 64/1981 dan No. 65/1981, Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Maret 1982 No. 21, Tambahan No. 314. Anggaran dasar AMAG telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas sebagaimaa termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk Notaris Eliwati Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, No. 85 tanggal 23 Februari 2009, persetujuan Menteri Hukum dan Hak AAsasi Manusia Republik Indonesia tanggal 08 Mei 2009, Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-19502.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 08 Mei 2009. Daftar Perseroan Nomor AHU-0024919.ah.01.09 Tahun 2009 tanggal 08 Mei 2009, Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Agustus 2009 No.64, Tambahan No.21467, , perubahan untuk peningkatan modal dasar menjadi Rp574.600.000.000,- sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk Notaris Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, No. 68 tanggal 30 Juni 2011, persetujuan Mentreri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 Agustus 2011, surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-43095.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 25 Agustus 2011. Daftar Perseroan Nomor AHU-0070759.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011, dan untuk pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiadan terakhir diubah dengan akta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H., MH, MKn, Notaris di Jakarta, No. 71 tanggal 30 Juni 2012, persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 2012, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-43095.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 31 Agustus 2012. Daftar Perseroan No. AHU-0078120.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012, dan untuk pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

AMAG berdomisili di Jakarta dan memiliki delapan cabang (Bandung, Medan, Makassar, Palembang, Surabaya, Bogor, Pekanbaru dan Bandar Lampung) serta dua puluhkantor perwakilan di luar Jakarta (Balikpapan, Bandar Lampung, Banjarmasin, Batam, Bogor, Kendari, Kuta-Bali, Malang, Manado, Padang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Solo dan Yogyakarta, Banda Aceh, Cirebon dan Serpong). Kantor pusat AMAG beralamat di Gedung Panin Pusat Lt. 8 Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. Jumlah karyawan AMAG rata-rata 367 karyawan per tanggal 30 Juni 2012.

b. Bidang Usaha

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar AMAG, ruang lingkup kegiatan AMAG adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang asuransi kerugian termasuk usaha reasuransi kerugian. Kegiatan ini telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. KEP-3251/MD/1986 tanggal 6 Mei 1986 dan No. KEP-5956/MD/1986 tanggal 10 September 1986.

c. Permodalan

Berdasarkan akta No. 24 tanggal 18 Mei 2005, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C-13599.HT.01.04.TH.2005 tanggal 18 Mei 2005, modal dasar AMAG Rp 384.000.000.000 terdiri dari 3.840.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Jumlah waran yangberedar pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebanyak 221.258.000 waran yang diterbitkan melalui

Penawaran Umum Perdana. Periode pelaksanaan waran adalah sejak tanggal 23 Desember 2006 sampai dengan 22 Desember 2010, dengan harga pelaksanaan Rp 100 per saham. Pada tanggal 30 Juni 2012 jumlah waran yang beredar adalah 221.208.000 waran, karena ada pelaksanaan sejumlah 50.000 waran pada tahun 2010. Daftar pemegang saham AMAG berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk Notaris Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, No. 68 tanggal 30 Juni 2011, persetujuan Mentreri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 Agustus 2011, surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-43095.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 25 Agustus 2011, Daftar Perseroan No. AHU-0070759.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011, dan untuk pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H., MH, MKn, Notaris di Jakarta, No. 71 tanggal 30 Juni 2012, persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 2012, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-43095.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 31 Agustus 2012. Daftar Perseroan No. AHU-0078120.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012, dan untuk pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiajo Daftar Pemegang Saham AMAG (Stockholder Index List) per tanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh PT Blue Chip Mulia selaku BAE AMAG pada tanggal 01 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.746.000.000	574.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.873.289.760	287.328.976.000	
Pemegang Saham :			
1. PT Bank Panin Tbk	388.000.000	38.800.000.000	13,50
2. PT Panin Insurance Tbk	928.293.693	92.829.369.300	32,31
3. Dana Pensiun Karyawan Panin Bank	422.868.000	42.286.800.000	14,72
4. Masyarakat dengan kepemilikan masing-masing dibawah 5%	1.134.128.067	113.412.806.700	39,47
Total	2.873.289.760	287.328.976.000	100,00
Saham dalam portepel	2.872.710.240	287.271.024.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk., No. 71 tanggal 28 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.Kn notaris di Jakarta Pusat yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-46346.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012, susunan anggota Komisaris dan Direksi AMAG adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris/Komisaris Independen	:	Aries Liman
Komisaris Independen	:	Tri Hananto Sapto Anggoro
Komisaris	:	Syamsul Hidayat

Direksi

Presiden Direktur/Direktur tidak terafiliasi	:	Linda Juliana J.L. Delhaye
Direktur	:	Dedi Setiawan
Direktur	:	Alexander Hendro Setokusumo

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut disajikan data keuangan pokok AMAG untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 yang angka-angkanya bersumber dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), yang seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2011	2010	2009
Laporan Posisi Keuangan			
Kas dan Bank	9.602	11.317	8.929
Investasi	1.005.868	609.483	463.403
Piutang Premi	7.175	8.389	8.839
Piutang Reasuransi	358	296	971
Piutang Pegawai	34	69	54
Aset Pajak Tangguhan	7.338	5.489	4.772
Aset Tetap	10.658	11.206	13.415
Aset Lain-lain	10.902	8.108	5.941
Total Aset	1.051.935	654.357	506.324
Utang Klaim	271	33	300
Estimasi Klaim Retensi sendiri	51.545	35.925	39.295
Premi yang Belum merupakan Pendapatan	137.175	104.956	88.405
Utang Reasuransi	5.922	5.946	7.446
Utang Komisi	4.164	4.901	3.521
Utang Pajak	9.058	7.295	4.015
Biaya yang masih harus Dibayar	14.321	12.942	13.651
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	20.155	16.312	13.965
Pendapatan Premi Ditangguhkan	143.127	100.644	61.531
Utang Sewa Pembiayaan	275	640	1.320
Utang Lain-Lain	29.517	13.798	1.064
Total Liabilitas	415.530	303.392	234.513
Total Ekuitas	636.405	350.965	271.811

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember		
	2011	2010	2009
Laporan Laba Rugi Komprehensif			
Pendapatan Underwriting	310.717	245.649	218.326
Beban Underwriting	(202.909)	(161.047)	(157.972)
Hasil Investasi	54.298	29.999	33.608
Beban Usaha	(55.088)	(48.921)	(41.694)
Penghasilan Lain-lain	2.376	2.116	2.634
Laba sebelum pajak	109.395	67.796	54.903
Beban pajak	(13.929)	(8.434)	(5.711)
Laba Bersih	95.466	59.362	49.193
Laba Komprehensif	88.107	58.877	49.953
Rasio-Rasio Penting			
Laba Bersih / Total Aset (%)	8,4	9,0	9,0
Laba Bersih / Total Ekuitas (%)	13,8	16,8	18,1
Total Liabilitas / Total Ekuitas (x)	0,65	0,86	0,86

Jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 1.051,93 miliar, mengalami peningkatan sebesar 60,76% dibandingkan dengan aset pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 654,36 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya investasi dalam deposito berjangka.

Jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 415,53 miliar, mengalami peningkatan sebesar 36,96% dibandingkan dengan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 303,39 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan premi yang ditangguhkan.

Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 636,41 miliar, mengalami peningkatan sebesar 81,33% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 350,96 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya modal yang disetor dan saldo laba.

Laba bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 95,47 miliar, mengalami peningkatan sebesar 60,82% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 59,36 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya total pendapatan yang berasal dari pendapatan premi.

6. KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Perseroan dipimpin oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan Komisaris dipilih serta diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal dari RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS tahunan yang ketiga untuk anggota Direksi dan penutupan RUPS tahunan yang kedua untuk anggota Komisaris setelah tanggal pengangkatan mereka.

Tugas dan wewenang Komisaris beserta Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan untuk pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS serta RUPS dapat memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan untuk pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi yang saat ini menjabat telah

ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembagian Tugas Direksi PT Bank Panin Tbk No.01/SK-DK/2010 tanggal 10 Februari 2010.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 71 tertanggal 27 April 2012, yang dibuat dihadapan Indah Fatmawati,S. H., pengganti dari Notaris nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S. H., yang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 31 Juli 2012 Nomor AHU-AH.01.10-28027. Susunan anggota Direksi menjabat sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2012 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan tahun 2015 , susunan anggota Dewan Komisaris menjabat sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 09 April 2012 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan tahun 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Drs. Johnny
Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen	: Drs. H. Bambang Winarno
Komisaris	: Suwirjo Josowidjojo
Komisaris Independen	: Drs. Riyanto

Direksi

Presiden Direktur	: Drs. H. Rostian Sjamsudin
Wakil Presiden Direktur	: Chandra Rahardja Gunawan
Wakil Presiden Direktur	: Roosniati Salihin
Direktur	: Ng Kean Yik
Direktur	: Edy Heryanto
Direktur	: Iswanto Tjitradi
Direktur	: Lionto Gunawan
Direktur	: Hendrawan Danusaputra
Direktur	: Gunawan Santoso
Direktur	: H. Ahmad Hidayat
Direktur Kepatuhan	: Antonius Ketut Dwirianto

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan :

KOMISARIS



DRS. JOHNNY
Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1984. Mengawali karirnya sebagai Assistant to Chief Accountant pada Bank Tabungan Sakura. Jakarta (1975-1977). Mulai bergabung dengan Perseroan tahun 1979 dengan posisi terakhir sebagai Direktur Perseroan hingga tahun 2007, kemudian diangkat menjadi Presiden Komisaris sejak tahun 2007.



DRS. H. BAMBANG WINARNO
Wakil Presiden Komisaris/Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 75 tahun. Menyelesaikan pendidikan pada Perguruan Tinggi Ilmu Keuangan dan Perbankan. Jakarta pada tahun 1967. Mengawali karir pada Bank Dagang Negara dengan posisi terakhir menjabat sebagai Kepala Bagian Konsortium dan Sindikasi Kredit Kantor Pusat (1960-1976). Bergabung dengan Perseroan dengan posisi Kepala Biro Kredit Khusus (1977-2000), selanjutnya menjabat sebagai Komisaris Perseroan (2000-2001) dan diangkat menjadi Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2001.



SUWIRJO JOSOWIDJOJO
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Meraih gelar Bachelor of Science di bidang Business Administration University of San Fransisco. USA pada tahun 1981. Mengawali karirnya dengan bekerja di Bank of California. USA (1982). Mulai bergabung dengan Perseroan sebagai EDP, Customer Service (1982-1983). Selanjutnya menjabat sebagai EDP Manager di Panin Insurance (1983-1984), sebagai General Manager di PT Panin Insurance (1984-1986), sebagai Direktur di PT Panin Insurance Tbk (1986-Juni 2000) dan menjabat sebagai Komisaris di PT Panin Overseas Finance (1994-1998). Bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris sejak tahun 1994.



DRS. RIYANTO
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 67 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1971. Mengawali karirnya pada Departemen Keuangan Ditjen Pengawasan Keuangan Negara sebagai Pemeriksa (1973- 1976), Kepala Internal Audit pada PT Petrokimia Gresik (1975-1978), Bank Indonesia sebagai Pemeriksa Bank Eksekutif (1978-2001), PT Bank Mitra Niaga sebagai komisaris (2001- September 2007). Mulai bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris pada tahun 2004.

DIREKSI



DRS. H. ROSTIAN SJAMSUDIN
Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 71 tahun. Pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial/ Hubungan Masyarakat. Universitas Padjadjaran. Bandung pada tahun 1965. Mengawali karir sebagai Manajer PT Perkebunan XII (1965-1973). Direktur Hotel Kemang Jakarta (1973-1979).Bergabung dengan Perseroan pada tahun 1979 dengan jabatan sebagai Assistant Director (1979-1985), kemudian menjabat sebagai Direktur (1985-1986), Wakil Presiden Direktur (1986-1994) dan diangkat sebagai Presiden Direktur sejak tahun 1994.



CHANDRA RAHARDJA GUNAWAN
Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Meraih gelar Bachelor of Science di bidang Business Administration University of San Fransisco. USA pada tahun 1979. Mengawali karir sebagai Trainee di Crocker National Bank, San Fransisco (1980-1981). Menjabat sebagai Vice president di Chase Manhattan Bank, N.A. (1985-1989). Wakil Presiden Direktur Bank Artha Prima (1990-1991). Direktur BSB Bank (1991-1992). Direktur PT Panin Overseas Finance (1992-1993), bergabung dengan Perseroan dengan jabatan sebagai Direktur (1993-1994) dan sebagai Wakil Presiden Direktur sejak tahun 1994.



ROOSNIATI SALIHIN
Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Pendidikan bahasa Jepang di Kokusai Gakkuyukai. Tokyo (1964-1965). pendidikan sastra Bahasa Inggris di UCLA. Amerika (1965-1968) dan di Sophia University. Tokyo (1968-1970) serta mengikuti pendidikan di Tokyo Business School jurusan Manajemen (1970-1971). Bergabung dengan Perseroan pada tahun 1971 dengan jabatan sebagai International Division (1971-1994), sebagai Executive Vice President (1991-1994), sebagai Senior Executive Vice President (1994-1997) dan menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur (1997-sekarang). Menjabat sebagai Komisaris di berbagai afiliasi Perseroan: Westpac Panin Bank (1991-1993), DKB Panin Finance Ltd. (1991-2000). Senior Executive Vice President (1994-1997), Komisaris PT Clipan Finance Indonesia Tbk (2008-Sekarang) dan sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 1997.



H. AHMAD HIDAYAT
Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia. 74 tahun. Pendidikan Akademi Akuntansi. Bandung pada tahun 1961 dan Universitas Padjadjaran jurusan Ekonomi tahun 1963. Memulai karir pada Bank of America dengan posisi terakhir sebagai Controller (1968-1986). Bergabung dengan Perseroan sebagai Head of Accounting Department (1986-1988). PT Bank Danamon sebagai Head of Accounting Department (1988-1989). Kembali bergabung dengan Perseroan pada tahun 1989 dan menjabat sebagai Assistant to the Board of Directors (1989-1991). Menjabat sebagai Executive Director PT Westpac Panin Bank (1991-1992). Kembali bergabung dengan Perseroan sebagai Member of the Supervisory Board (1992-1994). dan sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1994.



ISWANTO TJITRADI
Direktur

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Science di bidang Business Administration University of San Fransisco. USA pada tahun 1980. Mengawali karir perbankan sebagai Account Offcer di Citibank. N.A., Jakarta (1980-1982). Menjabat sebagai Direktur pada beberapa perusahaan dalam Gunung Sewu Group (1982-1987), PT Poniman Group (1987-1988), sebagai senior manager di PT Multicor (1988-1989). Kembali bergabung dengan Citibank. N.A., dengan posisi terakhir sebagai Assistant Vice President-Structure Finance Unit (1989-1990), selanjutnya bergabung dengan Lippo Bank dengan posisi terakhir sebagai Senior Vice President Corporate Banking Group Head (1990-1996). Bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1996.



LIONTO GUNAWAN
Direktur Umum dan Personalia

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Science di bidang Finance dari San Fransisco State University. USA pada tahun 1988. Mengawali karir perbankan di PT Westpac Panin Bank sebagai Manager (1991-1993). Menjabat sebagai Direktur PT ANZ Panin Bank (1993-1997) dan bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur pada tahun 1997 sampai dengan sekarang.



EDY HERYANTO
Direktur Kredit

Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Menyelesaikan pendidikan pada Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan – Padang 1986 dan Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (1987-1988). Memulai karirnya di perbankan sebagai Credit Analyst dan Marketing Officer pada Bank Universal (1988-1990). Bergabung dengan Perseroan pada tahun 1990 sebagai Senior Assistant Marketing Manager (1990-1991), dengan posisi terakhir sebagai Vice President dengan jabatan Pemimpin Cabang Palmerah (1994-2004). Diangkat sebagai Direktur Kredit Perseroan pada tahun 2004.



HENDRAWAN DANUSAPUTRA
Direktur International Banking

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Pendidikan Computer Science di University of Technology. Sydney pada tahun 1988. Mengawali karir perbankan sebagai Loans Department Officer di Sumitomo Niaga Bank. Jakarta (1989-1990). Kemudian bergabung dengan American Express TRS, Jakarta sebagai Manager Cashier and Treasury Operations (1990-1992). Head of Financial Institutions & Regional Manager (1992-1994). Director Correspondent Banking (1994-1996). Selanjutnya bergabung dengan Perseroan pada tahun 1996 sebagai Vice President International (1996-Juni 2007). Komisaris PT Clipan Finance Tbk (2004-Juni 2007) dan diangkat sebagai Direktur pada tahun 2007.



GUNAWAN SANTOSO
Direktur Treasury

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Pendidikan Sarjana Teknik di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1989. Mengawali karirnya di Perseroan sebagai Assistant Manager Bagian Pasar Uang (1989-1991). Manager Treasury (1991-1993). Assistant Vice President Treasury (1993-1995). Vice President Treasury (1995-Juni 2007), Komisaris PT Clipan Finance Tbk. (2000-Juni 2007), Komisaris PT Verena Multi Finance Tbk (2011-sekarang). Kemudian diangkat menjadi Direktur sejak tahun 2007.



NG KEAN YIK
Direktur Retail Baking

Warga negara Malaysia, 56 tahun. Meraih gelar MBA di tahun 1993 dari University of Melbourne. Mengawali karir profesionalnya sebagai auditor KPMG Melbourne (1978-1985), sebelum bergabung dengan ANZ Melbourne tahun 1985-1987 sebagai Manager Audits Development, Group Audit. Kemudian menjabat berbagai posisi di ANZ, dengan posisi terakhir sebagai Executive Strategic Development International (Mei 2000-September 2002). Bergabung dengan Panin Bank tahun 2002 sebagai Senior Executive Advisor (September 2002-Mei 2006), sebagai Presiden Direktur PT Epanin Dotcom (Januari 2003 – Maret 2009), sebagai Consumer Banking Head (Mei 2006-November 2007) dan Group General Manger Retail Banking (November 2007- Juni 2008). Diangkat sebagai Direktur pada tahun 2008.



ANTONIUS KETUT DWIRIANTO
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Sebelas Maret tahun 1991 dan Master di bidang Hukum dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2008. Mengawali karirnya di bidang perbankan di Bank CIC Jakarta pada tahun 1992 sebagai kepala Cabang (1995-1999). Bergabung dengan Perseroan sebagai Kepala Divisi Kepatuhan (2001 – 2009) dan kemudian diangkat menjadi Direktur sejak tahun 2009.

Pada tanggal 8 September 2009 Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda:
1. Merubah Pasal 17.1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mengangkat saudara Antonius Ketut Dwirianto selaku Direktur Kepatuhan untuk sisa masa jabatan anggota direksi Perseroan sejak ditutupnya RUPS ini.

Perubahan Pasal 17.1 Anggaran Dasar Perseroan baru berlaku setelah diterima serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Pengangkatan Bapak Antonius Ketut Dwirianto baru berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
Penunjukan seluruh anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan dengan peraturan Bapepam Nomor IX.I.6.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi Perseroan adalah sebesar Rp20.492 juta, Rp71.902 juta dan Rp11.106 juta, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2011, 2010 dan 2009. Gaji dan tunjangan diberikan berdasarkan orientasi kerja, persaingan pasar dan kapasitas keuangan Perseroan yang telah disampaikan melalui RUPS berdasarkan usulan dari Komite Remunerasi Perseroan.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia dengan surat No. 9/44/DPB3/TPB3-5/Rahasia tanggal 1 November 2007, surat No.10/80/DPIP/Rahasia tanggal 4 Juni 2008, dan surat No.11/148/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 16 November 2000.

KOMITE AUDIT

Sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 beserta perubahannya Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Perseroan telah membentuk Komite Audit. Susunan keanggotaan dan ruang lingkup tugas Komite Audit telah disesuaikan dengan Peraturan-peraturan dimaksud.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut :

DRS. RIYANTO, ketua merangkap anggota komite audit Perseroan
Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1971. Mengawali karirnya pada Departemen Keuangan Ditjen Pengawasan Keuangan Negara sebagai Pemeriksa dan Bank Indonesia sebagai Pemeriksa Bank Eksekutif (1978-2001). Sejak tahun 2004 hingga saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan dan merangkap sebagai Ketua Komite Audit Perseroan.

SUSANTO SORIP, anggota komite audit Perseroan
Warga negara indonesia, lahir pada tahun 1964 di jakarta. Lulus dari the university of new south wales tahun 1983, randwick technical college tahun 1984, colombo plan scholarship for indonesia overseas student tahun 1988. Mengawali karirnya di bangkok bank ltd sejak 1990 – 1991 sebagai credit & marketing officer dan sebagai direktur utama pt multi agro gemilang plantation (2010-sekarang). Saat ini juga merangkap sebagai anggota komite audit perseroan.

ADRIANA MULIANTO, anggota komite audit Perseroan
Warga Negara Indonesia, 33 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta pada tahun 2002. Mengawali karirnya sebagai auditor eksternal pada sebuah Kantor Akuntan Publik (2001-2002). Bekerja di bidang Akuntansi dan Keuangan pada PT Pacific Republic International. Saat ini menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan.

LUKMAN, anggota komite audit Perseroan
Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta. Mengawali karirnya sebagai Supervisor pada Kantor Akuntan Publik Drs. Utomo, Mulia & Co – SGV pada tahun 1973, KAP Capelle Tuanakotta, pada tahun 1979 – 1989 dan KAP Hans Tuanakotta Mustofa, deloitte Touche (1990 – 2002). Komisaris Independen PT Clipan Finance Indonesia sejak tahun 2009 dan ditunjuk menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Mei 2010.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 beserta perubahannya Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko. Susunan keanggotaan dan ruang lingkup tugas Komite Pemantau Risiko telah disesuaikan dengan Peraturan-peraturan dimaksud.

Komite Pemantau Risiko bertindak mewakili Dewan Komisaris dan bertanggung jawab serta berfungsi memantau dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

a. Mengevaluasi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank.
c. Mengevaluasi dan memberikan masukan atas rekomendasi dari Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko dirangkap oleh anggota Komite Audit Perseroan.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 beserta perubahannya Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi. Susunan keanggotaan dan ruang lingkup tugas Komite Remunerasi dan Nominasi telah disesuaikan dengan Peraturan-peraturan dimaksud.

Komite ini bertugas merancang dan mengevaluasi remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif serta menominasikan calon / kandidat pengurus Bank.

Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Drs. H. Bambang Winarno
2. Anggota : Drs. Riyanto
3. Anggota : Suwirjo Josowidjojo
4. Anggota : Yusak Zefanya

Drs. H. Bambang Winarno, Ketua
Warga Negara Indonesia, 74 tahun. Menyelesaikan pendidikan pada Perguruan Tinggi Ilmu Keuangan dan Perbankan. Jakarta pada tahun 1967. Mengawali karir pada Bank Dagang Negara dengan posisi terakhir menjabat sebagai Kepala Bagian Konsortium dan Sindikasi Kredit Kantor Pusat (1960-1976). Bergabung dengan Perseroan dengan posisi Kepala Biro Kredit Khusus (1977-2000), selanjutnya menjabat sebagai Komisaris Perseroan (2000-2001) dan diangkat menjadi Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2001.

Drs. Riyanto, Anggota
Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1971. Mengawali karirnya pada Departemen Keuangan Ditjen Pengawasan Keuangan Negara sebagai Pemeriksa dan Bank Indonesia sebagai Pemeriksa Bank Eksekutif (1978-2001). Sejak tahun 2004 hingga saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan dan merangkap sebagai Ketua Komite Audit Perseroan.

Suwirjo Josowidjojo, Anggota
Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Meraih gelar *Bachelor of Science* di bidang *Business Administration University of San Fransisco*, USA pada tahun 1981. Mengawali karirnya dengan bekerja di *Bank of California*. USA (1982). Mulai bergabung dengan Perseroan sebagai *Account Officer* (1982-1983). Selanjutnya menjabat sebagai Manager di Panin Insurance (1983-1984), sebagai General Manager (1984-1986), sebagai Direktur (1986-2000) dan menjabat sebagai Presiden Direktur (2000-sekarang). Bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris sejak tahun 1994.

Yusak Zefanya, Anggota
Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Meraih gelar *Master of Art* di bidang *Leadership* dari STT International Harvest, pada tahun 2007. Mengawali karirnya dengan bekerja di PT Masa Ponko Corporation (1980) dan PT Gunung Agung (1982). Mulai bergabung dengan Perseroan sebagai Staf Bagian Umum dan Bagian Personalia (1982-1991). Selanjutnya menjabat sebagai Kepala Bagian Personalia (1991-2005) dan menjabat sebagai Kepala Biro Umum dan Personalia (2005-sekarang).

SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)
Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan juncto Peraturan Pencatatan Efek PT Bursa Efek Indonesia (dahulu PT Bursa Efek Jakarta) Nomor 1-A lampiran II Keputusan Direksi BEJ Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, pada saat ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Panin Tbk., Nomor 033/DIR/BUP/SJ/97 Tanggal 23 Januari 1997, Perseroan telah menunjuk Jasman Ginting sebagai *Corporate Secretary* yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas.

7. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DALAM PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA SERTA ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PENYERTAAN

Nama	Perseroan	Pemegang Saham Utama	Anak Perusahaan dan Perusahaan Penyertaan										
		PF	VT	AMA	CFI	PSE	VMF	BPS	BAI	SBPI	FAC	SKV	EF
Drs. Johnny	PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drs. H. Bambang Winarno	WPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suwirjo Josowidjojo	K	WPK	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-
Drs. Riyanto	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drs. H. Rostian Sjamsudin	PD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chandra R. Gunawan	WPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roosniati Salihin	WPD	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-
Ng Kean Yik	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edy Heryanto	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lionto Gunawan	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hendrawan Danusaputra	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gunawan Santoso	D	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-
Iswanto Tjitradi	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H. Ahmad Hidayat	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antonius Ketut Dwirianto	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mu'min Ali Gunawan	-	PK	-	-	PK	PK	-	-	-	-	-	-	-
Fadjar Gunawan	-	PD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

D	=	Direktur	VT	=	Votraint No. 1103 PTY Ltd	BAI	= PT ANZ Panin Bank
K	=	Komisaris	PL	=	PT Panin Life Tbk	SBPI	= PT Sarana Bersama
PD	=	Presiden Direktur	AMA	=	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	FAC	= PT First Asia Capital
PK	=	Presiden Komisaris	CFI	=	PT Clipan Finance Indonesia Tbk	SKV	= PT Sarana Kalsel Ventura
WPD	=	Wakil Presiden Direktur	PSE	=	PT Panin Sekuritas Tbk	EF	= PT Evergreen Finance
WPK	=	Wakil Presiden Komisaris	VMF	=	PT Verena Multi Finance Tbk		
PB	=	Perseroan/ PT Bank Pan Indonesia Tbk	BPS	=	PT Bank Panin Sayrian (d/h Bank Harfa)		

8. HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PENGURUS DAN PENGAWAS PERSEROAN DENGAN PENGURUS DAN PENGAWAS PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Nama	Drs. Johnny	Drs. H. Bambang Winarno	Suwirjo Joso widjojo	Drs. Riyanto	Drs. H. Rostian Sjamsudin	Chandra Rahardja Gunawan	Roosniati Salihin	Ng Kean Yik	Edy Heryanto	Lionto Gunawan	Hendrawan Danusaputra	Gunawan Santoso	Iswanto Tjitradi	H. Ahmad Hidayat	Antonius Ketut Dwirianto
	Presiden Komisaris	Wakil Presiden Komisaris	Komisaris	Komisaris	Presiden Direktur	Wakil Presiden Direktur	Wakil Presiden Direktur	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur
PT Panin Financial Tbk															
• Mu'min Ali Gunawan (PK)	-	-	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	-	-
• Suwirjo Josowidjojo (K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Sophie Soelaiman (KI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Fadjar Gunawan (PD)	-	-	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	-	-
• Bhindawati Gunawan (WPD)	-	-	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	-	-
• Marwan Noor (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vortraint No. 1103 Pty. Ltd															
• Nicholas John Cowell (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Wayne Hugh Stevenson (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :
T = Terafiliasi

9. HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PENGURUS DAN PENGAWAS PERSEROAN DENGAN PENGURUS DAN PENGAWAS ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PENYERTAAN

Nama	Drs. Johnny	Drs. H. Bambang Winarno	Suwirjo Joso widjojo	Drs. Riyanto	Drs. H. Rostian Sjamsudin	Chandra Rahardja Gunawan	Roosniati Salihin	Ng Kean Yik	Edy Heryanto	Lionto Gunawan	Hendrawan Danusaputra	Gunawan Santoso	Iswanto Tjitradi	H. Ahmad Hidayat
	Presiden Komisaris	Wakil Presiden Komisaris	Komisaris	Komisaris	Presiden Direktur	Wakil Presiden Direktur	Wakil Presiden Direktur	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur	Direktur
PT Panin Sekuritas Tbk														
• Mu'min Ali Gunawan (PK)	-	-	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	-
• Aries Liman (WPK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Kun Mawira (K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Poppy S. Dharsono (K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Peter Setiono (KI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• I Made Rugeh Ramia (KI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Handrata Sadeli (PD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Rosmini Lidarjono (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Menas Shahaan (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Indra Christanto (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Clipan Finance Indonesia Tbk														
• Mu'min Ali Gunawan (PK)	-	-	-	-	-	T	-	-	-	T	-	-	-	-
• Roosniati Salihin (K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Suwirjo Josowidjojo (K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Veronika Lindawati (KI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Lukman Abdullah (KI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Gita Puspita Kirana Darmawan (PD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Suhendra (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk														
• Aries Liman (PK/KI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Syamsul Hidayat. AAIK-HC (K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Tri Hananto Sapto Anggoro (KI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Linda Juliana J.L. Delhaye (PD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Dedi Setiawan (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Alexander Hendro Setokusumo (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Bank ANZ Indonesia														
• Enrique V. Bernardo (PK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Bill Foo Say Mui (K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Jusuf Arbianto Tjondrolukito (KI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Anies Rasyid Baswedan (KI)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Joseph Abraham (PD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Ajay Mathur (WPD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Muhammadian Rostian (D)	-	-	-	-	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Soewandy (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Martin Mulwanto (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Luskito Hambali (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Verena Multi Finance Tbk														
• Murniaty Santoso (PK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Gunawan Santoso (K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Iqbal Witjaksono (K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Hadi Budiman (PD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Iman Santoso Iskandar (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Andi Harjono (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Bank Panin Syariah (d/h Bank Harfa)														
• Wouter Tedjarahardja (PK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Jasman Ginting Munthe (K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Yumirati Kartina (K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Deny Hendrawati (PD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Fathorrahman (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Sukisari (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Budi Prakoso (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Sarana Bersama Pembiayaan Ind.														
• Basuki Setiadjit (K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Adilaksana Putranto (PD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :
T = Terafiliasi

10. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan senantiasa menyadari ketergantungan kinerja usahanya pada keberhasilan pengembangan aset sumber daya manusianya. Oleh karenanya, kami selalu menempatkan investasi pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu agenda terpenting Perseroan. Perseroan telah menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pengembangan, yang mencakup program inti pengembangan pengetahuan perbankan seperti pengelolaan risiko, maupun pengembangan pengetahuan profesional dan kepemimpinan.

Sebagai sebuah Bank yang mempekerjakan karyawan dengan berbagai talenta dan keahlian, Perseroan juga memberi prioritas pada pengembangan budaya dan lingkungan kerja yang positif agar karyawan dapat merealisasikan seluruh potensialnya. Selama ini, Perseroan telah berhasil membangun iklim kerja yang sangat mendukung dan mendorong kerjasama erat antar karyawan berdasarkan prinsip saling percaya. Dengan demikian, Perseroan dapat mengambil manfaat dari tingginya loyalitas karyawan seperti terrefleksikan pada angka rata-rata lama bekerja karyawan. Untuk mendorong motivasi karyawan, Perseroan juga menawarkan skema *insentif* yang menarik berbasis kinerja bagi para karyawan dengan kinerja yang terbaik.

Program-program pelatihan Perseroan yang paling berhasil adalah Panin Professional Program. Program ini bertujuan untuk menyiapkan tenaga-tenaga kompeten seperti tenaga penjual baik commercial bisnis maupun retail bisnis, tenaga operasional serta tenaga auditor sesuai bidang kerja masing-masing, melalui program pendidikan yang komprehensif dan intensif. Panin Professional Program ini meliputi: *Account Officer Program Commercial* (AOP Commercial), *Account Officer Program* KPR (AOP KPR), C*redit Analyst/Reviewer Development Program* (CADP), *Relationship Management Program* (RMP), *Internal Audit Officer Program* (IAOP) dan *Operation Professional Program* (OPP).
Perseroan juga mengelenggarakan pelatihan-pelatihan secara internal dan mengirimkan karyawan untuk mengikuti seminar dan pendidikan pada lembaga-lembaga tertentu di dalam dan luar negeri. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan proses operational dan service termasuk peningkatan pemahaman akan internal control, mitigasi resiko, anti fraud awereness, serta peningkatan penguasaan *banking system.*

Selain menerima gaji yang telah memenuhi standar Upah Minimum Propinsi dan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan seperti yang tersebut di atas, Perseroan juga menyediakan berbagai fasilitas. antara lain:

a. Fasilitas pinjaman
   - Pinjaman untuk membeli, membangun dan merenovasi rumah
   - Pinjaman untuk membeli kendaraan bermotor
   - Pinjaman lain-lain.
b. Perusahaan memberikan tunjangan hari raya sesuai dengan peraturan yang berlaku
c. Gratifikasi diberikan berdasarkan pencapaian kinerja masing-masing Karyawan yang disesuaikan dengan kemampuan Kantor Cabang/Divisi/Biro/Group dan Perusahaan secara keseluruhan,
d. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) mencakup:
   - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
   - Jaminan Hari Tua (JHT)
   - Jaminan Kematian

e. Perawatan Kesehatan
Perusahaan memberikan fasilitas perawatan kesehatan untuk semua Karyawan Panin melalui kerjasama dengan Perusahaan Asuransi. Fasilitas perawatan Kesehatan yang diterima oleh Karyawan yaitu :
- Rawat Inap
- Rawat Jalan
- Rawat Gigi
- Kacamata
- Melahirkan

f. - Bantuan Suka
Diberikan untuk Karyawan yang menikah untuk pertama kalinya atau menikahkan anaknya dengan maksimum 3 orang anak dan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku
- Bantuan Duka
Diberikan untuk Karyawan sehubungan dengan kematian keluarga terdekat (istri/suami, ayah/ibu, ayah/ibumertua) dan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika pegawai meninggal dunia maka Perusahaan akan memberikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:
- Gaji/upah pegawai pada bulan yang sedang berjalan
- Uang duka
- Pensiun bagi janda/duda yang ditinggalkan.

g. Jaminan Hari Tua (Pensiun)
Kepada pegawai yang telah mencapai usia 55 tahun akan diberikan uang pensiun. Atau kepada ahli warisnya yang ditunjuk akan diberikan pensiun yang dibayarkan sesuai peraturan Dana Pensiun.

Komposisi Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan tetap per 31 Agustus 2012 tercatat sejumlah 6.555 orang atau mengalami peningkatan 13.5% dari jumlah karyawan pada akhir tahun 2011 yang berjumlah 5.772 orang.

Komposisi karyawan tetap sampai dengan akhir bulan 31 Agustus 2012 menurut jenjang manajemen. jenjang pendidikan dan jenjang usia adalah sebagai berikut:

No	Jenjang Manajemen	Aug 2012		2011		2010		2009		2008		2007	
		∑ *	%	∑ *	%	∑ *	%	∑ *	%	∑ *	%	∑ *	%
1	Manajemen Puncak	15	0.23%	15	0.3%	14	0,28	14	0,30	14	0,33	15	0,40
2	Manajemen Madya	1.550	23.65%	1.468	25.4%	1.372	27,60	1.323	28,50	1031	24,20	888	23,62
3	Pelaksana	4.990	76.13%	4.289	74.3%	3.585	72,12	3.216	71,20	3216	75,47	2.857	75,98
Total		6.555	100,00	5.772	100,00	4.971	100	4.553	100,00	4261	100,00	3.760	100,00

*) ∑ = Jumlah Orang

No	Jenjang Pendidikan	Aug 2012		2011		2010		2009		2008		2007	
		∑ *	%	∑ *	%	∑ *	%	∑ *	%	∑ *	%	∑ *	%
1	SD	15	0.23%	15	0.3%	20	0,40	22	0,47	24	0,56	24	0,64
2	SLTP	40	0.61%	40	0.7%	47	0,95	48	1,03	51	1,20	55	1,46
3	SLTA	620	9.46%	622	10.8%	646	13,00	643	13,85	648	15,21	774	20,59
4	Akademi/D3	803	12.25%	763	13.2%	706	14,20	686	14,78	645	15,14	538	14,31
5	Sarjana/S1	4.934	75.27%	4.202	72.8%	3.446	69,32	3.143	67,71	2799	65,69	2.306	61,33
6	S2	143	2.18%	130	2.3%	106	2,13	100	2,15	94	2,20	63	1,68
Total		6.555	100,00	5.772	100,00	4.971	100,00	4.642	100,00	4261	100,00	3.760	100,00

*) ∑ = Jumlah Orang

No	Jenjang Usia	Aug 2012		2011		2010		2009		2008		2007	
		∑ *	%	∑ *	%	∑ *	%	∑ *	%	∑ *	%	∑ *	%
1	18 - 25 tahun	1158	17.67%	815	14.1%	676	13,60	555	11,96	583	13,68	443	11,78
2	26 - 35 tahun	3390	51.72%	3.055	52.9%	2.488	50,05	2.351	50,65	2062	48,39	1.798	47,82
3	36 - 45 tahun	1241	18.93%	1.190	20.6%	1.159	23,32	1.141	24,58	1063	24,95	1.009	26,84
4	46 - 55 tahun	623	9.50%	600	10.4%	566	11,39	524	11,29	490	11,50	449	11,94
5	Di atas 55 tahun	143	2.18%	112	1.9%	82	1,65	71	1,53	63	1,48	61	1,62
Total		6.555	100,00	5.772	100,00	4.971	100,00	4.642	100,00	4261	100,00	3.760	100,00

*) ∑ = Jumlah Orang

Selain 6.555 karyawan tetap tersebut di atas, per 31 Agustus 2012 di Perseroan juga terdapat 2.242 orang karyawan kontrak yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi karyawan tetap serta 1 orang tenaga kerja asing. Perseroan memiliki satu serikat pekerja yang dibentuk oleh pegawai Perseroan dengan nama Ikatan Karyawan Bank Panin (IKBP), yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 2000.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai tenaga kerja asing tersebut:

Nama	Kebangsaan	Jabatan	Surat Ijin	Masa Berlaku
Ng Kean Yik	Malaysia	Direktur Retail Banking	Dari KEMENAKERTRANS RI : IMTA No. 01085/ MEN/P/IMTA/2012	15 Maret 2012 s/d 14 Maret 2013
			Dari Keimigrasian KITAS No. 2C21JE1907-L	s/d 14 Maret 2013

11. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan memiliki perjanjian dengan Pihak Ketiga yang dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan, seperti perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan, perjanjian dalam rangka transaksi repo, pemeliharaan dan pengelolaan arsip, penggunaan jasa *outsourcing*, penggunaan jasa aplikasi sistem teknologi informasi, sistem kliring elektronik, penutupan asuransi, pemasaran produk *bancassurance*, agen penjualan, penyaluran dana dengan sistem *channeling* dan lain-lain. Sebagian besar perjanjian tersebut bersifat tidak material sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan tidak bersifat benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang benturan kepentingan transaksi tertentu, atau walaupun memenuhi unsur Benturan Kepentingan namun termasuk sebagai Transaksi Yang dikecualikan dari ketentuan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan No. IX.E.1.

Adapun perjanjian penting yang nilainya cukup material adalah :

Perjanjian Penerimaan Pinjaman dari Luar Negeri

1. Perjanjian dengan DEG – *Deutsche Investitions Und Entwicklungsgesellschaft* MBH, Jerman, dalam rangka penerimaan fasilitas pinjaman luar negeri, sebagai berikut:
   - Nilai transaksi : USD 30 juta
   - Jangka waktu : 5 (lima) tahun, jatuh tempo 31 Desember 2014.
   - Manfaat bagi Perseroan : sebagai sumber pendanaan jangka panjang untuk penyediaan pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor.

2. Perjanjian dengan *Barclays Bank Plc* – London, dalam rangka penerimaan fasilitas pinjaman luar negeri jangka panjang, sebagai berikut:
   - Nilai transaksi : USD 50 juta
   - Jangka waktu : 5 (lima) tahun, jatuh tempo 10 Maret 2014.
   - Manfaat bagi Perseroan : sebagai sumber pendanaan jangka panjang untuk mempebaiki komposisi pendanaan jangka panjang Perseroan.

3. Perjanjian dengan *Societe De Promotion Et De Participation Pour La Coorperation Economique S.A (Proparco)* – Bank Pembangunan Prancis, dalam rangka penerimaan fasilitas pinjaman luar negeri jangka panjang, sebagai berikut:
   - Nilai transaksi : USD 25 juta
   - Jangka waktu : 7 (tujuh) tahun , jatuh tempo 30 April 2018
   - Manfaat bagi Perseroan : sebagai sumber pendanaan pembiayaan usaha mikro yang disalurkan Perseroan

Seluruh pinjaman luar negeri yang diperoleh oleh Perseroan memiliki kedudukan yang sama terhadap hutang-hutang Perseroan yang lain dan terhadap seluruh Obligasi yang diterbitkan Perseroan, kecuali terhadap Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh Perseroan pada tahun 2008.

Transaksi-transaksi ini tidak merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1. Ketentuan Pasal 16 ayat 2 huruf g *Loan Agreement* dengan DEG merupakan *negative covenant* yang dapat menghalangi pemegang saham untuk menerima haknya dalam hal kondisi Perseroan berada dalam keadaan *Event of Default.*

Yang dimaksud dengan *Event of Default* dalam perjanjian tersebut antara lain adalah apabila Perseroan mengalami kegagalan dalam pembayaran kepada kreditur atau apabila pembayaran dividen menyebabkan CAR Perseroan mengalami penurunanan dibawah ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator.

Namun adalah sesuatu yang wajar bila dalam keadaan Default suatu Perusahaan tidak melakukan pembagian dividen tunai. Lagi pula jumlah pinjaman sebesar USD 30 juta tersebut nilainya tidak material dan hanya mewakili 0,21% dari total Aktiva Perseroan, sehingga Perseroan tidak mengalami kesulitan untuk melunasi pinjaman tersebut bila diperlukan.

Tidak ada pembatasan-pembatasan negatif (*negative covenant*) terhadap hak pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi terkait dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan.

12. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Pada tanggal 30 Juni 2012 hingga tanggal 31 Agustus 2012 Perseroan menghadapi ataupun tersangkut dalam sejumlah perkara hukum di sejumlah badan peradilan baik yang masih dalam proses acara maupun yang telah putus namun putusannya belum berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*).

Dari perkara-perkara Perseroan tersebut sebagian besar merupakan perkara permohonan eksekusi jaminan kredit nasabah debitur Perseroan yang mengalami wanprestasi pembayaran. Penanganan perkara dilakukan oleh atau dibawah tanggung jawab kantor yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Perkara-perkara tersebut adalah sebagai berikut :

A. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Pusat

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	Pengadilan Pajak	Sengketa pajak	Berkas sengketa No. 25.040628.1997	Perseroan (Pemohon Banding) melawan Dirjen Pajak (Termohon Banding)	**Materi Sengketa:** Banding atas Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-692/PJ.07/2008 tanggal 19 Desember 2008 berkenaan dengan SKPKBT PPh Pasal 4 Masa – Tahun1997 No. 00001/340/97/091/07 tanggal 10 Oktober 2007. **Kasus Posisi**: Dalam surat Termohon Banding kepada Sekretaris Pengadilan Pajak No. S-4948/PJ.072/2009 tanggal 16 Juni 2009 diuraikan bahwa Perseroan mengajukan keberatan atas SKPKBT PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s/d Desember 2007 No. 00001/340/97/091/07 tanggal 10 Oktober 2007 yang dikenakan kepada Perseroan melalui surat Perseroan No. 002/DIR/EXT/08 tanggal 4 Januari 2008, dimana menurut Perseroan total jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp0 sedangkan menurut Termohon Banding adalah sebesar Rp 9.093.691.124, dan atas keberatan tersebut Termohon Banding telah mengeluarkan surat SK No. KEP-692/PJ.07/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang isinya menolak keberatan Perseroan dan mempertahankan SKPKBT PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s/d Desember 2007 No. 00001/340/97/091/07 tanggal 10 Oktober 2007 dengan total jumlah yang masih harus dibayar Perseroan sebesar Rp 9.093.691.124. Dalam rangka banding tersebut Termohon Banding mengambil kesimpulan bahwa Pemohon Banding memasarkan deposito PBII yang berkedudukan di Republik Nauru namun Perseroan tidak memotong PPh Pasal 4 ayat (2) sehingga Perseroan harus membayar atau terutang bunga deposito PBII sebesar Rp 30.312.303.750 dan memohon Pengadilan Pajak agar mempertahankan SKPKBT PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s/d Desember 2007 No. 00001/340/97/091/07 tanggal 10 Oktober 2007 tersebut. Pengadilan Pajak telah menyampaikan surat uraian Banding Termohon Banding tersebut kepada Perseroan dalam suratnya No. B.1131/SP.21/2009 tanggal 30 Juni 2009 yang menjelaskan surat permohonan banding Perseroan adalah surat No. 040/DIR/EXT/09 tanggal 16 Pebruari 2009.	4 Agustus 2010 pembacaan Putusan Pengadilan Pajak No. Put.25125/ PP/M.VIII/25/2010. Dalam putusan tersebut Perseroan sebagai pihak yang menang. Tidak ada pengajuan PK dari Ditjen Pajak.

					07 Agustus 2009 Perseroan mengirim Surat Bantahan atas Surat Uraian Banding No. S-4948/ PJ.0772/2009 Tanggal 16-06-2009 (surat Pengadilan Pajak No. B.1131/ SP.21/2009 Tanggal. 30-06-2009 Perseroan tetap mempertahankan bahwa Perseroan tidak ada kewajiban memotong PPh Ps 4 (2) atas bunga yang dibayarkan PBII 4 Agustus 2010 dibacakan Putusan Pengadilan Pajak No. Put.25125/PP/M.VIII/25/2010 yang isinya memutuskan dan menetapkan: Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding thd Kep DJP No Kep-692/WPJ. 07/2008 Tanggal 19 Desember 2008 tentang keberatan atas SKPKBT No. 00001/340/97/091/07 Tanggal 10/102007 an Perseroan, sehingga PPh Ps 4 92) yang harus dibayar menjadi "Nihil".	
2.	Pengadilan Pajak	Sengketa pajak	Berkas sengketa No. 99.040398.1993	Perseroan (Penggugat) melawan Dirjen Pajak (Tergugat)	**Materi Sengketa:** Gugatan atas surat Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu No. S-1026/WPJ.19/ KP.01/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 perihal Permohonan ke-2 pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun Pajak 1993 No. 00062/206/93.054/95 tanggal 3 Nopember 1995. **Kasus Posisi**: Perseroan memperoleh jawaban atas suratnya No. 017/DIR/EXT/09 tanggal 30 Januari 2009 dalam surat KPP Wajib Pajak Besar Satu No. S-1026/WPJ.19/ KP.01/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 sehubungan permohonan ke-2 Perseroan berupa pembatalan SKPKB PPH Badan Tahun Pajak 1993 No. 00062/206/ 93.054/95 tanggal 3 Nopember 1995 dengan nilai Rp 10.277.720.712 telah disetujui Perseroan sebesar Rp 567.276.150 sehingga menjadi sebesar Rp 9.710.444.562, dan Perseroan mohon dibatalkan menjadi nihil. Permohonan ke-1 diajukan Perseroan dalam suratnya No. 116/DIR/EXT/08 tanggal 1 April 2008. Permohonan diajukan Perseroan karena perkara gugatan Perseroan atas SKPKB PPH Badan No. 00062/206/93/054/95 tanggal 3 Nopember 1995 kepada PTUN dalam putusannya tanggal 10 Juni 1999 telah dimenangkan oleh Perseroan dengan amar putusan membatalkan SKPKB PPH Badan No. 00062/206/93/054/95 dimana atas putusan tersebut BPSP mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung telah menolak kasasi tersebut. 14 April 2009, sehubungan surat gugatan Perseroan maka KPP Wajib Pajak Besar Satu mengeluarkan surat tanggapannya No. S-343/WPJ.19/2009 tanggal 14 April 2009. 27 Mei 2009, sehubungan surat tanggapan KPP Wajib Pajak Besar Satu maka Perseroan telah mengeluarkan surat bantahannya No. 126/DIR/EXT/09 tanggal 27 Mei 2009. 14 Oktober 2009 diucapkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put.20148/PP/ M.VIII/99/2009; MENGADILI: Menyatakan permhonan gugatan Penggugat thdp Kep DJP No. S-1026/WPJ.19/ KP.01/2009 Tanggal 05 Pebruari 2009 tentang Permohonan ke 2 Pembatalan SKPKB PPh Badan Th 1990 No. 00062/206/93/054/95 Tanggal 03 Nopember 1995 an Panin bank NPWP: 01.312.166.0-091.000 "tidak dapat diterima".	Proses Peninjauan Kembali.

					08 Maret 2010, Perseroan mengirim surat No. 032/DIR/EXT/10 Kepada Ketua M.A Perihal: Permohonan peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak No. Put.20148/PP/M.VIII/99/ 2009 Tanggal 15 Desember 2009 (yang diucapkan Tanggal 14 Oktober 2009). Tanggal 11 Mei 2010, Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali No. KMK-265/SP.51/V/2010 kepada Ketua MA RI dan Perseroan. Sampai tanggal 12 Nov 2012 belum ada jawaban dari Mahkamah Agung RI.	
3.	Pengadilan Pajak	Sengketa pajak	Berkas sengketa No. 24.031584.1996 dengan Putusan No. 18241/PP/M.VIII/25 /2009	Perseroan (Pembanding) melawan Dirjen Pajak (Terbanding)	**Materi Sengketa:** Banding terhadap SK Dirjen Pajak No. S-584/PJ.07/2007 tanggal 24 Juli 2007 tersebut mengenai permohonan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari Sampai Dengan Desember 1996. **Kasus Posisi**: Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s/d Desember 1996 No. 0001/240/96/091/06 tanggal 31 Okt 2006 yang dikenakan kepada Perseroan. Dirjen Pajak dengan SK No. KEP-00006/ PK/WPJ.19/KP.0103/2007 tanggal 7 Juni 2007 guna "membetulkan" Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s/d Desember 1996 No. 0001/240/96/091/06 tanggal 31 Okt 2006 sehingga jumlah yang harus dibayar Rp 14.744.822.141,00. Perseroan mengajukan keberatan dengan surat No. 014/Dir/Ext/07 tanggal 29 Jan 2007. Atas keberatan tersebut, Dirjen Pajak mengeluarkan SK No KEP-584/PJ.07/2007 tangga 24 Juli 2007 yang menolak keberatan Perseroan. Atas penolakan tersebut, Perseroan mengajukan banding dengan surat Perseroan No. 225/Dir/EXT/07 tanggal 22 Okt 2007. Alasan permohonan banding: • Dirjen Pajak tetap mempertahankan koreksi atas bunga deposito PBII sebesar Rp 64.983.490.384,00 berdasarkan laporan dugaan ICW belum dikenakan pajak, sementara laporan tersebut hanya merupakan dugaan yang masih perlu dibuktikan kebenarannya, dimana PBII sebenarnya hanya merupakan anak perusahaan Perseroan yang menjalankan usahanya sendiri termasuk deposito, dan Perseroan bukanlah pihak yang memberikan penghasilan deposito kepada nasabah PBII karena hanya "pass-through" sehingga tidak punya kewajiban memotong dan menyetor pajak bunga deposito PBII. • Koreksi atas obyek PPh Pasal 4 ayat (2) berupa sewa sebesar Rp 2.784.972.000,00 dan koreksi atas penjualan aktiva bangunan sebesar Rp 42.000.000.000,00 sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar seharusnya adalah sebesar Rp 318.487.276,00. Putusan Pengadilan Pajak: -Putusan No. 18241/PP/M.VIII/25/2009 tanggal	Dalam tahap permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put 18241/PP/M.VIII/2 5/2009, Tanggal 20-05-2009 yang diajukan oleh Perseroan. Dalam tahap permohonan Peninjauan Kembali atas No. Put.18241/PP /M.VIII/25/2009 Tanggal. 20-05-2009 yang diajukan oleh Dirjen Pajak. Hingga kini belum ada jawaban dari Mahkamah Agung.

					20 Mei 2009: Permohonan banding Perseroan dikabulkan, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar Perseroan sebesar Rp 318.487.276,00. Dari putusan perkara tersebut, Perseroan sebagai pihak yang menang. Perkembangan setelah Putusan No. 18241/PP/M.VIII/25/2009 tanggal 20 Mei 2009: Tanggal 6 Juli 2009 Keputusan Kepala KPP WPB Satu No. Kep-WPB Satu No. Kep-00047/WPJ.19/ KP.0103/2009 Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak, memutuskan, menetapkan; Pelaksanaan PUT-18241/PP/M.VIII/25/2009 Tanggal 20-5-2009. Tanggal 06 Juli 2009 Perseroan menulis surat No. 165/DIR/EXT/09 Permohonan Pemindah-bukuan dari SKPKB PPh Ps 4 (2) Tahun 1996 ke PPN (KJP 411211) Tanggal 17 Juli -2009 KPPWPB Satu menerbitkan 12 Bukti Pemindahbukuan dengan total Rp14.426.334.865 (sesuai dengan permohonan Perseroan) Tanggal 15 September 2009 DJP mengirim Surat memori Peninjuan Kembali Putusan Pengadilan Pajak No. Put 18241/PP/M.VIII/25/2009, tanggal 20 Juni 2009 Tanggal 02 Nopember -2009 Perseroan mengirimkan surat Kontra Memori Peninjauan Kembali No. 266/DIR/ EXT/09 thd Permohonan Peninjauan Kembali DJP No. S-8046/PJ.074/09 atas No. Put.18241/PP /M.VIII/25/2009 tanggal 20 Mei 2009.	

1. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Senayan

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Pihak dan Kedudukannya	Keterangan	Status Terakhir
1	PN Jakarta Barat	Perdata	405/PDT.G/2006/PN.JKT.BAR	Abraham Suwito, selaku Penggugat. melawan Susanto Halim, selaku Tergugat I, Lanny Sugiarto, selaku Tergugat II, Rudy Soejoharto, selaku Tergugat III, PPAT Anriz Nazarudin SH, selaku Turut Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat, selaku Turut Tergugat II, Perseroan, selaku Turut Tergugat III, Notaris Hambet Maseh SH, selaku Turut Tergugat IV.	Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat sehubungan pembagian dana yang berasal dari penerimaan kredit oleh Para Tergugat dan jaminan kredit tersebut. Dalam perkara ini Perseroan mengajukan eksepsi sehubungan tidak berkualitasnya penggugat menuntut pembatalan akta perjanjian kredit dan untuk mempersoalkan kedudukan hukum sertifikat hak milik yang menjadi jaminan kredit. Nilai gugatan ganti rugi materiil sebesar Rp 250.000.000,00. Nilai gugatan moril sebesar Rp1.000.000.000,00. Proses Acara: Putusan Gugatan Perdata ini dibacakan pada tanggal 15 Januari 2008. Putusan ditingkat pertama Penggugat dikalahkan. Putusan ditingkat banding Penggugat dikalahkan. Penggugat mengajukan kasasi. Pada putusan tingkat kasasi Penggugat dikalahkan.	Menunggu putusan kasasi dari MA RI. Pada putusan kasasi Penggugat dikalahkan. Menunggu proses lelang.
2	PN. Jakarta Selatan	Perdata	2265/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel.	Eddy MD (Penggugat) Melawan Perseroan (Tergugat 3)	Pokok Permasalahan: Penggugat merasa tidak pernah menjaminkan tanah dan bangunannya. Jaminan diberikan oleh CV Cahaya Maju (debitur kabur). Proses Acara: Pada tingkat pengadilan pertama Penggugat dikalahkan. Penggugat ajukan banding.	Proses banding.
3	PN. Jakarta Pusat	Perdata Gugatan	234/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst	Ny. Elisabeth (Penggugat) Melawan Y. Suhendra	Pokok Permasalahan: Penggugat merasa tidak pernah menjaminkan tanah dan bangunannya kepada Perseroan. Tanah dan bangunan dijaminkan oleh Yusuf Suhendra.	Menunggu apakah Penggugat akan ajukan PK.

				(Tergugat 1), Perseroan (Tergugat 3)	Nilai Perlara:Rp 300.000.000,-. Proses Acara: Pada tingkat pertama, ttingkat banding dan tingkat kasasi Penggugat dikalahkan.	

2. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Surabaya Coklat

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	PN Sidoarjo	Perdata	28/Eks.SHT/ 2006/PN. Sda	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Didiek Soediono (Termohon Eksekusi)	Dasar permohonan: Termohon Eksekusi (debitur) wanprestasi atas kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kreditnya kepada Perseroan (kreditur), sehingga Perseroan mengajukan permohonan eksekusi jaminan. Obyek pernohonan: Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik terletak di Surabaya yang dibebani Hak Tanggungan kepada Perseroan. Nilai perkara: Rp 158.101.869,45. Penetapan PN Surabaya: -Penetapan aanmaning: 13 Oktober 2006.	Proses lelang belum dilanjutkan, karena ada pembayaran sebagian.
2.	PN Surabaya	Perdata	212/Pdt.G /1996/ PN.Sby	Perseroan (Penggugat) Melawan CV Banyumas Jaya (Tergugat 1), Sigit Nugroho Widi selaku Direktur I Tergugat 1 (Tergugat 2), Willy Handoko Kusnanto selaku Direktur II Tergugat 1 (Tergugat 3), Subroto Adiwidjaja (Turut Tergugat).	Pokok Permasalahan: Tergugat 1 (debitur) wanprestasi atas kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kreditnya yang dijamin dengan 3 bidang tanah dan bangunan. Dua agunan berupa SHGB yang terletak Jalan Mangga II/E-246,Surabaya dan yang terletak di Jalan Manyar Jaya VIII/B-45 Surabaya telah di lepaskan karena adanya pembayaran sebagian. Karena Tergugat 1 kemudian wanprestasi lagi, maka terhadap agunan lainnya yang terletak di Jalan Kemayoran Baru No.74, Surabaya diajukan gugatan wanprestasi satu dan lain hal karena agunan (bangunan) tersebut berdiri di atas Tanah Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kotamadya Surabaya yang tidak dapat dipasang hak tanggungan.. Nilai perkara: Rp 220.987.623,78. Penetapan / Putusan PN Surabaya: Sudah ada putusan PN.	
3.	PN Surabaya	Perdata	99/Eks.SHT/ 1999/PN. Sby	Perseroan (Pemohon Eksekusi) Melawan CV Puri Kencana (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Termohon Eksekusi (debitur) wanprestasi atas kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kreditnya kepada Bank Panin (kreditur), sehingga Bank Panin mengajukan permohonan eksekusi jaminan. Atas hutang debitur dijamin dengan 2 bidang tanah, salah satunya di ikat dengan Hak Tanggungan karena berupa Sertipikat sedangkan objek yang satu lagi tidak di ikat. Nilai perkara: Rp 796.899.847,95. Proses Acara: -Penetapan aanmaning: 12 Mei 1999. -Penetapan sita eksekusi: 2 Juni 1999. -Penetapan aanmaning: 13 April 2004. -Sita eksekusi: 10 Juli 1999. -Pengumuman kedua/lanjutan lelang eksekusi: 24 Juli 1999. -Pengumuman pertama lelang eksekusi: 12 Juli 2004. - Penetapan lelang. ***Catatan:*** *Nilai Hak Tanggungan tersebut sebesar Rp 90.000.000,00 sedangkan nilai terutang Termohon Eksekekusi telah mencapai Rp 796.899.847,95.*	

3. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Medan

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	Pengadilan Negeri Medan	Perdata	227/Pdt.G/2009/PN.Mdn Yang didaftarkan tanggal 25 Mei 2009.	- Perseroan (Penggugat) - melawan - - Dodi Esrijal (Tergugat I) - Suprapti (Tergugat II)	Dasar Gugatan : Tergugat I (debitur) tidak lagi melaksanakan pembayaran cicilan hutangnya atas fasilitas kredit KSP dan Pinjaman Karyawan kepada Bank Panin (kreditur) sebesar Rp. 18.156.663,54 serta bunga berjalan 4% per bulan. Kasus Posisi : Debitur (Tergugat I) selaku penerima fasilitas kredit dan fasilitas pinjaman karyawan dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan diatasnya tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya hingga Tergugat I tidak bekerja lagi pada Perseroan karena melarikan diri dan telah dilaporkan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di kantor kepolisian setempat. Jumlah terutang Tergugat I (total pinjaman siap pakai dan pinjaman karyawan) sebesar Rp. 18.156.663,54. Penggugat menuntut Para Tergugat membayar biaya advokat / kuasa hukum Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- Nilai Perkara : Rp. 18.156.663,54 berikut bunga berjalan 4% per bulan dan biaya advokat/kuasa hukum Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (sehingga nilai perkara ini seluruhnya menjadi Rp. 38.156.663,54.) -Telah diputus pada tanggal 30 Nopember 2009, dengan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek. Menyatakan Tergugat I dan II berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 18.156.663,54. dan Menghukum Tergugat I dan II untuk membayarnya secara tunai. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar bunga sebesar 2% per bulan. -Relas Pemberitahuan Putusan telah diberitahukan kepada Para Tergugat melalui koran tertanggal 09 Juli 2010, dan Para Terggugat tidak ada mengajukan banding	-Eksekusi melalui bantuan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. -Eksekusi telah dimohonkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. -Dalam tahap pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

					sampai dengan waktu yang ditentukan, sehingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. -Putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht.)	
2.	Pengadilan Negeri Medan.	Perdata	123/Pdt.G/2010/PN.Mdn	- Perseroan (Penggugat) - melawan - - Yendy Yan Pawan (Tergugat I) - Tiny Hady (Tergugat II)	Dasar Gugatan : Tergugat I dan Tergugat II (debitur) tidak lagi melaksanakan pembayaran cicilan hutangnya atas fasilitas kredit mobil kepada Perseroan (kreditur) sebesar Rp. 148.379.740,06 untuk Tergugat I dan sebesar Rp. 430.487.229,50 untuk Tergugat II, sehingga seluruhnya sebesar Rp. 578.866.969,56 serta bunga berjalan 2% per bulan. Kasus Posisi : Tergugat I dan II (debitur) memiliki utang penerimaan fasilitas kredit pemilikan mobil (KPM) dari Perseroan (kreditur) dengan jaminan 2 (dua) buah mobil, jaminan mobil tersebut belum dipasang Hak Fidusianya. Karena debitur tidak lagi membayar cicilan hutang termasuk pokok, bunga dan denda kepada Perseroan sampai per 11 Maret 2010 total sebesar Rp. 148.379.740,06 untuk Tergugat I, dan per 25 Maret 2010 total sebesar Rp. 430.487.229,50 untuk Tergugat II, maka Bank Panin mengajukan gugatan Perdata terhadap Debitur. Nilai Perkara: Rp. 578.866.969,56. -Telah diputus pada tanggal 28 Juli 2010, dengan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek. Menyatakan Tergugat I dan II berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 578.866.969,56. dan menghukum Tergugat I dan II untuk membayarnya secara tunai. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar bunga sebesar 2% per bulan. -Relas Pemberitahuan Putusan telah dibertahukan kepada Para Tergugat melalui koran tertanggal 26 Agustus 2010, dan Para Terggugat tidak ada mengajukan banding sampai dengan waktu yang ditentukan, sehingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.	-Perkara telah diputus dengan verstek pada tanggal 28 Juli 2010 dan telah berkekuatn hukum tetap. -Khusus untuk Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya -Eksekusi jaminan terhadap Tergugat II belum dapat dieksekusi karena BPKB dan Mobil Jaminan belum diketahui keberadaannya.

3.	PN Medan	Perdata	415/Pdt.G/2010/PN.Mdn	-Perseroan (Penggugat) - Melawan - -PT. Bintang Saudara (Tergugat I) -Robby Meyer (Tergugat II).	**Pokok Permasalahan:** Gugatan Wanprestasi karena Debitur (i.c. Tergugat I/PT. Bintang Saudara) . **Nilai Perkara**: Rp 4.283.353.797,66. Proses Acara: '- Gugatan telah diputus pada tanggal 11 Mei 2011 yang amar putusannya berbunyi: 1. Menyatakan bahwa Tergugat I & II telah cidera janji (wanprestasi). 2. Menyatakan Tergugat I & II berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 4.283.353.797,66.- 3. Menguhukum Tergugat I & II untuk membayar secara tunai seluruh hutang Tergugat I kepada Penggugat secara tanggung renteng dan bersama-sama sejumlah Rp. 4.283.353.797,66.- 4. menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi. 5. menghukum Tergugat I & II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. -Putusan tersebut diberitahukan pada Tergugat tanggal 30 Mei 2011, Tergugat tidak ada banding sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. - Terhadap putusan dimaksud bank Panin melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap putusan dan Permohonan pelaksanaan Sita Eksekusi atas harta Benda Termohon Eksekusi sesuai dengan surat No. 038/WP/Xt/II/2012, tanggal 13 Pebruari 2012.	'- Eksekusi terkendala karena objek Jaminan Sertipikat Hak Milik No. 27 a/n Robby Meyer, dalam Putusan Perkara Mahkamah Agung RI antara Robby Meyer Lawan Dr. Barbara Sumampow, dkk dinyatakan bahwa objek Jaminan milik Dr. Barbara Sumampow . atas Putusan Mahkamah Agung RI dimaksud Pihak Bank Panin telah mengajukan upaya hukum Perlawanan yang terdaftar dengan Register No. 02/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn. - Perlawanan No. No.02/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn dimaksud telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juni 2012, dengan amar putusan menolak Perlawanan Pelawan (I.c. Bank Panin). -Bank selaku Pelawan telah mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Medan sesuai dengan Akta Banding No. 104/2012, tanggal 15 Juni 2012.
4	PN Medan	Perdata	02/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn	- Perseroan (Pelawan) -melawan- - Ny. Alice Sumampow (Terlawan I), Dr.Barbara Sumampow (Terlawan II). Dr. Halim (Terlawan III). Robby Meyer (Terlawan IV).	Pokok Permasalahan: '-Berkaitan dengan adanya penetapan eksekusi pengambilan sertifikat SHM No. 27/Desa Hamdan dari Pengadilan Negeri Medan yang merupakan jaminan hutang pada Perseroan. Nilai Perkara: Rp 4.283.353.797,66. Proses Acara: Adanya Surat Penetapan Eksekusi Pengambilan SHM No. 27/Desa Hamdan a/n Robby Meyer yang	

					merupakan jaminan hutang pada Perseroan dari Pengadilan Negeri Medan dimaksud. '- Pihak Perseroan melalui kuasa hukumnya mengajukan perlawan yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. No. 02/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn, tgl. 03 Januari 2012 berkaitan dengan Surat Penetapan Eksekusi Pengambilan SHM No. 27/Desa Hamdan a/n Robby Meyer.	
5	PN Binjai	Perdata	02/Pdt.Eks/Akta Hak Tanggungan/2006/PN-BJ.	'- Bank Panin (Pemohon Eksekusi) - melawan - - Delly Mahfuzar. (Termohon Eksekusi).	Pokok Permasalahan: Debitur wanprestasi pembayaran kredit yang telah jatuh tempo sehingga Perseroan selaku kreditur ajukan permohonan eksekusi jaminan. Obyek Eksekusi: Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 403 Desa Kartini, Kec. Binjai Kota, Kotamadya Binjai, Jalan Kartini No. 10A/35, a/n Delly Mahfuzar. Nilai perkara: Rp 195.357.903,10. '- Lelang eksekusi telah dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2008, akan tetapi tidak ada peminat atas objek jaminan yang dilelang. - Susulan Permohonan Pelaksanaan Lelang Eksekusi telah diajukan pada tanggal 29 September 2011.	Proses lelang.
6	PN Lubuk Pakam	Perdata	29/Eks/2008/HT/2006/PN-LP.	'- Bank Panin (Pemohon Eksekusi) - melawan - - Kuswandy (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Debitur wanprestasi pembayaran kredit KPR yang telah jatuh tempo sehingga Perseroan selaku kreditur ajukan permohonan eksekusi jaminan. Nilai Perkara: Rp 2.058.987.012,79. Obyek Eksekusi: Sebidang tanah dan bangunan SHGB No. 2627, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Komplek Cemara Hijau, Blok D Nomor 8-G, a/n Kuswandy. Proses Acara: '-Pelaksanaan lelang belum dapat dilaksanakan berkaitan dengan adanya penetapan sita dalam perkara pidana sesuai dengan Penetapan izin	'-Adanya Sita dilakukan oleh Poltabes Medan terkait perkara Pidana yang dilaporkan oleh Husainy terhadap Kuswandy. -Adapun gugatan dari Husainy dan Salmah berkaitan dengan permasalahan jaminan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. No. 330/Pdt.G/2012/PN.Mdn, dan sidang I telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2012.

					penyitaan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1353 / Pen.Pid / 2008 / PN-LP tanggal 24 September 2008, yang diberikan kepada Poltabes Medan, atas pengaduan Husainy terhadap Kuswandy.	
7.	Pengadilan Negeri Medan.	Perdata/ Sengketa Hak Tanggungan	02/Eks/HT/2009/PN.Mdn.	- Perseroan (Pemohon Eksekusi) - Melawan - - Lau Siaw Peng (Termohon Eksekusi)	Dasar Permohonan : Termohon Eksekusi (debitur) tidak lagi melaksanakan pembayaran cicilan hutangnya yang telah jatuh tempo kepada Perseroan (kreditur) atas fasilitas kredit KPR. Kasus Posisi : Termohon Eksekusi (debitur) memiliki utang penerimaan fasilitas kredit KPR dari Perseroan (kreditur) dengan jaminan 3 (tiga) bidang tanah Hak Milik atas nama Termohon Eksekusi yang dibebani Hak Tanggungan kepada Perseroan. Oleh karena debitur tidak lagi membayar cicilan hutangnya termasuk pokok, bunga dan denda kepada Perseroan sampai per 13 Nop 2008 total sebesar Rp. 594.060.399,07 maka Perseroan mengajukan permohonan eksekusi jaminan. Obyek Eksekusi: '-Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 3831, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Jl. Brigadir Jenderal Zei Hamid, Komplek Citra Baru, Nomor 112, a/n Law Siaw Peng. -Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 3832, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Jl. Brigadir Jenderal Zei Hamid, Komplek Citra Baru, Nomor 114, a/n Law Siaw Peng. -Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 3833, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Jl. Brigadir Jenderal Zei Hamid, Komplek Citra Baru, Nomor 116, a/n Law Siaw Peng. Penetapan PN. Medan: -Penetapan Aanmaning: 4 Pebruari 2009 -Penetapan sita eksekusi: 14 April 2009 -Penetapan Lelang Eksekusi: 11 Juni 2009. -Penetapan lelang eksekusi lanjutan telah ditandatangani dan sedang berada diruang Ketua untuk Penentuan limit lelang.	-Penetapan Lelang eksekusi lanjutan telah ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Proses Lelang Eksekusi lanjutan menunggu negosiasi Limit lelang dengan Pengadilan Negeri sambil mencari calon pembeli lelang.

					Nilai Perkara: Rp. 594.060.399,07.- Sita Eksekusi dilaksanakan 21 April 2009. Pelaksanaan Lelang Eksekusi telah dilaksanakan tanggal 16 September 2009, akan tetapi tidak ada peminat.	
8.	Pengadilan Negeri Medan.	Perdata/ Sengketa Hak Tanggungan	06/Eks/HT/2009/PN.Mdn.	- Perseroan (Pemohon Eksekusi) - melawan - - Leonardo GM, Insinyur, disebut juga Insinyur Leonard Jaya Ginting, ditulis juga Leonardo Ginting Manik, Ir. (Termohon Eksekusi)	Dasar Permohonan : Termohon Eksekusi (debitur) tidak lagi melaksanakan pembayaran cicilan hutangnya yang telah jatuh tempo kepada Perseroan(kreditur) atas fasilitas kredit KPR. Kasus Posisi: Termohon Eksekusi (debitur) memiliki utang penerimaan fasilitas kredit KPR dengan jaminan 1 (satu) bidang tanah HGB atas nama Termohon Eksekusi yang dibebani Hak Tanggungan kepada Perseroan. Oleh karena debitur tidak lagi membayar cicilan hutangnya termasuk pokok, bunga dan denda kepada Perseroan sampai per 14 Des 2008 total sebesar Rp. 876.361.045,03 maka Bank Panin mengajukan permohonan eksekusi jaminan. Penetapan PN Medan: -Penetapan Aanmaning 18 Pebruari 2009 -Penetapan Sita eksekusi 14 April 2009 -Penetapan Lelang Eksekusi 11 Juni 2009. -Penetapan lelang eksekusi lanjutan telah ditandatangani dan sedang berada diruang Ketua untuk Penentuan limit lelang. Nilai Perkara: Rp. 876.361.045,03. Sita Eksekusi dilaksanakan 21 April 2009. Pelaksanaan Lelang Eksekusi telah dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2010, akan tetapi tidak ada peminat.	-Penetapan Lelang eksekusi lanjutan telah ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Proses Lelang Eksekusi lanjutan menunggu negosiasi Limit lelang dengan Pengadilan Negeri sembari mencari calon pembeli lelang.

9	PN Medan	Perdata	-	'- Perseroan (Pemohon Eksekusi) - Melawan - - Yendy Yan Pawan (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Debitur wanprestasi pembayaran kredit s yang telah jatuh tempo sehingga Perseroan selaku kreditur ajukan permohonan eksekusi jaminan. Nilai Perkara: Rp 657.560.693,59. Obyek Eksekusi: '-Sebidang tanah dan bangunan SHGB No. 1856, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Jl. Nibung Raya Nomor 36, a/n Yendy Yan Pawan. Proses Acara: -Permohonan Eksekusi Hak Tanggugan telah diajukan pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Maret 2010. -Susulan Permohonan sudah diajukan untuk ditindak lanjuti.	-Ada keinginan pihak ketiga untuk membeli jaminan dan dalam tahap negosiasi.
10	PN Binjai	Perdata	02/Pdt.Eks/Akta.HT/2011/PN.BJ.	Perseroan (Pemohon Eksekusi) - Melawan - - Giok Huat alias Ariandi (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Debitur wanprestasi pembayaran kredit PRK yang telah jatuh tempo sehingga Perseroan selaku kreditur ajukan permohonan eksekusi jaminan. Nilai Perkara: Rp 1.066.142.692,17. Obyek Eksekusi: -Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 691, Desa/Kel. Bandar Senembah, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 315-A / 315, a/n Giok Huat alias Ariandi. Proses Acara: -Debitur telah di Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 22 Maret 2011. - Sita Eksekusi telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 18 Oktober 2011.	-Permohonan Pelaksanaan Lelang Eksekusi telah diajukan ke Pengadilan Negeri Binjai . -Selanjutnya menunggu penetapan Lelang dari Ketua Pengadilan Negeri Binjai. Sembari menunggu pembeli/peminat Lelang Eksekusi.
11	PN Medan	Perdata	42/Eks/HT2011/PN.Mdn.	- Perseroan (Pemohon Eksekusi) -melawan- - Drs. Bekman Hutabarat. (Termohon Eksekusi).	Pokok Permasalahan: Debitur wanprestasi pembayaran kredit PRK KSG dan PJPIA yang telah jatuh tempo sehingga Perseroan selaku kreditur ajukan permohonan eksekusi jaminan. Nilai Perkara: PRK KSG sebesar Rp 1.136.020.952,61. PJPIA Rp 1.354.259.243,06.	Informasi NJOP sebagai acuan limit lelang telah diperoleh dari Dispenda sesuai dengan Surat dari Dispenda No. 973.SJ/588, tanggal 24 April 2012. -Menunggu Proses Penetapan limit dan tanggal lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan sembari menunggu pembeli lelang

					Total Keseluruhan Hutang adalah Rp 2.490.280.195,67. Obyek Eksekusi: Sebidang tanah dan bangunan SHGB No.966, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Jl. Kalimantan Nomor: 21, a/n Doktorandus Bekman Hutabarat. -Sebidang tanah dan bangunan SHM No.106, Desa Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Jl. Sei Blutu No. 17, a/n Doktorandus Bekman Hutabarat. Proses Acara: Permohonan Eksekusi telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Oktober 2011. - Aanmaning I telah dilaksanakan oleh Pengadilan negeri Medan pada tanggal 14 Nopember 2011. - Debitur memenuhi Aanmaning dengan mengakui adanya hutang dimaksud dan meminta diberikan keringanan untuk membayar hutang sesuai dengan surat dari Pengacara Debitur No. 007/I/LO/2012, tgl. 16 Januari 2012. - Permohonan Sita Eksekusi telah diajukan ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Desember 2011.	
12	PN Medan	Perdata	39/Eks/HT/2011/PN.Mdn.	-Perseroan (Pemohon Eksekusi) -melawan- -Raymond Mangihut Pandapotan (Termohon Eksekusi I) -Drs. Sabam Isidorus Sihotang, MM. (Termohon Eksekusi II)	Pokok Permasalahan: Debitur wanprestasi pembayaran kredit PRK KSG yang telah jatuh tempo sehingga Perseroan selaku kreditur ajukan permohonan eksekusi jaminan. Nilai Perkara: Rp 958.209.586,54. Obyek Eksekusi: Sebidang tanah dan bangunan SHM No.1051, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan atas nama Doktorandus Sabam Isidorus Sihotang, MM (Termohon Eksekusi II), Jl. Bunga Cempaka No. 29B. Proses Acara: - Permohonan Eksekusi telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Oktober 2011. - Aanmaning I dan II telah	-Permohonan Lelang Eksekusi telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Medan. - Informasi NJOP sebagai acuan limit lelang telah diperoleh dari Dispenda sesuai dengan Surat dari Dispenda No. 973.SS/937, tanggal 25 Juni 2012. - Menunggu Proses Penetapan limit dan tanggal lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan sembari menunggu pembeli lelang.

					dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Nopember 2011 dan 14 Desember 2011. -terhadap objek jaminan Debitur telah dilaksanakan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 Maret 2012.	
13	PN Medan	Perdata	38/Eks/HT/2011/PN.Mdn.	- Perseroan (Pemohon Eksekusi) -melawan- - PT.Metroscokai (Termohon Eksekusi I) - Yang Wen Qin (Termohon Eksekusi II	Pokok Permasalahan: Debitur wanprestasi pembayaran kredit PRK yang telah jatuh tempo sehingga Perseroan selaku kreditur ajukan permohonan eksekusi jaminan. Nilai Perkara: Rp 1.879.773.314,37. Obyek Eksekusi: -Sebidang tanah dan bangunan SHM No.142, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan atas nama Yang Wen Qin, Komplek Villa Murai 2 No. 68. - Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 1011, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Komplek Villa Bukit Mas Blok E No. 5-A. Proses Acara: -Aanmaning I dan II telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Nopember 2011 dan 29 Nopember 2011. -Terhadap objek Jaminan dgn SHM No. 142/ Simpang Tanjung dan SHM No. 1011/Desa Sempajaya telah dilaksanakan Sita Eksekusi oleh PN Medan pada tgl 26 Januari 2012 dan Bantuan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tgl. 2 Pebruari 2012.	- Permohonan Lelang Eksekusi telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan surat tertanggal 21 Maret 2012. -Menunggu Penetapan Lelang Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Medan.
14	PN Medan	Perdata	41/Eks/HT/2011/PN.Mdn.	- Perseroan (Pemohon Eksekusi) -melawan- -Haji Ridwan Haji Hasan. (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Debitur wanprestasi pembayaran kredit KPR yang telah jatuh tempo sehingga Perseroan selaku kreditur ajukan permohonan eksekusi jaminan. Nilai Perkara: Rp 2.074.411.820,30.. Obyek Eksekusi: Sebidang tanah dan bangunan SHM No.252, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan atas nama Haji Ridwan Haji Hasan, Jl. Waringin No. 9-L.	Informasi NJOP sebagai acuan limit lelang telah diperoleh dari Dispenda sesuai dengan Surat dari Dispenda No. 973.SJ/936, tanggal 25 Juni 2012. -Menunggu Proses Penetapan limit dan tanggal lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan sembari menunggu pembeli lelang

					Proses Acara: - Permohonan Eksekusi telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Oktober 2011. - Aanmaning I dan II telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Nopember 2011 dan 29 Nopember 2011. -Sita Eksekusi telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Medan pada tgl.17 Januari 2012. -surat Mohon Pelaksanaan Lelang Eksekusi telah diajukan ke Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Surat No. 039/WP/XT/II/2011, tgl. 14 Pebruari 2012.	
15	PN Medan	Perdata	61/Eks/HT/2011/PN.Mdn	-Perseroan (Pemohon Eksekusi) -Fahrizal (Termohon Eksekusi I) -Para Ahli waris Abdul Hamid yaitu : 1. Hj. Mariati 2. Juniharti 3. Jumadi 4. Fahrizal 5. Mahdi 6. Ahmad Hidayat. 7. Dian Nuzulia (Termohon Eksekusi II)	Pokok Permasalahan: Debitur wanprestasi pembayaran kredit KPR yang telah jatuh tempo sehingga Perseroan selaku kreditur ajukan permohonan eksekusi jaminan. Nilai Perkara: Rp 1.351.732.652,19. Obyek Eksekusi: -Sebidang tanah dan bangunan SHM No.1106, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan atas nama Ahli waris Abdul Hamid (Termohon Eksekusi II), Jl. Rajawali No. 36. Proses Acara: Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri medan pada tanggal 07 Nopember 2011. -Terhadap Termohon Eksekusi II telah di Aanmaning yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Desember 2011.	Menunggu Berita Acara AanmaningI dari Pengadilan Negeri Bekasi terhadap Termohon Eksekusi I. -Surat Susulan Permohonan Aanmaning Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi telah disusul.
16	PN Medan	Perdata	62/Eks/HT/2011/PN.Mdn	-Perseroan (Pemohon Eksekusi) -melawan- -Sofian Sudirmin, SE (Termohon Eksekusi I) -Rosmiri Budjaya (Termohon Eksekusi II). -Susilo Sudirmin (Termohon Eksekusi III). -Eddy Sudirmin	Pokok Permasalahan: Debitur wanprestasi pembayaran kredit PRK dan KPR yang telah jatuh tempo sehingga Perseroan selaku kreditur ajukan permohonan eksekusi jaminan. Nilai Perkara: PRK sebesar Rp 2.507.167.399,80. KPR sebesar Rp 1.035.381.676,04. Total Keseluruhan Hutang Debitur sebesar Rp 3.542.549.075,84.	Permohonan Lelang Eksekusi telah diajukan ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Juni 2012. -adanya proses negosiasi penarkan salah satu jaminan secara parsial terhadap SHM No. 230.

				(Termohon Eksekusi IV).	Obyek Eksekusi: Sebidang tanah dan bangunan SHM No.291, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan, Kota Medan atas nama Rosmiri Budjaya (Termohon Eksekusi II), Jl. Tapanuli 31 H. -Sebidang tanah dan bangunan SHM No.191, Kelurahan Sukadamai dahulu Polonia, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan atas nama Sofian Sudirmin, SE (Termohon Eksekusi I), Komplek Malibu Indah Taman Blok C No. 101. -Sebidang tanah dan bangunan SHM No.230, Kelurahan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang atas nama Susilo Sudirmin (Termohon Eksekusi III) dan Eddy Sudirmin (Termohon Eksekusi(IV), Jl. Mesjid Komplek Pergudangan KBM No. 138 M. Proses Acara: Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Medan pada tangal 17 Nopember 2011. - Aanmaning I telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Desember 2011. -Terhadap Objek Jaminan Debitur yang berada di Kota Medan yaitu SHM No.291 dan SHM No. 191 Telah dilaksanakan Sita Eksekusinya pada tanggal 01 Maret 2012. -Terhadap SHM No. 230, telah dilaksanakan sita eksekusinya dengan bantuan PN. Lubuk Pakam pada tanggal 08 Juni 2012.	
17	PN Medan	Perdata	183/Pdt.G/2010/PN.Mdn	Irwansyah (Penggugat) - Melawan - Ir. Leonard GM disebut juga Ir. Leonard Jaya Ginting disebut juga Ir. Leonard Ginting Manik(Tergugat I), -Martua Simanjuntak, SH, Notaris/PPAT. (Tergugat II)	Pokok Permasalahan: Gugatan perbuatan melawan hukum. Berkaitan dengan permasalahan peralihan hak SHGB No. 2194 yang menjadi objek jaminan pada bank dari Irwansyah selaku Penggugat kepada Ir. Leonard Jaya Ginting selaku Debitur. Nilai Perkara: Tututan Materil : Rp 275.000.000. Tuntutan Immateril : Rp	Putusan banding.

				-Perseroan (Tergugat III)	1.000.000.000. Proses Acara: Perkara No. 183/Pdt.G/2010/PN.Mdn tersebut telah diputus pada tanggal 24 Nopember 2010. - dengan amar putusan Menolak gugatan Penggugat (i.c. Irwansyah) seluruhnya. -Penggugat (i.c. Irwansyah) telah mengajukan Banding pada tanggal 06 Desember 2010. - berkas perkara banding telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Medan No. W2.U1/ 5121/Pdt.04.10/III/2011, tanggal 14 April 2011 perihal Pemeriksaan tingkat Banding Perkara Perdata Nomor: 183/Pdt.G/2010/PN.Mdn. Perkara tingkat banding No. 155/PDT/2011/PT-MDN telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 14 September 2011 dengan amar putusan: • Menerima permohonan banding dari kuasa huukum penggugat/pembanding • Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Tgl 24 Nov. 2010 No.183/Pdt.G/2010/PN.Mdn, yang dimohonkan banding. • Menghukum Penggugat/ Pembanding utk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000.-	
18	Pengadilan Negeri Medan.	Gugatan Perdata	555/Pdt.G/2010/PN.Mdn	-Sri Wardani (Penggugat I) -Hasan (Penggugat II) -Husin (Penggugat III) -Husaini (Penggugat IV) -Husni (Penggugat V) -Melawan- -Departemen Keuangan Republik Indonesia, cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah II Medan, cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan. (Tergugat I). -Perseroan (Tergugat II). -Andri Bisuk	Pokok Permasalahan: Berkaitan dengan tanah SHM Nomor: 440/Gang Buntu yang menjadi objek perkara merupakan budel waris yang belum dibagi para ahli waris (i.c. yang menjadi objek jaminan pada Bank Panin). Proses Acara: Perkara sudah diputus pada tanggal 13 Juli 2011 dengan amar putusan menolak gugatan para Penggugat (Sri Wardani, dkk) untuk seluruhnya. -Penggugat (Sri Wardani, dkk) telah menyatakan Banding, Sesuai dengan Relaas Pemberitahuan banding tertanggal 21 September 2011.	Proses banding.

				Nicholas Tambunan (Tergugat III). - Hamid.(Tergugat IV).		
19	Pengadilan Negeri Medan	Gugatan Perlawanan	194/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn	Drs. Sabam Isidorus Sihotang, MM (Pelawan) Lawan -Raymond Pandapotan Sihotang. (Terlawan I) -Perseroan (Terlawan II).	Pokok Permasalahan: Berkaitan dengan pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap SHM No. 1051, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang,Kota Medan atas nama Sabam Isidorus Sihotang, MM (Pelawan) yang merupakan objek jaminan pada Bank Panin.	Dalam proses Mediasi hingga tanggal 9 Juli 2012. -Debitur telah mengajukan penawaran pembayaran, akan tetapi hingga saat sekarang belum terlaksana.
20	Pengadilan Negeri Medan	Gugatan Perdata	330/Pdt.G/2012/PN.Mdn	-Husainy (Penggugat) -Salmah (Penggugat). Lawan -Kuswandy (Tergugat) -PT.Unitwin Indonesia (Turut Tergugat I) -Perseroan (Turut Tergugat II) -Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat III) -Eka Dharmayanti, SH (Turut Tergugat IV).	Pokok Permasalahan: Tuntutan penyerahan SHGB No. 2627/Desa Sampali kepada Penggugat. Berkaitan dengan permasalahan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat sehubungan dengan SHGB No. 2627/Desa Sampali yang merupakan objek jaminan pada Perseroan.	Pada sidang pertama tgl. 4 Juli 2012 dihadiri oleh pihak Penggugat dan Turut Tergugat I dan II. Sidang diundur tgl 25 Juli 2012 dengan pemanggilan kembali para pihak. Proses persidangan.

4. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Bandung

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	Tingkat pertama: Pengadilan Negeri Bandung Tingkat Banding: Pengadilan Tinggi Bandung	Perdata	Tingkat pertama: PN Bandung No. 360/Pdt.G/2007/ PN.Bdg Tingkat Banding: 123/Pdt/2009/ PT.Bdg	Tingkat Pertama: Hj. Marlinah dan Dr. Udin Wahyudin MM (Penggugat / Debitur) melawan Perseroan Cab. Bandung (Tergugat / Kreditur) Tingkat Banding:	**Pokok Permasalahan**: Penggugat (debitur) melalui kuasa hukumnya melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atas lelang eksekusi hak tanggungan terhadap jaminan yang dilakukan oleh Bank Panin Cab.Bandung. Obyek sengketa: Jl. Pasirlayung Utara No. 11 A Bandiunng. Nilai perkara: Rp 225.000.000,-	Proses kasasi.

				Hj. Marlinah dan Dr. Udin Wahyudin MM (Pembanding / Debitur) melawan Perseroan Cab. Bandung (Terbanding/ Kreditur)	Proses Perkara: Pada putusan tingkat pertama Debitur dikalahkan. Pada tanggal 22 April 2009 Debitur ajukan upaya Banding terhadap putusan PN Bandung No. 360/Pdt.G/2007/PN.Bdg. Pada tingkat banding Penggugat dikalahkan. Penggugat ajukan Kasasi.	
2	Tingkat pertama: Pengadilan Negeri Bandung Tingkat Banding: PT Bandung	Perdata	Tingkat pertama: PN Bandung No. 316/Pdt.G/2009/ PN.Bdg Tingkat Banding: 85/Pdt/2011/PT. Bdg	Tingkat Pertama : Dra. Tedja Permata (Penggugat) melawan Perseroan Cab. Bandung (Tergugat I) KPKNL Bandung (Tergugat II) Hadrianus Thamrin Z (Tergugat III) Kantor Pertanahan Kota Bandung (Turut Tergugat) Tingkat Banding: Dra. Tedja Permata (Pembanding) melawan Perseroan Cab. Bandung (Terbanding I), KPKNL Bandung (Terbanding II), Hadrianus Thamrin Z (Terbanding III), Kantor Pertanahan Kota Bandung (Turut Terbanding)	Nilai Perkara: Rp 3.500.000.000,-. Proses Acara: Pada putusan PN Bandung tanggal 11 Maret 2010 gugatan Penggugat ditolak. Penggugat dikalahkan. Penggugat ajukan banding. Pada putusan PT Bandung tanggal 4 Mei 2011 putusan PN Bandung tanggal 11 Maret 2011 dikuatkan. Perseroan dimenangkan. Penggugat ajukan Kasasi.	Proses Kasasi.
3.	Tingkat Pertama: Pengadilan Negeri Bandung	Perdata	Tingkat pertama: PN Bandung No. 280/Pdt.G/2009/ PN.Bdg Tingkat Banding: 208/Pdt/2010/ PT.Bdg	Tingkat Pertama: Hanneke R (Penggugat) melawan Perseroan Cab. Bandung (Tergugat) Tingkat Bandng: Hanneke R (Pembanding) melawan Perseroan Cab. Bandung (Terbanding)	Pokok Permasalahan: Penggugat (debitur) melalui kuasa hukumnya melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atas Akta Penyerahan Hak Sebagai Pembayaran Hutang (debitur kepada Bank Panin) untuk dibatalkan termasuk menghentikan upaya paksa pengosongan objek jaminan. Obyek sengketa: Sentrasari Mall Blok B4 Kav. 66 dan Blok B2 No. 47 Bandung. Nilai Perkara: Rp 1.920.000.000,-. Proses Acara: Pada putusan PN Bandung tanggal 16 Februari 2010 gugatan Penggugat ditolak. Penggugat (Debitur) dikalahkan. Penggugat ajukan banding. Pada putusan banding PT Bandung tanggal 29 September 2010 putusan PN Bandung tanggal 16 Februari 2010 dikuatkan. Penggugat dikalahkan. Penggugat ajukan kasasi. Perseroan telah ajukan Kontrak Memori Kasasi.	Proses kasasi.

4.	Tingkat Pertama: Pengadilan Negeri Bandung	Perdata	Tingkat pertama: PN Bandung No. 281/Pdt/G/2011/ PN.Bdg	Tingkat Pertama: Ny. Eti Handayani (Penggugat) melawan Hadi Priyadi (d/h Hoo Tiak Sien) (Tergugat), Perseroan Cab. Bandung (Turut ergugat)	Pokok Permasalahan: Penggugat adalah istri dari debitur (Tergugat) , setelah mengajukan gugatan cerai penggugat mangajukan gugatan pembagian harta gono gini yang didalamnya terdapat jaminan Bank Panin Cab.Bandung. Obyek sengketa: Harta gono gini di Komp. Perum Batununggal Jl. Batununggal Indah IV No. 71 Bandung dan Jl. Rancabolang Cisaranten Kidul Bandung. Nilai perkara: Rp 3.247.330.000,-. Proses Acara: Dalam proses banding.	Hasil Uji Tuntas Sementara 30 Juni 2012: Proses banding.
5.	Tingkat Pertama: Pengadilan Negeri Bandung	Perdata	Tingkat pertama: PN Bandung No. 88/Pdt.G/2011/ PN.Bdg.	Tingkat Pertama: PT Ecopower Indonesia (Tergugat) melawan Perseroan Cab. Bandung (Tergugat I), Pemerintah RI, qq Kementerian Keuangan RI, qq Kanwil Kementerian Keuangan Prov.Jabar, qq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung (Turut Tergugat II)	Pokok Permasalahan: Penggugat menggugat Bank Panin Cab.Bandung (tergugat I) yang melakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap jaminan Penggugat melalui KPKNL (tergugat II) tanpa adanya aanmaning (teguran) terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung. Obyek sengketa: Jk. Dipalaya II No. 18, Ciwaruga, Kab. Bandung Barat. Nilai perkara: Rp 1.200.000.000,-. Proses Acara: Masuk tahap pemeriksaan (inzage) dan sedang menunggu putusan banding di PT Bandung.	Hasil Uji Tuntas Sementara 30 Juni 2012: Tunggu putusan banding.
6.	Tingkat Pertama: Pengadilan Negeri Bandung	Perdata	Tingkat pertama: PN Bandung No. 132/Pdt.G/2010/ PN.Bdg	Tingkat Pertama: Cucu bin Mad Dapi (Penggugat) melawan Susan Sungkono (Tergugat 1), H. Sadeli (Tergugat 2), Dr. Soedigdo Pringgoprawiro (Tergugat 3), Dr. Soekeni Soedigdo (Tergugat 4),. H. Apoen Gapoer (Tergugat 5), Endoj Sjarif Hidajat (Tergugat 6), Mas Entjep Mumung (Tergugat 7), Sri Rahayu (Tergugat 8), Bank Panin Cab. Bandung (Tergugat 9), Endang Sarwoto (Tergugat 10), M. Rahmat (Tergugat 11), Ka. Kantor Pertanahan Kab. Bandung (Tergugat 12)/	Pokok Permasalahan: Penggugat menggugat tergugat I (debitur) yang telah memiiliki objek sengketa tersebut dengan dasar kepemilikan yang melawan hukum dan telah menjaminkannya kepada Bank Panin Cab. Bandung. Obyek sengketa: Blok Situ Tengah Kampung Situ Tengah RT 01/RW014 Ds. Padalarang, Kab. Bandung Barat. Nilai perkara: Rp 4.400.000.000,-. Proses Acara: Pada tingkat banding Penggugat/Terbanding dikalahkan. Penggugat/Terbanding ajukan kasasi.	Hasil Uji Tuntas Sementara 30 Juni 2012: Proses kasasi.

7.	Tingkat Pertama: Pengadilan Negeri Bandung	Perdata	Tingkat pertama: PN Bandung No. 231/Pdt.G/2010/ PN.Bdg	Tingkat Pertama: Edi Thama Disastra (Pembantah) melawan Perseroan Cab. Bandung (Terbantah 1), Heny Heryawan (Terbantah 2).	Pokok Permasalahan: Pembantah melakukan bantahan terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang akan dilakukan oleh Terbantah I (Bank Panin Cab.Bandung) atas jaminan milik Terbantah II yang dianggap oleh Pembantah masih merupakan milik ahli waris Alm. H. Nandang Sucherlan/. Obyek sengketa: Jl. Cihaur No. 19/158 C, Bandung Nilai perkara: Rp 1.817.100.000,-. Proses Acara: Pada tingkat pertama Pembantah dikalahkan. Pembantah ajukan banding.	Hasil Uji Tuntas Sementara 30 Juni 2012: Tahap banding.
8.	Tingkat Pertama: Pengadilan Negeri Bandung	Perdata	Tingkat pertama: PN Bandung No. 343/Pdt.G/2011/ PN.Bdg	Tingkat Pertama: Hj. Lely Yuliah Dkk (Para Pembantah) melawan Perseroan Cab. Bandung (Terbantah 1), H. Ahmad Suhendar Mahdi & Ny. Ely Wiliyanti Hidayat (Terbantah 2), Ir. R. Hardjito Hankyo S dan Ny. Rr. Sulistyowati (Terbantah 3)	Pokok Permasalahan: Pembantah melakukan bantahan terhadap perkara eksekusi Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung no.92/Pdt.Eks/2009/HT/ PN.Bdg. Obyek sengketa: Jl. Cipaku Indah I No. 248 H Bandung Nilai perkara: Rp 1.256.000.000,-. Proses Acara: Pada tingkat pertama Para Pembantah dikalahkan. Para Pembantah ajukan banding.	Hasil Uji Tuntas Sementara 30 Juni 2012: Tahap banding.
9.	Tingkat Pertama: Pengadilan Negeri Bandung	Perdata	Tingkat pertama: PN Bandung No. 171/Pdt.G/2011/ PN.Bdg	Tingkat Pertama: Susanti Permadi (Pembantah) melawan Kang Andreas C (Terbantah 1), Perseroan Cab. Bandung (Terbantah 2), Pemerintah RI qq Kanwil Kementerian Keuangan Prov. Jabar qq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung (Terbantah 3)	Pokok Permasalahan: Pembantah melakukan bantahan terhadap Relas Panggilan Teguran No.36/Pdt.Eks/RIS/2011/PN.BB yang isinya agar Pembantah mengosongkan persil miliknya yang telah beralih kepemilikan kepada Terbantah I berdasarkan Risalah Lelang No.724/2011. Obyek sengketa: Jl. Setra Duta Hagar D-2 No. 7, Paranggong, Kab. Bandung. Nilai perkara: Rp 2.750.000.000,-. Proses Acara: Pembuktian tertulis pihak Pembantah..	Hasil Uji Tuntas Sementara 30 Juni 2012: Pembuktian tertulis.
10.	Tingkat Pertama: Pengadilan Negeri Bandung	Perdata	Tingkat pertama: PN Bandung No. 535/Pdt.G/2011/ PN.Bdg	Tingkat Pertama: Rudy Widjaja (Penggugat) melawan Perseroan Cab. Bandung (Tergugat 1), Negara RI cq Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Ka. Kantor Wilayah VIII Bandung cq Ka. Kantor Pelayanan	Pokok Permasalahan: Penggugat/debitur beranggapan bahwa kolektibitas kreditnya tidak dapat diketegorikan sebagai kredit macet karena belum melampaui 270 hari sehingga tindakan Bank Panin Cabang Bandung melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui KPKNL Bandung merupakan perbuatan melawan hukum. Obyek sengketa: Kios di Bandung Electronic Center (EC) lantai 1 G-10, Jl. Purnawarman No. 13-15, Bandung. Nilai perkara: Rp 994.000.000,-.	Hasil Uji Tuntas Sementara 30 Juni 2012: Proses persidangan tingkat pertama.

				Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung (Tergugat 2), Herry Sujana (Turut Tergugat 1), Bardo Solichin (Turut Tergugat 2).	Proses Acara: Proses persidangan tingkat pertama..	
11	Tingkat Pertama: Pengadilan Negeri Bale Bandung	Perdata	Tingkat pertama: PN Bandung No. 33/Pdt.G/2011/ PN.BB	Tingkat Pertama: Wiwin Widaningsih / Direktur CV Abdijabar Teknik Sakti (Penggugat) melawan Perseroan Cab. Bandung (Tergugat 1), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Bandung (Tergugat 2), Ineke Srihartati (Turut Tergugat 1), Rosalia Kodiyat (Turut Tergugat 2), Ka. Kantor Pertanahan / BPN Kota Cimahi (Turut Tergugat 3).	Pokok Permasalahan: Penggugat melakukan gugatan terhadap penentuan harga limit Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat I (Bank Panin Cab.Bandung) atas jaminan kreditnya/. Obyek sengketa: Jl. Rancabentang 148/62, Ds. Cibeureum Kec. Cimahi Selaran, Kota Cimahi. Nilai perkara: Rp 694.400.000,-. Proses Acara: Proses banding..	Hasil Uji Tuntas Sementara 30 Juni 2012: Proses banding.
12.	Tingkat Pertama: Pengadilan Negeri Bandung	Perdata	Tingkat pertama: PN Bandung No. 124/Pdt.G/2009/ PN.Bdg	Tingkat Pertama: H. Tata Gunawan (Penggugat) Melawan Deden Guntur Isnawan Perseroan Cab. Bandung (Tergugat II) Felix Y (Tergugat II) KPKNL Bandung (Turut Tergugat I) Inneke Srihartati (Turut Tergugat II)	Penggugat mengajukan gugatan agar peralihan hak secara lelang atas tanah jaminan Penggugat pada Perseroan kepada Tergugat III batal demi hukum. Proses Acara: Putusan PN Bandung tanggal 3 Januari 2011 gugatan Penggugat gugur. Perseroan dimenangkan. Putusan dibacakan untuk umum tanpa kehadiran para pihak.	Putusan Tingkat Pertama.
13	Tingkat Pertama: Pengadilan Negeri Bale Bandung	Perdata	Tingkat pertama: PN Bandung No. 42/Pdt.G/2012/ PN.BB	Tingkat Pertama: Daniel Atalo (Penggugat) melawan Perseroan Cab. Bandung (Tergugat 1), Pimp. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Bandung (Tergugat 2), Jaimus Sinaga (Tergugat 3).	Hasil Uji Tuntas Sementara 30 Juni 2012: Pokok Permasalahan: Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, II dan III . Penggugat juga menggugat pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap jaminan Penggugat melalui KPKNL (tergugat II) tanpa adanya aanmaning (teguran) terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung adalah tidak sah. Obyek sengketa: Jl. Nusa Sari Barat No. 29 Kota Cimahi. Nilai perkara: Rp 300.000.000,-. Proses Acara: Mediasi dead lock. Dilanjutkan dengan pemanggilan para pihak untuk sidang.	Hasil Uji Tuntas Sementara 30 Juni 2012: Proses sidang tingkat pertama.

13.	Tingkat Pertama: Pengadilan Negeri Garut Tingkat Banding: Pengadilan Tinggi Bandung Tingkat Kasasi: MA	Perdata	Tingkat Pertama: 04/Pdt/G/2009/ PN.Grt Didaftar tanggal 29 Januari 2009 Tingkat Banding: 76/Pdt/2010/ PT.BDG Tingkat Kasasi: 2956 K/Pdt/2010	Tingkat Pertama: Yati Mulyati (Penggugat I) Drs. Suryana W (Penggugat II Melawan 1. Perseroan Garut (Tergugat 1) 2. Perseroan Bandung (Tergugat 2) 3. Kepala Kantor KPKNL Bandung (Tergugat 2) 4. Suhendrik Arisanto (Tergugat 4); dan I. Lilis Suryani (Turut Tergugat 1) II. Yayan Cahyana (Turut Tergugat 2) Tingkat Banding: 1. Perseroan Garut (Pembanding semula Tergugat 1) 2. Perseroan Bandung (Pembanding semula Tergugat 2) 3. Suhendrik Arisanto (Pembanding semula Tergugat 4) Melawan Yati Mulyati (Terbanding semula Penggugat I) Drs. Suryana W Terbanding semula Penggugat II. Tingkat Banding: 1. Perseroan Garut dan Perseroan Bandung (Para Pemohon Kasasi I) 2. Suhendrik Arisanto (Pemohon Kasasi II) Melawan Yati Mulyati dan Drs. Suryana W (Para Termohon Kasasi); Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandung, Lilis Suryani, Yayan Cahyana (Para Turut Termohon Kasasi).	Pokok Permasalahan : Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II meminjam dari Penggugat I yakni Sertipikat HM No. 383/Jayaraga atas nama Penggugat I untuk dijaminkan kepada Perseroan cab. Garut dengan sepengetahuan Penggugat I. Karena Debitur tidak melakukan pembayaran dan kewajibannya maka proses lelang eksekusi Hak Tanggungan melakui KPKNL dilakukan oleh Perseroan Cab. Garut dan Perseroan Cab. Bandung, dan Penggugat merasa tidak pernah diberitahu akan dilaksanakannya lelang meskipun sudah ada pengumuman Pemberitahuan Lelang Agungn Kredit sebanyak 2 kali di surat kabar dan pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan pengumuman. Tunggakan debtur per 4 Juli 2007 Rp 253.230.643,97 dan per 11 Sept 2007 Rp 226.248.550. Harga hasil lelang Rp 250.000.000,- Penggugat I dan II (sebagai penjamin Debitur) meminta penetapan dan pelaksanaan lelang tanggal 12 Sep 2007 adalah tidak sah dan batal demi hukum; dan meminta penangguhan eksekusi pengosongan atas sebidang tanah SHM No. 383/Desa Jayaraga atas nama Penggugat I. Perkara ini berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan dalam perkara No. 03/Pdt.Els/2008/PN.GRT di PN Garut. Jenis Gugatan: Perbuatan Melawan Hukum. Nilai perkara: Rp 250.000.000,- yang merupakan harga hasil lelang. Proses Acara : • Putusan PN Garut tanggal 14 September 2009 mengabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan hasil lelang. Perseroan dikalahkan. • Putusan PT Bandung tanggal 15 April 2010 menguatkan putusan PN Garut. Perseroan pihak yang dikalahkan. Perseroan ajukan permohonan kasasi. • Putusan Kasasi tanggal 16 September 2011 membatalkan Putusan PT Bandung tanggal 15 April 2010 dan menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya. Perseroan dimenangkan.	Putusan Kasasi.

5. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Solo

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	Pengadilan Negeri Surakarta	Perdata	100/Pdt./G 2010/PN.Ska (diterima Tanggal 8 Juni 2010)	Dewi Kurniawati, CS. melawan Perseroan (Tergugat I) CS.	Hasil Uji Tuntas Sementara per 30 Juni 2012: Pokok Permasalahan: Ahliwaris permasalahkan kepemilikan salah satu agunan atas nama istri debitur (Agung Heri Gunawan). Nilai Perkara: Rp 745.000.000,-. Proses Acara: Pada putusan tingkat pertama gugatan tidak ditolak. Penggugat ajukan banding. Pada putusan banding menguatkan putusan tingkat pertama. Perseroan dimenangkan.	Putusan banding.
2.	Pengadilan Negeri Surakarta	Perdata	12/Pdt.G/2011/ PN.Ska	Ny. Lisajanti Utomo (Penggugat) melawan Antony Budi Santoso (Tergugat 1), Susanti (Tergugat 2), Perseroan (Tergugat 3), Not. Sri Wahyuni (Tergugat 4), Kantor Pertanahan Surakarta (Tergugat 5).	Hasil Uji Tuntas Sementara per 30 Juni 2012: Pokok Permasalahan: Penggugat (pemilik jaminan) mempermasalahkan keabsahan akad kredit antara Tergugat I (debitur) dengan Perseroan. Nilai Perkara: Rp 761.095.889,-. Proses Acara: Pada putusan tingkat pertama gugatan tidak ditolak. Penggugat ajukan banding. Pada putusan banding menguatkan putusan tingkat pertama. Perseroan dimenangkan.	Putusan banding.
3.	Pengadilan Negeri Surakarta	Perdata	52/Pdt.G/2011/ PN.Ska	Zakaria Abdullah Baraja (Penggugat) melawan Perseroan (Tergugat)	Hasil Uji Tuntas Sementara per 30 Juni 2012: Pokok Permasalahan: Penggugat mempermasalahkan banyaknya jumlah kewajiban yang barus dibayar. Nilai Perkara: Rp 731.000.000,-. Proses Acara: Pada putusan tingkat pertama gugatan ditolak. Perseroan dimenangkan.	Putusan banding.

6. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Semarang

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	Tingkat pertama: PN Pekalongan	Perdata	Tingkat pertama: 24/Pdt.Plw/2012/ PN.Pkl.	Tingkat pertama: Perseroan (Penggugat) Melawan Hermanto (debitur) (Tergugat)		Mediasi.
2	Tingkat Pertama: PN Semarang Tingkat Banding: PT Semarang	Perdata	Tingkat Pertama: 114/Pdt.G/2008/ PN.Smg Tingkat Banding: 329/Pdt/2009/ PT.Smg	Tingkat Pertama: Perseroan (Penggugat) melawan Michael Gozali dkk (Tergugat) Tingkat Banding: Perseroan (Terbanding) melawan	Kasus Posisi: Adanya sisa hutang Tergugat setelah lelang eksekusi jaminan. Nilai Perkara: Rp 69.343.844,-. Proses Acara: Putusan PN Semarang tanggal 23 Desember 2008, antara lain, gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, menyatakan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat antara Terugat I dan/atau II dengan Penggugat adalah berharga dan sah menurut hukum, menyatakan bahwa Tergugat I masih mempunyai sisa hutang pokok kepada Penggugat yang belum berbayar	Putusan banding. Tergugat (debitur) tidak mengajukan kasasi.

				Michael Gozali dkk (Pembanding)	sebesar Rp 79.368.844,- ditambah biaya iklan koran Rp 9.975.000,- sehingga sisa utang Tergugat I adalah berjumlah Rp 89.343.844,-, menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat. Putusan PT Semarang tanggal 9 November 2009, antara lain, menguatkan putusan PN Semarang tanggal 10 Desember 2009 No. 114/Pdt.G/2008/PN.Smg yang dimohonkan banding tersebut.	

7. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Makassar

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	Pengadilan Negeri Makassar	Perdata	No.145/Pdt.G/ 2009/PN.Mks	PT ACI (Penggugat) Melawan Perseroan Cabang Makassar (Tergugat)	Nilai perkara: Rp 1.200.000.000,-. Proses Acara: Pada putusan tingkat banding Perseroan dimenangkan. Penggugat ajukan kasasi.	Proses Kasasi
2.	Pengadilan Negeri Makassar	Perdata	No.243/Pdt.G/ 2009/PN.Mks	Perseroan Cabang Makassar melawan Sylvia Sitorus	Nilai perkara: Rp 0 Proses Acara: Pada putusan tingkat pertama Perseroan dimenangkan, isi putusan perlawanan Penggugat ditolak. Penggugat ajukan kasasi.	
3	Pengadilan Negeri Makassar	Perdata		Perseroan Melawan Verawaty	Kasus ini telah dijatuhkan vonis oleh Majelis Hakim PN Makassar pada tanggal 6 Desember 2011 dengan amar putusan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat yaitu menyangkut ahli waris dari Ny. Syarifah Supiah sedangkan menyangkut perkara pokok tentang kedudukan SHM yang sekarang ini menjadi jaminan hak tanggungan tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian maka posisi jaminan yang ada pada Perseroan Cabang Makassar tetap sah secara hukum.	Terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut pihak Penggugat mengajukan banding tanggal 19 Desember 2011.
4	Pengadilan Negeri Makassar	Pidana		Andi Bumbun Reza Ali, H. Haruna dan Perseroan cab. Makassar.	Dalam proses pendampingan Perseroan cabang Makassar pada Kepolisian Resior Kota Besar Makassar dalam kapasitas sebagai saksi.	
5	Pengadilan Negeri Makassar	Perdata		Sianny	Penyelesaian sementara dengan jalan musyawarah antara Sianny, Iwan Gomasjaya dan BPN Makassar.	
6	Pengadilan Negeri Makassar	Perdata Kepailitan		Hery	Hery merupakan debitur Perseroan Cabang Makassar. Dalam perkara kepailitan Hery (Termohon Pailit) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Makassar atas Permohonan Pailit Wempy Dahong.	Tahap pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.

8. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Pontianak

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	Tingkat pertama: PN. Pontianak	Perdata	Tingkat Permohonan Eksekusi: PN Pontianak permohonan eksekusi No. 10/PDT.EKS. HT/2004/	Tingkat pertama: Syafrianto Amarikun (Termohon Eksekusi, Pembantah) Melawan Perseroan (Pemohon Eksekusi, Terbantah 1),	Pokok Permasalahan: Perseroan (kreditur) mengajukan permohonan eksekusi jaminan utang Terbantah II (debitur) di Pengadilan Negeri Pontianak No. 10/PDT.EKS. HT/2004/PN.PTK. Tanggal 20 Agt 2004. Sita eksekusi dilaksanakan PN Pontianak Tanggal 28 Des 2004. Pembantah mengajukan permohonan penangguhan eksekusi lelang obyek sita eksekusi Tanggal 1 Peb 2005. Perseroan mengajukan permohonan proses lelang pada Tanggal 29 Juli 2008. Pembantah (d/h Termohon Eksekusi) mendapat 2 kali panggilan untuk mediasi dari PN Pontianak sebelum Perseroan melaksanakan proses lelang, namun mediasi	Proses Kasasi

			PN.PTK yang diajukan Tanggal 20 Agt 2004. Tingkat pertama: 34/PDT.BTH/ 2009/PN. PTK. (terdaftar Tanggal 17 April 2009) Tingkat banding: PT Pontianak No. 09/PDT/2 010/ PT.PTK Tingkat kasai: MA No. 3038 K/ PDT/2010	Dian Elisah/Sik Soe Hwa (Terbantah 2)	yang ditawarkan oleh Hakim ditolak oleh Terbantah I (Perseroan) melalui Kuasa Hukum, dan PN Pontianak menyarankan Pembantah mengajukan perkara bantahan terhadap permohonan eksekusi Perseroan. Pembantah mengajukan bantahan atas pelaksanaan putusan Sita Eksekusi atas SHM Nomor 7085 oleh Pengadilan Negeri Pontianak No. 10/PDT.EKS.HT/2004/PN.PTK. Nilai perkara: Rp 193.332.016 (jumlah terutang debitur sesuai permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Pontianak No. 10/PDT.EKS. HT/2004/PN.PTK.). Proses Acara: Permohonan eksekusi sudah mencapai tahap putusan Sita Eksekusi. Termohon Eksekusi (Pembantah) ajukan bantahan dengan register No. 34/PDT.BTH/ 2009/PN.PTK. Pada putusan tingkat pertama tanggal 9 September 2009 Pembantah dinyatakan sebagai pembantah yang beritikad tidak baik dan menolak bantahan Pembantah. Pembantah ajukan banding. Berdasarkan putusan tingkat banding tanggal 3 Agustus 2010 No. 09/PDT/2010/PT.PTK : - Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembantah - Pembanding - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 9 September 2009 nomor: 34/PDT.BTH/2009/PN.PTK. - Menghukum Pembantah/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- Pembanding ajukan kasasi. Dalam tahap penerimaan dan registrasi berkas perkara dari MA.	

10. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Pekanbaru

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	Tingkat pertama: Pengadilan Negeri Pekanbaru	Perdata	Tingkat pertama : 19/PDT/EK-Grosse/ 2007/ PN.PBR	Tingkat Pertama: Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Darsun (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan benda jaminan. Obyek jaminan: Tanah dan bangunan Perum Graha Hang Tuah Permai Blok D No. 08 Kel. Rejosari, Kec. Bukit Raya, Kodya Pekanbaru, Prov. Riau. Nilai perkara: Rp 151.000.000,00. Proses Acara: Sudah aanmaning. Per 31 Juli 2010, pada tahap panggilan pertama oleh pihak pengadilan Debitur berjanji mau melunasi kreditnya sampai bulan Januari 2010, tapi tidak ada realisasinya. Hingga bulan Juli 2010 masih dalam tahap pengejaran oleh pihak penagihan. Pendaftaran sita eksekusi Grosse Akta Hak Tanggungan.	Proses penetapan pengadilan.
2.	Tingkat pertama: Pengadilan Negeri Pekanbaru	Perdata	Tingkat pertama : 28/Pdt/Eks-Grosse/2009/ PN.Pbr	Tingkat Pertama: Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Farida (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan benda jaminan. Obyek jaminan: Tanah dan bangunan Perum Puri Rajawali Mas Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kodya Pekanbaru. Nilai perkara: Rp 249.000.000,00. Proses Acara: Sudah aanmaning. Pendaftaran sita eksekusi Grosse Akta Hak Tanggungan.	Proses penetapan pengadilan.
3.	Tingkat pertama: Pengadilan Negeri Pekanbaru	Perdata	Tingkat pertama : 33/Pdt/Eks-Grosse/2009/ PN.Pbr	Tingkat Pertama: Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Arjuna Deli (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan benda jaminan. Obyek jaminan: Tanah dan bangunan Jl. Utama, Desa Rejosari, Kec. Bukit Raya, Kodya Pekanbaru. Nilai perkara: Rp 120.000.000,00. Proses Acara: Sudah aanmaning. Pendaftaran sita eksekusi Grosse Akta Hak Tanggungan.	Proses penetapan pengadilan.

4.	Tingkat pertama: Pengadilan Negeri Pekanbaru	Perdata	Tingkat pertama : 27/Pdt/Eks-Grosse/2009/ PN.Pbr	Tingkat Pertama: Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Lukman Jamaluddin (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan benda jaminan. Obyek jaminan: Tanah dan bangunan Jl. Karya 1, Gg. Amalia 3, Kel. Desa Baru, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau. Nilai perkara: Rp 600.000.000,00. Proses Acara: Proses panggilan Aanmaning.	Proses aanmaning.
5.	Tingkat pertama: Pengadilan Negeri Pekanbaru	Perdata	Tingkat pertama : 10/Pdt/Eks-Grosse/2011/ PN.Pbr	Tingkat Pertama: Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Hermawan Lisa Putra (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan benda jaminan. Obyek jaminan: Tanah dan bangunan Kel. Sukamaju, Kec. Sail, Kodya Pekanbaru, Prov. Riau. Nilai perkara: Rp 382.000.000,00. Proses Acara: Proses panggilan Aanmaning.	Proses aanmaning.
6.	Tingkat pertama: Pengadilan Negeri Pekanbaru	Perdata	Tingkat pertama : 12/Pdt/Eks-Grosse/2011/ PN.Pbr	Tingkat Pertama: Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Hasan Basri Bakar (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan benda jaminan. Obyek jaminan: Tanah dan bangunan Jl. Melayu Gg. Malaka Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kodya Pekanbaru Prov. Riau. Nilai perkara: Rp 120.000.000,00. Proses Acara: Proses panggilan Aanmaning.	Proses aanmaning.
7.	Tingkat pertama: Pengadilan Negeri Pekanbaru	Perdata	Tingkat pertama : 13/Pdt/Eks-Grosse/2011/ PN.Pbr	Tingkat Pertama: Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Erniwita Duris (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan benda jaminan. Obyek jaminan: Tanah dan bangunan Jl. Kulim Komp. Beringin Indah Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kodya Pekanbaru. Nilai perkara: Rp 359.000.000,00. Proses Acara: Proses panggilan Aanmaning.	Proses aanmaning.
8.	Tingkat pertama: Pengadilan Negeri Pekanbaru	Perdata	Tingkat pertama : 15/Pdt/Eks-Grosse/2011/ PN.Pbr	Tingkat Pertama: Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Hj. Wan Elizam (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan benda jaminan. Obyek jaminan: Tanah dan bangunan Komp. Pandau Permai Blok B-55 Kel. Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau. Nilai perkara: Rp 298.000.000,00. Proses Acara: Proses panggilan Aanmaning.	Proses aanmaning.
9.	Tingkat pertama: Pengadilan Negeri Pekanbaru	Perdata	Tingkat pertama : 16/Pdt/Eks-Grosse/2011/ PN.Pbr	Tingkat Pertama: Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Chairum Rahmi (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan benda jaminan. Obyek jaminan: Tanah dan bangunan Perum Taman Mulia Indah Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kodya Pekanbaru Prov. Riau. Nilai perkara: Rp 415.000.000,00. Proses Acara: Proses panggilan Aanmaning.	Proses aanmaning.

11. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Kuta - Denpasar

No.	Pengadilan	Jenis	Nomor Perkara	Para Pihak	Kasus Posisi	Status Terakhir
1	PN Denpasar	Perdata	11/Pdt.G/2007/ PN. Dps.	Stephen Patrick O'Sullivan dan Julie Diane O'Sullivan, (Para Penggugat). melawan I Made Sara (Tergugat.) Perseroan (Turut Tergugat)	Pokok Permasalahan: Gugatan perbuatan melawan hukum. Bidang tanah atas nama Tergugat yang pembeliannya didanai oleh Penggugat dan selanjutnya bidang tanah tsb disewa oleh Penggugat selama 25 tahun berikut bangunan milik penggugat yang didirikan diatas tanah tersebut dijadikan jaminan pinjaman Tergugat di Perseroan dengan dibebani hak tanggungan senilai Rp 1.250.000.000,00, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari Penggugat. Antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perjanjian yang dibuat secara notariil yang pada intinya menyatakan bahwa pencantuman nama Tergugat pada sertipikat hanya bersifat pinjam nama saja oleh Penggugat. Tergugat dan Perseroan selaku Turut Tergugat menolak dalil Penggugat, dengan alasan orang asing tidak dapat memiliki tanah Indonesia dan jual beli, pencatatan nama Tergugat dalam sertifikat serta pembebanan hak tanggungan atas bidang tanah tersebut adalah sah. Tergugat juga mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah menerima uang sewa dari Penggugat karena sudah langsung dikompensasikan dengan uang untuk transaksi jual beli bidang tanah tersebut, dan peminjaman uang dari Perseroan adalah untuk keperluan perusahaan Penggugat dan seluruh uang digunakan oleh perusahaan tersebut dengan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima uang tersebut. Obyek Perkara: Sertipikat Hak Milik No. 7109/Desa Ungasan atas nama I Made Sara. Nilai perkara: Ganti rugi material Rp 5.739.993.000 dan ganti rugi immaterial Rp 10.000.000.000. Potensi nilai kerugian Perseroan: Sebesar nilai hak tanggungan Rp 1.250.000.000,00 Proses Acara: Pada putusan tingkat pertama Penggugat dimenangkan untuk sebagian. Perseroan ajukan banding. Sudah ada putusan banding No. 146/Pdt/2007/PT.DPS. Sudah ada putusan kasasi No. 1954/K/Pdt/2008. Sudah ada putusan PK No. 724 PK Pdt/2010. Ada permohonan fatwa tentang permohonan PK atas putusan PK.	• Putusan Kasasi. • Permohonan fatwa permohonan PK atas Putusan PK.
2	PN Denpasar	Perdata	642/Pdt.G/2011/ PN.Dps.	Perseroan (Penggugat) melawan I Made Sara (Tergugat.)	Pokok Permasalahan: Tergugat wanprestasi atas kewajibannya berdasarkan perjanjian fasilitas kredit dari Perseroan yang dibuat dihadapan notaris. Perseroan ajukan gugatan wanprestasi. Obyek Perkara: Sertipikat Hak Milik No. 7109/Desa Ungasan atas nama I Made Sara. Nilai perkara: Rp 500.281.194,26. Proses Acara: Pada putusan tingkat pertama gugatan Perseroan tidak diterima / NO.	Putusan sudah inkracht tanggal 30 Desember 2011.

3	PN Denpasar	Perdata	Tingkat Pertama: 31/Pdt.G/2012/ PN.Dps. Eksekusi Putusan: 31/Pdt.G/2012/ PN.Dps.	Tingkat Pertama: Perseroan (Penggugat) melawan I Made Sara (Tergugat.) Eksekusi Putusan: Perseroan (Pemohon) melawan I Made Sara (Termohon)	Pokok Permasalahan: Gugatan ulang atas perkara 642/Pdt.G/2011/ PN.Dps melawan I Made Sara. Obyek Perkara: Sertipikat Hak Milik No. 7109/Desa Ungasan atas nama I Made Sara. Nilai perkara: Rp 500.281.194,26. Proses Acara: Putusan PN Denpasar tanggal 15 Mei 2012 gugatan Penggugat diterima sebagian, menyatakan perjanjian kredit sah, menyatakan Tergugat cedera janji, menghukum Tergugat membayar sisa utang pokok Tergugat kepada Penggugat Rp 154.826.000,- bunga sebesar Rp 147.929.193,78 sehingga total Rp 302.755.193,78. Proses Acara: Penetapan PN Denpasar No. 31/Pdt.G/2012/ PN.Dps tanggal 22 Mei 2012 mengabulkan permohonan eksekusi dan memerintahkan Panitera / Juru Sita PN Denpasar memanggil pihak-pihak berperkara datang menghadap Ketua PN Denpasar tanggal 15 Agustus 2012 guna kepada Termohon diberi teguran untuk memenuhi isi putusan PN Denpasar tanggal 15 Mei 2012. Perseroan telah membuat surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung No. 118/ AM/08/2012 tanggal 8 Agustus 2012 perihal: Surat Kantor Pertanahan Kab. Badung No. 2745/PD/13-51.03.600/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012, intinya menjelaskan bahwa Putusan PN Denpasar No. 31/Pdt.G/2012/ PN.Dps telah berkekuatan tetap dan telah ditetapkan eksekusinya oleh PN Denpasar sesuai Penetapan PN Denpasar No. 31/Pdt.G/2012/ PN.Dps tanggal 22 Mei 2012. Perseroan telah membuat surat permohonan Sita Eksekusi kepada Ketua PN Denpasar dalam surat No. 138/AM/09/2012 tanggal 20 September 2012.	Putusan PN sudah inkracht sejak tanggal 14 Juli 2012.

12. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Bogor

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	Tingkat Pertama: PN Cibinong	Perdata	108/Pdt/G/2003/ Pn.Cbn	Susunan pihak berperkara pada peradilan tingkat pertama: Suheli selaku Penggugat. Teddy Supriatna selaku Tergugat I. H. Parman bin H. Saipin alias H. Parman selaku Tergugat II. Hj. Jubaedah, selaku Tergugat III. Kantor Pertanahan Kab. Bogor, selaku Tergugat IV. Kanwil BPN Prop. Jawa Barat, selaku Tergugat V. Suzanna Kaonang, SH, selaku Turut Tergugat I. Perseroan selaku Turut Tergugat II.	Pokok Permasalahan: Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan adanya penerbitan 2 sertipikat asli terhadap obyek yang sama. Tergugat I adalah nasabah debitur Perseroan. Penggugat mendalilkan bahwa terdapat dua buah sertipikat asli yang berbeda untuk sebidang tanah di lokasi bidang tanah yang sama, yang terdiri dari, yang satu, sertifikat hak milik atas nama Penggugat, dan yang lainnya, sertifikat hak milik lainnya atas nama Tergugat I, dimana sertifikat hak milik atas nama Tergugat I merupakan obyek jaminan kredit dengan hak tanggungan senilai Rp 500 juta kepada Perseroan. Nilai perkara: Rp 500.000.000,00. Proses Acara: Pada putusan tingkat pertama gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian Penggugat dimenangkan. Akta jual beli tanah kepada Penggugat, Sertifikat Hak Milik Penggugat, Sertifikat hak tanggungan kepada Perseroan serta sita jaminan	Putusan kasasi MA.

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
					dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.	
	Tingkat Banding: Pengadilan Tinggi Bandung	Perdata	288/Pdt/2005/ PT.BDG	Susunan pihak berperkara pada peradilan tingkat banding: Teddy Supriatna, H. Parman bin H. Saipin alias H. Parman, dan Hj. Jubaedah, selaku Para Pembanding I. Perseroan. selaku Pem banding II. Suheli, selaku Terbanding. Kantor Pertanahan Kab. Bogor, selaku Terbanding. Kanwil BPN Prop. Jawa Barat, selaku Terbanding. Suzanna Kaonang, SH, selaku Terbanding.	Pada putusan tingkat banding, Pembanding dimenangkan, gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima, sita jaminan dinyatakan tidak sah dan harus diangkat. Pada tingkat ini Perseroan pada posisi yang kalah.	
	Tingkat Kasasi: MA	Perdata	885K/PDT/ 2007	Tingkat pertama: Perseroan (Turut Termohon Kasasi) Melawan Suheli (Pemohon Kasasi), Teddy Supriatna (Termohon Kasasi)	24 Oktober 2010, putusan Kasasi MA mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.	
2	Tingkat pertama Pengadilan Negeri Cibinong	Perdata	18/Pen.Pdt/Sita. Eks.Akte/2007/ PN.Cbn.	Perseroan (Pemohon Eksekusi), melawan Haryanto (Termohon Eksekusi I), Nyonya Tutur Lisnawati (Termohon Eksekusi II)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan permohonan eksekusi jaminan. Obyek jaminan: Tanah dan bangunan. Nilai perkara: Rp 94.000.000,-. Proses Acara: Penetapan aanmaning tanggal 23 April 2007. Proses lelang.	Proses lelang.
3	Tingkat pertama Pengadilan Negeri Bekasi	Perdata	34/Eks.Ris/2011/PN.Bks	Perseoran (Pemohon Eksekusi) Melawan Ari Sulistio (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan permohonan eksekusi jaminan. Obyek jaminan: Tanah dan bangunan. Nilai perkara: Rp 1.500.000.000,-. Proses Acara: Proses eksekusi pengosongan.	Proses eksekusi pengosongan
4	Tingkat pertama Pengadilan Negeri Cibinong	Perdata	34/Pen.Pdt/Eks. Akte/2010/ PN.Cbn	Perseoran (Pemohon Eksekusi) Melawan Hari Hasanudin (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan permohonan eksekusi jaminan. Obyek jaminan: Tanah dan bangunan. Nilai perkara: Rp 325.000,-. Proses Acara: Penetapan lelang eksekusi tanggal 10 Maret 2011.	Tunggu tanggal lelang ulang.
5	Tingkat pertama Pengadilan Negeri Bogor	Perdata	08/Pdt/Eks/2012/ PN.Bgr. jo. Risalah Lelang No. 366/2011 94/Pdt.G/2012/ PN.Bgr	Perseoran (Pemohon Eksekusi) Melawan Sahala Firdaus Doloksaribu (Termohon Eksekusi) Sahala Firdaus Doloksaribu (Pelawan) Melawan Perseroan (Terlawan)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan permohonan eksekusi jaminan. Obyek jaminan: Tanah dan bangunan. Nilai perkara: Rp 1.699.000.000,-. Proses Acara: Rencana eksekusi pengosongan. Proses persidangan perkara No. 94/Pdt.G/2012/ PN.Bgr	Rencana eksekusi pengosongan.

13. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Palmerah

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	Pengadilan Negeri Bekasi	Perdata	43/EKS.HT / 2008/PN.BKS (permohonan diajukan pd Tanggal 28 April 2008 297/PDT.BTH/ 2008/PN.BKS	Perseroan (Kreditur / Pemohon Eksekusi) melawan PT Burma Jaya Mukti (Debitur / Termohona Eksekusi) Riyono, Mustofa Subehi, Indra Susman, Harwoko, Paidi, Yulianto, Ruswanto, Mohammad Sabani, Lim Salim, Widodo, Marwanto, Sugiman, Erwan, Oman Pardepi, Sarno, Imat Rochimat, Syahrizal, Budiyono, Warto, Edy Parjono, Akhmad, Hendrianto Wibowo, Irawan Yunantiro, Subandi, Oyon, Mujiyono, Mengawan, Suhaibah, M. Maskur, Sugeng Felix, Punarjo, Nurdin, Dwi Agus Mulyono, Basuki bin Sanip, Amat Jumali, H. Muhammad Nur, Suprapto, Dedy Yudha Hadi Surya (Para Pembantah) melawan Perseroan (Terbantah) Perseroan (Pemohon Eksekusi) (kreditor) melawan PT Burma Jaya Motor Henry Sakti (Para Termohon Eks. Debitor)	Tanggal Permohonan Eksekusi: 28 April 2008. Latar belakang permohonan: Terjadi Kredit Bermasalah Debitur yang telah diberikan peringatan Perseroan, sehingga pada tanggal 28 April 2008 Perseroan mengajukan permohonan Eksekusi grosse akta Sertifikat Hak Tanggungan kepada PN Bekasi. Penetapan : Atas permohonan eksekusi tersebut sudah terdapat : - Penetapan Aanmaning No. 43/EKS.HT/ 2008/PN.BKS tanggal 26 Mei 2008 - Penetapan Sita Eksekusi No. 43/EKS.HT/ 2008/PN.BKS tanggal 3 Juli 2008 Sita Eksekusi dilaksanakan sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No. 43/Eks/HT/2008/PN.Bks tanggal 21 Juli 2008. Nilai perkara : Rp 2.690.671.572.53 Kasus Posisi: Atas penetapan PN Bekasi tersebut Pihak Ketiga yakni Riyono dkk mengajukan verzet atas Penetapan sita eksekusi PN Bekasi dan didaftarkan No. 297/Pdt.Bth/2008/PN.Bks Tanggal. 21 Agustus 2008 bahwa sebelum dijaminkan ke Perseroan telah dijual per kavling kpd Pembeli Riyono Dkk, sehingga Henry Sakti selaku penjamin didakwa telah melakukan Pemalsuan sehingga pemberian jaminan oleh Perseroan adalah cacat hukum. Proses Acara: Putusan PN Bekasi No. 297/PDT.BTH/ 2008/PN.BKS tanggal 20 Mei 2009 memenangkan verzet Para Pembantah untuk sebagian, dengan memutuskan, antara lain, bahwa bidang tanah yang disita eksekusi adalah milik Para Pembantah, bahwa Perseroan dan PT Burma Jaya Sakti telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Pembantah, bahwa agar Perseroan mengembalikan sertifikat hak atas tanah yang disita eksekusi, menunda pelaksanaan eksekusi, menyatakan sita eksekutorial PN Bekasi No. 43/EKS.HT/ 2008/PN.BKS tanggal 3 Juli 2008 yang dilaksanakan sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No. 43/Eks/HT/2008/PN.Bks tanggal 21 Juli 2008 tidak dapat dilaksanakan sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam bantahan para pembantah, memerintahkan mengangkat kembali sita eksekutorial. Atas putusan PN Bekasi tersebut Perseroan telah menyatakan permohonan banding tanggal 7 Juli 2009. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan PN Bekasi.	Putusan banding.
2.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Perdata	09/Pen.Eks/ APHT/2010/ PN.JKT.SEL (permohonan didaftarkan pd Tanggal 27 Agustus 2009	Perseroan (Pemohon Eksekusi) (kreditor) melawan CV Detato Indo Hernest [Termohon Eksekusi 1 / debitur], Tonny Prabowo (Termohon Eksekusi 2)	Surat permohonan: Tanggal 27 Agustus 2009. Latar belakang permohonan: Terjadi Kredit Bermasalah yang telah diberikan peringatan oleh Perseroan, sehingga Perseroan mengajukan permohonan Eksekusi grosse akta Sertifikat Hak Tanggungan kepada PN Jakarta Selatan. Penetapan PN Jakarta Selatan: - Penetapan Aanmaning tanggal 25 Maret 2010	Pengajuan eksekusi lelang.

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
					Nilai perkara: Rp 2.015.850.784,27 Progres Acara: Telah diajukan eksekusi lelang Hak Tanggungan.	
3.	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	Perdata	14/2010 Eks/PN. Jkt. Tim. Jo. APHT No. 71/2008 (permohonan didaftarkan pd Tanggal 19 Maret 2010)	Perseroan (Pemohon Eksekusi / kreditor) melawan CV. Venjaya Collection; dan Abdul Rosyid (Para Termohon Eksekusi/ Debitor)	Surat permohonan: Tanggal 19 Maret 2010. Latar belakang permohonan: Terjadi Kredit Bermasalah yang telah diberikan peringatan oleh Perseroan, sehingga Perseroan mengajukan permohonan Eksekusi grosse akta Sertifikat Hak Tanggungan kepada PN Jakarta Timur. Penetapan PN Jakarta Timur: - Penetapan Aanmaning tanggal 25 Maret 2010 - Penetapan Sita Eksekusi tanggal 16 Juni 2010 Nilai perkara: Rp 2.182.744.244,46 Progres Penanganan Perkara Setelah 31 Juli 2010 : Akan diajukan lelang Eksekusi	Sita Eksekusi
4.	Pengadilan Negeri Tangerang	Perdata	58/Pen.Eks/ APHT/2009/ PN.TNG (permohonan didaftarkan pd Tanggal 24 September 2009	Perseroan (Pemohon Eksekusi) (kreditor) melawan Sugito, SE (Termohon Eksekusi/ Debitor)	Surat permohonan: Tanggal 24 September 2009. Latar belakang permohonan: Terjadi Kredit Bermasalah yang telah diberikan peringatan oleh Perseroan, sehingga Perseroan mengajukan permohonan Eksekusi grosse akta Sertifikat Hak Tanggungan kepada PN Tangerang. Penetapan PN Tangerang: - Penetapan Aanmaning tanggal 22 Oktober 2009 - Penetapan Sita Eksekusi tanggal 17 Februari 2010 Sita Eksekusi sudah dilaksanakan oleh Jurusita PN Tangerang pada tanggal 10 Maret 2010 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi. Nilai perkara: Rp 919.442.440,79 Progres Penanganan Perkara Setelah 31 Juli 2010 : Rencana Lelang Eksekusi.	Sita Eksekusi
5.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Perdata	29/Eks.HT/2010/ PN.JKT.Sel (permohonan didaftarkan pd Tanggal 17 Mei 2010	Perseroan (Pemohon Eksekusi/ kreditor) Melawan Ario Perdana Bambang Susanto (Termohon Eksekusi / Debitor)	Menurut Surat Pernyataan Kepala Cabang Palmerah tanggal 18 Agustus 2010: Surat permohonan: Tanggal 17 Mei 2010. Latar belakang permohonan: Terjadi Kredit Bermasalah yang telah diberikan peringatan oleh Perseroan, sehingga Perseroan mengajukan permohonan Eksekusi grosse akta Sertifikat Hak Tanggungan. Penetapan PN Jakarta Selatan: - penetapan Aanmaning - Penetapan Sita Eksekusi - Penetapan Lelang Eks Nilai perkara: Rp 1.368.868.620 Proses Acara : Sudah ada Penetapan Aanmaning. Akan ditindaklanjuti dengan Sita Eksekusi.	Proses sita eksekusi.
6.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Perdata	20/Eks.HT/2010/ PN.JKT.Sel (permohonan didaftarkan	Perseroan (Pemohon Eksekusi/ kreditor) melawan	Surat permohonan: Tanggal 12 Mei 2010. Latar belakang permohonan: Terjadi Kredit Bermasalah yang telah diberikan	Aanmaning.

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
			pd Tanggal 12 Mei 2010	Nyonya Ria Prihwati (Termohon Eksekusi/ Debitor)	peringatan oleh Perseroan, sehingga Perseroan mengajukan permohonan Eksekusi grosse akta Sertifikat Hak Tanggungan kepada PN Jakarta Selatan. Nilai perkara: Rp 5.114.926.863,16. Proses Acara : Penetapan Aanmaning tanggal 29 Juni 2010.	
7.	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	Perdata	25/Eks.HT/2010/ PN.JKT.TIM Jo. APHT No. 234/2009 (permohonan didaftarkan pd Tanggal 17 Mei 2010	Perseroan (Pemohon Eksekusi / kreditor) Melawan Rumiati (Termohon Eksekusi / Debitor)	Surat permohonan: Tanggal 12 Mei 2010. Latar belakang permohonan: Terjadi Kredit Bermasalah yang telah diberikan peringatan oleh Perseroan, sehingga Perseroan mengajukan permohonan Eksekusi grosse akta Sertifikat Hak Tanggungan. Nilai perkara: Rp 494.998.435 Proses Acara : Sudah ada Penetapan Aanmaning. Eksekusi lelang pertama tidak terjual.	Eksekusi lelang pertama tidak terjual.
8.	Pengadilan Negeri Cibinong	Perdata	20/Pen.Pdt/Eks. Aan/2010.Cbn (permohonan didaftarkan pd Tanggal 27 Mei 2010	Perseroan Tbk (Pemohon Eksekusi) (kreditor) Melawan Masdar Lira SH Nadia Irene Dama (Para Termohon Eks/ Debitor)	Surat permohonan: Tanggal 27 Mei 2010. Latar belakang permohonan: Terjadi Kredit Bermasalah yang telah diberikan peringatan oleh Perseroan, sehingga Perseroan mengajukan permohonan Eksekusi grosse akta Sertifikat Hak Tanggungan kepada PN Cibinong. Nilai perkara: Rp 595.293.606 Proses Acara : Penetapan Aanmaning tanggal 8 Juni 2010. Debitor mohon penundaan pembayaran s/d 5 September 2010. Eksekusi lelang pertama tidak terjual.	Eksekusi lelang pertama tidak terjual.
9.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Perdata	36/Eks.HT/2009/ PN.JKT.SLT (permohonan didaftarkan pd Tanggal 21 Juli 2009	Perseroan (Pemohon Eksekusi / Kreditor) melawan Tan Chandra Hartanto BA (Termohon Eksekusi / Debitor)	Surat permohonan: Tanggal 21 Juli 2009. Latar belakang permohonan: Terjadi Kredit Bermasalah yang telah diberikan peringatan oleh Perseroan, sehingga Perseroan mengajukan permohonan Eksekusi grosse akta Sertifikat Hak Tanggungan kepada PN Jakarta Selatan. Nilai perkara: Rp 2.606.163.674. Proses Acara : - Penetapan PN Jakarta Selatan tgl 24 Nov 2009: Aanmaning. - PN Jakarta Barat melaksanakan bantuan melakukan pemanggilan aanmaning sesuai surat permohonan bantuan dari PN Jakarta Selatan kepada PN Jakarta Barat agenda surat masuk PN Jakarta Barat tanggal 24 Nopember 2009. - Penetapan Sita Eksekusi tanggal 14 Juli 2010 - Akan diajukan lelang eksekusi	Per 31 Juli 2010: Aanmaning Setelah 31 Juli 2010: Penetapan Sita Eksekusi.
10.	Pengadilan Negeri Tangerang	Perdata	28/PEN.EKS/APHT /2010/PN.TNG (permohonan didaftarkan pd Tanggal 12 April 2010)	Perseroan (Pemohon Eksekusi / kreditor) melawan Mohamad Yuliantho (Termohon Eksekusi / Debitor)	Surat permohonan: Tanggal 12 April 2010. Latar belakang permohonan: Terjadi Kredit Bermasalah yang telah diberikan peringatan oleh Perseroan, sehingga Perseroan mengajukan permohonan Eksekusi grosse akta Sertifikat Hak Tanggungan kepada PN Tangerang. Nilai perkara: Rp 547.184.588,42. Proses Acara : - penetapan Aanmaning Tanggal 28 April 2010 - Penetapan Sita Eksekusi Tanggal 5 Juli 2010 - Akan diajukan lelang eksekusi.	
11.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Perdata	15/Eks.HT/2009/ PN.Jkt.Slt	Perseroan melawan PT Sulung Putra Mandiri	Nilai perkara: Rp 1.157.572.939,-. Obyek Eksekusi: SHM No. 492/Ciganjur, Jakarta Selatan. Proses Acara : -Penetapan Aanmaning. -Penetapan Sita Eksekusi.	Sita Eksekusi.

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
12.	Pengadilan Negeri Cibinong	Perdata	08/Pen.Pdt/Akta. A /PN.Cbn	Perseroan melawan M. Ihsan	Nilai perkara: Rp 403.592.361,09. Obyek Eksekusi: SHGB No.921/Cikeas, Cibubur Country. Proses Acara : -Penetapan Aanmaning. -Penetapan Sita Eksekusi.	Sita Eksekusi.
13.	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	Perdata	07/2011 Eks/ PN.Jkt.Tim jo APHT No.23/2009 No.78/2009 Jo APHT74/2009 jo APHT No.80/2009	Perseroan melawan PT Damba Intra	Nilai perkara: Rp 6.183.381.111,94. Obyek Eksekusi: 4 Serttipikat SHMSRS Bellagio, dan 2 Sertipikat Kav AD Jkt Tim. Proses Acara : -Penetapan Aanmaning.	Aanmaning.
14.	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	Perdata	08/2011 Eks/ PN.Jkt.Tim Jo APHT No.194/2009	Perseroan melawan Toto Suwarto	Nilai perkara: Rp 411.203.392,67. Obyek Eksekusi: SHM No.03390/Cibubur, Jakarta Timur. Proses Acara : -Penetapan Aanmaning.	Aanmaning.
15.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Perdata	13/Eks.HT/2009/ PN.Jkt.Slt	Perseroan melawan Koes Pudjianto	Nilai perkara: Rp 913.608.271,94. Obyek Eksekusi: 2 SHM No. 1739 & 1740, Jl. Harapan, Bintaro. Proses Acara : -Penetapan Aanmaning. -Penetapan Sita Eksekusi. -Penetapan Lelang.	Lelang eksekusi ke-II, tidak ada peminat.
16.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Perdata	43/Eks.HT/2005/ PN.Jkt.Slt	Perseroan melawan Arifandi	Nilai perkara: Rp 683.516.982,28. Obyek Eksekusi: SHM No. 2548/Petukangan, Jl. Tangkas IX No. A5. Proses Acara : -Penetapan Aanmaning. -Penetapan Sita Eksekusi. -Penetapan Lelang.	Lelang eksekusi ke-IV, tidak ada peminat.
17.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Perdata	21/Eks.HT/2008/ PN.Jkt.Slt	Perseroan melawan CV Juliana	Nilai perkara: Rp 4277857728.27. Obyek Eksekusi: SHM No. 4192/Pd Pinang, Jl. H. Naimun. Proses Acara : -Penetapan Aanmaning. -Penetapan Sita Eksekusi. -Penetapan Lelang.	Lelang eksekusi ke-IV, tidak ada peminat. Akan di-AYDA.
18.	Pengadilan Negeri Tangerang	Perdata	21/Pen.Eks/ APHT/2011/ PN.Tng	Perseroan melawan George Eka B.	Nilai perkara: Rp 2.691.666.694,85. Obyek Eksekusi: SHM No.03378/Pd Karya, Bintaro. Proses Acara : -Penetapan Aanmaning. -Penetapan Sita Eksekusi.	Sita Eksekusi.
19.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Perdata	23/2011 Eks Jo No.17/2010 jo No. 35/2010	Perseroan melawan William Setiawan	Nilai perkara: Rp 3.340.594.953,95. Obyek Eksekusi: SHM No.1672, HM No.1673, Duri Kepa, dan SHGB No. 598/Ancol. Proses Acara : -Penetapan Aanmaning. -Proses Sita Eksekusi.	Proses Sita Eksekusi.
20.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Perdata	042/2008.Eks/ PN.Jkt.Pst	Perseroan melawan Linawati Djojo	Nilai perkara: Rp 54.000.000,-. Obyek Eksekusi: SHMASRS No.554/III/Sumur Batu. Proses Acara : -Penetapan Aanmaning. -Proses Sita Eksekusi.	Proses Sita Eksekusi.
21.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Perdata	006/2011.Eks/ PN.Jkt Pst	Perseroan melawan Tan A Jak	Nilai perkara: Rp 988.156.930,-. Obyek Eksekusi: SHGB No.3079/Mangga 2, Jl. P. Jayakarta. Proses Acara : -Proses aanmaning.	Proses Aanmaning.
22.	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Perdata	055/2011.Eks/ PN.Jkt Pst	Perseroan melawan Lina Yulianti	Nilai perkara: Rp 1.251.978.905,-. Obyek Eksekusi: SHMASRS No.2973/Mangga Dua. Proses Acara : -Proses aanmaning.	Proses Aanmaning.
23.	Pengadilan Negeri Bekasi	Perdata		Perseroan melawan	Nilai perkara: Rp 1.627.308.725,-. Obyek Eksekusi: SHM No.1442/Cibeber dan SHGB No.2924/Mekarmukti.	Proses lelang eksekusi.

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
				Bong Randy	Proses Acara : -Proses lelang eksekusi.	
24.	Pengadilan Negeri Bekasi	Perdata	41/Pen.Eks/ APHT/2009/ PN.Tng	Perseroan melawan Franky Samuel	Nilai perkara: Rp 725.879.999,-. Obyek Eksekusi: SHMASRS No.4597 ITC Cempaka Mas. Proses Acara : -Proses aanmaning.	Proses aanmaning.
25.	Pengadilan Negeri Tangerang	Perdata	41/Pen.Eks/ APHT/2009/ PN.Tng	Perseroan melawan Yoe Ka Song	Nilai perkara: Rp 472.579.967,13 Obyek Eksekusi: .SHM No.2036/Sangiang Jaya Proses Acara : -Proses aanmaning.	Proses aanmaning.
26.	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	Perdata	09/2008 Eks/ PN.Jkt.Tim.J o. APHT I No.41/2006	Perseroan melawan Chandra Mulya S.	Nilai perkara: Rp 394.327.959,-. Obyek Eksekusi: SHM No.3843/Malaka Jaya, Duren Sawit. Proses Acara : -Proses lelang eksekusi.	Lelang eksekusi ke-II, tidak ada peminat.

14. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Malang

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	Pengadilan Negeri Malang	Perdata	2/Eks/2010/PN Malang	Perseroan Cab. Malang (Pemohon Eksekusi) Melawan R. Zakaria Subiantoro (Termohon Eksekusi)	- penetapan Aanmaning : Tanggal 12 Januari 2010 Progres Penanganan Perkara Setelah 31 Juli 2010 : - dilanjutkan ke proses sita jaminan	penetapan Aanmaning
2.	Pengadilan Negeri Malang	Perdata	15/Eks/2010/PN Malang	Perseroan Cab. Malang (Pemohon Eksekusi) Melawan Agus Khumaidi (Termohon Eksekusi)	- penetapan Aanmaning : Tanggal 4 Mei 2010 Progres Penanganan Perkara Setelah 31 Juli 2010 : - Jika belum ada penyelesaian akan di lanjutkan ke proses sita jaminan	penetapan Aanmaning
3.	Pengadilan Negeri Malang	Perdata	14/Eks/2011/PN Malang	Perseroan Cab. Malang (Pemohon Eksekusi) Melawan Asaf Yahya (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit macet. Perseroan ajukan permohonan eksekusi HT jaminan. Nilai perkara: Rp 324.793.493,-. Proses Acara: Sudah aanmaing. Proses sita.	Proses sita.
4.	Pengadilan Negeri Malang	Perdata	15/Eks/2011/PN Malang	Perseroan Cab. Malang (Pemohon Eksekusi) Melawan Misbachul Rosidi (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit macet. Perseroan ajukan permohonan eksekusi HT jaminan. Nilai perkara: Rp 629.321.905,-. Proses Acara: Sudah aanmaing. Proses sita.	Proses sita.
5.	Pengadilan Negeri Malang	Perdata	16/Eks/2011/PN Malang	Perseroan Cab. Malang (Pemohon Eksekusi) Melawan Benijanto Soegiharto (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit macet. Perseroan ajukan permohonan eksekusi HT jaminan. Nilai perkara: Rp 698.181.458,-. Proses Acara: Sudah aanmaing. Proses sita.	Proses sita.

15. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Sukabumi

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	Pengadilan Negeri Cibadak	Perdata	(Eksekusi) No. 06/ Pen.Eks.L/ 2004 PN Cbd. juncto (Perlawanan) No. 01/Pdt.G/ 2009/PN Cbd.	Agus Suparman Sugiawan SE (Pelawan) melawan Perseroan (Terlawan I), Drs. Aben Saepudin (Terlawan II), KPKNL Bogor (Terlawan III), Notaris Gunawan, SH (Turut Terlawan I) BPN Kabupaten Sukabumi (Turut Terlawan II)	Dasar Gugatan: Perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi pengosongan atas tanah & bangunan secara paksa Kasus Posisi: Pelawan adalah awalnya debitur Perseroan yang wanprestasi atas pembayaran angsuran dan kemudian dimohonkan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan ke kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Bogor melalui Pengadilan Negeri Cibadak yang pelaksanaannya pada Tanggal. 21 April 2005, yang dimenangkan oleh Terlawan II. Pelaksanaan eksekusi tersebut berdasarkan Penetapan Ketua PN Cibadak No. 06/Pen.Eks.L/2004 PN Cbd. yang dimohonkan oleh Perseroan, dimana pada tanggal 27 Nop 2008 PN Cibadak menetapkan Eksekusi Pengosongan No. 06/Pen.Eks.L/2004 PN Cbd.. Nilai perkara: Rp 86.700.000,00. Proses Acara : • Perkara PN Cibadak No. 01.G/Prd/2009/PN Cbd putus tanggal 21 Juni 2010 dengan putusan NO atau Perlawanan tidak dapat diterima. • Penetapan No. 06/Pen.Eks.L/2004 /PN.Cbd, tanggal 27 Nopember 2008 yaitu mengabulkan permohonan Pemohon yaitu pengosongan terhadap SHM No. 181/Desa Wamasari Milik Tergugat II (Drs. Aben Saepudin). • Pelaksanaan pengosongan tanggal 8 Januari 2009 berdasarkan Berita Acara Pengosongan No. 06/BA.Eks.I/2004/PN.Cbk.	Pengosongan.
2.	Pengadilan Negeri Cibadak	Perdata	01/Pdt.Som/ 2009/PN.Cbd (terdaftar tanggal 17 Peb 2009)	Perseroan (Pemohon Somasi) melawan H. Asep Somantri, SH (Termohon Somasi) / Debitur	Dasar / Latar Belakang Lahirnya Somasi / Teguran: Termohon Somasi (debitur) wanprestasi atas pembayaran bunga Kredit PRK dari Perseroan (kreditur,) dimana masa kreditnya sudah jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2008. Nilai perkara: Rp 554.115.625,10. Proses Acara: -Penetapan somasi: 13 Maret 2009. Setelah mendapat Somasi dari PN Cibadak debitur berjanji akan menyelesaikan seluruh fasilitas kreditnya di Perseroan. Akan mengajukan Somasi kedua ke PN Cibadak.	Tanggal 2 Juli 2010 Debitur melunasi sebagian Plafond (Rp120.000.000,-) Posisi Plafond menjadi sebesar Rp 434.115.625,10. Debitur kooperatif dan saat ini masih berupaya menjual aset debitur untuk penyelesaian seluruh hutang Debitur.
3.	BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Sukabumi	Perdata	Aduan No. 002/BPSK/II/2009 tanggal 2 Pebruari 2009	Nouval Baswedan (ahli waris Konsumen, Pengadu) melawan Perseroan (Pelaku Usaha, Teradu), PT. Panin Life, Tbk (Pelaku Usaha, Teradu)	Dasar Aduan: Claim Asuransi jiwa atas nama (alm) Sofyan Baswedan yang ditolak oleh PT. Panin Life, Tbk. Almarhum adalah nasabah yang meninggal dunia, ditolak karena pada waktu mengisi aplikasi asuransi memberikan data tidak akurat. Kasus Posisi: (Alm) Sofyan Baswedan pada 21 Februari 2008 mendapat fasilitas kredit dari Perseroan dan pada 4 September 2008 meninggal dunia, atas permohonan keluarga almarhum Perseroan mengajukan Claim ke pihak Panin Life, dan 1 Desember 2008 ada pemberitahuan dari Panin Life bahwa asuransi (alm) Sofyan B tidak dapat dibayarkan. Nilai perkara: Rp 175.331.214,02. Proses Acara: • Perkara tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur BPSK	Puitusan BPSK, Perseroan dimenangkan.

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
					akan tetapi akan melalui jalur Pengadilan Negeri. • Per 31 Juli 2010 : Pembicaraan kearah penyelesaian pernah dilakukan, akan tetapi tidak ada kesepahaman antara para pihak • Setelah 31 Juli 2010 belum ada perkembangan yang signifikan dari para pihak. BPSK keluarkan Putusan Sela No. 002/P3K/BPSK/11/2009 tanggal 20 Mei 2009 yang memutuskan menolak gugatan Pemohon.	
4.	Pengadilan Negeri Cibadak	Perdata	No. 05/Pdt.G/ 2011/PN.Cbd	Denda Ahadian Juniardi (Penggugat) melawan Hj. Shinta Sri Prihayati (Tergugat 1), Dasep Muhamad Nasir (Tergugat 2), Gunawan SH (Tergugat 3), Perseroan (Tergugat 4), BPN. Kab. Sukabumi (Turut Tergugat 1).	Dasar Gugatan: Pada tanggal 20 September 2005 terjadi transaksi jual beli tanah & bangunan antara tergugat I dengan tergugat II dalam hal pembelian tanah dan bangunan tersebut mendapat dukungan dana dari tergugat IV yaitu PT.BANK PANIN Tbk KCU Sukabumi, dimana Tergugat II adalah nasabah PT. BANK PANIN Tbk KCU Sukabumi. Tergugat II dalam perjalanan kreditnya mengalami kemacetan, dan pada saat tanah dan bangunan akan dieksekusi ada perlawanan dari pihak Penggugat dengan alasan bahwa Transaksi Jual Beli pada waktu itu tidak sah karena Penggugat sebagai anak dari penjual (Tergugat I) tidak dilibatkan pada transaksi tersebut.. Obyek: SHM No. 976, Blok Cisero, Desa Pasir Halang, SHM No.791, Blok Langensari, Ds.Pasir Halang, SHM No.899, Blok Gentong, Desa Pasir Halang, SHM No.403, Blok Gentong, Desa Pasir Halang. Nilai perkara: Rp 3.450.000.000,02.. Proses Acara : Proses persidangan.	Proses persidangan.

16. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Garut

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	Tingkat Pertama : Pengadilan Negeri Garut Tingkat Banding : Pengadilan Tinggi Bandung	Perdata	Tingkat pertama: 08/Pdt.G/ 2008/ PN.Grt (didaftar Tanggal 23 Juni 2008) Tingkat Banding: 64/PDT/2009/ PT.BDG	Tingkat pertama: Mansyoer Rusli dan Ny. Titin Yustinawati (Para Penggugat) melawan 1. Perseroan (Tergugat I) 2. Kamarul Akbar (Tergugat II) 3. PPAT Ulya Triarini SH (Tergugat III) 4. Kantor Pertanahan Kab. Garut (Turut Tergugat) Tingkat Banding: Para Penggugat (Pembanding) Melawan Perseroan (Terbanding 1), Kamarul Akbar (Terbanding 2), PPAT Ulya Triarini	Pokok Permasalahan: Penggugat berpendapat Akta Jual Beli atas rumah Penggugat kepada Perseroan yang dibuat dalam rangka kelanjutan dari hilangnya uang dalam brankas Perseroan adalah tidak sah. Kasus ini sebagai kelanjutan dari masalah hilangnya uang dalam brankas Perseroan yang menjadi tanggungjawab Penggugat sehubungan jabatan Penggugat pada Perseroan pada waktu itu maka Penggugat telah menandatangani Akta Jual Beli atas rumah Penggugat kepada Perseroan, dimana kemudian Penggugat berpendapat bahwa penandatanganan tersebut adalah tidak sah dan merugikan Penggugat. Harga jual beli rumah sebesar Rp 240.000.000, dan nilai ganti rugi imaterial yang dituntut Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,-. Jenis gugatan: Gugatan perbuatan melawan hukum. Nilai perkara: Rp 2.840.000.000,-. Proses Acara: Pada tingkat pertama putus tanggal 1 Desember 2008, putusan tolak gugatan Penggugat. Perseroan dimenangkan. Penggugat mengajukan banding. Proses Acara: Pada tingkat pertama putus tanggal 1 Desember 2008, putusan tolak gugatan Penggugat. Perseroan dimenangkan. Penggugat mengajukan	Peninjauan Kembali.

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
				SH (Terbanding 3), Kantor Pertanahan Kab. Garut (Turut Terbanding)	banding. Pada tingkat putusan banding putus tanggal 2 April 2009, putusannya menguatkan putusan tingkat pertama. Perseroan dimenangkan. Penggugat mengajukan kasasi. Pada tingkat kasasi putusan banding dikuatkan. Penggugat dikalahkan. Putusan diterima 29 Maret 2012. Perseroan dimenangkan. Penggugat ajukan PK. Saat ini dalam proses PK.	
2.	Tingkat Pertama : Pengadilan Negeri Garut Tingkat Banding : Pengadilan Tinggi Bandung Tingkat Kasasi: Mahkamah Agung RI	Perdata	Tingkat Pertama: 04/Pdt/G/2009/PN.Grt Didaftar tanggal 29 Januari 2009 Tingkat Banding: 76/Pdt/2010/PT.BDG	Tingkat Pertama: Yati Mulyati (Penggugat I) Drs. Suryana W (Penggugat II Melawan Perseroan Garut (Tergugat 1) Perseroan Bandung (Tergugat 2), Kepala Kantor KPKNL Bandung (Tergugat 2) Suhendrik Arisanto (Tergugat 4), Lilis Suryani (turut tergugat 1), Yayan Cahyana (turut tergugat 2). Tingkat Banding: Perseroan Garut (Pembanding semula Tergugat 1), Perseroan Bandung (Pembanding semula Tergugat 2), Suhendrik Arisanto (Pembanding semula Tergugat 4) Melawan Yati Mulyati (Terbanding semula Penggugat I) Drs. Suryana W Terbanding semula Penggugat II.	Pokok Permasalahan : Turut Tergugat 1 mempuyai hutang kepada Tergugat 1. Penggugat adalah penjamin atas hutang Turut Tergugat 2. Hutang kepada Tergugat 1 macet dan jaminan berupa tanah dan bangunan milik Penggugat dilelang dilelang tanggal 12-09-2007 yang dimenangkan oleh Tergugat 4. Pada saat pengosongan Penggugat mengajukan Gugatan. Nilai perkara: Rp 250.000.000,- Proses Acara: Pada tingkat pertama putus 14 September 2009 putusan kabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan hasil lelang. Perseroan dikalahkan. Pada tingkat banding putus 15 April 2010, putusan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Perseroan dikalahkan. Pada tingkat kasasi tanggal 16 September 2011 gugatan para penggugat/para termohon kasasi ditolak. Perseroan dimenangkan.	Putusan Kasasi.
6.	Tingkat Pertama : Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung	Perdata – Perseli-sihan Hubungan Industrial	Tingkat pertama: 85/G/2009/PHI.BDG (didaftar Tanggal 27 Mei 2009)	Tingkat pertama: Mansyoer Rusli (Penggugat) Melawan Perseroan (Tergugat)	Dasar Gugatan: Gugatan PHK dalam rangka perselisihan hubungan industrial. Kasus Posisi: Penggugat mengalami PHK oleh Perseroan. Perselisihan antara Penggugat dan Perseroan telah diupayakan diselesaikan melalui tahap mediasi di hadapan mediator Disnaker Garut dan telah menerima surat anjuran yang isi anjurannya ditolak oleh Penggugat sehingga tidak tercapai penyelesaian. Penggugat mengajukan gugatan menggugat nilai pembayaran hak-hak Penggugat sehingga seluruhnya sebesar Rp 303.664.550,00, menyatakan PHK dan memohon membatalkan surat anjuran Disnaker Garut tanggal 8 April 2009 dan 16 April 2009.	Putusan PHI Bandung.

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
					Nilai Perkara: Rp 303.664.550,00. Proses Acara: Perkara putus : 19 Agutus 2009 Isi Putusan : - Menolak gugatan Penggugat. - Perseroan membayar penggantian uang cuti dll Rp 4.284.571,42	

17. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Sumedang

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	PN Bandung	Perdata	27/Pdt/Eks/1994/HIP/PN.Bdg	Perseroan (Pemohon eksekusi) Melawan H. Udin Syaripudin (Termohon Eksekusi)	Ppkok Permasalahan: Fasilitas Kredit / Pinjaman yang diberikan Bank kepada Debitur telah mengalami kemacetan / wanprestasi (cidera janji) berdasarkan Sertifikat Hipotitik No. 1127/1994 yo Akta Hipotik No. 241/1/21/04/HIP/1994 dan Akta Persetujuan Kredit No. 183 tertanggal 27-10-1993 yang ditandatangani dihadapan Notaris ELIAWATI HOSTIADI, SH. Notaris di Bandung. Perseroan mengajukan permohonan eksekusi jaminan. Obyek eksekusi: Sebidang tanah dan Bangunan Hak milik No. 361/Desa Sindanglaya, Kec. Arcamanik, Wilayah Ujungberung, Kodya Bandung, Luas : 1990 m2, tercatat atas nama H. Udin Syaripudin. Nilai Perkara : Rp. 304.023.690,- Proses Acara: Penetapan sita jaminan: 17 September 2009 Sita Eksekusi sudah dilaksanakan tanggal 30 September 2009. Amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 145 K/PDT/2000, tanggal 5 Juni 2003 memenangkan Perseroan sebagai Pemohon Kasasi. Penetapan PN berdasarkan Akta Perdamaian Perkara No. 44/Pdt.G./2012/PN.BDG, Tgl. 2 April 2012, pihak kedua Ny Ardahlia Thamrin (d/h. Pembantah) akan menyelesaikan utang piutang H.Udin Syaripudin.	Proses perdamaian sedang berlangsung.
2.	PN Kls IA Sumedang	Perdata	03/Pen.Pdt/Eks. SHT/2009/PN. Smd	Perseroan (Pemohon eksekusi) Melawan Hj. Teti Sri Supartini (Termohon Eksekusi)	Surat Permohonan Eksekusi: Tanggal 11 September 2009 Pokok Permasalahan: Kredit bermasalah dan telah diberikan peringatan oleh Perseroan, sehingga Perseroan mengajukan permhonan Eksekusi grosse akta Sertifikat Hak Tanggungan Obyek Eksekusi: Sebidang tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 98, seluas 345 m2, Gambar Situasi No. 176/1990, tertanggal 11 April 1990, terletak di Blok Desa, Desa Legok Kaler, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat atas nama Teti Sri Supartini. Nilai Perkara : Rp 258.180.500 Proses Acara: Penetapan sita jaminan: 17 September 2009 Sita Eksekusi sudah dilaksanakan tanggal 30 September 2009.	Sita Eksekusi sudah dilaksanakan tanggal 30 September 2009.

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
3	PN Sumedang	Perdata	03/Pen.Pdt/ Eks.SHT / 2012/PN.Smd	Perseroan (Pemohon eksekusi) Melawan Pinpin Rismayanti (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Fasilitas Kredit / Pinjaman yang diberikan Bank kepada Debitur telah mengalami kemacetan / wanprestasi (cidera janji) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1341/2007, tertanggal 19 Nopember 2007, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 149/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan FAUZI, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Sumedang dan Akta Pengakuan Hutang No. 10 tertanggal 24 Oktober 2007, yang dibuat di hadapan FAUZI, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Sumedang. Obyek Eksekusi: Sebidang tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangun No. 88/Desa Sukajaya, seluas 517 m2, Surat ukur No.134/Sukajaya/2001, tertanggal 06 Desember 2001, terletak di Blok Kavling F-1 Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang selatan, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat atas nama Ny.Pinpin Rismayanti. Nilai Perkara: Rp. 200.130.642 Proses Acara: Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang No. 03/Pen.Pdt/Eks.SHT/2012/PN.Smd, tertanggal 29 Juni 2012 mengabulkan permohonan lelang eksekusi dari PT. Bank Panin, Tbk sebagai pemenang / pemohon Eksekusi.	Proses teguran/somasi dari PN Sumedang sedang berlangsung

18. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Palembang

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang	Perdata	27/Pdt.HT/Eks/2009/PN.PLG	Perseroan (Pemohon Eksekusi) Melawan Indra F Sutanto (Termohon Eksekusi	Nilai perkara: Rp 962.540.494,- Obyek Eksekusi: Sebidang tanah HM No. 116/Kel. Sei Selincah atas nama Indra F. Sutanto. Proses Acara: Sita Eksekusi tanggal 23 Februari 2011.	Sita Eksekusi.
2.	Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang	Perdata	28/Pdt.HT/Eks/2009/PN.PLG	Perseroan (Pemohon Eksekusi) Melawan Christina Apriliani (Termohon Eksekusi	Nilai perkara: Rp 252.345.178,-. Obyek Eksekusi: Sebidang tanah HM N0. 2970/Kel.8 ulu Proses Acara: -Proses Aanmaning (Tegoran). Semula Debitur melakukan kewajibannya untuk pembayaran angsuran kreditnya. Namun kemudian Debitur tidak kooperatif lagi sehingga akan dilanjutkan dengan sita jaminan.	Aanmaning. Akan dilanjutkan dengan sita jaminan.
3.	Pengadilan Negeri Palembang Pengadilan Tinggi Palembang	Perdata	Tingkat Pertama: 80/Pdt.G/2011/PN.PLG Tingkat Banding: 54/PDT/2012/PT.PLG	Arton Aswie (Penggugat / Pembanding/ Pemohon Kasasi) Melawan Deddy Indrawan (Tergugat I/ Pembanding, Termohon Kasasi) Perseroan Cab. Palembang (Tergugat II /	Permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 54/PDT/2012/ PT.PLG jo. No. 80/Pdt.G/2011/ PN.PLG.	Proses kasasi.

				Terbanding/ Termohon Kasasi).		
4	PN Palembang	Perdata	11/Pdt.HT/Eks/2010/PN.PLG	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Ardi (Termohon Eksekusi)	Nilai perkara Rp. 1.341.196.513,-	*sita jaminan*
5	PN Palembang	Perdata	11/Pdt.Ht/EKS/2011/PLG	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Ahmad Siswidianto (Termohon Eksekusi)	Nilai perkara Rp. 783.910.168,-	*aanmaning*
6	PN Palembang	Perdata	28/Pdt.HT/Eks/2011/PN.PLG	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan CV.Rorien dkk(Termohon Eksekusi)	Nilai perkara Rp. 363,144,503,72	*aanmaning*
7	PN Palembang	Perdata	27/Pdt.HT/Eks/2011/PN.PLG	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Ahmad Salbilah(Termohon Eksekusi)	Nilai perkara Rp. 218,488,236	*aanmaning*
8	PN Palembang	Perdata	29/Pdt.HT/Eks/2011/PN.PLG	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Beni Wijaya (Termohon Eksekusi)	Nilai perkara Rp. 825,308,723,90	*aanmaning*
9	PN Palembang	Perdata	30/Pdt.HT/Eks/2011/PN.PLG	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Hairul ILyasa(Termohon Eksekusi)	Nilai perkara Rp. 438,444,513,00	*aanmaning*
10	PN Palembang	Perdata	31/Pdt/HT/Eks/2011/PN.PLG	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Parli(Termohon Eksekusi)	Nilai perkara Rp. 273,518,425,69	*aanmaning*

19. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Manado

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	Tingkat Pertama: PN Manado	Perdata	03/Pdt.G/2009/ PN.MDO (didaftar Tanggal 7 Jan 2009)	Nonce Hendy Katrine Pesik, dan Benaya Bonaventura Benjamin (Para Penggugat) melawan Perseroan (Tergugat)	Jenis gugatan: Gugatan penyalahgunaan wewenang. Nilai perkara: Rp 1.300.000.000,00. Putusan: 7 Mei 2009. Isi putusan: Gugatan Penggugat ditolak. Kesimpulan: Perseroan menang N.O Gugatan ditolak karena gugatan yang diajukan Penggugat merupakan Ne Bis In Idem dengan gugatan yang diajukan dengan materi dan para pihak yang sama dengan No. 264/Pdt.G/2008/PN.MDO yang diputus Tanggal 2 Desember 2008 dan sudah in-kracht Tanggal 28 Desember 2008. Sehubungan perkara No. 264/Pdt.G/2008/PN.MDO, Perseroan pernah mengajukan permohonan	Jaminan telah dilunasi debitur pada November 2011. Kasasi penggugat di tolak dan untuk salian putusan belum di terima.

					eksekusi yang didaftar di PN Manado No. 19/Pdt. Hip/2008/PN.MDO Tanggal 29 Agustus 2008 yang dicabut karena adanya gugatan No. 264/Pdt.G/2008/PN.MDO. Gugatan hal yang sama No. 123/PDT.G/2009/PN.MDO, Tanggal 19 Mei 2009 Banding atas perkara No. 123/PDT.G/2009/PN.MDO oleh penggugat ke PT Manado Tanggal 10 Maret 2010 No. 42/PDT/2010/PT MDO Penggugat mengajukan Permohonan Kasasi Tanggal 10 Agustus 2010. Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Perdamaian tanggal 14 Desember 2011.	
2.	PN Manado	Perdata	20/PDT.HIP/2008/PN.MDO didaftar 29 Agustus 2008	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan dr. Rudityo A.W (Termohon Eksekusi I), Ny. Nancy CY Kereh (Termohon Eksekusi II)	Surat permohonan: Tanggal 25 Agustus 2008. Dasar permohonan: Termohon Eksekusi (debitur) wanprestasi atas kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kreditnya kepada Perseroan (kreditur). Obyek pernohonan: Tanah & Bangunan yang dibebani Hak Tanggungan kepada Perseroan. Nilai perkara: Rp.1.272.260.854,06 Proses Acara: Penetapan No. 20/Pdt.Hip2008/PN.Mdo tanggal 8 Februari 2010 sita eksekusi. Berita Acara Sita Eksekusi No. 20/Pdt.Hip/PN.Mdo tanggal 16 Februari 2010.	Per 30 September 2012 Penangguhan dari PN. Manado
3.	PN Manado	Perdata	32/PDT.HIP/2008/PN.MDO didaftar 23 Desember 2008	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Ny. Samsia Maruf (Termohon Eksekusi I), Jusuf Rauf Koday (Termohon Eksekusi II)	Surat permohonan: Tanggal 18 Desember 2008. Dasar permohonan: Termohon Eksekusi (debitur) wanprestasi atas kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kreditnya kepada Perseroan (kreditur). Obyek pernohonan: Tanah & Bangunan yang dibebani Hak Tanggungan kepada Perseroan. Nilai perkara: Rp.795.972.944,53. Progres Penanganan Perkara hingga 31 Juli 2010 : Proses Lelang Eksekusi Progres Penanganan Perkara Setelah 31 Juli 2010 : Daftar Lelang Eksekusi	Per 31 Maret 2009: Penangguhan dari PN Manado Tanggal 27 September 2012 Debitur telah melunasi utangnya sesuai Surat Keterangan Lunas dari Perseroan No. 922/MAN/EXT/12 tanggal 27 Sept 2012. Jaminan debitur telah di lunasi pada Oktober 2012.
4.	PN Manado	Perdata	03/PDT.HIP/2008/PN.MDO didaftar 22 Januari 2009	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan CV Multi Sarana Elektronik (Termohon	Surat permohonan: Tanggal 21 Januari 2009 Dasar permohonan: Termohon Eksekusi (debitur) wanprestasi atas kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kreditnya kepada Perseroan (kreditur). Obyek pernohonan:	Per 30 Juni 2010 hingga 30 Sept 2012 ada penangguhan dari PN Manado.

				Eksekusi I), Hanny Elim (Termohon Eksekusi II)	Tanah & Bangunan yang dibebani Hak Tanggungan kepada Perseroan. Nilai perkara: Rp.1.150.982.514,69. Proses Acara: Penetapan PN Manado No. 03/Pdt.Hip/2009/PN.Mdn tanggal 27 April 2009 sita eksekusi. Sita Eksekusi tanggal 29 April 2009 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No. 03/Pdt.Hip/2009/PN.Mdn. Diusahakan penyerahan jaminan secara sukarela oleh Debitur. Lelang Eksekusi, Tanggal 2 Desember 2009 SHM No. 728 terjual dan yang lainnya belum ada pembeli.	
5.	PN Manado	Perdata	15/PDT.HIP/ 2008/PN. MDO didaftar 5 Juni 2008	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan PT. Mahkota Ratu Hotels (Termohon Eksekusi I), Elnika A. Mowilos, Richard H.J. Tampi Joy E. M Tampi (Termohon Eksekusi II)	Surat permohonan: Tanggal 28 Mei 2008. Dasar permohonan: Termohon Eksekusi (debitur) wanprestasi atas kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kreditnya kepada Perseroan (kreditur). Obyek pernohonan: Tanah & Bangunan yang dibebani Hak Tanggungan kepada Perseroan. Nilai perkara: Rp.14.298.518.764,21. Proses Acara: Sita eksekusi tanggal 21 Agt 2008. Ada penangguhan di PN Manado.	Per 30 September 2012: Untuk SHM No.60,90,15,82/Wenang utara dan SHGB No. 126/Wenang Utara telah terjual melalui lelang pada tanggal 27 Maret 2012. Untuk SHM 2196/Malaka Sari dalam proses sita eksekusi di PN Manado
6.	Tingkat Pertama: PN Manado	Perdata	15/PDT.HIP/2008/PN.MDO didaftar 14 Mei 2009	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Ny. Deasy Jolanda Roring (Termohon Eksekusi I), Denny Joy Rey (Termohon Eksekusi II)	Surat permohonan: Tanggal 14 Mei 2009. Dasar permohonan: Termohon Eksekusi (debitur) wanprestasi atas kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kreditnya kepada Perseroan (kreditur). Obyek pernohonan: Tanah & Bangunan yang dibebani Hak Tanggungan kepada Perseroan. Nilai perkara: Rp.788.255.434,02. Proses Acara: Sita eksekusi tanggal 16 Februari 2010. Ada penangguhan di PN Manado.	Per 30 September 2012 Debitur menyetor +/- 21 juta seriap bulan
7.	Tingkat Pertama: PN Manado	Perdata	16/PDT.HIP/2008/PN.MDO didaftar 14 Mei 2009	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Bertje Tulung (Termohon Eksekusi I), Ny. Carolina Sondakh (Termohon Eksekusi II)	Surat permohonan: Tanggal 14 Mei 2009. Dasar permohonan: Termohon Eksekusi (debitur) wanprestasi atas kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kreditnya kepada Perseroan (kreditur). Obyek pernohonan: Tanah & Bangunan yang dibebani Hak Tanggungan kepada Perseroan. Nilai perkara: Rp.1.436.995.617,2. Proses Acara: Somasi tanggal 28 Juli 2009. Ada penangguhan di PN Manado.	Per 30 September 2012 Debitur melakukan pelunasan sebagian sebesar Rp. 200 juta

8.	Tingkat Pertama: PN Manado	Perdata	57/PDT.G/ 2010/PN. MDO didaftar 8 Maret 2010	Grace Kelly Bazmul (Pemohon Eksekusi) Asna Bagulu (Tergugat I) Hatono Muarif (Tergugat II) Cindy Punu, SH MH (Turut Tergugat I)	Proses Acara : Putusan tanggal 9 Juni 2010 gugatan Penggugat diterima. Pembatalan AJB. Ada penangguhan dari PN Manado. Proses banding. Kasasi Penggugat ditolak. Salinan putusan belum diterima.	Putusan kasasi.

20. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Padang

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	Tingkat pertama: Pengadilan Negeri Padang Tingkat Banding: Pengadilan Tinggi Padang Tingkat Kasasi:	Perdata	Tingkat pertama: 24/PDT.G/2008/ PN.PDG (didaftar 27 Maret 2008) Tingkat Banding: 1785/Pdt/2008/ PT.PDG Tingkat Kasasi: 23/2009/PN. Pdg 14/2009.PN. Pdg	Tingkat pertama: Ny. Nurzulidar Opet (Penggugat) melawan Elfis Faisal (Tergugat T1) Rina Ifnida (Tergugat 2) Basudewo (Tergugat 3) Nelta Yap (Tergugat 4) Perseroan (Tergugat 5) BPN (Tergugat 6) Hendra Idris (Tergugat 7) Tingkat Banding: Elfis Faisal (Pembanding) Rina Ifnida (Pembanding) melawan Nurzulidar Opet (Terbanding 1) Basudewo (Terbanding 2) Nelta Yap (Terbanding3) Perseroan (Terbanding 4) Perseroan (Pembanding) melawan Nurzulidar Opet (Terbanding 1) Elfis Faisal (Terbanding 2) Rina Ifnida (Terbanding 3) Basudewo (Terbanding4) Nelta Yap (Terbanding5) BPN (Terbanding 6) Not. Hendra Idris SH (Terbanding 7).	Jenis gugatan: Perlawanan Sita Eksekutorial berdasarkan Penetapan PN Kls. 1A Padang No. 30/Eks/HT/2007/PN.PDG Tanggal 31 Jan 2008. Kasus Posisi: Perseroan sebagai Kreditur telah melakukan eksekusi terhadap jaminan CV. Niaga Jaya atas SHM No. 777 berdasarkan Penetapan PN Kls. 1A Padang No. 30/Eks/HT/2007/PN.PDG Tanggal 31 Jan 2008, sehubungan hal tersebut Pelawan mengajukan perlawanan. Nilai perkara: Rp. 1.200.000.000,-. (berdasarkan keterangan tertulis Kepala KC Padang tanggal 19 Mei 2009) Tingkat Pertama : Tanggal Putusan : 03 Nop 2008 Isi Keputusan: Bantahan Pembantah ditolak. Kesimpulan : Perseroan dipihak yang dimenangkan. Penggugat menyatakan banding. Tanggal 11 Maret 2009 Pembanding menyerahkan memori bandingnya. Tanggal 19 Maret 2009 Perseroan menyerahkan Kontra Memori Bandingnya. Tingkat Banding Putusan PT Padang: Putusan: Tanggal 8 Mei 2009. Amar: Menguatkan putusan PN Padang. Kesimpulan: Perseroan dipihak yang dimenangkan.	Elfis Faisal dan Rina Ifnida mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI tanggal 17 Juli 2012.

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
	MARI Jakarta			Tingkat Kasasi: Perseroan (Pemohon Kasasi) melawan Nurzulidar Opet cs (Termohon Kasasi)	Tingkat Kasasi: 26 Juni 2009, Pemohon Kasasi menyerahkan Memori Kasasinya kepada PN Padang. 13 Juli 2009, Perseroan menerima pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi Pemohon Kasasi. 24 Juli 2009, Perseroan menyerahkan Kontra Memori Kasasi Ke PN Pdg. Putusan Kasasi: 16 Desember 2010 Isi Putusan: -Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: 1. Elfis Faisal, 2. Rina Ifnida, Pemohon Kasasi II: Ny. Nurzulidar Opet dan Pemohon Kasasi III: Perseroan. -Menghukum para pemohon kasasi / Tergugat 1,2/Penggugat/Tergugat 5 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,-.	
2.	Tingkat pertama: Pengadilan Negeri Padang Tingkat banding: Pengadilan Tinggi Padang Tingkat kasasi: Mahkamah Agung Republik Indonesia	Perdata	Tingkat Pertama : 38/PDT.BTH/ 2008/PN.PDG (didaftar 7 Mei 2008) Tingkat Banding : 44/2008.PN. PDG 11/PDT/2009/ PT.PDG Tingkat Kasasi:	Tingkat Pertama : Ny. Nurzurlidar Opet (Pelawan) melawan Perseroan (Terlawan 1), CV. Niaga Jaya (Terlawan 2), Elfis Faisal (Terlawan3], Rina Ifnida (Terlawan 4) Tingkat Banding : Ny. Nurzurlidar Opet (Pembanding) melawan Perseroan (Terbanding 1), CV Niaga Jaya (Terbanding 2), Elfis Faisal (Terbanding 3], Rina Ifnida (Terbanding 4) Tingkat Kasasi : Ny. Nurzurlidar Opet (Pemohon Kasasi)	Pokok Permasalahan: Perseroan sebagai Kreditur telah melakukan eksekusi terhadap jaminan CV. Niaga Jaya atas SHM No. 777 berdasarkan Penetapan PN Kls. 1A Padang No. 30/Eks/HT/2007/PN.PDG Tanggal 31 Jan 2008, sehubungan hal tersebut Pelawan mengajukan Perlawanan Sita Eksekutorial berdasarkan Penetapan PN Kls. 1A Padang No. 30/Eks/HT/2007/PN.PDG Tanggal 31 Jan 2008. Nilai perkara: Rp. 1.200.000.000,-. (berdasarkan keterangan tertulis Kepala KC Padang tanggal 19 Mei 2009) Proses Acara : Putusan tingkat pertama: Tanggal Putusan : 03 Nop 2008. Isi Keputusan: Bantahan Pembantah ditolak. Kesimpulan : Perseroan dipihak yang dimenangkan. Penggugat menyatakan banding. Putusan tingkat banding: Putusan PT Padang tanggal 8 Mei 2009. Amar: Menguatkan putusan PN Padang. Kesimpulan: Perseroan dipihak yang dimenangkan. Penggugat ajukan kasasi. Putusan tingkat kasasi: Putusan Kasasi MARI tanggal 9 Juni 2010. Amar : Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Ny.	Perkara hingga tingkat kasasi dimenangkan oleh Perseroan.

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
				melawan Perseroan (Termohon Kasasi 1), CV. Niaga Jaya (Termohon Kasasi 2), Elfis Faisal (Termohon Kasasi 3], Rina Ifnida (Termohon Kasasi 4)	Nurzulidar Opet). Kesimpulan : Bank Panin Menang	
3.	Tingkat pertama: PN Padang

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
				(Terbanding 5)	Kontra Memori Kasasi ke PN. PDG 06 Agustus 2010 : Perseroan menerima Tambahan dan Perbaikan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi. 16 Agustus 2010 : Perseroan menyerahkan Tambahan Memori Kasasi. Putusan Kasasi No. 3199 K/Pdt/2010 tanggal 29 September 2011: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Nurzulidar Opet; Menghukum Pemohon Kasasi/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,-. Kesimpulan: Perseroan merupakan pihak yang dimenangkan.	
4.	PN Padang	Perdata	119/PDT.G/2008/PN.PDG (didaftar Tanggal 16 Desember 2008)	Ny. Nurzurlidar Opet (Penggugat) melawan Anchieko (Tergugat 1) Perseroan (Tergugat 2), Elfis Faisal (Tergugat 3a), Rina Ifnida (Tergugat 3b), Basudewo (Tergugat 3c), Nelta Yap (Tergugat 3d), Not. Hendra Idris (Tergugat 4), KP2LN Padang (Tergugat 5) BPN (Tergugat 6)	<u>Pokok Permasalahan</u>: Penggugat menggugat pelaksanaan lelang terhadap jaminan CV. Niaga Jaya (Debitur) SHM no. 77. <u>Nilai perkara</u>: Rp. 1.200.000.000,-. (berdasarkan keterangan tertulis Kepala KC Padang tanggal 19 Mei 2009) <u>Proses Acara</u>: Tingkat Pertama : Putusan PN Padang : Putusan diucapkan tgl. 28 Oktober 2009. Amar : Mengabulkan gugatan Pengguggat untuk sebahagian, dimana : - SHM No. 777 adalah sah milik Penggugat - Proses Lelang dan penetapan pemenang lelang tidak mempunyai kekuatan hukum - Memerintahkan Tergugat VI untuk memproses balik nama SHM No. 777 ke atas nama Penggugat - dll Kesimpulan : Perseroan dipihak yang dikalahkan. Upaya hukum : Perseroan mengajukan Banding terhadap putusan tersebut.	Putusan Kasasi.
	<u>Tingkat Banding:</u> Pengadilan Tinggi Padang		<u>Tingkat Banding:</u> - Akta Banding No. 67/2009.PN. PDG per Tanggal 5 -11-2009 - Perkara Banding No. 31/PDT/2010. PT.PDG	<u>Tingkat Banding:</u> Anchieko (Pembanding 1) Perseroan (Pembanding 2), Melawan Ny. Nurzurlidar Opet (Terbanding) Elfis Faisal (Turut Terbanding I), Rina Ifnida (Turut Terbanding II),	<u>Tingkat Banding:</u> Putusan : 22 April 2010 Amar: Membatalkan putusan PN.PDG dan mengadili sendiri: - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. - Menyatakan gugatan Intervensi tidak dapat diterima. Kesimpulan : Perseroan dipihak yang dimenangkan.	

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
				Basudewo (Turut Terbanding IIII), Nelta Yap (Turut Terbanding IV), Not. Hendra Idris (Turut Terbanding V), KP2LN Padang (Turut Terbanding VI) BPN (Turut Terbanding VII)		
	Tingkat Kasasi: MARI Jakarta		Tingkat Kasasi: - Akta Kasasi No. 38/2010 .PN. PDG per Tanggal 9 Juli 2010	Tingkat Kasasi: Ny. Nurzurlidar Opet (Pemohon Kasasi) Melawan Anchieko (Termohon Kasasi I) Perseroan (Termohon Kasasi II), Elfis Faisal (Termohon Kasasi IIIa), Rina Ifnida (Termohon Kasasi IIIb), Basudewo (Termohon Kasasi IIIc), Nelta Yap (Termohon Kasasi IIId), Not. Hendra Idris (Termohon Kasasi IV), KP2LN Padang (Termohon Kasasi V) BPN (Termohon Kasasi VI) Asdra Setiawan Turut Termohon Kasasi	Tingkat Kasasi: 23 Juli 2010 : Perseroan menerima pemberitahuan dan menyerahkan memori Kasasi dari PN PDG dari Pemohon Kasasi 3 Agustus 2010 : Perseroan menyerahkan Kontra Memori Kasasi ke PN PDG 06 Agustus 2010: Perseroan menerima Tambahan dan Perbaikan memori Kasasi dari Pemohon kasasi. 16 Agustus 2010 : Perseroan menyerahkan Tambahan Kontra Memori Kasasi. Putusan Mahkamah Agung No. 3200 K/Pdt/2010 tanggal 30 Juni 2011: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Nurzulidar Opet) tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat-Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,-. Kesimpulan: Perseroan merupakan pihak yang dimenangkan.	
5.	Pengadilan Negeri Padang	Perdata	119/PDT.G/INV/ 2008/PN.PDG (didaftar Tanggal 25 Maret 2009)	Asdra Setiawan (Penggugat Intervensi) melawan Ny. Nurzurlidar Opet (Tergugat Intervensi 1) Anchieko (Tergugat Intervensi 2) Perseroan (Tergugat Intervensi 3), Elfis Faisal (Tergugat Intervensi 4a), Rina Ifnida [Tergugat Intervensi 4b), Basudewo (Tergugat Intervensi 4c), Nelta Yap (Tergugat Intervensi 4d), Not. Hendra Idris (Tergugat Intervensi 5),	Jenis gugatan: Gugatan intervensi. Kasus Posisi: Penggugat Intervensi menginvertensi perkara dengan menyatakan memiliki hak sewa/mengontrak/memakai dan menguasai selama 5 tahun atas bangunan diatas SHM No. 777 karena Tergugat Intervensi 1 wanprestasi pada Penggugat Intervensi berdasarkan perjanjian penitipan uang antara Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi 1. Nilai perkara: Rp. 1.200.000.000,-. (berdasarkan keterangan tertulis Kepala KC Padang tanggal 19 Mei 2009)	

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
				KP2LN Padang (Tergugat Intervensi 6) BPN (Tergugat Intervensi 7)	Putusan PN Padang: Putusan diucapkan Tanggal 28 Oktober 2009 Amar: Menyatakan gugatan Intervensi tidak dapat diterima (NO), dimana: Perseroan dipihak yang dimenangkan. Penggugat Intervensi tidak melakukan Banding.	
6	Pengadilan Negeri Padang	Perdata	06/Eks.HT/2012/PN.PDG Tgl. 12 april 2012	Perseroan (Pemohon Eksekusi) Melawan Ermiwati (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan permohonan eksekusi jaminan SHM No. 1003/Ulak karang Selatan a.n. 1) Ermiwati, 2) Ayuni Tamimahwati, 3) Vajar Tamiano, 4) Muhammad Tomi Tamiano. Nilai perkara: Rp. 468.294.099,72. Proses Acara: Pihak Termohon Eksekusi (Ermiwati) telah dipanggi berdasarkan Relass Panggilan Anmaning/Teguran pada tgl. 26 April 2012 oleh pihak PN. Padang.	Dalam Tahap Negosiasi dan Mediasi.
7	Pengadilan Negeri Padang	Perdata	109/Pdt.G/2012/ PN.PDG (didaftar tgl 28 Agustus 2012)	Syachdan Oyong cs (Penggugat) Melawan Nurzulidar Opet (Tergugat I), Elfis Faisal (Tergugat II), Rina Ifnida (Tergugat III), Anchieko (Tergugat IV), Perseroan Pusat Jakarta cq KCU Padang (Tergugat V), Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Wil. III Pekanbaru cq Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Padang (Tergugat VI), Basudewo (Tergugat VII), Nelta Yap (Tergugat VIII).	Pokok Permasalahan: Penggugat menggugat SHM No. 777 tercantum atas nama Tergugat I (Nurzulidar Opet) adalah Hak Milik Siti Nurjadi (Alm) adlah ibu kandung para penggugat yang langsung ahli warisnya para Penggugat. Para Penggugat menggugat SHM No. 777, jaminan CV Niaga Jaya (Debitur). Masih tahap mediasi.	Proses mediasi di PN Padang.

21. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Yogyakarta

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1	Pengadilan Negeri Bantul	Perdata	Tingkat Pertama: No. 08/Pdt.eks.HT/ 2012/PN Btl	Tingkat Pertama: PT Bank Panin Cab. Yogyakarta (pemohon Eksekusi) melawan 1. Tn Teguh Setiawan (debitur) 2. Ny. Irma fara Murwani (mantan Isteri debitur) sebagai Termohon eksekusi	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan benda jaminan. Benda jaminan meliputi: Jaminan kredit terdiri atas : 1. SHM No. 12094/banguntapan, LT 603 M2 atas nama TEGUH SETIAWAN 2. SHM No. 1526/Tinjomoyo LT 182 M2 atas nama Hj Salma Irzal. Nilai perkara: Rp. 1.604.341.522,- Proses Acara: Sudah aanmaning.	Proses Sita Eksekusi.

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
2	Pengadilan Negeri Bantul	Perdata	Tingkat Pertama: No. 23/Pdt.E/ Plwn/ 2012/ PN BTL	Tingkat Pertama: Ny. Irma fara Murwani, Hj. Salma Irsal (Pelawan) melawan Perserpan (Terlawan 1), Tn Teguh Setiawan (debitur, eks suami, Turut Terlawan).	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan benda jaminan. Benda jaminan meliputi: Jaminan kredit terdiri atas : 1. SHM No. 12094/banguntapan, LT 603 M2 atas nama TEGUH SETIAWAN 2. SHM No. 1526/Tinjomoyo LT 182 M2 atas nama Hj Salma Irzal. Nilai perkara: Rp. 1.604.341.522,- Proses Acara: Sudah aanmaning.	Proses Mediasi.
3	Pengadilan Negeri Sleman	Perdata	Tingkat Pertama: No. 04/Pdt.E/ 2012/PN.Slmn	Tingkat Pertama: PT Bank Panin Cab. Yogyakarta (pemohon Eksekusi) melawan 1. Tn Sijratul Muntaha, SE, M.kes dan 2. Ny. Nurita (isteri Debitur) sebagai termohon eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan benda jaminan. Benda jaminan meliputi:: SHM No. 8510/Wedomartani LT 101 M2 atas nama Sijratul Muntaha Se. Mkes. Nilai perkara: Rp. 201.000.000,-. Proses Acara: Proses Aanmaning ke-2.	Proses Aanmaning ke-2.
4	Pengadilan Negeri Surakarta	Perdata	Tingkat Pertama: Belum ada nomor karena masih dalam proses penelitian oleh panitera.	Tingkat Pertama: PT Bank Panin Cabang Yogyakarta (pemohon eksekusi) melawan 1. Tn. Whillson Santoso (debitur) dan 2. Loe Djing Hwa sebagai termohon Ekesekusi	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan benda jaminan. Benda jaminan meliputi: SHM No785/kemlayan atas nama Whillson Santoso Nilai perkara: Rp. 1.009.097.822,-. Proses Acara: -	Berkas sudah masiuk pengadilan tapi masih dalam penelitian panitera karena adanya mutasi di pengadilan.
5.	Tingkat Pertama: Pengadilan Negeri Sleman	Perdata	Tingkat Pertama: 24/Pdt.E/2010/ PN.Slmn Didaftarkan pada Tanggal 12 Mei 2010	Perseroan (Permohonan Eksekusi) Melawan Ny. Vira Jiansa Respaty, S.H, M. Hum Tn. Chandra Purnomo Welyanto, S.E (Termohon Eksekusi)	Progres Penanganan Perkara hingga 31 Juli 2010 : - Permohonan eksekusi didaftar di PN Sleman tanggal 12 Mei 2010 No. 24/Pdt.E/2010/PN.Slmn. - Surat Penetapan Tegoran nomor: 24/Pdt.E/2010/PN.Slmn tanggal 24 Juni 2010 - Termohon ditegor Ketua Pengadilan Negeri Sleman pada 7 Juli 2010 untuk Tegoran I (pertama) Termohon tidak hadir. - Termohon dipanggil lagi pd Tanggal 20 Juli 2010 untuk Tegoran II disarankan untuk bernegosiasi. - Para Pihak supaya menghadap lagi pada Tanggal 30 Agustus 2010 untuk memberikan hasil negosiasi. - Pada Tanggal 3 Agustus 2010 pada pihak baik Pemohon dan Termohon datang di PN Sleman, Ketua PN. Sleman menanyakan hasil negosiasi dan belum terjadi kesepakatan dalam negosiasi.	Per 30 April 2010 : Permohonan Eksekusi di PN Sleman belum didaftar dan permohonan dibuat pada tanggal 12 Mei 2010 Per 30 Juni 2010 : Pengadilan Negeri Sleman menetapkan Tegoran keapda Termohon Eksekusi pada tanggal 7 Juli 2010 Per 31 Juli 2010 : Para Pihak disarankan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk bernegosiasi dan hasilnya untuk dilaporkan. Sampai saat ini belum terjadi kesepakatan dalam bernegosiasi, Pihak pemohon menindaklanjuti proses eksekusi untuk dilaksanakan sita eksekusi barang jaminan.

22. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Jambi

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	PN Jambi	Perdata	No. 335/Pdt.G/ 2010/PN.Jkt.Tim	CV Jernih (Penggugat) Melawan PT Jico Agung, PT Global Sumber Rejeki, PD Bintang Mas, Perseroan (Tergugat)	Pokok Permasalahan: CV Jernih minta Bank Panin KCU Jambi blokir dan tidak cairkan Klaim Bank Garansi PT Jico Agung sampai permasalahan antara CV Jernih dan PT Jico Agung diselesaikan. Sesuai ketentuan Perjanjian Bank Garansi, Perseroan cairkan klaim BG setelah PT Jico Agung lampirkan syarat-syarat yang tak terbantahkan untuk proses pencairan BG. Nilai perkara: Rp 76/850.000.- Proses Acara: Pada putusan tingkat pertama pengadilan tolak gugatan Penggugat dan saat ini menunggu Penetapan Putusan tersebut.	Menunggu penetapan putusan pengadilan. Setelah 30 Juni 2012, permasalahan antara Perseroan dengan CV Jernih sudah selesai dengan Perjanjian Perdamaian.

23. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Palu

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	PN Palu	Perdata	Tingkat Pertama: No. 46/Pdt.G/ 2009/PN.Palu tanggal 12 Oktober 2009 Tingkat Banding: PT Palu No. 70/PDT/2010/PT.Palu	Tingkat Pertama: Syukri Mahmud , dan Ratnawati (Penggugat) Melawan Perseroan (Tergugat) Tingkat Banding: Syukri Mahmud , dan Ratnawati (Pembanding) Melawan Perseroan (Terbanding)	Pokok Permasalahan: Penggugat menggugat pelaksanaan lelang berdasarkan Penetapan Lelang Eksekusi No. 01/Pen/Aanmaning /L.Eks/2009/PN.Palu Tanggal 24 Juli 2009 dengan mengajukan gugatan perlawanan tanggal 27 Juli 2009. Obyek sengketa: Eks jaminan HT adalah sebidang tanah dan bangunan jaminan Termohon Eksekusi yang terletak di Jl. Puebongo SHM No. 125/Bayoage, Surat Ukur/Gambar Situasi No.4654/1989/Tanggal 30 November 1988 seluas 970 M2 atas nama Termohon Eksekusi. Nilai perkara: Rp 1.103.200.000.- Proses Acara: Putusan PN Palu No. 46/Pdt.G/2009 Tanggal 01 Desember 2009. Pada putusan tingkat banding di PT Palu No. 70/PDT/2010/PT.Palu tanggal 21 Februari 2011 Penggugat dikalahkan. Terhadap putusan banding diajukan kasasi. Dalam proses kasasi.	Proses kasasi.

24. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Serang

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	PN Serang	Perdata	No. 01/PDT/SMS/ 2011/PN.SRG	Agus Madrai	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan somasi. Nilai perkara: Rp 19.000.000,-. Benda Jaminan: 1 unit bangunan rumah di Taktakan Serang. Proses Acara: -	Debitur sedang upaya jual jaminan supaya bisa bayar tunggakannya ke Perseroan.
2.	PN Serang	Perdata	No. 10/PDT.Eks/ 2011/PN. SRG	Enah Maemunah	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan permohonan eksekusi HT benda jaminan. Nilai perkara: Rp 400.000.000,-. Benda Jaminan: 2 unit bangunan rumah di Serang dan Labuhan. Proses Acara: -	Debitur sedang upaya jual jaminan supaya bisa bayar tunggakannya ke Perseroan.

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
3.	PN Serang	Perdata	No. 16/PDT.Eks. Aan/ 2011/ PN. SRG	Suslina Sari	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan permohonan eksekusi HT benda jaminan. Nilai perkara: Rp 320.000.000,-. Benda Jaminan: 1 unit bangunan rumah di Cilegon. Proses Acara: -	Debitur sedang upaya jual jaminan supaya bisa bayar tunggakannya ke Perseroan. Proses penjualan.
4.	PN Pandeglang	Perdata	No. 03/PDT.Eks/ 2011/PN.PDG	Aceng Sumantri	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan permohonan eksekusi HT benda jaminan. Nilai perkara: Rp 186.500.000,-. Benda Jaminan: 1 unit bangunan rumah di Pandeglang. Proses Acara: Aanmaning	Debitur sedang upaya jual jaminan supaya bisa bayar tunggakannya ke Perseroan. Proses penjualan.

25. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Kendari

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	PN Kendari	Perdata	65/Pdt.Plw/2011/ PN.Kdi.	Bank Panin (Pemohon eksekusi) Melawan M. Rizal (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan pernohonan ekekusi HT benda jaminan. Nilai perkara: Rp 646.000.000,-. Benda Jaminan: Tanah dan bangunan . Proses Acara: -	Tunggu jadwal lelang kedua oleh KPKNL.
2.	PN Kendari	Perdata		Bank Panin (Pemohon eksekusi) Melawan Suhadi (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan pernohonan ekekusi HT benda jaminan. Nilai perkara: Rp 539.000.000,- Benda Jaminan: Tanah dan bangunan . Proses Acara: -	Proses lelang jaminan.
3.	PN Kendari	Perdata		Bank Panin (Pemohon eksekusi) Melawan PT Hikari Jeindo(Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan pernohonan ekekusi HT benda jaminan. Nilai perkara: Rp 1.050.000.000,-. Benda Jaminan: Tanah dan bangunan . Proses Acara: -	Proses lelang jaminan.

26. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Menara Imperium

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Perdata	06/Eks.HT/2009/PN.Jkt.Sel.	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Dr. Frederich Yunadi, SH, LLM (Termohon Eksekusi 1), Ny. Sis Miarsih	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan pernohonan ekekusi HT benda jaminan. Nilai perkara: Rp3.500.000.000,-. Benda Jaminan: 3 bidang tanah Sertipikat Hak Milik atas nama Termohon Eksekusi 1 yang dipasang Hak Tanggungan kepada Perseroan. Proses Acara: - -Penetapan aanmaning: 23 Pebruari 2009. -Penetapan sita eksekusi: 21 April 2009. -Lelang. Progres Penanganan Perkara hingga 31 Juli 2010 :	Akan diajukan permhonan lelang ulang

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
				Hanggara (Termohon Eksekusi 2)	Proses Lelang sudah dilaksanakan, belum laku terjual Progres Penanganan Perkara Setelah 31 Juli 2010 : Akan diajukan permhonan lelang ulang	
2	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Perdata	No. 21/Eks/SHT/ 2010/PN.Jkt.Ut	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan M. Rifai B (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan pernohonan ekekusi HT benda jaminan. Nilai perkara: Rp 584.000.000,-. Benda Jaminan: tanah dan bangunan. Proses Acara: -	Tunggu tanggal lelang dari KPKNL
3	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Perdata	No. 09/2010.Eks. jo. No. 618/2006	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Ivan Lucas (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan pernohonan ekekusi HT benda jaminan. Nilai perkara: Rp 701.000.000,-. Benda Jaminan: tanah dan bangunan. Proses Acara: -	Dilelang oleh PN Jakarta Barat
4	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Perdata	No. 36/Eks/SHT/2009/PN.Jkt.Ut	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Ferry SG (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan pernohonan ekekusi HT benda jaminan. Nilai perkara: Rp 750.000.000,-. Benda Jaminan: tanah dan bangunan. Proses Acara: -	Jaminan akan dilelang
5	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	Perdata	No. 29/2009.Eks/PN.Jkt.Tim	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Oemar (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan pernohonan ekekusi HT benda jaminan. Nilai perkara: Rp 900.000.000,-. Benda Jaminan: tanah dan bangunan. Proses Acara: -	Dalam prpses sita karena sertifikat yang dijaminkan ada kendala mengenai alamat. Menunggu Berita Acara pengukuran dari BPN Jakarta Timur.
6	Pengadilan Negeri Depok	Perdata	No. 13/Pen.Pdt. Aanm.Eks.HT/ 2011/PN.Dpk	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Nana K (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan pernohonan ekekusi HT benda jaminan. Nilai perkara: Rp 1.307.947.259,65,-. Benda Jaminan: tanah dan bangunan. Proses Acara: -	Jaminan sudah dilelang tapi belum laku akan dilelang ulang.
7	Pengadilan Negeri Denpasar	Perdata	No. 10/Pdt.AHT/ 2011/PN.Dps	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan PT Karunia (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan pernohonan ekekusi HT benda jaminan. Nilai perkara: Rp 5.843.304.191,12. Benda Jaminan: tanah dan bangunan. Proses Acara: -	Jaminan sudah dilelang tanggal 11 Juni 2012 dan sudah laku dijual.
8	Pengadilan Negeri Bandung	Perdata	No. 12/Pdt.Eks/ 2012/HT/PN.Bdg	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Paulus SB (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan pernohonan ekekusi HT benda jaminan. Nilai perkara: Rp 5.268.116.174,38. Benda Jaminan: tanah dan bangunan. Proses Acara: Aanmaning.	Akan disita.

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
9	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Perdata	No. 1212/Pdt.G/ 2009/PN.Jkt.Sel	Dr. Frederick Yunardi SH LLM (Penggugat) melawan Perseroan (Tergugat)	Pokok Permasalahan: Penggugat keberatan karena jaminannya akan dieksekusi.. Nilai perkara: Rp 4.477.250.949,-.. Benda Jaminan: tanah dan bangunan. Proses Acara: Pada putusan tingkat pertama Penggugat dikalahkan,	Penggugat ajukan banding.

27. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Tasikmalaya

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	Perdata	023/Pdt.G/2010/ PN.Tsm	Agus Salim dkk (Penggugat) melawan Andre Sebastian KLuw (Tergugat)	Pokok Permasalahan: Pembatalan hibah atas jaminan di PIB debitur, Andrie Sebastian Lauw. Berupa tanah dan bangunan. Nilai Perkara: Rp 885.960.803,-. Prpses Acara: Putusan PT Jawa Barat tanggal 8 Maret 2012 Nomor 35/Pdt/2012/ PT.BDG, menguatkan putusan PN Tasikmalaya tanggal 8 Agustus 2011 Nomor 23/Pdt.G/2010/PN.TSM	Proses Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta

28. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Surabaya Cendana

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	Tingkat pertama: PN Surabaya	Perdata	Tingkat Pertama: PN Surabaya 74/Pdt.G/2008/ PN.SBY (didaftar tanggal 19 Des 2008) Tingkat banding: PT Surabaya No. 169/PDT/2010/ PT.Sby. Tingkat Kasasi: Mahkamah Agung No. 1338K/PDT/2011.	Irsad Tjahjono (Penggugat, Pembanding, Pemohon Kasasi) melawan Perseroan Cabang Surabaya Cendana (Tergugat 1), PT Balai Lelang Tunjungan (Tergugat 2).	Pokok Permasalahan,: Penggugat (debitur) memperoleh memperoleh fasilitas Kredit Mikro Panin dari Perseroan (kreditur) sebesar Rp.125.000.000, dan sebagaimana berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal 11 Januari 2007 No. 40 yang dibuat dihadapan Devi Chrisnawati, S.H., Notaris di Surabaya jo Perjanjian Perubahan tertanggal 18 Desember 2007 No. 48 yang dibuat dihadapan Rini Widowati, SH., Notaris di Sidoarjo (Jatuh Tempo Kredit Tanggal 18 Januari 2012) dengan memberikan agunan berupa tanah dan bangunan di Jl. Lilium Barat 8/1 Desa Kraton, Kec. Krian, Sidoarjo (SHGB 21/Kraton a/n Irsad Tjahjono yang telah dibebani Hak Tanggungan untuk Perseroan. Penggugat merupakan Debitur dalam kategori macet, sehingga Perseroan melalui Tergugat 2 berhak untuk melakukan penjualan di muka umum (lelang eksekusi), yang dalam pelaksanaan sebelumnya telah diterbitkan surat teguran/somasi serta kemudian pemberitahuan tertulis yang menerangkan telah diadakan pengumuman lelang baik melalui pengumuman tempel/selebaran tempel maupun surat kabar harian dimana menurut Debitur (Penggugat) perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Penggugat ajukan permohonan agar Pengadilan meletakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Para Tergugat, yaitu yang terletak pada Jl. Kombes. M. Duryat 25 Surabaya (Tergugat I) dan Jl. Basuki Rachmat 149 Surabaya (Tergugat II). Nilai perkara: Ganti rugi sebesar Rp 500.000.000,00 secara tanggung renteng. Proses Acara: Pada putusan tingkat pertama gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Penggugat ajukan banding. Pada putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Surabaya putusan pengadilan tingkat pertama	Proses kasasi.

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
					dikuatkan. Penggugat mengajukan kasasi. Berkas perkara telah diterima MA dan Perseroan Cab. Surabaya telah menerima pemberitahuan aquo tanggal 29 September 2011.	
2.	Tingkat pertama: PN Surabaya	Perdata	Tingkat pertama: PN Surabaya 717/Pdt.G/2010/ PN.SBY (didaftar tanggal 19 Des 2008) Tingkat banding: PT Surabaya No. 575/Pdt/2011/ PT.Sby Tingkat kasasi: MA	Eddy Prajitno Hiana (Penggugat, Pembanding, Pemohon Kasasi) melawan Perseroan Cabang Surabaya Cendana (Tergugat I), PT Balai Lelang Tunjungan (Tergugat II).	Pokok Permasalahan: Penggugat menerima fasilitas krdit dari Perseroan kantor Cabang Utama Surabaya Cendana dengan fasilitas berupa: - Pinjaman rekening koran dengan plafond kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 - Pinjaman jangka panjang dengan plafond kredit sebesar Rp300.000.000,00 - Pinjaman berulang dengan plafond kredit sebesar Rp1.700.000.000,- Namun ternyata Eddy Prajitno Niana tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran. Oleh karenanya dalamrangka penyelesaian kredit dimaksud, Perseroan kantor Cabang utama Surabaya Cendana melaksanakan pelelangan atas obyek jaminan a quo. Penggugat kebeeratan atas pelaksanaan pelelangan dan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Surabaya dan didaftarkan dalam register perkara No. 717/Pdt.G/2009/PN.Sby untuk menunda pelaksanaan pelelangan dan mengajukan restrukturisasi dalam rangka penyelesaian kreditnya. Prpses Acara: Pada putusan tingkat pertama gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Penggugat ajukan banding. Pada putusan tingkat banding putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan. Penggugat ajukan kasasi.	Menurut daftar dari KCU Perseroan di Surabaya, perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan kasasi di MA.
3.	Tingkat pertama: PN Surabaya	Perdata	Tingkat Pertama: PN Surabaya 358/Pdt.G/2010/ PN.SBY Tingkat Banding: PT Surabaya No.	Kimadyo Dwi Utomo (Penggugat, Pembanding) melawan Perseroan Cabang Surabaya Cendana (Tergugat I), Rahmat Santoso, SH (Tergugat II).	Pokok Permasalahan: Penggugat, menerima fasilitas Kredit Mikro Pani, dengan plafond sebesar Rp300.000.000,- Sejak angsuran pertama Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran. Oleh karenanya Perseroan kantor Cabang utama Surabaya Cendana melakukan kerjasama dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah dimaksud dengan advokat Rahmat Santoso, SH Dalam pelaksanaan pekerjaannya, ternyata Rahmat Santoso, SH selaku kuasa hukum Perseroan, Kantor Cabang Utama Surabaya Cendana pernah menerima uang sebesar Rp90.000.000,- dari Kimadyo Dwi Utomo untuk dibayarkan kepda Perseroan, Kantor Cabang Utama Surabaya Cendana. Namun ternyata uang a quo tidak disetorkan kepada Bank Panin. Penerimaan uang a quo, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetjuan dari Perseroan Kantor Cabang Utama Surabaya Cendana. Selanjutnya dalam rangka penyelesian kredit bermasalah tersebut, Perseroan Kantor Cabang Utama Surabaya Cendana melakukan pelelangan atas obyek jaminan. Kimadyo Dwi Utomo keberatas atas pelaksanaan lelang a quo dan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Surabaya dan didaftarkan dalam register perkara No. 358/Pdt.G/2010/PN. Sby, dengan alasan telah melakukan pembayaran melalui Rahmat Santoso, SH selaku kuasa hukum Perseroan Kantor Cabang Surabaya Cendana dan mengajukan restrukturisasi dalam rangka penyelesaian kreditnya. Nilai perkara: Tuntutan ganti rugi Penggugat sebagai berikut: - Kerugian materiil yang dialami oleh Kimadyo Dwi Utomo dan Perseroan Kantor Cabang Utama Surabaya Cendana Sebesar Rp 119.700.000,- - Kerugian immateriil yang dialami oleh Kimadyo Dwi Utomo sebesar Rp100.000.000,- Prpses Acara:	Proses banding.

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
					Pada putusan tingkat pertama gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan yang berkaitan dengan Perseroan. Tergugat II (Rahnat Santoso SH) ajukan banding.	
4.	Tingkat pertama: Bojonegoro	Perdata	Tingkat Pertama: PN Bojonegoro 23/Pdt.G/2010/ PN.Bjn Tingkat Banding: Masih dalam pemeriksaan.	Moch. Zaeroni (Penggugat) melawan Perseroan Cabang Surabaya Cendana (Tergugat I), KPKNL Surabaya (Tergugat II). Rudi Sudarto, SH (Tergugat III)	Pokok Permasalahan: Pen ggugat adalah Debitur Mikro Panin, menerima fasilitas kredit Mikro Pani, menerima fasilitas kredit Mikro Panin dengan Plafond kredit sebesar Rp 50.000.000,-. Dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran angsuran, ternyata Penggugat lalai memenuhi kewajibannya, oleh karenannya BankPanin Kantor Cabang Utama Surabaya Cendana dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah a quo melaksanakan pelelangan atas obyek jaminan melalui KPKNL Surabaya, yang sebelumnya telah dilaksanakan peringatan terhdap PenggugatmelaluiSurat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III dan pemberitahuan Pelaksanaan Pelelangan atas obyek jaminan. Dalam pelaksanaan pelelangan, obyek jaminan terjual melalui pelelangan dan sebagai pemenang lelang adalah Rudi Sudarto, SH. Atas terjual lelang terhadap obyek jaminan, Penggugat keberatan dan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Bojonegoro dan didaftarkan dalam register perkara No. 23/Pdt.G/2010/PN.Bjn, dengan alasan pelaksanaan pelelangan yang telah dijalankan tidak prosedural dan bertentangan denga ketentuan hukum yang berlaku dan meminta pembatalan seluruh dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan pelaksanaan pelelangan a quo Nilai perkara: Rp 50,000.000,-. Prpses Acara: Pada putusan tingkat pertama gugatan Penggugat ditolak. Penggugat ajukan banding. Pemeriksaan berkas ditingkat banding di PT Surabaya.	Pemeriksaan ditingkat banding.
5.	Tingkat pertama: Depok	Perdata	Tingkat Pertama: PN Depok No. 181/Pdt.G/2010/ PN.DPK Tingkat Banding: PT Surabaya No.	Dra. Irawati Hasan (Penggugat) melawan Tan Kevin Chen (Tergugat I), . BPN Kota Depok (Tergugat II).	Pokok Permasalahan: Penggugat dalam gugatannya mengaku sebagai pemilik atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pangkalan Jati I No. 70, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Sawangan, Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 1186/Pangkalan Jati seluas 3.153 m^2, untuk selanjutnya disebut obyek sengketa. Penggugat merasa tidak pernah melakukan dan menandatangani Akta Jual Beli dengan Tergugat I dan tidak pernah menjaminkan obyek sengketa tersebut pada PT. Bank Panin, Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya – Cendana. Bahwa Penggugat mendalilkan adanya pemalsuan tanda tangan dalam Akta Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dalam peralihan hak dan penjaminan atas obyek sengketa. Nilai perkara: Rp 50,000.000,-. Prpses Acara: Pada putusan tingkat pertama gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Penggugat ajukan banding.	Proses banding.
6.	Tingkat pertama: Gresik	Perdata	Tingkat Pertama: Pengadilan Agama Gresik No. 410/Pdt.G/ 2012/PA.Gresik	Tulik (Penggugat) melawan Potro	Pokok Permasalahan: POTRO (Tergugat 1)merupakan DEBITUR bermasalah (macet), jaminannya akan dilelang oleh BANK PANIN, POTRO mempunyai istri bernama TARNING (almarhumah), Penggugat menggugat hak atas harta bersama POTRO bersama ibunya,	Proses banding.

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
			Tingkat Banding: PT Surabaya No.	(Tergugat 1), Suhermanto (Tergugat 2), Nusa Naini (Tergugat 3), Yuliani (Tergugat 4), Perseroan cq KCU Surabaya Cendana (Tergugat 5)	TARNING, antara lain adalah seluruh jaminan yang dijaminkan di BANK PANIN. Penggugat berulang kali meminta Tergugat 5 agar bersedia utk menjelaskan ttg adanya fasilitas kredit tsb, ttp sll diabaikan oleh Tergugat 5. Oleh krn dijadikan jaminan oleh Tergugat 1, 2, 3, 4 dengan 5, maka itu mrpkan tanggung jwb msg2. Untuk menghindari agar seluruh obyek sengketa dipindahtangankan, Penggugat akan meletakkan sita jaminan + mendaftarkan ke BPN. Putusan yang dimohon : - Menerima & mengabulkan seluruh gugatan - Menetapkan bagian TARNING sbg harta warisan TARNING yang belum dibagike semua ahli waris - Menyatakan, bahwa Penggugat, Tergugat 1,2,3,4 adalah seluruh ahli waris TARNING - Menghukum para Tergugat atau siapapun yg memperoleh hak dr mrk utk menyerahkan bagian hak waris Penggugat kpd Penggugat, dlm keadaaan kosong dan baik, max 7 hari Nilai perkara: Rp 50,000.000,-. Prpses Acara: Pada putusan tingkat pertama gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Penggugat ajukan banding.	
7.	Tingkat pertama: Tuban	Perdata	Tingkat Pertama: Pengadilan Negeri Tuban 10/Pdt.G/2012/ PN.Tbn	Siti Khaliyatul Badriyah (Penggugat) melawan Perseroan Cab, Bpjonegoro (Tergugat 1), Perseroan Cab, Cendana (Tergugat 2), KPKNL (Tergugat 3), Sumini (Tergugat 4), Kartika Dewi (Tergugat 5), Suwarno (Tergugat 5).	Pokok Permasalahan: Penggugat mempunyai sebidang tanah di Desa Tunggulrejo, Kec. Singgahan, Kab. Tuban yang tercatat pada SHM 199 ; luas 514m2 atas nama SITI KHALIYATUL BADRIYAH (Penggugat) dan diatasnya berdiri bangunan rumah SHM dipinjam oleh T4, 5, 6 untuk dijaminkan di Tergugat 1. Bhw dg bujuk rayu dengan alasan mempermudah pinjaman ke BANK, Penggugat disuruh balik nama sertipikat tersebut seolah-olah telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergguat 4, yang kemudian sertipikat tersebut berubah menjadi atas nama Tergugat 4. Setelah itu sertipikat tsb dijaminkan oleh Tergugat 4 pada BANK PANIN (Tergugat 1) senilai Rp 250.000.000,-, yang dibagi 3, masing-masing : Tergugat 4 = Rp 100.000.000,-, Tergugat 5 = Rp 120.000.000,-, Tergugat 6 = Rp 120.000.000,-, Tergugat 4,5,6 telah membuat pernyataan sanggup mengangsur selama 18 bulan mulai tanggal 21-8-2009 sampai lunas, Tergugat 4,5,6 ternyata hanya mengangsur slm beberapa kali angsuran, kemudian macet dan diambil alih oleh Tergugat 2 yang kemudian oleh Tergugat 2 diserahkan kpd Tergugat 3 yang saat ini dalam proses pengumuman lelang, Perbuatan Tergugat 4,5,6 merupakan perbuatan melawan hukum dan Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp 100.000.000,-. Nilai perkara: Rp 100,000.000,-. Prpses Acara: Pada putusan tingkat pertama gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Penggugat ajukan banding.	Proses persidangan.

29. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Banda Aceh

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	Tingkat pertama: PN Banda Aceh	Perdata	07/Pdt.Eks/2010/ PN.Bna	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Agung (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit macet, Perseroan ajukan permohonan eksekusi HT benda jaminan. Obyek Permohonan Eksekusi: 1 unit ruko Jl. Chairil Anwar No. 31 Banda Aceh. Nilai perkara: Rp 874..988.808,- Proses Acara: Aanmaning.	Aanmaning
2.	Tingkat pertama: PN Banda Aceh	Perdata	04/Pdt.Eks/2012/ PN.Bna	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan H. Fachroel JM (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Kredit macet, Perseroan ajukan permohonan eksekusi HT benda jaminan. Obyek Permohonan Eksekusi: 1 unit ruko Jl. TP Panglima Polim No. 23 Banda Aceh. Nilai perkara: Rp 1.599.289.176,50. Proses Acara: lelang.	Lelang

30. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Pecenongan

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1	Tingkat Pertama: Pengadilan Negeri Tangerang	Perdata	Tingkat Pertama: Pengadilan Negeri Tangerang No. 23/Pen.Eks/ APHT/2012/ PN.Tng tanggal 18 Juni 2012	Tingkat Pertama: Perseroan (Pemohon Eksekusi) Melawan Bakhtiar Tedja Negara (Termohon Eksekusi)	Pokok Permasalahan: Perseroan ajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan benda jaminan berupa tanah dan bangunan. Nilai perkara: Rp 4.852.029.664,-.	

Catatan: *Setelah 30 Juni 2012, Perseroan KCU Pecenongan (selaku Turut Tergugat I) menerima gugatan perdata dari Mimi Gunawan Thamrin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 371/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Agustus 2012. Gugatan diajukan Mimi Gunawan Thamrin (Penggugat) terhadap Effendy Permanto, FX Nurtanio, Suwandi Fermanto (berturut-turut Tergugat I, II dan III) serta Ibu Sri Ayu Hartanti, Perseroan KCU Pecenongan, PT Dwikartika Lestari (berturut-turut Turut Tergugat I, II dan III), PT Goldbell Nusantara, Lie Kessy Lisyanto (berturut-turut Tergugat IV, V), PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, PT Wahana Otto Mitra Multiartha Tbk. dan PT Summit Otto Finance (berturut-turut Turut Tergugat VI, VII dan VIII). Gugatan diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Perseroan tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. PEnggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III (Suwandi Fermanto) pada PT Tritala Sakti Utama Motor. Hubungan hukum pada Perseroan adalah Perseroan selaku kreditur dengan Suwandi Fermanto (debitur) dengan total kewajiban KPR Rp 1.838.327.047,34 dengan jaminan berupa 1 unit ruko LT/LB 152/342 m2 di Jl. Gunung Sahari No. 26 RT 008/04 Kel. Gunung Sahari Utara Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat SHGB No. 2086 atas nama Effendi Fermanto dan Franciscus Xaverius.*

31. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Kopi

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	Pengadilan Negeri Bogor	Perdata	10/Pdt/Eks.Akte/ 2011/PN.Bgr	Perseroan (Pemohon Eksekusi) Melawan Deky Purnomo(Termohon Eksekusi).	Pokok Permasalahan: Kredit Macet. Perseroan ajukan permohonan eksekusi benda jaminan. Obyek: rumah tihggal. Nilai perkara: Rp 5.640.039.949,-. Proses Acara: Selesai, Sudah masuk proses lelang tapi tidak ada peminat karrena kontur rumah tidak sesuai.	Sudah masuk proses lelang tapi tidak ada peminat karrena kontur rumah tidak sesuai.

32. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Plaza Pacific

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	Pengadilan Negeri Tangerang	Perdata	19/PEN.EKS/ APHT/2009/ PN.TNG (permohonan didaftarkan pd Tanggal 20 April 2009) 365/Bth.Pdt/2010/PN.TNG	Perseroan (Pemohon Eksekusi) (kreditur) melawan Jonathan Alexander Bambang Sutrisno dan Ny. Helena Caroline Bambang Sutrisno (Termohon Eksekusi) (debitur) Jonathan Alexander Bambang Sutrisno [Pembantah] melawan Perseroan (Terbantah)	Surat permohonan eksekusi: Tanggal 20 April 2009. Latar belakang permohonan: Terjadi Kredit Bermasalah yang telah diberikan peringatan oleh Perseroan, sehingga Perseroan mengajukan permohonan Eksekusi grosse akta Sertifikat Hak Tanggungan kepada Pengadilan Negeri Tangerang. Nilai perkara: Rp 794.180.823,41. Proses Acara : - Penetapan Ketua PN Tangerang tanggal 28 April 2009: Aanmaning. - Penetapan Ketua PN Tangerang tanggal 1 Juni 2009: : Sita Eksekusi. - Penetapan Ketua PN Tangerang tanggal 3 Nov 2009: Lelang Eksekusi - Penetapan Ketua PN Tangerang tanggal 17 Februari 2010: Eks Lelang. - Sita Eksekusi sudah dilaksanakan oleh Jurusita PN Tangerang pada tanggal 10 Juni 2009 sesuai Berita Acara Sita Eksekusi. - Para Termohon Eks mengajukan Verzet atas Penetapan Ketua PN Tangerang No. 19/PEN. EKS APHT/2009/PN.TNG yang didaftarkan di PN Tng No. 365/Pdt.Bth/2010/PN.TNG tanggal 9 Agustus 2010 dimana Para Termohon selaku pembantah mengajukan bantahan mengenai jumlah kewajiban Para Termohon Eksekusi dan mohon penundaan Lelang eksekusi - Perseroan mendapat surat panggilan dari PN Jakarta Barat tanggal 23 Agustus 2010 No. 365/Bth.Pdt/2010/PN.TNG untuk datang dalam persidangan di PN Tangerang 1 September 2010. - Mediasi - Surat Panitera/Sekretaris a/n Ketua PN Tangerang No. W29.U4.182.HT.04.05/VIII/2012 tanggal 31 Agt 2012 tentang Pemberitahuan Lelang Perkara No. 19/Pen.Eks/APHT/ 2009/PN.TNG, lelang eksekusi tanggal 7 September 2012. - Lelang eksekusi sudah dilaksanakan tapi tidak ada pembeli.	Lelang eksekusi tanggal 7 September 2012, tidak ada pembeli.

32. Perkara Perseroan yang ditangani Kantor Cabang Cirebon

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
1.	Pengadilan Negeri Cirebon	Perdata	05/Pdt.Eks/2011/ PN.Cn (tgl 12 April 2011)	Perseroan (Pemohon Eksekusi) Melawan Yuyun Sumiarti (Termohon Eksekusi), Toni Prajantoro (Termohon Eksekusi)	Surat permohonan eksekusi: No. 068/CIR/EXT/11 tanggal 4 April 2011/ Obyek Eksekusi: SHM No. 764 di Perumahan Setrayasa Barat III No. 1, Desa Pilangsari, Kecamatan Kedawung, Kab. Cirebon a/n Yuyun Sumiarti luas 300 m2. Nilai perkara: Rp 551.910.140,64. Proses Acara : Permohonan somasi tanggal 4 April 2011. Permohonan Sita Eksekusi tanggal 17 Juli 2012. Termohon mengajukan permohonan penangguhan SIta Eksekusi karena debitur akan melunasi tunggakan angsuran dan akan menjual asetnya.	Permohonan sita eksekusi. Pencabutan perkara karena pelunasan tanggal 23 Oktober 2012.
2.	Pengadilan Negeri Indramayu	Perdata	02/Pdt.Eks/2011/ PN.Im (tgl 7 April 2011)	Perseroan (Pemohon Eksekusi) Melawan Herawati (Termohon	Surat permohonan eksekusi: No. 069/CIR/EXT/11 tanggal 4 April 2011. Obyek Eksekusi: SHM No. 55 di Eretan Wetan No. 91, RT 02/05, Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandang Haur, Kab. Indramayu luas 278 m2 atas nama Tatang Djunaedi.	Permohonan sita eksekusi. Penjualan aset dalam tahap penawaran.

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
				Eksekusi), Tatang Djunaedi (Termohon Eksekusi)	Nilai perkara: Rp 170.056.139,86. Proses Acara : Permohonan somasi tanggal 4 April 2011. Permohonan Sita Eksekusi tanggal 17 Juli 2012. Termohon mengajukan permohonan penangguhan SIta Eksekusi karena debitur akan melunasi tunggakan angsuran dan akan menjual asetnya.	
3.	Pengadilan Negeri Kuningan	Perdata	28/Pen.K/02/Pdt. Eks/2011/PN.Kng (tgl 13 Sep 2011)	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Hj. Ohat Rohati (Termohon Eksekusi), H. Juli (Termohon Eksekusi)	Surat permohonan eksekusi: No. 025/CIR/EXT/11 tanggal 18 Juli 2011. Obyek Eksekusi: SHM No. 357 di Desa Purwasari Kec. Giriwangi Kab. Kuningan luas 122 m2 atas nama Haji Juli dan SHM No. 343 di Blok Pahing, Desa Lengkong, KEc. Kadugede, Kab. Kuningan, luas 1.360 m2 atas nama Haji Juli. Nilai perkara: PRK Rp 217.938.436,96 dan PJP Rp 138.722.048,21. Proses Acara : Permohonan somasi tanggal 18 Juli 2011. Permohonan Sita Eksekusi tanggal 17 Juli 2012. Termohon mengajukan permohonan penangguhan SIta Eksekusi karena debitur akan melunasi tunggakan angsuran dan akan menjual asetnya.	Permohonan sita eksekusi. PJP telah dilunasi tanggal 22 Oktober 2012.
4.	Pengadilan Negeri Indramayu	Perdata	04/Pen.Eks/2012/ PN.Im (tgl 16 April 2012)	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Tatang Djunaedi (Termohon Eksekusi), Herawati (Termohon Eksekusi)	Surat permohonan eksekusi:No. 037/CIR/EXT/11 tanggal 26 Maret 2011. Obyek Eksekusi: Bidang tanah SHM No. 278 di Desa Eretan Wetan, Kec. Kandang Haur, Kab. Indramayu luas 237 m2 atas nama Tatang Junaedi, dan bidang tanah HM No. 1093 di Desa Eretan Wetan, Kec. Kandang Haur, Kab. Indramayu luas 34 m2 atas nama Herawati. Nilai perkara: Rp 33.707.706,59. Proses Acara :Permohonan somasi tanggal 26 Maret 2012. Permohonan Sita Eksekusi tanggal 11 Juni 2012. Termohon mengajukan permohonan penangguhan SIta Eksekusi karena debitur akan melunasi tunggakan angsuran dan akan menjual asetnya.	Permohonan sita eksekusi.
5.	Pengadilan Negeri Indramayu	Perdata	Dalam proses	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Suwanti Efendi (Termohon Eksekusi)	Surat permohonan eksekusi:No. 062/CIR/EXT/12 tanggal 25 April 2012. Obyek Eksekusi: Bidang tanah SHM No. 883 di Blok Kebon II RT 03/05 Desa Eretan Kulon, Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu luas 571 m2 atas nama Suwanti. Nilai perkara: Rp 145.597.526,74. Proses Acara :Permohonan somasi tanggal 25 April 2012.	Permohonan somasi.
6.	Pengadilan Negeri Cirebon	Perdata	05/Pdt.Eks/2012/ PN.CN (tgl 4 Okt 2012)	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Gideon Darmawan (Termohon Eksekusi)	Surat permohonan eksekusi: No. 137/CIR/EXT/12 tanggal 17 September 2012. Obyek Eksekusi: Bidang tanah SHM No. 4009. 4010, 4011 di Jl. Kalijaga No. 55 Kel. Kesambi, Kec. Lemahwungkuk, Cirebon luas 200 m2 atas nama Gideon Darmawan. Nilai perkara: PRK KPR-Xtra Rp 104.681.640,50 dan KPR Rp 259.415.946,77. Proses Acara : Permohonan somasi tanggal 17 September 2012.	Permohonan somasi.
7.	Pengadilan Negeri Sumber	Perdata	10/Pdt.Eks/2012/ PN.Sbr (tgl 27 Sep 2012)	Perseroan (Pemohon Eksekusi) melawan Atin Sugiatin (Termohon Eksekusi), Sosi Kartika (Termohon Eksekusi)	Surat permohonan eksekusi: No. 138/CIR/EXT/12 tanggal 17 September 2012. Obyek Eksekusi: PRK-KSG: Bidang tanah SHM 170 dan 172 di Jl. Blok Supi, Desa Gebang Pabuaran Kidul, Kec. Ciledug, Kab. Cirebon luas 150 atas nama Atin Sugiatin d/h Liem Rek Tien, dan SHM No. 154 m2 di Jl. Blok Supi, Desa Gebang Pabuaran Kidul, Kec. Ciledug, Kab. Cirebon luas 150 atas nama Atin Sugiatin d/h Liem Rek Tien. KPR X-tra: Bidang tanah SHM 144 di Perumahan Taman CIpto Blok 3 No. 10 Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon luas 200 m2 atas nama Nyonya Sosi Kartika dan Nona Natsha Sherni Ali Wyne.	Penjualan aset dalam tahap penawaran.

No.	Pengadilan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan	Status Terakhir
					Nilai perkara: KPR KKG Rp 664.362.802,21, dan PRK KPR-Xtra Rp 675.147.278,05. Proses Acara : Permohonan somasi tanggal 17 September 2012. Debitur telah menjual sebagian agunan tanggal 5 Oktober 2012 untuk melunasi KPR X-tra dan mohon penangguhan Sita Eksekusi karena debitur akan melunasi KPR.	

Kantor-Kantor Cabang Perseroan di Banjarmasin, Pematang Siantar, Bojonegoro, Cayman Island, Batam, Bandar Lampung, Samarinda, Balikpapan, Tegal, Purwokerto, Singapura, Jayapura, Pangkal Pinang, CBD Pluit, Ambon, Lhokseumawe, Kediri, Gading Serpong, AM Sangaji, Mataram, Gorontalo tidak memiliki perkara hukum.

Direksi Perseroan menegaskan seluruh perkara-perkara penting telah diungkapkan dan tidak ada lagi perkara penting yang tidak diungkapkan dalam prospektus dan tidak terdapat somasi atas perkara yang dihadapi Perseroan. Apabila pada salah satu atau seluruh perkara tersebut di atas Perseroan dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dan diwajibkan untuk melaksanakan keputusan tersebut maka nilai kewajiban tersebut tidak mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan maupun kepentingan pemegang saham Perseroan dan pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh Perseroan.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan memulai kegiatan operasi perbankan sebagai bank umum pada tanggal 18 Agustus 1971 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-205/DDK/II/8/1971 tanggal 18 Agustus 1971. Selanjutnya Perseroan memperoleh status Bank Devisa berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/2-Kep.Dir. tanggal 21 April 1972.

Sejak didirikan hingga saat ini Perseroan bergerak di bidang perbankan yang mencakup Layanan Umum Perbankan dan produk-produk *Treasury* dan produk investasi lainnya. Dalam perjalanan usahanya, Perseroan telah menunjukkan prestasi yang baik di Indonesia. Berdasarkan hasil *due diligence* yang dilakukan oleh auditor independen yang ditunjuk Pemerintah pada saat krisis multi dimensional yang terjadi pada tahun 1998, Perseroan digolongkan ke dalam bank kategori "A" sehingga tidak perlu mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Bank-Bank yang dipublikasikan per 30 Juni 2012, Perseroan menduduki peringkat ke-7 terbesar dari sisi aset, dengan total Aset sebesar Rp. 128,04 triliun dan pangsa pasar sebesar 4.04% terhadap total aset Bank Umum. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam industri perbankan. Perseroan akan lebih fokus pada sektor Ritel dan Konsumen yang telah terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan usaha Perseroan sehingga dapat mencapai posisi tersebut.

Perseroan terus melakukan upaya antisipasi dan secara bertahap mulai mentransformasikan usahanya menjadi Bank Ritel dan Bisnis. Perseroan menjalankan strategi untuk mentransformasikan diri menjadi salah satu bank terkemuka yang menyediakan produk dan jasa perbankan ritel dan sekaligus melayani dunia usaha di Indonesia.

Sebagai bagian dari strategi menjadi ritel *banking*, saat ini Perseroan aktif menyalurkan kredit komersial untuk pembiayaan usaha menengah dan kecil (SMB) serta kredit konsumen berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Mobil (KPM) dan Kartu Kredit (Panin Card). Dalam bidang pendanaan Perseroan terus mengembangkan produk-produk yang inovatif dan bernilai tambah, seperti Tabungan Panin, Tabungan Bisnis Panin, Tabungan Junior Panin dan Tabungan Rencana, Pan Dollar dalam berbagai mata uang Utama, dan lain-lain.

Sebagai implementasi dari strategi yang fokus pada pengembangan Bank di segmen ritel dan bisnis, Perseroan terus meningkatkan pangsa pasar domestik yang masih sangat potensial, yang antara lain terdorong adanya peningkatan jumlah masyarakat berpenghasilan menengah.

Perluasan jaringan distribusi yang terus ditingkatkan disertai jangkauan basis nasabah yang diperluas merupakan faktor pendukung utama. Hingga akhir Juni 2012, Perseroan telah memiliki lebih dari 450 kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pengembangan kegiatan operasional Perseroan didukung oleh tersedianya fasilitas electronic banking, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan.

Jaringan distribusi sebagai pendukung pengembangan bisnis ritel, baik berupa perluasan jaringan kantor cabang dan ATM serta saluran distribusi lainnya yang berbasis teknologi seperti *Mobile Banking, Telephone Banking* dan *Call Centre* serta *internet banking*. Perseroan juga telah mengembangkan jasa *Cash Management* untuk melayani nasabah yang membutuhkan kemudahan dalam pengelolaan arus kas perusahaan dan mengembangkan jasa *Wealth Management* bagi nasabah Prioritas.

Di bidang *Treasury*, Perseroan aktif dalam kegiatan transaksi valuta asing terutama untuk kepentingan kegiatan usaha nasabah dengan memberikan kurs valuta asing yang dikenal sangat kompetitif. Saat ini Perseroan menawarkan berbagai kurs valuta asing secara "real time" melalui website kepada nasabah ritel. Perseroan juga aktif dalam perdagangan surat-surat berharga, *bancassurance*, reksadana terproteksi, *Primary Dealer* untuk perdagangan Obligasi Pemerintah dan perdagangan ORI-1 hingga ORI-9.

Dibidang transaksi internasional, Perseroan menyediakan jasa *trade financing* untuk kegiatan perdagangan internasional (impor dan ekspor), transaksi kiriman uang (*remmittances*) dan bertindak sebagai distributor untuk penjualan *Amex Travelers Cheque* di Indonesia.

2. KEGIATAN USAHA

Sebagai Bank komersial, Perseroan menjalankan kegiatan usaha pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun perusahaan. Perseroan juga melakukan transaksi antar bank serta kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen-instrumen keuangan yang aman dan menguntungkan, disamping menyediakan jasa untuk memperlancar arus pembayaran dan perdagangan nasional dan internasional, seperti jasa pengiriman uang. inkaso/*collection*, transaksi valuta asing dan pembiayaan ekspor-impor dalam bentuk *letter of credit* (L/C), yang memberikan pendapatan non-bunga/imbal jasa (*fee based income*) kepada Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan yang berkantor pusat di Jakarta dan sampai dengan prospektus ini diterbitkan memiliki 450 kantor cabang, dimana 54 kantor merupakan kantor cabang utama yang berlokasi di Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Sukabumi, Garut, Sumedang, Solo, Semarang, Surabaya Coklat, Malang, Bojonegoro, Medan, Pematang Siantar, Pekanbaru, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Palmerah, Palembang, Batam, Lampung, Manado, Kuta-Bali, Padang, Yogyakarta, Serang, Jambi, Purwokerto, Tegal, Balikpapan, Samarinda, Palu, Kendari, Jakarta Menara Imperium, Jakarta CBD Pluit, Jakarta Pecenongan, Jakarta Kopi, Tasikmalaya, Surabaya Cendana dan Banda Aceh, Jayapura, Pangkal Pinang, Ambon, Lhokseumawe, Kediri, Bengkulu, Mataram, Gorontalo, Jakarta Gading Serpong, Jakarta Sangaji, Jakarta Plaza Pasifik, Bengkulu, Gorontalo, Mataram, Jakarta Bekasi Square dan Jakarta Puri Tirta dan 1 kantor cabang yang berdomisili di luar negeri merupakan *offshore* unit yakni di Cayman Islands dan 1 kantor perwakilan di Singapura serta didukung oleh 388 kantor cabang pembantu dan 6 kantor kas. Perluasan kantor-kantor cabang didasarkan atas beberapa kriteria, antara lain: a) meningkatkan jaringan guna memenuhi kebutuhan kegiatan usaha nasabah, b) perkembangan perekonomian daerah yang bersangkutan, c) situasi dan kondisi sosial ekonomi daerah yang bersangkutan dan d) mempermudah akses internasional (khusus untuk kantor di luar negeri).

Bagi nasabah yang memerlukan pelayanan jasa di luar negeri dapat dilayani oleh lebih dari 150 bank koresponden Perseroan di seluruh dunia.

Berikut ini adalah gambaran mengenai kantor operasional Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan beserta status kepemilikan gedung dan/atau bidang tanahnya.

No	Lokasi	LB	Status Opr.	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
	Bank Panin Pusat. Jl. Jend Sudirman. Senayan	7905	Kantor Pusat	Milik Pihak Lain/Hub. Istimewa	1/1/2012 s/d 31/12/2012
I.	Senayan				
1	Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 - Senayan Jakarta 10270	2.7/	Cabang Utama	Sewa pihak ketiga	1/1/2012 s/d 31/12/2012
2	Panin Life Building Jl. Jatinegara Barat 54E Blok B3-4 Jakarta Timur	240	Capem	Sewa pihak ketiga	1/1/2012 s/d 31/12/2016
3	Jl. Fachrudin 47-49 Jakarta 10250	1.165/211	Capem	Milik sendiri	
4	Jl. Metro Duta I/UA-17. Pondok Indah Komp. Pertokoan Pl Jakarta 12310	110	Capem	Milik sendiri	
5	Jl. Darmawangsa III Blok D/15 Wijaya Grand Centre. Kebayoran Baru Jakarta 12160	235	Capem	Milik sendiri	
6	Jl. Terogong Raya 33 Cilandak. Jakarta 12430 Jakarta International School	6	Capem	Hak Pakai	Kerjasama untuk waktu yang tidak ditentukan
7	Jl. R.S. Fatmawati Komp. DEPLU Sektor V/1 Jakarta 12150	150	Capem	Milik sendiri	
8	Komp. Billy & Moons Blok M I BZ No. 2. SEB/2E. Jakarta 13450	180	Capem	Milik sendiri	
9	Jl. Permata Hijau Blok D17-18 Jakarta12520	134	Capem	Sewa pihak ketiga	19/04/2010 s/d 19/04/2020
10	Perkantoran Hijau Arcadia. Menara E Ground Fl Suite 102, Jl. TB. Simatupang Kav. 88 Jakarta 12520	130	Capem	Sewa pihak ketiga	1/3/2012 s/d 28/02/2015
11	Gedung Bursa Efek Jakarta. Tower I Suite 107B. Jl Jend. Sudirman Kav.52-53. Jakarta	154	Capem	Sewa pihak ketiga	/15/03/2012 s/d14/03/2014
12	Jl.Sunga Sambas VI 189 H. Jakarta	636	Capem	Milik sendiri	
13	Jl. Kemang Raya No. 112 A. Jakarta Selatan 12730	643	Capem	Milik sendiri	
14	Jl. Fatmawati No. 63 A. B. C - Cipete. Jakarta Selatan	1.389	Capem	Milik sendiri	
15	Jl. Teuku Nyak Arif No. 10 Jakarta Selatan	408/375	Capem	Milik sendiri	
16	Jl. Jatinegara Barat 41. Jakarta 13310	375	K.Kas	Milik sendiri	

No	Lokasi	LB	Status Opr.	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
17	Jl. Radio Dalam Raya No.52A. Jakarta Selatan	225	Capem	Milik sendiri	
18	Komp. Ruko Permata Senayan Unit E 62-63. Jl. Tentara Pelajar. JakSel	494	Capem	Milik sendiri	
19	Tamini Square GF Unit GB/3. Jl. Taman Mini Raya. Kp. Makassar. Jaktim	131	Capem	Milik sendiri	
20	Jl. Cilandak (KKO) No.9 Ruko D. Pasar Minggu. JakSel.	305	Capem	Milik sendiri	
21	Tanah Abang Bukit Blok A No.14, Jl. Fachrudin No 36. JakPus.	211	Capem	Milik sendiri	
22	Komp. Sentra Arteri Mas. Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. 10 D-E. JakSel	2590/646	Capem	Milik Sendiri	
23	Jl. Radio Dalam Raya Blok B II A No. 39. JakSel	440	Capem	Milik sendiri	
24	Sudirman Park. Rukan Hook Blok A No. 1. Jl. K.H. Mansyur Kav. 35. JakPUs 10220	90	Capem	Milik sendiri	
25	Jl. Dewi Sartika No. 210. Cawang. Jak Tim	362	Capem	Milik sendiri	
26	Jl. Raya Cinere Blok A No.40. Cinere Kec. Limo. Depok. Jawa Barat	165	Capem	Milik sendiri	
27	Jl. Raya Matraman Blok A I Kav. No. 3. Kebon Manggis. Matraman. Jak Tim	300	Capem	Milik sendiri	
28	Jl. Raya Buaran. RT. 003/012. Persil I / 9 (sekarang Jl. Perumnas Blok I / 9). Duren Sawit.	80	Capem	Milik sendiri	
29	Pasar Induk Kramat Jati Blok D2 No. 7. 8 dan 9. Kel. Tengah. Kec. Kramat Jati. Jakarta Timur	450	Capem	Milik sendiri	
30	Jl. Balai Pustaka Timur RT. 012/09 Blok B No. 17, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur	324	Capem	Milik sendiri	
31	Ruko di Kompleks Pertokoan Duta Mas Blok B2 No. 27, Jakarta Selatan	3/225	Capem	Milik sendiri	
32	Jl. RS Fatmawati No.37D, Jakarta Selatan	243	Capem	Milik sendiri	
33	Panin Plaza Jl Teuku Nyak Arief Blok CC Persil 6 No 5-6-7, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.	3005	Capem	Milik sendiri	
II.	Surabaya Coklat				
1	Jl. Coklat 16. Surabaya 60161	2.398	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Tunjungan 92. Surabaya 60161	1.843	Capem	Milik sendiri	
3	Jl. Darmo 139 Surabaya 60241	2243	Capem	Sewa pihak ketiga	1/1/2012 s/d 31/12/2015
4	Jl. Kusuma Bangsa 39 Surabaya 60272	367	Capem	Milik sendiri	
5	Jl. Dharmahusada No.121A-B. Surabaya 60132	416	Capem	Milik sendiri	
6	Jl. Kutisari 58A Surabaya 60291	520	Capem	Milik sendiri	
7	Jl. Demak 167 Surabaya 60173	513	Capem	Milik sendiri	
8	Jl. Arief Rahman Hakim 55-55 A. Surabaya 60117	553	Capem	Milik sendiri	

No	Lokasi	LB	Status Opr.	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
9	Jl. Semarang No. 108D Blok A12 Surabaya	290	Capem	Milik sendiri	
10	Komplek Pertokoan Ruko Taman Graha Asri. Blok K1-K2 Jl.Raya Ngagel No.179-183.Surabaya 60245	220	Capem	Milik sendiri	
11	Jl. Tanjung Perak Timur 242 Surabaya	147	Capem	Milik sendiri	
12	Jl.Mayjen Sungkono 100. Surabaya	461	Capem	Sewa pihak ketiga	01/07/2011 s/d 30/06/2021
13	Kompleks Pertokoan Mulyosari. Jl. Raya Mulyosari No.362. Blok Z No. 51/52 Sutorejo. Sukolilo. Surabaya	336	Capem	Milik sendiri	
14	Kompleks Perumahan dan Pertokoan Galaxy. Bumi Permai Blok I - 1 No. 1 & 2. Jl. Sukosemolo Sukolilo. Surabaya	591	Capem	Milik sendiri	
15	Kompleks Rukun Makmur Indah Blok B5 dan B7 Gubeng. Surabaya	422	Capem	Milik sendiri	
16	Jl. Pucang Anom No. 35A. Surabaya	210	Capem	Milik sendiri	
17	Jl. Raya Sukomanunggal Jaya Satelite-Satelite Town SquareBlok A7-A8 Surabaya	440	Capem	Milik sendiri	
18	Jl. Kapas Kerampung No. 30. Surabaya	690	Capem	Milik sendiri	
19	ITC Mega Grosir Ground Floor Blok H2 Stand No 10-11-12. Jl. Gembong No. 20-30. Surabaya	68	Capem	Sewa pihak ketiga	31/10/2006 s/d 31/01/2032
20	Gedung Bank Harfa. HR. Muhammad Square. Jl. HR. Muhammad Blok C 19-20 & C 29-30	105	Capem	Sewa pihak ketiga	01/10/2008 s/d 30/09/2020
21	Jl. Darmo Indah Timur SS 3. Tandes. Kidul. Jatim	250	Capem	Milik sendiri	
22	Ruko Sentra Taman Gapura Blok J3 & J5 (Citraland). Lontar. Lakarsantri. Surabaya.	565	Capem	Milik sendiri	
23	Pasar Atum Mall Stand Lantai II Blok BA-20, Jl. Bunguran 45, Surabaya	30	Capem	Milik sendiri	
III.	Medan				
1	Jl. Pemuda 16 - 22. Medan	3.193	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Sutomo 32 Medan 20212	332	Capem	Milik sendiri	
3	Jl. Jend. Gatot Subroto No.196 Medan 20112	200	Capem	Milik sendiri	
4	Komplek Taman Setia Budi Indah Blok UU No. 47 Medan 20132	183	Capem	Milik sendiri	
5	Jl. Pahlawan 17-C. Tanjung Morawa 20362 Deli Serdang Medan. Sumatra Utara	282	Capem	Milik sendiri	
6	Jl. Bandung No. 38. Medan	152	Capem	Milik sendiri	
7	Jl. Krakatau No. 14B. Medan	235	Capem	Milik sendiri	
8	Jl. Zainul Arifin No. 63. Medan	200	Capem	Milik sendiri	
9	Jl. Yos Sudarso No. 197D. Medan	294	Capem	Milik sendiri	
10	Jl. Sutomo Ujung No 21 E, Medan	256	K.Kas		
11	Jl.Kota Baru III No.46. Medan	276	Capem	Sewa pihak ketiga	01/09/2010 s/d 31/08/2015
12	Jl. Asia No. 115 C. Kel. Sei Rengas II. Kec.	399.25	Capem	Milik sendiri	

No	Lokasi	LB	Status Opr.	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
	Medan Area. Medan				
13	Jl. Zein Hamid No. 809 B-C. Kampung baru. Medan	384	Capem	Milik sendiri	
14	Jl. Iskandar Muda No. 99 B-C-D. Medan	360	Capem	Milik sendiri	
15	Jl. Pulau Pinang 6. Medan 20111	2.347	Capem	Milik sendiri	
16	Jl. Sutomo No. 190/566. Medan. Sumatera Utara	714	Capem	Milik sendiri	
17	Jl. Jenderal Sudirman No. 382, Pekan Binjai, , Binjai, Sumatera Utara	343	Capem	Milik sendiri	
IV.	Bandung				
1	Jl. Banceuy No. 8-10 Braga Sumur. Bandung	3.395	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Jend. Sudirman 462. Bandung 40251	290	Capem	Milik sendiri	
3	Jl. Otto Iskandardinata 233 Bandung 40251	701	Capem	Milik sendiri	
4	Jl. Kiara Condong 175. Bandung 40274	274	Capem	Milik sendiri	
5	Metro Trade Center, Blok D No.17, Jl. Soekarno Hatta, Rancabolong, Bandung	255	Capem	Milik sendiri	
6	Jl. Prof. Drg. Surya Sumantri 6A. Bandung	200	Capem	Milik sendiri	
7	Jl. Gardujati No. 66 C. Bandung 40111	210	Capem	Milik sendiri	
8	Jl. H. Juanda No. 110. Bandung	575	Capem	Sewa pihak ketiga	1/5/2004 s/d 1/5/2014
9	Jl. Asia Afrika No. 166-170. Bandung	1.035.43	Capem	Sewa pihak ketiga	Kerjasama untuk waktu yang tidak ditentukan
10	Komplek Kopo Mas Regency Blok N 1A. Bandung	256	Capem	Milik Sendiri	
11	Jl. Dr. Setiabudi No. 167 A. Gegerkalong. sukasari. Bandung	216	Capem	Milik Sendiri	
12	IBCC A I No. 3 A-5-6-7. Jalan A. Yani (setelah Jalan Jakarta). Bandung	200	Capem	Milik Sendiri	
13	Jl. Buah Batu No. 238. Cijagra. Lengkong. Bandung. Jawa Barat	243	Capem	Milik Sendiri	
14	Jl. Arteri Komplek Taman Kopo Indah II Ruko 1B No. 23, Bandung 40218	338	Capem	Milik sendiri	
15	Jl. Abdurahman Saleh No 37, Husen Sastranegara, Bandung 40174	267	Capem	Milik sendiri	
16	Festival City Link Ground Floor No 27, Jl Peta 241, Bandung	138.1	Capem	Sewa pihak ketiga	28/10/2010 s/d 27/10/15
V.	Cirebon				
1	Jl. Yos Sudarso 17. Cirebon 45111	1.673	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Pulasaren 93 Cirebon 45116	495	Capem	Milik sendiri	
3	Jl. Tujuh Pahlawan Revolusi 34 Cirebon 45153	100	Capem	Sewa pihak ketiga	05/01/2009 - 04/01/2014
4	Jl. Raya Kadipaten 27. Kadipaten 45452	158	Capem	Milik sendiri	
5	Jl. Mayor Dasuki 102 Jatibarang 45273	588	Capem	Milik sendiri	
6	Jl. Kol. S. Sukani 27. Jatiwangi 45454	243	Capem	Milik sendiri	
7	Jl. Raya Plered 88 Plered. Cirebon 45154	284	Capem	Milik sendiri	

No	Lokasi	LB	Status Opr.	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
8	Jl. Merdeka Barat 38 Ciledug. Cirebon 45188	414	Capem	Milik sendiri	
9	Jl. Siliwangi 91 Kuningan 45511	604	Capem	Milik sendiri	
10	Jl. Raya Losari 138 Losari 45192	475	Capem	Milik sendiri	
11	Jl. Jend. Sudirman no.195. Indramayu	142	Capem	Milik sendiri	
12	Cherbon Grand Centre Blok D No.15. Jl.Karanggetas Cirebon	1.925	Capem	Milik sendiri	
VI.	Solo				
1	Jl. Gatot Subroto 91F	1.014	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Purwosari Plaza Lt. I & II Blok B 2 Jl. Perintis Kemerdekaan. Solo 57147 (TUTUP tapi izin belum mati dan masih dihitung)	224	Capem	Milik sendiri	
3	Ruko Blok D - 04. Jl. A.Yani 136 A - Kartasura. Sukoharjo Solo 57167	71	Capem	Milik sendiri	
4	Jl. Pemuda Utara 19 Bareng Lor	75	Capem	Milik sendiri	
5	Jl. Pandanaran 82 Boyolali 57311	98	Capem	Milik sendiri	
6	Jl. Raya Wonogiri 187 Wonogiri 57612	90	Capem	Milik sendiri	
7	Jl. Mayor Kusmanto No. 7. Solo 57113	1.284	Capem	Milik sendiri	
8	Jl. Raya Palur KM 5. Karang Anyar. Solo	180	Capem	Milik sendiri	
9	Jl. S.Parman No. 89 Kestalan. Banjarsari. Solo	614	Capem	Milik sendiri	
10	Jl. Raya Solo Baru Sektor 3, Ruko HH-14. Madegondo. Grogol. Sukoharjo. Jawa Tengah	270	Capem	Milik sendiri	
VII.	Semarang				
1	Gedung Panin Bank lantai dasar Jl. Pandanaran 6-8. Semarang 50134	11.02	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl.Suari 27. Semarang 50137	2.988	Capem	Milik sendiri	
3	–Ruko Telaga Mas Blok A No. 18B-19B, Jl Telaga Mas Raya, Panggung Lor, Semarang	400	Capem	Milik sendiri	
4	Jl. Industri Raya Timur Kav 3. Kaligawe KM. 4. Semarang 50143	800	Capem	Milik sendiri	
5	Jl. Majapahit No. 225 A. Semarang Semarang 50248	147	Capem	Milik sendiri	
6	Kompleks Ruko Dargo Plaza. Jl.Dargo A 10-11. Semarang 50124	400	Capem	Milik sendiri	
7	Jl. Ahmad Yani 195 B Semarang 50252	255	Capem	Milik sendiri	
8	Jl. Diponegoro 772A. Ungaran 50500	96	Capem	Milik sendiri	
9	Jl. Raya Weleri (no 222). Weleri 51355	102	Capem	Sewa pihak ketiga	24/04/2012 s/d 25/04/2017
10	Jl. Let. Jend. Suprapto 5. Temanggung 56214	150	Capem	Milik sendiri	
11	Jl. Diponegoro 49. Salatiga 50712	800	Capem	Milik sendiri	
12	Jl. Letjend Suprapto No. 31-33 Purwodadi	487	Capem	Milik sendiri	
13	Jl. Diponegoro 91 Parakan 56254	162	Capem	Sewa pihak ketiga	10/1/2011 s/d 10/1/2016
14	Jl. Sultan Agung No. 55 E-F. Semarang. Semarang	360	Capem	Milik sendiri	

No	Lokasi	LB	Status Opr.	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
15	Kompleks Ruko Rejotumoto II No. 10. Jl. Tidar. Magelang. Jawa Tengah	400	Capem	Milik sendiri	
16	Kompleks Ruko Ahmad Yani No. 7. Jl. Jend. A. Yani. Kudus	120	Capem	Milik sendiri	
17	Jl. Gang Besen No. 92. Semarang	330	Capem	Milik sendiri	
18	JL. KH Mas Mansyur No. 30 C-D. Kel. Bendan. Pekalongan. Jawa Tengah	391.5	Capem	MIlik sendiri	
19	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 7 dan 8. Blora. Jawa Tengah	318	Capem	Sewa pihak ketiga	1/11/2008 s/d 31/10/2018
20	Jl. Gatot Subroto Blok F1 No. 6, Kaw. Industri Candi Semarang	138	Capem	Milik sendiri	
21	Jl. Kol. Sunandar, pati, Jawa Tengah	142	Capem	Milik sendiri	
VIII.	Makasssar				
1	Jl. Dr. Sam Ratulangi 20. Makassar 90125	2.962	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Veteran No. 78. Makassar 90157	372	Capem	Milik sendiri	
3	Komp. Ruko Pasar Mirah . Jl. Pengayoman Blok D/9 Panakukang Mas. Makassar	200	Capem	Milik sendiri	
4	Jl. Sultan Alauddin Kompleks Ruko Permatasari No. 2 Makassar 90221	210	Capem	Milik sendiri	
5	Jl. Tentara Pelajar 157 A Makassar 90172	234	Capem	Milik sendiri	
6	Kompleks Ruko Puri Kencana Sari Blok D No. 9 - 10. Jl. Perintis Kemerdekaan. Tamanlarea Indah. MKS	400	Capem	Milik sendiri	
7	Jl. Sulawesi No. 151. Pattunuang. Makassar	225	Capem	Milik sendiri	
8	Jl. Sungai Saddang Baru No. B2. Balla Parang. Makassar	248	Capem	Milik sendiri	
9	Jl. Andi Makkassau No. 59 E. Kp. Pisang. Soreang. Pare-pare	248	Capem	Milik sendiri	
10	Jl. Kelapa No.11 D. Tompotika. Wara. Palopo	300	Capem	Milik sendiri	
11	Jl.KH.Wahid Hasyim 185 C. Gowa. Sulawesi Selatan	303	Capem	Milik sendiri	
12	Jl. Cendrawasih. Komp. Cendrawasih Square Blok A.7. Makassar	400	Capem	Milik sendiri	
13	Jl. Abdul Syakur Blok B 5-6. Mamuju. Sulawesi Barat	300	Capem	Milik sendiri	
14	Ruko Metro Square Latimojong, Jl Gunung Latimojong Blok A/3, Makassar, Sulawesi Selatan.	300	Capem	Milik sendiri	
15	Jl. Metro Tanjung Bunga 27. Tanjung Merdeka. Tamalate. Makassar. Sulawesi Selatan	277	Capem	Milik sendiri	
16	Jl. Makmur No. 31, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan	951	Capem	Milik sendiri	
17	Mall MTC Kios Ground Floor A9-10, Jl. A. Yani, Makassar	13	Capem	Milik sendiri	
18	Jl. Andi Ninong No. 35-37, Sengkang, Wajo	248	Capem	Milik sendiri	

No	Lokasi	LB	Status Opr.	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
19	Jl. Veteran Selatan, Botolebang, Mamajang, Makassar	270	Capem	Milik sendiri	
20	Jl. Jend. Sudirman No. 68, Wonomulyo, Polewali Mandar	320			
IX.	Banjarmasin				
1	Jl. H. Anang Adenansi No. 1. Banjarmasin	208	Cabang Utama	Sewa pihak ketiga	2/5/2011 s/d 2/5/2013
2	Jl. Jend.A.Yani. KM 4.5 No.31. Kec. Banjar Timur. Banjarmasin	460	Capem	Milik sendiri	
3	Jl. Pasar Baru Indah Blok B/IV. Kertak Baru Ilir. Banjarmasin	300	Capem	Milik sendiri	
4	Jl. Kuripan Gg. IV No. 17, Banjarmasin	315.2	Capem	Sewa pihak ketiga	1/10/2011 s/d 30/09/2021
5	Jl. Jend. A. Yani Km. 33,5 No 11. Loktabat. Banjarbaru. KalSel	626.137	Capem	Milik sendiri	
6	Jl. Kramat Muka No 38-39 . Barabai Utara. Hulu Sungai Tengah. KalSel	183.445	Capem	Sewa pihak ketiga	1/11/2012 s/d 31/10/2022
X.	Pontianak				
1	Jl. Imam Bonjol 44. Pontianak	1.67	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl.Sidas no.3. Pontianak 78117	2.012	Capem	Milik sendiri	
3	Kompleks Ahmad Yani Megamall Blok B No 21-22, Jl. Jend. A.Yani. Pontianak	548	Capem	Milik sendiri	
4	Jl. Sultan Muhammad 71-73. Pontianak	447	K.Kas	Milik sendiri	
5	Jl. Yos Sudarso No. 88. Singkawang Barat. Pontianak	1906	Capem	Milik Sendiri	
6	Jl. MT. Haryono No.88, Sintang, Kalimantan Barat	847	Capem	Milik Sendiri	
XI.	Pematang Siantar				
1	Jl. Merdeka 69-71. Pematang Siantar 21118	891	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Sisingamangaraja No. 551 Perdagangan. Kab. Simalungun	249	Capem	Milik sendiri	
3	Jl. Soa Sio No. 22 A-B. Pematang Siantar	410	Capem	Milik sendiri	
4	Jl. Jend. A. Yani No. 119. Tebing Tinggi	228	Capem	Milik sendiri	
5	Jl. Imam Bonjol No. 28 Kisaran, Pematang Siantar, Sumatera Utara	458.5	Capem	Milik sendiri	
XII.	Pekanbaru				
1	Jl. Jend. Sudirman No. 335. Pekanbaru Pekanbaru 28112	1.13	Cabang Utama	Sewa pihak ketiga	1/12/2008 s/d 30/11/2018
2	Jl. Tuanku Tambusai (Nangka) 425. Pekanbaru 28282. Riau	399	Capem	Milik sendiri	
3	Jl. Jend. Sudirman No. 62. Duri Kec.Mandau Kab. Bengkalis. Riau 28712	630	Capem	Milik sendiri	
4	–Jl. Bupati Tulus No 32, Rengat, Indragiri Hulu, Riau	240	Capem	Milik sendiri	

No	Lokasi	LB	Status Opr.	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
5	Jl. Teuku Umar No. 8 D Selat Panjang. Bengkalis. Riau 28753	225	Capem	Milik sendiri	
6	Kompleks Riau Business Center Blok B No. 4. Jl. Riau Pekanbaru	306.75	Capem	Milik sendiri	
7	Jl. H. Imam Munandar (Jl. Harapan Raya) No. 247 E. Pekanbaru	315	Capem	Milik sendiri	
8	Jl. Jendral Sudirman Atas 415. Pekanbaru	322	Capem	Milik sendiri	
9	Jl. Jend. Sudirman No. 2 Air Molek Pasir Penyu	76.56	K.Kas	Milik sendiri	
10	Jl. M.Boya no. 64 A-B. Pekanbaru	416	Capem	Milik sendiri	
11	Jl. Jend. Sudirman No. 171 Bagan batu. Bagan Sinembah. Rokan Hilir	540.5	Capem	Milik sendiri	
12	Jl. Jend. Sudirman No. 145. Pekanbaru	1360	Capem	Milik sendiri	
13	Jl. H.R. Subrantas Raya Kav 19, No 13-14. Delima. Tampan. Pekanbaru.	540	Capem	Milik sendiri	
14	Jl. Jend. Sudirman, Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu, Propinsi Riau	454	Capem	Milik sendiri	
15	Sultan Syarif Kasim, Dumai, Riau	656	Capem	Milik sendiri	
XIII.	Kuta				
1	Jl. Legian 80-X. kuta Denpasar 80361	2.05	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Diponegoro 150 A1/3-5 Denpasar 80114	242	Capem	Milik sendiri	
3	Shopping Centre Nusa Dua Blok E/28. Denpasar 80361	150	Capem	Milik sendiri	
4	Jl. Danau Tamblingan No. 67A. Sanur. Denpasar - Bali	150	Capem	Milik sendiri	
5	Jl. Imam Bonjol No. 338 C	160	Capem	Milik sendiri	
6	Jl. Gatot Subroto Tengah No. 279. Denpasar	3210	Capem	Sewa pihak ketiga	01/03/2011 s/d 28 Feb 2021
7	Komplek Pertokoan Duta Permai Blok I/D-E. Jl. Dewi Sartika. Denpasar	404	Capem	Milik sendiri	
8	Jl. Gatot Subroto Timur No 209, Tonja, Denpasar Timur	257	Capem	Sewa pihak ketiga	01/03/2011 s/d 28/02/2021
XIV.	Bogor				
1	Jl. Pakuan No. 14. Bogor 16143	3.013.20	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl.Raya Parung, Ruko Bintang Parung Blok A1 No.4, Bogor	820	Capem	Milik sendiri	
3	Jl.Lawang Seketeng 96. Bogor 16123	257.58	Capem	Milik sendiri	
4	Jl.Raya Tajur No.67 C. Bogor	272.16	Capem	Milik sendiri	
5	Jl.Margonda Raya No.88 Depok Mall. Blok B1 No.49 Depok	200.34	Capem	Milik sendiri	
6	Jl.R.Dewi Sartika Kav.No.7. Bogor	218.88	Capem	Milik sendiri	
7	Komplek Ruko 24 No. 2 R-S, Jl. KH. Soleh Iskandar, Tanah Sereal, Kedung Jaya, Bogor		Capem	Milik sendiri	
8	Komp. Pertokoan Modern. Jl. Raya Alternatif Cibubur 79. Jatikarya - Bekasi 17435	399	Capem	Milik sendiri	
9	Depok Town Square Blok GE No.1. Jl. Raya	80	Capem	Milik Sendiri	

No	Lokasi	LB	Status Opr.	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
	Margonda. Depok. Jawa Barat				
10	Ruko Warung Jambu No. 12 A, Jl. Raya Pajajaran ,Bantarjati, Kota Bogor Utara, Bogor	186	Capem	Milik Sendiri	
XV.	Palmerah				
1	Jl. Palmerah Utara 52. Kemanggisan - Palmerah. Jakarta 11480	5.938	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Ruko Intercon Plaza Blok E 21-22. Kebun Jeruk. Jakarta Barat	231	Capem	Milik sendiri	
3	Kompleks Green Garden Blok I.9 No.36. Kedoya Utara. Jakarta Barat	240	Capem	Milik sendiri	
4	Kompleks Green Ville Blok A W No. 55 Duri Kepa. Kebon Jeruk. Jakarta Barat 10320	225	Capem	Milik sendiri	
5	Ruko Intercon Megah Perumahan Taman Kebon Jeruk. Blok W.IV No.31 JakBar	305	Capem	Milik sendiri	
6	Jl. Tanjung Duren Raya No. 15 B. JakBar.	278.08	Capem	Milik sendiri	
7	Jl. Surya Wijaya 33 A. Sunrise. JakBar	168	Capem	Milik sendiri	
8	Jl. Kedoya Raya No. 27 F (Komp. Cosmos). JakBar.	250	Capem	Milik sendiri	
9	Apartemen Mediterania Garden Residences I. Blok Dahlia. Lantai Ground Floor. Jl. Tanjung Duren Raya Kav. 5-9. Tanjung Duren Selatan. Grogol Petamburan. Jakarta Barat.	102	Capem	Milik sendiri	
10	Kompleks Kedoya Elok Plaza Blok DB Kav No. 30. Kedoya Selatan. Kebon Jeruk. Jakarta Barat.	250	Capem	Milik sendiri	
11	Komp. Graha Kencana. Jl. Perjuangan No. 88 C.J. Kebon Jeruk. Kebon Jeruk. Jakarta Barat	328	Capem	Milik sendiri	
12	Kompleks Perumahan Green Garden Blok Z4 No. 8. Kedoya Utara. Kebon Jeruk. Jakarta Barat.	250	Capem	Milik sendiri	
13	Jl. Kedoya Angsana Blok II No. 46. Kedoya. Kebon Jeruk. Jakarta Barat	265	Capem	Milik sendiri	
14	Ruko BotanicJunction Blok H 9 No. 15. Jl. Meruya Selatan. Komp. Puri Botanical. Jakarta Barat	115	Capem	Milik sendiri	
15	Jl. Pesanggrahan No. 3 A. Meruya Utara. Kembangan. Jakarta Barat	80	Capem	Milik sendiri	
16	Maisonette Regency Kebon Jeruk Kav. No. 30, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat.	220.57	Capem	Milik sendiri	
17	Garden Shopping Arcade Unit 8/08/EA-EB, Podomoro City, Jl. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat	737	Capem	Milik sendiri	

No	Lokasi	LB	Status Opr.	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
18	Jl. Raden Saleh Raya, Blok R 1 / 12, Karang Mulya, Karang Tengah, Tangerang, Banten		Capem		
19	Jl. HOS Cokroaminoto (d/h Jl. Raya Ciledug) No.18 B, Sudimara Timur, Ciledug, Tangerang Banten		Capem		
XVI.	Malang				
1	Jl. Sultan Agung 14. Malang 65111	910	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Kyai Tamin Kompleks Pasar Besar KT No. 01 Malang 65117	200	Capem	Milik sendiri	
3	Jl. Terusan Borobudur/Blimbing No. 47A. Lowokwaru. Malang	250	Capem	Milik sendiri	
4	Jl. Thamrin No. 190. Lawang. Malang.	342	Capem	Milik sendiri	
5	Jl. Kawi No. 37 / B3. Kepanjen. Malang	120	Capem	Milik sendiri	
6	Ruko Sentral Niaga Pandaan Blok B-01. Jl. Raya A. Yani 321. Petungasri. Pandaan. Pasuruan. Jatim	513	Capem	Milik sendiri	
7	Jl. Dewi Sartika No. 4, Temas. Batu, Malang	189	Capem	Milik sendiri	
XVII.	Sukabumi				
1	Jl. Jenderal Sudirman No. 102	316	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Siliwangi No. 259. Cicurug. Sukabumi	960	Capem	Milik sendiri	
3	Jl. Kapten Harun Kabir. Sukabumi 43111 Komp Pasar Pelita Blok L I No.3 - 5	141	Capem	Milik sendiri	
4	Jl. Siliwangi No. 87, Pelabuhan Ratu, Sukabumi	369	Capem	Milik sendiri	
XVIII.	Bojonegoro				
1	Jl. Untung Suropati 28. Bojonegoro 62115	249	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Raya No. 108. Babat 62271	210	Capem	Milik sendiri	
XIX.	Garut				
1	Jl. Ciledug 113. Garut 44114	914	Cabang Utama	Milik sendiri	
XX.	Sumedang				
1	Jl. Mayor Abdulrachman 180. Sumedang 40382	202.5	Cabang Utama	Sewa pihak ketiga	28/4/2010 s/d 27/4/2013
XXI.	Cayman Island				
1	c/o IBJ SCHRODER BANK & TRUST COMPANY P.O.BOX 1040 WEST WIND BUILDING GRAND CAYMAN. CAYMAN ISLAND BRITISH WEST INDIES		Cabang Utama	Sewa pihak ketiga	Selama berlangsungnya perjanjian tertanggal 13 Januari 2005 dengan Bank of Scotia & Trust (Cayman) Ltd.

No	Lokasi	LB	Status Opr.	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
	Scotiabank Building. Cardinal Avenue. George Town. Cayman Islands				
XXII.	Palembang				
1	Jl. M. P. Mangkunegara No. 1. Palembang	928	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Mesjid Lama 97 - 99. Palembang 30125	264	Capem	Milik sendiri	
3	Jl. Rajawali No. 11 - 12. Palembang	352	Capem	Milik sendiri	
4	Jl. Kol. Atmo No. 863. Palembang	663	Capem	Milik sendiri	
5	Jl. Jenderal Sudirman No 48. Karang Raja. Prabumulih. Sumatera Selatan.	376	Capem	Milik sendiri	
6	Jl. Raya Palembang-Betung KM 12, Kel. Talang Kelapa, Kec. Sukarami, Palembang	454	Capem	Milik sendiri	
7	Jl. Yos Sudarso No 5 A-B, Taba Jemekeh, Lubuklinggau, Sumatera Selatan	216	Capem	Milik sendiri	
8	Jl. Mayor Salim , Batubara, Kel 20 Ilir, Palembang	400	Capem	Milik sendiri	
XXIII.	Batam				
1	Kompleks Lumbung Rejeki Blok A 1-4, Jl.Sultan Abdul Rahman.. Nagoya Batam 29432	320	Cabang Utama	Sewa pihak ketiga	1/11/2001 s/d 1/11/2013
2	Jl. Setiabudi No. 307 Tanjung Balai Karimun. Riau 29161	364	Capem	Milik sendiri	
3	Kompleks Penuin Blok K No. 1. Batam	429	Capem	Milik sendiri	
4	Jl. Merdeka No. 1-2-3. Tanjung Pinang. Kepulauan Riau	1.08	Capem	Milik sendiri	
5	Komp. Nagoya Bussiness Center Blok V No. 28. Lubuk Baja Batam	285	Capem	Milik sendiri	
6	Komplek Ruko Palm Spring Blok B2 No. 9. Taman Baloi. Batam Kota. Kota Batam. Riau.	448	Capem	Milik sendiri	
7	Komplek Pertokoan Perumnas Fanindo Blok D No. 08-09, Tanjung Uncang, Batuaji, Batam	619.94	Cabang	Milik sendiri	
XXIV.	Bandar Lampung				
1	Jl.R.A. Kartini 97-99. Bandar Lampung	1.68	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Ikan Lemuru No. 12A. Teluk Betung	416	Capem	Sewa pihak ketiga	01/01/2009 s/d 31/12/2013
3	Jl. Proklamator. Bandar Jaya. Terbangi Besar - Lampung		Capem	Sewa pihak ketiga	8/10/2009 s/d 8/10/2013
4	Jl. Mayjend Ryamizard Ryacudu No. 10 A-B. Metro. Metro Pusat. Lampung	344	Capem	Milik sendiri	
XXV.	Manado				

No	Lokasi	LB	Status Opr.	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
1	Komp.ITC Marina Plaza Blok Bunaken No.24-26. Jl.Piere Tendean Boulevard.Manado	1.825	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Dotulolong Lasut No. 7 Manado	1.263	Capem	Milik sendiri	
3	Komp. Bahu Mall Blok S No. 11, JL. Wolter Monginsidi.. Bahu. Manado	356	Capem	Milik sendiri	
XXVI.	Padang				
1	Jl. Belakang Olo No. 61. Padang	611	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Pondok No. 92. Padang	891	Capem	Milik sendiri	
3	Sentral Pasar Raya Ground Floor. Jl. M. Yamin. Padang Barat. Padang	105.33	Capem	Milik sendiri	
XXVII.	Yogyakarta				
1	Jl. Affandi (dh. Gejayan) CT X No. 10. Catur Tunggal. Depok. Yogyakarta	1.712.40	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Mall Jogja Tronik Jl. Brigjend Katamso 75-77. Yogyakarta	116.54	Capem	Sewa pihak ketiga	1/01/2005 s/d 01/01/2030
3	Jl. C.Simanjuntak No. 75. Yogyakarta	1.036.43	Capem	Milik sendiri	
4	Jl. Godean KM 4, Ngestihardjo, Bantul	180	Capem	Milik sendiri	
XXVIII.	Samarinda				
1	Jl. Jend. Sudirman No. 35 Samarinda - Kalimantan Timur	1.176	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Komp.Ruko Mall Lembuswana Blok D No. 1-2. Jl. S.Parman. Samarinda	491	Capem	Milik sendiri	
XXIX.	Balikpapan				
1	Panin Tower, Kompleks Grand Sudirman, Jl Jend Sudirman No 7, Balikpapan		Cabang utama		
2	Plaza Kebun Sayur No T 15, Jl. Letjend Suprapto, Balikpapan				
3	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 3 Balikpapan - Kalimantan Timur	1.138	Capem	Milik sendiri	
XXX.	Jambi				
1	Jl. Hayam Wuruk No. 143 BCD Jambi	846.61	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Komplek Wiltop Plaza. Jo. Prof. M. Yamin No. 36-37. Muara Bungo. Jambi	404	Capem	Milik sendiri	
3	Jl. Sultan Thaha Blok A. No. 32-33. Kodya. Jambi	432	Capem	Milik sendiri	
4	Jl. Lintas Sumatera KM 1 Pasar, Pasar Sarolangun, Sarolangun, Jambi	208	Capem	Milik sendiri	
5	Jl. Orang Kayo Pingai No 171, Talang Banjar, Jambi	317.52	Capem	Milik sendiri	

No	Lokasi	LB	Status Opr.	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
XXXI.	Palu				
1	Jl. Sam Ratulangi No. 82 Palu - Sulawesi Tengah	780	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Luwuk Trade Centre Kav. 12-13. Jl. DR. Sutomo. Luwuk. Banggai. Sulawesi Tengah	380	Capem	Milik sendiri	
3	Kompleks Ruko Bantaya No 4-5, Jl. Trans Sulawesi. Bantaya. Parigi. Parigi Moutong. Sulawesi Tengah.	246.88	Capem	Milik sendiri	
XXXII.	Tegal				
1	Jl. Jend. A. Yani No. 78-80. Mintaragen - Tegal	1.041	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Raya Utara No. 15. Adiwerna. Kabupaten Tegal	75	Capem	Milik sendiri	
3	Jl.Jenderal Sudirman No.94, RT 01, RW 21, Brebes, Jawa Tengah	383	Capem	Sewa	01/07/2010 s/d 30/06/2020
XXXIII.	Serang				
1	Komp. Pertokoan Serang Plaza Blok II No.1. Jl. Maulana Hasanuddin. Serang - Banten	282	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. S. A. Tirtayasa Jombang Kali. Jombang Cilegon. Banten.	383	Capem	Milik sendiri	
3	Kompleks Citra Raya Sektor 1.2. Blok L-01 No.9 R&10 R. Cikupa. Cikupa. Tangerang. Banten.	480	Capem	Milik sendiri	
XXXIV.	Purwokerto				
1	Ruko Nusantara. Jl. Jend. Sudirman No. 786 - Kranji. Purwokerto - Jawa Tengah	700	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Jend. Sudirman No. 45,. Purbalingga	310	Capem	Sewa pihak ketiga	01/01/2011 - 31/12/2020
XXXV.	Kendari				
1	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 30E. Kendari - Sulawesi Tenggara	1.08	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Batara Guru No. 60. Waju.Murhum. Bau-Bau. Sulawesi Tenggara	270	Capem	Milik sendiri	
3	Jl. Chairil Anwar No. 2 dan 4, Lamokota, Kolaka, Kolaka, Sulawesi Tenggara	380	Capem	Milik sendiri	
XXXVI.	Menara Imperium				
1	Metropolitan Kuningan Superblok Kav.1. Jl.H.R. Rasuna Said. JakSel	1.068	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Raya Pasar Minggu No. 19 B-C. Kalibata. Pancoran. Jakarta Selatan	369	Capem	Milik Sendiri	
3	Kompleks Pertokoan Menteng Prada. Blok 7E Lt.1. Jl. Pegangsaan Timur 15A. Jakarta 10320	157	Capem	Milik Sendiri	

No	Lokasi	LB	Status Opr.	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
4	Gedung Kantor Pusat Borobudur.Jl. Johar No. 3.Kec. Menteng. JakPus	234	Capem	Sewa pihak ketiga	16/09/2010 s/d 15/09/2015
5	Kompleks Rukan Buncit Mas Blok BB-7-8. Jl. Mampang Prapatan Raya. Jakarta Selatan	205	Capem	Milik sendiri	
6	Plaza Mutiara, Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav.E.1.2 No.1&2 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950	179	Capem	Milik Sendiri	
7	Jl. Tebet Timur Dalam Raya 2. Jakarta 12820	192	Capem	Milik sendiri	
8	Jl. Mampang Prapatan Raya No. 56 C. Mampang Prapatan. Jakarta Selatan	353	Capem	Milik sendiri	
9	Jl. Dr. Saharjo No. 244 C. Menteng Dalam. Tebet. Jakarta Selatan.	291	Capem	Milik sendiri	
XXXVII.	Tasikmalaya				
1	Jl. KH. Z. Mustafa 372B. Jawa Barat	634.406	Cabang Utama	Milik sendiri	
XXXVIII.	Surabaya Cendana				
1	Jl.Kombes Polisi M. Duryat 25. Surabaya 60262	3410	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Tambak Langon 15 Surabaya 60184	276	Capem	Milik sendiri	
3	Jl. R.A Kartini 218 Gresik 61122	419	Capem	Milik sendiri	
4	Jl. HOS Cokroaminoto 60 Mojokerto 61313	515	Capem	Milik sendiri	
5	Jl. Kh. Mukmin 11/B4 Sidoarjo Jawa Timur	150	Capem	Milik sendiri	
6	Jl. Panglima Sudirman 146. Tuban	1.182	Capem	Milik sendiri	
7	Rujo Taman Pondok Indah, Jl. Raya Menganti A-40. Wiyung. Surabaya.	335	Capem	Milik sendiri	
8	Jl. Ahmad Yani No. 40. Sidoarjo.	490	Capem	Milik sendiri	
9	Jl. Basuki Rahmat No. 40. Sukorejo. Lamongan. Jawa Timur	415	Capem	Milik sendiri	
10	Jl. Raya Tropodo No. 29 B. Tropodo. Sidoarjo. Jawa Timur	205	Capem	Milik sendiri	
11	Jl. KH Wahid Hasyim No 195. Jombang	174	Capem	Milik sendiri	
12	Jl. Airlangga No. 107. Desa Kauman. Mojosari. Mojokerto. Jawa Timur.	219	Capem	Milik sendiri	
13	Jl. Imam Bonjol No. 94. Kauman. Krian. Jawa Timur	1128	Capem	Milik sendiri	
XXXIX.	Banda Aceh				
1	Jl. Muh. Jam No. 1 G-H. Desa Baru. Banda Aceh	470	Cabang Utama	Milik sendiri	
XL.	Singapura				
1	149. Rochor Road #04-04. Singapore	277		Milik sendiri	
XLI.	Jayapura				
1	Jl. Sam Ratulangi No. 1. Desa Gurabesi. Jayapura	986	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Raya Abepura, Waimhorock, Abepura, Jayapura	274	Capem	Milik sendiri	

No	Lokasi	LB	Status Opr.	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
XLII.	Pangkal Pinang				
1	/Ruko Harmoni City Blok C No. 9-11. Jl. Soekarno Hatta. Bukit Intan. Pangkal Pinang. BaBel	594	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Muhidin Raya No. 168 A, Sungailiat, Bangka	203	Capem		
XLIII.	Pecenongan				
1	Jl.Pecenongan 84 Jakarta Pusat	7840	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Krekot Bunder 7 Jakarta 10710	637	Capem	Milik sendiri	
3	Jl. Pintu Besar Selatan 52 Jakarta 11110	1420	Capem	Milik sendiri	
4	Jl. Sukarjo Wirjopranoto No. 2R Sawah Besar Jakarta 10120	426	Capem	Milik sendiri	
5	Jl. Ir. Juanda III/6. Jakarta Pusat	405	Capem	Sewa pihak ketiga	01/07/2010 s/d 30/6/2015
6	Lindeteves Trade Center Ground Floor. No. RB 55-56-57, Jl Hayam Wuruk No 127, Jakarta Barat	276	Capem	Milik sendiri	
7	Jl. Pintu Besar Selatan No. 62. Jakarta Barat	437	Capem	Milik sendiri	
8	Jl. Gunung Sahari No. 60-63. Blok B4-B5 Jakarta Pusat	584	Capem	Milik sendiri	
9	Jl. Garuda No. 26-26A. Kemayoran. Jakarta Pusat	480	Capem	Milik sendiri	
10	Ruko Karang Anyar Permai Blok A No. 21.Kec. Sawah Besar. JakPus	263.3	Capem	Sewa pihak ketiga	1/12011 s/d 12/31/2020
11	Ruko Glodok Plaza Blok F No.3. Jl.Pinangsia. Kec.Taman Sari. JakBar	250	Capem	Milik sendiri	
12	Jl. P. Jayakarta No.24/4 Mangga Besar Selatan. Sawah Besar. JakPus.	324	Capem	Milik sendiri	
13	Ruko Atrium Segitiga Senen Blok F No. 32 Kec. Senen. JakPus	276	Capem	Sewa pihak ketiga	1/4/2012 s/d 31/3/2022
14	Kem Tower Lt.1 Unit A Jl.Landasan Pacu Barat Blok B No.10 Kav.No.2, Kemayoran, Jakarta Pusat	153	Capem	Milik sendiri	
15	Jl. Hayam Wuruk No. 2 K, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat	222	Capem	Milik sendiri	
16	Jl. Mangga Besar Raya No. 90 , Taman Sari, Jakarta Barat	90	Capem	Milik sendiri	
17	Jl. Lau Tze No. 109, Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat	360	Capem	Sewa pihak ketiga	1/11/2009 s/d 31/10/2019
18	Jl. Kartini Raya No. 55 E RT 001/03, Sawah Besar, Jakarta Pusat	270	Capem	Milik sendiri	
XLIV.	CBD Pluit				
1	CBD Pluit Boutique Office Blok S No.9. Jl. Pluit Selatan Raya. JakUt	1175	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Pluit Karang Timur 51-52 Jakarta	960.784	Capem	Milik sendiri	
3	Apartment Muara Indah. Menara IA. Lt.1 No.1-6. 1-7, Jl Pluit Karang Barat, Jakarta Utara 14450	484	Capem	Milik sendiri	

No	Lokasi	LB	Status Opr.	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
4	Jl. Pluit Karang Jelita I. Muara Karang Blok Z8 No. 10 dan 12.	347	Capem	Milik sendiri	
5	PT Unex Inti Indonesia Terminal III Hall D. Bandara Sukarno - Hatta. Tangerang 19120	20	K.Kas	Hak Pakai	Kerjasama untuk waktu yang tidak ditentukan
6	Jl. Pluit Sakti Blok A Kav No.1. Kec.Penjaringan. JakUt	226	Capem	Milik sendiri	
7	Megamal Pluit Blok R No. 25-26.Jl. Pluit Permai Raya. Kel. Pluit JakUt	255	Capem	Milik sendiri	
8	Ruko Manyar Blok A No. 16 .17.18. Bukit Golf Mediterania. PIK JakUt	720	Capem	Milik sendiri	
9	Komp. Taman Grisenda GE No. 42-43. Kapuk Muara. JakUt	380	Capem	Milik Sendiri	
10	Ruko Komp. Duta Mas A-3. No. 29. JakBar.	200	Capem	Milik sendiri	
11	Ruko Cordoba Blok B No. 1. 2 & 3. Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk. Kapuk Muara. Penjaringan. Jakarta Utara	750	Capem	Milik sendiri	
12	Taman Resor Mediterania Blok X-3 Kav.. C No E8i. Jl. Galeri Niaga I. Kapuk Muara. Penjaringan. JakUt	417	Capem	Milik sendiri	
13	Ruko Komp. Duta Harapan Indah Blok L No.1 - 2. Kel. Kapuk Muara. Kec. Penjaringan. Jak Ut	509	Capem	Milik sendiri	
14	Jl. Pluit Selatan I No.75 Blok D Kav No.13, Jakarta Utara	181.57	Capem	Milik sendiri	
15	Komp Ruko Villa Taman Bandara Blok N 10 No. 33,, Dadap, Kosambi, Tangerang, Banten.	139	Capem	Milik sendiri	
XLV.	Kopi				
1	Jl. Kopi 52 Jakarta 11230	2500	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl.R.E Martadinata 1 B-C. Ancol - Pademangan Jakarta Utara 14430	416	Capem	Milik sendiri	
3	Kompleks Harco Elektronik Mangga Dua Raya Blok I 5A & 5B. Jl.Manggadua Raya Jakarta Pusat 10730	110	Capem	Sewa pihak ketiga	1/12/2011 s/d 30/11/2015
4	Ruko Mangga Dua Mal No. 20. Jl. Mangga Dua Raya - Jakarta Pusat	566	Capem	Sewa pihak ketiga	1/1/2012 s/d 31/12/2015
5	Komp. Puri Deltatama Blok I/9. Jl. Bandengan Selatan No. 43. Pejagalan. JakUt	237.4	Capem	Milik sendiri	
6	Ruko Robinson No. 82. I. Jembatan Dua. JakUt	256.8	Capem	Sewa pihak ketiga	1/4/2012 s/d 31/3/2022
7	Jl. Jembatan Tiga Blok FQ No.36. Penjaringan. JakUt	306.4	Capem	Milik Sendiri	
8	Rukan Bandengan Indah. Jl. Bandengan Utara No. 80 Blok A-38. Jak Ut	251	Capem	Milik Sendiri	
9	Jl. Jembatan Dua No. 2Q. Jak Ut	120	Capem	Milik Sendiri	
10	Grand Boutique Mangga Dua Center. Jl. Mangga Dua Raya Blok C	400	Capem	Milik sendiri	

No	Lokasi	LB	Status Opr.	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
	Kav. No.2. Ancol JakUt				
11	Ruko Permata Kota Blok I No120-21Jl. Tubagus Angke 170. Kec. Grogol Petamburan. JakBar/	384	Capem	Milik sendiri	
12	Wisma Eka Jiwa Unit B No. 10. Mangga Dua. Sawah Besar. Jakarta Pusat		Capem	Sewa pihak ketiga	01/02/08 s/d 31/01/13
13	Jl. Jelambar Baru Raya No 37 B. Blok B Kav. No. 1 SEB. Grogol Petamburan. JakBar	47	Capem	Milik sendiri	
14	Jl. Lodan No. B3-B4-B5-B6. Kel. Mangga Dua Utara. Kec.Penjaringan. Jakarta Utara.	865	Capem	Milik sendiri	
15	Kompleks Mitra Bahari, Jl. Pakin Blok A Kav No.5, Jakarta Utara	300	Capem	Milik sendiri	
16	Season City Blok B No. 29 dan 30, Jl. Jembatan Besi , Latumeten, Jakarta Barat	576	Capem	Milik sendiri	
XLVI.	Ambon				
1	Jl. Diponegoro No. 20. Ambon. Maluku	880	Cabang Utama	Sewa pihak ketiga	01/12/2008 s/d 31/11/2018
XLVII.	Lhokseumawe				
1	Jl. Samudera No 8 dan 9. Banda Sakti. Lhokseumawe. NAD	624	Cabang Utama	Milik sendiri	
XLVIII	Kediri				
1	Jl. Brawijaya No. 50, Kediri, Jawa Timur	1749	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Jl. Letjend. S. Parman No 64, Oro-oro Ombo, Kartoharjo, Madiun	255.8	Capem	Milik sendiri	
XLIX.	Gading Serpong				
1	Ruko Fifth Avenue Blok A No.1-3. Gading Serpong. Tangerang	743	Capem	Milik sendiri	
2	Kompleks Ruko Malibu BSD City Sektor VII Blok B 15-16. Jl. Raya Pahlawan Seribu. BSD Tangerang	300	Capem	Milik sendiri	
3	WTC Serpong - Jl. Raya Serpong 5883. Pondok Jagung. Serpong - Tangerang	228	Capem	Milik sendiri	
4	Rukan Golden Boulevard Blok M No.3 & 5. Kec. Bumi Serpong Damai. Tangerang. Banten	338	Capem	Milik sendiri	
5	Ruko Golden Madrid Blok E No. 3.5.6 & 7. BSD City. Serpong. Tangerang	460	Capem	Milik sendiri	
6	Jl. Merdeka 140, Cimone Tangerang 15113	333.06	Capem	Milik sendiri	
7	Metropolis Town Square. Ruko Blok GM-6 No. 6-7 dan Kios Blok GA-5 No. 11-12. Kelapa Indah. Tangerang. Banten	500	Capem	Milik sendiri	
8	Jl. MH. Thamrin Raya A 7. Cikokol. Tangerang	162	Capem	Milik sendiri	

No	Lokasi	LB	Status Opr.	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
9	Jl. Sutera Niaga II No. 26. Serpong. Tangerang	221	Capem	Milik sendiri	
10	Komp. Duta Garden Square Blok C No. 53&55. Sumber Jaya. Jurumudi Baru. Tangerang	252	Capem	Milik sendiri	
11	Kompleks Ruko Bintaro Jaya. Blok C No. 6 dan 7. Sektor 9 Bintaro Pondok Aren. Tangerang 15229	257	Capem	Milik sendiri	
12	Ruko Atrium Bintaro Blok B 1. Bintaro Jaya Sektor 3A Pondok Aren. Tangerang. Banten.	180	Capem	Milik sendiri	
13	Ruko Pamulang Permai Blok SH 18/4 Pamulang. Jl.Pamulang Raya No.3. Tangerang	263	Capem	Milik sendiri	
14	Karawaci Office Park, Komp. Ruko Pinangsia Blok I No. 38-39. Lippo Karawaci. Tangerang	800	Capem	Milik sendiri	
15	Daan Mogot KM 21 Blok E1 No.26, Batu Ceper,Tangerang, Banten	360	Capem	Milik sendiri	
16	Ruko Business Park Tangerang City Blok B 8 dan 9, Jl. Jenderal Sudirman, Cikokol, Tangerang	450	Capem	Milik sendiri	
17	Ruko Jalur Sutera, Jalur Sutera Kav. 29 A No. 1, Alam Sutera, Serpong, Tangerang	0	Capem	Milik sendiri	
18	Ruko Royal Poin, Jl. Majapahit Timur No. 4, Cipondoh, Tangerang	176	Capem	Milik sendiri	
L.	A.M. Sangaji				
1	Jl. AM. Sangaji Raya No. 15.15A dan 17. Petojo Utara. Gambir. Jakarta Pusat	5720	Capem	Milik sendiri	
2	Jl. Cideng Timur 80B Petojo Selatan - Gambir Jakarta 10160	576	Capem	Milik sendiri	
3	Roxy Mas Blok E.2 No. 1 - 2. Jl.K.H.Hasyim Ashari Pusat Niaga Roxy Mas Cideng - Gambir. Jakarta 10150	783	Capem	Milik sendiri	
4	Jl. K.H. M Mansyur No. 150 - 152. Jakarta Barat	225	Capem	Sewa pihak ketiga	01/10/2012 s/d 30/9/2015
5	Wisma Lumbini - Lantai Dasar ,Jl. Tomang Raya No. 53, Jakarta Barat	278	Capem	Sewa pihak ketiga	01/01/2011 s/d 31/12/2013
6	Jl. KH. Mansyur No. 183 C. Tambora. JakBar	92	Capem	Milik sendiri	
7	Jl. Suryopranoto No.81. Petojo. JakPus	234	Capem	Milik sendiri	
8	Jl. Gajahmada No. 93. Krukut. Taman Sari. Jakarta Barat.	195	Capem	Milik sendiri	
9	Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 15 A. Petojo Utara. Gambir. Jakarta Pusat	332	Capem	Milik sendiri	
10	Kompleks Duta Merlin, Jl. Gajahmada No. 3-5 Blok B 19. Jakarta Pusat	198	Capem	Milik sendiri	
11	Jl. Dr. Muwadi I No. 35 C, Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat	239	Capem	Milik sendiri	
LI	Plaza Pasifik				

No	Lokasi	LB	Status Opr.	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
1	Kompleks Plaza Pasifik Blok B4 No. 83-85-87, Jl. Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara	1005	Cabang Utama	Milik sendiri	
2	Kompleks Pusat Perdagangan Ujung Menteng Blok A No. 22. Jl. Bekasi Raya Km. 25 A-22. Ujung Menteng. Cakung. Jakarta Timur.	239	Capem	Milik sendiri	
3	Ruko Mega Grosir Cempaka mas Blok A/ 003. Jl. Letjen Suprapto. JakPus.	375	Capem	Milik sendiri	
4	Pulogadung Trade Center. Jl. Bekasi Raya Blok B-H Kav. No. 1. Cakung. Rawa Terate. JakTim	312	Capem	Milik sendiri	
5	Graha Cempaka Mas, Jl. Letjend Suprapto dan Jl. Yos Sudarso No. C / 26, Jakarta Pusat.	297	Capem	Milik sendiri	
6	Jl. Boulevard Barat LC-7 No. 61, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara	274	Capem	Milik sendiri	
7	Jl.Sunter Paradise Raya II Blok C. 17 - 18 Jakarta Utara	585	Capem	Milik sendiri	
8	Kelapa Gading Boulevard Blok CN-2 Kav. No. 1. Kelapa Gading. Jakarta Utara	492	Capem	Milik sendiri	
9	Perumahan Gading Kirana Blok B-10 Kav.No.31. JakUt	240	Capem	Milik sendiri	
10	Jl. Danau Sunter Utara F 21 No. 3. Sunter Agung. JakUt.	225	Capem	Milik sendiri	
11	Ruko Enggano Megah Blok B No.9 E-F. Jl. Enggano. Tanjung Priok. JakUt	384	Capem	Milik sendiri	
12	Kompleks Royal Sunter, Jl. Danau Sunter Selatan Blok F Kav No. 55.Sunter Jaya. Tanjung Priok. Jakarta Utara.	330	Capem	Milik sendiri	
13	Jl. Danau Sunter Utara Blok B KAv No. 12. Tanjung Priok. Jakarta Utara	130	Capem	Milik sendiri	
14	Jl. Metro Kencana VII Blok Q No.12 & 12A, Sunter, Jakarta Utara	220	Capem	Milik sendiri	
15	Mall of Indonesia Ground Floor E-09, Jl Boulevard Barat Raya No 1, Kelapa Gadng, Jakarta Utara	26.17	Capem	Sewa pihak ketiga	6/10/2013 s/d 6/09/13
LII	Bengkulu				
1	Jl. Letjend. Suprapto No. 30, Bengkulu	669	Cabang Utama	Sewa Pihak Ketiga	1/1/11 s/d 31/12/2020
LIII	Mataram				
1	Kompleks Pertokoan Sweta Indah, Jl. Sandubaya No. 18-21, Cakranegara, Mataram 83323	2000	Cabang Utama	Milik Sendiri	
LIV	Gorontalo				
1	Jl. Nani Wartabone No. 32D, Gorontalo 96112	855.6	Cabang Utama	Milik Sendiri	

No	Lokasi	LB	Status Opr.	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
LV	Bekasi Square				
1	Bekasi Square Ruko Unit No.57-58.Kios UG 182-183. Jl. Ahmad Yani. Pekayon. Bekasi	443	Capem	Milik sendiri	
2	Jl. Jalan Raya Jatiwaringin No.335 Pondok Gede. Bekasi 17411	200	Capem	Milik Sendiri	
3	Jl. Cut Meutia 3 Bekasi 17113	120	Capem	Milik sendiri	
4	Komplek Ruko Bekasi Mas. Kav. D.2.B Jl. Jend. Ahmad Yani Bekasi 17144	303.36	Capem	Sewa pihak ketiga	01/12/2010 s/d 01/12/2020
5	Cikarang Plaza Unit B-15. Cikarang - Bekasi	200	Capem	Milik sendiri	
6	Ruko Sentra Niaga, Jl. Boulevard Hijau Blok A No.9. Taman Harapan Indah. Bekasi	180	Capem	Milik sendiri	
7	Plaza Pondok Gede Blok A No. 16-17. Jl. Raya Pondok Gede. Jatiwaringin. Pondok Gede. Bekasi. Jabar	203	Capem	Milik sendiri	
8	Celebration Boulevard Blok AA 15 No. 47. Grand Wisata. Mustika Jaya. Bekasi. Jawa Barat	390	Capem	Milik sendiri	
9	Ruko Metro Boulevard-2 Unit No. B-18. Jl. Niaga Raya. Jababeka, Bekasi	228	Capem	Milik sendiri	
10	Grand Mall Bekasi Lt Dasar I, II / Ruko B No. 60 dan Kios No. 40, Jl. Jend. Sudirman, Harapan Mulia, Bekasi	233.98	Capem	Milik sendiri	
11	Karawang Resinda Blok F No. 23, Purwadana, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat.	144	Capem	Milik sendiri	
12	Karawang Plaza No.32, Jl. Tuparev, Nagasari, Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat.	192	Capem	Milik sendiri	
13	Jl. Cut Meutiah Kav No. A II - 5a, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat	212	Capem	Milik sendiri	
14	Kompleks Ruko Kalimas Kav. No. A - 26, Margahayu, Bekasi Timur,Jawa Barat	268	Capem	Milik sendiri	
LVI	Puri Tirta				
1	Komp. Puri Kencana Blok L6 No. 88 M.N.O. Kembangan Selatan. Kembangan. Jakarta Barat	369	Capem	Milik sendiri	
2	Jl. Utan Jati. Kompleks Rukan Citra Niaga Blok A No. 33. Pegadungan. Kalideres. Jakarta Barat.	183	Capem	Milik sendiri	
3	Komp. Taman Semanan. Jl. Dharma Kencana Blok D No. 16-18. Duri Kosambi. Cengkareng. JakBar	348	Capem	Milik sendiri	
4	Dian Kasih International School. Komp. Citra Garden 5. Citra Garden City Blok H No. 1, Kalideres. Jakarta Barat	80	Capem	Sewa pihak ketiga	26/09/2008 s/d 26/09/2014

No	Lokasi	LB	Status Opr.	Kepemilikan	Jangka Waktu Sewa
5	Kompleks Perumahan Citra 2.A Blok BG-3.B Persil No. 29-30. Pegadungan. Kalideres. JakBar	214	Capem	Milik sendiri	
6	Jl. Puri Indah Raya Blok I/12A Komp. Perumahan Puri Indah Kembangan Kebon Jeruk. Jakarta Barat	180	Capem	Milik sendiri	
7	Kompleks Sentra Niaga Puri Indah Raya Blok T.3/17-18 A. Kembangan - Jakarta Barat	1060	Capem	Milik sendiri	
8	Jl.Jimbaran Blok B No. 2-3. Perumahan Daan Mogot Baru - Jakarta Barat	362	Capem	Milik sendiri	
9	Taman Palem Lestari Blok C1/19. Cengkareng Barat. JakBar	415	Capem	Milik sendiri	
10	Ruko Mutiara Taman Palem Blok D 01 No. 17 Cengkareng. Jakarta	110	Capem	Milik sendiri	
11	Jl. Peta Selatan No. 6 P. Kalideres, Jakarta Barat	216	Capem	Milik sendiri	
12	Rukan Kencana Niaga Blok D I No,2 -1. Jl. Taman Aries. Meruya Utara. Kembangan Selatan. Jakarta Barat	289	Capem	Milik sendiri	
13	Jl. Pakis Raya Komp. Perumahan Bojong Indah No. 88 O, Cengkareng, Jakarta Barat.	345	Capem	Milik sendiri	
14	Perumahan Taman Permata Buana, Jl. Pulau Bira Blok D1 Kav.No.21, Jakarta Barat	117	Capem	Milik sendiri	
15	Jl. Lingkar Luar Kamal Raya, Perum Perumnas Blok A/2, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat.	160	Capem	Milik sendiri	
16	Kompleks City Resort Residences Blok B No. 28, Cengkareng, Jakarta Barat	158	Capem	Milik sendiri	

Selain Aset Tetap berupa tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk kantor-kantor Perseroan tersebut Perseroan juga memiliki Aktiva Tetap berupa tanah dan bangunan lainnya sebagai berikut:

No	Alamat	LT (m2)	LB (m2)	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Peruntukan
1	Apartemen Pavilion unit 1905 Lt. 19 Blok 2. K.H. Mas Mansyur. Karet Tengsin	-	130	1996	750.000.000	Akan dijadikan mess karyawan
2	Komplek Puri Mas Blok A/6. Bogor	219	179	1996	500.000.000	Akan dijadikan rumah dinas
3	Tanjung Barat No. 26. Pasar Minggu	604	362	1996	707.000.000	Akan dijual
4	Jl. Setapak (Marsma Iswayudi). Balikpapan	7,103	27	Des 2002	3500000000	Kantor cabang
5	Rukan Muara Indah. Jl. Pluit Karang Barat Blok P1. P2. P3 Menara I B Lt 1 / 01-18. 19. 20	219	277	3-Mar	3.393.595.041	Akan dijual
6	Rukan Muara Indah. Jl. Pluit Karang Barat Blok P1. P2. P3 Menara I A Lt 1 / 01-16. 17	0	68	3-Mar	1.053.719.008	Akan dijual
7	Jl. Raya Perjuangan 9 A. Kebon Jeruk. Jakarta	88	347	3-Mar	2.000.000.000	Disewa

No	Alamat	LT (m2)	LB (m2)	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Peruntukan
8	Jl. Sriwijaya Kel. Rawa Bangun Kec. Taman Sari. Kotamadya Pangkal Pinang. Kep. Bangka	3,080	512	3-Mar	1.870.818.000	Kantor cabang
9	Jl. Raya Tangerang-Serang KM 17 No.44. Cikupa. Desa Talaga. Banten	45,416	3,709	3-Mar	19.856.825.150	Ruang Penyimpanan Arsip
10	Jl. Balikpapan Permai Blok H 1 No. 12 & 12 A. Balikpapan	144	288	3-Mar	1.200.000.000	Lokasi ATM
11	Jl. Sam Ratulangi No. 16 (Jl. Pierre Tendean). Manado	1,654	-	3-Mar	5.051.753.200	Dijual
12	Jl. Permata Hijau Blok E Kav 49 & 50. Grogol Utara Tanah No. 1381 & 1382	1,022	-	3-Mar	3.070.000.000	Rumah Dinas
13	Jl. Panglima Sudirman Barat. Kec. Mayangan. Kel. Jati. Probolinggo. Jawa Timur	2,1	4,41	3-Mar	2.850.000.000	Cabang Pembantu
14	Jl. Kolonel Sugiono No. 17. Jogyakarta	430	666	3-Mar	4.400.000.000	Cabang Pembantu
15	Jl. Tuparev No. 248. Karawang Wetan	1,057	-	3-Apr	300.000.000	Cabang utama
16	Jl. Bintang Metropol Blok C7 Kav. 14. Bekasi Utara	60	27	3-Apr	24.266.000	Akan Dijual
17	Kuningan Madya. Puri Imperium (B 32 03. B 32 04. B32 06)	620	1,114	3-Apr	8.798.400.000	Sewa
18	22 Apartment Pavilion Menara 2 & 4 Jl. KH Mansyur. Jakarta Pusat	-	2,707	3-Apr	59.552.443.299	Dijual & sebagian sbg Mess Karyawan
19	Apartemen Brawijaya Lt. X No. 11004. Jakarta Selatan	260	377	3-Apr	1.600.000.000	Akan Dijual
20	Apartemen Brawijaya Lt. X No. 11008. Jakarta Selatan	357	542	3-Apr	1.894.200.000	Akan Dijual
21	Jl. Ratulangi No. 15 A. Makassar. Sulawesi Selatan	2,259	8,464	Nop 2003	22.660.040.005	Kanwil
22	Jl. Gajah Mada No. 31. Jember Kidul. Kaliwates	1,442	536	Des 2003	3.989.100.000	Capem
23	Jl. Lukman Hakim. Desa Doromukti. Tuban	4,130	3000	Peb 2004	3.600.000.000	Capem
24	Panin Bintaro Jaya Sektor 7	10,01	26,604	4-Mar	28.888.888.888	Kantor Pusat
25	Taman Bintaro Jaya Blok B7/E1 - 02. Jl. Zamrud 9 Blok E Kav. No. 49 & 50. Jakarta Selatan	1,305	-	4-Apr	1.438.294.000	Perluasan Rencana Kantor Pusat
26	Jl. Raya Pondok Aren. Ciputat. Bintaro. Tangerang	3,335	-	5-Jun	5.134.000.000	
27	Kav. Permata Senayan Blok B. 2. 3. 5 & 25	1,800	-	4-Jun	12.420.000.000	Dijual
28	Ruko Permata Senayan Blok F.1. 2	165	514	4-Jun	2.110.000.000	Capem
29	Jl. Fatmawati No. 18. Jakarta	2,77	4,728	Okt 2005	27.612.000.000	Capem
30	Ruko Komp. Kelapa Gading Boulevard Blok R A-I No. 32. Jakarta Utara	228	346	Des 2005	4.500.000.000	Capem
31	Jl. Mangga Besar Raya No. 75. Jakarta Barat	817	450	7-Apr	9.551.185.000	Capem
32	Jl. Kiapang (BrigJend Katamso No. 27). Kel. Kota Bambu Selatan. Grogol. Petamburan. Jakarta Barat	385	800	Apr'08	7.500.000.000	Capem
40	Ruko di Jl. Balai Pustaka Timur Blok B No. 16. Jakarta Timur	121	324	Des'08	4.061.681.818	Capem
41	Jl. Jend. H. Amir Machmud. Cimahi	1,343	-	Apr'09	6.056.350.000	Capem

No	Alamat	LT (m2)	LB (m2)	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Peruntukan
42	Ruko di Jl. Kartini Raya No. 55E, Jakarta Pusat	78	144	Nop'09	2.895.000.000	Capem
43	Ruko Di Jl. Mangga Besar No.90, Jakarta Barat	49	252	Jan'10	2.050.000.000	Capem
44	Ruko di Kompleks Ruko Kalimas Kav. A-26, Bekasi Timur	103	234	Feb'10	1.625.000.000	Capem
45	Ruko di Kompleks Perum Taman Palem Lestari Blok L No. 32-33, Jakarta Barat	134	302	Mar'10	2.500.000.000	Capem
46	Ruko di Jl. Hayam Wuruk No. 2K, Jakarta Pusat	73	219	Mar'10	1.730.000.000	Capem
47	Jl. Muwardi I No.35C, Jakarta Barat	97	168	Mar'10	1.870.000.000	Capem
48	Ruko Di Jl. HOS Cokroaminoto, Tangerang	104,66	120	Mar'10	1.445.000.000	Capem
49	Ruko di Kompleks Ruko Bidex Blok C No. 16, BSD City	75	225	Mar'10	1.800.000.000	Capem
50	Ruko di Jl. Raden Saleh Raya Blok R1/12, Ciledug, Tangerang	83	288	Mar'10	1.245.000.000	Capem
52	Ruko di Puri Mansion unit RPOB-027, Jakarta Barat	65,71	194,78	Apr'10	2.750.000.000	Capem
53	Ruko di Jl.Tanjung Duren Utara IV Blok 1 kav 227 Jakarta Barat	104	175	Apr'10	1.990.000.000	Capem
55	Jl. Biak No. 14-B2, Jakarta Pusat	53	270	Mei'10	1.970.000.000	Capem
56	Jl. Petojo Binatu III No. 1, Jakarta Pusat	63	189	Mei'10	2.450.000.000	Capem
57	Ruko Modernland Blok CR No. 35, Tangerang	76	157	Jun'10	1.565.000.000	Capem
58	Ruko di Komp. Royal Poin, Jl. Majapahit Timur No. 4, Tangerang	98	112	Jul'10	1.175.000.000	Capem
59	Ruko di Jl. Bungur Raya No. 85 Blok A/6, Jakarta Pusat	-	-	Jul'10	1.990.000.000	Capem
60	Jl. Salemba Tengah No. 35-37A, Jakarta Pusat	70	164	Jul'10	1.795.000.000	Capem
61	Komp. Ruko Aldiron Blok C No. 3, Jl. Daan Mogot No. 119, Jakarta Barat	110	240	Jul'10	1.695.000.000	Capem
62	Ruko di Komp. Kota Wisata Blok SEA No. 16, Bogor	0	0	Aug'10	900.000.000	Capem
63	Ruko di Komp. Ruko Pinangsia blok D No. 51, Tangerang	0	0	Sept'10	1.390.000.000	KK
64	Ruko di Jl. Raya Karawaci Blok A No. 1, Tangerang	0	0	Sept'10	1.400.000.000	KK
65	Ruko di Graha Boulevard Blok KCG No. AO 6, Kelapa Gading	0	0	Sept'10	7.879.080.000	Capem
66	Citywalk MT Haryono Square, Unit A 6A-B, B-7A, Jakarta	0	0	Sept'10	3.400.000.000	Capem
67	Ruko di Jl. Raya Karawaci Blok A No. 2, Tangerang	0	0	Sept'10	1.400.000.000	KK
68	Ruko di Jl. Sultan Agung, Jember, Jawa Timur	0	0	Sept'10	2.250.000.000	Capem
69	Ruko di Jl. Sultan Iskandar Muda No. 53, Jakarta Selatan	0	0	Oct'10	3.515.000.000	Capem
70	Ruko di Kompleks Perum. Permata Taman Palem Blok A1 No. 1, Jakarta Barat	0	0	Nov'10	1.745.000.000	Capem
71	Ruko di Jl. Tanah Abang II No. 41, Jakarta Pusat	0	0	Nov'10	2.375.000.000	Capem
72	Ruko di Kompleks Citra Business Park Blok B No. 7-8, Jakarta Barat	0	0	Nov'10	2.640.000.000	Capem

No	Alamat	LT (m2)	LB (m2)	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Peruntukan
73	Ruko di Pasar Modern Mutiara Karawaci Blok D 28-29, Banten	0	0	Nov'10	1.608.461.958	KK
74	Jl. Kisamaun No. 195, Tangerang	0	0	Des'10	1.815.000.000	KK
75	Jl. Raya Rawa Bambu No. 88B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan	0	0	Des'10	2.570.000.000	Capem
76	Kios Cikarang Trade Centre (CTC) No.888-A	0	0	Mar'11	1.370.000.000	Capem
77	Jl. Pasar Senen No.11-A Jakarta Pusat	0	0	Mar'11	1.919.000.000	Capem
78	Komp.Ruko Union Blok C/10, Cikarang Selatan, Bekasi	0	0	Mar'11	1.805.000.000	Capem
79	Ruko di Jl.Letjen Suprapto No.30-C, Jakarta Pusat	0	0	May'11	2.018.975.000	Capem
80	Komplek Ruko PMP Blok A no.8, Gading Serpong, Tangerang	0	0	Mar'12	1.350.000.000	KK
81	Jl Tjilik Riwut KM 02	0	0	Jun'12	7.000.000.000	Capem
I	**BANDA ACEH**					
1	JL. HASAN DEK KELURAHAN BEURAWE KEC. KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH PROV. ACEH	100	308	Apr'11	1.550.000.000	KK
II	**BANDAR LAMPUNG**					
1	Jl. Ki Maja, Kedaton, Bandar Lampung	123	150	Mar'11	850.000.000	KK
2	Jl. Gajah Mada No. 71C dan 71D, Bandar Lampung	215	308	Jun'11	2.200.000.000	KK
3	Ruko di Jl. Teuku Umar No. 72 Kedaton,Bandar Lampung	412	765	Jul'11	1.950.000.000	KK
	BALIKPAPAN					
1	Ruko J-Square Shop House, Jl. Ruhui Rahayu Rt 052	196	300	Jun'11	2.000.000.000	KK
III	**BANJARMASIN**					
1	Jalan Transmigrasi RT 5 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Batu Licin	271	250	Mar'12	1.740.000.000	Capem
2	Jln Kuripan Rt. 33 No. 17 Banjarmasin	128	270	Jun'12	2.000.000.000	Capem
IV	**BANDUNG**					
1	Jl.Otto Iskandardinata No.82A Subang SHM No. 3705/Karanganyar	193	253	Apr'11	1.300.000.000	Capem
2	Komp Surapati Core Blok B-03,Jl.PPH Hasan Mustopa No.39 Kel.Pasirluyu Kec Cibeuying kidul Bandung	100	225	Apr'11	1.750.000.000	KK

No	Alamat	LT (m2)	LB (m2)	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Peruntukan
V	**BATAM**					
1	Jl. TPI ke Kijang, Tanjung Pinang	140	160	Okt'10	1.009.980.305	Capem
2	Ruko Komp. Perum Botania Garden Tahap III Blok A6 No. 1	108	106	Apr'11	600.000.000	KK
VI	**BOGOR**					
1	Jl. Raya Bogor Km. 31, Cimanggis, Depok	120	180	Apr'10	1.170.000.000	Capem
VII	**KENDARI**					
1	Jl.Konggoasa Kel.Dapu-Dapura Kec.Kendari Barat	107	326	Apr'11	1.515.074.427	Capem
2	Perumahan Citraland Kendari Kompleks ruko The Imperium No.2 (Crown Casino) Kendari Sulawesi Tenggara	90	240	Feb'12	1.650.000.000	Capem
3	Jalan MT.Haryono Kendari kelurahan Bende	205	310	Agt'12	1.850.000.000	Capem
VIII	**JAYAPURA**					
1	JL. RAYA SENTANI	135	167	Jan'11	1.350.000.000	Capem
2	JL. BUDI UTOMO TIMIKA	178	215	Jan'11	1.760.000.000	Capem
3	JL. BUDI UTOMO TIMIKA	180	215	Feb'11	1.760.000.000	Capem
IX	**KUTA - BALI**					
	Istana Kuta Galleria VL1.07 Blok Broadway 3 No.1 Jl.Patih Jelantik Kuta Bali	71	204	Apr'11	1.870.000.000	Capem
X	**KEDIRI**					
1	JL. PANGLIMA SUDIRMAN 45i TULUNGAGUNG.	100	220	Feb'11	1.400.000.000	Capem
2	Jl. A.Yani RT. 001 RW.07, Kepolorejo, Magetan	205	270	Mar'11	1.550.000.000	Capem
3	JL. MERDEKA NO. 28 KAV I & II BLITAR	199	270	Jun'11	1.800.000.000	Capem
4	JL. YOS SUDARSO, RUKO HARLY SQUARE BLOK D5-6, NGANJUK	136	270	Jul'11	1.300.000.000	Capem
XI	**JAMBI**					
1	Jl. Asia Kel. Tungkal IV Kota Kec. Tungkal Ilir, kab. Tanjung barat Jambi	231	254	Apr'11	2.400.000.000	Capem
2	Jl. Muradi Kel. Pasar Sungai penuh kec. Sungai Penuh	107	261	Apr'11	1.600.000.000	Capem
XII	**MAKASSAR**					
1	Jl.A.P.Pettarani	157	2740	Dec'10	2.325.000.000	KK
2	Komp.Kima Square Jl.Perintis Kemerdekaan	153	459	Dec'10	2.788.000.000	Capem

No	Alamat	LT (m2)	LB (m2)	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Peruntukan
	KM 16					
3	Jl. Jend Sudirman Komp. Ruko Butta Toa	145	203	Dec"10	2.500.000.000	Capem
4	JL. Jend Sudirman No.68	150	160	Mar"11	1.600.000.000	Capem
5	Jl.Jend.Sudirman Sorong	900	650	May'11	5.038.877.450	Capem
6	Jl. A. Mononuto Ternate	1.042	0	Agt'12	3.500.000.000	Capem
XIII	**MANADO**					
1	Pasar Segar Blok RA 7, Jl. Yos Sudarso	68	202	Des'10	2.175.000.000	KK
2	Jl. Yos Sudarso, Bitung Manado	279	1.036	Apr'11	2.500.000.000	Capem
XIV	**MALANG**					
1	Jl. Letjen Suprapto 22 Lumajang	68	144	Jan'11	787.500.000	Capem
XV	**PADANG**					
1	Jl. H. Agus Salim No. 87, Padang	2,201	268,8	2007	6.050.000.000	Capem
2	Jl. Padang By.Pass RT 003 RW.02, Kel. Lubuk Begalung Nan XX padang	688	710	Apr'11	2.400.000.000	Capem
XVI	**PALEMBANG**					
1	Jl. Jendral Urip Sumoharjjo No. 1 dan 2, kel. Kemalaraja, Kec. Baturaja Timur	218	300	Mar'11	1.500.000.000	Capem
2	Jl. Mayor Ruslan III Desa Pasar Lama, kab. Lahat	160	342	May'11	2.800.000.000	Capem
XVII	**PANGKAL PINANG**					
1	Jl. Trem No.27 Kelurahan Pasar Padi kec. Rangkui Pangkalpinang	38	159	Mey'11	1.154.202.500	Capem
2	Jl.Sekolah No.18 RT:11 RW:02 Kota Tanjungpandan Belitung	148	161	Des'10	1.550.000	Capem
XVIII	**PALU**					
1	Kompleks Pertokoan Palu Plaza, Jl. Danau Poso, Palu	240	449,5	Mei'10	2.175.000.000	KK
2	Jl. Emmy saelan Palu	341	324	Sep'11	2.772.000.000	Capem
XIX	**PEMATANG SIANTAR**					
1	Jl.Jend Ahmad Yani, Tebing Tinggi	70	70	Des'10	850.000.000	Capem
2	Jl. A.Yani, kel. Kartini, Rantau Utara, Rantau Prapat	270	270	Des'10	2.250.000.000	Capem
3	Jl. Sisingamangaraja No. 77, Tanjung Balai	141	0	Apr'11	1.400.000.000	Capem
XX	**PEKAN BARU**					

No	Alamat	LT (m2)	LB (m2)	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Peruntukan
1	Jl. Jend A.Yani, Bengkalis	204	0	Mar'11	1.500.000.000	Capem
2	Kel. Tj. Sawit, kampar	0	0	Mar'11	1.600.000.000	Capem
3	Jl. Raya Perawang Km. 6	125	240	May'11	1.400.000.000	Capem
XXI	**PONTIANAK**					
1	Jl. A. Yani (Paris) Pontianak	236	377	jan'11	5.000.000.000	KK
2	Jl. A. Yani Kab. Sanggau	249	500	Mar'11	3.750.000.000	Capem
3	Jl. Sutan Syarif Abdurrahman	288	488	Apr'11	3.500.000.000	KK
4	Jl. Suprapto No. 44 Ketapang	277	330	Des'11	2.650.000.000	Capem
XXII	**PURWOKERTO**					
1	Jl.A.Yani, Sidakarya, Cilacap Selatan	338	338	Feb'10	1.265.000.000	Capem
XXIII	**SEMARANG**					
1	JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.148 SEMARANG KEL.CABEAN KEC.SEMARANG BARAT	572	193	Des'10	3.737.000.000	Capem
2	JL. Industri VI Kav. 2 Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Kodya Semarang	138	173	Sep'10	980.000.000	Capem
3	Jl. Jendral Sudirman Kel. Proyonanggan Kec. Batang, Kab. Batang HM 420	370	170	Feb'11	2.100.000.000	Capem
4	Jl. A.Yani No 159 Wonosobo RT 02 RW 12 Kel. Wonosobo Barat, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo	341	370	Jun'11	2.500.000.000	Capem
5	Jl. Dr. Wahidin No. 65 Rembang	160	480	Jul'11	1.200.000.000	Capem
6	Jl. Veteran No. 67, Semarang Selatan	2,855	0	2004	5.905.400.000	Training Center
8	Jl. Diponegoro No. 1, Semarang Selatan	22,337	4,120	2004	20.863.242.000	Training Center
XXIV	**SOLO**					
1	Jl.Raya Sukowati Kp.Beloran RT/RW:002/013 Sragen Kulon, Sragen	238	400	Dec'10	2.500.000.000	Capem
2	Ruko A-19 Solo Center Point Jl.Slamet Riyadi No. 373 Solo	75	300	Mar'11	2.240.000.000	KK
XXV	**SURABAYA CENDANA**					
1	Ruko Manyar Garden Regency No. 31, Jl. Nginden Semolowaru 101, Surabaya	111	205	Peb'10	1.050.000.000	Capem
2	Pusat Grosir Surabaya Lt. 4 Blok C 5 Stand 5-6, Jl. Dupak 1	27	27	Mar'10	1.155.000.000	Capem
3	Jl.Putro Agung Blok C1 dan C2, Surabaya	80	240	Jun'10	2.400.000.000	Capem
4	Jl.S.Parman No.64, Madiun, Jawa Timur	175,5	324	Mei'10	1.240.000.000	Capem

No	Alamat	LT (m2)	LB (m2)	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Peruntukan
XXVI	**SUKABUMI**					
1	Jl. Pasar Baru Kavling 7-8 Kel:Muka Kec:Cianjur Kabupaten Cianjur	276	552	Jan'11	1.400.000.000	Capem
2	Jl. Siliwangi RT 03/RW 13, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Cibadak	495	750	Feb'11	2.500.000.000	Capem
XXVII	**SURABAYA COKLAT**					
1	Ruko Gateway Blok B8, Jl. Raya Waru, Sidoarjo	75	225	Peb '10	1.322.400.000	Capem
2	Jl.Raya Gubeng No.68-C, Surabaya	105	252	Mei'10	2.500.000.000	Capem
3	Ruko Rungkut Megar raya Blok E-1, Jl. Kali Rungkut No. 5 Surabaya	75	370	Apr'11	750.000.000	KK
4	Ruko jl. A.Yani Banyuwangi	197	197	Apr'11	1.600.000.000	Capem
5	Ruko Pakuwon Town Square, Jl. Pakuwon Boulevard IV/AA1-15, Surabaya	85	177	Jun'11	1.600.000.000	KK
XXVIII	**TASIKMALAYA**					
1	Jl.Jend.Sudirman No.15 Ciamis	413	447	Feb'11	1.490.000.000	Capem
XXIX	**GARUT**					
1	Jl. Kopo Permai II Blok 30 A/17 Bandung	181	135	Des'07	300.000.000	Dijual
2	Jl. Patriot No. 1 Tarogong Garut	539	127	Des'07	350.000.000	Dijual

Total nilai buku aktiva tetap berupa tanah dan bangunan lainnya yang dimiliki Perseroan diatas adalah Rp 448,88 miliar. Selain Aktiva Tetap berupa tanah dan Bangunan tersebut di atas Perseroan juga memiliki inventaris lainnya, antara lain: 1023 (seribu dua puluh tiga) unit Mobil, 214 (dua ratus empat belas) unit sepeda motor dan inventaris lainnya berupa mesin-mesin ATM, Komputer, Lemari Besi, AC dan lain-lain .

Hampir seluruh bangunan kantor Perseroan beserta properti/inventarisnya yang berada di lokasi kantor tersebut telah diasuransikan pada perusahaan asuransi PT Panin Insurance Tbk (hubungan istimewa) dan PT Asuransi Multi Arta Guna (hubungan istimewa) masing-masing untuk jangka waktu 1 tahun dan diperpanjang sesuai jatuh tempo masing-masing polis.

Perseroan pada saat ini juga telah mengoperasikan sebanyak 819 buah ATM *(Automated Teller Machine).* Serta tergabung dalam jaringan ATM ALTO dan ATM BERSAMA, sehingga nasabah Perseroan juga dapat memperoleh layanan melalui lebih dari 25.000 buah ATM jaringan ALTO dan ATM BERSAMA di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk jaringan internasional, Perseroan juga tergabung dalam jaringan ATM Mastercard Cirrus dan debit Maestro diseluruh dunia.

Berikut ini adalah tabel perkembangan jumlah kantor-kantor cabang yang dimiliki oleh Perseroan selama 5 tahun terakhir:

Keterangan	31 Agustus 2012	31 Desember				
		2011	2010	2009	2008	2007
Kantor Pusat	1	1	1	1	1	1
Kantor Cabang	54	52	48	46	43	39
Kantor Cabang Pembantu	388	385	370	336	314	256
Kantor Kas	6	6	6	5	5	5
Kantor Cabang Luar Negeri	1	1	1	1	1	1
Kantor Perwakilan Luar Negeri	1	1	1	1	1	1
Sub Total	451	446	427	390	365	303
ATM	819	730	583	519	459	352
Total	1.270	1.176	1.010	909	824	655

Berikut ini akan diuraikan lebih rinci mengenai kegiatan usaha utama Perseroan yang terbagi atas kegiatan penghimpunan dana, penempatan atau penyaluran dana dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan imbal jasa *(fee based income)*. Disamping itu akan diuraikan pula mengenai kegiatan pendukung operasional, seperti kegiatan pemasaran dan teknologi.

3. PENGHIMPUNAN DANA

Kegiatan penghimpunan dana masyarakat terutama diarahkan pada sektor retail, yaitu melalui rekening Tabungan dan Giro (Rupiah dan Valuta Asing) dan Tabungan dari perorangan dan perusahaan-perusahaan serta Deposito Berjangka (Rupiah dan Valuta Asing) perusahaan menengah ke atas, perusahaan asuransi dan yayasan-yayasan dana pensiun. Selain dari dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat, Perseroan juga memperoleh dana tambahan melalui penerbitan Obligasi, pinjaman antar bank dan pinjaman berjangka dari bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan dalam negeri dan luar negeri.

Dalam penghimpunan dana masyarakat, Perseroan menekankan pada kualitas jasa dan produk yang mampu memberikan kemudahan dan kepuasan nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Likuiditas Perseroan selalu dijaga pada tingkat yang aman, dimana sebagian dari dana masyarakat tersebut selain disisihkan dalam bentuk cadangan primer sesuai ketentuan Bank Indonesia perihal simpanan wajib (*reserve requirement*) sekurang-kurangnya 8% untuk Rupiah dan mata uang asing, juga ditempatkan dalam bentuk surat berharga jangka pendek seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) serta Obligasi Pemerintah yang likuid di pasar.

Jumlah dana yang berhasil dihimpun Perseroan dan tingkat bunga rata-rata untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL KOMPOSISI DANA YANG DIHIMPUN

(dalam jutaan Rupiah)

Dana Pihak Ketiga	30 Juni 2012		2011		2010		2009		2008		2007	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Giro	15.572.153	13,85	16.108.374	15,71	14.768.795	16,58	12.084.495	18,91	8.753.429	16,31	6.406.832	16,47
Entitas Anak												
Tabungan	40.697.496	36,20	31.801.385	31,02	22.424.183	25,17	13.616.201	21,30	8.068.447	15,03	7.550.631	19,42
Deposito Berjangka												
- Pihak Ketiga	36.190.708	32,20	37.548.463	36,62	37.765.815	42,38	30.281.897	47,37	28.566.669	53,21	17.268.554	44,41
- Pihak Berelasi	326.888	0,29	290.310	0,28	320.927	0,36	251.894	0,39	655.134	1.22	95.116	0,24
Entitas Anak												
Sertifikat Deposito	-		-		-		-		-		-	
Jumlah DPK	92.787.245	82,54	85.748.532	83,63	75.279.720	84,49	56.234.487	87,97	46.043.679	85,77	31.321.133	80,54
Pinjaman yang Diterima	3.269.645	2,91	2.985.155	2,91	3.582.389	4,02	1.631.918	2,55	3.191.603	5,94	2.141.497	5,51
Simpanan dari Bank Lain	8.581.204	7,63	5.315.229	5,19	3.567.326	4,00	2.259.800	3,54	1.334.578	2,49	2.283.248	5,87
Surat Berharga yang Diterbitkan + Obligasi Subordinasi	7.774.598	6,92	8.483.315	8,27	6.675.953	7,49	3.795.616	5,94	3.112.866	5,80	3.142.752	8,08
Jumlah Dana	112.412.692	100,00	102.532.231	100,00	89.105.388	100,00	63.921.821	100,00	53.682.726	100,00	38.888.630	100,00
Rata-rata Suku Bunga												
- Dalam Rupiah		4,16%		4,71%		5,23%		6,50%		6,98%		5,78%
- Dalam Valas		0,36%		0,35%		0,58%		1,32%		2,24%		2,06%

Adapun komposisi deposito berjangka berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut :

TABEL KOMPOSISI DEPOSITO BERJANGKA BERDASARKAN JATUH WAKTU

Jangka Waktu Deposito	30 Juni 2012		2011		2010		2009		2008		2007	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1 bulan	25.627.954	70,18	26.861.023	70,99	24.096.618	63,27	19.322.517	63,28	21.982.796	75,22	14.742.717	84,90
3 bulan	5.986.313	16,39	6.621.925	17,50	10.281.029	26,99	5.778.255	18,92	3.546.506	12,14	1.670.547	9,62
6 bulan	2.924.667	8,01	2.431.803	6,43	2.410.459	6,33	3.821.572	12,52	1.594.176	5,46	439.042	2,53
12 bulan	1.967.258	5,39	1.907.477	5,04	1.284.903	3,37	1.591.745	5,21	2.079.323	7,12	433.774	2,50
> 12 bulan	11.404	0,03	16.545	0,04	13.733	0,04	19.702	0,07	19.002	0,06	77.590	0,45
Jumlah	36.517.596	100,00	37.838.773	100,00	38.086.742	100,00	30.533.791	100,00	29.221.803	100,00	17.363.670	100,00

Dana pihak ketiga merupakan sumber utama dana Perseroan dan sampai dengan akhir tahun 2011 deposito berjangka merupakan sumber dana terbesar yang berhasil dihimpun oleh Perseroan, akan tetapi sampai dengan periode 30 Juni 2012, sumber dana yang berasal dari tabungan mengambil alih posisi deposito berjangka sebagai sumber dana terbesar selama ini dimana tabungan menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat pada Perseroan.

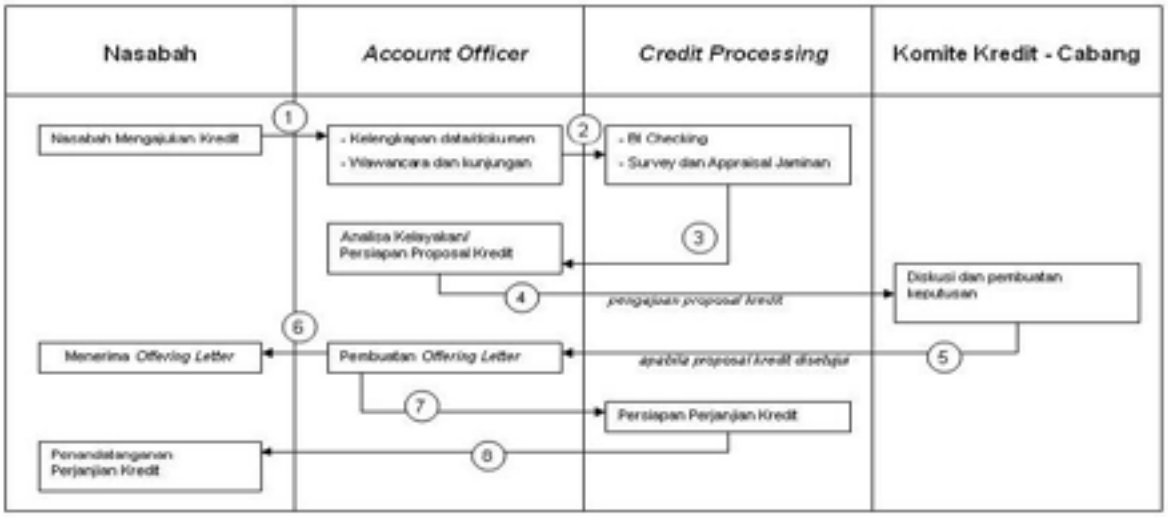
Dari tabel komposisi deposito berjangka di atas terlihat bahwa jangka waktu deposito yang dihimpun terkonsentrasi pada jangka waktu satu bulan. Hal ini mencerminkan tanggapan nasabah deposito atas fluktuasi suku bunga jangka pendek yang mengacu kepada tingkat suku bunga SBI dan SBM (suku bunga maksimum penjaminan) yang ditetapkan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setiap bulannya.

Penurunan simpanan yang terjadi pada periode 30 Juni 2012 dan akhir tahun 2011 adalah semata-mata sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk menurunkan biaya dana dengan berupaya untuk memperbaiki komposisi pendanaan dengan sumber dana yang relatif lebih murah. Selain mendorong pertumbuhan Giro dan Tabungan, strategi yang ditempuh adalah menurunkan Deposito Berjangka dengan menetapkan suku bunga deposito yang lebih rendah dari suku bunga Penjaminan oleh LPS. Pada 30 Juni 2012, deposito turun 3,49% atau Rp 1.321,18 miliar dari Rp 37.838,77 miliar pada akhir tahun 2011 menjadi Rp 36.517,60 miliar. Sedangkan pada akhir tahun 2011 mengalami sedikit penurunan sebesar Rp 247,97 miliar atau turun 0,65% dari Rp 38.086,74 miliar pada akhir tahun 2010 menjadi Rp 37.838,77 miliar pada akhir tahun 2011.

4. PENEMPATAN ATAU PENYALURAN DANA

Sejalan dengan tumbuhnya kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Perseroan, terjadi peningkatan pula pada penempatan atau penyaluran dana yang menghasilkan pendapatan bunga atau aset produktif. Dana-dana tersebut sebagian besar disalurkan dalam bentuk kredit. Disamping itu untuk menjaga posisi likuiditas jangka pendek. Perseroan juga melakukan penempatan dana pada bank lain dalam bentuk *interbank call money* serta penempatan dana dalam bentuk pembelian surat-surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Obligasi Pemerintah maupun obligasi yang diterbitkan oleh korporasi.

Skema Proses Pemberian Kredit kepada Nasabah :



Kredit yang diberikan dibedakan menjadi kredit langsung yang terdiri dari kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi, sedangkan kredit lainnya adalah kredit tidak langsung.

Fasilitas kredit modal kerja meliputi fasilitas kredit untuk kebutuhan modal kerja dan berjangka waktu pendek yang berbasis *revolving* serta fasilitas pembiayaan modal kerja lainnya. Fasilitas modal kerja yang sering dipakai di Indonesia adalah fasilitas Rekening Koran dan kredit modal kerja *revolving* yang memiliki jangka waktu 12 bulan serta dapat diperpanjang. Fasilitas pembiayaan modal kerja lainnya adalah pembiayaan perdagangan dalam bentuk pembukaan L/C.

Fasilitas kredit investasi atau kredit berjangka adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi dengan jangka waktu menengah hingga panjang yang bersifat *non revolving*.

Fasilitas kredit konsumen adalah kredit untuk membiayai kebutuhan yang bersifat konsumsi seperti kepemilikan rumah dan kepemilikan mobil. Kepemilikan rumah diberikan kepada nasabah perorangan dengan jangka waktu sampai dengan 20 tahun. Sedangkan kredit kepemilikan mobil adalah pembiayaan mobil baru dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun dan untuk mobil bekas sesuai dengan syarat yang ditentukan.

Fasilitas kredit komersial adalah kredit untuk membiayai usaha kecil dan menengah dengan jangka waktu sampai 10 tahun.

Fasilitas kredit yang tidak langsung meliputi pembukaan L/C dan pemberian bank garansi. Atas pemberian fasilitas ini, Perseroan mendapatkan *fee* dari nasabah dan menanggung kewajiban bersyarat.

4.2. Jenis-Jenis Nasabah

Perseroan mengkategorikan para nasabah yang menerima kredit berdasarkan segmen pasar, yaitu nasabah korporasi, nasabah komersial dan nasabah konsumen. Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi kredit yang diberikan Perseroan per 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007.

	30 Juni 2012		2011		2010		2009		2008		2007	
Outstanding	**o/s**	**%**	**o/s**	**%**	**o/s**	**%**	**o/s**	**%**	**o/s**	**%**	**o/s**	**%**
Konsumen (KPR, KPM, Kartu Kredit dan Konsumen lainnya)	23.164.806	27,69	19.510.232	27,45	15.949.796	27,86	11.656.664	28,35	10.156.081	27,80	7.669.063	26,47
Komersial (s.d. 50 Miliar)	33.174.261	39.65	28.249.438	39,74	21.809.408	38,10	15.970.257	38,84	14.084.346	38,56	11.635.421	40,16
Korporasi (> 50 Miliar)	27.323.287	32,66	23.320.132	32,81	19.486.815	34,04	13.494.501	32,81	12.286.157	33,64	9.668.177	33,37
Total	**83.662.354**	**100,00**	**71.079.802**	**100,00**	**57.246.019**	**100,00**	**41.121.422**	**100,00**	**36.526.584**	**100,00**	**28.972.661**	**100,00**

4.2.1. Kredit Kepada Nasabah Korporasi

Jumlah kredit nasabah korporasi dalam neraca per 30 Juni 2012 adalah sekitar 32,66% dari portofolio kredit dalam neraca Perseroan. Perseroan selama ini lebih mengkhususkan diri dalam pembiayaan di sektor perdagangan, infrastruktur, industri dan jasa. Nasabah korporasi pada dasarnya terdiri dari perusahaan yang memiliki fasilitas kredit lebih dari Rp50 miliar.

4.2.2. Kredit Kepada Nasabah Komersial

Jumlah kredit kepada segmen ini sekitar 39,65% dari portofolio kredit Perseroan per 30 Juni 2012. Segmen nasabah ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan, distribusi dan industri kecil yang memiliki fasilitas kredit hingga Rp50 miliar. Segmen ini tumbuh tertinggi diantara pertumbuhan pemberian kredit kepada segmen lainnya, terutama dengan perluasan *network* distribusi dan pengembangan produk, seperti Smart Panin dan KSG Panin.

4.2.3. Kredit Kepada Nasabah Konsumen

Jumlah kredit untuk segmen ini adalah sebesar 27,69% dari portofolio kredit dalam negeri Perseroan per 30 Juni 2012. Kegiatan penyaluran kredit untuk segmen ini difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Mobil (KPM) dan Kartu Kredit.

4.2.4. Konsentrasi Industri

Portofolio kredit Perseroan beraneka ragam dan terdiri dari berbagai sektor dan kelompok usaha. Kebijakan Manajemen adalah untuk menjaga diversifikasi portofolio kredit dengan baik sehingga konsentrasi yang berlebihan pada suatu kelompok nasabah tertentu atau sektor industri dapat dihindari. Namun demikian, portofolio kredit Perseroan lebih terfokus pada tiga sektor usaha, yaitu sektor jasa, industri dan perdagangan. Selain dunia usaha, Perseroan juga aktif dalam pembiayaan kredit konsumen, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Mobil (KPM).

Berikut adalah tabel posisi kredit yang diberikan Perseroan per sektor (sesuai kategori Bank Indonesia) per 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009,2008 dan 2007.

Tabel Penyaluran Kredit Berdasarkan Sektor Usaha

Sektor	30 Juni 2012		2011		2010		2009		2008		2007	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jasa	20.949.740	25,04	18.042.891	25,39	13.284.122	23,20	8.976.226	21,83	7.385.654	20,22	4.602.570	15,89
Industri	12.738.272	15,22	10.670.135	15,01	9.907.653	17,31	5.209.385	12,67	5.129.486	14,04	4.984.741	17,20
Perdagangan	19.189.487	22,94	16.576.672	23,32	12.821.438	22,40	9.606.496	23,36	8.177.708	22,39	7.335.062	25,32
Konstruksi	11.016.574	13,17	7.635.126	10,74	5.715.697	9,98	1.351.069	3,29	1.161.219	3,18	1.055.171	3,64
Lain-lain*	19.768.281	23,63	18.154.978	25,54	15.517.109	27,11	15.978.246	38,85	14.672.516	40,17	10.995.117	37,95
Jumlah	83.662.354	100,00	71.079.802	100,00	57.246.019	100,00	41.121.422	100,00	36.526.583	100,00	28.972.661	100,00

**) Lain-lain termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Mobil (KPM)*

4.2.5. Struktur Jatuh Tempo Kredit

Sejalan dengan strategi Perseroan untuk fokus kepada sektor ritel dan konsumen, porsi KPR dan KPM yang umumnya berjangka waktu menengah menunjukkan peningkatan. Selama 3 tahun terakhir ini kredit jangka menengah yaitu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun yang berhasil disalurkan oleh Perseroan memberikan kontribusi lebih dari 50% dari jumlah kredit yang diberikan.

Berikut ini adalah tabel pemberian kredit berdasarkan jangka waktu:

(dalam jutaan Rupiah)

Jangka Waktu	30 Juni 2012	2011	2010	2009	2008	2007
Kurang dari 1 Tahun	17.798.363	15.496.718	14.774.187	13.285.702	11.771.983	9.922.946
1-5 Tahun	35.267.297	29.156.877	19.858.869	13.872.719	12.040.286	9.682.706
Lebih dari 5 Tahun	30.596.694	26.426.207	22.612.963	13.963.001	12.714.314	9.367.009
Jumlah	83.662.354	71.079.802	57.246.019	41.121.422	36.526.583	28.972.661

4.2.6. Penetapan Tingkat Bunga Kredit

Penetapan tingkat suku bunga kredit merupakan tanggung jawab ALCO. Tingkat suku bunga kredit ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi biaya perolehan dana, target biaya operasi, keuntungan yang diinginkan, risiko kredit serta suku bunga kredit bank-bank pesaing.

Tingkat suku bunga ditentukan dengan memperhitungkan risiko kredit secara menyeluruh, sehingga tingkat suku bunga yang dibebankan mencerminkan risiko implisit masing-masing debitur. Dengan memperhitungkan hal-hal tersebut, Perseroan tidak membedakan penentuan tingkat suku bunga kredit antara pihak terafiliasi maupun tidak terafiliasi.

Kredit yang diberikan Perseroan mempunyai tingkat bunga tetap dan tingkat bunga mengambang. Tingkat bunga Tetap diberlakukan untuk produk Kredit Pemilikan Mobil (KPM) dan 1 tahun pertama Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kredit-kredit lainnya umumnya mempunyai tingkat bunga mengambang. Pembebanan bunga dilakukan setiap bulan dan Perseroan memiliki opsi untuk meninjau tingkat bunga per debitur setiap saat. ALCO melakukan perubahan tingkat bunga sesuai dengan perkembangan industri perbankan. ALCO beranggotakan para direksi dan kepala divisi terkait.

4.2.7. Kebijakan Perkreditan

Melalui kebijakan kreditnya, Perseroan berusaha menjaga kualitas aset produktif melalui proses analisis kredit yang mengacu pada prinsip kehati-hatian, pemantauan secara periodik, kebijakan diversifikasi portofolio, kecukupan agunan kredit dan pengendalian internal. Untuk melindungi kemungkinan terjadinya kerugian atas kredit yang diberikan, kebijakan Perseroan mensyaratkan agunan yang mencukupi baik yang berupa agunan yang dapat dikuasai (seperti tanah, bangunan atau aset tetap), maupun agunan yang tidak dapat dikuasai (seperti benda bergerak, piutang dan benda tidak terwujud) sebagai agunan tambahan.

4.2.8. Persetujuan Kredit

Proses kredit dimulai dengan pengumpulan data, verifikasi, analisa data keuangan, penilaian risiko. Jaminan, pembuatan proyeksi keuangan, menentukan kebutuhan kredit sampai pada proses persetujuan kredit. Setiap kredit diputus oleh Komite Kredit yang setidak-tidaknya terdiri dari 3 (tiga) orang yang masing-masing berdiri sendiri dalam memberikan pendapatnya. Setiap cabang melalui Komite Kredit Cabang-nya mempunyai batasan wewenang untuk pemberian kredit dan untuk permintaan yang melewati batas wewenang yang ditentukan maka permintaan tersebut harus mendapat persetujuan dari Komite Kredit Pusat.

Masing-masing kantor cabang baik di dalam maupun di luar negeri memiliki batas kewenangan yang berbeda-beda untuk memberikan persetujuan kredit. Batas kewenangan tersebut ditentukan oleh Komite Kredit Pusat sesuai dengan kebutuhan. Dalam menetapkan nilai agunan. Perseroan menggunakan sistem *Cash Equivalent Value* (CEV) atau nilai agunan pada saat dicairkan. CEV diperoleh dari perkalian nilai taksasi agunan dengan *Cash Equivalent Factor* (CEF) dari masing-masing jenis agunan. Nilai taksasi suatu agunan ditentukan setelah mengevaluasi data dari perusahaan penilai, data Pemerintah, harga pasar yang berlaku dan pengalaman Perseroan sendiri.

Demi menjaga kestabilan pendapatan, Perseroan memberikan pertimbangan yang seksama dan berhati-hati sebelum menutup suatu kredit. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang diberikan adalah antara lain berdasarkan : (1) kelayakan usaha (yang diperoleh melalui hasil survei lapangan terhadap kegiatan usaha nasabah) untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban dan pembayaran cicilan dan bunga, (2) kondisi sektor industri yang bersangkutan, termasuk tingkat persaingan, prospek usaha serta peraturan-peraturan yang mungkin dapat membatasi kegiatan usaha dalam industri tersebut, (3) kondisi aset yang dijadikan jaminan dan (4) karakter dan pengalaman nasabah dalam melakukan pengelolaan usahanya.

4.2.9. Penyisihan Penghapusbukuan Kredit

Berikut ini adalah tabel komponen penyisihan penghapusbukuan kredit per 30 Juni 2012, 31 Desember 2011,2010, 2009, 2008 dan 2007.

(dalam jutaan Rupiah)

Penyisihan kerugian Kredit	30 Juni 2012	2011	2010	2009	2008	2007
Saldo Awal	2.000.491	1.563.457	1.154.324	1.244.127	682.106*	1.251.614
Penambahan karena akuisisi entitas anak	-	-	-	-	-	-
Selisih penyisihan pada penerapan awal PSAK 55	-	-	(289.089)	-	-	-
Penyisihan periode berjalan	340.869	912.235	1.186.051	862.317	412.047	(26.449)
Akrual bunga pada piutang yang mengalami penurunan nilai	(41.871)	(107.566)	(26.901)	-	-	-
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	-	-	-	250.778	294.302	185.371
Penghapusbukuan kredit	(25.779)	(369.027)	(462.874)	(1.159.444)	(223.953)	(794.740)
Reklasifikasi dari penempatan pada bank lain	-	-	19.165	-	-	-
Selisih kurs	7.820	1.392	(17.219)	(43.454)	79.625	65.981
Saldo akhir	2.281.530	2.000.491	1.563.457	1.154.324	1.244.127	681.777

**) Terdapat penambahan sebesar Rp 329 juta karena akuisisi entitas anak*

Kerugian Penurunan Nilai dan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Sejak 1 Januari 2010

Pada setiap tanggal pelaporan Bank dan entitas anak mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual atau pinjaman yang diberikan dan piutang mengalami penurunan nilai.

Sebagaimana diijinkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009, untuk tahun 2010, Bank menerapkan ketentuan transisi penurunan nilai atas kredit secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Sebelum 1 Januari 2010

Penentuan kualitas aset dan penyisihan penghapusan aset mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan perubahannya, Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009.

Penilaian kualitas dan penyisihan penghapusan dilakukan terhadap aset produktif dan aset non produktif.

Aset Produktif

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, tagihan derivatif, kredit, piutang/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, tagihan anjak piutang, efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, investasi neto sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen, tagihan akseptasi, penyertaan saham termasuk komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administrative dan fasilitas kredit yang belum digunakan.

Penyisihan penghapusan aset produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi berdasarkan penelaahan terhadap kualitas masing-masing aset produktif, komitmen dan kontinjensi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Berdasarkan keputusan Bank Indonesia di atas, aset produktif dan estimasi komitmen dan kontinjensi diklasifikasikan dalam 5 (lima) kategori yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Aset Non-produktif

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, Bank diwajibkan membentuk penyisihan penghapusan aset non produktif (meliputi agunan yang diambil alih, property terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense account*).

Penyisihan penghapusan aset non produktif berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi atas upaya penyelesaian masing-masing aset non-produktif dilakukan pada akhir periode. Berdasarkan keputusan Bank Indonesia di atas, aset non produktif diklasifikasikan dalam empat kategori yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Penyisihan Penghapusan Aset

Penyisihan penghapusan aset produktif dan aset non produktif berupa:

• Cadangan umum untuk aset produktif minimum sebesar 1% dari aset produktif yang memiliki kualitas lancar.

• Cadangan khusus untuk aset produktif dan non produktif, kecuali untuk kualitas dalam perhatian khusus hanya berlaku untuk aset produktif, dengan besarnya persentase penyisihan penghapusan sebagai berikut:

Klasifikasi	Persentase PPAP
Lancar	Minimum 1,00%
Dalam Perhatian Khusus	Minimum 5,00%
Kurang Lancar	Minimum 15,00%
Diragukan	Minimum 50,00%
Macet	100,00 %

Persentase penyisihan penghapusan di atas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin dengan agunan tunai.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan penempatan pada Bank Indonesia (BI Intervensi) tidak dibentuk penyisihan penghapusan.

Aset dihapusbukukan dari penyisihan penghapusan pada saat manajemen berpendapat bahwa secara operasional debitur sudah tidak mampu membayar dan/atau sulit untuk ditagih. Penerimaan kembali aset yang telah dihapuskan dicatat sebagai penambahan penyisihan penghapusan yang bersangkutan selama periode berjalan.

Estimasi kerugian untuk komitmen dan kontinjensi yang dibentuk diakui sebagai beban dan liabilitas dalam akun "Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi".

Sesuai dengan Surat Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP tanggal 23 Desember 2011, Bank tidak diwajibkan lagi membentuk penyisihan penghapusan untuk aset non-produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, namun pada setiap akhir periode pelaporan Bank tetap harus menilai apakah terdapat indikasi aset non-produktif mengalami penurunan nilai dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan untuk transaksi rekening administrative, Bank membentuk provisi atas rekening administrative jika Bank memiliki kewajiban kini yang dapat diestimasi secara andal dan besar kemungkinan harus diselesaikan Bank dengan mengeluarkan sumber daya.

Perubahan penentuan penyisihan kerugian penurunan nilai dan pembentukan provisi di atas merupakan perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun-tahun sebelumnya, kecuali untuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih yang diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan karena dampak dari perubahan tersebut tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian tahun-tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah rincian pembentukan penyisihan aset produktif yang dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia tersebut atas saldo aset produktif Perseroan tanggal 30 Juni 2012.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Total Aset Produktif	124.117.136
Aset Produktif yang diklasifikasikan	4.789.594
Cadangan yang wajib dibentuk	2.490.476
Cadangan yang telah dibentuk per 30 Juni 2012	2.490.476
Kelebihan cadangan yang dibentuk	-

Berikut ini adalah tingkat kolektibilitas kredit per 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008, dan 2007:

Uraian	30 Juni 2012		31-Des									
			2011		2010		2009		2008		2007	
	Rp juta	%	Rp juta	Rp juta	%	Rp juta	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%
Lancar	78.997.101	94,42	66.754.705	93,91	53.014.079	92,61	36.926.198	89,80	31.927.243	84,73	26.472.628	91,37
Dalam perhatian khusus	1.994.519	2,38	1.875.216	2,64	1.803.071	3,15	2.896.693	7,04	3.014.190	7,30	1.613.650	5,57
Kurang Lancar	142.497	0,17	113.621	0,16	633.172	1,11	368.469	0,90	200.526	1,80	62.895	0,22
Diragukan	480.425	0,58	98.260	0,14	1.215.917	2,12	693.414	1,69	182.754	1,67	147.285	0,51
Macet	2.047.812	2,45	2.238.000	3,15	579.780	1,01	236.648	0,57	1.201.870	4,50	676.203	2,33
Jumlah Kredit	83.662.354	100,00	71.079.802	100,00	57.246.019	100,00	41.121.422	100,00	36.526.583	100,00	28.972.661	100,00
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2.281.530)		(2.000.491)		(1.563.457)		(1.154.324)		(1.244.127)		(681.777)	
Jumlah Kredit-Bersih	81.380.824		69.079.311		55.682.562		39.967.098		35.282.456		28.290.884	

Berikut ini disajikan tabel yang merinci aset produktif netto Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007:

TABEL KOMPOSISI ASET PRODUKTIF – NETTO

Aset Produktif	30 Juni 2012		2011		2010		2009		2008		2007	
	Jumlah	%	Jumlah	Jumlah	%	Jumlah	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Giro pada Bank Lain	617.745	0,51	1.185.222	1,06	868.754	0,88	857.136	1,21	1.364.522	2.36	320.848	0,70
Penempatan pada Bank Lain	9.450.117	7,77	15.968.557	14,32	16.989.076	17,26	8.107.083	11,43	5.293.561	9.14	3.056.019	6,68
Efek-efek	16.635.433	13,68	15.537.775	13,93	20.687.701	21,02	19.086.471	26,90	12.948.494	22.35	11.348.813	24,81
Tagihan Derivatif	8.839	0,01	3.316	0,00	4.936	0,01	3.122	0,00	110.268	0,19	17.938	0,04
Kredit	81.380.824	66,91	69.079.311	61,94	55.682.562	56,58	39.967.098	56,32	35.282.456	60,90	28.290.884	61,86
Tagihan anjak piutang	1.044.310	0,86	1.078.015	0,97	567.094	0,58	270.345	0,38	258.590	0,44	101.879	0,22
Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	5.789.023	4,76	2.798.161	2,51	-	-	8.000	0,01	127.010	0,22	382.927	0,84
Investasi Neto Sewa Pembiayaan	1.419.557	1,16	1.152.711	1,03	926.382	0,94	864.914	1,22	878.882	1,52	855.004	1,87
Piutang Pembiayaan Konsumen	3.696.266	3,04	3.454.100	3,10	1.905.263	1,94	1.070.007	1,53	821.096	1,41	376.588	0,82
Tagihan Akseptasi	1.155.133	0,95	848.825	0,76	503.849	0,51	511.736	0,72	682.967	1,18	884.433	1,94
Penyertaan dalam bentuk saham	429.413	0,35	419.529	0,38	276.925	0,28	203.627	0,29	169.068	0,29	100.287	0,22
Jumlah	**121.626.660**	**100,00**	**111.525.522**	**100,00**	**98.412.542**	**100,00**	**70.949.539**	**100,00**	**57.936.914**	**100,00**	**45.735.620**	**100,00**

Berikut ini disajikan tabel yang merinci aset produktif bruto Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007.

TABEL KOMPOSISI ASET PRODUKTIF – BRUTO

Aset Produktif	30 Juni 2012		2011		2010		2009		2008		2007	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Giro pada Bank Lain	617.746	0,50	1.185.224	1,04	868.756	0,87	865.791	1,20	1.378.634	2,32	324.068	0,70
Penempatan pada Bank Lain	9.450.117	7,61	15.969.057	14,05	16.989.676	16,98	8.185.363	11,32	5.333.810	8,98	3.081.998	6,62
Efek-efek	16.797.651	13,53	15.596.526	13,73	20.698.319	20,69	19.124.787	26,45	12.983.292	21,87	11.393.520	24,47
Tagihan Derivatif	8.839	0,01	3.316	0,00	4.936	0,01	3.154	0,00	111.382	0,19	18.120	0,04
Kredit	83.662.354	67,41	71.079.802	62,55	57.246.019	57,23	41.121.422	56,87	36.526.583	61,52	28.972.661	62,24
Tagihan Anjak Piutang	1.044.480	0,84	1.078.345	0,95	569.215	0,57	285.582	0,39	265.257	0,45	101.879	0,22
Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	5.789.023	4,66	2.798.161	2,46	-	-	8.000	0,01	127.606	0,21	386.855	0,83
Investasi Neto Sewa Pembiayaan	1.427.527	1,15	1.156.765	1,02	941.388	0,94	892.988	1,23	909.629	1,53	875.470	1,88
Piutang Pembiayaan Konsumen	3.734.228	3,01	3.495.274	3,08	1.933.382	1,93	1.094.128	1,51	838.661	1,41	394.758	0,85
Tagihan Akseptasi	1.155.133	0,93	848.825	0,75	503.849	0,50	516.905	0,72	722.167	1,22	893.367	1,92
Penyertaan dalam bentuk saham	430.038	0,35	420.154	0,37	277.550	0,28	215.423	0,30	179.132	0,30	108.409	0,23
Jumlah	**124.117.136**	**100,00**	**113.631.449**	**100,00**	**100.033.090**	**100,00**	**72.313.543**	**100,00**	**59.376.153**	**100,00**	**46.551.105**	**100,00**

4.2.10. Strategi Perbaikan Kualitas Kredit

Dalam mengatasi kredit bermasalah, manajemen berupaya menangani secara khusus agar kredit bermasalah tersebut tidak mempengaruhi kinerja Perseroan. Untuk itu Perseroan telah membentuk bagian kerja tersendiri yaitu Satuan Tugas Khusus (STK) dan *Special Asset Management* (SAM) yang menangani penyelesaian kredit bermasalah mulai dari kantor pusat hingga tingkat cabang. Di samping itu perusahaan juga menyisihkan cadangan aset produktif sesuai dengan jumlah yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. Berikut antara lain beberapa upaya yang diambil manajemen dalam rangka perbaikan kualitas kredit bermasalah:

1. Mengambil alih jaminan terhadap debitur yang memiliki kemampuan berusaha dan tidak dapat membayar kewajibannya kepada bank. Pelaksanaan penyitaan jaminan dilakukan oleh bagian Satuan Tugas Khusus Pusat/Cabang (STKP/C) yang telah dibentuk oleh Perseroan khusus untuk menangani masalah di atas.

2. Melakukan upaya Litigasi untuk debitur bermasalah yang perlu diselesaikan melalui pengadilan.

3. Melakukan tindakan-tindakan:
   i. Restructuring
   ii. Rescheduling
   iii. Reconditioning
   iv. Memberikan kemudahan kepada Debitur eksportir dalam melakukan transaksi yang menggunakan jasa bank, misalnya penentuan *margin deposit* untuk pembukaan *Letter of Credit* (L/C) atau Bank Garansi dibawah ketentuan yang berlaku.

Tindakan ini hanya diberikan kepada Debitur yang dipandang oleh Perseroan bahwa usaha yang dijalankan masih layak untuk dibiayai.

5. KEBIJAKAN PENDANAAN

Dalam kegiatan operasinya Perseroan membutuhkan likuiditas yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi baik pemberian kredit, penanaman dalam surat-surat berharga, transaksi antar bank, pembayaran bunga dan lain-lain. Sebagian dari investasi tersebut merupakan investasi jangka panjang, seperti pemberian kredit kepada sektor infrastruktur. Kredit Pemilikan Rumah dan kredit investasi lainnya.

Sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi tersebut sebagian besar berasal dari Giro, Tabungan serta dari Deposito Berjangka yang sebagian besar berjangka waktu pendek, yaitu 1 bulan dan 3 bulan.

Penerbitan obligasi bertujuan untuk memperbaiki komposisi sumber pendanaan jangka panjang dan mengurangi *mismatch* atau ketidak-sesuaian jumlah aset jangka panjang dengan sumber dana jangka panjang dalam rangka pengendalian risiko likuiditas dan risiko suku bunga. Obligasi-obligasi yang diterbitkan Perseroan memiliki periode jatuh tempo yang berbeda-beda, agar tidak terlalu membebani arus kas Perseroan.

Dalam rangka pengelolaan likuiditas, manajemen Perseroan juga menetapkan kebijakan yang mengharuskan tersedianya *Secondary Reserve* berupa penempatan dalam Surat-surat Berharga dan SBI dalam jumlah yang memadai. *Secondary Reserve* bersifat sangat likuid dan karenanya biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang diperlukan sewaktu-waktu. Untuk pembayaran pokok hutang pada saat jatuh tempo akan dilakukan dengan dana yang berasal dari pelunasan SBI atau penjualan Surat Berharga yang dimiliki.

6. PENDAPATAN IMBAL JASA (*FEE BASED INCOME*)

Perseroan menyadari bahwa pendapatan bunga bersih di masa mendatang akan mengalami koreksi yang cukup berarti sebagai akibat langsung dari ketatnya persaingan, oleh sebab itu Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kegiatan yang menghasilkan pendapatan non-bunga atau imbal jasa (*fee based income*).

Berikut diuraikan beberapa kegiatan usaha Perseroan yang menghasilkan pendapatan imbal jasa:

6.1. Treasury

Divisi *Treasury* selain bertanggung jawab dalam pengelolaan dana atau likuiditas bank, juga menyediakan jasa pengembangan transaksi valuta asing, khususnya kepada nasabah yang sering melakukan transaksi keuangan luar negeri dan menyediakan pula fasilitas pengadaan transaksi pasar uang, seperti jual beli surat berharga berupa Obligasi dan instrumen-instrumen *Fixed Income* lainnya. Jenis transaksi valuta asing yang ditawarkan antara lain dalam bentuk *Bank Note*, *Spot, Swap* dan *Forward*.

Produk-produk *treasury* disediakan untuk kepentingan nasabah terutama digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang melakukan *hedging* maupun perdagangan (*trading*). Mengingat sifat produk *treasury* yang sangat rumit dan memiliki risiko yang tinggi, Perseroan senantiasa menetapkan pembatasan dan pengawasan yang ketat. Setiap produk yang ditransaksikan harus mendapat persetujuan dari Komite Kredit. Demikian pula dengan nasabah yang akan melakukan transaksi, mereka harus terlebih dahulu mendapat fasilitas atas transaksi tersebut dari Komite Kredit. Untuk memperoleh fasilitas, nasabah juga diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian yang dibuat secara khusus.

6.2. Trade Finance

Untuk membantu kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan perusahaan-perusahaan dalam negeri. Perseroan secara aktif berpartisipasi dalam penyediaan pembiayaan perdagangan luar negeri, terutama dalam bentuk *Letter of Credit* (L/C).

6.3. Jasa-jasa Perbankan Lainnya

Perseroan juga menyediakan berbagai jasa untuk memperlancar arus pembayaran nasabah dengan didukung oleh jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain: *Cash Management*, Jasa Kiriman Uang (dalam dan luar negeri), Inkaso/*Collection*, Jual Beli *Traveller Cheque*, *Bank Draft*, Pembayaran Pajak, Rekening Listrik dan Telepon. Untuk penitipan barang berharga milik nasabah, Perseroan menyediakan jasa *Safe Deposit Box* yang terjamin keamanannya.

7. PEMASARAN DAN OPERASIONAL

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa kunci keberhasilan perusahaan yang bergerak dalam industri perbankan dengan iklim persaingan yang ketat dewasa ini dan di masa mendatang terletak pada profesionalisme dan dedikasi dari seluruh jajaran karyawan, mulai dari *front office*, *back office* hingga tingkat manajemen pengambil keputusan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah (marketing oriented). Selain itu, menetapkan strategi pemasaran yang tepat dan terpadu sangatlah penting untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar dalam industri perbankan Indonesia.

Pemasaran produk kredit telah mendukung pencapaian pangsa pasar kredit Perseroan per Agustus 2012, berdasarkan data Bank Indonesia, sekitar 3,44% atau lebih tinggi dari periode sama tahun sebelumnya yang sekitar 3,11%. Adapun pangsa pasar DPK Bank tercatat sebesar 3,26%, atau di atas tahun sebelumnya yang 3,10%. Pemasaran produk-produk Bank dilakukan melalui sekitar 450 kantor di hamper seluruh provinsi di Indonesia (2 kantor di luar negeri) dengan jaringan ATM sekitar 850 unit. Selain itu, saluran distribusi pemasaran juga mencakup Small Medium and Retail (Smart) Centre yang berjumlah sekitar 117 unit, 37 KPM Center, dan 20 KPR Center.

Berdasarkan lapangan usaha, lima sektor yang menjadi pasar aktual terbesar bagi kredit Perseroan adalah sektor Rumah Tangga (22,58%), sektor Perdagangan Besar dan Eceran (22,30%), sektor Perantara Keuangan (13,02%), sektor Industri Pengolahan (11,50%), dan sektor Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan (8,54%). Sedangkan menurut tiga jenis segmen kredit, porsi Kredit Komersial merupakan yang terbesar yakni 41% dari total Kredit, sementara porsi Kredit Korporasi dan Kredit Konsumer relatif sama masing-masing 29% dan 30%. Adapun porsi kredit ke segmen UMKM sekitar 38% dari total kredit Perseroan . Secara geografis, kredit Perseroan sebesar 60% disalurkan di provinsi DKI Jakarta, 8% di Jawa Timur, 5% di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan serta masing-masing 3% di Sumatera Utara, Riau dan Jawa Tengah serta sisanya di provinsi-provinsi lain.

Dari sisi pendanaan, pemasaran produk telah berusaha menyasar ke banyak segmen nasabah melalui produk-produk seperti *Tabungan Panin*, *Tabungan Junior* untuk anak-anak, *Tabungan Rencana* untuk perencanaan pendidikan anak, pernikahan, atau pension; *Tabungan Bisnis* bagi pengusaha, *Simpanan Pan Dollar* dan *Tabunganku* untuk masyarakat umum serta produk giro untuk pebisnis yang menyediakan pilihan mata uang yang lengkap, dan juga deposito berjangka. Strategi pemasaran tersebut berhasil meningkatkan porsi CASA (Tabungan dan Giro) menjadi lebih dari 50% dari total dana pihak ketiga (DPK). Secara geografis, sebanyak 45% DPK dihimpun dari wilayah DKI Jakarta.

Dengan penguatan infrastruktur dan pengembangan kualitas SDM tersebut, diharapkan bisa menjadi fondasi yang kokoh menuju perbaikan layanan dan peningkatan kepuasan nasabah, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi kinerja keuangan Perseroan . Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan beragam produk ritel-konsumer pun terus dilakukan dan disinergikan dengan strategi pemasaran yang efektif, termasuk melalui cross-selling antar produk

Untuk meningkatkan kualitas SDM dan organisasi secara keseluruhan, Bagian HRD sebagai partner unit bisnis menyusun strategi jangka panjang yang diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan melalui program rekrutmen, pendidikan dan pelatihan karyawan, pengembangan organisasi, serta pengukuran kinerja karyawan.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengawasan dan memperkuat sales force dan sales distribution yang berkembang pesat, Perseroan merekrut sejumlah lulusan perguruan tinggi terbaik untuk didik secara khusus melalui program terpadu berupa Internal Audit Officer Program (IAO), Account Officer Development Program (AOP) yang terdiri dari AO Commercial dan AO KPR, serta Personal Bankers Development Program (PBDP) untuk melatih tenaga pemasaran produk pendanaan Perseroan . Perseroan juga telah menyiapkan Cash Management Executive (CME), menambah unit-unit kerja dan saluran distribusi khusus seperti KPR Center dan KPM Center di kantor cabang Selain itu, Perseroan juga memberikan kesempatan pada para karyawannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan yang bersifat eksternal.

8. TINGKAT KESEHATAN

Bank Indonesia senantiasa mendorong terciptanya iklim perbankan yang sehat dengan memonitor setiap perkembangan bank dan mewajibkan setiap bank untuk melaporkan posisi tingkat kesehatan setiap enam bulan sebagaimana diatur dalam PBI No 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan SE BI no 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Perhitungan tingkat kesehatan ini mencakup aspek-aspek : Profil Risiko, Good Corporate Governance, Rentabilitas dan Permodalan.

Dalam menjaga tingkat kesehatannya Perseroan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatannya usahanya dengan berpedoman ketentuan yang digariskan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan tingkat kesehatan dari Bank Indonesia yang dilakukan secara *self assessment*, berturut-turut tingkat kesehatan Perseroan tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, masing-masing memperoleh nilai komposit 1 berturut-turut tingkat kesehatan Perseroan tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007 masing-masing memperoleh nilai komposit 2.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Untuk menghindari pemberian kredit secara terkonsentrasi kepada satu Debitur atau kelompok peminjam tertentu, Bank Indonesia mengatur mengenai pembatasan persentase pemberian kredit kepada satu pihak atau satu kelompok terhadap total modal yang dimiliki bank.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 dan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/16/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000, BMPK kepada pihak yang terkait dengan bank ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal bank dan kepada pihak yang tidak terkait setinggi-tingginya 20% dari modal Bank.

Ketentuan tersebut kemudian dirubah melalui Peraturan Bank Indonesia No 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dimana BMPK terhadap pihak terkait setinggi-tingginya 10% dari modal Bank. Untuk BMPK kepada 1 (satu) peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank dan BMPK kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank.

Berikut adalah rasio pemberian kredit terhadap modal Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007.

Keterangan		30 Juni 2012	2011	2010	2009	2008	2007
Pihak terkait	Ketentuan BI	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	Rasio BMPK Perseroan	3,10%	4,28%	7,75%	6,96%	2,85%	9,57%
Pihak tidak terkait	Ketentuan BI	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	Rasio BMPK Perseroan	19,66%	11,73%	16,35%	15,78%	23,66%	11,40%

Giro Wajib Minimum (GWM)

Sebagai bagian dari strategi pengelolaan likuiditas Perbankan dan sekaligus sebagai instrumen pengendalian moneter, Bank Indonesia mewajibkan setiap bank di Indonesia untuk menjaga posisi Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah di Bank Indonesia sebesar : GWM Primer 8% dari jumlah dana masyarakat yang dihimpun dan kewajiban kepada pihak ketiga lainnya, GWM Sekunder 2,5% dari jumlah dana masyarakat yang dihimpun dan kewajiban kepada pihak ketiga lainnya dan GWM LDR sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LDR bank dan LDR target dengan memperhatikan selisih antara KPMM bank dan KPMM insentif. Sedangkan GWM Valas ditetapkan sebesar 8%. Ketentuan ini

telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir diatur dalam Peraturan Bank Indonesia no 13/10/PBI/2011 untuk GWM valas dan no 12/19/PBI/2010 untuk GWM rupiah. Berdasarkan ketentuan tersebut besarnya GWM bagi setiap bank dibedakan berdasarkan 2 kriteria utama yaitu:

i. besarnya jumlah Dana Pihak Ketiga yang dihimpun
ii. besarnya rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) bank yang bersangkutan.

Berikut adalah tingkat GWM Perseroan dalam Rupiah pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008, dan 2007.

Keterangan	30 Juni 2012	2011	2010	2009	2008	2007
Ketentuan BI	8%	8%	8%	5%	5%	7%
GWM Perseroan	8,07%	8,01%	8,11%	5,02%	5,02%	7,14%

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.10/15/PBI/2008, bank diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8,00% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan Modal Inti sebesar 5% dari ATMR. Sedangkan peraturan untuk penghitungan ATMR market risk diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/13/PBI/2007. Berdasarkan Peraturan ini, bank yang memiliki total asset 10 trilyun atau lebih, bank devisa yang memiliki posisi surat berharga dan atau posisi transaksi derivatif dalam *Trading Book* sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau lebih, dan bank bukan Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif suku bunga dalam *Trading Book* sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib memperhitungkan risiko pasar dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Adapun peraturan untuk penghitungan ATMR Kredit risk dan penghitungan ATMR market risk adalah berturut turut SE No. 9/33/DPNP di update dengan SE No. 14/21/DPNP serta SE No. 11/3/DPNP.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dihitung dengan cara membagi modal dengan ATMR. Pengertian modal menurut Peraturan Bank Indonesia ini meliputi Modal Inti (Tier I) dan Modal Pelengkap (Tier II). Bank yang telah memperhitungkan risiko pasar dalam perhitungan CAR dapat pula memperhitungkan Modal Pelengkap Tambahan (Tier III). Besarnya Modal Pelengkap hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah Modal Inti.

ATMR terdiri dari aset neraca dan beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontijensi yang diberikan bobot sesuai kadar risiko. Bobot risiko untuk masing-masing aset ditentukan oleh Bank Indonesia.

Apabila CAR suatu bank lebih rendah 8,00%, maka Bank Indonesia dapat meminta pemegang saham bank untuk menyuntikkan dana hingga kebutuhan CAR minimum terpenuhi. Jika berdasarkan evaluasi Bank Indonesia, CAR suatu Bank Umum berada di bawah 8,00%, jumlah GWM dalam Rupiah kurang dari 8,00% atau mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar bank dapat dikategorikan sebagai Bank dalam Pengawasan Khusus. Terhadap Bank yang termasuk dalam kategori Bank Indonesia dapat mengambil tindakan antara lain dengan:

i. Bank dilarang untuk mendistribusikan modal;
ii. Bank dilarang untuk melakukan pembayaran atas pinjaman;
iii. Bank dilarang melakukan transaksi dengan dengan pihak terafiliasi atau pihak lain yang ditentukan oleh Bank Indonesia, kecuali telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia;
iv. Bank diharuskan untuk memberikan laporan atas perubahan kepemilikan saham kepada Bank Indonesia;
v. Bank dilarang untuk menjual aset atau meningkatkan komitmen dan kontijensi tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali antara lain Sertifikat Bank Indonesia, giro pada Bank Indonesia, tagihan antar bank dan Surat Utang Pemerintah.

Adapun CAR Perseroan setelah memperhitungkan risiko pasar pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

Keterangan	30 Juni 2012	2011	2010	2009	2008	2007
CAR – Termasuk Risiko Pasar	16,59	17,45	16,65	21,53	20,31	21,58
CAR – Tanpa Risiko Pasar	16,66	17,53	16,66	21,68	20,65	23,34
CAR – menurut ketentuan BI	8,00	8,00	8,00	5,00	5,00	7,00

Posisi CAR yang cukup tinggi dan berada diatas ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8% membuktikan bahwa Perseroan mempunyai dukungan permodalan yang memadai untuk pengembangan kegiatan usahanya.

Rasio Likuiditas / Rasio antara Pinjaman dengan Dana Pihak Ketiga (LDR)

Dalam menjalankan operasinya Perseroan mengharapkan peningkatan kredit yang bersifat realistik dan konservatif, untuk mengantisipasi agar tingkat LDR (*Loan to Deposit Ratio*) tetap dalam kriteria sehat sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010, Bank Indonesia menentukan posisi LDR pada kisaran batas bawah 78% dan batas atas 100%.

Tabel berikut menggambarkan Rasio Pinjaman terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)/Rasio Likuiditas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007:

(dalam persentase)

Keterangan	30 Juni 2012	2011	2010	2009	2008	2007
LDR	87,83	80,36	74,22	73,28	78,93	92,36

Berikut kriteria penetapan peringkat LDR :

- Peringkat 1: 50 < Rasio ≤ 80%, mencerminkan bahwa Bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.
- Peringkat 2: 80% < Rasio < 85%, mencerminkan bahwa bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan namun bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin.
- Peringkat 3: 85% < Rasio < 95%, mencerminkan bahwa bank tergolong cukup baik namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif.
- Peringkat 4: 95% < Rasio < 100%, mencerminkan bahwa bank tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.
- Peringkat 5: Rasio ≥ 100%, mencerminkan bahwa bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

Non Performing Loans (NPL)

Perseroan berkewajiban untuk menjaga rasio kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet terhadap total aktiva produktif (*Non Performing Loans*) selalu dibawah 5%. Berikut adalah tabel posisi *Non Performing Loans* (NPL) - Bersih Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal per 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007:

(dalam persentase)

Keterangan	30 Juni 2012	2011	2010	2009	2008	2007
NPL – Bersih	0,74	0,92	2,68	1,60	2,15	1,76
NPL – Gross	3,30	3,56	4,37	3,16	4,34	3,06
NPL menurut ketentuan BI	maksimum 5%	maksimum 5%	maksimum 5%	maksimum 5%	maksimum 5%	maksimum 5%

Rasio-rasio Rentabilitas

Berikut ini adalah rasio-rasio rentabilitas Perseroan untuk tahun per 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007:

(dalam persentase)

Keterangan[1)]	30 Juni 2012	2011	2010	2009	2008	2007
Laba sebelum pajak penghasilan / rata-rata jumlah aset	2,13	2,02	1,76	1,75	1,75	3,14
Laba bersih / rata-rata jumlah ekuitas	16,31	14,63	11,62	11,03	10,16	13,98
Pendapatan operasional bersih / rata-rata jumlah aset produktif gross	1,30	2,46	2,15	2,13	2,00	3,62
Biaya operasional / pendapatan operasional	77,12	80,26	83,49	84,74	84,56	73,74

Catatan:
1) Laba sampai dengan Juni 2012 tidak disetahunkan.Rasio-rasio Juni 2012 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Peringkat Bank

Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 mewajibkan bank-bank untuk mendasarkan usaha mereka pada prinsip kehati-hatian dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan peringkat bank mereka dan untuk melakukan penilaian sendiri atas peringkat bank setiap semester. Peringkat bank adalah peringkat kualitatif terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi keadaan atau pelaksanaan bank dengan peringkat kuantitatif dan atau kualitatif atas faktor-faktor berikut:

- permodalan;
- *good corporate governance*;
- risiko; dan
- pendapatan.

Peringkat komposit ditetapkan berdasarkan penilaian atas masing-masing faktor di atas. Terdapat lima peringkat komposit:

- peringkat komposit 1, mencerminkan bahwa bank dalam kondisi sangat sehat dan mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya;
- peringkat komposit 2, mencerminkan bahwa bank dalam kondisi sehat dan mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya;
- peringkat komposit 3, mencerminkan bahwa bank dalam kondisi cukup sehat dan mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya;
- peringkat komposit 4, mencerminkan bahwa bank dalam kondisi kurang sehat dan kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya; dan
- peringkat komposit 5, mencerminkan bahwa bank dalam kondisi tidak sehat dan diyakini tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Berdasarkan perhitungan tingkat kesehatan dari Bank Indonesia yang dilakukan secara *self assessment*, berturut-turut tingkat kesehatan Perseroan tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, masing-masing memperoleh nilai komposit 1 berturut-turut tingkat kesehatan Perseroan tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008 dan 2007 masing-masing memperoleh nilai komposit 2.

9. TEKNOLOGI

Kebutuhan akan teknologi informasi terkini telah menjadi keniscayaan dalam insitusi perbankan, termasuk bagi Perseroan. Jumlah nasabah yang kian bertambah dan lokasinya yang kian tersebar menuntut kemudahan dan kenyamanan yang sama dalam melakukan transaksi perbankan. Pengembangan teknologi informasi juga dilakukan untuk membantu kelancaran menyelesaikan pekerjaan secara efisien. Sejalan dengan perkembangan usaha, maka kebutuhan terhadap teknologi informasi pun terus meningkat. Oleh karenanya, perlu dilakukan proses penyesuaian antara pengembangan teknologi informasi dengan kebutuhan bisnis. Perseroan secara berkelanjutan melakukan edukasi atas pemahaman teknologi informasi terkait kebutuhan bisnis dan melakukan review terhadap rencana kerja bisnis secara akurat dan terarah, sehingga dapat diformulasikan spesifikasi teknis kebutuhan bisnisnya secara benar.

Salah satu capaian penting Perseroan adalah selesainya implementasi *core banking* and *teller system* di seluruh cabang. Implementasi yang diinisiasi sejak akhir tahun 2010 tersebut meliputi penggunaan dua sistem yakni *Signature* versi 9 yang merupakan sistem komputerisasi perbankan yang canggih saat ini, menggantikan *Integrated Core Banking System* (ICBS) versi 9501. Di samping itu, juga diterapkan *CBS Teller* menggantikan *PS Teller* yang sudah dipakai sejak 1995. *Signature* v9 diimplementasikan sekaligus secara *bankwide* (strategi *big bang*), adapun *CBS Teller* melalui strategi *roll out* per Kantor Cabang Utama atau per Wilayah

Sesuai dengan misi Perseroan sebagai Bank Ritel dan Bisnis terkemuka yaitu menyediakan produk jasa yang inovatif dan bernilai tambah, serta untuk memenuhi komitmen Perseroan dalam rangka meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada nasabah, kegiatan utama dalam bidang teknologi informasi diarahkan pada peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan jaringan kantor dan pertambahan penggunaan aplikasi. Selain itu, dilakukan penambahan fungsi kontrol pada aplikasi dan *version* control untuk pemeliharaan dan penerapan aplikasi baru sehingga memenuhi standar industri dalam *system development life cycle*. Otomatisasi fungsi-fungsi rutin guna meningkatkan efisiensi kerja juga ditingkatkan. Untuk pelayanan kepada nasabah, telah dilakukan penambahan jenis-jenis fasilitas pembayaran yang dapat memudahkan nasabah melakukan pembayaran kewajiban rutin, pembelian tiket perjalanan, serta fasilitas entertainment.

Pengembangan teknologi informasi tersebut bagi operasional Bank telah membantu meningkatkan fungsi kontrol atas transaksi dan pekerjaan yang dilakukan oleh pengguna. Sedangkan terhadap pelayanan nasabah adalah terjadinya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan.

Secara khusus, prakarsa yang diambil bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas dan kualitas layanan nasabah, menyempurnakan sistem informasi manajemen dan mendukung proses manajemen risiko yang kompleks dan rumit.

Dengan terus-menerus menyempurnakan infrastruktur teknologi informasinya, Perseroan dapat lebih melaju dengan peningkatan layanan dan saluran distribusi berbasis teknologi untuk perluasan cabang dan jaringan ATM-nya, serta untuk menghasilkan fleksibilitas dalam pengembangan produk, seperti layanan *cash management,* kartu kredit dan *internet banking* serta yang mendukung aplikasi *internet banking*.

Dalam mengembangkan jalur distribusi, selain melalui peningkatan jaringan kantor cabang, Perseroan juga mengembangkan saluran distribusi berbasis teknologi informasi melalui *electronic banking*. Selain mengembangkan jaringan ATM sendiri yang kini mencapai hamper 819 unit, Perseroan juga telah melakukan kerjasama dengan jaringan ATM ALTO dan ATM BERSAMA sehingga nasabah Perseroan dapat melakukan transaksi melalui lebih dari 25.000 ATM yang bertanda ATM BERSAMA dan ALTO yang tersebar di seluruh Indonesia.

Perseroan juga telah mengembangkan dan membakukan fungsionalitas dan fitur transaksi yang terkait dengan layanan ATM Panin, *Call Centre* dan GSM *Mobile Banking*, dan Internet Bankin, sehingga memberikan keleluasan dan kemudahan bertransaksi bagi nasabah secara terpadu dalam layanan Panin One Access.

Dalam menerapkan program penanggulangan bencana (*disaster recovery plan*) dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadi gangguan pada sistem utama, Perseroan memiliki sistem cadangan (*hot back up system*) yang berlokasi diluar Kantor Pusat Perseroan. Dengan sistem ini Bank tetap dapat beroperasi pada saat terjadinya krisis atau gangguan pada sistem utamanya, ditambah dengan sistem *back up* yang melindungi sistem inti (*core system*).

10. ASURANSI

Perseroan Perseroan telah mengasuransikan secara memadai seluruh kekayaannya, termasuk bangunan, kendaraan, inventaris kantor, mesin ATM dan uang tunai terhadap kebakaran dan musibah umum lainnya. Perseroan mengasuransikan sebagian besar asetnya pada PT Panin Insurance Tbk., yang merupakan pihak terafiliasi dan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk., yang merupakan anak perusahaan. Penutupan asuransi dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diperpanjang sesuai dengan jatuh tempo masing-masing polis, dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.

Berikut adalah daftar aset yang diasuransikan per tanggal 31 September 2012:

A. Kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai/digunakan perseroan dan diasuransikan.

Penanggung	Obyek yang Dipertanggungkan	Nilai Pertanggungan
PT Panin Insurance Tbk	214 Unit Sepeda Motor	Rp 866.475.000
	1023 Unit Mobil	Rp 122.711.200.000

B. Gedung yang dimiliki/dikuasai/digunakan perseroan dan diasuransikan.

Penanggung	Obyek yang Dipertanggungkan	Nilai Pertanggungan
PT Panin Insurance Tbk	675 Unit Gedung	Rp 2.222.099.348.152
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	2 Unit Gedung	Rp 60.438.000.000

C. Inventaris yang dimiliki/dikuasai/digunakan perseroan.

Penanggung	Obyek yang Dipertanggungkan	Nilai Pertanggungan
PT Panin Insurance Tbk	824 Lokasi Inventaris	Rp1.350.004.432.809
PT Asuransi MAG	2 Lokasi Inventaris	Rp1.729.144.924

D. *Cash in safe, cash in cashier box dan cash in transit*.

Penanggung	Obyek yang Dipertanggungkan	Nilai Pertanggungan
PT Panin Insurance Tbk	443 *Cash in Safe*	Rp1.437.760.000.000
	Rp444 *Cash in Cashier Box*	Rp259.300.000.000
	Rp188 *Cash in Transit*	Rp291.900.000.000

E. Mesin ATM & Uang di Mesin ATM

Penanggung	Obyek yang Dipertanggungkan	Nilai Pertanggungan
PT Panin Insurance Tbk	790 Unit Mesin ATM	USD 10.270.000
	790 Lokasi Uang di Mesin ATM	Rp258.150.000.000

Perseroan telah memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran seluruh premi asuransi sesuai dengan nilai pertanggungan tersebut di atas. Asuransi yang dimiliki Perseroan memiliki nilai pertanggungan yang mencukupi untuk mengganti aset yang diasuransikan dan menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

11. PROSPEK USAHA

Dengan kekuatan fundamental dan struktur permodalan yang dimiliki, Perseroan menetapkan sasaran jangka menengah untuk menjadi Bank Ritel dan Bisnis yang memberikan andil dalam melayani kepentingan konsumen dan dunia usaha Indonesia. Perseroan telah mengidentifikasikan bahwa sektor perbankan ritel tetap memiliki prospek yang baik untuk pengembangan usaha di masa depan dengan memperhatikan karakteristiknya yang aman dan menguntungkan. Dengan jumlah usaha kecil yang sangat besar, potensi pasar sektor ini sangat luas dan akan terus berkembang.

Potensi pasar perbankan ritel di Indonesia masih sangat menjanjikan. Terkait hal itu, Perseroan terus mengembangkan beragam produk dengan mengutamakan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan nasabah. Dengan peningkatan sistem teknologi informasi, Perseroan terus berupaya menekan beban operasional sehingga lebih kompetitif dan tingkat keuntungan bisa optimal. Selain itu, Perseroan juga terus memperkaya fitur-fitur pada produk ritel-konsumer, baik untuk pendanaan maupun pembiayaan, sehingga akan memberikan lebih banyak keuntungan bagi nasabah lama dan dapat menarik nasabah baru.

Segmen usaha skala komersial semakin menjadi pilihan, mengingat segmen ini telah teruji ketahanannya dalam beberapa kali krisis ekonomi yang terjadi. Sektor perbankan pun menilai segmen ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan mengingat banyaknya jumlah usaha yang masuk kategori ini. Perseroan secara fokus mengembangkan bisnis kredit komersial sejak tahun 2005, dengan menyiapkan semua infrastrukturnya.

Dengan reputasi yang baik dan manajemen yang berkualitas, Perseroan tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan dana selain dari nasabah penyimpan. Hal ini dapat dilihat dari diterimanya pinjaman jangka panjang dari perbankan internasional seperti DEG-Deutsche Investitionsund Entwicklungsgesellschaft, Jerman, Bank Pembangunan Perancis (Proparco), dan Barclays Bank Plc., Inggris.

Cabang-cabang baru telah dibuka di lokasi-lokasi yang potensial dan teknologi yang lebih mutakhir telah digunakan sebagai platform teknologi yang lebih kokoh, handal dan fleksibel dalam mendukung operasi Perseroan. Pembukaan kantor cabang ini akan dilanjutkan sehingga kini Perseroan telah memiliki lebih dari 450 kantor di seluruh Indonesia.

Kemajuan yang menggembirakan juga berhasil dicapai dalam pengembangan sumber daya manusia, tidak saja di bidang kompetensi pelayanan nasabah dan pengembangan produk tetapi juga di bidang-bidang penting lainnya seperti pengelolaan risiko dan aspek kepatuhan. Program rekrutmen dan pelatihan karyawan terus ditingkatkan dengan fokus pada pengembangan komptensi yang sesuai dengan kebutuhan pada ruang lingkup pekerjaannya.

Untuk melengkapi produk jasa perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat, mulai akhir tahun 2009 Perseroan telah menawarkan produk jasa perbankan syariah melalui anak perusahaan, Bank Panin Syariah (BPS). Layanan perbankan Syariah tersebut akan meningkatkan produk perbankan ritel Perseroan ke basis nasabah yang lebih luas melalui peningkatan franchise Perseroan.

12. MANAJEMEN RISIKO, KEPATUHAN DAN PENGENDALIAN INTERN

Sistem manajemen risiko Perseroan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum,sesuai Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/23/DPNP, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2011, dan dokumen terkait lainnya dari Komite Basel tentang Pengawasan Perbankan Banking, terutama sesuai dengan Basel II, maka Perseroan melaksanakan pengawasan dan audit intern dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

12.1. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam penerapan Manajemen Risiko, Perseroan menempuh beberapa langkah antara lain:
- Penyempurnaan Struktur Organisasi
- Perbaikan Sistem & Prosedur
- Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
- Sistem Informasi Manajemen (MIS)
- Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC).

12.2. Kepatuhan

Berkaitan dengan kegiatan operasional, Perseroan selalu memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku antara lain:
- Ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM), Kewajiban Penyedian Modal Minimum (KPMM) ataupun Penyisihan kerugian Aset (PPA)
- Memperhatikan, memantau transaksi-transaksi tunai dan transaksi mencurigakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang
- Melaksanakan pemenuhan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC).

12.3. Pengendalian Intern (*Internal Control*)

Untuk menghindari dan meminimalisasi terjadinya risiko serta adanya penyimpangan (*fraud*), maka fungsi pengawasan dilaksanakan dengan cara:
- Peningkatan sistem pengendalian intern pada seluruh tingkatan organisasi
- Penguatan fungsi Satuan Kerja Audit Intern di kantor pusat serta pembentukan dan peningkatan kemampuan pengendalian intern di kantor cabang.

Pengendalian Intern di seluruh Kantor Cabang menjadi perhatian Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Fokus pelaksanaan pengendalian intern tersebut antara lain harus meyakinkan:
1. Risiko telah teridentifikasi dan dikelola secara tepat.
2. Informasi penting dalam hal keuangan, manajerial dan operasional telah disajikan secara akurat, handal dan tepat waktu.
3. Seluruh aktivitas PaninBank telah sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur serta peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.
4. Kualitas dan perbaikan yang berkesinambungan selalu terpelihara dengan tetap memperhatikan aspek pengendalian intern.

Berdasarkan surat Keputusan Direksi PT Bank Panin Tbk., No. 008/DIR/JAP/SJ/08 tanggal 24 Desember 2008 menunjuk Herbert J.S. Sibuea sebagai ketua Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). SKAI merupakan bagian dari struktur pengendalian intern dalam Perseroan dan bertugas untuk memastikan bahwa proses-proses terkait pengelolaan risiko, pengendalian intern dan tata kelola perusahaan telah berjalan dengan memadai dan berfungsi secara efektif.Dalam melaksanakan tugasnya, SKAI berpedoman pada Piagam Audit Intern sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan disusun untuk menegaskan visi dan misi, fungsi dan ruang lingkup kerja, tanggung jawab, kewenangan, akuntabilitas, independensi, ketidakberpihakan dan kode etik dari Audit Intern.SKAI mendukung operasional untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam pendekatan yang sistematik dan disiplin termasuk mengevaluasi dan menigkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, agar Perseroan memenuhi prinsip Good Corporate Governance.

13. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Perseroan mendukung pengembangan komunitas yang berada di lokasi operasional cabang-cabang Bank di seluruh Indonesia. Aktivitas tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perseroan difokuskan pada program pelestarian lingkungan, pendidikan dan seni, kesejahteraan masyarakat, tanggap darurat dan bantuan bencana alam.

Program CSR dilaksanakan tidak hanya sekedar bersifat "*charity*" semata. Perseroan melaksanakan kegiatan CSR sebagai sebuah aktivitas yang tak terpisahkan dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, berkesinambungan, sejalan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
Prinsip pengelolaan dari kegiatan dan program CSR merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi komitmen PaninBank untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Salah satu program CSR yang menjadi fokus Perseroan adalah Reforest Indonesia, yaitu bentuk kepedulian terhadap lingkungan dengan cara membagikan bibit pohon trembesi atau sengon, polybag, program pelatihan serta buku panduan secara gratis.
Program Reforest Indonesia telah dilakukan secara serentak di seluruh cabang di Indonesia, dan di setiap kantor cabang Perseroan memiliki Green Officer yang tugasnya bekerja sama dengan instasi-instasi yang akan berpartispasi sebagai mitra dalam rangka penghijauan Indonesia..

Perseroan secara aktif terlibat dalam penanggulangan berbagai bencana alam yang terjadi di tanah air, seperti gempa bumi dan banjir dengan memberikan bantuan materi, medis, pemulihan infrastruktur dan lain-lain.

Pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang membutuhkan dilakukan bekerjasama dengan yayasan yang peduli pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga pelaksanaannya dapat lebih terkendali dan tepat sasaran.

14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan dan anak perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan, yaitu PT ANZ Bank Indonesia, PT Panin Insurance Tbk, PT Panin Life Tbk, PT Clipan Finance Indonesia Tbk, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Verena Oto Finance Tbk, PT Bank Panin Syariah, PT Amana Jaya, PT Multi Amana Gemilang, PT Terminal Builders dan Dana Pensiun Karyawan Panin Bank. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:

1. Giro pada bank lain
2. Transaksi derivatif
3. Pemberian kredit
4. Melakukan investasi dalam efek-efek dan penyertaan dalam bentuk saham
5. Penempatan dana dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam bentuk simpanan
6. Sewa menyewa ruangan kantor.
7. *Operating lease* (sewa guna usaha tanpa hak opsi) kendaraan bermotor dengan PT Clipan Finance Indonesia Tbk.
8. Kerjasama penyaluran pembiayaan (*chanelling*) dengan PT Clipan Finance Indonesia Tbk.
9. Asuransi atas aset tetap Perseroan dan anak perusahaan, "*Cash-In-Transit*" dan "*Cash-In-Safe*", asuransi *cash in safety box*, asuransi dana pada mesin-mesin ATM, asuransi kendaran bermotor, asuransi *property all risks* terhadap bangunan-bangunan, mesin-mesin ATM dan inventaris kantor.

Jumlah giro, efek-efek, kredit dan penyertaan dari pihak afiliasi pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebagai berikut:

Juta Rp/Ekivalen

Jenis Transaksi	Pihak Berelasi	Hubungan Keterkaitan Dengan Perseroan	Nilai	Jangka Waktu
Giro	ANZ Bank	Pemegang Saham	16.156	
Efek-efek	PT Panin Sekuritas Tbk	Anak Perusahaan	30.000	
Kredit	CV Sepakat Bangun Bersama	Kel. Pengurus	988	1 tahun
	Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif	Pengurus	13.792	1 tahun
	PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Anak Perusahaan	279.367	
	PT Panin Corp	Pengendali Bank	65	
Penyertaan	PT Bank ANZ Indonesia	Kel. Pengurus	16.500	
	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Anak Perusahaan	48.500	
	PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Anak Perusahaan	708.361	
	PT Bank Panin Syariah d/hBank Harfa	Anak Perusahaan	476.055	
	PT Panin Sekuritas Tbk	Anak Perusahaan	236.057	
	PT Verena Multi Finance Tbk. (d/h PT Verena Oto Finance Tbk)	Anak Perusahaan	42.953	

Persentase giro, penempatan pada bank lain, efek-efek kredit dan penyertaan dari pihak afiliasi terhadap jumlah aset adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

Keterangan	30 Juni 2012	2011	2010	2009	2008	2007
Giro pada bank lain	0,022	0,064	0,072	0,046	0,110	0,060
Penempatan pada bank lain	-	-	0,165	0,623	0,077	-
Efek-efek	0,029	0,047	0,038	0,051	-	0,274
Kredit	0,010	0,012	0,013	0,017	0,020	0,027
Penyertaan	0,316	0,336	0,254	0,261	0,262	0,187
Jumlah	**0,377**	**0,459**	**0,542**	**0,998**	**0,469**	**0,548**

Persentase simpanan, simpanan dari bank lain, liabilitas akseptasi dan pinjaman yang diterima dari pihak afiliasi terhadap jumlah liabilitas adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

Keterangan	30 Juni 2012	2011	2010	2009	2008	2007
Simpanan	0,356	0,390	0,397	0,436	1,240	0,293
Simpanan dari bank lain	0,011	0,009	0,031	0,047	0,053	0,031
Liabilitas Akseptasi	-	0,004	-	-	0,076	0,112
Pinjaman yang diterima	-	-	-	-	0,981	-
Jumlah	**0,367**	**0,403**	**0,428**	**0,483**	**2,350**	**0,436**

Tabel berikut ini menguraikan penyertaan Perseroan pada pihak-pihak berelasi dengan nilai penyertaan di atas Rp1 miliar pada posisi 30 Juni 2012:

Kegiatan Penyertaan

Nama Perusahaan	Jumlah Penyertaan (Rp Juta)	Kepemilikan (%)	Kegiatan Usaha	Penyertaan Sejak
Anak Perusahaan				
PT Bank Panin Syariah (d/h PT Bank Harfa)	449.512	99,99	Bank Syariah	2008
PT Clipan Finance Indonesia Tbk.	512.858	54,34	Lembaga Pembiayaan	1982
PT Verena Multi Finance Tbk. (d/h PT Verena Oto Finance Tbk.)	42.953	42,87	Lembaga Pembiayaan	2003
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.	38.800	13,50	Asuransi Umum	1980
Perusahaan Penyertaan				
PT Sarana Kalsel Ventura	40	1,04	Modal Ventura	1997
PT Bank ANZ Indonesia (d/h PT ANZ Panin Bank)	16.500	1,00	Bank Umum	1990
PT Panin Sekuritas Tbk	152.422	29,00	Perantara Pedagang Efek. Manajer Investasi. Penjaminan Emisi Efek	1989
PT First Asia Capital	750	2,50	Perantara Pedagang Efek	1989
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	625	9,33	Lembaga Pembiayaan	1981

Semua transaksi dengan pihak afiliasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga, diberlakukan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga.

Manajemen telah mengungkapkan semua transaksi dengan pihak-pihak afiliasi. Transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi tersebut di atas tidak merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Utama.

15. PERSAINGAN USAHA DAN STRATEGI MENGHADAPI PERSAINGAN

Perseroan terus melanjutkan fokus strategi usahanya pada sektor ritel dan komersial, selaras dengan visi-misinya. Strategi tersebut terbukti mampu mendorong pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) sejak tahun 2007. Rata-rata pertumbuhannya mencapai sekitar 30%. Selain itu, strategi ini juga membuat Perseroan lebih tahan krisis. Terbukti pada mega-krisis 1997, Perseroan menjadi satu-satunya bank yang tidak masuk dalam program rekapitalisasi pemerintah.

Sektor perbankan ritel memiliki prospek yang baik bagi arah pengembangan usaha Perseroan ke depan. Beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari sektor ini antara lain:

- Potensi pasar yang luas dan terus berkembang
- *Interest spread* yang relatif besar
- Penyebaran risiko kredit yang lebih luas
- Potensi untuk melakukan *cross selling* produk, dan
- Sumber peningkatan *fee based income*.

Pemberian kredit ke sektor-sektor riil yang produktif dengan risiko terkendali menjadi kegiatan utama Perseroan dalam menyalurkan dana sesuai fungsi intermediasi perbankan. Demi tujuan tersebut, Perseroan melanjutkan proses transformasi menjadi Bank Ritel dan Bisnis terkemuka melalui pemasaran produk jasa perbankan ritel dan sekaligus melayani dunia usaha di Indonesia.

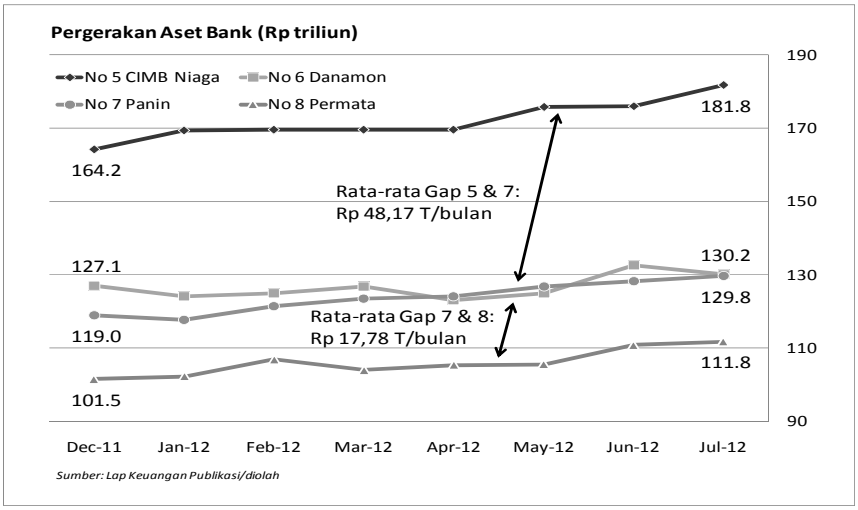
Perseroan terus mempertahankan momentum pertumbuhan kuat yang telah dicanangkan manajemen. Hal tersebut menjadi kian penting pada saat marjin bunga diperkirakan relatif akan terus berkurang di tengah upaya otoritas menekan turun suku bunga kredit sementara suku bunga dana agak berpotensi naik menyusul kenaikan suku bunga jangka pendek belakangan ini. Tren suku bunga kredit yang cenderung turun dan suku bunga dana yang kurang lebih stabil menyebabkan marjin diperkirakan akan tertekan turun. Konsekuensi kondisi ini adalah Perseroan akan terdorong untuk terus meningkatkan penyaluran kredit guna meningkatkan pendapatan bunga bersih.

Di sisi lain, Perseroan akan terus memperkuat struktur pendanaannya dengan tingkat bunga sangat kompetitif dan memperpanjang jangka waktu simpanan DPK. Di samping deposito, produk-produk pendanaan yang menjadi andalan Bank antara lain *GiroPanin*, *Tabungan Panin*, *Tabungan Junior*, *Tabungan Bisnis*, *Tabungan Rencana*, dan *PanDollar*. Produk pengembangan seperti *Tabungan Power Saver* dan *E-Saver* yang menawarkan tingkat bunga menarik serta *Giro Multicurrency* juga disiapkan dan terus dikembangkan. Didukung dengan sumber pendanaan jangka panjang lain seperti dari surat utang, strategi menahan dana selama mungkin di neraca Bank ini menjadi upaya untuk terus mengurangi ketidaksesuaian jatuh tempo (*maturity missmatch*) demi lebih meningkatkan ketahanan internal, tingkat kesehatan dan kinerja Bank secara umum.

Dalam strategi pertumbuhan kredit, penggerak utama pertumbuhan akan ditekankan pada segmen usaha kecil dan menengah (*Small-Medium Business*/SMB). Pengembangan produk seperti *asset-based finance* dan *dealer financing* diharapkan mampu melengkapi portofolio produk segmen komersial. Dalam *consumer banking*, penjualan produk unggulan seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Mobil (KPM) terus digenjot untuk melanjutkan momentum pertumbuhannya yang kuat melalui jaringan distribusi Perseroan yang lebih luas.

Perluasan jaringan distribusi masih menjadi program yang penting guna meraih pangsa pasar yang lebih besar dengan basis nasabah yang lebih luas. Perluasan jaringan dilakukan dengan terus membuka kantor-kantor cabang dan layanan *automated teller machine* (ATM) di seluruh kota-kota penting di Indonesia. Jaringan cabang sebanyak sekitar 500 kantor akan dioptimalkan juga mendekatkan pelayanan yang prima kepada nasabah. Pada saat yang sama, perseroan terus melakukan inovasi produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk *service* yang disediakan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, seperti layanan *cash management, wealth management,* kartu kredit, serta layanan *e-channel* ataupun *e-banking, mobile banking*, dan sebagainya.

Dengan strategi tersebut Perseroan berhasil meningkatkan pangsa pasar asetnya terhadap seluruh Bank Umum di Indonesia dari 2,4% pada tahun 2005 menjadi 3,33% pada akhir Juli 2012 (sumber : Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia, Juli 2012). Sehingga, Perseroan menduduki posisi ke-tujuh bank dengan aset, DPK maupun kredit terbesar di Indonesia.



16. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Perseroan memiliki sertifikat merek tanggal 20 April 2010 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang diperoleh dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan entitas anak secara konsolidasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 14 November 2012, 15 Maret 2012, 29 Maret 2011, 25 Maret 2010, 20 Maret 2009 dan 25 Maret 2008 serta laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2011 yang tidak diaudit. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 tertanggal 14 November 2012 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan standar akuntansi keuangan yang relevan dan efektif berlaku 1 Januari 2012 dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan obligasi dan obligasi subordinasi. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tahun 2011 tertanggal 15 Maret 2012 memuat paragraf penjelasan mengenai perubahan akuntansi atas penyisihan penghapusan aset non-produktif dan transaksi rekening administratif sedangkan laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tahun 2010 tertanggal 29 Maret 2011 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan awal PSAK No.50 (Revisi 2006) dan No.55 (Revisi 2006) dan penerapan ketentuan transisi sesuai ketentuan Bank Indonesia untuk estimasi penurunan nilai atas kredit secara kolektif.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Kas	1.127.088	1.392.325	1.076.074	900.900	928.108	484.707
Giro pada Bank Indonesia	8.395.204	7.490.081	5.403.656	2.480.939	1.921.074	2.058.955
Giro pada bank lain						
Pihak berelasi	29.466	79.389	78.740	35.738	70.605	31.863
Pihak ketiga	588.279	1.105.833	790.014	821.398	1.293.917	288.985
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – bersih						
Pihak berelasi	-	-	180.200	485.100	49.500	-
Pihak ketiga	9.450.117	15.968.557	16.808.876	7.621.983	5.244.061	3.056.020
Efek-efek						
Pihak berelasi	38.946	58.524	41.652	40.000	-	146.562
Pihak ketiga	16.758.705	15.538.002	20.656.667	19.084.787	12.983.292	12.546.958
Dikurangi:						
Cadangan kerugian penurunan nilai	(162.218)	(58.751)	(10.618)	(38.316)	(34.798)	(44.707)
Efek-efek yang digunakan sebagai sinking fund untuk pelunasan obligasi	-	-	-	-	-	(1.300.000)
Efek – efek bersih	16.635.433	15.537.775	20.687.701	19.086.471	12.948.494	11.348.813
Tagihan derivatif - pihak ketiga	8.839	3.316	4.936	3.122	110.268	17.938
Kredit yang diberikan - bersih						
Pihak berelasi	13.485	14.398	14.058	13.023	12.621	14.308
Pihak ketiga	81.367.339	69.064.913	55.668.504	39.954.075	35.269.835	28.276.576
Tagihan anjak piutang	1.044.310	1.078.015	567.094	270.345	258.590	101.879
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	5.789.023	2.798.161	-	8.000	127.010	382.927
Investasi neto sewa pembiayaan - bersih	1.419.557	1.152.711	926.382	864.914	878.882	855.004
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	3.696.266	3.454.100	1.905.263	1.070.007	821.096	376.588
Tagihan akseptasi - bersih	1.155.133	848.825	503.849	511.736	682.967	884.433
Penyertaan dalam bentuk saham - bersih	429.413	419.529	276.925	203.627	169.068	100.287
Pendapatan yang masih akan diterima	647.415	597.476	591.760	567.103	622.395	457.080
Aset tetap - bersih	1.893.960	1.805.408	1.763.280	1.702.829	1.671.786	1.564.421
Aset pajak tangguhan - bersih	96.860	43.485	53.157	77.293	79.740	134.856
Sinking fund untuk pelunasan obligasi dan obligasi subordinasi	-	-	-	-	-	1.305.250
Aset lain-lain	2.006.351	1.899.882	1.694.865	1.237.114	1.249.058	1.791.220
Jumlah Aset	**135.793.538**	**124.754.179**	**108.995.334**	**77.915.717**	**64.409.075**	**53.532.110**
LIABILITAS						
Liabilitas segera	374.837	255.962	138.272	164.729	286.231	277.402
Simpanan						
Giro						
Pihak berelasi	48.207	109.494	38.547	20.223	19.573	27.538
Pihak ketiga	15.523.946	15.998.880	14.730.248	12.064.272	8.733.856	6.379.294
Tabungan						
Pihak berelasi	47.865	25.119	19.964	16.257	14.301	9.454
Pihak ketiga	40.649.631	31.776.266	22.404.219	13.599.944	8.054.146	7.541.177
Deposito berjangka						
Pihak berelasi	326.888	290.310	320.927	251.894	655.134	95.116
Pihak ketiga	36.190.708	37.548.463	37.765.815	30.281.897	28.566.669	17.268.554
Simpanan dari bank lain	8.581.204	5.315.229	3.567.326	2.259.800	1.334.578	2.283.248

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali – Bersih - Pihak ketiga	3.062.667	3.665.163	4.653.892	503.887	-	3.346.225
Liabilitas derivatif - pihak ketiga	3.419	2.951	7.216	5.295	94.549	8.321
Liabilitas akseptasi						
Pihak berelasi	-	4.139	-	-	42.042	50.342
Pihak ketiga	1.155.912	845.855	503.849	516.905	648.397	843.025
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	3.879.993	4.591.701	2.789.842	2.303.760	1.623.516	1.990.689
Pinjaman yang diterima	3.269.645	2.985.155	3.582.389	1.631.918	3.191.603	2.141.497
Utang pajak	239.974	268.626	136.305	227.052	94.822	307.156
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	209	-	-	-	-	291
Liabilitas lain-lain	1.441.064	1.291.121	953.658	779.304	728.945	1.349.847
Obligasi subordinasi – bersih	3.894.605	3.891.614	3.886.111	1.491.856	1.489.350	1.152.063
Jumlah Liabilitas	118.690.774	108.866.048	95.498.580	66.118.993	55.577.712	45.071.239
EKUITAS						
Modal saham	2.408.765	2.408.765	2.408.765	2.408.765	2.033.530	2.021.119
Agio saham	3.444.330	3.444.330	3.444.330	3.444.330	2.318.626	2.281.394
Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non pengendali	(16.454)	(16.454)	(8.782)	(3.747)	(3.747)	(3.747)
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	-	-	-	-	-	675.144
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-	-	13.489
Komponen ekuitas lainnya – Laba (rugi) belum direalisasi dari pemilikan efek	(12.768)	(31.159)	(24.598)	130.478	(260.001)	40.989
Saldo laba						
Ditentukan penggunaannya	140.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Tidak ditentukan penggunaannya	9.393.699	8.315.575	6.505.244	4.812.285	3.851.679	2.511.737
Kepentingan non-pengendali	1.745.192	1.647.074	1.071.795	904.613	791.277	820.732
Jumlah Ekuitas	17.102.764	15.888.131	13.496.754	11.796.724	8.831.363	8.460.857
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**135.793.538**	**124.754.179**	**108.995.334**	**77.915.717**	**64.409.075**	**53.532.110**

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni		Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember				
	2012	2011 (Tidak diaudit)	2011	2010	2009	2008	2007
Pendapatan bunga	5.434.212	4.828.410	9.945.650	8.183.967	7.375.667	6.011.625	4.349.268
Beban bunga	2.868.787	2.445.439	4.982.909	3.981.493	4.150.677	3.451.922	2.093.513
Pendapatan bunga - bersih	2.565.425	2.382.971	4.962.741	4.202.474	3.224.990	2.559.703	2.255.755
Pendapatan operasional lainnya	915.184	815.908	2.110.291	1.361.464	948.730	587.158	600.280
Beban kerugian penurunan nilai / penyisihan penghapusan	434.054	457.463	961.867	1.216.590	949.928	518.529	47.394
Beban operasional lainnya	1.500.214	1.630.327	3.483.102	2.491.459	1.822.361	1.568.887	1.323.793
Beban operasional lainnya - bersih	(1.019.084)	(1.271.882)	(2.334.678)	(2.346.585)	(1.823.559)	(1.500.258)	(770.907)
Laba operasional	1.546.341	1.111.089	2.628.063	1.855.889	1.401.431	1.059.445	1.484.848
Pendapatan (beban) non operasional – bersih	83.816	35.569	108.303	87.937	65.124	31.742	(49.187)
Laba sebelum pajak penghasilan	1.630.157	1.146.658	2.736.366	1.943.826	1.466.555	1.091.187	1.435.661
Beban pajak	(388.727)	(280.946)	(683.251)	(494.889)	(386.722)	(329.742)	(414.721)
Laba bersih periode berjalan	1.241.430	865.712	2.053.115	1.448.937	1.079.833	761.445	1.020.940
Pendapatan komprehensif lain	23.904	18.789	(14.846)	(155.434)	390.526	(302.647)	(17.617)
Laba komprehensif	1.265.334	884.501	2.038.269	1.293.503	1.470.359	458.798	1.003.323
Laba per saham dasar [1] (dalam Rupiah penuh)	45,59	31,12	75,99	53,66	43,03	32,80	45,60
Dilusian	-	-	-	-	-	30,43	42,47

RASIO KEUANGAN

(dalam persentase)

Uraian	Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni	Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Jumlah Liabilitas / Jumlah aset	87,41	87,26	87,62	84,86	86,29	84,19
Jumlah Liabilitas / Jumlah ekuitas	693,99	685,20	707,57	560,49	629,32	532,70
Jumlah Kredit yang diberikan-bersih / Jumlah aset	59,93	55,37	51,09	51,30	54,78	52,85
Kredit yang diberikan - bersih/Jumlah aset produktif - bersih	66,91	61,94	56,58	56,33	60,90	61,86
Jumlah Aset Produktif-Bersih / Jumlah aset	89,57	89,40	90,29	91,06	89,95	85,44
Jumlah Simpanan / Jumlah aset	68,33	68,73	69,07	72,17	71,49	58,51
Rasio Usaha [2]						
Pendapatan bunga / jumlah aset produktif - bersih	n.a[4]	8,92	8,32	10,40	10,38	9,51
Pendapatan bunga-bersih / rata-rata jumlah aset	n.a[4]	4,25	4,50	4,53	4,34	4,80
Pendapatan bunga-bersih /rata-rata jumlah ekuitas	n.a[4]	33,78	33,23	31,27	29,61	29,93
Pendapatan bunga-bersih/ rata-rata jumlah aset produktif - bersih	n.a[4]	4,73	4,96	5,00	4,94	5,65
Pendapatan operasional-bersih / rata-rata jumlah aset	n.a[4]	2,25	1,99	1,97	1,80	3,16
Laba sebelum pajak penghasilan / jumlah pendapatan bunga	n.a[4]	27,51	23,75	19,88	18,15	33,01
Laba bersih / jumlah pendapatan bunga	n.a[4]	20,64	17,70	14,64	12,67	23,47
Laba bersih / rata-rata jumlah aset	n.a[4]	1,76	1,55	1,52	1,29	2,17
Laba bersih / rata-rata jumlah ekuitas	n.a[4]	13,97	11,46	10,47	8,81	13,54
Laba bersih / rata-rata jumlah aset produktif - bersih	n.a[4]	1,96	1,71	1,68	1,47	2,56
Rasio Pertumbuhan						
Pendapatan Bunga	n.a[4]	21,53	10,96	22,69	38,22	11,48
Pendapatan Operasional - Bersih	n.a[4]	41,61	32,43	32,28	(28,65)	30,98
Laba Bersih	n.a[4]	41,70	34,18	41,81	(25,42)	27,75
Jumlah Aset	n.a[4]	14,46	39,89	20,97	20,32	32,13
Jumlah Liabilitas	n.a[4]	14,00	44,43	18,97	23,31	34,95
Jumlah Ekuitas	n.a[4]	17,72	14,41	33,58	4,38	27,92
Rasio Perbankan						
Rasio Permodalan						
CAR – risiko kredit, operasional dan pasar [3]	16,59	17,45	16,65	21,79	20,31	21,58
CAR – risiko kredit	16,66	17,53	16,66	21,93	20,65	23,34
Rasio Kualitas Aset						
Aset Produktif Bermasalah terhadap total aset produktif	2,42	2,42	2,52	1,86	2,48	1,66
NPL (*Gross*)	3,30	3,56	4,36	3,15	4,34	3,06
NPL (*Net*)	0,74	0,92	2,68	1,60	2,15	1,76
CKPN aset keuangan terhadap terhadap aset produktif	2,09	1,91	1,63	1,84	2,25	1,58
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit / Kredit yang diberikan	2,73	2,81	2,73	2,81	3,41	2,35
Rasio Rentabilitas						
ROA	n.a[4]	2,02	1,76	1,75	1,75	3,14
ROE	n.a[4]	14,63	11,62	11,03	10,16	13,98
NIM	n.a[4]	4,64	4,59	4,43	4,72	5,81
BOPO	n.a[4]	80,26	83,49	84,74	84,56	73,74
Rasio Likuiditas						
LDR	87,83	80,36	74,22	73,28	78,93	92,36

Rasio Kepatuhan						
GWM Rupiah	8,07	8,01	8,11	5,02	5,02	7,14
GWM Valas	8,04	8,14	1,04	1,04	1,01	3,08
PDN	0,39	0,60	0,31	2,86	6,44	0,97
BMPK (pelanggaran/pelampauan)	-	-	-	-	-	-

Catatan:

1. *Perseroan tidak menghitung laba per saham dilusian pada tahun 2012, 2011, 2010 dan 2009 karena tidak terdapat dampak dilutif dari saham biasa pada tahun-tahun tersebut*
2. *Rata-rata jumlah Aset, Ekuitas dan Aset Produktif-bersih dihitung dari penjumlahan saldo awal dan akhir tahun dibagi dua, Aset Produktif-bersih meliputi Giro pada Bank Lain, Penempatan pada Bank Lain, Efek-efek, Tagihan Derivatif, Kredit, Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali, Investasi Neto Sewa Pembiayaan, Piutang Pembiayaan Konsumen, Tagihan Akseptasi, Tagihan Anjak Piutang dan Penyertaan, masing-masing setelah dikurangi Penyisihan kerugian Aset Produktif.*
3. *Perhitungan telah disesuaikan dengan surat edaran Bank Indonesia No. 13/6/DPNP tahun 2011, No.11/I/DPNP tahun 2009. PBI No.10/15/PBI/2008. PBI No.9/13I/PBI/2007. PBI No.9/16/PBI/2007, peraturan Bank Indonesia 6/10/PBI/2004 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP yang mengatur tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Perhitungan CAR tersebut telah memperhitungkan risiko pasar dan operasional.*
4. *Tidak disajikan karena data tidak dapat diperbandingkan*

X. EKUITAS

Dibawah ini disajikan struktur Ekuitas Perseroan untuk periode enam bulan yang yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (*member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya masing-masing tertanggal 14 November 2012, 15 Maret 2012, 29 Maret 2011 dan 25 Maret 2010. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 tertanggal 14 November 2012 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan standar akuntansi keuangan yang relevan dan efektif berlaku 1 Januari 2012 dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan obligasi dan obligasi subordinasi. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tahun 2011 tertanggal 15 Maret 2012 memuat paragraf penjelasan mengenai perubahan akuntansi atas penyisihan penghapusan aset non-produktif dan transaksi rekening administratif sedangkan laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tahun 2010 tertanggal 29 Maret 2011 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan awal PSAK No.50 (Revisi 2006) dan No.55 (Revisi 2006) dan penerapan ketentuan transisi sesuai ketentuan Bank Indonesia untuk estimasi penurunan nilai atas kredit secara kolektif.

STRUKTUR EKUITAS PERSEROAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010	31 Desember 2009
Modal Dasar - 96.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, dan 2010 serta 59.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2009	9.600.000	9.600.000	9.600.000	5.900.000
Modal ditempatkan dan disetor Penuh – 24.087.645.998 saham pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009	2.408.765	2.408.765	2.408.765	2.408.765
Agio saham	3.444.330	3.444.330	3.444.330	3.444.330
Selisih Transaksi Ekuitas dengan Pihak Non-pengendali	(16.454)	(16.454)	(8.782)	(3.747)
Komponen ekuitas lainnya – Laba (rugi) belum direalisasi dari pemilikan efek	(12.768)	(31.159)	(24.598)	130.478
Saldo laba	9.533.699	8.435.575	6.605.244	4.912.285
Kepentingan Non-pengendali	1.745.192	1.647.074	1.071.795	904.613
Jumlah Ekuitas	**17.102.764**	**15.888.131**	**13.496.754**	**11.796.724**

Setelah tanggal laporan keuangan 30 Juni 2012 hingga prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan modal Perseroan. Untuk mengantisipasi pertumbuhan usaha yang membutuhkan peningkatan permodalan yang signifikan, Perseroan telah meningkatkan jumlah Modal Dasar menjadi 96.000.000.000 saham atau sebesar Rp. 9.600.000.000.000,- sebagaimana termaktub dalam Akta No. 09 tanggal 9 Juli 2010 yang dibuat oleh Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

(i) Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebesar:

1. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT);
2. 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak Penduduk / berkedudukan di luar negeri dan merupakan *beneficial owner* dari bunga tersebut. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.

(ii) Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar:

1. 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT);
2. 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak Penduduk / berkedudukan di luar negeri. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).

(iii) Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar:

1. 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT);
2. 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak Penduduk / berkedudukan di luar negeri. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

(iv) Atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebesar:

1. 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
2. 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
3. 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Ketentuan pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak berlaku apabila penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah:

a. Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
b. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Sebagai wajib pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Perundang undangan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DISARANKAN ATAS BIAYA SENDIRI, UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Pada tanggal 27 April 2012, Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun 2011 dengan tanda terima Nomor 091-01-00007415.

XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 45 tanggal 18 Oktober 2012 dan Addendum Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No.103 tanggal 14 November 2012, akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 49 tanggal 18 Oktober 2012 dan Addendum Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No.107 tanggal 14 November 2012 yang keseluruhannya dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo S.H., MH, Mkn, Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*) Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dengan jumlah Pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dengan jumlah Pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Sindikasi Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (dalam Rupiah)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi:			
1.	PT CIMB Securities Indonesia		
2.	PT Danareksa Sekuritas		
3.	PT Evergreen Capital		
4.	PT Indopremier Securities		
Penjamin Emisi Obligasi :			
1.			
2.			
	Jumlah		

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Sindikasi Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi	Porsi Penjaminan (dalam Rupiah)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi:			
1.	PT CIMB Securities Indonesia		
2.	PT Danareksa Sekuritas		
3.	PT Evergreen Capital		
4.	PT Indopremier Securities		
Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi:			
1.			
2.			
3.			
	Jumlah		

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang turut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d. Hubungan antara Perseroan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung. mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung. oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Plaza Mandiri lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38
Jakarta 12190
Telp. : (021) 5268216, 52913212, 5245161, 5275370
Fax : (021) 5263762

STTD Nomor : 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) No: 05/12/2008.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat penunjukan No. 243/DIR/EXT/12 tanggal 24 September 2012

Pedoman kerja: Pedoman kerja Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Tugas Pokok: PT. Bank Mandiri (Persero), selaku Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini adalah mewakili kepentingan pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntan Publik **Osman Bing Satrio & Rekan** (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited)

The Plaza Office Tower, Lantai 32
Jl. M.H. Thamrin Kav 28 – 30
Jakarta 10350, Indonesia STTD Nomor: 305/PM/STTD-AP/2002 tanggal 30 Januari 2002
Keanggotaan Asosiasi: Institute Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No: 1020

Dalam rangka Penawaran Umum ini, kantor Akuntan Osman Bing Satrio & Rekan telah ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi Akuntan Publik dengan surat penunjukkan No. 034/VII/2012/GA/664 tanggal 2 Juli 2012.

Pedoman kerja: Standar Profesional Akuntan Publik
Audit berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Tugas Pokok: Fungsi utama Auditor Independen dalam Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Auditor Independen merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Audit yang dilakukan oleh Auditor Independen meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Auditor Independen bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

Konsultan Hukum	**Da Silva, Subandi, Suhardiadi**
	Gedung Artha Graha. Lantai 23 Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53 Jakarta 12190. Indonesia Phone : (021) 515 2474 Fax : (021) 515 2495
	STTD Nomor: 62/STTD-KH/PM/1996 tanggal 1 Februari 1996 Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 95010. Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan Surat No. 256/DIR/EXT/12 tanggal 26 September 2012.
Pedoman kerja:	Standar Profesi HKHPM sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan HKHPM No. KEP-01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005.
Tugas pokok:	Tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini adalah memberi Pendapat Hukum secara independen dan obyektif dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan materialitas mengenai kondisi atau keadaan Perseroan dan hal-hal penting dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini dilihat dari segi hukum berdasarkan hasil dari uji tuntas dari segi hukum ("Uji Tuntas") yang telah dilaksanakannya terhadap informasi atau fakta material mengenai Perseroan yang berlaku saat dilakukannya Uji Tuntas dan hal-hal lain sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang didasarkan atas dokumen dan informasi yang disampaikan Perseroan dan instansi yang berwenang untuk memberi suatu keterangan tertentu tentang Perseroan sesuai dengan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang ditetapkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
Notaris	**Kantor Notaris Kumala Tjahjani Widodo S.H., MH, Mkn**
	Jl. Belawan No. 8 Jakarta 10150. Indonesia Phone : (021) 386 6602 Fax : (021) 380 3139
	STTD Nomor: 153 / BL/STTD-N/2008 tanggal 16 April 2008 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.002.010.231044 Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan Surat No.243/DIR/EXT/12 tanggal 24 September 2012.
Pedoman kerja:	Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang tentang jabatan Notaris No. 30 tahun 2004, Kode Etik Notaris.
Tugas pokok:	Lingkup kerja seorang Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini adalah membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini. antara lain Perjanjian Perwaliamanatan. Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi serta akta-akta pengubahannya.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 juncto angka 23 Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-309/BL/2008 Tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan, Wali Amanat menyatakan tidak akan:

(i) Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang bersifat utang; dan/atau
(ii) Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum, melalui Prospektus, yang telah dibuat oleh Konsultan Hukum Da Silva, Subandi, Suhardiadi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI
Perserikatan Perdata Bidang Hukum / Law Firm

Ref. No. 56/S/DSS/LO-BPI/XI/2012

Jakarta, 26 November 2012

Kepada Yth.

PT BANK PAN INDONESIA TBK.
disingkat **PT BANK PANIN TBK.**
Bank Panin Pusat
Jl. Jenderal Sudirman
Jakarta 10270, Indonesia

melalui Direksi PT. Bank Panin Tbk

Dengan hormat,

Perihal: **Pendapat Segi Hukum Atas PT Bank Pan Indonesia Tbk. Disingkat PT Bank Panin Tbk. Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin**

Kami, Moses Fernandez da Silva, S.H., CN, Advokat/Konsultan Hukum Pasar Modal dan Partner pada dan karena itu mewakili Kantor Hukum **DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI** ("**DSS**"), berdasarkan surat Perseroan tertanggal 26 September 2012 No. 256/DIR/EXT/12, telah ditunjuk **PT BANK PAN INDONESIA TBK.** disingkat **PT BANK PANIN TBK.** ("**Perseroan**") untuk bertindak sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum) dan sehubungan dengan hal tersebut melakukan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (**"Uji Tuntas"**) dan memberikan Pendapat Segi Hukum ("**Pendapat Hukum**" atau "**Legal Opini**" atau "**LO**") dalam rangka Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan I atas :

- Obligasi dengan nama "**OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK PANIN**" (Obligasi tersebut selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin**") dengan Target Dana Yang Dihimpun sebesar Rp 3.000.000.000.000,- (tiga trilyun Rupiah), yang akan diterbitkan secara berkelanjutan serta jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin pada setiap tahap penerbitan akan dicantumkan dalam Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin pada setiap tahapan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin; dan
- Obligasi Subordinasi dengan nama "**OBLIGASI SUBORDNASI BERKELANJUTAN I BANK PANIN** " (Obligasi Subordinasi tersebut selanjutnya disebut "**Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin**") dengan Target Dana Yang Dihimpun sebesar Rp 4.000.000.000.000,- (empat trilyun Rupiah), yang akan diterbitkan secara berkelanjutan serta jumlah pokok Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin pada setiap tahap penerbitan akan dicantumkan dalam Sertifikat Jumbo Obligasi SubordinasiBerkelanjutan I Bank Panin pada setiap tahap penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin.

Penawaran Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin dilakukan dengan melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan yang dimaksud Peraturan Nomor IX.A.15. Tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, tentang Penawaran Umum Berkelanjutan ("**Peraturan No. IX.A.15**") (selanjutnya Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut disebut "**Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin**" yang disingkat "**Penawaran Umum Berkelanjutan I**").

Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin yang akan diterbitkan Perseroan atas nama PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA sebagai bukti hutang kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin. Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin tersebut ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok.

Artha Graha Building, 23th floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Phone (62-021) 5152474, 5154352, 5152495, Fax (62-021) 5152495, E-mail : dasilva@rad.net.id

Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua kreditumya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin secara pari passu berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi terhadap pemegang Hutang Senior. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua kreditumya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin secara pari passu berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak pemegang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur subordinasi Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin merupakan produk baru Perseroan dan untuk maksut tersebut Perseroan telah memberitahukan rencana produk baru tersebut kepada Bank Indonesia dan tidak terdapat keberatan dari Bank Indoneia sebagaiana tercantum dalam surat Kepala Departemen Pengawasan Bank 3 Bank Indonesia kepada Perseroan No.14/74/DPB3/PB 3-2/Rahasia tangal 13 November 2012, Perihal: Recana Penerbitan Obligasi Berkelanjutan Bank Saudara.

Perseroan telah menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), berkedudukan di Jakarta untuk memeringkat Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin, dan telah diperoleh hasil pemeringkatan sebagai berikut:

- Peringkat Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin : idAA (Double A).
- Peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin : idAA- (Double A Minus).

Pada Penawaran Umum Berkelanjutan I ini Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin dalam beberapa tahap.

Pada tahap pertama akan diterbitkan dan ditawarkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin dengan jumlah pokok sebanyak-sebanyaknya sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu trilyun Rupiah) sesuai dengan akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 Nomor 44 tanggal 18 Oktober 2012 dan iubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 102, tanggal 14 November 2012, keduanya dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H, MH, MKn, Notaris di Jakarta (selanjutnya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 akan disebut sebagai "**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I**" atau "**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi**" dan Obligasi tersebut selanjutya akan disebut "**Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I**") dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 2.000.000.000.000,- (dua trilyun Rupiah) sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 48 tanggal 18 Oktober 2012 dan diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No.106 tanggal 14 November 2012, keduanya dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H, MH, MKn, Notaris di Jakarta (selanjutnya Perjajian Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dan Addendum I Perjajian Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 disebut sebagai "**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjuntan I Bank Panin Tahap I**" atau "**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi**" dan Obligasi Subordinasi tersebut disebut sebagai "**Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I**").

Tingkat Bunga Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I akan ditentukan dalam akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I dan akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran pertama dan terakhir yang akan ditentukan dalam addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Berkelanjutan I Obligasi Bank Panin Tahap I dan addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I.

Jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I dapat berkurang dikarenakan adanya pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I dan sehubungan atau adanya pembelian kembali (buy back) sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Bank PaninTahap I sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Satu (1) tahun setelah tanggal penjatahan sebagaimana tercantum dalam Prospektus, Perseroan dari waktu-kewaktu dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I sebelum Taggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Perseroan mempunyai hak untuk memberithukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk kemudian dijual kembali denga harga pasar atau sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I. Khusus untuk pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.

Pembayaran Bunga dan Pokok Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I dapat mengalami penangguhan guna memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang perbankan yang berlaku bagi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full comitment*) oleh Para Penjamin Emisi Efek yang ditentukan kemudian dan tercantum dalam Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 45 tanggal 18 Oktober 2012 dan kemudian diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 103 tanggal 14 November 2012 dan akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 49 tanggal 18 Oktober 2012 dan diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 107 tanggal 14 November 2012, semuanya dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., MH., MKn, Notaris di Jakarta.

Hak pemegang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I adalah *paripassu* tanpa preferen dengan hak-hak kreditur subordinasi Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari sesuai ketentuan ayat 5.16. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I.

Jumlah pokok dan tingkat suku bunga Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin yang akan diterbitkan dalam tahap selanjutnya akan ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin tahapan selanjutnya dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin tahap selanjutnya dengan memperhatikkan ketentuan Peraturan No. IX.A.15.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan I ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk memperbaiki struktur pendanaan Emiten dan meningkatkan aktiva produktif, terutama dalam bentuk kredit dan penanaman dalam surat-surat berharga, sebagai berikut:

- 90% (sembilan puluh persen) untuk pemberian kredit, yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR), pembiayaan proyek infrastruktur dan kredit investasi jangka panjang;
- 10% (sepuluh persen) untuk penanaman dalam surat-surat berharga.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin akan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap Level Bawah (*Lower Tier* 2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Guna memenuhi Surat Edaran Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan Perseroan akan diperhitungkan oleh Perseroan dan dicantumkan dalam Prospektus serta diumumkan kepada masyarakat.

Guna memenuhi Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (**"Peraturan No. X.K.4"**), Perseroan akan melaporkan secara periodik penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin ini kepada Bapepam dan LK dan kepada Wali Amanat.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I ini, maka rencana perubahan tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat dan RUPO sesuai dengan Peraturan No. X.K.4.

Kami telah melakukan Uji Tuntas Dari Segi Hukum mengenai fakta yang ada terhadap Perseroan dan hal-hal penting lainnya terkait dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan dalam kerangka hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan dengan ruang lingkup dan pembatasan serta metode dan asumsi-asumsi yang diuraikan dalam surat ini sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 yang ringkasannya disajikan dalam laporan Uji Tuntas sebagaiman dimuat dalam surat kami Ref. No. 35/S/DSS/LUT-BPI/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 ("Laporan Uji Tuntas Pertama" atau disebut "**LUT Pertama**") dan dilanjutkan hingga tanggal 19 November 2012 yang dilaporkan dalam surat kami Ref. No. 48/S/DSS/LUT-BPI/XI/2012 tanggal 19 November 2012 ("Tambahan Laporan Uji Tuntas Kesatu" atau disebut "**TLUT Ke-1**") dan kemudian hingga tanggal 26 November 2012 yang kami laporkan dalam surat kami Ref. No. 55/S/DSS/LUT-BPI/XI/2012 tanggal 26 November 2012 ("Tambahan Laporan Uji Tuntas Kedua" atau disebut "**TLUT Ke-2**"), yang selanjutnya LUT Pertama yang kemudian disesuaikan dengan TLUT Ke-1 dan TLUT Ke-2 disebut sebagai "**Laporan Uji Tuntas**" atau "**LUT**".

LUT telah dilaksanakan dengan ruang lingkup dan dengan metode serta asumsi-asumsi dan batasan lain yang disebut dalam LUT dan telah mencerminkan keadaan Perseroan serta dokumen hukum berkaitan dengan rencana Penawaran Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I pada Tanggal Hasil Uji Tuntas yang jatuh pada tanggal yang sama dengan tanggal LUT.

Hasil Uji Tuntas dan LUT menjadi dasar untuk memberikan Pendapat Hukum, dan oleh karena itu LUT merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Pendapat Hukum yang dikeluarkan dalam surat ini.

Pendapat Hukum dibuat dengan memperhatikan standar pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku.

DENGAN DIKELUARKANNYA PENDAPAT HUKUM DALAM SURAT INI MAKA SETIAP DAN SELURUH PENDAPAT HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK PANIN DAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK PANIN YANG PERNAH KAMI KELUARKAN SEBELUM TANGGAL SURAT INI MENJADI TIDAK BERLAKU DAN KARENANYA PENDAPAT HUKUM DIDALAM SURAT INI MERUPAKAN DAN HARUS DIANGGAP SEBAGAI SATU-SATUNYA PENDAPAT HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK PANIN DAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK PANIN.

Pendapat Hukum

Dari Hasil Uji Tuntas yang ringkasan eksekutifnya dimuat dalam LUT dan dengan asumsi-asumsi dan kualifikasi yang akan disebut pada bagian akhir surat ini, kami berpendapat sebagai berikut:

I. Pendapat Hukum Atas Perseroan

I.1. Pendirian Perseroan telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku pada saat pendirian Perseroan.

I.2. Tiap-tiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dilakukan Perseroan adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku pada saat perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

I.3. Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku termaktub dalam Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta No. 81 tanggal 25 Juli 2008, persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tanggal 27 Oktober 2008, surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.78480.AH.01.02. Tahun 2008, tangal 27 Oktober 2008, Daftar Perseroan Nomor AHU-0101237.AH.01.09. Tahun 2008, tangal 27 Oktober 2008 dan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 Pebruari 2009 No.13, Tambahan No. 4248 jo. Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta No. 11 tanggal 10 September 2009, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Oktober 2009, surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10.18383 tanggal 22 Oktober 2009, Daftar Perseroan No. AHU-0069259.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 dan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 September 2010 No.76, Tambahan No. 1433 jo. Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta No. 09 tanggal 09 Juli 2010, persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 Oktober 2010, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.46590.AH.01.02 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Daftar Perseroan No. AHU 0071414.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 dan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2 Maret 2012 No.18, Tambahan No. 5579.

I.4. Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku telah memenuhi Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("**UU Perbankan**") dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UU Pasar Modal**" atau "**UUPM**") termasuk tetapi tidak terbatas Peraturan No. IX.J.1. tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.

I.5. Perseroan berhak melakukan kegiatan usahanya sebagai Bank Umum sesuai dengan maksud dan tujuan yang dicantumkan dalam Pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum yang dimiliki Perseroan dan Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ijin yang dimilikinya.

I.6. Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh PT Blue Chip Mulia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 01 Oktober 2012 adalah:

Modal Dasar : Rp 9.600.000.000.000,- Modal Ditempatkan : Rp 2.408.764.599.800,- Modal Disetor : Rp 2.408.764.599.800,-		Nominal Per Saham Rp 100,-		%
No.	Nama	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
1	PT Panin Financial Tbk. *	11.065.846.285	1.106.584.628.500	45.94
2	Votraint No. 1103 Pty Ltd	9.349.793.152	934.979.315.200	38.82
3	Masyarakat lainnya (dibawah 5%)	3.672.006.561	367.200.656.100	15.24
	Jumlah	24.087.645.998	2.408.764.599.800	100
	Jumlah Saham dalam portepel	71.912.354.002	7.191.235.400.200	

** jumlah saham tersebut termasuk 250.000.000 saham yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku.*

Saham yang tercatat di Bursa Efek berjumlah 23.837.645.998 saham dan pengalihan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan perdagangan saham PT Bursa Efek Indonesia yang berlaku.

Saham yang tidak tercatat di PT Bursa Efek Indonesia juga meliputi modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan.

Riwayat kepemilikan saham Perseroan yang diuraikan dalam Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan Dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan Bank Panin adalah benar dan berkesinambungan dari Penawaran Umum Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010 Dan Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010 pada tahun 2010.

I.7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 9.600.000.000.000,00 (sembilan trilyun enam ratus milyar Rupiah) terbagi atas 96.000.000.000 (sembilan puluh enam milyar) saham @ Rp100,00 (seratus Rupiah) nominal;

Modal Ditempatkan: Rp 2.408.764.599.800,00 (dua trilyun empat ratus delapan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah) terbagi atas 24.087.645.998 (dua puluh empat milyar delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham @ Rp100,00 (seratus Rupiah) nominal;

Modal Disetor : 100 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan nilai nominal seluruhnya Rp 2.408.764.599.800,00 (dua trilyun empat ratus delapan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah).

I.8. Jumlah modal disetor dalam Perseroan telah memenuhi ketentuan tentang persyaratan kepemilikan saham dan permodalan bank umum yang diatur dalam UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya.

I.9. Susunan persahaman dan permodalan Perseroan telah mencerminkan kesinambungan dokumen hukum yang tersedia untuk dilakukan Uji Tuntas atas riwayat persahaman dan riwayat permodalan Perseroan setelah Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Obligasi IV Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap sampai dengan dikeluarkan Pendapat Hukum ini.

I.10. Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berlaku telah dibuat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.

I.11. a. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada Pendapat Hukum ini, yakni :

Presiden Komisaris	:	Drs. JOHNNY (Drs. Johnny N. Wiraatmadja);
Wakil Presiden Komisaris / Komisaris Independen	:	Drs. Haji BAMBANG WINARNO;
Komisaris Independen	:	Drs. RIJANTO;
Komisaris	:	Tuan SUWIRJO JOSOWIDJOJO;
Presiden Direktur	:	Drs. Haji ROSTIAN SYAMSUDIN;

Wakil Presiden Direktur	:	Tuan CHANDRA RAHARDJA GUNAWAN;
Wakil Presiden Direktur	:	Nyonya ROOSNIATI SALIHIN;
Direktur	:	Tuan Haji AHMAD HIDAYAT;
Direktur	:	Tuan LIONTO GUNAWAN;
Direktur	:	Tuan ISWANTO TJITRADI;
Direktur	:	Tuan EDY HERYANTO;
Direktur	:	Tuan GUNAWAN SANTOSO;
Direktur	:	Tuan NG KEAN YIK;
Direktur	:	Tuan HENDRAWAN DANUSAPUTRA;
Direktur Kepatuhan	:	Tuan ANTONIUS KETUT DWIRIANTO;

telah diangkat sah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 9 April 2012 dinyatakan dalam Akta Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, No. 71, tanggal 27 April 2012, masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPS tersebut tanggal 9 April 2012 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2014 dan masa jabatan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya RUPS tersebut tanggal 9 Apriil 2012 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2015.

Pengangkatan dan susunan tersebut memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan persyaratan sebagai anggota Direksi dan Komisaris Perbankan menurut ketentuan UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya, termasuk tetapi tidak terbatas telah memenuhi kewajiban memiliki Direktur Kepatuhan sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum (**"Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006"**). Perseroan juga telah memiliki persetujuan-persetujuan dari Bank Indonesia tentang perubahan pencalonan Tuan Riyanto dan Tuan Edy Heryanto sebagai anggota Direksi Perseroan, setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum (**"Peraturan BI No. 2/27/PBI/2000"**) untuk perubahan jabatan Drs. Johnny dari Direktur menjadi Presiden Komisaris dan pengangkatan Tuan Gunawan Santoso dan Tuan Hendrawan Danusaputra sebagai Direktur Perseroan telah diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 1 November 2007, pengangkatan Tuan Ng Kean Yik sebagai Direktur telah disetujui Bank Indonesia pada tanggal 4 Juni 2008 dan pengangkatan Tuan Antonius Ketut Dwirianto sebagai Direktur Kepatuhan telah disetujui Bank Indonesia pada tanggal 16 November 2009. Sesuai dengan ketentuan UU Perbankan ayat (2) pasal 38 "Perubahan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia" dengan demikian dengan diterimanya laporan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan oleh Bank Indonesia maka Perseroan telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan UU Perbankan yang berlaku. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan yakni Tuan Ng Kean Yik sebagai Direktur telah dilaporkan kepada Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 2008 dan pengangkatan Tuan Antonius Ketut Dwirianto sebagai Direktur Kepatuhan telah dilaporkan kepada Bank Indonesia pada tanggal 1 Desember 2009;

b. Perseroan memiliki (a) Direktur tidak terafiliasi yakni Tuan Edy Heryanto sesuai peraturan PT Bursa Efek Indonesia, dan (b) Presiden Direktur yang independen terhadap pemegang saham pengendali Perseroan yakni Tuan H. Rostian Syamsudin sesuai Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006;

c. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;

d. Tuan Ng Kean Yik, Direktur Perseroan, adalah warga negara asing, dan pengangkatannya telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia;

e. Setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak melanggar ketentuan pembatasan jabatan rangkap bagi Komisaris yang diatur dalam Pasal 22 ayat (5) Peraturan BI No. 2/27/PBI/2000 dan setiap anggota Direksi Perseroan tidak melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan bagi Direksi yang diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan BI No. 2/27/PBI/2000;

f. Anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain dan dengan demikian tidak melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan BI No. 2/27/PBI/2000;

g. Setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak tersangkut perkara hukum;

h. Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendelegasikan pengangkatan anggota Komite Audit kepada Direksi Perseroan serta telah dilaksanakan oleh Direksi Perseroan;

i. Perseroan telah mengangkat Tuan Jasman G. Munthe sebagai Sekretaris Perusahaan sesuai Peraturan Bapepam No. IX.I.4 dan telah membentuk Komite Audit sesuai Peraturan Bapepam No. IX.I.5;

j Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendelegasikan pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Direksi Perseroan;

k Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendelegasikan pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko kepada Direksi Perseroan.

l Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai susunan yang berlaku telah di laporkan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menegah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat selaku Kantor pedaftaran Perusahaan Dati II dimana Perseroan didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 25 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

m. Direksi Perseroan telah membentuk Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I.12. Perseroan telah memiliki ijin usaha utama sebagai Bank Umum yang termaktub dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-205/DDK/II/8/1971 tanggal 18 Agustus 1971, dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Keuangan ub. Menteri Keuangan Republik Indonesia, ijin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Devisa sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 5/2-Kep.Dir., dikeluarkan oleh Direksi Bank Indonesia (d/h PT Pan Indonesia Bank Ltd.) pada tanggal 21 April 1972, dan persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian sebagaimana termaktub dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-01/PM/Kstd/2001 tanggal 28 Pebruari 2002 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian Kepada PT Bank Panin Tbk., dikeluarkan oleh Kepala Biro Transaksi Dan Lembaga Efek, Perseroan memiliki 54 Kantor Cabang dalam negeri dan 1 kantor cabang di luar negeri, 388 Kantor Cabang Pembantu dan 6 Kantor Kas serta 1 kantor perwakilan di luar negeri, yang keseluruhannya dilengkapi dengan persetujuan/pelaporan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perbankan sedangkan untuk pembukaan/pengoperasian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Perseroan sebelum tahun 2006 telah ditegaskan oleh Perseroan kepada Bank Indonesia serta memperoleh tanggapan/pencatatan dari Bank Indonesia sedangkan untuk pembukaan/pengoperasian ATM setelah tahun 2006 hingga kini keseluruhannya dilengkapi dengan persetujuan/pelaporan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan. Alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas dan penempatan ATM masih sesuai dengan ijin/persetujuan yang diperoleh Perseroan dari instansi yang berwenang serta semua ijin/persetujuan tersebut di atas masih berlaku.

I.13. Perseroan memenuhi persyaratan sebagai Bank Umum sesuai ketentuan UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya serta sebagai Emiten sesuai ketentuan UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, dan telah melaksanakan kewajiban penyampaian: (i) laporan-laporan baik kepada Bapepam dan LK (d/h Bapepam) sebagai otoritas pasar modal maupun kepada Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan bank, (ii) Laporan Informasi Keuangan

Tahunan kepada Kementerian Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan; Perseroan selaku Bank Umum terkena sanksi bari Bank Indonesia berupa teguran maupun sanksi kewajiban membayar berkaitan dengan keterlambatan dan/atau kekeliruan pelaporan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan UU Perbankan. Pemenuhan Perseroan berkaitan dengan sanksi dari Bank Indonesia yang berupa kewajiban membayar telah dilaksanakan dengan memotong dana Perseroan pada rekening Perseroan di Bank Indonesia dan sanksi berupa teguran telah ditindaklanjuti manajemen Perseroan..

I.14. Transaksi pemberian kredit kepada pihak istimewa yang diuraikan dalam Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Bank Panin dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, kebijakan Perseroan yang berlaku (untuk pemberian kredit kepada karyawan Perseroan), dan tidak melanggar ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

I.15. Perseroan telah memenuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK) sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tangal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, memenuhi ketentuan CAR (Capital Adequacy Ratio) dan ketentuan penyediaan modal inti, serta memiliki kolektibilitas kredit yang bermasalah dengan kualitas kredit kurang lancar, diragukan dan macet (Non Performing Loan /NPL). Dalam hal akan dilakukan restrukturisasi kredit, Perseroan wajib memperhatikan kriteria debitor yang dapat dilakukan restrukturisasi sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (**"Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005"**) yaitu debitor mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit dan memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005, terhadap kredit yang macet dapat dilakukan hapus buku dan hapus tagih sepanjang sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih yang dibuat Perseroan menurut peraturan Bank Indonesia tersebut dan telah dilakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aktiva Produktif yang telah diberikan.

I.16. Perseroan telah terdaftar sebagai Agen Penjualan Efek Reksadana sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

I.17. Perseroan telah memperoleh ijin-ijin lain, diantaranya, Ijin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan dimana untuk ijin yang telah atau akan berakhir wajib didaftar kembali dan untuk kantor-kantor yang belum dilengkapi Ijin Tempat Usaha agar dilengkapi; persetujuan penggunaan generator pembangkitan tenaga listrik untuk kantor-kantor milik Perseroan atau kantor-kantor yang disewa Perseroan yang menggunakan generator dimana penggunaan generator yang belum dilengkapi dengan persetujuan penggunaan generator agar Perseroan melengkapinya; persetujuan instalasi listrik dan persetujuan instalasi penangkal petir untuk bangunan milik Perseroan di mana untuk bangunan lain milik Perseroan yang belum dilengkapi dengan persetujuan instalasi listrik dan persetujuan instalasi penangkal petir (jika ada) agar Perseroan segera melengkapinya; ijin pemanfaatan air di bawah tanah untuk bangunan milik Perseroan yang memanfaatkan air di bawah tanah di mana untuk ijin pemanfaatan air di bawah tanah yang telah/atau akan berakhir jangka waktu berlakunya agar diperpanjang oleh Perseroan dan untuk bangunan milik Perseroan lainnya yang juga memanfaatkan air di bawah tanah namun belum dilengkapi dengan ijin pemanfaatan air di bawah tanah agar Perseroan melengkapinya. Keterangan Domisili dimana untuk keterangan domisili yang telah/atau akan berakhir jangka waktu berlakunya agar diperpanjang oleh Perseroan dan untuk pemindahan alamat kantor dan/atau pembukaan kantor baru Perseroan agar Perseroan melengkapinya dengan Keterangan Domisili Perusahaan.

-Untuk Keterangan Domisili, Izin Tempat Usaha, izin penggunaan generator pembangkitan tenaga listrik, izin instalasi penangkal petir, izin pemanfaatan air di bawah tanah, tidak diatur secara tegas sanksi hukumnya, namun hal tersebut perlu menjadi perhatian dan ditaati Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Penerapan Good Corporatate Governance dengan mengingat apabila terjadi permasalahan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka sesuai dengan

ketentuan hukum perdata maupun pidana yang berlaku di Republik Indonesia baik Perseroan maupun anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dapat dituntut pertanggung jawabannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

I.18. Perseroan masih memenuhi persyaratan sebagai perusahaan terbuka dan tidak mendapat sanksi dari Badan Pengawas Pasar Modal berkenaan dengan keterlambatan penyampaian laporan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban Perseroan sebagai Emiten sesuai dengan ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

I.19. Perseroan telah memenuhi kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak serta pemenuhan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

I.20. Kantor-kantor Cabang Perseroan telah dilengkapi dengan NPWP, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Perseroan belum semua dilengkapi NPWP dan masih menggunakan NPWP Kantor Pusat atau Kantor Cabangnya dalam administrasi perpajakannya, namun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan, Perseroan wajib memiliki NPWP untuk masing-masing kantor dimana Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya. Belum dilengkapinya NPWP untuk masing-masing kantor tempat usaha Perseroan dapat menimbulkan Perseroan terkena sanksi administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan. Hingga saat ini Perseroan tidak mendapat sanksi dari instansi perpajakan yang berwenang atas belum dilengkapinya NPWP untuk setiap kantor tempat usaha Perseroan, namun hal tersebut perlu menjadi perhatian dan ditaati Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Penerapan Good Corporatate Governance.

I.21. Perseroan melaksanakan kewajiban pendaftaran perusahaan dan memiliki Tanda Daftar Perusahaan ("**TDP**") untuk Kantor Pusat yang masih berlaku sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU WDP**"), untuk Kantor Cabang sebagaian besar Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Perseroan telah melaksanakan pendaftaran perusahaan atau memperpanjang masa berlaku TDP pada Kantor Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten/Kota yang membawahi wilayah kantor Perseroan tersebut, kecuali untuk Kantor Cabang Pembantu yang baru dibuka pada saat ini masih dalam proses permohonan pendaftaran pada Kantor Pendafatan Perusahaan di mana Kantor Cabang Pembantu tersebut berad. Konsekuensi hukum jika kewajiban pendaftaran tidak dilaksanakan sesuai dengan Pasal 32 ayat 1 UU WDP diancam sanksi pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00 apabila tidak dilaksanakan pendaftaran TDP.

Hingga kini Perseroan tidak menerima sanksi dari instansi terkait berkaitan dengan belum semua kantor Perseroan memiliki TDP, namun hal tersebut perlu menjadi perhatian dan ditaati Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Penerapan Good Corporate Governance.

Perseroan memenuhi kriteria perusahaan yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) kepada Departemen Perdagangan Republik Indonesia, dan hal tersebut telah dilaksanakan Perseroan untuk tahun buku yang terakhir tahun 2011.

I.22. Jenis usaha dan kegiatan Perseroan tidak termasuk kriteria wajib AMDAL atau wajib UKL-UPL.

I.23. Aset (harta kekayaan) material Perseroan per 30 Juni 2012 meliputi barang bergerak berupa kendaraan bermotor, dan barang tidak bergerak berupa bidang tanah, bangunan, dan unit satuan rumah susun dan sebagian besar telah dilengkapi dokumen peroleh hak atau peralihan hak, bukti kepemilikan hak, atau ijin bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan aset benda bergerak berupa penyertaan saham pada perusahaan lain telah dicatat dalam daftar pemegang saham dan/atau dimuat dalam anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar perusahaan penyertaan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dengan demikian aset-aset tersebut memberi hak bagi Perseroan untuk dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku.

Aset Perseroan tidak diagunkan secara khusus, tidak disita, dan tidak menjadi obyek sengketa. Sehubungan kewajiban pembayaran Perseroan kepada para kreditumya tanpa pemberian jaminan/ agunan secara khusus maka berlaku Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dimana seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua kreditumya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen secara pari passu.

Aset saham penyertaan Perseroan pada perusahaan lain meliputi saham-saham pada perusahaan berikut: (i) PT Bank Panin Syariah (d/h PT Bank Harfa) berkedudukan di Jakarta Barat (**"BPS"**) sebesar 99,999%, (ii) PT Clipan Finance Indonesia Tbk., berkedudukan di Jakarta Barat (**"CFI"**) sebesar 54,35 %, (iii) PT Verena Multi Finance Tbk. (d/h PT Verena Oto Finance Tbk.), berkedudukan di Jakarta Pusat sebesar 42,87% (**"VMF"**), (iv) PT Panin Sekuritas Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan sebesar 29,00% (**"PS"**), (v) PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat sebesar 13,50% (**"AMAG"**), (vi) PT Bank ANZ Indonesia (d/h PT ANZ Panin Bank), berkedudukan di Jakarta Pusat (**"BAI"**) sebesar 1,00%, (vii) PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia sebesar 9,33% (**"SBPI"**), (viii) PT First Asia Capital (d/h PT Panin Capital), berkedudukan di Jakarta Pusat sebesar 2,5% (**"FAC"**), dan (ix) PT Sarana Kalsel Ventura, berkedudukan di Banjarmasin sebesar 1,04% (**"SKV"**). BPS, CFI, VMF dan AMAG merupakan Perusahaan Terkendali. PS, BAI, SBPI, FAC, dan SKV merupakan Perusahaan Penyertaan Biasa.

BPS, CFI, VMF dan AMAG didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perubahan anggaran dasar, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, permodalan dan persahaman, direksi dan komisaris, dan ijin-ijin usaha utama BPS, CFI, VMF maupun AMAG telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bukti kepemilikan aset material BPS, CFI, VMF maupun AMAG telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen ketenagakerjaan BPS, CFI, VMF maupun AMAG telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali peraturan perusahaan AMAG yang baru berakhir 18 Oktober 2012 dan belum terdapat perpanjangannya dan sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku masih ada tenggang waktu untuk mengajukan perpanjangan peraturan perusahaan dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal berakhirnya.

Perjanjian material yang dimiliki BPS, CFI, VMF maupun AMAG yang masih berlaku jangka waktunya berlakunya secara sah sesuai peraturan perundang-undangan berlaku dan untuk yang sudah habis masa berlakunya sedang dalam proses perpanjangan dan berlaku sah setelah jangka waktunya diperpanjang.

BPS tidak menghadapi perkara hukum. CFI, VMF maupun AMAG menghadapi perkara hukum perdata. Perkara hukum yang dihadapi CFI, VMF maupun AMAG tersebut tidak berpengaruh negatif terhadap jalannya usaha dan/atau tidak secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan ketiga perusahaan tersebut.
BPS, VMF maupun AMAG tidak menerima somasi. CFI menerima somasi dari pihak lain namun hal itu tidak mempengaruhi keadaan keuangan CFI dan/atau berpengaruh negatif terhadap jalannya usaha CFI.

I.24. Aset-aset penting dan material Perseroan telah diasuransikan dan seluruhnya masih dalam masa pertanggungan dan jenis obyek asuransi meliputi kendaraan bermotor, bangunan kantor dan inventaris. Jenis asuransi Perseroan meliputi asuransi kendaraan bermotor dengan polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia dan asuransi kerugian dengan polis asuransi *property all risk* dan polis asuransi standar gempa bumi Indonesia. Perseroan juga melakukan penutupan asuransi cash in safe. Penutupan asuransi dilakukan pada afiliasi Perseroan yakni PT Panin Insurance Tbk.

I.25. Hak Atas Kekayaan Intelektual merek "Panin Bank" telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk sejumlah kelas barang/jasa dan pendaftaran merek tersebut masih berlaku.

I.26. Perseroan memiliki peraturan perusahaan yang berlaku sah, mengikutsertakan karyawan-karyawannya yang memenuhi syarat pada program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan untuk kantor-kantor cabangnya namun terdapat beberapa kantor cabang yang belum dilengkapi bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku. Perseroan mempekerjakan tenaga kerja asing dan telah dilengkapi dengan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih berlaku. Perseroan memenuhi ketentuan pembayaran upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku. Perseroan tidak mendapat sanksi dibidang ketenagakerjaan.

I.27. Perjanjian-perjanjian material antara Perseroan dengan pihak lainnya telah ditandatangani pihak-pihak yang berwenang atau diberi kuasa untuk itu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya sah, berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan Perseroan.

I.28. Perjanjian-perjanjian tersebut tidak memuat ketentuan *negative covenents* yang dapat menghalangi Penawaran Umum Berkelanjutan I dan/atau yang dapat merugikan pemegang Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin, pemegang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin, dan para pemegang saham Perseroan.

I.29. Perseroan menghadapi perkara hukum perdata dan pajak. Perkara hukum yang dihadapi Perseroan tersebut tidak berpengaruh negatif terhadap jalannya usaha dan/atau tidak secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan Perseroan. Perseroan tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara hukum dihadapan badan-badan peradilan dan badan arbitrase yang berpengaruh negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan Perseroan. Perseroan tidak dinyatakan pailit dan tidak mengajukan ataupun dimohonkan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran di badan peradilan yang berwenang. Perseroan tidak menerima somasi yang berdampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

II. Pendapat Hukum Atas Hal-Hal Penting Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin

II.1. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin :

a. Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan terlebih dahulu sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 03/COM/EXT/12 tanggal 31 Agustus 2012 dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT;
b. Direksi Perseroan telah membuat dan menandatagani Surat Pernyataan mengenai tidak terjadinya gagal bayar dan hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Akuntan Publik yang mengaudit buku-buku Perseroan;
c. Perseroan (selaku Emiten) dan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), berkedudukan di Jakarta (selaku perusahaan pemeringkat) telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemeringkatan Atas Perusahaan Dan Obligasi Berkalnjutan I Dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I PT Bank Panin Tbk. No. 65A/PPJP/PEF/Dir/x/2012 tanggal 4 Oktober 2012 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup;
d. Perseroan telah membuat dan menandatangani "Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan" sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Bank Panin Tahun 2012 No. 46 tanggal 18 Oktober 2012 yang diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Bank Panin Tahun 2012 No. 104 tanggal 14 November 2012 keduanya dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakartadan Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan Bank Panin Tahun 2012 No. 50 tanggal 18 Oktober 2012 yang diubah dengan Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan Bank Panin Tahun 2012 No. 108 tanggal 14 November 2012 keduanya dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta.

e. Perseroan telah menyampaikan pelaporan kepada Bank Indonesia untuk penerbitan Obligasi Berkelanjutan I dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin yang merupakan produk baru Bank Panin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan Anggaran Dasar Perseron dalam rangka penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi Perseroan.
Perseroan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

II.2. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012:

a. Perseroan (selaku Emiten) dan PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta (selaku bursa efek dimana Obligasi Berkelanjutan I dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan akan dicatatkan) telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-048/BEI.PPS/10-2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang diubah dengan Addendum I Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. Ad-SP-018/BEI.PPS/11-2012 tanggal 12 November 2012, keduanya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup;

b. (i) Perseroan (selaku Emiten) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan I telah membuat dan menandatangani:
   (1) Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI No. SP-0056/PO/KSEI/1012 tanggal 18 Oktober 2012 yang diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI No. SP-0028/PI-PO/KSEI/1112 tanggal 14 November 2012, keduanya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup;
   (2) Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 47 tanggal 18 Oktober 2012 yang diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Agen Pembayaran No. 105 tanggal 14 November 2012, keduanya dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta (**"Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012"**)

   (ii) Perseroan (selaku Emiten) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (selaku Wali Amanat) telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 44 tanggal 18 Oktober 2012 yang diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 102 tanggal 14 November 2012, keduanya dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta (**"Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012"**);

   (iii) Perseroan (selaku Emiten) dengan (i) PT CIMB Securities, berkedudukan di Jakarta Selatan, (2) PT Danareksa Sekuritas, berkedudukan di Jakarta Pusat, (3) PT Evergreen Capital, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan (4) PT Indo Premier Securities, berkedudukan di Jakarta Pusat, (selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek) telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 45 tanggal 18 Oktober 2012 yang diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 103 tanggal 14 November 2012, keduanya dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012**");

c. (i) Perseroan (selaku Emiten) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta sehubungan dengan Obligasi Subordinasi Berkelanjtan I telah membuat dan menandatangani:
   (1) Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi Di KSEI No. SP-0055/PO/KSEI/1012 tanggal 18 Oktober 2012 yang diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi Di KSEI No. SP-0029/PI-PO/KSEI/1112 tanggal 14 November 2012, keduanya dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup;

(2) Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 51 tanggal 18 Oktober 2012 yang diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Agen Pembayaran No. 109 tanggal 14 November 2012, keduanya dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta (**"Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012"**);

(ii) Perseroan (selaku Emiten) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (selaku Wali Amanat) telah membuat dan menandatangani **Akta** Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 48 tanggal 18 Oktober 2012 yang diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 106 tanggal 14 November 2012, keduanya dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta (**"Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012"**);

(iii) Perseroan (selaku Emiten) dengan (i) PT CIMB Securities, berkedudukan di Jakarta Selatan, (2) PT Danareksa Sekuritas, berkedudukan di Jakarta Pusat, (3) PT Evergreen Capital, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan (4) PT Indo Premier Securities, berkedudukan di Jakarta Pusat, (selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek) telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 49 tanggal 18 Oktober 2012 yang diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 107 tanggal 14 November 2012, keduanya dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta (**"Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012"**).

II.3. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi SubordinasiBerkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi I Bank Panin Tahap I Tahun 2012, dan perjanjian-perjanjian lainnya yang disebut dalam butir II.2 diatas telah dibuat secara sah serta berlaku dan mengikat Perseroan dan pihak atau pihak-pihak lainnya yang membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

Seluruh perjanjian tersebut tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan perjanjian-perjanjian lainnya dimana Perseroan terikat sebagai pihak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dibidang Perbankan dan pihak menandatangani perjanjian-perjanjian memiliki kewenangan yang sah untuk mewakili Perseroan.

Pembuatan dan penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut telah memenuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pihak Wali Amanat yang telah memiliki surat terdaftar Wali Amanat dari Bapepam dan LK dan bagi Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang telah memiliki izin usaha Penjamin Emisi Efek dari Bapepam dan LK, dan pihak yang mewakili Wali Amanat telah mendapat kuasa yang cukup dari Direksi Wali Amanat untuk menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012, dan pihak yang mewakili masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah perorangan yang terdaftar di Bapepam dan LK yang berwenang mewakili Para masing-masing Penjamin Emisi Efek tersebut dan berwenang menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bak Panin Tahap I Tahun 2012.

Wali Amanat dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat.

II.4. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT CIMB Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Evergreen Capital, dan PT Indo Premier Securities, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta PT Pemeringkat Efek Indonesia selaku Perusahaan Pemeringkat Efek.

II.5. Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin tidak dijamin dengan suatu agunan secara khusus. Oleh karena itu seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua kreditumya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen secara pari passu, termasuk para pemegang Obligasi III, berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

II.6. Kedudukan hukum pemegang Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin dan pemegang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin apabila Perseroan bubar dan dilikuidasi, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hak tagih untuk Obligasi Berkelanjutan I Bank Paniin dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin akan dibayar dari sisa hasil likuidasi Perseroan bersaman dengan kreditur lainnya yang mempunyai tingkat yang sama dan sebelum pembayaran kepada pemegang saham Perseroan.

II.7. Pembayaran Bunga dan Pokok Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin dapat mengalami penaguhan dalam hal Perseroan mengalami kejadian-kejadian: (i) pembayaran dimaksud dapat menyebabkan Kewajiban Penyedian Modal Minimum Emiten secara individual atau Kewajiban Penyedian Modal Minimum Perseroan secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, (ii) Perseroan dalam keadaan rugi; atau (iii) kondisi profitabiitas Perseroan tidak memungkinkan untuk membayar Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perbankan.

II.8. Informasi yang menyangkut aspek hukum yang disajikan dalam Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan I yang akan diterbitkan Perseroan tidak menyesatkan.

Pendapat Hukum diberikan dengan asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

(1) Kami memiliki kualifikasi dan telah melaksanakan Uji Tuntas dan memberi Pendapat Hukum dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I ini dalam integritas kami sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal;

(2) Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan oleh karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi di negara lain;

(3) Pendapat Hukum didasarkan pada Uji Tuntas atas dokumen-dokumen tertulis dan keterangan-keterangan lisan dan/atau tertulis yang telah diberikan oleh Perseroan atau pejabat-pejabatnya atau petugas-petugasnya serta keterangan tertulis yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada kami selama dilakukan Uji Tuntas, kecuali terhadap dokumen atau informasi yang oleh UU Perbankan merupakan kerahasiaan bank atau dokumen yang dianggap sama sekali merupakan rahasia perusahaan Perseroan yang tidak diberikan kepada kami untuk dilakukan Uji Tuntas;

(4) (a) Setiap dan seluruh dokumen yang kami terima untuk Uji Tuntas merupakan dokumen yang asli dan tidak palsu, dan tandatangan yang tertera pada dokumen tersebut adalah benar tandatangan orang atau orang-orang yang bersangkutan; dan orang atau orang-orang yang membuat dan menandatangani dokumen tersebut adalah berwenang dan cakap menurut hukum untuk membuat dan menandatangani dokumen dan/atau melakukan tindakan hukum yang disebut dalam dokumen yang bersangkutan; dan dalam hal pihak yang membuat dokumen berbentuk badan maka badan tersebut berhak untuk melakukan

tindakan hukum yang disebut dalam dokumen yang bersangkutan; dan jika dokumen yang disampaikan kepada kami adalah salinan atau fotokopi, maka salinan atau fotokopi dokumen tersebut adalah sesuai dengan aslinya;

(b) Setiap dan seluruh dokumen dan/atau informasi sehubungan dengan fakta-fakta, data, pernyataan, keterangan, penegasan, dan informasi yang kami terima dari Perseroan adalah dokumen yang diberikan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dan memberikannya;

(c) Setiap dan seluruh dokumen dan/atau informasi sehubungan dengan fakta-fakta, data, pernyataan, keterangan, penegasan, dan informasi yang kami terima dari Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pejabat-pejabatnya dan petugas-petugasnya, dan/atau keterangan tertulis yang kami terima dari instansi yang berwenang adalah benar, akurat, lengkap, dan telah sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, dan mencerminkan keadaan pada Tanggal Hasil Uji Tuntas yang jatuh pada tanggal yang sama dengan tanggal LUT dan tanggal Pendapat Hukum ini;

(5) Pendapat Hukum merupakan pendapat hukum yang berkelanjutan dari pendapat hukum yang kami berikan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I.

Pendapat Hukum diberikan dengan pembatasan sebagai berikut:

(1) Pendapat Hukum hanya meliputi hal-hal yang disebut secara tegas di dalamnya dan tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dianggap termasuk di dalamnya atau dianggap serupa;

(2) Pendapat Hukum tidak memuat dan tidak dapat dipergunakan untuk memberi penilaian dari aspek perpajakan dan/atau komersial dan/atau finansial atas suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau atas aset yang terkait.

Demikian Pendapat Hukum kami buat selaku Advokat/Konsultan Hukum Pasar Modal yang independen dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum sepanjang telah dimuat secara tegas dalam Pendapat Hukum.

Hormat kami,

DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI

Moses Fernandez da Silva, S.H.,CN
STTD Bapepam No. 62/STTD-KH/PM/1996
Anggota HKHPM No. 95010
Anggot PERADI No. G.96.10878

Tembusan Kepada Yth :

1. **Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan:**
   Gedung Baru Departemen Keuangan Lantai 3
   Jl. DR. Wahidin Raya
   Jakarta Pusat

2. **Bursa Efek:**

   PT BURSA EFEK INDONESIA
   Gedung Bursa Efek Indonesia
   Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53
   Jakarta 12190, Indonesia

   melalui Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

3. **Wali Amanat:**

   PT BANK MANDIRI (Persero) TBK.
   Plaza Mandiri, lantai 22
   Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38
   Jakarta 12190, Indonesia

   melalui Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

4. **Penjamin Pelaksana Emisi Efek:**

   - **PT CIMB SECURITIES INDONESIA**
     The Indonesia Stock Exchange Building Tower II Lantai 20
     Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 52-53
     Jakarta 12190, Indonesia

     melalui Direksi PT CIMB Securities Indonesia

   - **PT DANAREKSA SEKURITAS**
     Gedung Danareksa Lantai 1
     Jl. Medan Merdeka Selatan No.14
     Jakarta 10110, Indonesia

     melalui Direksi PT Danareksa Sekuritas
   - **PT EVERGREEN CAPITAL**
     Panin Bank Centre, lantai dasar
     Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
     Jakarta 10270, Indonesia

     melalui Direksi PT Evergreen Capital

   - **PT INDO PREMIER SECURITIES**
     Wisma GKBI 7/F Suite 718
     Jl. Jenderal Sudirman No. 28
     Jakarta 10210, Indonesia

     melalui Direksi PT Indo Premier Securities

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ANAK PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

PaninBank

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN INFORMASI TAMBAHAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2012 DAN 2011
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009
DAN 1 JANUARI 2009/31 DESEMBER 2008
PT BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. Rostian Sjamsudin
   Alamat kantor : Bank Panin Pusat
   Jl. Jend. Sudirman – Senayan
   Jakarta 10270
   Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain : Jakarta
   Nomor Telepon : (021)2700545
   Jabatan : Presiden Direktur

2. Nama : Ahmad Hidayat
   Alamat kantor : Bank Panin Pusat
   Jl. Jend. Sudirman – Senayan
   Jakarta 10270
   Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain : Jakarta
   Nomor Telepon : (021)2700545
   Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan;
2. Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian dan informasi tambahan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Nopember 2012

Presiden Direktur



Drs. H. Rostian Sjamsudin

Direktur

Ahmad Hidayat

Deloitte.

Osman Bing Satrio & Rekan
Registered Public Accountants
License No. KMK No. 758/KM.1/2007
The Plaza Office Tower 32nd Floor
Jl. M.H. Thamrin Kav 28 - 30
Jakarta 10350, Indonesia

Tel: +62 21 29923100
Fax: +62 21 29928200, 29928300
E-mail: iddttl@deloitte.com
www.deloitte.com

Laporan Auditor Independen

No. GAR112 0850 PIB IBH

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
P.T. Bank Pan Indonesia Tbk

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan konsolidasian P.T. Bank Pan Indonesia Tbk dan entitas anak tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008, serta laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Laporan keuangan konsolidasian adalah tanggung jawab manajemen Bank. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian berdasarkan audit kami. Kami tidak mengaudit laporan keuangan PT Panin Sekuritas Tbk dan PT Laksayudha Abadi, entitas asosiasi, yang investasinya disajikan dengan metode ekuitas untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 dan seluruh laporan keuangan entitas asosiasi, yang investasinya disajikan dengan metode ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008. Investasi pada perusahaan asosiasi tersebut disajikan dengan metode ekuitas. Nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi tersebut masing-masing mencerminkan 0,22%, 0,23%, 0,23%, 0,26% dan 0,26% dari jumlah aset konsolidasian masing-masing pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008, dan bagian laba bersih entitas asosiasi yang termasuk dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian masing-masing sebesar 2,78%, 3,20%, 5,41% dan 4,53% dari jumlah laba bersih konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Kami juga tidak mengaudit laporan posisi keuangan P.T. Verena Multi Finance Tbk, entitas anak, yang laporan keuangannya menyajikan jumlah aset sebesar 0,92% dari jumlah aset konsolidasian dan seluruh perusahaan asosiasi tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008. Laporan keuangan entitas asosiasi dan entitas anak tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya telah diserahkan kepada kami, dan pendapat kami, sepanjang berkaitan dengan jumlah untuk entitas asosiasi dan entitas anak tersebut, didasarkan semata-mata atas laporan auditor independen lain tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami dan laporan auditor independen lain memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, berdasarkan audit kami dan laporan auditor independen lain tersebut, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan P.T. Bank Pan Indonesia Tbk dan entitas anak tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008, dan hasil usaha serta arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Audit kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapatan atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi tambahan terlampir disajikan untuk tujuan analisis tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, dan bukan ditujukan untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas perusahaan secara individu serta bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan konsolidasian. Informasi tambahan tersebut adalah tanggung jawab manajemen Bank. Informasi tambahan tersebut telah menjadi obyek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian, dan, menurut pendapat kami, disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Seperti dijelaskan pada Catatan 2a, P.T. Bank Pan Indonesia Tbk dan entitas anak telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan No. GA112 0813 PIB IBH tanggal 27 September 2012 atas laporan keuangan konsolidasian P.T. Bank Pan Indonesia Tbk dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan obligasi dan obligasi subordinasi, Bank telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan konsolidasian terdahulu dengan laporan keuangan yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan dalam Catatan 59 mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian.

OSMAN BING SATRIO & REKAN

Bing Harianto, SE
Izin Akuntan Publik No. AP.0558

14 Nopember 2012

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2012, 31 DESEMBER 2011, 2010, 2009 DAN 1 JANUARI 2009/31 DESEMBER 2008

	Catatan	30 Juni 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010	31 Desember 2009	1 Januari 2009/ 31 Desember 2008
		Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
ASET						
KAS	3b,3g,5	1.127.088	1.392.325	1.076.074	900.900	928.108
GIRO PADA BANK INDONESIA	3g,3m,6	8.395.204	7.490.081	5.403.656	2.480.939	1.921.074
GIRO PADA BANK LAIN - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 1 juta pada tanggal 30 Juni 2012, Rp 2 juta pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Rp 8.655 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp 14.112 juta pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008	3g,3m,3s,7					
Pihak berelasi	3f,46	29.466	79.389	78.740	35.738	70.605
Pihak ketiga		588.279	1.105.833	790.014	821.398	1.293.917
Jumlah		617.745	1.185.222	868.754	857.136	1.364.522
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar nihil pada tanggal 30 Juni 2012, Rp 500 juta pada tanggal 31 Desember 2011, Rp 600 juta pada tanggal 31 Desember 2010, Rp 78.280 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp 40.249 juta pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008	3g,3n,3s,8					
Pihak berelasi	3f,46	-	-	180.200	485.100	49.500
Pihak ketiga		9.450.117	15.968.557	16.808.876	7.621.983	5.244.061
Jumlah		9.450.117	15.968.557	16.989.076	8.107.083	5.293.561
EFEK-EFEK	3g,3o,3s,9					
Pihak berelasi	3f,46					
Dimiliki hingga jatuh tempo		-	30.000	30.000	30.000	-
Tersedia untuk dijual		-	9.893	9.613	10.000	-
Diperdagangkan		38.946	18.631	2.039	-	-
Pihak ketiga						
Dimiliki hingga jatuh tempo		12.545.884	13.379.925	7.985.894	4.785.688	12.632.637
Tersedia untuk dijual		3.688.713	1.605.757	12.570.626	14.270.535	277.214
Diperdagangkan		524.108	552.320	100.147	28.564	73.441
Jumlah		16.797.651	15.596.526	20.698.319	19.124.787	12.983.292
Dikurangi:						
Cadangan kerugian penurunan nilai		(162.218)	(58.751)	(10.618)	(38.316)	(34.798)
Bersih		16.635.433	15.537.775	20.687.701	19.086.471	12.948.494
TAGIHAN DERIVATIF - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar nihil pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, Rp 32 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp 1.114 juta pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008	3g,3p,3s,10	8.839	3.316	4.936	3.122	110.268
KREDIT - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 2.281.530 juta pada tanggal 30 Juni 2012, Rp 2.000.491 juta pada tanggal 31 Desember 2011, Rp 1.563.457 juta pada tanggal 31 Desember 2010, Rp 1.154.324 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp 1.244.127 juta pada tanggal 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008	3g,3q,3r,3s,11					
Pihak berelasi	3f,46	13.485	14.398	14.058	13.023	12.621
Pihak ketiga		81.367.339	69.064.913	55.668.504	39.954.075	35.269.835
Jumlah		81.380.824	69.079.311	55.682.562	39.967.098	35.282.456
TAGIHAN ANJAK PIUTANG- setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 170 juta pada tanggal 30 Juni 2012, Rp 330 juta pada tanggal 31 Desember 2011, Rp 2.121 juta pada tanggal 31 Desember 2010, Rp 15.237 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp 6.667 juta pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008	3g,3s,3cc	1.044.310	1.078.015	567.094	270.345	258.590

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2012, 31 DESEMBER 2011, 2010, 2009 DAN 1 JANUARI 2009/31 DESEMBER 2008 (Lanjutan)

	Catatan	30 Juni 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010	31 Desember 2009	1 Januari 2009/ 31 Desember 2008
		Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar nihil pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan Rp 596 juta pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008	3g,3s,3gg,12	5.789.023	2.798.161	-	8.000	127.010
INVESTASI NETO SEWA PEMBIAYAAN - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 7.970 juta pada tanggal 30 Juni 2012, Rp 4.054 juta pada tanggal 31 Desember 2011, Rp 15.006 juta pada tanggal 31 Desember 2010, Rp 28.074 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp 30.747 juta pada tanggal 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008	3g,3s,3u,13	1.419.557	1.152.711	926.382	864.914	878.882
PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 37.962 juta pada tanggal 30 Juni 2012, Rp 41.174 juta pada tanggal 31 Desember 2011, Rp 28.119 juta pada tanggal 31 Desember 2010, Rp 24.121 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp 17.565 juta pada tanggal 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008	3g,3s,3v,14					
Pihak berelasi		-	154	189	85	59
Pihak ketiga		3.696.266	3.453.946	1.905.074	1.069.922	821.037
Jumlah		3.696.266	3.454.100	1.905.263	1.070.007	821.096
TAGIHAN AKSEPTASI - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar nihil pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, Rp 5.169 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp 39.200 juta pada tanggal 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008	3g,3s,3t,15	1.155.133	848.825	503.849	511.736	682.967
PENYERTAAN DALAM BENTUK SAHAM - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 625 juta pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, Rp 11.796 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp 10.064 juta pada tanggal 1 Januari 2009/Desember 31 2008	3f,3g,3s,3w 16,46	429.413	419.529	276.925	203.627	169.068
ASET TETAP - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.785.858 juta pada tanggal 30 Juni 2012, Rp 1.672.164 juta pada tanggal 31 Desember 2011, Rp 1.462.250 juta pada tanggal 31 Desember 2010, Rp 1.229.296 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp 949.138 juta pada tanggal 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008	3x,3z,17	1.893.960	1.805.408	1.763.280	1.702.829	1.671.786
ASET PAJAK TANGGUHAN - BERSIH	3mm,41	96.860	43.485	53.157	77.293	79.740
ASET LAIN-LAIN	3s,18					
Aset tetap yang belum digunakan dalam kegiatan operasional	3aa	486.072	523.581	507.941	429.974	409.416
Agunan yang diambil alih - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 54.459 juta pada tanggal 30 Juni 2012, Rp 96.300 juta pada tanggal 31 Desember 2011, Rp 135.734 juta pada tanggal 31 Desember 2010, Rp 120.081 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp 90.750 juta pada tanggal 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008	3bb	260.771	227.913	378.237	375.721	369.214
Lainnya - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 1.634 juta pada tanggal 30 Juni 2012, Rp 1.420 juta pada tanggal 31 Desember 2011, Rp 446 juta pada tanggal 31 Desember 2010, Rp 152 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dan nihil pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008	3d,3g,3y,3ii	1.906.923	1.745.864	1.400.447	998.522	1.092.823
Jumlah		2.653.766	2.497.358	2.286.625	1.804.217	1.871.453
JUMLAH ASET		135.793.538	124.754.179	108.995.334	77.915.717	64.409.075

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

	Catatan	30 Juni 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010	31 Desember 2009	1 Januari 2009/ 31 Desember 2008
		Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS						
LIABILITAS SEGERA		374.837	255.962	138.272	164.729	286.231
SIMPANAN	3h,3dd,19					
Pihak berelasi	3f,46	422.960	424.923	379.438	288.374	689.008
Pihak ketiga		92.364.285	85.323.609	74.900.282	55.946.113	45.354.671
Jumlah		92.787.245	85.748.532	75.279.720	56.234.487	46.043.679
SIMPANAN DARI BANK LAIN	3h,3ee,20					
Pihak berelasi	3f,46	12.468	10.155	30.000	30.864	29.298
Pihak ketiga		8.568.736	5.305.074	3.537.326	2.228.936	1.305.280
Jumlah		8.581.204	5.315.229	3.567.326	2.259.800	1.334.578
EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI - PIHAK KETIGA	3h,3hh,21	3.062.667	3.665.163	4.653.892	503.887	-
LIABILITAS DERIVATIF - PIHAK KETIGA	3h,3p,10	3.419	2.951	7.216	5.295	94.549
LIABILITAS AKSEPTASI	3h,3t,15					
Pihak berelasi	3f,46	-	4.139	-	-	42.042
Pihak ketiga		1.155.912	845.855	503.849	516.905	648.397
Jumlah		1.155.912	849.994	503.849	516.905	690.439
SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN - BERSIH	3h,3ff,22	3.879.993	4.591.701	2.789.842	2.303.760	1.623.516
PINJAMAN YANG DITERIMA	3h,23					
Pihak berelasi	3f,46	-	-	-	-	545.000
Pihak ketiga		3.269.645	2.985.155	3.582.389	1.631.918	2.646.603
Jumlah		3.269.645	2.985.155	3.582.389	1.631.918	3.191.603
UTANG PAJAK	3mm,24,41	239.974	268.626	136.305	227.052	94.822
LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN - BERSIH	3mm,41	209	-	-	-	-
LIABILITAS LAIN-LAIN	3h,3jj,3ll,25	1.441.064	1.291.121	953.658	779.304	728.945
OBLIGASI SUBORDINASI - BERSIH	3h,3ff,26	3.894.605	3.891.614	3.886.111	1.491.856	1.489.350
JUMLAH LIABILITAS		118.690.774	108.866.048	95.498.580	66.118.993	55.577.712

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2012, 31 DESEMBER 2011, 2010, 2009 DAN 1 JANUARI 2009/31 DESEMBER 2008 (Lanjutan)

	Catatan	30 Juni 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010	31 Desember 2009	1 Januari 2009/ 31 Desember 2008
		Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
EKUITAS						
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK						
MODAL SAHAM - nilai nominal Rp 100 per saham						
Modal dasar - 96.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, 59.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008						
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 24.087.645.998 saham pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 20.335.300.386 saham pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008	27	2.408.765	2.408.765	2.408.765	2.408.765	2.033.530
AGIO SAHAM	2ff,27	3.444.330	3.444.330	3.444.330	3.444.330	2.318.626
SELISIH TRANSAKSI EKUITAS DENGAN PIHAK NON-PENGENDALI	3w,28	(16.454)	(16.454)	(8.782)	(3.747)	(3.747)
KOMPONEN EKUITAS LAINNYA - LABA (RUGI) BELUM DIREALISASI DARI PEMILIKAN EFEK	3g,3o,9	(12.768)	(31.159)	(24.598)	130.478	(260.002)
SALDO LABA						
Ditentukan penggunaannya		140.000	120.000	100.000	100.000	100.000
Tidak ditentukan penggunaannya		9.393.699	8.315.575	6.505.244	4.812.285	3.851.679
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		15.357.572	14.241.057	12.424.959	10.892.111	8.040.086
KEPENTINGAN NON-PENGENDALI	3c,29	1.745.192	1.647.074	1.071.795	904.613	791.277
JUMLAH EKUITAS		17.102.764	15.888.131	13.496.754	11.796.724	8.831.363
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		135.793.538	124.754.179	108.995.334	77.915.717	64.409.075

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2012 DAN 2011 (2011 - TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009

	Catatan	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
		Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL						
Pendapatan Bunga	3f,3gg,3ii,3jj					
Bunga yang diperoleh	31,46	5.256.077	4.658.439	9.611.181	7.965.031	7.158.372
Provisi dan komisi kredit	3kk	178.135	169.971	334.469	218.936	217.295
Jumlah Pendapatan Bunga		5.434.212	4.828.410	9.945.650	8.183.967	7.375.667
Beban Bunga	3f,3ff,3hh,3ii,3jj					
Bunga	32,46	2.395.433	2.349.566	4.708.193	3.843.861	4.029.752
Hadiah		334.968	7.221	67.261	12.907	11.193
Provisi dan komisi yang dibayar	3kk	138.386	88.652	207.455	124.725	109.732
Jumlah Beban Bunga		2.868.787	2.445.439	4.982.909	3.981.493	4.150.677
Pendapatan Bunga - Bersih		2.565.425	2.382.971	4.962.741	4.202.474	3.224.990
Pendapatan Operasional Lainnya						
Keuntungan bersih penjualan efek	3o,9,33	95.462	76.945	185.714	325.393	223.227
Pendapatan underwriting	3jj,34	176.351	149.286	278.231	245.602	216.937
Provisi dan komisi selain kredit - bersih	3kk,35	33.584	9.126	36.340	52.482	53.528
Pendapatan transaksi valuta asing - bersih	3e	152.856	101.590	287.348	217.266	174.287
Kenaikan (penurunan) nilai efek yang diperdagangkan	3o,9	(55.728)	7.542	49.851	1.913	4.697
Bagian laba bersih entitas asosiasi	3w,16	30.765	30.277	58.569	69.986	43.511
Lainnya	36	481.894	441.142	1.214.238	448.822	232.543
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya		915.184	815.908	2.110.291	1.361.464	948.730
Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai						
Aset produktif	3g,3s,7,8,9,10,11,12 13,14,15,16,37	471.993	498.803	998.356	1.198.296	914.031
Aset non produktif dan lainnya	3s,18,37	(37.939)	(41.340)	(36.489)	18.294	35.897
Jumlah Beban Kerugian Penurunan Nilai		434.054	457.463	961.867	1.216.590	949.928
Beban Operasional Lainnya						
Umum dan administrasi	3f,38,46	766.675	1.039.162	2.078.973	1.381.499	967.017
Tenaga kerja	39	415.964	333.682	874.835	705.290	533.832
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	3ll,43	121.171	60.534	120.818	83.877	66.462
Lainnya	40	196.404	196.949	408.476	320.793	255.050
Jumlah Beban Operasional Lainnya		1.500.214	1.630.327	3.483.102	2.491.459	1.822.361
Beban Operasional Lainnya - Bersih		(1.019.084)	(1.271.882)	(2.334.678)	(2.346.585)	(1.823.559)
LABA OPERASIONAL		1.546.341	1.111.089	2.628.063	1.855.889	1.401.431

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2012 DAN 2011 (2011 - TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

	Catatan	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
		Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL						
Hasil sewa		6.435	6.457	12.649	12.164	11.885
Lainnya - bersih		77.381	29.112	95.654	75.773	53.239
PENDAPATAN NON OPERASIONAL - BERSIH		83.816	35.569	108.303	87.937	65.124
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		1.630.157	1.146.658	2.736.366	1.943.826	1.466.555
PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK	3mm,41					
Pajak kini		(441.893)	(272.792)	(673.579)	(470.753)	(385.155)
Pajak tangguhan		53.166	(8.154)	(9.672)	(24.136)	(1.567)
Jumlah		(388.727)	(280.946)	(683.251)	(494.889)	(386.722)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN		1.241.430	865.712	2.053.115	1.448.937	1.079.833
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN						
Kenaikan (penurunan) nilai efek yang belum direalisasi	3o,9	23.904	18.789	(14.846)	(155.434)	390.526
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		1.265.334	884.501	2.038.269	1.293.503	1.470.359
LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik entitas induk		1.098.124	749.619	1.830.331	1.292.586	960.606
Kepentingan non-pengendali	3c,29	143.306	116.093	222.784	156.351	119.227
LABA BERSIH		1.241.430	865.712	2.053.115	1.448.937	1.079.833
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik entitas induk		1.116.515	769.045	1.823.770	1.137.510	1.351.086
Kepentingan non-pengendali		148.819	115.456	214.499	155.993	119.273
Jumlah Laba Komprehensif		1.265.334	884.501	2.038.269	1.293.503	1.470.359
LABA PER SAHAM	3nn,42					
(dalam Rupiah penuh)						
Dasar		45,59	31,12	75,99	53,66	43,03

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2012 DAN 2011 (2011 - TIDAK DIAUDIT) SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009

	Catatan	Modal saham	Agio saham	Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali	Komponen ekuitas lainnya - laba (rugi) belum direalisasi dari pemilikan efek	Saldo Laba/Retained Earnings		Ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
						Ditentukan penggunaannya	Tidak ditentukan penggunaannya			
		Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Saldo per 1 Januari 2009		2.033.530	2.318.626	(3.747)	(260.002)	100.000	3.747.271	7.935.678	791.277	8.726.955
Penyesuaian sehubungan dengan perubahan kebijakan akuntansi	3s	-	-	-	-	-	104.408	104.408	-	104.408
Saldo per 1 Januari 2009 setelah penyesuaian sehubungan dengan perubahan kebijakan akuntansi		2.033.530	2.318.626	(3.747)	(260.002)	100.000	3.851.679	8.040.086	791.277	8.831.363
Pelaksanaan waran menjadi saham	1c,3ff	375.235	1.125.704	-	-	-	-	1.500.939	-	1.500.939
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	960.606	960.606	119.227	1.079.833
Laba belum direalisasi dari pemilikan efek	3o,9	-	-	-	390.480	-	-	390.480	46	390.526
Jumlah laba komprehensif		-	-	-	390.480	-	960.606	1.351.086	119.273	1.470.359
Kepentingan Non Pengendali atas aset bersih entitas anak	3c	-	-	-	-	-	-	-	(5.937)	(5.937)
Saldo per 31 Desember 2009		2.408.765	3.444.330	(3.747)	130.478	100.000	4.812.285	10.892.111	904.613	11.796.724
Saldo per 1 Januari 2010		2.408.765	3.444.330	(3.747)	130.478	100.000	4.812.285	10.892.111	904.613	11.796.724
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK No. 55 (revisi 2006)	2a	-	-	-	-	-	400.373	400.373	-	400.373
Saldo per 1 Januari 2010 setelah penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK No. 55 (revisi 2006)		2.408.765	3.444.330	(3.747)	130.478	100.000	5.212.658	11.292.484	904.613	12.197.097
Selisih transaksi ekuitas dengan pihak nonpengendali	3w,28	-	-	(5.035)	-	-	-	(5.035)	-	(5.035)
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	1.292.586	1.292.586	156.351	1.448.937
Rugi belum direalisasi dari pemilikan efek	3o,9	-	-	-	(155.076)	-	-	(155.076)	(358)	(155.434)
Jumlah laba komprehensif		-	-	-	(155.076)	-	1.292.586	1.137.510	155.993	1.293.503
Kepentingan Non Pengendali atas aset bersih entitas anak	3c	-	-	-	-	-	-	-	11.189	11.189
Saldo per 31 Desember 2010		2.408.765	3.444.330	(8.782)	(24.598)	100.000	6.505.244	12.424.959	1.071.795	13.496.754
Selisih transaksi ekuitas dengan pihak nonpengendali	3w,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba bersih periode berjalan (tidak diaudit)		-	-	-	-	-	749.619	749.619	116.093	865.712
Laba (rugi) belum direalisasi dari pemilikan efek (tidak diaudit)	3o,9	-	-	-	19.426	-	-	19.426	(637)	18.789
Jumlah laba komprehensif (tidak diaudit)		-	-	-	19.426	-	749.619	769.045	115.456	884.501
Cadangan umum	30	-	-	-	-	20.000	(20.000)	-	-	-
Kepentingan Non Pengendali atas aset bersih entitas anak	3c	-	-	-	-	-	-	-	(30.254)	(30.254)
Saldo per 30 Juni 2011 (tidak diaudit)		2.408.765	3.444.330	(8.782)	(5.172)	120.000	7.234.863	13.194.004	1.156.997	14.351.001
Saldo per 1 Januari 2011		2.408.765	3.444.330	(8.782)	(24.598)	100.000	6.505.244	12.424.959	1.071.795	13.496.754
Selisih transaksi ekuitas dengan pihak nonpengendali	3w,28	-	-	(7.672)	-	-	-	(7.672)	-	(7.672)
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	1.830.331	1.830.331	222.784	2.053.115
Rugi belum direalisasi dari pemilikan efek	3o,9	-	-	-	(6.561)	-	-	(6.561)	(8.285)	(14.846)
Jumlah laba komprehensif		-	-	-	(6.561)	-	1.830.331	1.823.770	214.499	2.038.269
Cadangan umum	30	-	-	-	-	20.000	(20.000)	-	-	-
Kepentingan Non Pengendali atas aset bersih entitas anak	3c	-	-	-	-	-	-	-	360.780	360.780
Saldo per 31 Desember 2011		2.408.765	3.444.330	(16.454)	(31.159)	120.000	8.315.575	14.241.057	1.647.074	15.888.131
Selisih transaksi ekuitas dengan pihak nonpengendali	3w,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba bersih periode berjalan		-	-	-	-	-	1.098.124	1.098.124	143.306	1.241.430
Laba belum direalisasi dari pemilikan efek	3o,9	-	-	-	18.391	-	-	18.391	5.513	23.904
Jumlah laba komprehensif		-	-	-	18.391	-	1.098.124	1.116.515	148.819	1.265.334
Cadangan umum	30	-	-	-	-	20.000	(20.000)	-	-	-
Kepentingan Non Pengendali atas aset bersih entitas anak	3c	-	-	-	-	-	-	-	(50.701)	(50.701)
Saldo per 30 Juni 2012		2.408.765	3.444.330	(16.454)	(12.768)	140.000	9.393.699	15.357.572	1.745.192	17.102.764

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2012 DAN 2011 (2011 - TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009

	Catatan	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
		Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Bunga, provisi dan komisi kredit yang diterima		5.382.403	4.846.100	9.838.995	8.276.058	7.430.638
Bunga, hadiah, provisi dan komisi dana yang dibayar		(2.879.914)	(2.452.046)	(4.970.718)	(3.922.923)	(4.189.457)
Penerimaan pendapatan operasional lainnya		787.232	673.563	1.711.481	915.876	734.809
Pembayaran beban operasional lainnya		(1.309.826)	(1.572.864)	(3.289.986)	(2.397.040)	(1.564.457)
Keuntungan dari transaksi valuta asing - bersih		89.304	29.577	286.501	122.510	88.959
Penerimaan pendapatan non operasional - bersih		84.313	63.195	135.233	320.970	329.564
Pembayaran beban pajak		(461.843)	(238.527)	(549.520)	(566.388)	(237.860)
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		1.691.669	1.348.998	3.161.986	2.749.063	2.592.196
Penurunan (kenaikan) aset operasi						
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		1.805.623	(1.587.895)	(1.805.623)	-	(1.578.314)
Efek-efek		2.410.054	(11.431.176)	(2.996.897)	616.151	788.392
Kredit		(12.559.835)	(6.269.505)	(14.089.603)	(14.831.890)	(5.705.797)
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		(2.990.862)	(894.083)	(2.798.161)	8.000	119.927
Investasi neto sewa pembiayaan		(275.237)	(37.034)	(221.059)	(50.870)	9.100
Piutang pembiayaan konsumen		(183.712)	(864.625)	(1.624.952)	(884.818)	(287.564)
Tagihan anjak piutang		33.865	(144.569)	(509.129)	(283.634)	(20.325)
Aset lain-lain		(272.730)	(116.100)	(123.485)	(250.252)	(12.098)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi						
Liabilitas segera		68.172	294.430	117.672	(26.326)	(121.688)
Simpanan		7.038.713	2.994.042	10.468.812	19.045.835	10.195.957
Simpanan dari bank lain		3.265.976	1.601.579	1.747.903	1.306.922	920.072
Liabilitas akseptasi		(391)	2.295	1.170	-	31.728
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali		(602.497)	(3.749.938)	(988.728)	4.150.005	503.887
Liabilitas lain-lain		156.075	372.251	107.074	106.303	59.249
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(415.117)	(18.481.330)	(9.553.020)	11.654.489	7.494.722
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Hasil penjualan penyertaan entitas anak		-	-	-	-	3.284
Hasil penjualan aset tetap	17	5.016	5.772	9.770	38.533	10.220
Penerimaan dividen		60	19.640	19.745	12.722	5.308
Perolehan aset tetap	17	(154.522)	(130.941)	(261.803)	(367.304)	(295.990)
Penyertaan pada entitas asosiasi		-	(9.000)	(9.000)	(20.000)	-
Hasil penjualan entitas asosiasi		-	-	-	17.420	-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(149.446)	(114.529)	(241.288)	(318.629)	(277.178)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Penerbitan surat berharga yang diterbitkan	22	800.000	510.000	1.785.000	540.000	800.000
Pelunasan surat berharga yang diterbitkan	22	(1.550.000)	-	-	(50.000)	-
Biaya emisi obligasi yang diterbitkan		(7.049)	(3.726)	(15.231)	(5.227)	(9.539)
Penjualan kembali obligasi yang diterbitkan	22,26	9.000	92.905	79.905	-	-
Pembelian kembali obligasi yang diterbitkan	22,26	-	-	-	(42.905)	(43.900)
Penerimaan pinjaman yang diterima		1.104.061	1.911.054	2.411.509	4.960.763	1.972.275
Pembayaran pinjaman yang diterima		(819.571)	(2.492.233)	(3.008.743)	(3.010.292)	(3.531.960)
Penambahan modal disetor		-	-	-	-	1.500.939
Setoran modal dari entitas non-pengendali		-	-	400.323	21.790	-
Biaya emisi saham		-	-	(16.960)	-	-
Pembayaran dividen tunai entitas anak kepada non pengendali		-	-	(30.255)	(17.959)	(5.949)
Biaya emisi obligasi subordinasi yang diterbitkan		-	-	-	(29.828)	-
Obligasi subordinasi yang diterbitkan	26	-	-	-	2.460.000	-
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(463.559)	18.000	1.605.548	4.826.342	681.866
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(1.028.122)	(18.577.859)	(8.188.760)	16.162.202	7.899.410
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		28.161.602	36.350.362	36.350.362	20.188.160	12.288.750
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE		27.133.480	17.772.503	28.161.602	36.350.362	20.188.160

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2012 DAN 2011 (2011 - TIDAK DIAUDIT)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009 (Lanjutan)

	Catatan	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
		Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN						
Kas dan setara kas terdiri dari:						
Kas	5	1.127.088	1.093.650	1.392.325	1.076.074	900.900
Giro pada Bank Indonesia	6	8.395.204	7.038.689	7.490.081	5.403.656	2.480.939
Giro pada bank lain	7	617.746	775.111	1.185.224	868.756	865.791
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8	9.450.117	8.865.053	14.163.434	16.989.676	6.268.910
Sertifikat Bank Indonesia	9	7.543.325	-	3.930.538	12.012.200	9.671.620
Jumlah		27.133.480	17.772.503	28.161.602	36.350.362	20.188.160

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

P.T. Bank Pan Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank") didirikan dengan akta No. 85 tanggal 17 Agustus 1971 dari notaris Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja, S.H. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kgehakiman dalam Surat Keputusan No. J.A.5/81/24 tanggal 19 April 1972 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 6 Juni 1972 Tambahan No. 210. Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan akta No. 9 tanggal 9 Juli 2010 dari Benny Kristianto, S.H., notaris di Jakarta, dalam rangka peningkatan modal dasar Bank dari Rp 5.900 miliar menjadi Rp 9.600 miliar, terbagi menjadi 96.000 juta saham. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-46590.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010.

Bank berkedudukan di Jakarta dengan 52 kantor cabang di Indonesia, 1 cabang di Cayman Islands dan 1 kantor perwakilan di Singapura. Kantor pusat Bank beralamat di Gedung Panin Centre Jl. Jend. Sudirman, Jakarta. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, rata-rata jumlah karyawan Bank masing-masing 6.211, 5.329, 4.874 dan 4.642 karyawan.

Sesuai dengan anggaran dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan usaha bank umum dalam arti kata seluas-luasnya di dalam maupun di luar negeri.

Bank mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18 Agustus 1971, sesuai dengan izin usaha yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. KEP-205/DDK/II/8/1971 tanggal 18 Agustus 1971. Sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/2-Kep.Dir. tanggal 21 April 1972, Bank telah mendapat persetujuan menjadi bank devisa.

Bank tergabung dalam kelompok usaha Panin Group. Susunan pengurus dan komite audit Bank pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

		31 Desember			1 Januari 2009/
	30 Juni 2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
Dewan Komisaris					
Presiden Komisaris	Drs. Johnny	Drs. Johnny	Drs. Johnny	Drs. Johnny	Drs. Johnny
Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen	Drs. H. Bambang Winarno	Drs. H. Bambang Winarno	Drs. H. Bambang Winarno	Drs. H. Bambang Winarno	Drs. H. Bambang Winarno
Komisaris	Suwirjo Josowidjojo	Suwirjo Josowidjojo	Suwirjo Josowidjojo	Suwirjo Josowidjojo	Suwirjo Josowidjojo
Komisaris Independen	Drs. Riyanto	Drs. Riyanto	Drs. Riyanto	Drs. Riyanto	Drs. Riyanto
Direksi					
Presiden Direktur	Drs. H. Rostian Sjamsudin	Drs. H. Rostian Sjamsudin	Drs. H. Rostian Sjamsudin	Drs. H. Rostian Sjamsudin	Drs. H. Rostian Sjamsudin
Wakil Presiden Direktur	Chandra Rahardja Gunawan	Chandra Rahardja Gunawan	Chandra Rahardja Gunawan	Chandra Rahardja Gunawan	Chandra Rahardja Gunawan
Wakil Presiden Direktur	Roosniati Salihin	Roosniati Salihin	Roosniati Salihin	Roosniati Salihin	Roosniati Salihin
Direktur Kredit Konsumer	Ng Kean Yik	Ng Kean Yik	Ng Kean Yik	Ng Kean Yik	Ng Kean Yik
Direktur Kredit Komersial	Edy Heryanto	Edy Heryanto	Edy Heryanto	Edy Heryanto	Edy Heryanto
Direktur Kredit Korporasi	Iswanto Tjitradi	Iswanto Tjitradi	Iswanto Tjitradi	Iswanto Tjitradi	-
Direktur Umum dan Personalia	Lionto Gunawan	Lionto Gunawan	Lionto Gunawan	Lionto Gunawan	Lionto Gunawan
Direktur Perbankan International	Hendrawan Danusaputra	Hendrawan Danusaputra	Hendrawan Danusaputra	Hendrawan Danusaputra	Hendrawan Danusaputra
Direktur Treasury	Gunawan Santoso	Gunawan Santoso	Gunawan Santoso	Gunawan Santoso	Gunawan Santoso
Direktur Kepatuhan	Antonius Ketut Dwirianto	Antonius Ketut Dwirianto	Antonius Ketut Dwirianto	Antonius Ketut Dwirianto	Iswanto Tjitradi
Direktur Keuangan	H. Ahmad Hidayat	H. Ahmad Hidayat	H. Ahmad Hidayat	H. Ahmad Hidayat	H. Ahmad Hidayat
Komite Audit					
Ketua	Drs. Riyanto	Drs. Riyanto	Drs. Riyanto	Drs. Riyanto	Drs. Riyanto
Anggota	Adriana Mulianto	Adriana Mulianto	Syamsuar Halim	Syamsuar Halim	Syamsuar Halim
	Lukman Abdullah	Lukman Abdullah	Adriana Mulianto	Adriana Mulianto	Adriana Mulianto
	Susanto Sorip	Susanto Sorip	Lukman Abdullah		
Komite Pemantau Resiko					
Ketua	Drs. Riyanto	Drs. Riyanto	Drs. Riyanto	Drs. Riyanto	Drs. Riyanto
Anggota	Adriana Mulianto	Adriana Mulianto	Adriana Mulianto	Adriana Mulianto	Adriana Mulianto
	Susanto Sorip	Susanto Sorip	Syamsuar Halim	Syamsuar Halim	Syamsuar Halim
			Lukman Abdullah		
Komite Remunerasi dan Nominasi					
Ketua	Drs. H. Bambang Winarno	Drs. H. Bambang Winarno	Drs. H. Bambang Winarno	Drs. H. Bambang Winarno	Drs. H. Bambang Winarno
Anggota	Drs. Riyanto	Drs. Riyanto	Drs. Riyanto	Drs. Riyanto	Drs. Riyanto
	Suwirjo Josowidjojo	Suwirjo Josowidjojo	Suwirjo Josowidjojo	Suwirjo Josowidjojo	Suwirjo Josowidjojo
	Yusak Zefanya	Yusak Zefanya	Yusak Zefanya	Yusak Zefanya	Yusak Zefanya
Internal audit	Herbert J.S. Sibuea	Herbert J.S. Sibuea	Herbert J.S. Sibuea	Herbert J.S. Sibuea	Herbert J.S. Sibuea
Sekretaris Perusahaan	Jasman Ginting	Jasman Ginting	Jasman Ginting	Jasman Ginting	Jasman Ginting

Pembentukan Komite Audit telah sesuai dengan Peraturan No. IX.I.5 tentang "Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit" yang terdapat dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004.

b. Entitas Anak

Bank merupakan pemegang saham terbesar dibandingkan dengan kepemilikan pihak lain serta memiliki pengendalian atas manajemen entitas anak berikut:

Entitas Anak	Jenis Usaha	Persentase Pemilikan				Tahun Operasi Komersial	Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)				
							30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/ 31 Desember
		2012	2011	2010	2009		2012	2011	2010	2009	2008
							Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
PT Clipan Finance Indonesia Tbk (Clipan)	Lembaga pembiayaan	54,35%	54,35%	54,35%	54,35%	1982	5.310.556	4.785.504	2.693.910	1.771.267	1.607.442
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (AMAG)	Asuransi	13,50%	13,50%	13,50%	15,92%	1980	1.249.270	1.051.935	654.357	506.324	437.340
PT Bank Panin Syariah (dahulu PT Bank Harfa) (BPS)	Bank Syariah	99,997%	99,997%	99,997%	99,997%	2009	1.276.177	1.016.879	458.713	161.649	208.746
PT Verena Multi Finance Tbk (VMF) (dahulu PT Verena Oto Finance Tbk)	Lembaga pembiayaan	42,87%	42,87%	42,87%	42,87%	1994	1.619.536	1.521.029	961.244	643.465	595.599

Seluruh entitas anak berdomisili di Jakarta.

Pada tanggal 3 Agustus 2009, Bank menambah investasi modal pada Bank Harfa sebesar Rp 50 miliar dalam rangka konversi Bank Harfa menjadi Bank Panin Syariah. Tambahan investasi ini telah disetujui melalui Akta No.1 tanggal 3 Agustus 2009, Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta.

Bank Harfa berubah menjadi Bank Panin Syariah (BPS) yang menjalankan usaha perbankan berbasis syariah pada tanggal 1 Desember 2009 setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dengan surat No. 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009.

Pada tanggal 6 April 2011 dan 10 Juni 2011, Bank menambah investasi modal pada BPS masing-masing sebesar Rp 28.480 juta dan Rp 271.517 juta. Tambahan investasi ini telah disetujui melalui Akta No. 387 tanggal 28 April 2011 dari Aulis Taufani, S.H., notaris di Jakarta dan No. 36 tanggal 27 Juni 2011 dari Erni Rohaini, S.H., notaris di Jakarta.

Pada tanggal 23 September 2011, PT Clipan Finance Indonesia Tbk (Clipan) memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK dengan suratnya No. S-10363/BL/2011 untuk melakukan Penawaran Umum terbatas V sebesar 1.171.488.567 saham disertai waran sebanyak 911.157.774 waran. Saham-saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2011. Bank membeli 636.647.978 saham Clipan disertai dengan 495.170.649 waran dengan harga penawaran Rp 400, sehingga persentase kepemilikan Bank terhadap Clipan tidak berubah.

Pada tanggal 26 September 2011, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (AMAG) memperoleh pernyataan efektif dari ketua Bapepam-LK dengan suratnya No. S-10485/BL/2011 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu sebesar 1.436.644.880 saham disertai waran sebanyak 478.881.626 waran yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Oktober 2011. Bank membeli 194.000.000 saham AMAG disertai dengan 64.666.666 waran dengan harga penawaran Rp 150, sehingga persentase kepemilikan Bank terhadap AMAG tidak berubah.

c. Penawaran Umum Efek Bank

Penawaran Umum Saham

Pada tanggal 28 Oktober 1982, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan suratnya No. SI-014/PM/E/1982 untuk melakukan penawaran umum atas 1.637.500 saham Bank kepada masyarakat.

Penawaran Umum Perdana dan Terbatas yang telah dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:

Tahun	Keterangan	Jumlah Saham	Nilai nominal per saham	Harga penawaran per saham	Nomor dan tanggal surat efektif dari Bapepam
			Rp	Rp	
1982	Penawaran Umum Perdana	1.637.500	1.000	3.475	SI-014/PM/E/1982 28 Oktober 1982
1983	Penawaran Umum Kedua	3.162.500	1.000	3.550	SI-017/PM/E/1983 18 Mei 1983
1989	Penawaran Umum Terbatas I	914.655	1.000	4.500	S-467/PM/1989 31 Oktober 1989
1990	Penawaran Umum Terbatas II	2.614.410	1.000	13.000	21 April 1990
1995	Penawaran Umum Terbatas III	60.180.462	1.000	1.900	S-725/PM/1995 8 Juni 1995
1997	Penawaran Umum Terbatas IV	300.902.312	500	1.200	S-1212/PM/1997 10 Juni 1997
1998	Penawaran Umum Terbatas V	702.105.395	500	500	S-1268/PM/1998 19 Juni 1998
1999	Penawaran Umum Terbatas VI	1.225.406.221	250	1.100	S-1180/PM/1999 29 Juni 1999
2006	Penawaran Umum Terbatas VII	4.016.358.393	100	350	S-791/BL/2006 28 Juni 2006

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa I para pemegang saham yang tercantum dalam Akta Berita Acara No. 52 tanggal 28 Mei 2004 dari Veronica Lily Dharma, S.H., notaris di Jakarta, disetujui pembagian saham bonus yang berasal dari saldo laba dengan jumlah maksimum 1.176.093.346 saham. Jumlah saham bonus yang dibagikan menjadi sejumlah 1.176.091.818 saham karena adanya pembulatan. Nilai nominal Rp 100 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada tanggal 28 Juni 2004.

Pada tanggal 30 Juni 2012, sejumlah 23.837.645.998 saham Bank telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) dan sejumlah 250.000.000 saham yang merupakan saham pendiri tidak dicatatkan di bursa.

Penawaran Umum Obligasi

Pada tanggal 29 Oktober 2010, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK dengan suratnya No. S-9803/BL/2010 untuk melakukan penawaran obligasi Bank Panin IV Tahun 2010 kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp 540 miliar. Pada tanggal 5 Nopember 2010, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 29 September 2009, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam dengan suratnya No. S-8699/BL/2009 untuk melakukan penawaran obligasi Bank Panin III Tahun 2009 kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp 800 miliar. Pada tanggal 7 Oktober 2009, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 7 Juni 2007, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam dengan suratnya No. S-2708/BL/2007 untuk melakukan penawaran obligasi Bank Panin II Tahun 2007 kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp 1.650 miliar. Pada tanggal 20 Juni 2007, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Surabaya).

Pada tanggal 28 Desember 1999, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam dengan suratnya No. S-2682/PM/1999 untuk melakukan penawaran obligasi Bank Panin I Tahun 2000 kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp 500 miliar. Pada tanggal 15 Maret 2000, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya. Sampai dengan tahun 2005, Bank telah menarik kembali seluruh obligasi Bank Panin I tahun 2000.

Penawaran Umum Obligasi Subordinasi

Pada tanggal 29 Oktober 2010, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK dengan suratnya No. S-9803/BL/2010 untuk melakukan penawaran umum obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010 kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp 2.460 miliar. Pada tanggal 5 Nopember 2010, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 27 Maret 2008, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam dengan suratnya No. S-1767/BL/2008 untuk melakukan penawaran umum obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008 kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp 1,5 triliun. Pada tanggal 10 April 2008, seluruh obligasi subordinasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 5 Juni 2003, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam dengan suratnya No. S-1279/PM/2003 untuk melakukan penawaran umum obligasi Subordinasi Bank Panin I Tahun 2003 kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp 1,3 triliun. Pada tanggal 23 Juni 2003, seluruh obligasi subordinasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 17 Juni 2008, Bank telah menarik kembali seluruh obligasi Subordinasi Bank Panin I tahun 2003.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Standar yang berlaku efektif pada periode berjalan

Dalam tahun berjalan, Bank dan entitas anak telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012. Penerapan standar baru dan revisi serta interpretasi telah berdampak terhadap perubahan kebijakan akuntansi Bank dan entitas anak yang mempengaruhi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- PSAK 24 (revisi 2010), Imbalan Kerja

  Revisi standar ini memperkenalkan pilihan pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial secara penuh pada periode terjadinya, di luar laba rugi, yaitu dalam pendapatan komprehensif lain. Revisi standar tersebut juga (a) menentukan bagaimana Bank dan entitas anak memperlakukan program imbalan pasti yang membagi risiko antar entitas sepengendali pada laporan keuangan tersendiri atau individual dan (b) mensyaratkan Bank untuk menyajikan pengungkapan tambahan (Catatan 43b).

- PSAK 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan

  Standar ini menggabungkan seluruh pengungkapan terkait instrumen keuangan ke dalam satu standar dan menggantikan pengungkapan menurut PSAK 50 (revisi 2006). Standar tersebut mensyaratkan pengungkapan tambahan mengenai signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas, dan pengungkapan kuantitatif dan kualitatif atas sifat dan luas risiko keuangan. Penerapan standar ini mengakibatkan pengungkapan tambahan dalam laporan keuangan (Catatan 54).

Berikut ini standar baru dan standar revisi serta interpretasi yang diterapkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Penerapan ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi dapat mempengaruhi akuntansi untuk transaksi masa depan:

- PSAK 10 (revisi 2010), Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
- PSAK 13 (revisi 2011), Properti Investasi
- PSAK 16 (revisi 2011), Aset Tetap
- PSAK 18 (revisi 2010), Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
- PSAK 26 (revisi 2011), Biaya Pinjaman
- PSAK 28 (revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian
- PSAK 30 (revisi 2011), Sewa
- PSAK 33 (revisi 2011), Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum
- PSAK 34 (revisi 2010), Kontrak Konstruksi
- PSAK 36 (revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa

- PSAK 45 (revisi 2011), Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba
- PSAK 46 (revisi 2010), Pajak Penghasilan
- PSAK 50 (revisi 2010), Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK 53 (revisi 2010), Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK 55 (revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK 56 (revisi 2011), Laba per Saham
- PSAK 61, Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
- PSAK 62, Kontrak Asuransi
- PSAK 63, Pelaporan Keuangan Dalam Ekonomi Hiperinflasi
- PSAK 64, Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral
- ISAK 13, Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri
- ISAK 15, PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya
- ISAK 16, Perjanjian Konsesi Jasa
- ISAK 18, Bantuan Pemerintah - Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi
- ISAK 19, Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali Dalam PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
- ISAK 20, Pajak Penghasilan - Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya
- ISAK 22, Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan
- ISAK 23, Sewa Operasi - Insentif
- ISAK 24, Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa
- ISAK 25, Hak Atas Tanah
- ISAK 26, Penilaian Ulang Derivatif Melekat

b. Standar yang berlaku efektif pada tahun 2011

Pada tahun 2011, Bank dan entitas anak menerapkan PSAK revisi berikut ini yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011:

- PSAK 1 (revisi 2009), Penyajian Laporan Keuangan

  Standar revisi ini mengatur perubahan dalam format dan isi laporan keuangan konsolidasian, termasuk revisi judul laporan keuangan konsolidasian.

  Sebagai hasil dari penerapan standar revisi ini, Bank dan entitas anak menyajikan semua perubahan pemilik dalam ekuitas pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Semua perubahan non-pemilik dalam ekuitas disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Informasi komparatif disajikan kembali untuk menyesuaikan dengan standar.

  Sebagai tambahan, standar revisi mengharuskan penyajian laporan posisi keuangan ketiga pada tanggal 1 Januari 2009 karena perubahan klasifikasi kepentingan non-pengendali (sebelumnya disebut hak minoritas) menjadi bagian dari ekuitas.

  Pengungkapan tambahan juga dilakukan sehubungan dengan manajemen modal, penilaian kritis dalam menerapkan kebijakan akuntansi, dan sumber-sumber utama ketidakpastian estimasi.

- PSAK 7 (revisi 2010), Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi

  Standar ini memperluas definisi pihak-pihak berelasi dan pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo termasuk komitmen antara mereka. Standar ini juga mengharuskan pengungkapan hubungan antara entitas induk dan entitas anak terlepas dari apakah telah terjadi transaksi antara mereka. Selanjutnya pengungkapan atas kompensasi secara keseluruhan dan masing-masing kategori kompensasi yang diberikan kepada semua personil manajemen kunci juga diharuskan.

Bank dan entitas anak telah mengevaluasi hubungan antara pihak-pihak berelasi dan mengungkapkannya sesuai dengan standar revisi ini.

- PSAK 22 (revisi 2010), Kombinasi Bisnis

  Sesuai dengan ketentuan transisi, PSAK 22 (revisi 2010), telah diterapkan secara prospektif untuk kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Pengaruh dari penerapan PSAK 22 (revisi 2010), Kombinasi Bisnis adalah sebagai berikut:

  - Diperbolehkan untuk memilih dasar setiap transaksi untuk mengukur kepentingan nonpengendali (sebelumnya disebut sebagai hak minoritas) baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan kepentingan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Jika Bank memilih untuk mengukur kepentingan nonpengendali dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi, konsekuensinya adalah goodwill yang diakui sehubungan dengan akuisisi mencerminkan pengaruh dari perbedaan antara nilai wajar dari kepentingan nonpengendali dan proporsi kepemilikan kepentingan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi;

  - Mengharuskan biaya-biaya yang terkait dengan akuisisi diperhitungkan secara terpisah dari kombinasi bisnis, umumnya biaya-biaya diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya, dimana sebelumnya dicatat sebagai bagian dari biaya perolehan akuisisi;

  - Menghentikan amortisasi goodwill yang diakui pada tahun sebelumnya dan melakukan uji penurunan nilai atas goodwill sesuai dengan PSAK 48 (revisi 2009);

  - Menghentikan pengakuan nilai tercatat dari negatif goodwill pada tanggal 1 Januari 2011 dengan melakukan penyesuaian terhadap saldo laba awal tahun.

c. Standar yang berlaku efektif pada tahun 2010

Pada tahun 2010, Bank dan entitas anak menerapkan PSAK revisi berikut ini yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010:

- PSAK 50 (revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan

- PSAK 55 (revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

Penerapan PSAK 50 (revisi 2006) menghasilkan pengungkapan instrumen keuangan yang lebih luas termasuk beberapa pengungkapan kualitatif yang berkaitan dengan tujuan manajemen risiko keuangan.

PSAK 55 (revisi 2006) memberikan panduan pada pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan dan kontrak untuk membeli item non-keuangan. Antara lain, penerapan standar ini memerlukan penggunaan metode suku bunga efektif ketika aset atau liabilitas diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Selain itu, PSAK ini juga mengubah cara Bank dan entitas anak dalam mengukur penurunan nilai aset keuangan tergantung pada klasifikasi instrumen keuangan.

Pada penerapan awal PSAK 50 (revisi 2006) dan 55 (revisi 2006), perhitungan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*) yang diperoleh sebelumnya dan masih bersaldo pada saat penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006) ditentukan berdasarkan arus kas masa depan yang akan diperoleh sejak penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006) sampai dengan jatuh tempo instrumen keuangan tersebut.

Sebagaimana diijinkan dalam surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009, untuk penerapan pertama kali PSAK 50 (revisi 2006) dan 55 (revisi 2006) pada tahun 2010, Bank menerapkan ketentuan transisi penurunan nilai atas kredit secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Karena PSAK ini diterapkan secara prospektif, penerapan awal tidak memiliki pengaruh atas jumlah yang dilaporkan di tahun 2009, kecuali Rp 400.373 juta dari kerugian penurunan nilai aset keuangan yang dibebankan ke saldo laba sesuai dengan Buletin Teknis No. 4, Ketentuan Transisi Penerapan Awal PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006), dengan perincian sebagai berikut:

	Penyisihan awal	Penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006)	Penyisihan awal setelah penyesuaian
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Aset Produktif			
Giro pada bank lain (Catatan 7)	8.655	(8.649)	6
Penempatan pada bank lain (Catatan 8)	78.280	(58.565)	19.715
Efek-efek (Catatan 9)	38.316	(27.698)	10.618
Tagihan derivatif (Catatan 10)	32	(32)	-
Kredit (Catatan 11)	1.154.324	(289.089)	865.235
Tagihan akseptasi (Catatan 15)	5.169	(5.169)	-
Penyertaan dalam bentuk saham (Catatan 16)	11.796	(11.171)	625
Jumlah	1.296.572	(400.373)	896.199

d. PSAK dan ISAK telah diterbitkan, tapi belum berlaku efektif

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013, yaitu ISAK 21, Perjanjian Kontrak Real Estat.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasinya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Perlakuan akuntansi untuk laporan keuangan sejak tahun 2010 disesuaikan dengan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008, serta PSAK 50 (revisi 2010), PSAK 55 (revisi 2011) dan PSAK 60 sejak tahun 2012. PAPI 2008 berlaku untuk bank umum konvensional.

Perlakuan akuntansi untuk laporan keuangan tahun 2009 disusun sesuai dengan PSAK 31 (revisi 2000) tentang “Akuntansi Perbankan” dan PAPI 2000.

b. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp) dan laporan keuangan konsolidasian tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung yang dimodifikasi dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Laporan keuangan entitas anak yang menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah disusun berdasarkan pedoman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Revisi 2011) tentang ”Penyajian Laporan Keuangan Syariah”.

c. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Bank dan entitas yang dikendalikan oleh Bank (entitas anak). Pengendalian dianggap ada apabila Bank mempunyai hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya.

Hasil dari entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama periode berjalan termasuk dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sejak tanggal efektif akuisisi dan sampai dengan tanggal efektif penjualan.

Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Bank.

Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat konsolidasian.

Kepentingan non-pengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Efektif 1 Januari 2011, kepentingan non-pengendali pemegang saham pada awalnya diukur pada proporsi kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Setelah akuisisi, nilai tercatat kepentingan non-pengendali adalah jumlah kepentingan non-pengendali pada pengakuan awal ditambah dengan proporsi kepentingan non-pengendali atas perubahan selanjutnya dalam ekuitas. Jumlah pendapatan komprehensif diatribusikan pada kepentingan non-pengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non-pengendali mempunyai saldo defisit.

Sebelumnya, kepentingan non-pengendali diukur pada pengakuan awal pada proporsi kepemilikan kepentingan non-pengendali dalam biaya historis dari aset bersih yang dapat diidentifikasi dari pihak yang diakuisisi (*acquiree*). Bila kerugian dari kepentingan non-pengendali melebihi kepentingannya dalam ekuitas entitas anak, kelebihan dan setiap kerugian lebih lanjut yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali dibebankan kepada pemegang saham mayoritas kecuali kepentingan non-pengendali tersebut mempunyai kewajiban mengikat dan dapat menanggung rugi tersebut.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Bank dan entitas anak pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan entitas anak dan kepentingan non-pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Bank telah memilih untuk menyajikan sebagai bagian yang terpisah dalam ekuitas, sisa saldo yang berkaitan dengan pengaruh transaksi modal tahun sebelumnya dari entitas anak dengan pihak ketiga.

d. Kombinasi Bisnis

Akuisisi entitas anak dan bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya akuisisi adalah nilai agregat nilai wajar (pada tanggal pertukaran) dari aset yang diperoleh, liabilitas yang terjadi atau ditanggung dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai pertukaran atas pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif. Untuk kombinasi bisnis sebelum tahun 2011, setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung pada kombinasi bisnis dianggap sebagai bagian dari biaya kombinasi bisnis.

Dalam penerapannya, imbalan untuk akuisisi termasuk setiap aset atau liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontinjen diukur terhadap nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya dalam nilai wajar disesuaikan dengan biaya akuisisi ketika memenuhi syarat sebagai penyesuaian pengukuran periode. Semua perubahan selanjutnya dalam nilai wajar dari imbalan kontijensi diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas yang dihitung sesuai dengan standar akuntansi. Perubahan dalam nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak dicatat.

Aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjensi pihak yang diakuisisi yang memenuhi kondisi-kondisi pengakuan berdasarkan PSAK 22 (revisi 2010), Kombinasi Bisnis, diakui pada nilai wajar, kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu diukur dengan menggunakan standar yang relevan. Untuk kombinasi bisnis sebelum tahun 2011 dimana Bank mengakuisisi kurang dari seluruh saham entitas anak, proporsi minoritas atas aset dan liabilitas dinyatakan sebesar jumlah tercatat sebelum akuisisinya.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Bank dan entitas anak melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

Periode pengukuran adalah periode dari tanggal akuisisi hingga tanggal Bank memperoleh informasi lengkap tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan periode pengukuran maksimum satu tahun dari tanggal akuisisi.

e. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Bank diselenggarakan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Bank. Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif.

f. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Bank dan entitas anak (entitas pelapor):

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;

   ii. memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau

   iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

   i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).

   ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

   iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

   iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

   v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

   vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

   vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

g. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Bank dan entitas anak diklasifikasikan sebagai berikut:

- Nilai wajar melalui laba rugi
- Dimiliki hingga jatuh tempo
- Tersedia untuk dijual
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal, jika:

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Bank dan entitas anak, dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci; atau
- merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 (revisi 2011) memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan FVTPL diukur pada nilai wajar, biaya transaksi diakui secara langsung ke dalam laba rugi konsolidasian. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui dalam laba rugi konsolidasian dan dicatat masing-masing sebagai kenaikan (penurunan) nilai aset keuangan yang diperdagangkan dan keuntungan (kerugian) penjualan efek. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 3i.

Dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo hanya jika investasi tersebut memiliki pembayaran yang tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta Bank dan entitas anak mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi kerugian penurunan nilai yang ada.

Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah itu, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dan dicatat pada nilai wajar.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya dan akumulasi revaluasi investasi AFS kecuali untuk kerugian penurunan nilai, bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Jika aset keuangan dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui pada revaluasi investasi AFS, direklas ke laporan laba rugi komprehensif.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa yang tidak mempunyai kuotasi harga pasar di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi kerugian penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Klasifikasi atas aset keuangan

Bank dan entitas anak mengklasifikasikan aset keuangan dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari aset keuangan tersebut. Klasifikasi aset keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi: Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan terdiri dari efek-efek.

- Pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari: kas, giro pada bank indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank indonesia dan bank lain, efek-efek, efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, kredit, piutang pembiayaan konsumen, investasi neto sewa pembiayaan, tagihan akseptasi, tagihan anjak piutang dan aset lain-lain (pendapatan yang masih akan diterima, tagihan pihak ketiga, piutang lain-lain, uang jaminan).

- Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo terdiri dari efek-efek.

- Aset keuangan tersedia untuk dijual terdiri dari efek-efek dan penyertaan saham.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga dan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Perhitungan dari suku bunga efektif termasuk semua *fee* dan pembayaran atau penerimaan poin yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Biaya transaksi termasuk biaya *incremental* yang secara langsung berkaitan dengan akuisisi atas penerbitan aset atau liabilitas keuangan.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif penurunan nilai.

Bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Kerugian penurunan nilai dihitung secara individual untuk aset keuangan yang signifikan secara individual serta kolektif untuk aset yang secara individual tidak signifikan dan secara individual signifikan namun tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai. Di dalam menentukan penurunan nilai kolektif, aset keuangan dikelompokkan pada kelompok aset keuangan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang serupa. Arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan ini diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual dan pengalaman kerugian historis untuk aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa. Pengalaman historis kerugian disesuaikan berdasarkan hasil pengamatan data pada masa kini, untuk merefleksikan efek dari kondisi masa kini yang tidak mempengaruhi periode dari pengalaman historis.

Dalam melakukan penilaian secara kolektif, Bank dan entitas anak harus menghitung:

- *Probability of default* (”PD”) – model ini menilai probabilitas konsumen gagal melakukan pembayaran kembali secara penuh dan tepat waktu.
- *Recoverable amount* – didasarkan pada identifikasi arus kas masa datang dan estimasi nilai kini dari arus kas tersebut (*discounted cash flow*).
- *Loss given default* (”LGD”) – Bank mengestimasi kerugian ekonomis yang mungkin akan diderita Bank apabila terjadi tunggakan fasilitas kredit/pembiayaan. LGD menggambarkan jumlah utang yang tidak dapat diperoleh kembali dan umumnya ditunjukkan dalam persentase dari *exposure at default* (EAD). Model perhitungan LGD mempertimbangkan jenis peminjam, fasilitas dan mitigasi risiko, misalnya ketersediaan agunan.
- *Loss identification period* (”LIP”) - periode waktu antara terjadinya peristiwa yang merugikan dalam kelompok aset keuangan sampai bukti obyektif dapat diidentifikasi atas fasilitas kredit/pembiayaan secara individual.
- *Exposure at default* (”EAD”) – Bank mengestimasi tingkat utilisasi yang diharapkan dari fasilitas kredit/pembiayaan pada saat terjadi tunggakan.

PD, LGD dan LIP diperoleh dari observasi data fasilitas kredit/piutang pembiayaan selama minimal tiga tahun.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara kolektif dilakukan dengan mengkalikan nilai baki debet fasilitas kredit/piutang pembiayaan pada posisi laporan dengan *probability default* (PD), *loss identification period* (LIP) dan *loss given default* (LGD).

Kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi komprehensif dan nilai tercatat dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai yang terbentuk. Apabila pada periode berikutnya jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, baik secara langsung atau dengan menyesuaikan cadangan kerugian penurunan nilai. Pada saat penurunan nilai diakui dalam aset keuangan atau kelompok aset keuangan, pendapatan bunga diakui berdasarkan nilai tercatat setelah penurunan nilai menggunakan tarif bunga yang digunakan untuk mendiskontokan estimasi arus kas masa datang pada saat menghitung penurunan nilai.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi komprehensif dalam periode yang bersangkutan.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara obyektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laporan laba rugi komprehensif hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi komprehensif. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke pendapatan komprehensif lainnya.

Aset keuangan yang tidak dinilai secara individual, dievaluasi secara kolektif.

Sebagaimana diijinkan dalam surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009, untuk tahun 2010 Bank menerapkan ketentuan transisi penurunan nilai atas kredit secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan perubahannya, Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Bank dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Bank dan entitas anak mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Bank dan entitas anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Bank dan entitas anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Bank dan entitas anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Bank dan entitas anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

h. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Bank dan entitas anak diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Bank dan entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan Bank dan entitas anak diklasifikasikan sebagai berikut:

- Nilai wajar melalui laba rugi
- Diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika liabilitas keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal, jika:

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- liabilitas keuangan merupakan bagian dari kelompok liabilitas keuangan, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Bank dan entitas anak, dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci; atau
- merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 (revisi 2011) memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diakui pada nilai wajarnya dikurangi dengan biaya transaksi yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Pengukuran berikutnya dinilai pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul pada liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui pada laporan laba rugi komprehensif**.**

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, diakui pada nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan tersebut. Pengukuran selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dimana beban bunga diakui berdasarkan tingkat pengembalian yang efektif, kecuali untuk liabilitas jangka pendek dimana pengakuan bunganya tidak material.

Klasifikasi atas liabilitas keuangan

Bank dan entitas anak mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari liabilitas keuangan tersebut. Klasifikasi liabilitas keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi: Liabilitas keuangan dalam kelompok diperdagangkan terdiri dari liabilitas derivatif.

- Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi terdiri dari simpanan, simpanan dari bank lain, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, liabilitas akseptasi, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, liabilitas lain-lain (bunga yang masih harus dibayar dan setoran jaminan) dan obligasi subordinasi.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Bank dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Bank dan entitas anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

i. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar adalah nilai yang digunakan untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu liabilitas antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar (*arm's length transaction*).

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas keuangan dapat diukur dengan menggunakan kuotasi di pasar aktif, yaitu jika harga yang dikuotasikan tersedia setiap waktu dan dapat diperoleh secara rutin dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

Dalam hal tidak terdapat pasar aktif untuk suatu aset atau liabilitas keuangan, maka Bank menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak yang berkeinginan dan memahami, dan bilamana tersedia, penggunaan analisa arus kas yang diskonto dan penggunaan nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama.

j. Reklasifikasi Aset Keuangan

Sejak 1 Januari 2012, Bank dan entitas anak tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi aset keuangan ke kelompok aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Bank dan entitas anak hanya dapat melakukan reklasifikasi aset keuangan ke kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang jika aset keuangan tersebut memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan entitas memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo dari kelompok aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau dari kelompok tersedia untuk dijual. Aset keuangan tersebut direklasifikasi pada nilai wajar pada tanggal reklasifikasi yang menjadi biaya perolehan diamortisasi yang baru. Setiap keuntungan dan kerugian yang sudah diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik. Setiap keuntungan dan kerugian yang sudah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diamortisasi ke laba rugi selama sisa umur aset keuangan (jika aset keuangan memiliki jatuh tempo tetap) atau tetap diakui dalam pendapatan komprehensif lain sampai aset keuangan tersebut dilepas atau dijual (jika aset keuangan tidak memiliki jatuh tempo tetap).

Sebelum 1 Januari 2012, Bank dan entitas anak tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi aset keuangan dari atau ke kelompok aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang.

k. Saling Hapus Antara Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan Bank dan entitas anak saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

l. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

m. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Sejak 1 Januari 2010, giro pada Bank Indonesia disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan suku bunga efektif dan giro pada bank lain disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 3g).

Sebelum 1 Januari 2010, giro pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo giro dan giro pada bank lain disajikan sebesar saldo giro setelah dikurangi penyisihan penghapusan.

n. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Sejak 1 Januari 2010, penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan suku bunga efektif dan penempatan pada bank lain disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 3g).

Sebelum 1 Januari 2010, penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo penempatan setelah dikurangi bunga diterima di muka yang belum diamortisasi dan penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan setelah dikurangi penyisihan penghapusan.

o. Efek-efek

Sejak 1 Januari 2010

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengukuran awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan efek-efek mengacu pada Catatan 3g, 3i dan 3j terkait aset keuangan.

Sebelum 1 Januari 2010

Efek-efek diklasifikasikan berdasarkan tujuan manajemen pada saat perolehan sebagai berikut:

(i) Investasi efek diperdagangkan disajikan sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif periode berjalan.

(ii) Investasi efek yang tersedia untuk dijual dinyatakan sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya dicatat sebagai pendapatan komprehensif lainnya dan diakui sebagai penghasilan atau beban pada saat laba atau rugi tersebut direalisasi.

(iii) Efek utang yang dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan yang disesuaikan dengan amortisasi premi dan/atau diskonto yang belum direalisasi.

Untuk surat-surat berharga yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, nilai wajar tersebut umumnya ditentukan dengan mengacu pada harga penawaran pasar yang terjadi di bursa efek pada tanggal yang terdekat dengan tanggal pelaporan, kemudian disesuaikan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk merealisasi aset tersebut. Untuk surat-surat berharga yang tidak mempunyai harga penawaran pasar, estimasi atas nilai wajar surat berharga ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang memiliki substansi yang sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih surat berharga tersebut. Dalam hal nilai pasar tidak tersedia, maka penilaian efek-efek ditentukan antara lain dengan menggunakan metode *Discounted Cash Flow*.

Investasi dalam unit penyertaan di reksadana dinilai berdasarkan Nilai Aset Bersih (*Net Asset Value*) pada tanggal pelaporan.

Pemindahan efek ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dari tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lainnya dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama sisa umur efek tersebut. Pemindahan efek ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dari diperdagangkan dicatat sebesar nilai wajarnya, yang dianggap sebagai biaya perolehan dari efek tersebut.

Pemindahan efek ke kelompok tersedia untuk dijual dari dimiliki hingga jatuh tempo dicatat sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal transfer diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya secara terpisah.

Untuk efek yang dipindahkan dari diperdagangkan, laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal transfer telah tercatat sebagai penghasilan dan oleh karena itu tidak boleh dihapus.

Efek-efek disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian setelah dikurangi penyisihan penghapusan.

Untuk efek individual dalam kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo atau kelompok tersedia untuk dijual, bila terjadi penurunan nilai wajar di bawah biaya perolehan (termasuk amortisasi premi dan diskonto) yang bersifat permanen, maka biaya perolehan efek individual harus diturunkan sebesar nilai wajarnya, dan jumlah penurunan nilai tersebut dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif periode berjalan.

Untuk menghitung laba atau rugi yang direalisasi, biaya perolehan investasi efek ditentukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang, sedangkan biaya perolehan efek utang yang dimiliki hingga jatuh tempo ditentukan berdasarkan metode identifikasi khusus.

p. Tagihan dan Liabilitas Derivatif

Sejak 1 Januari 2010

Tagihan dan liabilitas derivatif disajikan sebesar keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yang berasal dari kontrak derivatif dengan tujuan bukan untuk lindung nilai. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tersebut dihitung dari selisih antara nilai kontrak dan nilai wajar instrumen derivatif pada tanggal pelaporan. Nilai wajar ditentukan berdasarkan harga pasar, model penentuan harga atau harga pasar instrumen lain yang memiliki karakteristik serupa. Keuntungan atau kerugian dari instrumen derivatif yang tidak memenuhi kriteria untuk dapat diklasifikasikan sebagai lindung nilai diakui sebagai laba rugi periode berjalan (Catatan 3g dan 3h).

Sebelum 1 Januari 2010

Perlakuan akuntansi untuk tagihan dan liabilitas derivatif mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55 (revisi 1999) tentang Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai.

Tagihan dan liabilitas derivatif disajikan sebesar keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yang berasal dari kontrak derivatif untuk tujuan *trading*. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tersebut dihitung dari selisih antara nilai kontrak dengan nilai wajar instrumen derivatif pada tanggal pelaporan dan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif periode berjalan. Nilai wajar ditentukan berdasarkan harga pasar, model penentuan harga atau harga pasar instrumen lain yang memiliki karakteristik serupa.

Instrumen derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama dan diperlakukan sebagai instrumen derivatif, jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:

(1) Karakteristik ekonomis dan risiko instrumen derivatif melekat tidak secara jelas dan erat berhubungan dengan karakteristik ekonomis dan risiko kontrak utama.

(2) Instrumen derivatif yang mencakup instrumen derivatif melekat dan kontrak utama tidak dinilai kembali sesuai dengan nilai wajarnya berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum.

(3) Instrumen terpisah dengan kondisi yang sama dengan instrumen derivatif melekat dapat merupakan instrumen derivatif seperti yang diatur berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum.

(4) Apabila suatu entitas tidak dapat secara pasti mengidentifikasi dan mengukur instrumen derivatif melekat yang harus dipisahkan dari kontrak utama, maka keseluruhan perjanjian diukur dengan nilai wajar.

q. Kredit

Sejak 1 Januari 2010

Kredit diakui sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 3g).

Sebelum 1 Januari 2010

Kredit diakui pada saat pencairannya sebesar pokok kredit. Kredit dinyatakan sebesar jumlah bruto tagihan Bank yang belum dilunasi oleh debitur setelah dikurangi penyisihan penghapusan. Untuk kredit yang direstrukturisasi, dalam pokok kredit termasuk bunga dan biaya lain yang dialihkan menjadi pokok kredit. Bunga yang dialihkan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan.

Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

Pembiayaan *murabahah* adalah suatu pembiayaan oleh entitas anak, BPS, dalam bentuk transaksi jual beli sebesar harga pokok barang ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Untuk tahun 2012, 2011, 2010 dan 2009, piutang *murabahah* dinyatakan sebesar saldo piutang dikurangi dengan margin yang ditangguhkan dan penyisihan piutang ragu-ragu.

r. Restrukturisasi Kredit Bermasalah

Sejak 1 Januari 2010, kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit diakui bila nilai sekarang dari jumlah penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

Sebelum 1 Januari 2010, restrukturisasi kredit bermasalah dengan modifikasi persyaratan kredit dicatat prospektif, dan tidak mengubah nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi, kecuali jika saldo kredit tercatat melebihi jumlah nilai tunai penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru kredit, maka selisih tersebut diakui sebagai kerugian hasil restrukturisasi. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit dan penghasilan bunga sesuai dengan proporsinya.

s. Kerugian Penurunan Nilai dan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Sejak 1 Januari 2010

Pada setiap tanggal pelaporan Bank dan entitas anak mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual atau pinjaman yang diberikan dan piutang mengalami penurunan nilai, seperti yang dijelaskan pada Catatan 3g.

Sebagaimana diijinkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009, untuk tahun 2010, Bank menerapkan ketentuan transisi penurunan nilai atas kredit secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Catatan 2c).

Untuk Bank Syariah, penentuan kualitas aset dan penyisihan penghapusan aset mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan perubahannya, Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007 dan No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011.

Sebelum 1 Januari 2010

Penentuan kualitas aset dan penyisihan penghapusan aset mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan perubahannya, Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009. Untuk Bank Syariah, penentuan kualitas aset dan penyisihan penghapusan aset mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan perubahannya, Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007.

Penilaian kualitas dan penyisihan penghapusan dilakukan terhadap aset produktif dan aset non produktif.

Aset Produktif

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, tagihan derivatif, kredit, piutang/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, tagihan anjak piutang, efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, investasi neto sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen, tagihan akseptasi, penyertaan saham termasuk komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif dan fasilitas kredit yang belum digunakan.

Penyisihan penghapusan aset produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi berdasarkan penelaahan terhadap kualitas masing-masing aset produktif, komitmen dan kontinjensi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Berdasarkan keputusan Bank Indonesia di atas, aset produktif dan estimasi komitmen dan kontinjensi diklasifikasikan dalam 5 (lima) kategori yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Aset Non-produktif

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, Bank diwajibkan membentuk penyisihan penghapusan aset non produktif (meliputi agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense account*).

Penyisihan penghapusan aset non produktif berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi atas upaya penyelesaian masing-masing aset non-produktif dilakukan pada akhir periode. Berdasarkan keputusan Bank Indonesia di atas, aset non produktif diklasifikasikan dalam empat kategori yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Penyisihan Penghapusan Aset

Penyisihan penghapusan aset produktif dan aset non produktif berupa:

- Cadangan umum untuk aset produktif minimum sebesar 1% dari aset produktif yang memiliki kualitas lancar.

- Cadangan khusus untuk aset produktif dan non produktif, kecuali untuk kualitas dalam perhatian khusus hanya berlaku untuk aset produktif, dengan besarnya persentase penyisihan penghapusan sebagai berikut:

Klasifikasi	Persentase Penyisihan Penghapusan Aset	
Dalam perhatian khusus	Minimum	5%
Kurang lancar	Minimum	15%
Diragukan	Minimum	50%
Macet		100%

Persentase penyisihan penghapusan di atas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin dengan agunan tunai.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan penempatan pada Bank Indonesia (BI Intervensi) tidak dibentuk penyisihan penghapusan.

Aset dihapusbukukan dari penyisihan penghapusan pada saat manajemen berpendapat bahwa secara operasional debitur sudah tidak mampu membayar dan/atau sulit untuk ditagih. Penerimaan kembali aset yang telah dihapuskan dicatat sebagai penambahan penyisihan penghapusan yang bersangkutan selama periode berjalan.

Estimasi kerugian untuk komitmen dan kontinjensi yang dibentuk diakui sebagai beban dan liabilitas dalam akun “Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi”.

Sesuai dengan Surat Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP tanggal 23 Desember 2011, Bank tidak diwajibkan lagi membentuk penyisihan penghapusan untuk aset non-produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, namun pada setiap akhir periode pelaporan Bank tetap harus menilai apakah terdapat indikasi aset non-produktif mengalami penurunan nilai dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan untuk transaksi rekening administratif, Bank membentuk provisi atas rekening administratif jika Bank memiliki kewajiban kini yang dapat diestimasi secara andal dan besar kemungkinan harus diselesaikan Bank dengan mengeluarkan sumber daya.

Perubahan penentuan penyisihan kerugian penurunan nilai dan pembentukan provisi di atas merupakan perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun-tahun sebelumnya, kecuali untuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih yang diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan karena dampak dari perubahan tersebut tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian tahun-tahun sebelumnya.

t. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

Sejak 1 Januari 2010, tagihan akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, sedangkan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 3g dan 3h).

Sebelum 1 Januari 2010, tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar nilai *Letter of Credit* (L/C) atau nilai realisasi L/C yang diaksep oleh bank pengaksep. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi penyisihan penghapusan.

u. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai Lessor

Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah investasi neto sewa pembiayaan entitas anak. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor.

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sebagai Lessee

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Bank dan entitas anak yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontijen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontijen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dinilai sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

v. Piutang Pembiayaan Konsumen

Sejak 1 Januari 2010

Piutang pembiayaan konsumen dinyatakan sebesar nilai tercatat dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen sebesar jumlah bersih piutang setelah dikurangi dengan bagian yang dibiayai oleh bank-bank sehubungan dengan transaksi kerja sama pembiayaan bersama yang diamortisasi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif (Catatan 3g).

Pada saat pengakuan awal, nilai wajar piutang pembiayaan konsumen adalah sebesar piutang pembiayaan konsumen ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada piutang, seperti beban kepada dealer yang terkait langsung dengan pembiayaan konsumen.

Sebelum 1 Januari 2010

Piutang pembiayaan konsumen dinyatakan sebesar jumlah saldo angsuran dari pembiayaan konsumen dikurangi pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan penyisihan piutang ragu-ragu.

Untuk perjanjian kerjasama pembiayaan bersama konsumen tanpa jaminan *(without recourse)*, disajikan sebesar porsi jumlah angsuran piutang yang dibiayai (pendekatan neto). Pendapatan pembiayaan konsumen disajikan setelah dikurangi dengan bagian yang merupakan hak bank-bank, dalam rangka transaksi tersebut. Untuk pembiayaan bersama konsumen dengan jaminan *(with recourse)*, piutang pembiayaan konsumen merupakan seluruh jumlah angsuran dari pelanggan sedangkan kredit yang disalurkan oleh penyedia dana dicatat sebagai utang (pendekatan bruto). Bunga yang dikenakan kepada pelanggan dicatat sebagai bagian dari pendapatan pembiayaan konsumen, sedangkan bunga yang dikenakan penyedia dana dicatat sebagai beban bunga.

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan perbedaan antara jumlah angsuran yang akan diterima dan jumlah pokok pembiayaan. Pendapatan yang belum diakui diamortisasi dan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu perjanjian pembiayaan konsumen dengan menggunakan tingkat pengembalian bunga efektif.

Pelunasan sebelum masa berakhirnya kontrak pembiayaan konsumen dianggap sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan laba atau rugi yang timbul diakui dalam periode berjalan.

Pendapatan lain yang diterima sehubungan dengan transaksi pembiayaan konsumen diakui dan dicatat sebagai pendapatan dalam periode yang bersangkutan.

w. Penyertaan dalam Bentuk Saham

Investasi pada entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu perusahaan dimana Bank dan entitas anak mempunyai pengaruh yang signifikan, namun tidak mempunyai pengendalian atau pengendalian bersama, melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan atas kebijakan finansial dan operasional investee.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Investasi pada entitas asosiasi dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Bank dan entitas anak atas aset bersih entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan, dikurangi dengan penurunan nilai yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu. Bagian Bank dan entitas anak atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, secara substansi, merupakan bagian dari nilai investasi bersih Bank dan entitas anak dalam entitas asosiasi) diakui hanya sebatas bahwa Bank dan entitas anak telah mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atau melakukan pembayaran atas liabilitas entitas asosiasi.

Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Bank dan entitas anak atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen dari entitas asosiasi yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai goodwill yang termasuk dalam jumlah tercatat investasi. Efektif 1 Januari 2011, goodwill tidak lagi diamortisasi tetapi diuji penurunan nilai sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan dari kepemilikan Bank dan entitas anak dari nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali segera diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif.

Ketika Bank dan entitas anak melakukan transaksi dengan entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian dieliminasi sebesar kepentingan mereka dalam entitas asosiasi.

Penyertaan lainnya

Sejak 1 Januari 2010, penyertaan dalam bentuk saham dengan pemilikan kurang dari 20% disajikan sebesar nilai wajarnya dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 3g). Apabila saham tidak memiliki kuotasi di pasar aktif atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka penyertaan diukur dengan nilai perolehan.

Sebelum 1 Januari 2010, penyertaan dalam bentuk saham dengan pemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk investasi jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya). Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif periode berjalan.

x. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dengan menggunakan metode saldo-menurun-ganda (*double-declining balance method*), kecuali untuk bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) masing-masing dengan tarif sebagai berikut:

	Persentase
Bangunan	5%
Kendaraan bermotor	25% - 50%
Inventaris kantor	25% - 50%

Aset tetap kendaraan bermotor dan inventaris kantor milik entitas anak disusutkan dengan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 2 – 5 tahun (Catatan 56).

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada periode yang bersangkutan.

y. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud terdiri dari goodwill dan perangkat lunak yang dibeli oleh Bank.

Goodwill

Goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis diakui sebagai aset pada tanggal diperolehnya pengendalian (tanggal akuisisi). Goodwill diukur sebagai selisih dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pihak yang diakuisisi dan nilai wajar dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi (jika ada) atas jumlah selisih bersih dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi.

Jika setelah penilaian kembali, kepemilikan Bank dan entitas anak pada nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi melebihi dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali pihak yang diakuisisi dan nilai wajar dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi (jika ada), selisihnya diakui segera dalam laba atau rugi sebagai pembelian dengan diskon.

Efektif 1 Januari 2011, goodwilll tidak diamortisasi melainkan diuji penurunan nilainya sekurang-kurangnya sekali setahun.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasil kas dari Bank dan entitas anak yang diharapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill diuji penurunan nilainya secara tahunan, dan ketika terdapat indikasi bahwa unit tersebut mengalami penurunan nilai. Jika jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan pertama untuk mengurangi jumlah tercatat aset atas setiap goodwill yang dialokasikan pada unit dan selanjutnya ke aset lainnya dari unit dibagi prorata atas dasar jumlah tercatat setiap aset dalam unit tersebut. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Pada pelepasan entitas anak, jumlah yang dapat diatribusikan dari goodwill termasuk dalam penentuan laba atau rugi atas pelepasan.

Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dibeli oleh Bank dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan menggunakan metode saldo-menurun-ganda (*double-declinning balance method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 tahun.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode amortisasi direview setiap akhir tahun.

z. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan kecuali Goodwill

Pada tanggal pelaporan, Bank dan entitas anak menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Bank dan entitas anak mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3g.

aa. Aset Tetap yang belum Siap Digunakan dalam Kegiatan Operasional

Aset tetap yang belum siap digunakan dalam kegiatan operasional dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

bb. Agunan yang Diambil Alih

Tanah dan aset lainnya (jaminan kredit yang telah diambil alih oleh Bank) disajikan dalam akun Agunan yang Diambil Alih dalam kelompok “Aset lain-lain”.

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai realisasi bersih. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai realisasi bersih dari agunan yang diambil alih, dibebankan ke dalam akun penyisihan penghapusan aset produktif. Sedangkan selisih lebih nilai realisasi bersih di atas saldo kredit, agunan yang diambil alih diakui maksimum sebesar saldo kredit dan selisihnya dicatat dalam administratif Bank.

Selisih antara nilai agunan yang telah diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan penghapusan aset agunan yang diambil alih dibentuk atas penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif periode berjalan.

cc. Tagihan Anjak Piutang

Sejak 1 Januari 2010, tagihan anjak piutang dinyatakan sebesar nilai tercatat dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Nilai tercatat tagihan anjak piutang sebesar jumlah bersih piutang yang diamortisasi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif. Pada saat pengakuan awal, nilai wajar tagihan anjak piutang adalah sebesar tagihan anjak piutang dikurangi dengan pendapatan yang dapat diatribusikan secara langsung pada piutang seperti pendapatan tagihan anjak piutang yang belum diakui dan pendapatan provisi (Catatan 3g).

Sebelum 1 Januari 2010, tagihan anjak piutang diakui sebesar nilai piutang yang diperoleh. Selisih antara tagihan anjak piutang dengan jumlah pembayaran kepada nasabah diakui sebagai pendapatan tangguhan selama periode anjak piutang. Pendapatan administrasi diakui pada saat transaksi dilakukan dan pendapatan anjak piutang dicatat atas dasar akrual. Transaksi anjak piutang dilakukan atas dasar dengan *recourse.*

dd. Simpanan

Sejak 1 Januari 2010, pada saat pengakuan awal simpanan diukur sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 3h).

Sebelum 1 Januari 2010, simpanan dinyatakan sebagai berikut:

- Giro dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemegang giro.
- Tabungan dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemilik tabungan.
- Deposito dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

Untuk tahun 2012, 2011, 2010 dan 2009, simpanan entitas anak yang bergerak di bidang perbankan syariah dinyatakan sebagai berikut:

- Giro *wadiah* dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemegang giro.
- Tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemilik tabungan.
- Deposito berjangka *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan entitas anak.

ee. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, *inter-bank call money* dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau 90 hari, tabungan dan deposito berjangka.

Sejak 1 Januari 2010, pada saat pengakuan awal simpanan dari bank lain diukur sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 3h).

Sebelum 1 Januari 2010, simpanan dari bank lain disajikan sebesar jumlah liabilitas terhadap bank lain.

ff. Biaya Emisi

Emisi Obligasi

Biaya emisi obligasi langsung dikurangkan dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto obligasi tersebut. Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium yang diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan metode garis lurus untuk periode sebelum 1 Januari 2010 dan dengan metode suku bunga efektif untuk periode sejak 1 Januari 2010. Selisih antara harga pembelian kembali obligasi dengan jumlah tercatat obligasi diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada periode berjalan.

Emisi Obligasi Subordinasi

Biaya emisi obligasi subordinasi langsung dikurangkan dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto obligasi subordinasi tersebut. Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium yang diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode sebelum 1 Januari 2010, dan dengan metode suku bunga efektif untuk periode sejak 1 Januari 2010.

Biaya Emisi Saham

Biaya emisi saham disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor dan tidak disusutkan.

gg. Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Sejak 1 Januari 2010, efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 3g).

Sebelum 1 Januari 2010, efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) diakui sebagai tagihan sebesar harga penjualan yang disepakati dikurangi pendapatan bunga diterima di muka. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali efek diakui sebagai pendapatan bunga diterima di muka dan diamortisasi selama jangka waktu sejak efek tersebut dibeli hingga dijual kembali.

hh. Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Sejak 1 Januari 2010, efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*) diakui sebagai liabilitas disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan suku bunga efektif (Catatan 3h).

Sebelum 1 Januari 2010, efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*) diakui sebagai liabilitas sebesar harga pembelian yang disepakati dikurangi beban bunga yang dibayar di muka. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali efek diakui sebagai beban bunga yang dibayar di muka dan diamortisasi selama jangka waktu sejak efek tersebut dijual hingga dibeli kembali.

ii. Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga

Sejak 1 Januari 2010

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 3g).

Selama tahun 2012, 2011 dan 2010, penerimaan yang berhubungan dengan kredit yang mengalami penurunan nilai langsung mengurangi nilai tercatat kredit. Pendapatan bunga atas penurunan nilai aset keuangan dalam periode berjalan diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk diskon arus kas di masa yang akan datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

Bunga dari liabilitas keuangan, diakui sebagai beban pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Pendapatan dan beban bunga yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian termasuk:

- Bunga pada aset dan liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi yang dihitung menggunakan suku bunga efektif.
- Bunga pada instrumen sekuritas investasi tersedia untuk dijual dihitung menggunakan suku bunga efektif.
- Porsi efektif dari nilai wajar berubah pada derivatif lindung nilai arus kas dari berbagai arus kas bunga, pada periode yang sama dimana lindung nilai arus kas mempengaruhi pendapatan/beban bunga.
- Nilai wajar berubah pada derivatif yang memenuhi kualifikasi (termasuk ketidakefisienan lindung nilai) dan berkaitan dengan item lindung nilai pada lindung nilai wajar dari risiko suku bunga.

Perubahan nilai wajar pada derivatif lainnya yang digunakan untuk kepentingan manajemen risiko, dan aset dan liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, akan terlihat pada pendapatan bersih dari instrumen keuangan lainnya yang diukur pada nilai wajar pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Sebelum 1 Januari 2010

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual, kecuali pendapatan bunga atas kredit dan aset produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet (*nonperforming*) serta investasi neto sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen dan tagihan anjak piutang yang macet diakui secara *cash basis*. Pada saat aset produktif diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai (pada periode berjalan) atau "*non-performing"*, tagihan bunga dari aset tersebut yang sudah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima, dibatalkan dan selanjutnya diakui sebagai tagihan kontinjensi (disajikan di luar laporan posisi keuangan konsolidasian).

Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit *nonperforming*, kecuali untuk kredit yang diklasifikasikan kurang lancar dan investasi neto sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen dan tagihan anjak piutang yang macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit dan piutang. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit dan piutang diakui sebagai pendapatan bunga pada periode berjalan.

Pendapatan bunga yang ditangguhkan dari kredit yang direstrukturisasi diakui sebagai pendapatan secara proporsional pada saat diterima pembayaran angsuran pokok.

Untuk tahun 2012, 2011, 2010 dan 2009, pendapatan syariah diperoleh dari transaksi *murabahah* yang diakui secara akrual, sedangkan beban syariah berasal dari bagi hasil *mudharabah* dan bonus *wadiah*.

jj. Pengakuan Pendapatan dan Beban Underwriting

Merupakan pendapatan premi dan beban klaim entitas anak yang bergerak dalam bidang asuransi.

Pendapatan Premi

Premi dari asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Premi dari polis bersama diakui sebesar pangsa premi yang diperoleh Perusahaan.

Pendapatan premi diterima di muka dicatat sebagai pendapatan premi ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan masa pertanggungannya.

Setelah 1 Januari 2012, premi belum merupakan pendapatan dihitung dengan menggunakan metode harian dan disajikan dalam jumlah kotor sebagai liabilitas kontrak asuransi. Premi belum merupakan pendapatan bagian reasuradur disajikan sebagai bagian dari aset reasuransi.

Sebelum 1 Januari 2012, premi belum merupakan pendapatan dihitung secara agregratif dengan menggunakan persentase sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (KMK) No. 424/KMK.06/2003, yaitu 40% dari premi neto untuk polis dengan masa pertanggungan lebih dari 1 bulan dan 10% dari premi neto untuk polis dengan masa pertanggungan tidak lebih dari 1 bulan. Persentase tersebut berlaku untuk asuransi selain kendaraan. Untuk asuransi kendaraan menggunakan persentase sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 74/PMK.010/2007, yaitu 40% dari premi neto.

Penurunan (kenaikan) premi belum merupakan pendapatan adalah selisih antara premi belum merupakan pendapatan periode berjalan dan periode lalu.

Entitas anak mereasuransikan sebagian risiko atas akseptasi pertanggungan yang diperoleh kepada perusahaan asuransi lain dan perusahaan reasuransi. Jumlah premi dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi selama periode kontrak reasuransi secara proporsional dengan proteksi yang diperoleh. Pembayaran atau liabilitas atas transaksi reasuransi retrospektif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar liabilitas yang dicatat sehubungan dengan kontrak reasuransi tersebut.

Penyajian pendapatan premi dalam laporan laba rugi komprehensif menunjukkan jumlah premi bruto, premi reasuransi, penurunan (kenaikan) premi yang belum merupakan pendapatan dan kenaikan (penurunan) premi yang belum merupakan pendapatan bagian reasuransi. Pendapatan premi reasuransi disajikan sebagai pengurang premi bruto.

Beban Klaim

Beban klaim meliputi klaim yang disetujui (settled claims), klaim dalam proses penyelesaian (*outstanding claims*) termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan *(claims incurred but not yet reported)* dan beban penyelesaian klaim.

Klaim diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Bagian klaim yang diperoleh dari reasuradur diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Hak subrograsi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

Jumlah klaim dalam proses penyelesaian (estimasi klaim kotor) ditentukan berdasarkan estimasi kerugian dari klaim yang masih dalam proses penyelesaian pada tanggal pelaporan, termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan dan akan disajikan sebagai liabilitas kontrak asuransi. Estimasi klaim bagian reasuradur disajikan sebagai bagian dari aset reasuransi. Perubahan dalam estimasi klaim diakui dalam laporan laba rugi komprehensif periode terjadinya perubahan.

Penyajian beban klaim dalam laporan laba rugi komprehensif menunjukkan jumlah klaim bruto, klaim reasuransi, kenaikan (penurunan) estimasi klaim kotor dan penurunan (kenaikan) estimasi klaim bagian reasuransi. Klaim reasuransi disajikan sebagai pengurang klaim bruto.

kk. Pengakuan Pendapatan dan Beban Provisi dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu tertentu yang jumlahnya signifikan ditangguhkan dan diamortisasi sesuai dengan jangka waktunya dengan menggunakan suku bunga efektif pada tahun 2012, 2011 dan 2010 dan metode garis lurus pada tahun 2009. Untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan/atau komisi yang ditangguhkan, diakui pada saat kredit dilunasi.

Provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkreditan atau pinjaman dan jangka waktu tertentu atau nilainya tidak material menurut Bank diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

ll. Program Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya

Bank memberikan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetapnya. Bank dan entitas anak juga membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi jumlah yang lebih besar diantara 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti dan 10% dari nilai wajar aset program diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diprakirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vested*.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui, biaya jasa lalu yang belum diakui dan nilai wajar aset program.

mm. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Bank dan entitas anak ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tecatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Bank dan entitas anak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba atau rugi.

nn. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang bersangkutan setelah memperhitungkan pengaruh retroaktif perubahan nilai nominal saham.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

oo. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Bank dan entitas anak yang secara regular di*review* oleh “pengambil keputusan operasional” dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Sebaliknya, standar sebelumnya mengharuskan Bank dan entitas anak mengidentifikasi dua segmen (bisnis dan geografis), menggunakan pendekatan risiko dan pengembalian.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk, yang menyerupai informasi segmen bisnis yang dilaporkan di periode sebelumnya.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, selain dari penyajian perkiraan yang diatur di bawah ini.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Bank dan entitas anak mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Suatu aset keuangan dinyatakan mengalami penurunan nilai bila ada bukti obyektif terjadinya peristiwa yang berdampak pada estimasi arus kas atas aset keuangan. Bukti tersebut meliputi data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa yang merugikan dalam status pembayaran debitur atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kelalaian membayar piutang.

Kerugian penurunan nilai adalah selisih antara nilai tercatat dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan dan realisasi agunan pada tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Penyisihan penurunan nilai akan dibentuk untuk mengakui kerugian penurunan nilai yang terjadi dalam portofolio aset keuangan. Manajemen menggunakan perkiraan berdasarkan pengalaman kerugian historis untuk aset dengan karakteristik risiko kredit dan bukti obyektif adanya penurunan nilai yang serupa dengan yang ada dalam portofolio pada saat penjadwalan arus kas masa depan.

Bank melakukan penilaian terhadap penurunan nilai dalam dua cara, yaitu:

a. Individual, dilakukan untuk jumlah aset keuangan yang melebihi ambang batas (*threshold*) tertentu dan aset keuangan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai yang telah teridentifikasi secara terpisah pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Kerugian penurunan nilai adalah selisih antara nilai tercatat dan nilai kini dari estimasi terbaik atas arus kas masa depan dan realisasi agunan pada tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Estimasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas utang dan fleksibilitas keuangan debitur, kualitas pendapatan debitur, jumlah dan sumber arus kas, industri di mana debitur beroperasi dan nilai realisasi agunan. Estimasi jumlah dan waktu pemulihan masa depan akan membutuhkan banyak pertimbangan. Jumlah penerimaan tergantung pada kinerja debitur pada masa mendatang dan nilai agunan, keduanya akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di masa depan, di samping itu agunan mungkin tidak mudah dijual. Nilai aktual arus kas masa depan dan tanggal penerimaan mungkin berbeda dari estimasi tersebut dan akibatnya kerugian aktual yang terjadi mungkin berbeda dengan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

b. Kolektif, dilakukan untuk jumlah aset keuangan yang tidak melebihi ambang batas (*threshold*) tertentu, tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai dan aset keuangan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai, namun belum diidentifikasi secara terpisah pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Pembentukan kerugian penurunan nilai dilakukan secara kolektif dengan antara lain memperhitungkan jumlah dan lamanya tunggakan, agunan dan pengalaman kerugian masa lalu. Faktor paling penting dalam pembentukan cadangan adalah *probability of default* dan *loss given default*. Kualitas aset keuangan pada masa mendatang dipengaruhi oleh ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian aktual aset keuangan dapat berbeda secara material dari cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk. Ketidakpastian ini termasuk lingkungan ekonomi, suku bunga dan pengaruhnya terhadap pembelanjaan debitur, tingkat pengangguran dan perilaku pembayaran.

Metodologi dan asumsi yang digunakan dalam penurunan nilai individual dan kolektif ini akan ditelaah secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktual.

Manfaat Karyawan

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Bank dan entitas anak diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Bank dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja Bank.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Bank dan entitas anak ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direview secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 17.

Penurunan Nilai Goodwil

Menentukan apakah suatu goodwill turun nilainya memerlukan estimasi nilai pakai unit penghasil kas dimana goodwill dialokasikan. Perhitungan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk mengestimasi aliran kas masa depan yang diharapkan yang timbul dari unit penghasil kas yang menggunakan tingkat pertumbuhan yang sesuai dan tingkat diskonto yang sesuai untuk perhitungan nilai kini.

5. KAS

	30 Juni 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010	31 Desember 2009	1 Januari 2009/ 31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah	1.011.990	1.286.891	1.004.025	856.244	886.070
Dollar Amerika Serikat	106.058	88.653	57.621	42.645	32.792
Dollar Singapura	9.040	16.781	14.428	2.011	9.246
Jumlah	1.127.088	1.392.325	1.076.074	900.900	928.108

Kas diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, nilai wajar dari kas adalah sebesar nilai tercatatnya.

Saldo kas termasuk uang pada mesin ATM *(Automated Teller Machines)* sejumlah Rp 89.215 juta pada tanggal 30 Juni 2012, Rp 130.491 juta dan USD 138.074 pada tanggal 31 Desember 2011, Rp 93.801 juta dan USD 126.500 pada tanggal 31 Desember 2010, Rp 81.844 juta dan USD 108.200 pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp 85.395 juta dan USD 73.900 pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008.

6. GIRO PADA BANK INDONESIA

	30 Juni 2012		31 Desember 2011		31 Desember 2010		31 Desember 2009		1 Januari 2009/ 31 Desember 2008	
	Rp Juta	% GWM	Rp Juta	% GWM	Rp Juta	% GWM	Rp Juta	% GWM	Rp Juta	% GWM
Rupiah	6.991.025	8,07	6.179.827	8,01	5.227.961	8,11	2.342.832	5,02	1.822.974	5,02
Dollar Amerika Serikat	1.404.179	8,04	1.310.254	8,14	175.695	1,04	138.107	1,04	98.100	1,01
Jumlah	8.395.204		7.490.081		5.403.656		2.480.939		1.921.074	

Giro pada Bank Indonesia diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, nilai wajar dari giro pada Bank Indonesia adalah sebesar nilai tercatatnya.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010, yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Pebruari 2011, tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, setiap bank di Indonesia diwajibkan mempunyai saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer yang ditetapkan sebesar 8% dan GWM Sekunder yang ditetapkan 2,5% yang mulai berlaku tanggal 1 Nopember 2010, serta GWM *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar perhitungan antara parameter disintensif bawah atau parameter disintensif atas dengan selisih antara LDR bank dan LDR target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank dan KPMM Insentif yang mulai berlaku tanggal 1 Maret 2011. GWM dalam Dollar Amerika Serikat ditetapkan sebesar 8% sejak tanggal 1 Juni 2011, 5% sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 31 Mei 2011 dan 1% yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2010 sampai dengan 28 Pebruari 2011.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008, tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, GWM dalam Rupiah untuk tahun 2009 ditetapkan sebesar 7,5% yang terdiri dari GWM utama sebesar 5% yang mulai berlaku tanggal 24 Oktober 2008 dan GWM sekunder sebesar 2,5% yang mulai berlaku tanggal 24 Oktober 2009 dan GWM dalam Dollar Amerika Serikat ditetapkan sebesar 1% yang mulai berlaku tanggal 24 Oktober 2008.

Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, giro wajib minimum (GWM) sekunder Bank yang terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan obligasi Pemerintah Indonesia masing-masing sebesar 11,21%, 12,67%, 23,66% dan 32,29%.

Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008, Bank telah memenuhi giro wajib minimum yang harus disediakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

7. GIRO PADA BANK LAIN

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Pihak berelasi					
Bank					
Australia and New Zealand Banking Group					
Dollar Selandia Baru	14.746	26.520	23.917	10.683	26.919
Dollar Australia	14.720	52.869	54.823	25.416	44.399
Jumlah	29.466	79.389	78.740	36.099	71.318
Penyisihan penghapusan	-	-	-	(361)	(713)
Bersih	29.466	79.389	78.740	35.738	70.605
Pihak ketiga					
Bank					
Rupiah	35.997	54.142	38.260	30.624	54.077
Dollar Amerika Serikat	218.599	515.663	309.572	509.409	900.291
Dollar Singapura	95.223	186.604	146.051	61.077	150.645
Euro	52.462	135.668	90.011	54.000	105.656
Yen Jepang	38.243	45.976	91.030	115.075	55.011
Lainnya	77.929	128.793	86.415	53.101	34.801
Sub jumlah	518.453	1.066.846	761.339	823.286	1.300.481
Entitas anak					
Rupiah	65.828	38.895	28.611	6.406	6.809
Dollar Amerika Serikat	3.999	94	66	-	26
Sub jumlah	69.827	38.989	28.677	6.406	6.835
Jumlah	588.280	1.105.835	790.016	829.692	1.307.316
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1)	(2)	(2)	(8.294)	(13.399)
Bersih	588.279	1.105.833	790.014	821.398	1.293.917
Jumlah Giro pada Bank Lain - Bersih	617.745	1.185.222	868.754	857.136	1.364.522

Giro pada bank lain diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, nilai wajar dari giro pada bank lain adalah sebesar Rp 617.746 juta, Rp 1.185.224 juta dan Rp 868.756 juta (Catatan 52).

Rincian giro pada bank lain berdasarkan pihak dimana Bank menempatkan dananya adalah sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Bank					
Rupiah					
Bank Mandiri	14.361	4.998	3.904	3.098	8.529
Bank Internasional Indonesia	7.307	21.730	10.718	393	-
BPD Jawa Tengah	4.666	8.913	6.755	344	-
BPD Riau	3.013	6.359	1.017	-	5.711
Bank Central Asia	1.166	777	4.678	1.286	7.309
BPD Jawa Barat	921	7.866	1.266	1.166	16.618
Standard Chartered Bank	28	28	8.260	4.744	8.243
CIMB Niaga	11	2	6	14.756	3.114
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 5 miliar)	4.524	3.469	1.656	4.837	4.553
Sub jumlah	35.997	54.142	38.260	30.624	54.077
Valuta Asing					
J.P Morgan Chase, New York	125.216	227.436	108.622	52.956	103.048
United Overseas Bank Ltd., Singapura	78.935	163.910	129.474	58.877	137.429
Mizuho Corp., Tokyo	38.244	45.976	91.030	115.075	50.913
Toronto Dominion Bank, Kanada	30.325	38.684	15.826	8.997	6.389
Commerzbank AG, Jerman	24.346	63.142	47.084	28.754	71.837
Credit Suisse, Zurich	23.919	34.429	6.432	11.016	3.006
Citibank NA, New York	22.001	90.168	26.364	29.898	115.499
Standard Chartered Bank, London	20.450	40.709	55.643	30.156	18.324
Bank Central Asia, Jakarta	16.074	19.245	27.473	25.150	228.232
Standard Chartered Bank, Singapura	15.031	23.511	11.321	6.041	9.464
ANZ National Bank Ltd., Wellington	14.746	26.520	23.917	10.683	26.919
ANZ Banking Group Ltd., Melbourne	14.720	52.869	54.823	25.416	44.399
Wachovia NA, London	14.632	14.140	31.329	15.452	16.224
Bank of New York, New York	14.099	17.757	15.214	36.573	67.142
Bank Mandiri, Jakarta	11.684	24.027	22.062	73.537	231.580
Ing Bank, London	10.848	47.242	6.879	4.068	-
Standard Chartered Bank, New York	9.923	25.685	37.133	112.559	90.060
Wachovia NA, New York	9.092	25.014	30.625	25.397	32.521
Standard Chartered Bank, Frankfurt	8.176	11.144	4.719	5.726	17.595
Oversea - Chinese Banking Corp. Ltd., Singapura	4.343	5.556	14.082	8.553	9.164
Standard Chartered Bank, Hongkong	3.234	14.971	8.514	2.933	4.211
Bank of China, Jakarta	1.817	79.934	33.206	140.925	-
American Express Bank, New York	-	-	-	-	26.786
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 5 miliar)	67	24	47	19	6.980
Sub jumlah	511.922	1.092.093	801.819	828.761	1.317.722
Jumlah Giro pada Bank Lain - Bank	547.919	1.146.235	840.079	859.385	1.371.799

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Entitas Anak					
Rupiah					
Bank Capital Premiere Bisnis	30.087	-	-	-	-
Bank Victoria International	22.797	435	13.945	-	175
Bank Central Asia	8.140	8.559	3.498	4.981	5.313
Bank Rakyat Indonesia	1.620	3.557	3.294	-	-
Bank Tabungan Pensiunan Nasional	-	23.215	6.362	-	-
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)	3.184	3.129	1.512	1.425	1.321
Sub jumlah	65.828	38.895	28.611	6.406	6.809
Dollar Amerika Serikat					
Bank Mutiara	3.808	13	-	-	-
Bank Artha Graha	191	81	-	-	-
Bank Negara Indonesia	-	-	50	-	-
Bank Internasional Indonesia	-	-	16	-	-
Bank Mandiri	-	-	-	-	26
Sub jumlah	3.999	94	66	-	26
Jumlah Giro pada Bank Lain - Entitas Anak	69.827	38.989	28.677	6.406	6.835
Jumlah	617.746	1.185.224	868.756	865.791	1.378.634
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1)	(2)	(2)	(8.655)	(14.112)
Jumlah Giro pada Bank Lain - Bersih	617.745	1.185.222	868.754	857.136	1.364.522

Tingkat suku bunga efektif rata-rata per tahun giro pada bank lain untuk mata uang Rupiah dan valuta asing masing-masing sebesar 1,50% dan 0,55% pada tanggal 30 Juni 2012, 2,50% dan 0,89% pada tanggal 31 Desember 2011, 2,50% dan 0,28% pada tanggal 31 Desember 2010, 1,50% dan nihil pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2,18% dan 0,11% pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008.

Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008, tidak terdapat giro pada bank lain yang dijadikan agunan oleh Bank dan entitas anaknya.

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010 tidak mengalami penurunan nilai dan berkualitas lancar pada tanggal 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2012 (Enam bulan)			2011 (Satu tahun)			2010 (Satu tahun)			2009 (Satu tahun)		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Saldo awal periode	2	-	2	2	-	2	366	8.289	8.655	934	13.178	14.112
Penambahan karena akuisisi anak perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selisih penurunan nilai sehubungan dengan penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006)	-	-	-	-	-	-	(360)	(8.289)	(8.649)	-	-	-
Eliminasi defisit dalam rangka kuasi reorganisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(243)	-	(243)
Penyisihan (pemulihan) periode berjalan	(1)	-	(1)	-	-	-	(4)	-	(4)	(325)	(3.346)	(3.671)
Selisih kurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.543)	(1.543)
Saldo akhir periode	1	-	1	2	-	2	2	-	2	366	8.289	8.655

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya giro pada bank lain.

8. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, nilai wajar dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah sebesar Rp 9.450.117 juta, Rp 15.969.057 juta dan Rp 16.989.676 juta (Catatan 52).

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain berdasarkan jenis penempatan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2012		
	Jangka waktu	Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun	Jumlah
			Rp Juta
Rupiah			
Pihak ketiga			
Bank			
BI Intervensi - setelah dikurangi bunga yang belum diamortisasi sebesar Rp 79.898 juta	5 - 9 bulan	0,13%	5.038.581
Call money	3 - 14 hari	4,36%	880.000
Sub jumlah			5.918.581
Entitas anak			
Deposito berjangka	1 bulan	7,75%	1.032.254
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	3 hari	3,75%	131.500
Sub jumlah			1.163.754
Jumlah			7.082.335
Valuta Asing			
Pihak ketiga			
Bank			
Call money			
Dollar Australia	6 - 14 hari	1,18%	749.883
Euro	14 - 21 hari	0,06%	567.022
Dollar Singapura	7 - 63 hari	0,12%	525.258
Dollar Amerika Serikat	1 - 3 bulan	0,41%	366.308
Yen Jepang	14 hari	0,01%	59.080
Poundsterling Inggris	14 hari	0,01%	44.002
Dollar Selandia Baru	7 - 14 hari	0,04%	33.743
Dollar Hongkong	14 hari	0,01%	9.688
Sub jumlah			2.354.984
Entitas anak			
Deposito berjangka - Dollar Amerika Serikat	1 bulan	2,75%	12.798
Jumlah			2.367.782
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Bersih			9.450.117

	31 Desember 2011		
	Jangka waktu	Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun	Jumlah
			Rp Juta
Rupiah			
Pihak ketiga			
Bank			
BI Intervensi - setelah dikurangi bunga yang belum diamortisasi sebesar Rp 98.466 juta	3 - 196 hari	5,87%	8.808.534
Call money	14 - 33 hari	5,06%	3.880.000
Deposito berjangka	33 hari	6,00%	50.000
Sub jumlah			12.738.534
Entitas anak			
Deposito berjangka	1 bulan	8,56%	883.564
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	3 hari	4,50%	75.000
Sub jumlah			958.564
Jumlah			13.697.098
Valuta Asing			
Pihak ketiga			
Bank			
Call money			
Dollar Australia	6 - 15 hari	4,68%	851.535
Euro	6 - 14 hari	0,88%	474.448
Dollar Singapura	11 - 63 hari	0,51%	460.914
Dollar Amerika Serikat	33 - 94 hari	4,03%	398.970
Poundsterling Inggris	14 hari	0,69%	41.926
Yen Jepang	9 hari	0,25%	23.364
Dollar Selandia Baru	16 hari	2,95%	14.001
Sub jumlah			2.265.158
Entitas anak			
Deposito berjangka - Dollar Amerika Serikat	1 bulan	2,15%	6.801
Jumlah			2.271.959
Jumlah			15.969.057
Cadangan kerugian penurunan nilai			(500)
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Bersih			15.968.557

	31 Desember 2010		
	Jangka waktu	Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun	Jumlah
			Rp Juta
Rupiah			
Pihak ketiga			
Bank			
BI Intervensi - setelah dikurangi bunga yang belum diamortisasi sebesar Rp 94.858 juta	1 - 4 bulan	6,29%	11.319.542
Call money	5 - 94 hari	6,33%	880.000
Sub jumlah			12.199.542
Entitas anak			
Deposito berjangka	1 bulan	7,12%	440.571
Jumlah			12.640.113
Valuta Asing			
Pihak berelasi			
Bank			
Call money			
Dollar Amerika Serikat	7 hari	0,34%	180.200
Pihak ketiga			
Bank			
Call money			
Dollar Amerika Serikat	4 - 33 hari	0,37%	2.680.475
Euro	6 - 34 hari	0,59%	618.926
Dollar Singapura	5 - 63 hari	0,54%	435.605
Dollar Australia	5 - 32 hari	4,81%	357.610
Poundsterling Inggris	14 hari	0,52%	55.765
Dollar Hongkong	63 hari	0,25%	17.386
Sub jumlah			4.165.767
Entitas anak			
Deposito berjangka - Dollar Amerika Serikat	1 bulan	1,37%	3.596
Jumlah			4.349.563
Jumlah			16.989.676
Cadangan kerugian penurunan nilai			(600)
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Bersih			16.989.076

	31 Desember 2009		
	Jangka waktu	Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun	Jumlah
			Rp Juta
Rupiah			
Pihak berelasi			
Bank			
Call money	14 - 33 hari	6,64%	490.000
Pihak ketiga			
Bank			
Call money	5 - 94 hari	6,94%	1.920.000
BI Intervensi - setelah dikurangi bunga yang belum diamortisasi sebesar Rp 46 juta	4 hari	6,00%	91.954
Kredit	1 - 3 tahun	12,18%	14.245
Sub jumlah			2.026.199
Entitas anak			
Deposito berjangka	1 bulan	10,27%	319.104
Jumlah			2.835.303
Valuta Asing			
Pihak ketiga			
Bank			
Call money			
Dollar Amerika Serikat	7 - 34 hari	0,18%	1.658.218
Dollar Australia	7 - 62 hari	3,76%	659.345
Dollar Singapura	7 - 92 hari	0,65%	566.531
Euro	7 - 63 hari	0,35%	399.501
Yen Jepang	31 - 92 hari	0,12%	56.205
Poundsterling Inggris	7 - 33 hari	0,42%	45.495
Dollar Hongkong	92 hari	0,06%	30.287
Dollar Selandia Baru	31 - 34 hari	2,56%	20.484
Dollar Kanada	34 hari	0,15%	8.965
Kredit			
Dollar Amerika Serikat	1 - 3 tahun	3,97%	1.902.209
Sub jumlah			5.347.240
Entitas anak			
Deposito berjangka - Dollar Amerika Serikat	1 bulan	3,25%	2.820
Jumlah			5.350.060
Jumlah			8.185.363
Cadangan kerugian penurunan nilai			(78.280)
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Bersih			8.107.083

	1 Januari 2009/31 Desember 2008		
	Jangka waktu	Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun	Jumlah
			Rp Juta
Rupiah			
Pihak berelasi			
Bank			
Call money	14 hari	11,50%	50.000
Pihak ketiga			
Bank			
Call money	6 - 92 hari	10,69%	1.321.000
BI Intervensi - setelah dikurangi bunga yang belum diamortisasi sebesar Rp 380 juta	5 - 6 hari	9,25%	369.620
Kredit	1 - 3 tahun	13,23%	18.518
Sub Jumlah			1.709.138
Entitas anak			
Deposito berjangka	1 bulan	10,25%	53.214
Fine Tune Operation - setelah dikurangi bunga yang belum diamortisasi sebesar 16 juta	8 hari	9,25%	15.884
Sub Jumlah			69.098
Jumlah			1.828.236
Valuta Asing			
Pihak ketiga			
Bank			
Call money			
Dollar Amerika Serikat	6 - 34 hari	1,45%	1.384.300
Dollar Australia	7 - 92 hari	4,53%	955.615
Dollar Singapura	6 - 33 hari	1,08%	345.250
Euro	8 - 34 hari	2,57%	199.634
Yen Jepang	6 hari	0,16%	12.065
Dollar Selandia Baru	12 hari	4,91%	6.319
Kredit			
Dollar Amerika Serikat	3 tahun	3,29%	319.622
Deposito berjangka			
Dollar Amerika Serikat	181 - 182 hari	5,64%	282.769
Jumlah			3.505.574
Jumlah			5.333.810
Cadangan kerugian penurunan nilai			(40.249)
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Bersih			5.293.561

Rincian penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain berdasarkan pihak dimana Bank menempatkan dananya adalah sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah					
Bank					
BI Intervensi	5.038.581	8.808.534	11.319.542	91.954	369.620
Call Money					
Standard Chartered Bank	500.000	-	-	-	-
OCBC NISP	200.000	-	-	-	-
Bank of Tokyo Mitsubishi	160.000	-	-	100.000	-
Bank DBS Indonesia	20.000	-	-	-	-
Bank Mega	-	3.000.000	130.000	100.000	-
BPD Jawa Barat	-	450.000	300.000	-	-
Bank Victoria International	-	400.000	-	500.000	200.000
Bank Index	-	30.000	-	-	-
BPD Kalimantan Barat	-	-	100.000	100.000	-
BPD Bali	-	-	100.000	50.000	-
BPD Papua	-	-	100.000	-	-
Rabobank	-	-	100.000	-	-
BPD Sulawesi Tenggara	-	-	50.000	-	-
Bank ANZ Indonesia (dahulu ANZ Panin Bank)	-	-	-	490.000	50.000
Bank Mutiara	-	-	-	150.000	-
Bank Capital Indonesia	-	-	-	100.000	150.000
CIMB Niaga	-	-	-	100.000	150.000
Bank International Indonesia	-	-	-	100.000	-
BPD Riau	-	-	-	100.000	-
BPD Sulawesi Utara	-	-	-	100.000	-
BPD Sumatra Utara	-	-	-	100.000	-
HSBC	-	-	-	100.000	-
BPD Nusa Tenggara Timur	-	-	-	100.000	100.000
Bank Bukopin	-	-	-	100.000	100.000
Bank Victoria Syariah (dahulu Bank Swaguna)	-	-	-	20.000	-
Bank DKI	-	-	-	-	100.000
Bank UOB Buana	-	-	-	-	100.000
JP Morgan Chase Bank	-	-	-	-	100.000
BPD Sumatra Selatan	-	-	-	-	100.000
Bank Sinarmas	-	-	-	-	50.000
BPD Jawa Tengah	-	-	-	-	50.000
BNP Paribas	-	-	-	-	40.000
Bank Chinatrust Indonesia	-	-	-	-	25.000
The Bangkok Bank Corp. Ltd.	-	-	-	-	20.000
Bank Ekonomi Raharja	-	-	-	-	20.000
Bank Hana	-	-	-	-	15.000
Bank Windu Kentjana	-	-	-	-	1.000
Sub jumlah	880.000	3.880.000	880.000	2.410.000	1.371.000

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Deposito Berjangka					
Bank Muamalat Syariah	-	50.000	-	-	-
Kredit					
BPR Benta Tesa - Surabaya	-	-	-	10.127	10.809
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 5 miliar)	-	-	-	4.118	7.709
Sub jumlah	-	-	-	14.245	18.518
Jumlah	5.918.581	12.738.534	12.199.542	2.516.199	1.759.138
Entitas anak					
Fine Tune Operation	-	-	-	-	15.884
Deposito berjangka					
Bank Mutiara	838.490	625.500	163.606	100.500	-
Bank Victoria International	179.500	193.500	211.500	90.000	29.500
Bank Index	9.000	9.000	-	-	-
Bank Mandiri	3.114	3.114	3.114	6.229	3.114
Bank Muamalat Syariah	-	50.000	-	-	-
Bank Syariah Mandiri	-	-	25.000	25.000	-
Bank Rakyat Indonesia Syariah	-	-	25.000	25.000	-
Bank Victoria Syariah (dahulu Bank Swaguna)	-	-	10.000	15.500	-
Bank Agroniaga	-	-	-	30.500	-
Bank Capital	-	-	-	18.000	-
Bank Mega Syariah	-	-	-	5.000	-
Bank Sinarmas	-	-	-	-	8.000
Bank Central Asia	-	-	-	-	5.500
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 5 miliar)	2.150	2.450	2.351	3.375	7.100
Sub jumlah	1.032.254	883.564	440.571	319.104	69.098
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	131.500	75.000	-	-	-
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Rupiah	7.082.335	13.697.098	12.640.113	2.835.303	1.828.236
Valuta Asing					
Bank					
Call Money					
Dollar Australia					
Naxitis Bank, Singapura	382.106	-	59.602	-	-
CIC Bank, Singapura	367.777	184.116	298.008	257.821	279.508
BNP Paribas, Singapura	-	667.419	-	177.516	143.532
Bank of Nova Scotia, Hongkong	-	-	-	198.649	151.085
Commerzbank, Singapura	-	-	-	25.359	381.490
Sub jumlah	749.883	851.535	357.610	659.345	955.615
Euro					
BNP Paribas, Singapura	507.957	181.579	252.378	155.738	76.782
CIC Bank, Singapura	59.065	-	120.180	135.424	61.426
Natixis Bank, Singapura	-	292.869	-	-	-
Unicredit Bank, Hongkong	-	-	246.368	-	-
National Bank of Kuwait, Singapura	-	-	-	81.255	61.426
Commerzbank, Singapura	-	-	-	13.542	-
Bank of Tokyo Mitsubishi, Singapura	-	-	-	13.542	-
Sub jumlah	567.022	474.448	618.926	399.501	199.634

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Dollar Singapura					
Bank Permata	221.940	181.572	56.207	26.818	87.261
Bank Negara Indonesia, Singapura	155.358	188.556	281.036	365.395	242.813
Bank Mandiri	147.960	34.918	-	-	-
First Gulf Bank	-	55.868	-	-	-
United Overseas Bank Ltd., Singapura	-	-	56.207	-	15.176
National Bank of Kuwait, Singapura	-	-	28.103	50.284	-
Bank Mega	-	-	14.052	-	-
Naxitis Bank, Singapura	-	-	-	63.693	-
BNP Paribas, Singapura	-	-	-	60.341	-
Sub jumlah	525.258	460.914	435.605	566.531	345.250
Dollar Amerika Serikat					
Bank Mutiara	281.775	317.362	45.050	-	-
Barclays Bank Plc., London	84.533	81.608	81.090	131.530	288.850
National Bank of Kuwait	-	-	464.015	187.900	-
DBS Bank	-	-	450.500	-	-
Naxitis Bank, Singapura	-	-	387.430	403.985	163.500
BNP Paribas, Singapura	-	-	315.350	-	-
Bank Negara Indonesia, New York	-	-	252.280	-	-
United Overseas Bank Buana	-	-	189.210	-	-
Bank ANZ Indonesia (dahulu ANZ Panin Bank)	-	-	180.200	-	-
RBS Indonesia	-	-	180.200	-	-
Bank Negara Indonesia, Tokyo	-	-	135.150	-	-
Bank Woori Indonesia	-	-	90.100	46.975	43.600
First Gulf Bank	-	-	90.100	-	-
Bank Negara Indonesia, Singapura	-	-	-	375.800	163.500
Bank Negara Indonesia, London	-	-	-	187.900	-
Bank of Tokyo Mitsubishi, Singapura	-	-	-	93.950	-
Hypo Vereins Bank, Hong Kong	-	-	-	93.950	-
Bank Rakyat Indonesia	-	-	-	46.975	381.500
BPD Sumatera Selatan	-	-	-	46.975	-
Bank Maybank Indocorp	-	-	-	37.580	27.250
Bank Index Selindo	-	-	-	4.698	-
BPD Jawa Barat	-	-	-	-	152.600
Bank Artha Graha International	-	-	-	-	76.300
Korea Exchange Bank	-	-	-	-	43.600
Bank Windu Kentjana	-	-	-	-	43.600
Sub jumlah	366.308	398.970	2.860.675	1.658.218	1.384.300
Yen Jepang					
CIC Bank, Singapura	59.080	-	-	45.986	-
Bank Mandiri	-	23.364	-	-	-
BNP Paribas, Singapura	-	-	-	10.219	12.065
Sub jumlah	59.080	23.364	-	56.205	12.065
Poundsterling Inggris					
CIC Bank, Singapura	44.002	-	-	-	-
BNP Paribas, Singapura	-	41.926	55.765	45.495	-
Sub jumlah	44.002	41.926	55.765	45.495	-

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Dollar Selandia Baru					
Natixis Bank, Singapura	33.743	14.001	-	-	-
BNP Paribas, Singapura	-	-	-	6.828	6.319
CIC Bank, Singapura	-	-	-	6.828	-
Commerzbank, Singapura	-	-	-	6.828	-
Sub jumlah	33.743	14.001	-	20.484	6.319
Dollar Hongkong					
CIC Bank, Singapura	9.688	-	-	-	-
BNP Paribas, Singapura	-	-	17.386	30.287	-
Sub jumlah	9.688	-	17.386	30.287	-
Dollar Kanada					
Commerzbank, Singapura	-	-	-	8.965	-
Kredit					
Dollar Amerika Serikat					
Bank Rakyat Indonesia	-	-	-	1.879.000	-
Bank DKI	-	-	-	23.209	47.122
Bank Ekspor Indonesia	-	-	-	-	272.500
Sub jumlah	-	-	-	1.902.209	319.622
Deposito Berjangka					
Dollar Amerika Serikat					
Deutsche Bank, Singapura	-	-	-	-	224.328
HSBC, Hongkong	-	-	-	-	58.441
Sub jumlah	-	-	-	-	282.769
Jumlah	2.354.984	2.265.158	4.345.967	5.347.240	3.505.574
Entitas anak					
Deposito berjangka - Dollar Amerika Serikat					
Bank Mutiara	9.480	907	-	-	-
Bank Artha Graha International	3.318	5.894	-	-	-
Bank Internasional Indonesia	-	-	3.596	-	-
Bank Negara Indonesia	-	-	-	2.820	-
Sub jumlah	12.798	6.801	3.596	2.820	-
Jumlah Penempatan pada Bank Lain - Valuta Asing	2.367.782	2.271.959	4.349.563	5.350.060	3.505.574
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	9.450.117	15.969.057	16.989.676	8.185.363	5.333.810
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	(500)	(600)	(78.280)	(40.249)
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Bersih	9.450.117	15.968.557	16.989.076	8.107.083	5.293.561

Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang dijadikan agunan oleh Bank dan entitas anaknya.

Seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010 tidak mengalami penurunan nilai dan berkualitas lancar pada tanggal 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008.

Jumlah tercatat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain berdasarkan sisa umur jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2012				
	Kurang dari atau s/d 1 bulan	Lebih dari 1 s/d 3 bulan	Lebih dari 3 s/d 12 bulan	Lebih dari 12 bulan	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah					
Bank					
BI Intervensi	-	-	5.038.581	-	5.038.581
Call money	880.000	-	-	-	880.000
Entitas anak					
Deposito berjangka	1.032.254	-	-	-	1.032.254
FASBIS	131.500	-	-	-	131.500
Jumlah	2.043.754	-	5.038.581	-	7.082.335
Valuta Asing					
Bank					
Call money	2.058.158	296.826	-	-	2.354.984
Entitas anak					
Deposito berjangka	12.798	-	-	-	12.798
Jumlah	2.070.956	296.826	-	-	2.367.782
Jumlah	4.114.710	296.826	5.038.581	-	9.450.117

	31 Desember 2011				
	Kurang dari atau s/d 1 bulan	Lebih dari 1 s/d 3 bulan	Lebih dari 3 s/d 12 bulan	Lebih dari 12 bulan	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah					
Bank					
BI Intervensi	1.511.534	5.462.000	1.835.000	-	8.808.534
Call money	3.880.000	-	-	-	3.880.000
Deposito berjangka	50.000	-	-	-	50.000
Entitas anak					
Deposito berjangka	883.564	-	-	-	883.564
FASBIS	75.000	-	-	-	75.000
Jumlah	6.400.098	5.462.000	1.835.000	-	13.697.098
Valuta Asing					
Bank					
Call money	1.970.719	294.439	-	-	2.265.158
Entitas anak					
Deposito berjangka	6.801	-	-	-	6.801
Jumlah	1.977.520	294.439	-	-	2.271.959
Jumlah	8.377.618	5.756.439	1.835.000	-	15.969.057

	31 Desember 2010				
	Kurang dari atau s/d 1 bulan	Lebih dari 1 s/d 3 bulan	Lebih dari 3 s/d 12 bulan	Lebih dari 12 bulan	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah					
Bank					
BI Intervensi	2.591.599	8.727.943	-	-	11.319.542
Call money	780.000	100.000	-	-	880.000
Entitas anak					
Deposito berjangka	440.571	-	-	-	440.571
Jumlah	3.812.170	8.827.943	-	-	12.640.113
Valuta Asing					
Bank					
Call money	4.024.809	321.158	-	-	4.345.967
Entitas anak					
Deposito berjangka	3.596	-	-	-	3.596
Jumlah	4.028.405	321.158	-	-	4.349.563
Jumlah	7.840.575	9.149.101	-	-	16.989.676

	31 Desember 2009				
	Kurang dari atau s/d 1 bulan	Lebih dari 1 s/d 3 bulan	Lebih dari 3 s/d 12 bulan	Lebih dari 12 bulan	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah					
Bank					
Call money	2.195.000	215.000	-	-	2.410.000
BI Intervensi	91.954	-	-	-	91.954
Kredit	-	11.483	2.357	405	14.245
Entitas anak					
Deposito berjangka	319.104	-	-	-	319.104
Jumlah	2.606.058	226.483	2.357	405	2.835.303
Valuta Asing					
Bank					
Call money	3.012.653	432.378	-	-	3.445.031
Kredit	-	-	1.902.209	-	1.902.209
Entitas anak					
Deposito berjangka	2.820	-	-	-	2.820
Jumlah	3.015.473	432.378	1.902.209	-	5.350.060
Jumlah	5.621.531	658.861	1.904.566	405	8.185.363

	1 Januari 2009/31 Desember 2008				
	Kurang dari atau s/d 1 bulan	Lebih dari 1 s/d 3 bulan	Lebih dari 3 s/d 12 bulan	Lebih dari 12 bulan	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah					
Bank					
Call money	1.371.000	-	-	-	1.371.000
BI Intervensi	369.620	-	-	-	369.620
Kredit	-	12.632	5.830	56	18.518
Anak perusahaan					
Deposito berjangka	53.214	-	-	-	53.214
Fine Tune Operation	15.884	-	-	-	15.884
Jumlah	1.809.718	12.632	5.830	56	1.828.236
Valuta Asing					
Bank					
Call money	2.903.183	-	-	-	2.903.183
Deposito berjangka	-	224.328	58.441	-	282.769
Kredit	-	-	-	319.622	319.622
Jumlah	2.903.183	224.328	58.441	319.622	3.505.574
Jumlah	4.712.901	236.960	64.271	319.678	5.333.810

Sejak 1 Januari 2010, penempatan pada bank lain dalam bentuk kredit disajikan dalam akun kredit sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) revisi 2008.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2012 (Enam bulan)			31 Desember								
				2011 (Satu tahun)			2010 (Satu tahun)			2009 (Satu tahun)		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Saldo awal periode	500	-	500	600	-	600	24.571	53.709	78.280	14.117	26.132	40.249
Selisih penurunan nilai sehubungan dengan penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006)	-	-	-	-	-	-	(23.878)	(34.687)	(58.565)	-	-	-
Eliminasi defisit dalam rangka kuasi reorganisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386	-	386
Penyisihan (pemulihan) periode berjalan	(500)	-	(500)	(100)	-	(100)	50	-	50	10.068	36.484	46.552
Reklasifikasi ke kredit	-	-	-	-	-	-	(143)	(19.022)	(19.165)	-	-	-
Selisih kurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.907)	(8.907)
Saldo akhir periode	-	-	-	500	-	500	600	-	600	24.571	53.709	78.280

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya penempatan pada bank lain.

9. EFEK-EFEK

Berdasarkan tujuan investasi dan mata uang, efek-efek adalah sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Pihak berelasi					
Rupiah					
Dimiliki hingga jatuh tempo					
Bank	-	30.000	30.000	30.000	-
Tersedia untuk dijual					
Entitas anak	-	9.893	9.613	10.000	-
Diperdagangkan					
Entitas anak	38.946	18.631	2.039	-	-
Jumlah pihak berelasi	38.946	58.524	41.652	40.000	-
Pihak ketiga					
Dimiliki hingga jatuh tempo					
Bank					
Rupiah	11.276.226	12.081.962	7.057.746	4.026.504	10.977.214
Dollar Amerika Serikat	1.190.652	1.164.190	868.672	699.430	1.527.482
Yen Jepang	164	-	213	-	-
Entitas anak - Rupiah	78.842	133.773	59.263	59.754	127.941
Jumlah efek dimiliki hingga jatuh tempo	12.545.884	13.379.925	7.985.894	4.785.688	12.632.637
Tersedia untuk dijual					
Bank					
Rupiah	2.597.128	928.536	11.725.102	13.399.578	45.266
Dollar Amerika Serikat	842.035	581.315	810.686	841.669	202.713
Entitas anak					
Rupiah	235.519	95.906	29.349	29.288	29.235
Dollar Amerika Serikat	14.031	-	5.489	-	-
Jumlah efek tersedia untuk dijual	3.688.713	1.605.757	12.570.626	14.270.535	277.214
Diperdagangkan					
Bank					
Rupiah	59.450	423.290	89.692	10.070	56.571
Dollar Amerika Serikat	464.658	129.030	10.452	-	-
Entitas anak - Rupiah	-	-	3	18.494	16.870
Jumlah efek diperdagangkan	524.108	552.320	100.147	28.564	73.441
Jumlah pihak ketiga	16.758.705	15.538.002	20.656.667	19.084.787	12.983.292
Jumlah efek-efek	16.797.651	15.596.526	20.698.319	19.124.787	12.983.292
Dikurangi:					
Cadangan kerugian penurunan nilai	(162.218)	(58.751)	(10.618)	(38.316)	(34.798)
Jumlah Efek-Efek - Bersih	16.635.433	15.537.775	20.687.701	19.086.471	12.948.494

Berdasarkan jenis dan tujuan investasi efek-efek, adalah sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Pihak berelasi					
Dimiliki hingga jatuh tempo					
Bank					
Obligasi lainnya	-	30.000	30.000	30.000	-
Tersedia untuk dijual					
Entitas anak					
Obligasi lainnya	-	9.893	9.613	10.000	-
Diperdagangkan					
Entitas anak					
Reksadana	38.946	18.631	2.039	-	-
Jumlah pihak berelasi	38.946	58.524	41.652	40.000	-
Pihak ketiga					
Dimiliki hingga jatuh tempo					
Bank					
Sertifikat Bank Indonesia	6.231.836	6.621.559	956.811	-	2.970.500
Obligasi Pemerintah Indonesia	2.999.612	3.031.178	2.744.045	2.604.544	7.315.411
Obligasi lainnya	2.047.826	2.367.362	2.654.051	2.071.875	1.850.815
Surat utang jangka menengah	984.957	984.935	300.000	-	-
Efek beragun aset	141.881	165.228	200.000	-	-
Wesel tagih	60.930	75.890	28.398	34.030	39.120
Surat Perbendaharaan Negara	-	-	1.027.029	-	-
Obligasi subordinasi	-	-	16.297	15.485	328.850
Entitas anak					
Obligasi Pemerintah Indonesia	73.841	53.773	54.263	54.754	-
Obligasi lainnya	5.001	5.000	5.000	5.000	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	75.000	-	-	94.764
Surat Utang Negara	-	-	-	-	33.177
Jumlah efek dimiliki hingga jatuh tempo	12.545.884	13.379.925	7.985.894	4.785.688	12.632.637
Tersedia untuk dijual					
Bank					
Sertifikat Bank Indonesia	1.311.489	634.300	11.055.389	9.671.620	-
Reksadana	909.896	-	-	-	12.091
Obligasi Pemerintah Indonesia	677.603	471.811	529.304	3.338.167	33.175
Obligasi lainnya	340.175	143.298	356.121	298.358	202.713
Surat utang jangka menengah	200.000	260.442	515.206	-	-
Obligasi subordinasi	-	-	79.768	320.634	-
Surat Perbendaharaan Negara	-	-	-	612.468	-
Entitas anak					
Obligasi lainnya	91.610	1.014	-	-	29.235
Obligasi Pemerintah Indonesia	59.600	-	-	-	-
Obligasi subordinasi	54.340	55.092	34.838	29.288	-
Saham	44.000	39.800	-	-	-
Jumlah efek tersedia untuk dijual	3.688.713	1.605.757	12.570.626	14.270.535	277.214

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Diperdagangkan					
Bank					
Obligasi Pemerintah Indonesia	456.617	421.685	59.991	-	56.571
Obligasi lainnya	46.543	129.714	-	-	-
Obligasi subordinasi	20.000	-	-	-	-
Surat utang jangka menengah	948	921	-	10.070	-
Surat Perbendaharaan Negara	-	-	40.153	-	-
Entitas anak					
Saham	-	-	3	1	-
Obligasi Pemerintah Indonesia	-	-	-	18.493	16.870
Jumlah efek diperdagangkan	524.108	552.320	100.147	28.564	73.441
Jumlah efek-efek pihak ketiga	16.758.705	15.538.002	20.656.667	19.084.787	12.983.292
Jumlah efek-efek	16.797.651	15.596.526	20.698.319	19.124.787	12.983.292
Dikurangi:					
Cadangan kerugian penurunan nilai	(162.218)	(58.751)	(10.618)	(38.316)	(34.798)
Jumlah Efek-Efek - Bersih	16.635.433	15.537.775	20.687.701	19.086.471	12.948.494

Tingkat bunga rata-rata per tahun

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
Rupiah					
Sertifikat Bank Indonesia	4,58%	6,72%	6,50%	6,61%	10,89%
Obligasi dan Surat Perbendaharaan Negara	8,67%	11,14%	9,63%	9,43%	10,76%
Obligasi subordinasi	10,05%	11,87%	12,41%	12,41%	12,25%
Surat Utang Negara	-	-	-	-	12,35%
Surat utang jangka menengah	9,57%	9,57%	8,60%	10,00%	-
Efek beragun aset	9,25%	9,25%	9,25%	-	-
Wesel tagih	12,34%	12,78%	10,48%	11,43%	11,46%
Dollar Amerika Serikat					
Obligasi	6,39%	6,62%	7,52%	7,67%	7,47%
Surat utang jangka menengah	6,38%	7,24%	6,59%	-	-
Wesel tagih	6,43%	6,35%	6,23%	6,82%	8,13%
Obligasi subordinasi	-	-	7,45%	7,54%	7,61%
Yen Jepang					
Wesel tagih	3,00%	-	3,00%	-	-

Jangka waktu efek-efek sejak tanggal pembelian hingga tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

		31 Desember			1 Januari 2009/
	30 Juni 2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
Rupiah					
Sertifikat Bank Indonesia	9 bulan	9 bulan	13 hari - 8 bulan	28 hari - 6 bulan	< 1 bulan
Obligasi dan Surat Perbendaharaan Negara	2 bulan - 30 tahun	3 bulan - 27 tahun	2 bulan - 27 tahun	3 bulan - 30 tahun	4 bulan - 30 tahun
Obligasi subordinasi	7 - 10 tahun	7 - 10 tahun	6 tahun	8 tahun	8 tahun
Surat utang jangka menengah	1 - 2 tahun	1 - 2 tahun	26 hari - 13 bulan	7 bulan	-
Surat utang negara	-	-	-	-	7 - 19 bulan
Efek beragun aset	9 tahun	9 tahun	9 tahun	-	-
Wesel tagih	2 - 3 bulan	1 - 4 bulan	25 hari - 3 bulan	2 - 3 bulan	68 hari - 8 bulan
Dollar Amerika Serikat					
Obligasi	3 - 30 tahun	3 - 28 tahun	4 - 28 tahun	3 - 30 tahun	1 - 30 tahun
Obligasi subordinasi	-	-	6 bulan - 7 tahun	6 - 9 tahun	5 - 9 tahun
Surat utang jangka menengah	2 tahun	1 - 3 tahun	1 - 3 tahun	-	-
Wesel tagih	1 - 4 bulan	14 hari - 3 bulan	13 hari - 1 bulan	14 hari - 3 bulan	5 bulan
Yen Jepang					
Wesel tagih	1 bulan	-	14 hari	-	-

Nilai wajar dari aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo adalah berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi dari pedagang perantara/penjual. Apabila informasi ini tidak tersedia, maka nilai wajar diestimasi menggunakan harga kuotasi pasar untuk efek dengan karakteristik kredit, jatuh tempo dan pengembalian yang serupa. Nilai wajar dari efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah					
Sertifikat Bank Indonesia	6.308.535	6.819.210	1.000.049	-	3.065.264
Obligasi	4.720.686	4.547.726	4.864.621	4.132.075	7.301.487
Surat utang jangka menengah	985.000	985.341	300.000	-	-
Efek beragun aset	141.881	165.228	200.000	-	-
Wesel tagih	3.274	5.652	5.384	27.036	23.482
Surat Perbendaharaan Negara	-	-	1.027.029	-	-
Obligasi subordinasi	-	-	16.711	17.145	-
Surat Utang Negara	-	-	-	-	33.177
Subjumlah	12.159.376	12.523.157	7.413.794	4.176.256	10.423.410
Dollar Amerika Serikat					
Obligasi	1.331.963	1.214.695	971.020	790.918	1.249.047
Wesel tagih	57.492	70.238	22.801	6.994	15.638
Subjumlah	1.389.455	1.284.933	993.821	797.912	1.264.685
Yen Jepang					
Wesel tagih	164	-	213	-	-
Jumlah	13.548.995	13.808.090	8.407.828	4.974.168	11.688.095

Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, nilai wajar dari aset keuangan ini adalah sebesar Rp 17.800.762 juta, Rp 15.994.691 juta dan Rp 21.090.253 juta (Catatan 52).

Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga tetap maupun mengambang, sehingga Bank dan entitas anak terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar *(fair value interest rate risk)* dan risiko suku bunga atas arus kas *(cash flow interest rate risk)*. Rata-rata suku bunga efektif untuk efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo untuk mata uang Rupiah dan valuta asing ini masing-masing sebesar 8,54% dan 6,07% per tahun untuk tahun 2012, 10,87% dan 7,68% per tahun untuk tahun 2011 dan 7,99 % dan 6,92% per tahun untuk tahun 2010.

Rincian efek-efek berdasarkan penerbit dan peringkat obligasi berdasarkan beberapa perusahaan pemeringkat pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/ 31 Januari 2008 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2012		31 Desember 2011		2010		2009		1 Januari 2009/ 31 Desember 2008	
	Rp Juta	Peringkat	Rp Juta	Peringkat	Rp Juta	Peringkat	Rp Juta	Peringkat	Rp Juta	Peringkat
Rupiah										
Sertifikat Bank Indonesia	7.543.325		7.330.859		12.012.200		9.671.620		3.065.264	
Surat Utang Negara	-		-		-		-		33.177	
Obligasi										
Pemerintah Republik Indonesia	2.226.835	BB+	2.527.486	BB+	3.299.327	Ba3	5.660.041	BB-/Ba3	6.366.670	BB-/Ba3
Badan Usaha Milik Negara										
PT Jasa Marga	452.611	idAA	450.879	idAA	472.407	idAA	444.597	idAA-	441.022	idA-
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional	170.000	AA-(idn)	170.000	AA-(idn)	215.643	AA-(idn)	50.575	A+	-	
PT Indosat	104.206	idAA+	102.959	idAA+	169.804	idAA+	213.866	idAA+	91.335	idAA+
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	100.000	idAAA	100.000	idAAA	487.000	idAAA	100.000	idAAA	-	
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku	56.234	A-(idn)	-		-		-		-	
PT Bank Tabungan Negara	14.000	idAA	24.000	idAA	24.000	idAA-	24.000	idAA-	-	
PT Bank Jawa Barat	13.000	idAA-	13.000	idAA-	-		-		-	
PT Aneka Tambang	-		20.140	idAA	-		-		-	
PT Bank Sulawesi Utara	-		-		46.508	idA-	-		-	
PT Perusahaan Listrik Negara	-		-		41.932	idAA+	-		-	
Perusahaan Lainnya										
PT Adira Dinamika Multi Finance	280.000	idAA+	280.000	idAA+	114.786	idAA	38.945	idAA-	135.475	idAA-
PT Japfa Comfeed Indonesia	204.587	idA-	94.289	idA	91.429	idA-	88.996	idBBB+	86.224	idBBB+
PT Duta Pertiwi Nusantara	149.893	idBBB+	148.190	idBBB+	145.146	idBBB	142.532	idBBB	139.576	idBBB
PT Indofood Sukses Makmur	125.000	idAA+	181.100	idAA+	171.638	idAA	169.603	idAA	42.325	idAA+
PT Bank Danamon Indonesia	75.000	idAA+	75.000	idAA+	124.206	idAA+	-		-	
PT Bank Nagari	75.000	idA	75.000	idA	-		-		-	
PT Salim Ivomas Pratama	50.000	idAA-	50.000	idAA	50.000	idAA-	50.000	idAA-	-	
PT Wahana Ottomitra Multiartha	50.000	AA(idn)	50.000	AA(idn)	-		98.507	idA-	166.286	idAA-
PT Victoria Sekuritas	50.000	idBBB	-		-		-		-	
PT Bank Saudara	48.000	idBBB+	48.000	idBBB+	-		-		-	
PT Medco Energi Internasional	25.000	idAA-	25.000	idAA-	-		25.000	idAA-	-	
PT Sarana Multigriya Finansial	19.201	idAA	64.598	AA(idn)	-		45.000	AA	-	
PT Astra Sedaya Finance	10.185	idA	-		76.377	idAA-	85.350	idAA-	66.330	idAA-
PT Bank Mayapada Internasional	-		215.500	A-(idn)	215.500	A-(idn)	224.502	BBB+	253.742	A2id
PT Bank CIMB Niaga	-		53.113	idAAA	-		-		-	
PT Bank Victoria International	-		49.962	BBB+(idn)	49.811	BBB+(idn)	49.679	A1.id	49.535	Ai.id
PT Panin Sekuritas	-		39.893	A(idn)	39.613	A(idn)	40.000	A-	-	
PT Bumi Serpong Damai	-		-		168.510	idBBB+	166.940	idBBB+	165.240	idBBB
PT Federal Internasional Finance	-		-		50.000	idAA-	50.000	idAA-	50.000	idAA-
PT Tjiwi Kimia	-		-		-		-		21.793	idBBB
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 20 miliar)	46.740		56.444		83.898		62.055		28.262	
Obligasi subordinasi										
Perusahaan Lainnya										
PT Bank Permata	26.910	idAA-	-		16.297	idA	15.485	idA+	15.268	idA
PT Bank Muamalat	20.000	idA(sy)	-		-		-		-	
PT Bank Mayapada Internasional	-		29.417	BBB+(idn)	29.349	BBB+(idn)	29.288	A-	-	
PT Bank CIMB Niaga	16.215	AA(idn)	15.525	AA(idn)						
PT Bank Mega	10.150	A-(idn)	10.150	A-(idn)						
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 20 miliar)	1.065		-		-		-		-	
Surat utang jangka menengah										
Badan Usaha Milik Negara										
PT Perkebunan Nusantara VII	409.957	idA	409.936	A	300.000	idA+	-		-	
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	275.000	idBBB+	275.000	A	-		-		-	
PT Bank Aceh	200.000	idA-	207.240	idA-	-		-		-	
PT Bank Maluku	150.000	A-(idn)	150.000	idA-	-		-		-	
BPD Nusa Tenggara Timur	-		-		300.000	idAAA	-		-	
Perusahaan Lainnya										
PT Bank Commonwealth	150.000	AAA(idn)	150.000	idAA	-		-		-	
PT Astra Sedaya Finance	-		-		-		10.070		-	
Saham	44.000		39.800		3		1		-	
Reksadana										
Perusahaan lainnya										
Bahana seri D Optima	909.896		-		-		-		-	
Panin Dana Maksimum	11.681		11.546		1.008		-		-	
Panin Dana Unggulan	9.997		-		-		-		-	
Panin Dana Prima	7.404		7.085		-		-		-	
Panin Dana Utama Plus 2	4.954		-		1.031		-		-	
Panin Dana Bersama Plus	4.910		-		-		-		-	
Reksa Brent Dana Tetap	-		-		-		-		12.091	
Efek beragun aset										
Badan Usaha Milik Negara										
Bank Tabungan Negara - Danareksa	141.881	idAA	165.228	id AA	200.000	idAAA	-		-	
Wesel tagih										
Perusahaan lainnya	3.274		5.652		5.384		27.036		23.482	
Jumlah Efek-efek - Rupiah	14.286.111		13.721.991		19.002.807		17.583.688		11.253.097	

	30 Juni 2012		31 Desember 2011		31 Desember 2010		31 Desember 2009		1 Januari 2009/ 31 Desember 2008	
	Rp Juta	Peringkat	Rp Juta	Peringkat	Rp Juta	Peringkat	Rp Juta	Peringkat	Rp Juta	Peringkat
Dollar Amerika Serikat										
Obligasi										
Pemerintah Republik Indonesia	2.040.438	BB+	1.450.961	BB+	1.155.458	Ba3	968.385	BB-/Ba3	1.055.357	BB-/Ba3
Badan Usaha Milik Negara										
PT Pertamina	135.054	BBB-	20.441	BB+	-		-		-	
PT Bank Negara Indonesia	56.593	BBB-	-		-		-		-	
PT Perusahaan Listrik Negara	19.418	BBB-	78.279	BB	-		-		-	
Majapahit Holding BV	-		10.257	BB	41.893	BB-	123.492	Ba2/BB	183.147	Ba3/BB-
Perusahaan Lainnya										
PT Berlian Laju Tanker	137.600	C	132.839	CC	111.979	CCC	112.305	CCC	123.570	B+
PT Adaro Indonesia	49.893	BB+	48.317	BB+	58.115	Ba1	-		-	
Theta Capital PTE. Ltd	9.153	BB-	-		-		-		-	
PT Alam Sutera Realty	4.787	BAA3	-		-		-		-	
PT Medco Energi Internasional	-		9.081	idAA-	-		-		-	
Lippo Karawaci Finance BV	-		-		4.590	B+(idn)	9.289	B1/B	29.309	B+
Matahari Finance BV	-		-		-		-		9.592	B1/B+
Obligasi subordinasi										
Perusahaan Lainnya										
PT Bank CIMB Niaga (d/h Bank Niaga)	-		-		85.257	AA+	129.970	Ba1	73.651	Ba2/B+
PT Bank CIMB Niaga (d/h Bank Lippo)	-		-		-		130.132	Ba1/BB	97.794	Ba2/BB-
PT Bank Internasional Indonesia	-		-		-		60.532	Ba2/B-/B+	36.394	Ba2/B-/B+
PT Bank Danamon Indonesia	-		-		-		-	-	105.743	Ba2/B
Surat utang jangka menengah										
Perusahaan lainnya										
PT Medco Energi Internasional	948	idAA-	54.122	idAA-	215.206		-		-	
Wesel tagih										
Perusahaan lainnya	57.492		70.238		22.801		6.994		15.638	
Jumlah Efek-efek - Dollar Amerika Serikat	2.511.376		1.874.535		1.695.299		1.541.099		1.730.195	
Yen Jepang										
Wesel tagih										
Perusahaan lainnya	164		-		213		-		-	
Jumlah Efek-efek	16.797.651		15.596.526		20.698.319		19.124.787		12.983.292	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(162.218)		(58.751)		(10.618)		(38.316)		(34.798)	
Jumlah Efek-efek - Bersih	16.635.433		15.537.775		20.687.701		19.086.471		12.948.494	

Biaya perolehan diamortisasi efek tersedia untuk dijual pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 3.705.225 juta, Rp 1.647.175, Rp 12.596.198, Rp 14.400.397 dan Rp 537.878 juta. Nilai wajar efek didasarkan pada harga pasar efek yang tercatat pada tanggal pelaporan dan teknik penilaian nilai wajar. Kerugian yang belum direalisasi akibat penurunan nilai wajar efek pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 16.512 juta, Rp 41.418 juta, Rp 25.572 juta, Rp 129.862 juta dan Rp 260.664 juta yang dicatat sebagai bagian komponen ekuitas lainnya.

Efek-efek telah diperingkat oleh Pefindo, PT Kasnic Credit Rating Indonesia, PT Fitch Rating Indonesian dan PT Moody's Indonesia.

Nilai wajar dan biaya perolehan diamortisasi dari efek-efek tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008 berdasarkan sisa umur jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2012						
	Kurang dari atau s/d 1 bulan	Lebih dari 1 s/d 3 bulan	Lebih dari 3 s/d 12 bulan	Lebih dari 1 s/d 2 tahun	Lebih dari 2 s/d 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Tersedia untuk dijual							
Nilai wajar							
Rupiah	149.789	495.634	876.226	3.996	228.764	1.078.238	2.832.647
Dollar Amerika Serikat	-	-	-	-	120.589	735.477	856.066
Jumlah	149.789	495.634	876.226	3.996	349.353	1.813.715	3.688.713
Dimiliki hingga jatuh tempo							
Biaya perolehan di amortisasi							
Rupiah	433.575	2.812.973	3.920.881	901.684	938.437	2.347.518	11.355.068
Dollar Amerika Serikat	47.883	9.609	-	293.585	55.590	783.985	1.190.652
Yen Jepang	164	-	-	-	-	-	164
Jumlah	481.622	2.822.582	3.920.881	1.195.269	994.027	3.131.503	12.545.884
Jumlah	631.411	3.318.216	4.797.107	1.199.265	1.343.380	4.945.218	16.234.597

	31 Desember 2011						
	Kurang dari atau s/d 1 bulan	Lebih dari 1 s/d 3 bulan	Lebih dari 3 s/d 12 bulan	Lebih dari 1 s/d 2 tahun	Lebih dari 2 s/d 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Tersedia untuk dijual							
Nilai wajar							
Rupiah	-	-	644.193	207.240	41.313	141.589	1.034.335
Dollar Amerika Serikat	-	53.201	-	-	10.257	517.857	581.315
Jumlah	-	53.201	644.193	207.240	51.570	659.446	1.615.650
Dimiliki hingga jatuh tempo							
Biaya perolehan di amortisasi							
Rupiah	1.311.398	2.673.186	3.571.899	1.033.888	1.149.937	2.505.427	12.245.735
Dollar Amerika Serikat	63.764	6.474	-	-	336.026	757.926	1.164.190
Jumlah	1.375.162	2.679.660	3.571.899	1.033.888	1.485.963	3.263.353	13.409.925
Jumlah	1.375.162	2.732.861	4.216.092	1.241.128	1.537.533	3.922.799	15.025.575

	31 Desember 2010						
	Kurang dari atau s/d 1 bulan	Lebih dari 1 s/d 3 bulan	Lebih dari 3 s/d 12 bulan	Lebih dari 1 s/d 2 tahun	Lebih dari 2 s/d 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Tersedia untuk dijual							
Nilai wajar							
Rupiah	988.124	3.474.377	6.593.433	313.756	121.889	272.485	11.764.064
Dollar Amerika Serikat	-	-	-	59.331	160.466	596.378	816.175
Jumlah	988.124	3.474.377	6.593.433	373.087	282.355	868.863	12.580.239
Dimiliki hingga jatuh tempo							
Biaya perolehan di amortisasi							
Rupiah	310.568	54.829	2.608.690	621.027	788.890	2.763.005	7.147.009
Dollar Amerika Serikat	20.866	1.501	280	154	311.881	533.990	868.672
Yen Jepang	213	-	-	-	-	-	213
Jumlah	331.647	56.330	2.608.970	621.181	1.100.771	3.296.995	8.015.894
Jumlah	1.319.771	3.530.707	9.202.403	994.268	1.383.126	4.165.858	20.596.133

	31 Desember 2009						
	Kurang dari atau s/d 1 bulan	Lebih dari 1 s/d 3 bulan	Lebih dari 3 s/d 12 bulan	Lebih dari 1 s/d 2 tahun	Lebih dari 2 s/d 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Tersedia untuk dijual							
Nilai wajar							
Rupiah	-	9.671.620	607.944	102.625	192.511	2.864.166	13.438.866
Dollar Amerika Serikat	-	-	-	72.818	349.361	419.490	841.669
Jumlah	-	9.671.620	607.944	175.443	541.872	3.283.656	14.280.535
Dimiliki hingga jatuh tempo							
Biaya perolehan setelah amortisasi							
Rupiah	27.036	-	-	199.440	921.634	2.968.148	4.116.258
Dollar Amerika Serikat	6.995	-	-	-	112.305	580.130	699.430
Jumlah	34.031	-	-	199.440	1.033.939	3.548.278	4.815.688
Jumlah	34.031	9.671.620	607.944	374.883	1.575.811	6.831.934	19.096.223

	1 Januari 2009/31 Desember 2008						
	Kurang dari atau s/d 1 bulan	Lebih dari 1 s/d 3 bulan	Lebih dari 3 s/d 12 bulan	Lebih dari 1 s/d 2 tahun	Lebih dari 2 s/d 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Tersedia untuk dijual							
Nilai wajar							
Rupiah	-	-	-	17.500	15.674	41.327	74.501
Dollar Amerika Serikat	-	-	9.592	-	61.340	131.781	202.713
Jumlah	-	-	9.592	17.500	77.014	173.108	277.214
Dimiliki hingga jatuh tempo							
Biaya perolehan setelah amortisasi							
Rupiah	3.121.923	-	177.505	357.596	1.400.238	6.047.893	11.105.155
Dollar Amerika Serikat	15.638	-	-	-	43.031	1.468.813	1.527.482
Jumlah	3.137.561	-	177.505	357.596	1.443.269	7.516.706	12.632.637
Jumlah	3.137.561	-	187.097	375.096	1.520.283	7.689.814	12.909.851

Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008, Obligasi Pemerintah Indonesia dalam valuta asing sebesar USD 65 juta atau setara dengan Rp 610.513 juta, Rp 589.388 juta, Rp 585.650 juta, Rp 610.675 juta dan Rp 708.500 juta dijadikan sebagai jaminan pinjaman yang diterima dari Barclays Bank Plc, London (Catatan 23).

Pada tahun 2009, Bank menjual efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dengan nilai nominal sebesar Rp 80.000 juta karena meningkatnya risiko pasar dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2009
	Rp Juta
Nilai tercatat	79.836
Harga jual	79.842
Laba penjualan	6

Obligasi Jasa Marga termasuk Obligasi Jasa Marga JORR I tahun 2003 dan Obligasi Jasa Marga JORR II tahun 2005, masing-masing sebesar Rp 11.059 juta dan Rp 10.525 juta, diperoleh dari penyelesaian kredit PT Citra Bhakti Margatama Persada, PT Citra Mataram Satriamarga Persada dan PT Marga Nurindo Bhakti, entitas anak PT Jasa Marga (Persero) yang telah dihapusbuku.

Kualitas efek-efek pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember	
	2012	2011	2010
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Tidak lewat jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	16.635.483	15.439.119	20.687.751
Mengalami penurunan nilai	162.168	157.407	10.568
Jumlah	16.797.651	15.596.526	20.698.319

Seluruh efek-efek tidak lewat jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai berkualitas lancar.

Sedangkan kualitas efek-efek pada tanggal 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2009	1 Januari 2009/ 31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta
Lancar	19.114.219	12.972.724
Macet	10.568	10.568
Jumlah	19.124.787	12.983.292

Obligasi PT Berlian Laju Tanker dan PT Bahtera Adimina Samudra adalah efek yang mengalami penurunan nilai pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011, sedangkan obligasi PT Bahtera Adimina Samudra adalah efek yang mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2010 dan berkualitas macet pada tanggal 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2012 (Enam bulan)			2011 (Satu tahun)			2010 (Satu tahun)			2009 (Satu tahun)		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Saldo awal periode	15.930	42.821	58.751	10.618	-	10.618	32.589	5.727	38.316	28.049	6.749	34.798
Selisih penurunan nilai sehubungan dengan penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006)	-	-	-	-	-	-	(21.971)	(5.727)	(27.698)	-	-	-
Penyisihan periode berjalan	8.946	93.183	102.129	5.312	42.821	48.133	-	-	-	4.540	455	4.995
Akrual bunga pada efek yang mengalami penurunan nilai	(258)	(1.954)	(2.212)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selisih kurs	-	3.550	3.550	-	-	-	-	-	-	-	(1.477)	(1.477)
Saldo akhir periode	24.618	137.600	162.218	15.930	42.821	58.751	10.618	-	10.618	32.589	5.727	38.316

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya efek-efek.

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Bank melakukan transaksi derivatif dalam bentuk pembelian dan penjualan berjangka valuta asing (*forward*) dan *swap* untuk tujuan *trading*.

Bank bertindak sebagai perantara transaksi *swap*. Transaksi *swap* terdiri dari kontrak *swap* mata uang asing. Transaksi tersebut merupakan komitmen untuk melunasi liabilitas dalam mata uang asing dengan kurs yang ditentukan terlebih dahulu.

Risiko pasar dari transaksi derivatif timbul sebagai akibat dari adanya perubahan nilai potensial fluktuasi kurs mata uang, sedangkan risiko kredit timbul dalam hal pihak lain tidak dapat memenuhi liabilitasnya kepada Bank. Jangka waktu dari pembelian dan penjualan berjangka valuta asing pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008 masing-masing berkisar antara 3 sampai 94 hari, 2 sampai 67 hari, 3 sampai 75 hari, 2 sampai 80 hari dan 6 sampai 188 hari.

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, nilai wajar dari tagihan dan liabilitas derivatif adalah sebesar nilai tercatatnya.

Rincian tagihan dan liabilitas derivatif pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009//31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2012			
	Jumlah nosional		Tagihan dan liabilitas derivatif	
	Beli	Jual	Tagihan	Liabilitas
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Pihak ketiga				
Forward	1.112.394	1.111.287	3.832	2.738
Swap	857.586	853.105	5.007	681
Jumlah	1.969.980	1.964.392	8.839	3.419

	31 Desember 2011			
	Jumlah nosional		Tagihan dan liabilitas derivatif	
	Beli	Jual	Tagihan	Liabilitas
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Pihak ketiga				
Forward	652.187	652.314	2.226	2.409
Swap	128.083	127.587	1.090	542
Jumlah	780.270	779.901	3.316	2.951

	31 Desember 2010			
	Jumlah nosional		Tagihan dan liabilitas derivatif	
	Beli	Jual	Tagihan	Liabilitas
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Pihak ketiga				
Forward	751.447	760.821	63	4.120
Swap	1.495.367	1.488.321	4.873	3.096
Jumlah	2.246.814	2.249.142	4.936	7.216

	31 Desember 2009			
	Jumlah nosional		Tagihan dan liabilitas derivatif	
	Beli	Jual	Tagihan	Liabilitas
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Pihak ketiga				
Forward	39.459	-	2.545	3.622
Swap	339.160	188.836	609	1.673
Penyisihan penghapusan	-	-	(32)	-
Jumlah	378.619	188.836	3.122	5.295

	1 Januari 2009/31 Desember 2008			
	Jumlah nosional		Tagihan dan liabilitas derivatif	
	Beli	Jual	Tagihan	Liabilitas
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Pihak ketiga				
Forward	46.144	43.585	6.590	3.986
Swap	1.154.398	1.075.327	104.792	90.563
Penyisihan penghapusan	-	-	(1.114)	-
Jumlah	1.200.542	1.118.912	110.268	94.549

Tagihan dan liabilitas derivatif pada tanggal 30 Juni 2012 dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan Dollar Australia, pada tanggal 31 Desember 2011 dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, pada tanggal 31 Desember 2010 dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan Poundsterling Inggris, pada tanggal 31 Desember 2009 dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan Dollar Hongkong dan pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008 dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan Dollar Australia.

Seluruh tagihan derivatif pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010 tidak mengalami penurunan nilai dan berkualitas lancar pada tanggal 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai tagihan derivatif untuk tahun 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009
	Rp Juta	Rp Juta
Saldo awal tahun	32	1.114
Selisih penurunan nilai sehubungan dengan penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006)	(32)	-
Pemulihan tahun berjalan	-	(1.082)
Saldo akhir tahun	-	32

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tagihan derivatif adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya tagihan derivatif.

11. KREDIT

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Estimasi nilai wajar kredit ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa datang menggunakan suku bunga saat ini. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, nilai wajar dari kredit adalah sebesar Rp 81.923.026 juta, Rp 71.718.473 juta dan Rp 57.631.584 juta (Catatan 52).

Kredit memiliki suku bunga tetap maupun mengambang, sehingga Bank dan entitas anak terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar *(fair value interest rate risk)* dan risiko suku bunga atas arus kas *(cash flow interest rate risk)*.

a. Jenis Pinjaman

	30 Juni 2012					
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah						
Kredit konsumsi	20.959.894	1.067.176	48.004	51.843	104.154	22.231.071
Kredit modal kerja	15.502.179	123.363	6.362	105.193	750.444	16.487.541
Pinjaman rekening koran	15.479.114	204.432	27.962	67.019	172.595	15.951.122
Kredit investasi	13.928.092	306.746	12.452	238.860	554.609	15.040.759
Pembiayaan bersama	829.256	-	-	-	-	829.256
Pinjaman karyawan	88.572	-	-	-	-	88.572
Kredit lainnya	2.880.223	181.525	11.838	17.510	158.021	3.249.117
Jumlah - Rupiah	69.667.330	1.883.242	106.618	480.425	1.739.823	73.877.438
Valuta asing						
Kredit modal kerja	4.560.959	-	-	-	297.609	4.858.568
Kredit investasi	2.766.833	110.799	35.879	-	10.380	2.923.891
Pembiayaan bersama	1.849.081	-	-	-	-	1.849.081
Pinjaman rekening koran	53.884	478	-	-	-	54.362
Kredit konsumsi	1.453	-	-	-	-	1.453
Kredit lainnya	97.561	-	-	-	-	97.561
Jumlah - Valuta asing	9.329.771	111.277	35.879	-	307.989	9.784.916
Jumlah	78.997.101	1.994.519	142.497	480.425	2.047.812	83.662.354
Cadangan kerugian penurunan nilai	(114.276)	(96.116)	(49.265)	(263.052)	(1.758.821)	(2.281.530)
Jumlah Kredit - Bersih	78.882.825	1.898.403	93.232	217.373	288.991	81.380.824

	31 Desember 2011					
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah						
Kredit konsumsi	17.721.402	947.214	49.825	37.299	51.614	18.807.354
Pinjaman rekening koran	13.962.827	245.015	30.038	23.619	149.715	14.411.214
Kredit investasi	11.861.781	297.167	14.199	12.292	753.085	12.938.524
Kredit modal kerja	11.459.830	117.229	5.847	4.732	848.458	12.436.096
Pembiayaan bersama	604.394	-	-	-	-	604.394
Pinjaman karyawan	80.265	-	-	-	-	80.265
Kredit lainnya	2.547.002	155.207	13.712	20.318	136.155	2.872.394
Jumlah - Rupiah	58.237.501	1.761.832	113.621	98.260	1.939.027	62.150.241
Valuta asing						
Kredit modal kerja	3.908.855	-	-	-	288.953	4.197.808
Kredit investasi	2.563.428	113.384	-	-	10.020	2.686.832
Pembiayaan bersama	1.908.076	-	-	-	-	1.908.076
Pinjaman rekening koran	47.660	-	-	-	-	47.660
Kredit konsumsi	2.080	-	-	-	-	2.080
Kredit lainnya	87.105	-	-	-	-	87.105
Jumlah - Valuta asing	8.517.204	113.384	-	-	298.973	8.929.561
Jumlah	66.754.705	1.875.216	113.621	98.260	2.238.000	71.079.802
Cadangan kerugian penurunan nilai	(102.812)	(86.566)	(48.647)	(52.365)	(1.710.101)	(2.000.491)
Jumlah Kredit - Bersih	66.651.893	1.788.650	64.974	45.895	527.899	69.079.311

	31 Desember 2010					
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah						
Kredit konsumsi	14.121.100	811.336	59.658	34.161	49.323	15.075.578
Pinjaman rekening koran	11.751.698	253.652	56.809	52.080	54.394	12.168.633
Kredit investasi	8.524.680	324.436	320.957	335.295	181.082	9.686.450
Kredit modal kerja	7.571.972	295.410	45.057	368.499	273.075	8.554.013
Pembiayaan bersama	432.426	-	-	-	-	432.426
Pinjaman karyawan	74.635	-	-	-	-	74.635
Kredit lainnya	2.117.595	118.237	20.715	136.936	10.925	2.404.408
Jumlah - Rupiah	44.594.106	1.803.071	503.196	926.971	568.799	48.396.143
Valuta asing						
Kredit investasi	4.698.399	-	129.976	9.957	-	4.838.332
Kredit modal kerja	3.462.819	-	-	278.989	10.981	3.752.789
Pembiayaan bersama	178.532	-	-	-	-	178.532
Pinjaman rekening koran	40.544	-	-	-	-	40.544
Kredit konsumsi	1.560	-	-	-	-	1.560
Kredit lainnya	38.119	-	-	-	-	38.119
Jumlah - Valuta asing	8.419.973	-	129.976	288.946	10.981	8.849.876
Jumlah	53.014.079	1.803.071	633.172	1.215.917	579.780	57.246.019
Cadangan kerugian penurunan nilai	(535.147)	(90.154)	(154.035)	(381.654)	(402.467)	(1.563.457)
Jumlah Kredit - Bersih	52.478.932	1.712.917	479.137	834.263	177.313	55.682.562

	31 Desember 2009					
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah						
Kredit konsumsi	10.238.375	736.020	49.176	49.702	48.161	11.121.434
Pinjaman rekening koran	8.979.675	342.229	51.466	39.159	72.523	9.485.052
Kredit investasi	5.821.088	648.262	238.345	438.862	38.832	7.185.389
Kredit modal kerja	4.997.481	700.062	6.830	10.387	54.869	5.769.629
Pembiayaan bersama	439.127	-	-	-	-	439.127
Pinjaman karyawan	77.050	-	-	-	3	77.053
Kredit lainnya	1.503.868	96.534	11.378	9.027	8.906	1.629.713
Jumlah - Rupiah	32.056.664	2.523.107	357.195	547.137	223.294	35.707.397
Valuta asing						
Kredit investasi	2.889.886	82.676	-	-	-	2.972.562
Kredit modal kerja	772.609	290.910	11.274	146.277	13.354	1.234.424
Pembiayaan bersama	1.130.541	-	-	-	-	1.130.541
Kredit konsumsi	979	-	-	-	-	979
Kredit Lainnya	75.519	-	-	-	-	75.519
Jumlah - Valuta asing	4.869.534	373.586	11.274	146.277	13.354	5.414.025
Jumlah	36.926.198	2.896.693	368.469	693.414	236.648	41.121.422
Penyisihan penghapusan	(370.864)	(144.835)	(55.270)	(346.707)	(236.648)	(1.154.324)
Jumlah Kredit - Bersih	36.555.334	2.751.858	313.199	346.707	-	39.967.098

	1 Januari 2009/31 Desember 2008					
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah						
Kredit konsumsi	9.068.235	717.986	35.234	34.992	52.730	9.909.177
Pinjaman rekening koran	7.949.701	396.730	39.009	21.236	119.764	8.526.440
Kredit investasi	5.528.889	691.990	107.194	117.143	305.794	6.751.010
Kredit modal kerja	3.084.459	716.811	12.470	6.212	101.867	3.921.819
Pembiayaan bersama	297.132	-	-	-	-	297.132
Pinjaman karyawan	63.056	8	-	-	3	63.067
Kredit lainnya	1.030.030	80.688	6.619	3.171	246.942	1.367.450
	27.021.502	2.604.213	200.526	182.754	827.100	30.836.095
Kredit yang dibeli dari BPPN	-	-	-	-	4.769	4.769
Jumlah - Rupiah	27.021.502	2.604.213	200.526	182.754	831.869	30.840.864
Valuta asing						
Kredit investasi	3.744.810	107.582	-	-	-	3.852.392
Kredit modal kerja	362.965	287.423	-	-	70.445	720.833
Pembiayaan bersama	340.488	7.205	-	-	285.865	633.558
Kredit konsumsi	1.082	613	-	-	-	1.695
Kredit lainnya	456.396	7.154	-	-	13.691	477.241
Jumlah - Valuta asing	4.905.741	409.977	-	-	370.001	5.685.719
Jumlah	31.927.243	3.014.190	200.526	182.754	1.201.870	36.526.583
Penyisihan penghapusan	(319.314)	(123.882)	(18.035)	(41.374)	(741.522)	(1.244.127)
Jumlah Kredit - Bersih	31.607.929	2.890.308	182.491	141.380	460.348	35.282.456

b. Sektor Ekonomi

	30 Juni 2012					
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah						
Perdagangan	17.629.188	323.037	24.887	53.811	999.665	19.030.588
Jasa	16.635.324	189.549	19.899	13.727	49.706	16.908.205
Konstruksi	8.680.946	212.659	14.497	230.225	49.285	9.187.612
Industri	8.111.342	188.306	7.233	135.274	540.597	8.982.752
Lain-lain	18.610.530	969.691	40.102	47.388	100.570	19.768.281
Jumlah - Rupiah	69.667.330	1.883.242	106.618	480.425	1.739.823	73.877.438
Valuta asing						
Jasa	4.005.656	-	35.879	-	-	4.041.535
Industri	3.353.937	110.750	-	-	290.833	3.755.520
Konstruksi	1.828.484	478	-	-	-	1.828.962
Perdagangan	141.694	49	-	-	17.156	158.899
Jumlah - Valuta asing	9.329.771	111.277	35.879	-	307.989	9.784.916
Jumlah	78.997.101	1.994.519	142.497	480.425	2.047.812	83.662.354
Cadangan kerugian penurunan nilai	(114.276)	(96.116)	(49.265)	(263.052)	(1.758.821)	(2.281.530)
Jumlah Kredit - Bersih	78.882.825	1.898.403	93.232	217.373	288.991	81.380.824

	31 Desember 2011					
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah						
Perdagangan	15.111.532	286.189	44.093	30.131	949.985	16.421.930
Jasa	13.784.224	209.884	10.001	11.100	27.090	14.042.299
Industri	6.885.406	170.455	7.354	14.472	649.467	7.727.154
Konstruksi	7.149.099	207.016	5.875	9.317	263.819	7.635.126
Lain-lain	15.307.240	888.288	46.298	33.240	48.666	16.323.732
Jumlah - Rupiah	58.237.501	1.761.832	113.621	98.260	1.939.027	62.150.241
Valuta asing						
Jasa	4.000.592	-	-	-	-	4.000.592
Industri	2.548.827	113.384	-	-	280.770	2.942.981
Perdagangan	136.539	-	-	-	18.203	154.742
Lain-lain	1.831.246	-	-	-	-	1.831.246
Jumlah - Valuta asing	8.517.204	113.384	-	-	298.973	8.929.561
Jumlah	66.754.705	1.875.216	113.621	98.260	2.238.000	71.079.802
Cadangan kerugian penurunan nilai	(102.812)	(86.566)	(48.647)	(52.365)	(1.710.101)	(2.000.491)
Jumlah Kredit - Bersih	66.651.893	1.788.650	64.974	45.895	527.899	69.079.311

	31 Desember 2010					
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah						
Perdagangan	11.463.879	419.783	37.803	741.223	45.826	12.708.514
Jasa	9.189.927	309.303	9.207	4.811	19.746	9.532.994
Industri	6.432.785	222.357	53.902	128.753	395.642	7.233.439
Konstruksi	5.179.597	111.619	351.467	13.541	59.473	5.715.697
Lain-lain	12.327.918	740.009	50.817	38.643	48.112	13.205.499
Jumlah - Rupiah	44.594.106	1.803.071	503.196	926.971	568.799	48.396.143
Valuta asing						
Jasa	3.751.128	-	-	-	-	3.751.128
Industri	2.257.793	-	126.451	278.989	10.981	2.674.214
Perdagangan	102.967	-	-	9.957	-	112.924
Lain-lain	2.308.085	-	3.525	-	-	2.311.610
Jumlah - Valuta asing	8.419.973	-	129.976	288.946	10.981	8.849.876
Jumlah	53.014.079	1.803.071	633.172	1.215.917	579.780	57.246.019
Cadangan kerugian penurunan nilai	(535.147)	(90.154)	(154.035)	(381.654)	(402.467)	(1.563.457)
Jumlah Kredit - Bersih	52.478.932	1.712.917	479.137	834.263	177.313	55.682.562

	31 Desember 2009					
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah						
Perdagangan	8.727.262	361.176	19.418	354.752	51.274	9.513.882
Jasa	6.706.110	228.841	268.589	16.443	35.072	7.255.055
Industri	3.281.965	812.162	8.055	40.369	19.710	4.162.261
Konstruksi	1.235.001	81.740	3.705	2.664	27.959	1.351.069
Lain-lain	12.106.326	1.039.188	57.428	132.909	89.279	13.425.130
Jumlah - Rupiah	32.056.664	2.523.107	357.195	547.137	223.294	35.707.397
Valuta asing						
Jasa	1.721.171	-	-	-	-	1.721.171
Industri	597.402	290.910	11.274	134.184	13.354	1.047.124
Perdagangan	80.521	-	-	12.093	-	92.614
Lain-lain	2.470.440	82.676	-	-	-	2.553.116
Jumlah - Valuta asing	4.869.534	373.586	11.274	146.277	13.354	5.414.025
Jumlah	36.926.198	2.896.693	368.469	693.414	236.648	41.121.422
Penyisihan penghapusan	(370.864)	(144.835)	(55.270)	(346.707)	(236.648)	(1.154.324)
Jumlah Kredit - Bersih	36.555.334	2.751.858	313.199	346.707	-	39.967.098

	1 Januari 2009/31 Desember 2008					
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah						
Perdagangan	7.493.024	417.030	40.479	22.805	67.290	8.040.628
Jasa	5.050.068	267.866	31.648	15.665	48.237	5.413.484
Industri	2.610.372	717.248	7.453	7.191	479.753	3.822.017
Konstruksi	993.683	154.100	3.326	3.957	6.153	1.161.219
Lain-lain	10.874.355	1.047.969	117.620	133.136	230.436	12.403.516
Jumlah - Rupiah	27.021.502	2.604.213	200.526	182.754	831.869	30.840.864
Valuta asing						
Jasa	1.685.390	915	-	-	285.865	1.972.170
Industri	929.505	293.828	-	-	84.136	1.307.469
Perdagangan	131.510	5.570	-	-	-	137.080
Lain-lain	2.159.336	109.664	-	-	-	2.269.000
Jumlah - Valuta asing	4.905.741	409.977	-	-	370.001	5.685.719
Jumlah	31.927.243	3.014.190	200.526	182.754	1.201.870	36.526.583
Penyisihan penghapusan	(319.314)	(123.882)	(18.035)	(41.374)	(741.522)	(1.244.127)
Jumlah Kredit - Bersih	31.607.929	2.890.308	182.491	141.380	460.348	35.282.456

Sektor ekonomi lain-lain terdiri dari administrasi, rumah tangga, perumahan, apartemen, gedung perkantoran, agrikultur, minyak dan pertambangan.

c. Jangka Waktu

Jangka waktu pinjaman diklasifikasikan berdasarkan periode pinjaman dalam perjanjian kredit dan waktu yang tersisa sampai dengan saat jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Periode Perjanjian Kredit:

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
≤ 1 tahun	17.798.363	15.496.718	14.774.187	13.285.702	11.771.983
> 1 - 2 tahun	14.291.220	13.035.756	6.970.031	3.507.099	3.429.966
> 2 - 5 tahun	20.976.077	16.121.121	12.888.838	10.365.620	8.610.320
> 5 tahun	30.596.694	26.426.207	22.612.963	13.963.001	12.714.314
Jumlah	83.662.354	71.079.802	57.246.019	41.121.422	36.526.583
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.281.530)	(2.000.491)	(1.563.457)	(1.154.324)	(1.244.127)
Jumlah Kredit - Bersih	81.380.824	69.079.311	55.682.562	39.967.098	35.282.456

Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo:

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
≤ 1 bulan	3.813.288	3.179.354	2.279.979	1.158.784	2.174.857
> 1 - 3 bulan	6.726.281	3.234.683	2.274.855	2.439.332	2.521.985
> 3 - 12 bulan	20.658.493	19.941.075	13.820.193	12.587.254	10.586.432
> 1 - 2 tahun	7.846.863	7.873.361	7.986.581	2.931.364	2.590.261
> 2 - 5 tahun	22.467.849	18.358.669	17.597.090	11.691.125	9.884.891
> 5 tahun	22.149.580	18.492.660	13.287.321	10.313.563	8.768.157
Jumlah	83.662.354	71.079.802	57.246.019	41.121.422	36.526.583
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.281.530)	(2.000.491)	(1.563.457)	(1.154.324)	(1.244.127)
Jumlah Kredit - Bersih	81.380.824	69.079.311	55.682.562	39.967.098	35.282.456

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit:

1) Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun untuk kredit dalam mata uang Rupiah adalah 11,42%, 11,79%, 12,67% dan 14,50% masing-masing untuk tahun 2012, 2011, 2010 dan 2009, sedangkan dalam valuta asing adalah 5,54%, 5,73%, 6,06% dan 7,53% masing-masing untuk tahun 2012, 2011, 2010 dan 2009.

2) Kredit dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan. Kredit juga dijamin dengan jaminan tunai berupa giro, tabungan dan deposito berjangka (Catatan 19). Manajemen berkeyakinan agunan yang diterima tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

3) Kredit untuk modal kerja dan investasi terdiri dari pinjaman jangka panjang, tetap, berulang dan diskonto, sedangkan kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit konsumsi lain.

4) Kredit dalam Rupiah berjangka waktu 1 bulan sampai 25 tahun, sedangkan kredit dalam valuta asing berjangka waktu antara 1 bulan sampai 12 tahun. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama dalam Rupiah berjangka waktu 1 sampai dengan 6 tahun, sedangkan dalam valuta asing berjangka waktu antara 1 sampai 7 tahun.

5) Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan berkisar antara 5% sampai dengan 30,08% pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011, 3,64% sampai dengan 25% pada tanggal 31 Desember 2010, 3% sampai dengan 30% pada tanggal 31 Desember 2009 dan 3% sampai dengan 60% pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008.

6) Kredit kepada karyawan Bank merupakan kredit untuk membeli kendaraan, rumah dan keperluan lainnya yang dibebani bunga sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu 1 sampai 10 tahun. Pembayaran kembali kredit dilakukan dengan pemotongan gaji setiap bulan.

7) Dalam jumlah kredit termasuk kredit yang diberikan kepada pihak yang berelasi sebesar Rp 13.485 juta, Rp 14.398 juta, Rp 14.058 juta, Rp 13.023 juta dan Rp 12.621 juta setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 29 juta, Rp 26 juta, Rp 142 juta, Rp 132 juta dan Rp 172 juta masing-masing pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008.

   Seluruh kredit yang diberikan kepada pihak yang berelasi pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010 tidak mengalami penurunan nilai dan berkualitas lancar pada tanggal 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008.

8) Rasio kredit usaha kecil terhadap kredit yang diberikan adalah sebesar 7,15%, 8,81%, 5,29%, 4,33% dan 4,55% masing-masing pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008.

9) Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008, tidak terdapat kredit yang dijadikan agunan oleh Bank dan entitas anak.

10) Rincian kredit menurut kualitas adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2012		
	Individual	Kolektif	Total
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Tidak lewat jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	26.397.021	52.369.085	78.766.106
Lewat jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai	377.295	37.152	414.447
Mengalami penurunan nilai	2.082.196	2.399.605	4.481.801
Jumlah Kredit	28.856.512	54.805.842	83.662.354

Seluruh kredit yang tidak lewat jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai berkualitas lancar.

11) Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008, rincian kredit yang direstrukturisasi menurut jenis dan kualitas pinjaman adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2012					
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah						
Kredit investasi	1.287.496	56.721	18.030	200.981	481.726	2.044.954
Kredit modal kerja	134.460	40.000	94.740	-	17.439	286.639
Pinjaman rekening koran	2.683	-	8.791	19.363	-	30.837
Kredit konsumsi	16.567	658	-	-	-	17.225
Jumlah	1.441.206	97.379	121.561	220.344	499.165	2.379.655
Valuta asing						
Kredit investasi	838.113	110.750	-	-	10.379	959.242
Kredit modal kerja	-	-	-	-	93.591	93.591
Jumlah	838.113	110.750	-	-	103.970	1.052.833
Jumlah Kredit - Bersih	2.279.319	208.129	121.561	220.344	603.135	3.432.488

	31 Desember 2011					
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah						
Kredit investasi	1.458.603	106.490	-	222.950	480.162	2.268.205
Kredit modal kerja	142.366	-	-	-	114.728	257.094
Pinjaman rekening koran	946	-	1.701	29.370	-	32.017
Kredit konsumsi	15.947	225	416	5.729	-	22.317
Kredit lainnya	41	-	-	-	-	41
Jumlah	1.617.903	106.715	2.117	258.049	594.890	2.579.674
Valuta asing						
Kredit investasi	845.248	113.384	-	-	10.020	968.652
Kredit modal kerja	-	-	-	90.352	-	90.352
Jumlah	845.248	113.384	-	90.352	10.020	1.059.004
Jumlah Kredit - Bersih	2.463.151	220.099	2.117	348.401	604.910	3.638.678

	31 Desember 2010					
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah						
Kredit investasi	1.151.476	278.489	307.899	324.168	4.402	2.066.434
Kredit modal kerja	146.557	131.118	40.000	-	26.786	344.461
Pinjaman rekening koran	-	9.413	19.797	-	-	29.210
Kredit konsumsi	16.697	1.760	6.129	-	-	24.586
Kredit lainnya	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1.314.730	420.780	373.825	324.168	31.188	2.464.691
Valuta asing						
Kredit investasi	454.249	-	126.452	9.957	-	590.658
Kredit modal kerja	-	89.779	-	-	-	89.779
Jumlah	454.249	89.779	126.452	9.957	-	680.437
Jumlah Kredit - Bersih	1.768.979	510.559	500.277	334.125	31.188	3.145.128

	31 Desember 2009					
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah						
Kredit investasi	1.130.218	441.957	228.377	401.326	179	2.202.057
Kredit modal kerja	90.552	152.036	-	-	3.531	246.119
Pinjaman rekening koran	-	9.695	18.713	-	-	28.408
Kredit konsumsi	4.151	515	969	-	-	5.635
Jumlah	1.224.921	604.203	248.059	401.326	3.710	2.482.219
Valuta asing						
Kredit investasi	588.773	82.676	-	136.580	-	808.029
Kredit modal kerja	-	93.615	-	302	-	93.917
Jumlah	588.773	176.291	-	136.882	-	901.946
Jumlah Kredit - Bersih	1.813.694	780.494	248.059	538.208	3.710	3.384.165

	1 Januari 2009/31 Desember 2008					
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah						
Kredit investasi	81.686	129.997	75.452	425	91.418	378.978
Kredit modal kerja	10.486	115	-	-	4.109	14.710
Kredit konsumsi	1.856	-	13	-	128	1.997
Pinjaman rekening koran	-	242	-	-	-	242
Jumlah	94.028	130.354	75.465	425	95.655	395.927
Valuta asing						
Kredit investasi	507.037	102.460	-	-	-	609.497
Pembiayaan bersama	-	7.204	-	-	339.193	346.397
Jumlah	507.037	109.664	-	-	339.193	955.894
Jumlah Kredit - Bersih	601.065	240.018	75.465	425	434.848	1.351.821

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008, Bank telah melakukan penyelamatan kembali atas kredit untuk beberapa debitur masing-masing sebesar Rp 302.344 juta, Rp 2.065.643 juta, Rp 1.286.111 juta, Rp 2.866.269 juta dan Rp 202.374 juta.

12) Saldo kredit bermasalah yang pengakuan bunganya secara *cash basis* pada tanggal 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 sebesar Rp 1.298.531 juta dan Rp 1.585.150 juta. Pada tahun 2012 berdasarkan PSAK 55 (revisi 2011) dan pada tahun 2011 dan 2010 berdasarkan PSAK 55 (Revisi 2006), Bank masih dapat mengakui pendapatan bunga dari kredit yang bermasalah. Saldo kredit bermasalah pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010 adalah Rp 2.670.734 juta, Rp 2.449.881 juta dan Rp 2.428.869 juta.

13) Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 serta 31 Desember 2011 dan 2010, Bank mengakui langsung ke dalam laporan laba rugi komprehensif, perbedaan nilai wajar dari kredit yang diberikan kepada karyawan masing-masing sebesar Rp 2.584 juta, Rp 897 juta, Rp 3.696 juta dan Rp 12.012 juta.

14) Rasio *non-performing loan* (NPL) pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
NPL Bruto	3,30%	3,56%	4,37%	3,16%	4,34%
NPL Neto	0,74%	0,92%	2,68%	1,60%	2,15%

15) Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008 tidak terdapat kredit yang tidak memenuhi ketentuan BMPK.

16) Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008, rincian kredit bermasalah menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2012		31 Desember						1 Januari 2009/ 31 Desember 2008	
			2011		2010		2009			
	Kredit bermasalah	Penyisihan penurunan nilai	Kredit bermasalah	Penyisihan penurunan nilai	Kredit bermasalah	Penyisihan penurunan nilai	Kredit bermasalah	Penyisihan penurunan nilai	Kredit bermasalah	Penyisihan penurunan nilai
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah										
Perdagangan	1.078.363	950.876	1.024.209	835.478	824.852	249.714	425.444	231.563	130.574	84.764
Jasa	83.332	56.788	48.191	31.079	33.764	26.587	320.104	83.582	95.550	60.817
Industri	683.104	592.346	671.293	518.089	578.297	296.375	68.134	41.103	494.397	59.332
Lain-lain	482.067	283.998	407.215	228.272	562.053	260.936	313.944	194.193	494.628	238.234
Jumlah	2.326.866	1.884.008	2.150.908	1.612.918	1.998.966	833.612	1.127.626	550.441	1.215.149	443.147
Valuta asing										
Industri	290.833	166.679	280.770	182.268	416.421	99.036	158.812	82.137	84.136	71.919
Perdagangan	17.156	17.156	18.203	15.927	9.957	4.979	12.093	6.047	-	-
Lain-lain	35.879	3.295	-	-	3.525	529	-	-	285.865	285.865
Jumlah	343.868	187.130	298.973	198.195	429.903	104.544	170.905	88.184	370.001	357.784
Jumlah	2.670.734	2.071.138	2.449.881	1.811.113	2.428.869	938.156	1.298.531	638.625	1.585.150	800.931

17) Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008 kredit yang disalurkan dengan sistem penyaluran kredit melalui lembaga pembiayaan, PT Verena Multi Finance Tbk dan PT Clipan Finance Indonesia Tbk, entitas anak, berupa kredit kendaraan motor dan mobil sebesar Rp 440.705 juta, Rp 246.642 juta, Rp 710.084 juta, Rp 527.301 juta dan Rp 691.602 juta.

18) Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2012 (Enam bulan)		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Saldo awal periode	1.786.366	214.125	2.000.491
Penyisihan (pemulihan) periode berjalan			
Individu	141.103	(11.604)	129.499
Kolektif	211.516	(146)	211.370
Akrual bunga pada kredit yang mengalami penurunan nilai	(36.635)	(5.236)	(41.871)
Penghapusan	(25.779)	-	(25.779)
Selisih kurs	-	7.820	7.820
Saldo akhir periode	2.076.571	204.959	2.281.530

	2011 (Satu tahun)		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Saldo awal tahun	1.374.713	188.744	1.563.457
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan			
Individu	941.166	120.987	1.062.153
Kolektif	(76.885)	(73.033)	(149.918)
Akrual bunga pada kredit yang mengalami penurunan nilai	(87.785)	(19.781)	(107.566)
Penghapusan	(364.843)	(4.184)	(369.027)
Selisih kurs	-	1.392	1.392
Saldo akhir tahun	1.786.366	214.125	2.000.491

	2010 (Satu tahun)		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Saldo awal tahun	998.767	155.557	1.154.324
Penyisihan tahun berjalan			
Individu	509.242	14.841	524.083
Kolektif	413.833	248.135	661.968
Selisih penurunan nilai pada penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006)	(220.700)	(68.389)	(289.089)
Akrual bunga pada kredit yang mengalami penurunan nilai	(24.301)	(2.600)	(26.901)
Reklasifikasi dari penempatan pada bank lain	143	19.022	19.165
Penghapusan	(302.271)	(160.603)	(462.874)
Selisih kurs	-	(17.219)	(17.219)
Saldo akhir tahun	1.374.713	188.744	1.563.457

	2009 (Satu tahun)		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Saldo awal tahun	819.889	424.238	1.244.127
Penyisihan tahun berjalan	815.866	46.451	862.317
Penghapusan	(800.025)	(359.419)	(1.159.444)
Penerimaan kembali	163.037	87.741	250.778
Selisih kurs	-	(43.454)	(43.454)
Saldo akhir tahun	998.767	155.557	1.154.324

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai kredit adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit.

19) Mutasi kredit yang dihapus buku adalah sebagai berikut:

	2012 (Enam bulan)		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Saldo awal periode	1.567.067	1.292.777	2.859.844
Penambahan dalan periode berjalan	14.012	-	14.012
Hapus tagih	(3.268)	(78.304)	(81.572)
Penerimaan kembali	(155.749)	(32.501)	(188.250)
Selisih kurs	-	45.959	45.959
Saldo akhir periode	1.422.062	1.227.931	2.649.993

	2011 (Satu tahun)		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Saldo awal tahun	1.826.856	1.660.297	3.487.153
Pembukuan kembali kredit hapus tagih	162	-	162
Penambahan dalam tahun berjalan	359.188	4.184	363.372
Hapus tagih	(45.514)	(85.173)	(130.687)
Penerimaan kembali	(573.625)	(292.643)	(866.268)
Selisih kurs	-	6.112	6.112
Saldo akhir tahun	1.567.067	1.292.777	2.859.844

	2010 (Satu tahun)		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Saldo awal tahun	1.681.931	1.644.359	3.326.290
Pembukuan kembali kredit hapus tagih	782	-	782
Penambahan dalam tahun berjalan	302.271	160.603	462.874
Hapus tagih	(7.474)	-	(7.474)
Penerimaan kembali	(150.654)	(77.720)	(228.374)
Selisih kurs	-	(66.945)	(66.945)
Saldo akhir tahun	1.826.856	1.660.297	3.487.153

	2009 (Satu tahun)		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Saldo awal tahun	1.045.148	1.656.061	2.701.209
Pembukuan kembali kredit hapus tagih	7.771	-	7.771
Penambahan dalam tahun berjalan	800.025	359.419	1.159.444
Hapus tagih	(7.976)	-	(7.976)
Penerimaan kembali	(163.037)	(87.741)	(250.778)
Selisih kurs	-	(283.380)	(283.380)
Saldo akhir tahun	1.681.931	1.644.359	3.326.290

12. EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, nilai wajar dari efek yang dibeli dengan janji dijual kembali adalah sebesar nilai tercatatnya.

Akun ini merupakan efek obligasi yang dibeli dengan janji dijual kembali berjangka waktu 91 – 189 hari pada tanggal 30 Juni 2012, 94 – 105 hari pada tanggal 31 Desember 2011 dan 30 - 180 hari pada tanggal 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 dengan perincian sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember		1 Januari 2009/
	2012	2011	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Bank				
Harga jual kembali	5.811.784	2.816.070	-	59.927
Pendapatan bunga yang belum direalisasi	(22.761)	(17.909)	-	(321)
Jumlah	5.789.023	2.798.161	-	59.606
Entitas anak				
Harga jual kembali	-	-	8.279	70.708
Pendapatan bunga yang belum direalisasi	-	-	(279)	(2.708)
Jumlah	-	-	8.000	68.000
Jumlah	5.789.023	2.798.161	8.000	127.606
Penyisihan penghapusan	-	-	-	(596)
Jumlah efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - Bersih	5.789.023	2.798.161	8.000	127.010

Seluruh efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dilakukan dengan pihak ketiga dan tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011, serta berkualitas lancar pada tanggal 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008.

Mutasi penyisihan penghapusan efek yang dibeli dengan janji dijual kembali untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut:

	2009
	Rp Juta
Saldo awal tahun	596
Pemulihan tahun berjalan	(596)
Saldo akhir tahun	-

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai efek yang dibeli dengan janji dijual kembali adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

13. INVESTASI NETO SEWA PEMBIAYAAN

Investasi neto sewa pembiayaan memiliki suku bunga tetap dan mengambang, sehingga Bank dan entitas anak terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar *(fair value interest rate risk)* dan risiko suku bunga atas arus kas *(cash flow interest rate risk)*.

	30 Juni 2012		
	Nilai tercatat		
	Dinilai secara kolektif	Dinilai secara individual	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah			
Piutang sewa pembiayaan	1.413.088	185.071	1.598.159
Nilai sisa terjamin	322.884	39.047	361.931
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(202.348)	(25.758)	(228.106)
Simpanan jaminan	(322.884)	(39.047)	(361.931)
Jumlah	1.210.740	159.313	1.370.053
Dollar Amerika Serikat			
Piutang sewa pembiayaan	62.263	-	62.263
Nilai sisa terjamin	16.784	-	16.784
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(4.789)	-	(4.789)
Simpanan jaminan	(16.784)	-	(16.784)
Jumlah	57.474	-	57.474
Jumlah	1.268.214	159.313	1.427.527
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.540)	(1.430)	(7.970)
Jumlah investasi neto sewa pembiayaan - Bersih	1.261.674	157.883	1.419.557

	31 Desember 2011		
	Nilai tercatat		
	Dinilai secara kolektif	Dinilai secara individual	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah			
Piutang sewa pembiayaan	1.146.884	109.719	1.256.603
Nilai sisa terjamin	228.008	29.912	257.920
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(158.346)	(14.266)	(172.612)
Simpanan jaminan	(228.008)	(29.912)	(257.920)
Jumlah	988.538	95.453	1.083.991
Dollar Amerika Serikat			
Piutang sewa pembiayaan	76.372	3.660	80.032
Nilai sisa terjamin	15.746	573	16.319
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(7.215)	(43)	(7.258)
Simpanan jaminan	(15.746)	(573)	(16.319)
Jumlah	69.157	3.617	72.774
Jumlah	1.057.695	99.070	1.156.765
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.541)	(1.513)	(4.054)
Jumlah investasi neto sewa pembiayaan - Bersih	1.055.154	97.557	1.152.711

	31 Desember 2010		
	Nilai tercatat		
	Dinilai secara kolektif	Dinilai secara individual	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah			
Piutang sewa pembiayaan	934.503	72.380	1.006.883
Nilai sisa terjamin	216.502	12.521	229.023
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(134.712)	(8.555)	(143.267)
Simpanan jaminan	(216.502)	(12.521)	(229.023)
Jumlah	799.791	63.825	863.616
Dollar Amerika Serikat			
Piutang sewa pembiayaan	82.941	6.643	89.584
Nilai sisa terjamin	18.645	1.385	20.030
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(11.293)	(519)	(11.812)
Simpanan jaminan	(18.645)	(1.385)	(20.030)
Jumlah	71.648	6.124	77.772
Jumlah	871.439	69.949	941.388
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.151)	(13.855)	(15.006)
Jumlah investasi neto sewa pembiayaan - Bersih	870.288	56.094	926.382

	31 Desember 2009	1 Januari 2009/ 31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah		
Piutang sewa pembiayaan	1.057.630	1.046.367
Nilai sisa terjamin	188.624	164.197
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(222.604)	(223.224)
Simpanan jaminan	(188.624)	(164.197)
Jumlah	835.026	823.143
Dollar Amerika Serikat		
Piutang sewa pembiayaan	66.735	98.417
Nilai sisa terjamin	17.964	22.861
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(8.773)	(11.931)
Simpanan jaminan	(17.964)	(22.861)
Jumlah	57.962	86.486
Jumlah	892.988	909.629
Penyisihan penghapusan	(28.074)	(30.747)
Jumlah investasi neto sewa pembiayaan - Bersih	864.914	878.882

Estimasi nilai wajar investasi neto sewa pembiayaan ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa datang menggunakan suku bunga untuk piutang baru dengan jangka waktu yang serupa. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, nilai wajar dari aset keuangan ini adalah sebesar Rp 1.435.984 juta, Rp 1.157.687 juta dan Rp 944.816 juta (Catatan 52).

Piutang sewa pembiayaan jatuh tempo dalam:

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Satu tahun berikutnya (termasuk yang telah jatuh tempo)	575.723	827.595	666.600	463.130	592.059
Dua tahun berikutnya	750.062	366.712	304.704	267.938	344.652
Tiga tahun berikutnya atau lebih	334.637	142.328	125.163	393.297	208.073
Jumlah	1.660.422	1.336.635	1.096.467	1.124.365	1.144.784
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun					
Rupiah	16,11%	16,08%	18,08%	18,25%	17,83%
Dollar Amerika Serikat	8,37%	7,24%	10,04%	10,33%	9,79%

Kisaran jangka waktu pembiayaan adalah 3 tahun.

Biaya-biaya yang timbul, seperti premi asuransi, bea materai dan biaya terkait lainnya sehubungan dengan perolehan aset sewa pembiayaan, dibebankan kepada nasabah.

Kualitas investasi neto sewa pembiayaan pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember	
	2012	2011	2010
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Tidak mengalami penurunan nilai	1.549.596	1.237.334	977.365
Mengalami penurunan nilai	110.826	99.301	119.102
Bersih	1.660.422	1.336.635	1.096.467

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

	2012 (Enam bulan)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Saldo awal periode	4.054	15.006	28.074	30.747
Selisih penurunan nilai pada penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006)	-	-	(1.461)	-
Penyisihan (pemulihan) periode berjalan				
Kolektif	4.000	(4.481)	(4.426)	-
Individual	4.390	526	458	4.868
Akrual bunga pada piutang yang mengalami penurunan nilai	(848)	(1.315)	(5.302)	-
Penghapusan	(3.626)	(5.682)	(2.337)	(7.541)
Saldo akhir periode	7.970	4.054	15.006	28.074

Manajemen Clipan dan VMF berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya investasi neto sewa pembiayaan.

Seluruh investasi neto sewa pembiayaan diberikan kepada pihak ketiga.

Clipan dan VMF menggunakan investasi neto sewa pembiayaan yang dimilliki sebagai jaminan pinjaman yang diterima (Catatan 23). Jumlah investasi neto sewa pembiayaan yang dijaminkan masing-masing sebesar Rp 913.194 juta, Rp 587.870 juta, Rp 404.742 juta, Rp 238.438 juta dan Rp 448.010 juta masing-masing pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008.

Jumlah investasi neto sewa pembiayaan yang direstrukturisasi masing-masing sebesar Rp 147.322 juta, Rp 152.336 juta, Rp 46.027 juta, Rp 363.503 juta dan Rp 179.413 juta pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008.

Pada saat perjanjian sewa pembiayaan dimulai, penyewa guna usaha memberikan simpanan jaminan yang akan digunakan sebagai pembayaran atas pembelian dari aset sewa pada akhir masa sewa, bila hak opsi dilaksanakan penyewa guna usaha. Apabila hak opsi tidak dilaksanakan, simpanan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada penyewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha.

14. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Piutang pembiayaan konsumen memiliki suku bunga tetap, sehingga Bank dan entitas anak terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar *(fair value interest rate risk).*

Jumlah piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008 merupakan piutang pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh Clipan dan VMF dengan perincian sebagai berikut:

	30 Juni 2012		
	Nilai Tercatat		
	Dinilai secara kolektif	Dinilai secara individual	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Piutang pembiayaan konsumen			
Pihak ketiga	4.296.018	154.708	4.450.726
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui			
Pihak ketiga	699.583	16.915	716.498
Jumlah	3.596.435	137.793	3.734.228
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(31.095)	(6.867)	(37.962)
Bersih	3.565.340	130.926	3.696.266

	31 Desember 2011		
	Nilai Tercatat		
	Dinilai secara kolektif	Dinilai secara individual	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Piutang pembiayaan konsumen			
Pihak berelasi	166	-	166
Pihak ketiga	4.036.209	163.714	4.199.923
Subjumlah	4.036.375	163.714	4.200.089
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui			
Pihak berelasi	(12)	-	(12)
Pihak ketiga	(681.167)	(23.636)	(704.803)
Subjumlah	(681.179)	(23.636)	(704.815)
Jumlah	3.355.196	140.078	3.495.274
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(35.399)	(5.775)	(41.174)
Bersih	3.319.797	134.303	3.454.100

	31 Desember 2010		
	Nilai Tercatat		
	Dinilai secara kolektif	Dinilai secara individual	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Piutang pembiayaan konsumen			
Pihak berelasi	235	-	235
Pihak ketiga	2.317.113	63.157	2.380.270
Subjumlah	2.317.348	63.157	2.380.505
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui			
Pihak berelasi	(46)	-	(46)
Pihak ketiga	(439.850)	(7.227)	(447.077)
Subjumlah	(439.896)	(7.227)	(447.123)
Jumlah	1.877.452	55.930	1.933.382
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(19.199)	(8.920)	(28.119)
Bersih	1.858.253	47.010	1.905.263

	31 Desember 2009	1 Januari 2009/ 31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta
Piutang pembiayaan konsumen		
Pihak berelasi	92	62
Pihak ketiga	1.374.428	1.049.897
Subjumlah	1.374.520	1.049.959
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui		
Pihak berelasi	(7)	(3)
Pihak ketiga	(280.385)	(211.295)
Subjumlah	(280.392)	(211.298)
Jumlah	1.094.128	838.661
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(24.121)	(17.565)
Bersih	1.070.007	821.096

Estimasi nilai wajar piutang pembiayaan konsumen ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa datang menggunakan suku bunga untuk piutang baru dengan jangka waktu yang serupa. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, nilai wajar dari piutang pembiayaan konsumen adalah sebesar Rp 3.744.243 juta, Rp 3.500.772 juta dan Rp 1.946.924 juta (Catatan 52).

Piutang pembiayaan konsumen jatuh tempo dalam:

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Satu tahun berikutnya (termasuk yang telah jatuh tempo)	1.587.694	2.086.951	624.482	452.718	474.392
Dua tahun berikutnya	1.723.127	1.403.177	953.645	624.199	378.077
Tiga tahun berikutnya atau lebih	1.139.905	709.961	802.378	297.603	197.490
Jumlah	4.450.726	4.200.089	2.380.505	1.374.520	1.049.959
Tingkat bunga rata-rata per tahun					
Rupiah	16,98%	17,46%	17,83%	20,41%	19,73%

Kualitas piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember	
	2012	2011	2010
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Tidak mengalami penurunan nilai	3.986.839	3.636.346	2.088.077
Mengalami penurunan nilai	463.887	563.743	292.428
Jumlah	4.450.726	4.200.089	2.380.505

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2012 (Enam bulan)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Saldo awal periode	41.174	28.119	24.121	17.565
Selisih penurunan nilai pada penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006)	-	-	(5.977)	-
Penyisihan periode berjalan				
Individual	14.680	22.321	10.871	23.679
Kolektif	6.205	18.646	15.958	-
Akrual bunga pada piutang yang mengalami penurunan nilai	(1.615)	(1.306)	(926)	-
Penghapusan	(22.482)	(26.606)	(15.928)	(17.123)
Saldo akhir periode	37.962	41.174	28.119	24.121

Manajemen Clipan dan VMF berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen.

Piutang pembiayaan konsumen dijadikan sebagai jaminan pinjaman yang diterima Clipan dan VMF dari beberapa bank (Catatan 23).

15. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI

Tagihan akseptasi merupakan tagihan kepada nasabah dan liabilitas akseptasi merupakan liabilitas kepada bank lain.

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Tagihan Akseptasi					
Rupiah	54.503	15.798	5.048	16.603	182.038
Valuta asing	1.100.630	833.027	498.801	500.302	540.129
Jumlah	1.155.133	848.825	503.849	516.905	722.167
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	-	(5.169)	(39.200)
Tagihan Akseptasi - Bersih	1.155.133	848.825	503.849	511.736	682.967
Liabilitas Akseptasi					
Rupiah	51.348	14.491	5.048	16.603	182.038
Valuta asing	1.104.564	835.503	498.801	500.302	540.129
Jumlah	1.155.912	849.994	503.849	516.905	722.167
Diskonto Liabilitas Akseptasi	-	-	-	-	(31.728)
Liabilitas Akseptasi - Bersih	1.155.912	849.994	503.849	516.905	690.439

Tagihan akseptasi diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Liabilitas akseptasi dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Estimasi nilai wajar dari tagihan akseptasi yang merupakan instrumen tanpa suku bunga adalah jumlah yang akan dibayarkan debitur kepada Bank. Sedangkan estimasi nilai wajar dari liabilitas akseptasi yang juga merupakan instrumen tanpa suku bunga adalah jumlah yang harus dikembalikan saat ada permintaan. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, nilai wajar dari tagihan dan liabilitas akseptasi adalah sebesar nilai tercatatnya.

Tagihan dan liabilitas akseptasi berdasarkan jangka waktu perjanjian adalah sebagai berikut:

			31 Desember				1 Januari 2009/
	30 Juni 2012		2011		2010 dan 2009		31 Desember 2008
	Tagihan	Liabilitas	Tagihan	Liabilitas	Tagihan dan liabilitas		Tagihan dan liabilitas
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
≤ 1 bulan	22.745	22.751	6.924	6.924	1.235	8.161	-
> 1 - 3 bulan	74.038	74.175	56.626	56.704	168.460	57.255	84.164
> 3 - 6 bulan	1.048.219	1.048.757	679.971	680.763	334.154	-	587.783
> 6 - 12 bulan	10.131	10.229	105.304	105.603	-	451.489	50.220
Jumlah	1.155.133	1.155.912	848.825	849.994	503.849	516.905	722.167

Tagihan dan liabilitas akseptasi berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2012		31 Desember 2011		31 Desember 2010 dan 2009		1 Januari 2009/ 31 Desember 2008
	Tagihan	Liabilitas	Tagihan	Liabilitas	Tagihan dan liabilitas		Tagihan dan liabilitas
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
≤ 1 bulan	206.810	206.178	99.144	99.399	87.044	152.734	298.934
> 1 - 3 bulan	578.185	577.558	378.796	379.654	369.883	270.320	317.962
> 3 - 6 bulan	360.080	362.020	370.885	370.941	46.922	85.062	88.087
> 6 - 12 bulan	10.058	10.156	-	-	-	8.789	17.184
Jumlah	1.155.133	1.155.912	848.825	849.994	503.849	516.905	722.167

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 jumlah liabilitas akseptasi termasuk liabilitas kepada pihak berelasi masing-masing sebesar Rp 4.139 juta dan Rp 42.042 juta.

Seluruh tagihan akseptasi pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010 tidak mengalami penurunan nilai sedangkan kualitas tagihan akseptasi pada tanggal 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2009	1 Januari 2009/ 31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta
Lancar	516.905	664.373
Dalam perhatian khusus	-	26.566
Macet	-	31.228
Jumlah	516.905	722.167
Penyisihan penghapusan	(5.169)	(39.200)
Jumlah	511.736	682.967

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai tagihan akseptasi untuk tahun 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010			2009		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Saldo awal tahun	166	5.003	5.169	32.736	6.464	39.200
Selisih penurunan nilai pada penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006)	(166)	(5.003)	(5.169)	-	-	-
Pemulihan tahun berjalan	-	-	-	(32.570)	(915)	(33.485)
Selisih kurs	-	-	-	-	(546)	(546)
Saldo akhir tahun	-	-	-	166	5.003	5.169

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penghapusan tagihan akseptasi adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya tagihan akseptasi.

16. PENYERTAAN DALAM BENTUK SAHAM

	Jenis usaha	Persentase Pemilikan					30 Juni 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010	31 Desember 2009	1 Januari 2009/ 31 Desember 2008
		30 Juni 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010	31 Desember 2009	1 Januari 2009/ 31 Desember 2008	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Metode Ekuitas/Equity Method											
Bank											
PT Panin Sekuritas Tbk	Sekuritas	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	29,00%	236.057	226.798	185.185	126.162	88.065
PT Evergreen Finance (d/h PT Dai-ichi Kangyo Panin Finance)	Lembaga pembiayaan	-	-	-	20,00%	20,00%	-	-	-	-	-
PT Epanin Dotcom	Modal ventura	-	-	-	-	20,00%	-	-	-	-	2.000
Entitas anak											
PT Laksayudha Abadi	Properti	36,00%	36,00%	36,00%	46,00%	46,00%	63.231	62.895	62.601	79.585	79.391
PT IBJ Verena Finance	Lembaga pembiayaan	20,00%	20,00%	20,00%	-	-	20.336	20.046	20.088	-	-
Subjumlah							319.624	309.739	267.874	205.747	169.456
Metode Biaya/Cost Method											
Bank											
PT Bank ANZ Indonesia (d/h PT ANZ Panin Bank)	Perbankan	1,00%	1,00%	15,00%	15,00%	15,00%	16.500	16.500	7.500	7.500	7.500
PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	Lembaga pembiayaan	9,33%	9,33%	9,33%	9,33%	9,33%	625	625	625	625	625
PT First Asia Capital (d/h PT Panin Capital)	Sekuritas	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	750	750	750	750	750
PT Sarana Kalsel Ventura	Modal ventura	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	40	40	40	40	40
Entitas anak											
PT Asuransi Maipark Indonesia	Asuransi	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	761	761	761	761	761
Subjumlah/Subtotal							18.676	18.676	9.676	9.676	9.676
Penyertaan Modal Sementara							91.738	91.739	-	-	-
Jumlah Penyertaan dalam bentuk saham							430.038	420.154	277.550	215.423	179.132
Cadangan kerugian penurunan nilai/ Penyisihan penghapusan							(625)	(625)	(625)	(11.796)	(10.064)
Jumlah Penyertaan dalam bentuk saham - Bersih							429.413	419.529	276.925	203.627	169.068

Penyertaan saham dengan metode biaya diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, dan diukur dengan nilai wajar. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, Bank mencatat penyertaan saham dengan metode biaya sebesar biaya perolehan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai karena nilai wajar dari *unquoted equity instruments* tersebut tidak dapat ditentukan dengan andal.

Penyertaan modal sementara pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 adalah penyertaan yang berasal dari *debt to equity swaps* dalam rangka restrukturisasi kredit.

Mutasi penyertaan dalam bentuk saham dengan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

	2012 (Enam bulan)				
	Saldo awal periode	Penambahan	Bagian laba bersih entitas asosiasi	Pengurangan	Saldo akhir periode
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
PT Panin Sekuritas Tbk	226.798	-	30.139	(20.880)	236.057
PT Laksayudha Abadi	62.895	-	336	-	63.231
PT IBJ Verena Finance	20.046	-	290	-	20.336
Jumlah	309.739	-	30.765	(20.880)	319.624

	2011 (Satu tahun)				
	Saldo awal tahun	Penambahan	Bagian laba bersih entitas asosiasi	Pengurangan	Saldo akhir tahun
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
PT Panin Sekuritas Tbk	185.185	-	58.317	(16.704)	226.798
PT Laksayudha Abadi	62.601	-	294	-	62.895
PT IBJ Verena Finance	20.088	-	(42)	-	20.046
Jumlah	267.874	-	58.569	(16.704)	309.739

	2010 (Satu tahun)				
	Saldo awal tahun	Penambahan	Bagian laba bersih entitas asosiasi	Pengurangan	Saldo akhir tahun
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
PT Panin Sekuritas Tbk	126.162	-	69.463	(10.440)	185.185
PT Laksayudha Abadi	79.585	-	435	(17.419)	62.601
PT IBJ Verena Finance	-	20.000	88	-	20.088
Jumlah	205.747	20.000	69.986	(27.859)	267.874

	2009 (Satu tahun)				
	Saldo awal tahun	Penambahan	Bagian laba bersih entitas asosiasi	Pengurangan	Saldo akhir tahun
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
PT Panin Sekuritas Tbk	88.065	-	43.317	(5.220)	126.162
PT Laksayudha Abadi	79.391	-	194	-	79.585
PT Epanin Dotcom	2.000	-	-	(2.000)	-
Jumlah	169.456	-	43.511	(7.220)	205.747

PT Epanin Dotcom

Pada tanggal 24 Maret 2009, Bank telah menjual kepemilikannya atas saham PT Epanin Dotcom sebanyak 4.000.000 lembar saham sehingga kepemilikan Bank menjadi nihil.

PT Evergreen Finance

Pada tanggal 27 Desember 2010, Bank telah menjual kepemilikannya atas saham PT Evergreen Finance sebanyak 500 lembar saham sehingga kepemilikan Bank menjadi nihil.

Ringkasan informasi keuangan dari entitas asosiasi di atas adalah sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Aset					
PT Panin Sekuritas Tbk	1.352.471	1.562.527	1.411.326	1.030.850	933.564
PT Evergreen Finance (d/h PT Dai-ichi Kangyo Panin Finance)	-	-	-	40	83
PT Epanin Dotcom	-	-	-	-	17.483
PT Laksayudha Abadi	495.737	492.681	493.783	498.929	493.105
PT IBJ Verena Finance	261.541	185.604	100.614	-	-
Jumlah Aset	2.109.749	2.240.812	2.005.723	1.529.819	1.444.235
Liabilitas					
PT Panin Sekuritas Tbk	528.529	777.771	774.826	594.009	628.942
PT Evergreen Finance (d/h PT Dai-ichi Kangyo Panin Finance)	-	-	-	78.490	91.433
PT Laksayudha Abadi	184.268	183.406	185.460	192.470	186.974
PT IBJ Verena Finance	159.863	85.373	176	-	-
Jumlah liabilitas	872.660	1.046.550	960.462	864.969	907.349
Aset Bersih	1.237.089	1.194.262	1.045.261	664.850	536.886
Pendapatan					
PT Panin Sekuritas Tbk	203.834	349.488	363.138	222.258	173.891
PT Evergreen Finance (d/h PT Dai-ichi Kangyo Panin Finance)	-	-	-	12.950	11
PT Epanin Dotcom	-	-	-	-	1.237
PT Laksayudha Abadi	22.028	36.105	30.708	4.813	19.102
PT IBJ Verena Finance	6.672	6.480	1.326	-	-
Jumlah pendapatan	232.534	392.073	395.172	240.021	194.241
Laba bersih					
PT Panin Sekuritas Tbk	103.928	201.094	239.528	149.367	36.477
PT Evergreen Finance (d/h PT Dai-ichi Kangyo Panin Finance)	-	-	-	12.900	(12.820)
PT Epanin Dotcom	-	-	-	-	897
PT Laksayudha Abadi	932	870	881	422	9
PT IBJ Verena Finance	1.447	(206)	438	-	-
Jumlah	106.307	201.758	240.847	162.689	24.563

Saldo penyertaan dalam bentuk saham pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010 berdasarkan ada tidaknya penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember	
	2012	2011	2010
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Tidak mengalami penurunan nilai	429.413	419.529	276.925
Mengalami penurunan nilai	625	625	625
Jumlah	430.038	420.154	277.550
Cadangan kerugian penurunan nilai	(625)	(625)	(625)
Bersih	429.413	419.529	276.925

Seluruh penyertaan dalam bentuk saham yang tidak mengalami penurunan nilai berkualitas lancar.

Saldo penyertaan dalam bentuk saham pada tanggal 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 berdasarkan klasifikasi sesuai ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

	31 Desember	1 Januari 2009/
	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta
Lancar	214.798	178.507
Macet	625	625
Jumlah	215.423	179.132
Penyisihan penghapusan	(11.796)	(10.064)
Bersih	203.627	169.068

Penyertaan dalam bentuk saham yang mengalami penurunan nilai pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010 dan memiliki kualitas macet pada tanggal 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 merupakan penyertaan kepada PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai penyertaan dalam bentuk saham untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2012	2011	2010	2009
	(Enam bulan)	(Satu tahun)	(Satu tahun)	(Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Saldo awal periode	625	625	11.796	10.064
Selisih penurunan nilai pada penerapan awal PSAK 55 (revisi 2006)	-	-	(11.171)	-
Penyisihan periode berjalan	-	-	-	1.732
Saldo akhir periode	625	625	625	11.796

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai penyertaan dalam bentuk saham cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

17. ASET TETAP

	1 Januari 2012	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	30 Juni 2012
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Biaya perolehan:					
Pemilikan langsung					
Tanah	620.813	3.468	-	8.148	632.429
Bangunan	1.442.092	47.648	-	43.753	1.533.493
Kendaraan bermotor	240.382	19.947	7.522	4.561	257.368
Inventaris kantor	1.173.066	83.459	1.216	-	1.255.309
Aset sewa pembiayaan					
Kendaraan bermotor	1.219	-	-	-	1.219
Jumlah	3.477.572	154.522	8.738	56.462	3.679.818
Akumulasi Penyusutan:					
Pemilikan langsung					
Bangunan	569.427	40.663	-	-	610.090
Kendaraan bermotor	146.861	19.367	5.394	-	160.834
Inventaris kantor	955.348	60.100	1.124	-	1.014.324
Aset sewa pembiayaan					
Kendaraan bermotor	528	82	-	-	610
Jumlah	1.672.164	120.212	6.518	-	1.785.858
Jumlah Tercatat	1.805.408				1.893.960

	1 Januari 2011	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2011
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Biaya perolehan:					
Pemilikan langsung					
Tanah	585.075	19.226	-	16.512	620.813
Bangunan	1.312.822	104.834	586	25.022	1.442.092
Kendaraan bermotor	209.425	49.117	18.266	106	240.382
Inventaris kantor	1.116.989	88.626	32.783	234	1.173.066
Aset sewa pembiayaan					
Kendaraan bermotor	1.219	-	-	-	1.219
Jumlah	3.225.530	261.803	51.635	41.874	3.477.572
Akumulasi Penyusutan:					
Pemilikan langsung					
Bangunan	495.078	74.784	382	(53)	569.427
Kendaraan bermotor	122.268	39.285	14.798	106	146.861
Inventaris kantor	844.574	143.524	32.697	(53)	955.348
Aset sewa pembiayaan					
Kendaraan bermotor	330	198	-	-	528
Jumlah	1.462.250	257.791	47.877	-	1.672.164
Jumlah Tercatat	1.763.280				1.805.408

	1 Januari 2010	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2010
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Biaya perolehan:					
Pemilikan langsung					
Tanah	552.758	38.315	9.825	3.827	585.075
Bangunan	1.197.293	138.864	21.040	(2.295)	1.312.822
Kendaraan bermotor	162.453	62.154	16.442	1.260	209.425
Inventaris kantor	1.017.142	127.971	28.388	264	1.116.989
Aset sewa pembiayaan					
Kendaraan bermotor	2.479	-	-	(1.260)	1.219
Jumlah	2.932.125	367.304	75.695	1.796	3.225.530
Akumulasi Penyusutan:					
Pemilikan langsung					
Bangunan	431.447	68.151	1.480	(3.040)	495.078
Kendaraan bermotor	101.370	33.087	12.735	546	122.268
Inventaris kantor	695.858	176.324	27.685	77	844.574
Aset sewa pembiayaan					
Kendaraan bermotor	621	255	-	(546)	330
Jumlah	1.229.296	277.817	41.900	(2.963)	1.462.250
Jumlah Tercatat	1.702.829				1.763.280

	1 Januari 2009	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Biaya perolehan:					
Pemilikan langsung					
Tanah	541.232	17.206	476	(5.204)	552.758
Bangunan	1.124.295	41.372	4.042	35.668	1.197.293
Kendaraan bermotor	150.632	16.409	4.588	-	162.453
Inventaris kantor	803.505	221.921	4.517	(3.767)	1.017.142
Aset sewa pembiayaan					
Kendaraan bermotor	1.260	1.219	-	-	2.479
Jumlah	2.620.924	298.127	13.623	26.697	2.932.125
Akumulasi Penyusutan:					
Pemilikan langsung					
Bangunan	354.000	64.005	722	14.164	431.447
Kendaraan bermotor	84.923	18.870	2.423	-	101.370
Inventaris kantor	509.874	189.200	2.790	(426)	695.858
Aset sewa pembiayaan					
Kendaraan bermotor	341	280	-	-	621
Jumlah	949.138	272.355	5.935	13.738	1.229.296
Jumlah Tercatat	1.671.786				1.702.829

Pengurangan aset tetap merupakan penjualan dan penghapusan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Nilai buku	2.220	3.758	33.795	7.688
Harga jual	5.016	9.770	38.533	10.220
Laba penjualan dan penghapusan aset tetap	2.796	6.012	4.738	2.532

Beban penyusutan adalah sebesar Rp 120.212 juta, Rp 123.391 juta, Rp 257.791 juta, Rp 277.817 juta dan Rp 272.355 juta masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan 2011 (2011 - tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

Bank memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun yang akan jatuh tempo sampai dengan 2039. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2012, terdapat tanah dan bangunan milik Bank dengan nilai buku sebesar Rp 35.662 juta yang masih dalam proses balik nama atau atas nama pihak lain.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat semua aset tetap masih lebih rendah dari pada nilai yang dapat dipulihkan, oleh karena itu tidak diperlukan penurunan nilai aset tetap.

Aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kecurian dan risiko lainnya kepada PT Panin Insurance dan PT Asuransi Multi Artha Guna, pihak berelasi, serta PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Tri Prakarta, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, PT Asuransi Raksa Pratikara dan PT Asuransi Dinamika dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 2.468.963 juta dan SGD 560.000 pada tanggal 30 Juni 2012, Rp 2.478.772 juta dan SGD 560.000 pada tanggal 31 Desember 2011, Rp 2.698.681 juta dan USD 7 juta pada tanggal 31 Desember 2010, Rp 1.881.380 juta dan USD 10 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp 2.420.450 juta dan USD 6 juta pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Aset tetap yang belum siap digunakan dalam kegiatan operasional direklasifikasi ke aset lain-lain (Catatan 18).

18. ASET LAIN-LAIN

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Bank					
Pendapatan yang masih akan diterima	659.630	592.313	589.598	564.497	622.395
Aset tetap yang belum siap digunakan dalam kegiatan operasional	486.072	523.581	507.874	422.863	409.416
Uang muka					
Pendirian cabang	393.575	394.740	219.422	153.584	132.119
Pihak ketiga	59.864	40.517	72.989	23.490	26.981
Pembelian aset tetap	75.298	10.925	32.571	26.261	68.731
Biaya dibayar di muka	321.673	305.849	228.909	23.657	22.632
Agunan yang diambil alih	289.430	281.306	489.487	489.830	446.075
Aset tidak berwujud					
Perangkat lunak	29.076	37.538	-	-	-
Goodwill	9.917	9.917	9.917	17.852	25.787
Persediaan hadiah dan barang cetakan	32.420	35.839	26.640	35.245	34.260
Deviden yang masih harus diterima	20.880	-	-	-	-
Pajak dibayar di muka (Catatan 55)	10.824	10.824	10.824	10.824	10.824
Tagihan kepada pihak ketiga	5.774	-	-	-	70.297
Beban pensiun dibayar di muka (Catatan 43a)	3.807	77.404	61.608	53.928	33.250
Lainnya	56.474	79.105	37.224	28.544	7.833
Sub jumlah	2.454.714	2.399.858	2.287.063	1.850.575	1.910.600
Dikurangi:					
Cadangan kerugian penurunan nilai	(51.268)	(91.174)	(132.326)	(119.479)	(88.943)
Bersih	2.403.446	2.308.684	2.154.737	1.731.096	1.821.657
Entitas Anak					
Pembiayaan *refinancing* - bersih	95.657	80.992	44.607	14.974	-
Piutang premi dan reasuransi - bersih	29.478	7.523	8.674	1.440	5.417
Agunan yang diambil alih	25.800	42.907	24.484	5.972	13.889
Piutang lain-lain	15.513	13.863	8.167	7.899	7.316
Biaya dibayar di muka	10.295	8.896	10.817	10.090	6.479
Kas yang dibatasi penggunaannya (Catatan 55)	149	1.696	20	12	480
Aset tetap yang belum siap digunakan dalam kegiatan operasional	-	-	67	7.111	-
Lainnya	78.253	39.343	38.906	26.377	18.022
Sub jumlah	255.145	195.220	135.742	73.875	51.603
Dikurangi:					
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.825)	(6.546)	(3.854)	(754)	(1.807)
Bersih	250.320	188.674	131.888	73.121	49.796
Jumlah Aset Lain-lain - Bersih	2.653.766	2.497.358	2.286.625	1.804.217	1.871.453

Pendapatan yang masih akan Diterima

Merupakan bunga yang masih akan diterima atas penempatan pada bank lain, efek-efek dan kredit.

Pendapatan yang masih akan diterima diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, nilai wajar dari pendapatan yang masih akan diterima adalah sebesar nilai tercatatnya.

Aset Tetap yang belum siap Digunakan dalam Kegiatan Operasional

Aset tetap yang belum siap digunakan dalam kegiatan operasional merupakan tanah dan bangunan yang direncanakan untuk pembukaan cabang dan tempat kegiatan pendukung operasional Bank dan entitas anak.

Manajemen berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap yang belum digunakan dalam kegiatan operasi.

Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih merupakan jaminan kredit dan pembiayaan konsumen berupa surat berharga dalam bentuk saham, tanah, bangunan dan kendaraan yang telah diambil alih oleh Bank dan entitas anak. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008, dalam agunan yang diambil alih termasuk surat berharga dalam bentuk saham yang diperdagangkan di bursa dengan nilai tercatat masing-masing sebesar Rp 187.839 juta.

Untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, Bank telah melakukan upaya penyelesaian atas agunan yang diambil alih.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif dan lainnya adalah sebagai berikut:

	2012 (Enam bulan)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Saldo awal periode	97.720	136.180	120.233	142.712
Selisih penurunan nilai pada penerapan awal PSAK 48 (revisi 2009)	-	-	-	(51.962)
Penghapusan	(3.945)	(3.014)	(2.641)	(6.566)
Penyisihan (pemulihan) periode berjalan	(37.682)	(35.446)	18.588	36.049
Saldo akhir periode	56.093	97.720	136.180	120.233

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif dan lainnya adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

Perangkat lunak

Perincian perangkat lunak adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2012	31 Desember 2011
	Rp Juta	Rp Juta
Biaya perolehan		
Awal periode	44.888	44.888
Penambahan periode berjalan	1.109	-
Akhir periode	45.997	44.888
Akumulasi Amortisasi		
Awal periode	(7.350)	-
Amortisasi periode berjalan	(9.571)	(7.350)
Akhir periode	(16.921)	(7.350)
Jumlah Tercatat	29.076	37.538

Goodwill

Perincian goodwill adalah sebagai berikut:

	31 Desember		1 Januari 2009/
	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Biaya perolehan	31.738	31.738	31.738
Akumulasi amortisasi			
Awal tahun	(13.886)	(5.951)	-
Amortisasi tahun berjalan	(7.935)	(7.935)	(5.951)
Akhir tahun	(21.821)	(13.886)	(5.951)
Jumlah Tercatat	9.917	17.852	25.787

Efektif 1 Januari 2011, Bank menghentikan amortisasi goodwill. Akumulasi amortisasi dieliminasi terhadap biaya perolehan yang tercatat.

19. SIMPANAN

Simpanan diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan, diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Estimasi nilai wajar dari simpanan tanpa jangka waktu, termasuk juga simpanan tanpa suku bunga, adalah jumlah yang harus dikembalikan pada saat ada permintaan pembayaran. Estimasi nilai wajar dari simpanan dengan suku bunga tetap tanpa kuotasi harga di pasar didasarkan pada diskonto arus kas menggunakan suku bunga dari utang baru dengan jangka waktu yang sama. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, nilai wajar dari liabilitas keuangan ini adalah sebesar nilai tercatatnya.

Simpanan memiliki suku bunga tetap maupun mengambang, sehingga Bank dan entitas anak terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar *(fair value interest rate risk)* dan risiko suku bunga atas arus kas *(cash flow interest rate risk)*.

Simpanan terdiri dari:

	30 Juni 2012		
	Pihak berelasi	Pihak ketiga	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Bank			
Giro	48.207	15.476.090	15.524.297
Tabungan	47.865	40.609.489	40.657.354
Deposito berjangka	326.888	35.556.140	35.883.028
Sub Jumlah	422.960	91.641.719	92.064.679
Entitas Anak			
Giro *Wadiah*	-	47.856	47.856
Tabungan *Mudharabah*	-	40.142	40.142
Deposito *Mudharabah*	-	634.568	634.568
Sub Jumlah	-	722.566	722.566
Jumlah	422.960	92.364.285	92.787.245

	31 Desember 2011		
	Pihak berelasi	Pihak ketiga	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Bank			
Giro	109.494	15.979.813	16.089.307
Tabungan	25.119	31.768.605	31.793.724
Deposito berjangka	290.310	37.155.419	37.445.729
Sub Jumlah	424.923	84.903.837	85.328.760
Entitas Anak			
Giro *Wadiah*	-	19.067	19.067
Tabungan *Mudharabah*	-	7.661	7.661
Deposito *Mudharabah*	-	393.044	393.044
Sub Jumlah	-	419.772	419.772
Jumlah	424.923	85.323.609	85.748.532

	31 Desember 2010		
	Pihak berelasi	Pihak ketiga	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Bank			
Giro	38.547	14.715.017	14.753.564
Tabungan	19.964	22.400.192	22.420.156
Deposito berjangka	320.927	37.475.310	37.796.237
Sub Jumlah	379.438	74.590.519	74.969.957
Entitas Anak			
Giro *Wadiah*	-	15.231	15.231
Tabungan *Mudharabah*	-	4.027	4.027
Deposito *Mudharabah*	-	290.505	290.505
Sub Jumlah	-	309.763	309.763
Jumlah	379.438	74.900.282	75.279.720

	31 Desember 2009		
	Pihak berelasi	Pihak ketiga	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Bank			
Giro	20.223	12.063.969	12.084.192
Tabungan	16.257	13.599.630	13.615.887
Deposito berjangka	251.894	30.277.958	30.529.852
Sub Jumlah	288.374	55.941.557	56.229.931
Entitas Anak			
Giro *Wadiah*	-	303	303
Tabungan *Mudharabah*	-	314	314
Deposito *Mudharabah*	-	3.939	3.939
Sub Jumlah	-	4.556	4.556
Jumlah	288.374	55.946.113	56.234.487

	1 Januari 2009/31 Desember 2008		
	Pihak berelasi	Pihak ketiga	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Bank			
Giro	19.573	8.727.441	8.747.014
Tabungan	14.301	8.047.955	8.062.256
Deposito berjangka	655.134	28.528.725	29.183.859
Sub Jumlah	689.008	45.304.121	45.993.129
Entitas anak			
Giro	-	6.415	6.415
Tabungan	-	6.191	6.191
Deposito berjangka	-	37.944	37.944
Sub Jumlah	-	50.550	50.550
Jumlah	689.008	45.354.671	46.043.679

a. Giro terdiri atas:

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Pihak berelasi					
Bank					
Rupiah	38.311	101.525	29.935	12.846	14.504
Dollar Amerika Serikat	9.811	7.926	8.556	7.377	5.069
Lainnya	85	43	56	-	-
Sub Jumlah	48.207	109.494	38.547	20.223	19.573
Pihak ketiga					
Bank					
Rupiah	6.093.700	6.157.735	4.709.772	3.492.293	2.871.267
Dollar Amerika Serikat	7.051.317	7.648.379	8.300.489	6.644.066	4.364.038
Dollar Australia	887.852	729.653	308.350	517.419	701.208
Dollar Singapura	631.461	616.092	565.544	675.754	454.799
Euro	547.929	554.111	600.614	400.303	220.732
Yen Jepang	87.795	59.916	77.164	184.930	56.753
Poundsterling Inggris	66.095	85.166	91.553	77.471	22.718
Dollar Selandia Baru	38.112	36.298	17.075	20.539	23.652
Dollar Hongkong	15.159	14.917	25.214	21.240	3.471
Lainnya	56.670	77.546	19.242	29.954	8.803
Sub Jumlah	15.476.090	15.979.813	14.715.017	12.063.969	8.727.441
Entitas Anak					
Rupiah	47.856	19.067	15.231	303	6.415
Jumlah	15.572.153	16.108.374	14.768.795	12.084.495	8.753.429
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun					
Rupiah	3,73%	4,04%	3,78%	4,33%	4,14%
Valuta asing	0,17%	0,17%	0,36%	1,06%	1,80%

Jumlah giro yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008 masing-masing adalah sebesar Rp 13.275 juta, Rp 12.383 juta, Rp 9.788 juta, Rp 37.518 juta dan Rp 17.853 juta.

b. Tabungan terdiri atas:

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah					
Bank					
Tabungan Bisnis Panin	26.455.990	12.477.488	13.319.111	2.268.604	1.499.541
Tabungan Magna Panin	11.374.996	10.510.078	8.560.783	10.862.596	6.317.943
Tabungan Bisnis Combo	1.778.340	7.777.758	-	-	-
Tabanas	354.863	316.890	247.897	296.926	172.391
Tabungan Panin Junior	335.778	304.655	252.459	164.114	72.381
Tabungan Panin Promo	267.583	318.932	-	-	-
Tabunganku	51.177	45.192	-	-	-
Tabungan Rencana Panin	38.225	42.513	39.906	23.647	-
Tabungan Junior Panin Promo	402	218	-	-	-
Sub Jumlah	40.657.354	31.793.724	22.420.156	13.615.887	8.062.256
Entitas Anak					
Tabungan *Mudharabah*	40.142	7.661	4.027	314	-
Tabungan Harfa	-	-	-	-	6.046
Tabungan Pegawai	-	-	-	-	145
Sub Jumlah	40.142	7.661	4.027	314	6.191
Jumlah	40.697.496	31.801.385	22.424.183	13.616.201	8.068.447
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun					
Rupiah	2,79%	2,70%	3,56%	2,79%	3,95%
Bagi hasil rata-rata per tahun	4,41%	3,37%	3,96%	5,00%	-

Jumlah tabungan yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008 masing-masing adalah sebesar Rp 39.240 juta, Rp 46.729 juta, Rp 8.188 juta, Rp 1.079.323 juta dan Rp 27.749 juta.

c. Deposito berjangka terdiri atas:

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Pihak berelasi					
Bank					
Rupiah	198.278	188.553	234.790	190.142	460.595
Dollar Amerika Serikat	128.610	101.757	86.137	61.752	194.539
Sub Jumlah	326.888	290.310	320.927	251.894	655.134
Pihak ketiga					
Bank					
Rupiah	32.726.264	34.407.815	33.916.299	27.190.499	25.541.289
Dollar Amerika Serikat	2.556.363	2.473.465	3.286.992	2.789.277	2.525.558
Dollar Australia	126.297	136.407	101.450	165.835	287.283
Dollar Singapura	72.610	71.014	70.716	53.643	85.719
Euro	63.331	54.737	86.612	62.622	78.475
Lainnya	11.275	11.981	13.241	16.082	10.401
Sub Jumlah	35.556.140	37.155.419	37.475.310	30.277.958	28.528.725
Entitas Anak - Rupiah	634.568	393.044	290.505	3.939	37.944
Jumlah	36.517.596	37.838.773	38.086.742	30.533.791	29.221.803
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun					
Rupiah	5,95%	6,96%	6,99%	9,48%	9,43%
Valuta asing	0,80%	0,80%	1,21%	2,34%	3,56%
Bagi hasil rata-rata per tahun	7,20%	8,19%	6,83%	7,13%	-

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan periode dan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Berdasarkan periode deposito berjangka:

	31 Desember														
	30 Juni 2012			2011			2010			2009			1 Januari 2009/31 Desember 2008		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
1 bulan	23.838.445	1.789.509	25.627.954	25.190.044	1.670.979	26.861.023	22.010.415	2.086.203	24.096.618	17.199.641	2.122.876	19.322.517	19.508.863	2.473.933	21.982.796
3 bulan	5.539.540	446.773	5.986.313	6.093.790	528.135	6.621.925	9.489.456	791.573	10.281.029	5.196.485	581.770	5.778.255	3.267.732	278.774	3.546.506
6 bulan	2.597.456	327.211	2.924.667	2.075.298	356.505	2.431.803	2.004.520	405.939	2.410.459	3.612.815	208.757	3.821.572	1.316.258	277.918	1.594.176
12 bulan	1.572.265	394.993	1.967.258	1.613.735	293.742	1.907.477	923.470	361.433	1.284.903	1.355.937	235.808	1.591.745	1.927.973	151.350	2.079.323
Lebih dari 12 bulan	11.404	-	11.404	16.545	-	16.545	13.733	-	13.733	19.702	-	19.702	19.002	-	19.002
Jumlah	33.559.110	2.958.486	36.517.596	34.989.412	2.849.361	37.838.773	34.441.594	3.645.148	38.086.742	27.384.580	3.149.211	30.533.791	26.039.828	3.181.975	29.221.803

Berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo:

	31 Desember														
	30 Juni 2012			2011			2010			2009			1 Januari 2009/31 Desember 2008		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
≤ 1 bulan	25.406.244	1.960.073	27.366.317	26.249.122	1.886.891	28.136.013	26.526.302	2.711.046	29.237.348	18.453.775	2.424.859	20.878.634	20.148.336	2.553.524	22.701.860
> 1 - 3 bulan	5.215.793	501.710	5.717.503	5.515.861	502.929	6.018.790	6.171.053	513.193	6.684.246	4.929.531	362.655	5.292.186	3.084.249	341.759	3.426.008
> 3 - 6 bulan	1.857.268	228.463	2.085.731	2.084.052	240.343	2.324.395	1.266.428	223.055	1.489.483	3.064.322	154.923	3.219.245	1.575.941	152.993	1.728.934
> 6 - 12 bulan	1.070.631	268.240	1.338.871	1.125.013	219.198	1.344.211	468.897	197.854	666.751	918.439	206.774	1.125.213	1.216.113	133.699	1.349.812
> 12 bulan	9.174	-	9.174	15.364	-	15.364	8.914	-	8.914	18.513	-	18.513	15.189	-	15.189
Jumlah	33.559.110	2.958.486	36.517.596	34.989.412	2.849.361	37.838.773	34.441.594	3.645.148	38.086.742	27.384.580	3.149.211	30.533.791	26.039.828	3.181.975	29.221.803

Jumlah deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 1.671.620 juta, Rp 1.428.648 juta, Rp 1.031.737 juta, Rp 2.100.188 juta dan Rp 1.304.419 juta.

20. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Estimasi nilai wajar dari simpanan tanpa jangka waktu, termasuk juga simpanan tanpa suku bunga, adalah jumlah yang harus dikembalikan saat ada permintaan pembayaran. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, nilai wajar dari liabilitas keuangan ini adalah sebesar nilai tercatatnya.

Simpanan dari bank lain memiliki suku bunga tetap maupun mengambang, sehingga Bank dan entitas anak terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar *(fair value interest rate risk)* dan risiko suku bunga atas arus kas *(cash flow interest rate risk)*.

Simpanan dari bank lain terdiri dari:

	31 Desember														
	30 Juni 2012			2011			2010			2009			1 Januari 2009/31 Desember 2008		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Pihak berelasi															
Bank															
Giro	12.468	-	12.468	10.155	-	10.155	-	-	-	30.864	-	30.864	29.298	-	29.298
Call money	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah	12.468	-	12.468	10.155	-	10.155	30.000	-	30.000	30.864	-	30.864	29.298	-	29.298
Pihak ketiga															
Bank															
Giro	97.216	327	97.543	119.039	2.924	121.963	59.026	2.017	61.043	88.215	5.809	94.024	45.481	229	45.710
Tabungan	68.121	-	68.121	90.840	-	90.840	39.585	-	39.585	5.150	-	5.150	-	-	-
Deposito berjangka	1.588.128	-	1.588.128	909.456	-	909.456	1.045.994	-	1.045.994	587.147	-	587.147	559.415	-	559.415
Call money	5.051.000	1.742.308	6.793.308	3.130.000	1.051.830	4.181.830	2.300.000	90.100	2.390.100	1.195.000	347.615	1.542.615	700.000	-	700.000
Sub Jumlah	6.804.465	1.742.635	8.547.100	4.249.335	1.054.754	5.304.089	3.444.605	92.117	3.536.722	1.875.512	353.424	2.228.936	1.304.896	229	1.305.125
Entitas Anak															
Giro *Wadiah*	1.436	-	1.436	858	-	858	104	-	104	-	-	-	-	-	-
Deposito *Mudharabah*	20.200	-	20.200	127	-	127	500	-	500	-	-	-	155	-	155
Sub Jumlah	21.636	-	21.636	985	-	985	604	-	604	-	-	-	155	-	155
Jumlah	6.838.569	1.742.635	8.581.204	4.260.475	1.054.754	5.315.229	3.475.209	92.117	3.567.326	1.906.376	353.424	2.259.800	1.334.349	229	1.334.578

a. Giro

Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun untuk giro Rupiah dan valuta asing masing-masing sebesar 3,07% dan 0,10% untuk tahun 2012, 3,75% dan 0,14% untuk tahun 2011, 3,37% dan 0,25% untuk tahun 2010 dan 4,59% dan 0,99% untuk tahun 2009.

Tingkat bonus per tahun untuk giro *wadiah* masing-masing sebesar 3,00%, 1,79% dan 0,75% untuk tahun 2012, 2011 dan 2010.

b. Tabungan

Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun untuk tabungan masing-masing sebesar 5,26%, 6,26%, 6,44% dan 5,95% untuk tahun 2012, 2011, 2010 dan 2009.

c. Deposito Berjangka

Jangka waktu deposito berjangka 4 hari sampai dengan 12 bulan untuk tahun 2012, 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008. Tingkat bunga efektif rata-rata masing-masing 4,24% 6,24%, 6,35% dan 8,11% per tahun untuk tahun 2012, 2011, 2010 dan 2009 dan memiliki sisa umur sampai dengan jatuh tempo di bawah 12 bulan.

Bagi hasil rata-rata per tahun untuk deposito *mudharabah* masing-masing sebesar 7,2%, 7,71% dan 6,83% untuk tahun 2012, 2011 dan 2010.

d. *Call Money*

Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008 jangka waktu *call money* Rupiah masing-masing 3 sampai dengan 32 hari, 3 sampai dengan 33 hari, 7 sampai dengan 34 hari, 5 sampai dengan 14 hari dan 6 sampai dengan 33 hari dan dengan tingkat bunga efektif rata-rata masing-masing sebesar 4,27%, 4,66%, 6,21% dan 6,43% per tahun untuk tahun 2012, 2011, 2010 dan 2009.

Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, jangka waktu *call money* valuta asing adalah 14 sampai dengan 91 hari, 4 hari, 7 hari dan 7 sampai dengan 14 hari dengan tingkat bunga efektif rata-rata sebesar 1,24%, 0,63%, 0,29% dan 0,17% per tahun untuk tahun 2012, 2011, 2010 dan 2009.

21. EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI – PIHAK KETIGA

Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali memiliki suku bunga tetap. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, nilai wajar dari liabilitas keuangan ini adalah sebesar nilai tercatatnya.

Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri dari:

			30 Juni 2012		
Jenis	Jangka waktu	Tanggal jatuh tempo	Nilai nominal	Beban bunga yang belum diamortisasi	Nilai bersih
			Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
FR0059	30 hari	12 Juli 2012	606.027	849	605.178
FR0052	33 hari	23 Juli 2012	505.196	1.414	503.782
FR0056	30 hari	11 Juli 2012	472.277	588	471.689
FR0036	31 hari	30 Juli 2012	337.269	1.231	336.038
FR0058	30 hari	27 Juli 2012	306.114	1.035	305.079
FR0057	30 hari	27 Juli 2012	197.238	667	196.571
FR0028	31 hari	30 Juli 2012	154.984	566	154.418
FR0058	30 hari	11 Juli 2012	130.757	163	130.594
FR0031	31 hari	30 Juli 2012	123.630	451	123.179
FR0048	31 hari	30 Juli 2012	104.100	380	103.720
FR0061	21 hari	2 Juli 2012	99.108	12	99.096
FR0027	31 hari	30 Juli 2012	33.445	122	33.323
Jumlah			3.070.145	7.478	3.062.667

			31 Desember 2011		
Jenis	Jangka waktu	Tanggal jatuh tempo	Nilai nominal	Beban bunga yang belum diamortisasi	Nilai bersih
			Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
FR0045	31 hari	19 Januari 2012	591.150	1.428	589.722
FR0040	31 hari	19 Januari 2012	432.190	1.046	431.144
FR0040	33 hari	25 Januari 2012	352.873	1.136	351.737
FR0047	31 hari	20 Januari 2012	307.955	785	307.170
FR0044	35 hari	1 Pebruari 2012	302.051	1.255	300.796
FR0040	31 hari	27 Januari 2012	272.010	949	271.061
FR0057	31 hari	20 Januari 2012	261.182	665	260.517
FR0040	31 hari	20 Januari 2012	233.198	594	232.604
FR0042	33 hari	25 Januari 2012	222.104	715	221.389
FR0042	31 hari	20 Januari 2012	221.239	564	220.675
FR0043	33 hari	25 Januari 2012	220.057	708	219.349
FR0059	33 hari	25 Januari 2012	177.612	572	177.040
FR0056	33 hari	25 Januari 2012	49.299	158	49.141
FR0044	31 hari	27 Januari 2012	32.933	115	32.818
Jumlah			3.675.853	10.690	3.665.163

			31 Desember 2010		
Jenis	Jangka waktu	Tanggal jatuh tempo	Nilai nominal	Beban bunga yang belum diamortisasi	Nilai bersih
			Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
IDBI100311183S	92 hari	24 Pebruari 2011	942.343	9.310	933.033
SPN 20110505	93 hari	16 Pebruari 2011	839.601	7.066	832.535
FR0040	94 hari	14 Pebruari 2011	513.972	4.136	509.836
IDBI120511182S	90 hari	16 Maret 2011	509.216	6.948	502.268
FR004S	29 hari	14 Januari 2011	252.814	563	252.251
IDBi100211182S	44 hari	6 Januari 2011	235.822	202	235.620
IDBI100211182S	44 hari	5 Januari 2011	235.779	161	235.618
IDB1100211182S	28 hari	24 Januari 2011	201.797	808	200.989
FR0044	93 hari	16 Januari 2011	181.564	1.528	180.036
FR004B	32 hari	24 Januari 2011	168.434	695	167.739
FR0028	32 hari	24 Januari 2011	147.149	608	146.541
FR0040	29 hari	14 Januari 2011	124.898	278	124.620
FR0031	29 hari	14 Januari 2011	124.789	278	124.511
IDBI100211182S	38 hari	21 Januari 2011	101.226	350	100.876
IDBI120511273S	92 hari	24 Januari 2011	75.378	745	74.633
FR0027	32 hari	24 Januari 2011	32.922	136	32.786
Jumlah			4.687.704	33.812	4.653.892

			31 Desember 2009		
Jenis	Jangka waktu	Tanggal jatuh tempo	Nilai nominal	Beban bunga yang belum diamortisasi	Nilai bersih
			Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
FR 0040	14 hari	12 Januari 2010	235.174	473	234.701
FR 0044	14 hari	4 Januari 2010	200.922	109	200.813
FR 0044	14 hari	12 Januari 2010	68.511	138	68.373
Jumlah			504.607	720	503.887

22. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN - BERSIH

Surat-surat berharga yang diterbitkan diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan, diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Nilai wajar dari surat berharga yang diterbitkan dihitung dengan menggunakan harga pasar. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, nilai wajar dari surat berharga yang diterbitkan adalah sebesar Rp 3.921.380 juta, Rp 4.499.680 juta dan Rp 2.806.146 juta (Catatan 52).

Obligasi yang diterbitkan memiliki suku bunga tetap, sehingga Bank dan entitas anak terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar *(fair value interest rate risk)*. Suku bunga efektif pada tahun 2012, 2011 dan 2010 untuk obligasi yang diterbitkan ini masing-masing adalah 10,21% per tahun, 10,73 % per tahun dan 9,30% per tahun.

Bank dan entitas anak tidak memiliki tunggakan pembayaran pokok, bunga maupun pelanggaran lainnya berkaitan dengan surat berharga tersebut selama tahun 2012, 2011, 2010 dan 2009.

Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank dan entitas anak adalah sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Nilai nominal					
Bank					
Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010	540.000	540.000	540.000	-	-
Obligasi Bank Panin III Tahun 2009	800.000	800.000	800.000	800.000	-
Obligasi Bank Panin II Tahun 2007					
Seri A	-	-	-	50.000	50.000
Seri B	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Seri C	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Entitas Anak					
Obligasi Clipan Finance III Tahun 2011					
Seri A	248.000	248.000	-	-	-
Seri B	123.000	123.000	-	-	-
Seri C	629.000	629.000	-	-	-
Medium Term Note I Clipan Finance Tahun 2011	800.000	-	-	-	-
Obligasi Verena Multifinance I Tahun 2011					
Seri A	-	65.000	-	-	-
Seri B	135.000	135.000	-	-	-
Seri C	300.000	300.000	-	-	-
Medium Term Note I Verena Multi Finance Tahun 2011	200.000	200.000	-	-	-
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	50.000	135.000	-	-	-
Surat berharga yang beredar	4.025.000	4.775.000	2.940.000	2.450.000	1.650.000
Surat berharga yang dibeli kembali *)	(119.406)	(158.261)	(136.116)	(134.372)	(22.575)
Diskonto yang belum diamortisasi	(25.601)	(25.038)	(14.042)	(11.868)	(3.909)
Bersih	3.879.993	4.591.701	2.789.842	2.303.760	1.623.516

*) Surat berharga yang dibeli kembali merupakan obligasi yang dibeli oleh Bank dan entitas anak lainnya dengan tujuan untuk dijual kembali.

Bank

Obligasi yang diterbitkan oleh Bank adalah sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Nilai nominal					
Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010	540.000	540.000	540.000	-	-
Obligasi Bank Panin III Tahun 2009	800.000	800.000	800.000	800.000	-
Obligasi Bank Panin II Tahun 2007					
Seri A	-	-	-	50.000	50.000
Seri B	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Seri C	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Obligasi yang beredar	1.540.000	2.940.000	2.940.000	2.450.000	1.650.000
Obligasi yang dibeli kembali	(119.406)	(158.261)	(136.116)	(134.372)	(22.575)
Diskonto yang belum diamortisasi	(8.839)	(10.698)	(14.042)	(11.868)	(3.909)
Bersih	1.411.755	2.771.041	2.789.842	2.303.760	1.623.516

Obligasi Bank Panin IV Tahun 2010

Merupakan obligasi nilai nominal sebesar Rp 540 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi, berjangka waktu 5 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 9 Nopember 2015.

Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 9 Pebruari 2011 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 9 Nopember 2015.

Berdasarkan surat PT Pefindo tanggal 8 Agustus 2011 No. 1026/PEF-Dir/VIII/2011, peringkat Obligasi Bank Panin IV tahun 2010 untuk periode 5 Agustus 2011 sampai dengan 1 Agustus 2012 adalah idAA.

Setelah ulang tahun ke – 1 (satu) sejak tanggal emisi, Bank dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruhnya untuk disimpan yang di kemudian hari dapat dijual kembali atau sebagai pelunasan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal obligasi melalui KSEI sesuai dengan jadwal.

Obligasi Bank Panin III Tahun 2009

Merupakan obligasi nilai nominal sebesar Rp 800 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,5% yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi, berjangka waktu 5 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 6 Oktober 2014.

Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 6 Januari 2010 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2014.

Berdasarkan surat PT Pefindo tanggal 8 Agustus 2011 No. 1026/PEF-Dir/VIII/2011, peringkat Obligasi Bank Panin III tahun 2009 untuk periode 5 Agustus 2011 sampai dengan 1 Agustus 2012 adalah idAA.

Setelah ulang tahun ke – 1 (satu) sejak tanggal emisi, Bank dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruhnya untuk disimpan yang di kemudian hari dapat dijual kembali atau sebagai pelunasan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal obligasi melalui KSEI sesuai dengan jadwal.

Obligasi Bank Panin II tahun 2007

Merupakan obligasi nilai nominal sebesar Rp 1.650 miliar dengan tingkat bunga tetap yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari:

- Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 50.000 juta berjangka waktu 3 tahun dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,75% per tahun. Obligasi ini telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 19 Juni 2010.

- Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.400.000 juta berjangka waktu 5 tahun dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,75% per tahun. Obligasi ini telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 19 Juni 2012.

- Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 200.000 juta berjangka waktu 7 tahun dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2014.

Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 19 September 2007 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 19 Juni 2010 untuk Seri A, tanggal 19 Juni 2012 untuk Seri B dan tanggal 19 Juni 2014 untuk Seri C.

Berdasarkan surat PT Pefindo tanggal 8 Agustus 2011 No. 1026/PEF-Dir/VIII/2011, peringkat Obligasi Bank Panin II tahun 2007 untuk periode 5 Agustus 2011 sampai dengan 1 Agustus 2012 adalah idAA.

Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal obligasi melalui KSEI sesuai dengan jadwal.

PT Clipan Finance Indonesia (Clipan)

Obligasi yang diterbitkan oleh Clipan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2012	31 Desember 2011
	Rp Juta	Rp Juta
Nilai nominal		
Obligasi Clipan Finance III Tahun 2011		
Seri A	248.000	248.000
Seri B	123.000	123.000
Seri C	629.000	629.000
Medium Term Notes I Clipan Finance Tahun 2012	800.000	-
Surat berharga yang beredar	1.800.000	1.000.000
Diskonto yang belum diamortisasi	(14.681)	(10.974)
Bersih	1.785.319	989.026

Medium Term Notes I Clipan Finance Tahun 2012 (MTN)

Pada tanggal 30 Maret 2012, Clipan menerbitkan MTN dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun dengan jumlah pokok sebesar Rp 800.000 juta dengan cara penawaran penempatan terbatas dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2015.

MTN ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen yang dimiliki Clipan (Catatan 13 dan 14).

Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 30 Juni 2012 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 30 Maret 2015.

Berdasarkan surat PT Pefindo No. 952/PEF-Dir/VI/2012 tanggal 29 Mei 2012, peringkat MTN I adalah idA+ (*Single A Plus*) untuk periode 28 Mei 2012 sampai dengan 1 Mei 2013.

Wali amanat untuk penerbitan MTN ini adalah PT Bank Mega Tbk. Clipan telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal MTN melalui KSEI sesuai jadwal.

Obligasi Clipan Finance III tahun 2011

Merupakan obligasi nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 juta dengan tingkat bunga tetap yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari:

- Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 248.000 juta berjangka waktu 370 hari dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,75% per tahun. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 13 Nopember 2012.

- Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 123.000 juta berjangka waktu 24 bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,75% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 8 Nopember 2013.

- Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 629.000 juta berjangka waktu 36 bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,25% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 8 Nopember 2014.

Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 8 Pebruari 2012 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 13 Nopember 2012 untuk Seri A, tanggal 8 Nopember 2013 untuk Seri B dan tanggal 8 Nopember 2014 untuk Seri C.

Berdasarkan hasil pemeringkatan PT. Pefindo No. 910/PEF-Dir/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, Obligasi Clipan Finance III tahun 2011 mendapat peringkat A+ (*Single A Plus*) untuk periode 14 Juli 2011 sampai dengan 1 Juni 2012.

Berdasarkan hasil pemeringkatan PT. Pefindo No. 953/PEF-Dir/VI/2012 tanggal 29 Mei 2012, Obligasi Clipan Finance III tahun 2011 mendapat peringkat A+ (*Single A Plus*) untuk periode 28 Mei 2012 sampai dengan 1 Mei 2013.

Clipan memberikan jaminan fidusia berupa investasi neto sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen dan anjak piutang yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar 60% dari jumlah utang pokok obligasi (Catatan 13 dan 14).

Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk. Clipan telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal obligasi melalui KSEI sesuai dengan jadwal.

PT Verena Multi Finance (VMF)

Surat berharga yang diterbitkan oleh VMF adalah sebagai berikut :

	30 Juni 2012	31 Desember 2011
	Rp Juta	Rp Juta
Nilai nominal		
Obligasi Verena Multifinance I Tahun 2011		
Seri A	-	65.000
Seri B	135.000	135.000
Seri C	300.000	300.000
Medium Term Notes I Verena Multi Finance Tahun 2011	200.000	200.000
Surat berharga yang beredar	635.000	700.000
Diskonto yang belum diamortisasi	(2.081)	(3.366)
Bersih	632.919	696.634

Obligasi Verena Multifinance I Tahun 2011

Merupakan obligasi nilai nominal sebesar Rp 500 miliar dengan tingkat bunga tetap yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari:

- Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 65 miliar berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,50% per tahun. Obligasi ini telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 22 Maret 2012.

- Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 135 miliar berjangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,50% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2013.

- Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 300 miliar berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11,25% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 18 Maret 2014.

Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 18 Juni 2011 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 18 Maret 2012 untuk Seri A, tanggal 18 Maret 2013 untuk Seri B dan tanggal 18 Maret 2014 untuk Seri C.

Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang yang dimiliki VMF sebesar Rp 50 miliar pada tanggal emisi, Rp 200 miliar pada satu bulan sejak tanggal emisi, Rp 350 miliar pada dua bulan sejak tanggal emisi dan menjadi Rp 500 miliar atau minimal 110% dari nilai pokok obligasi pada 3 bulan sejak tanggal emisi (Catatan 14).

Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah Bank Mandiri Tbk. VMF telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal obligasi melalui KSEI sesuai jadwal.

Berdasarkan surat No. 1610/PEF-Dir/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 dari Pefindo, peringkat obligasi Seri A adalah idA (*Single A*) untuk periode 22 Desember 2011 sampai dengan 22 Maret 2012.

Berdasarkan surat No. 1608/PEF-Dir/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 dari Pefindo, peringkat obligasi Seri B dan C adalah idA (*Single A*) untuk periode 22 Desember 2011 sampai dengan 1 Desember 2012.

Medium Term Notes I Verena Multi Finance Tahun 2011 (MTN)

Pada tanggal 14 Desember 2011, VMF menerbitkan MTN dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% per tahun dengan jumlah pokok sebesar Rp 200.000 juta dengan cara penawaran penempatan terbatas dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2014.

Surat utang jangka menengah ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan investasi neto sewa pembiayaan yang dimiliki VMF dengan jumlah jaminan sebesar Rp 50 miliar pada tanggal emisi, Rp 125 miliar pada satu bulan sejak tanggal emisi, Rp 200 miliar atau 100% dari nilai pokok MTN setelah 2 bulan sejak tanggal emisi (Catatan 13 dan 14).

VMF wajib menambah jaminan jika hasil pemeringkatan dari Pefindo mengalami penurunan, dengan perincian sebagai berikut:

Peringkat	Jaminan
id A-	110% dari jumlah pokok MTN
id BBB+	120% dari jumlah pokok MTN
id BBB	125% dari jumlah pokok MTN

Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 15 Maret 2012 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 15 Desember 2014.

Berdasarkan surat PT Pefindo No.1607/PEF-Dir/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011, peringkat MTN I adalah idA (*Single A*) untuk periode 22 Desember 2011 sampai dengan 1 Desember 2012.

Wali amanat untuk penerbitan MTN ini adalah Bank Sinarmas. VMF telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal MTN melalui KSEI sesuai jadwal.

Bank Panin Syariah (BPS)

Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank

Merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh BPS yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dengan akad *mudharabah*.

23. PINJAMAN YANG DITERIMA

Merupakan pinjaman yang diterima Bank dan entitas anak dalam mata uang Rupiah dan valuta asing dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni 2012		
	Jangka waktu	Tingkat bunga rata-rata per tahun	Jumlah
			Rp Juta
Pihak ketiga			
Bank			
Rupiah			
Bank Indonesia	3 - 20 tahun	7,00%	35
Pinjaman dari Departemen Keuangan Republik Indonesia	12 tahun	-	17
Sub jumlah			52
Dollar Amerika Serikat			
Pinjaman dari bank lain	3 bulan - 3 tahun	1,56%	1.314.950
Pinjaman dari lembaga keuangan non bank	5 tahun	LIBOR 6 bulan + 3,60%	279.425
	7 tahun	LIBOR 6 bulan + 3%	234.683
Sub jumlah			1.829.110
Clipan			
Rupiah			
PT Bank Central Asia	3 tahun	10,36%	177.359
PT Bank Negara Indonesia	1 - 3 tahun	10,33%	123.318
PT Bank Danamon Indonesia	3 tahun	10,77%	122.919
PT Bank Mandiri	2 - 3 tahun	10,68%	105.246
PT Bank International Indonesia	3 tahun	10,75%	79.993
PT Bank Permata	3 tahun	10,47%	58.312
PT Bank ICBC Indonesia	3 tahun	10,21%	49.829
PT Bank Hana	3 tahun	11,00%	35.600
PT Bank Victoria International	3 tahun	10,39%	21.863
PT Bank CIMB Niaga	3 tahun	11,00%	6.645
VMF			
Rupiah			
PT Bank Negara Indonesia	1 tahun	11,125%	465.393
PT Bank Permata	1 tahun	10,50%	112.624
PT Bank Resona Perdania	3 - 4 tahun	5,00%	44.730
PT Bank Sinarmas	3 tahun	13,00%	20.385
PT Bank ICBC Indonesia	3 tahun	11,50%	16.319
Jumlah			3.269.645

	31 Desember 2011		
	Jangka waktu	Tingkat bunga rata-rata per tahun	Jumlah
			Rp Juta
Pihak ketiga			
Bank			
Rupiah			
Bank Indonesia	3 - 20 tahun	7,00%	35
Pinjaman dari Departemen Keuangan Republik Indonesia	12 tahun	-	17
Sub jumlah			52
Dollar Amerika Serikat			
Pinjaman dari bank lain	3 bulan - 3 tahun	1,56%	838.744
Pinjaman dari lembaga keuangan non bank	5 tahun	LIBOR 6 bulan + 3,60%	270.819
	7 tahun	LIBOR 6 bulan + 3%	225.120
Sub jumlah			1.334.735
Clipan			
Rupiah			
PT Bank Central Asia	3 tahun	10,00%	226.071
PT Bank Negara Indonesia	1 - 3 tahun	10,00%	221.423
PT Bank Danamon Indonesia	1 - 3 tahun	10,95%	161.147
PT Bank Mandiri	1 - 3 tahun	10,92%	148.210
PT Bank International Indonesia	3 tahun	11,00%	104.355
PT Bank Permata	3 tahun	11,00%	74.995
PT Bank ICBC Indonesia	3 tahun	10,00%	62.395
PT Bank Hana	3 tahun	11,00%	46.992
PT Bank Victoria International	3 tahun	10,00%	28.123
PT Bank CIMB Niaga	3 tahun	11,00%	8.302
PT Bank Capital	2 tahun	10,00%	2.500
VMF			
Rupiah			
PT Bank Negara Indonesia	1 tahun	11,00%	476.386
PT Bank Resona Perdania	3 - 4 tahun	5,00%	67.202
PT Bank ICBC Indonesia	3 tahun	11,50%	21.319
PT Bank Sinarmas	3 tahun	12,00%	1.000
Jumlah			2.985.155

	31 Desember 2010		
	Jangka waktu	Tingkat bunga rata-rata per tahun	Jumlah
			Rp Juta
Pihak ketiga			
Bank			
Rupiah			
Bank Indonesia	3 - 20 tahun	7,01%	51
Pinjaman dari Departemen Keuangan Republik Indonesia	12 tahun	-	44
Sub jumlah			95
Dollar Amerika Serikat			
Pinjaman dari bank lain	3 bulan - 3 tahun	1,56%	1.802.000
Pinjaman dari lembaga keuangan non bank	5 tahun	LIBOR 6 bulan + 3,60%	270.300
	5 tahun	LIBOR 6 bulan + 2,60%	178.632
Sub jumlah			2.251.027
Clipan			
Rupiah			
PT Bank Negara Indonesia	1 - 4 tahun	12,50%	217.234
PT Bank Central Asia	1 - 3 tahun	13,50%	151.567
PT Bank ICBC	3 tahun	10,50%	96.226
PT Bank Victoria International	3 tahun	11,00%	52.727
PT Bank International Indonesia	3 tahun	10,50%	29.928
PT Bank Hana	3 tahun	11,00%	25.306
PT Bank Permata	3 tahun	10,75%	16.410
PT Bank Sinarmas	2 tahun	10,50%	3.812
PT Bank Mandiri	1 - 3 tahun	13,00%	827
VMF			
Rupiah			
PT Bank Negara Indonesia	1 tahun	14,50%	544.166
PT Bank Resona Perdania	3 tahun	5,00%	100.553
PT Bank Sinarmas	1 tahun	13,00%	49.577
PT Bank Victoria International	1 tahun	13,50%	22.355
PT Bank Royal Indonesia	1 tahun	12,00%	11.550
PT Bank Index Selindo	3 tahun	13,00%	4.421
PT Bank Windu Kentjana International	3 tahun	13,00%	3.500
PT BCA Finance	2 - 3 tahun	11,50%	1.203
Jumlah			3.582.389

	31 Desember 2009		
	Jangka waktu	Tingkat bunga rata-rata per tahun	Jumlah
			Rp Juta
Pihak ketiga			
Bank			
Rupiah			
Bank Indonesia	3 - 20 tahun	7,03%	72
Pinjaman dari Departemen Keuangan Republik Indonesia	12 tahun	-	53
Sub jumlah			125
Dollar Amerika Serikat			
Pinjaman dari bank lain	3 bulan - 3 tahun	1,18%	469.750
Pinjaman dari lembaga keuangan non bank	5 tahun	LIBOR 6 bulan + 2,60%	187.900
	5 tahun	LIBOR 6 bulan + 3,60%	281.850
Sub jumlah			939.625
Clipan			
Rupiah			
PT Bank Central Asia	1 - 2 tahun	10,63%	79.056
PT Bank Victoria International	3 tahun	12,13%	49.319
PT Bank Windu Kentjana International	3 tahun	13,00%	47.702
PT Bank Mandiri	1 - 2 tahun	11,39%	27.040
PT Bank Sinarmas	2 tahun	10,50%	14.499
VMF			
Rupiah			
PT Bank Negara Indonesia	1 tahun	13,84%	392.218
PT Bank Resona Perdania	3 tahun	SBI + 3,75%	42.729
PT Bank Victoria International	1 tahun	14,23%	36.158
PT BCA Finance	2 - 3 tahun	11,50%	3.572
Jumlah			1.631.918

	1 Januari 2009/31 Desember 2008		
	Jangka waktu	Tingkat bunga rata-rata per tahun	Jumlah
			Rp Juta
Pihak berelasi			
Bank			
Dollar Amerika Serikat			
Pinjaman dari bank lain	3 bulan	4,32%	545.000
Pihak ketiga			
Bank			
Rupiah			
Bank Indonesia	3 - 20 tahun	6,91%	115
Pinjaman dari Departemen Keuangan Republik Indonesia	12 tahun	-	79
			194
Dollar Amerika Serikat			
Pinjaman dari bank lain	3 - 6 bulan	4,85%	1.580.500
Pinjaman dari lembaga keuangan non bank	5 tahun	LIBOR 6 bulan + 2,6%	218.000
Sub jumlah			1.798.694
Clipan			
Rupiah			
PT Bank Central Asia	1 - 3 tahun	10,99%	179.056
PT Bank Mandiri	4,5 tahun	12,32%	166.754
PT Bank Victoria International	1 - 3 tahun	11,00%	25.278
PT Bank Sinarmas	1 - 3 tahun	10,50%	24.122
VOF			
Rupiah			
PT Bank Negara Indonesia	1 tahun	15,12%	361.527
PT Bank Sinarmas	1 tahun	11,00%	40.000
PT Bank Resona Perdania	3 tahun	SBI+3,75%	35.781
PT Bank Akita	1 tahun	14,02%	5.744
PT Bank Victoria International	1 tahun	17,00%	5.516
PT BCA Finance	3 tahun	11,75%	4.131
Jumlah			3.191.603

Bank

a. Pinjaman dari Bank Indonesia merupakan kredit likuiditas dalam rangka Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS), Kredit Koperasi Kepada Para Anggota (KKPA) dan pinjaman dalam rangka *Agricultural Financing Project* (AFP).

b. Pinjaman dari Departemen Keuangan Republik Indonesia merupakan pinjaman untuk KPRS.

c. Rincian pinjaman dari bank lain dalam Dollar Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2012				
	Jumlah fasilitas		Jatuh tempo	Tingkat bunga rata-rata per tahun	Jumlah Rp Juta
Pihak ketiga					
Barclays Bank, London - Cayman Islands	USD	50.000.000	19 April 2014	1,37%	469.625
JP Morgan Bank, Singapura	USD	20.000.000	30 Nopember 2012	2,04%	187.850
Citibank NA, New York	USD	15.000.000	16 Juli 2012	1,57%	140.887
Citibank, Jakarta	USD	10.000.000	13 Juli 2012	2,39%	93.925
Standard Chartered BHD, Kuala Lumpur	USD	10.000.000	14 Agustus 2012	1,67%	93.925
Wells Fargo Bank, Miami	USD	10.000.000	19 Oktober 2012	1,93%	93.925
Standard Chartered BHD, Kuala Lumpur	USD	10.000.000	22 Oktober 2012	1,93%	93.925
Bank of New York Mellon, Singapura	USD	7.500.000	9 Agustus 2012	1,70%	70.444
Citibank NA, New York	USD	7.500.000	18 Desember 2012	1,79%	70.444
Jumlah					1.314.950

	31 Desember 2011				
	Jumlah fasilitas		Jatuh tempo	Tingkat bunga rata-rata per tahun	Jumlah Rp juta
Pihak ketiga					
Barclays Bank, London - Cayman Islands	USD	50.000.000	19 April 2014	1,30%	453.375
Bank of New York Mellon, Singapura	USD	15.000.000	25 Mei 2012	1,97%	136.013
Citibank, Jakarta	USD	10.000.000	28 Pebruari 2012	1,76%	90.675
Standard Chartered, New York	USD	10.000.000	20 Maret 2012	1,64%	90.675
Bank of New York Mellon, Singapura	USD	7.500.000	15 Juni 2012	2,12%	68.006
Jumlah					838.744

	31 Desember 2010				
	Jumlah fasilitas		Jatuh tempo	Tingkat bunga rata-rata per tahun	Jumlah Rp juta
Pihak ketiga					
Ing Bank NV, Amsterdam	USD	70.000.000	1 Maret 2011	1,05%	630.700
Barclays Bank, London - Cayman Island	USD	50.000.000	19 April 2014	1,19%	450.500
Citibank, Jakarta	USD	20.000.000	3 Maret 2011	0,95%	180.200
Standard Chartered Bank, New York	USD	20.000.000	22 Maret 2011	1,10%	180.200
Wells Fargo Bank, North Carolina	USD	20.000.000	22 Pebruari 2011	0,93%	180.200
Bank of New York Mellon, Singapura	USD	10.000.000	22 Maret 2011	0,95%	90.100
Citibank, Jakarta	USD	10.000.000	22 Maret 2011	0,95%	90.100
Jumlah					1.802.000

	31 Desember 2009				
	Jumlah fasilitas		Jatuh tempo	Tingkat bunga rata-rata per tahun	Jumlah Rp juta
Pihak ketiga					
Barclays Bank, London - Cayman Islands	USD	50.000.000	19 April 2014	1,18%	469.750

	1 Januari 2009/31 Desember 2008				
	Jumlah fasilitas		Jatuh tempo	Tingkat bunga rata-rata per tahun	Jumlah Rp Juta
Pihak berelasi					
Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapura - Cayman Islands	USD	50.000.000	9 Maret 2009	4,32%	545.000
Pihak ketiga					
Barclays Bank, London - Cayman Islands	USD	50.000.000	19 April 2014	5,45%	545.000
Wachovia Bank, Miami - Cayman Islands	USD	20.000.000	20 Pebruari 2009	3,85%	218.000
JP Morgan Chase, Singapura - Cayman Islands	USD	20.000.000	25 Maret 2009	5,10%	218.000
Bank of New York, Singapura - Cayman Islands	USD	10.000.000	9 Januari 2009	6,35%	109.000
ING Bank, Brussels - Cayman Islands	USD	10.000.000	25 Pebruari 2009	3,87%	109.000
Credit Suisse, Zurich - Cayman Islands	USD	10.000.000	18 Maret 2009	4,15%	109.000
Bank of New York, Singapura - Cayman Islands	USD	10.000.000	23 Maret 2009	4,50%	109.000
Wachovia Bank, Miami - Cayman Islands	USD	10.000.000	30 Maret 2009	3,47%	109.000
Standard Chartered, Singapura - Cayman Islands	USD	5.000.000	29 Januari 2009	5,59%	54.500
Sub Jumlah					1.580.500
Jumlah					2.125.500

Pinjaman yang diterima dari Barclays Bank, London pada tahun 2012, 2011, 2010 dan 2009 dijamin dengan Obligasi Pemerintah Indonesia dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (Catatan 9).

d. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Non Bank

Pada tanggal 18 Pebruari 2011, Bank memperoleh pinjaman luar negeri jangka panjang dari Societe De Promotion Et De Participation Pour La Cooperation Economique S.A (PROPARCO) sebesar US$ 25 juta, jatuh tempo 30 April 2018 dengan tingkat suku bunga LIBOR 6 bulan plus 3% per tahun. Perolehan pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sesuai dengan Surat No. 028/DIR/KBI/11 tanggal 27 Januari 2011.

Pada tanggal 22 April 2009, Bank memperoleh pinjaman luar negeri jangka panjang dari DEG-Deutsche Investitionsund Entwicklungsgesellschaft mbH yang merupakan anggota dari KFW Bankengrouppe sebesar US$ 30 juta, jatuh tempo 29 Desember 2014 dengan tingkat suku bunga LIBOR 6 bulan plus 3,6% per tahun. Perolehan pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sesuai dengan surat No. 11/85/DInt tanggal 2 April 2009.

Pada tanggal 14 Maret 2006, Bank memperoleh pinjaman luar negeri jangka panjang dari DEG-Deutsche Investitionsund Entwicklungsgesellschaft mbH yang merupakan anggota dari KFW Bankengrouppe sebesar US$ 20 juta, jatuh tempo 15 Maret 2011 dengan tingkat suku bunga LIBOR 6 bulan plus 2,6% per tahun. Perolehan pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sesuai dengan surat No. 8/51/DInt tanggal 2 Maret 2006.

Bank telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga, pokok pinjaman dan pelunasan pinjaman sesuai dengan perjanjian.

Clipan

a. Bank Central Asia (BCA)

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No.1259/GBK/2006 tanggal 20 Oktober 2006 dari BCA, Clipan mendapatkan fasilitas kredit *Installment Loan* 2 dengan jumlah maksimum Rp 100.000 juta untuk kebutuhan modal kerja dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan suku bunga tetap 13,5% per tahun. Jaminan berupa investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar 105% dari jumlah pokok fasilitas kredit (Catatan 13 dan 14). Fasilitas pinjaman ini telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 26 Juni 2010. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008, saldo fasilitas *Installment Loan* 2 masing-masing sebesar Rp 7.167 juta dan Rp 40.500 juta.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No. 1585/GBK/2007 tanggal 23 Oktober 2007 dari BCA, Clipan mendapatkan fasilitas kredit *Installment Loan* 3 dengan jumlah maksimum Rp 200.000 juta untuk kebutuhan modal kerja dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan suku bunga tetap 10,5% per tahun. Jaminan berupa investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar 105% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit (Catatan 13 dan 14). Fasilitas ini telah jatuh tempo pada tanggal 28 Juli 2011. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008 saldo fasilitas *Installment Loan* 3 masing-masing sebesar Rp 9.111 juta, Rp 71.889 juta dan Rp 138.556 juta.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) No.30317/GBK/2010 tanggal 12 Mei 2010 dari BCA dan sesuai dengan Akte Perubahan Keempat atas Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 17 Mei 2010 dari Notaris Arnasya A. Pattinama, SH, notaris di Jakarta, Clipan memperoleh tambahan fasilitas kredit *Installment Loan* 4 dengan jumlah maksimum Rp 150.000 juta untuk kebutuhan modal kerja dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan suku bunga 11,00% *flat*. Selain itu, Clipan juga memperoleh fasilitas kredit dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan jumlah maksimum Rp 25.000 juta untuk kebutuhan modal kerja dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan suku bunga 10,50% *floating*. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, saldo fasilitas *Installment Loan* 4 masing-masing sebesar Rp 64.583 juta, Rp 88.889 juta dan Rp 138.889 juta.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No. 30303/GBK/2011 tanggal 13 Juli 2011, Clipan memperoleh persetujuan permohonan tambahan PRK menjadi Rp 50.000 juta dengan bunga 10,00 % *floating* per tahun dan penambahan fasilitas *installment Loan* 5 sebesar Rp 150.000 juta untuk kebutuhan modal kerja pembiayaan Clipan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan suku bunga 10,50 % tetap per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011, saldo fasilitas *Installment Loan* 5 sebesar Rp 113.333 juta dan Rp 138.056 juta, sedangkan saldo PRK pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar nihil dan Rp 4.194 juta pada tanggal 31 Desember 2010.

Berdasarkan Surat No. 40121/GBK/2012 tanggal 9 Mei 2012, Clipan memperoleh persetujuan perpanjangan batas waktu penarikan atau penggunaan Fasilitas Kredit Lokal/Pinjaman Rekening Koran sampai tanggal 17 Agustus 2012.

Clipan memberikan jaminan berupa investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar 105% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit (Catatan 13 dan 14).

Clipan diwajibkan antara lain, menjaga, memelihara dan mempertahankan nilai/harga dari agunan tidak kurang dari 105% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit yang telah ditarik dan belum dibayar kembali, perbandingan antara seluruh liabilitas terhadap total ekuitas *(debt to equity ratio)* tidak lebih dari 8:1.

Jumlah biaya transaksi yang belum diamortisasi yang terkait dengan pinjaman dari BCA pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 557 juta, Rp 874 juta dan Rp 627 juta.

b. Bank Negara Indonesia (BNI)

Pada tanggal 30 Nopember 2010, Clipan memperoleh fasilitas kredit dalam bentuk Pinjaman Tetap untuk Modal Kerja dengan jangka waktu 1 - 4 tahun dengan jumlah maksimum sebesar Rp 300.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,5% per tahun untuk tenor 1 - 3 tahun dan 13,5% per tahun untuk tenor 4 tahun. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, saldo Pinjaman Tetap sebesar Rp 123.780 juta, Rp 222.255 juta dan Rp 218.145 juta.

Clipan memberikan jaminan fidusia berupa piutang sewa pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar 105% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit (Catatan 13).

Berdasarkan surat dari BNI No. KSN/2/8160 tanggal 8 Desember 2010, terdapat penurunan tingkat suku bunga menjadi 10,25% per tahun untuk tenor 1 dan 2 tahun, 10,50% per tahun untuk tenor 3 tahun dan 12,50% per tahun untuk tenor 4 tahun.

Berdasarkan surat dari BNI No. SLN/5/752 tanggal 24 Agustus 2011 bahwa tingkat suku bunga menjadi 10,00% per tahun untuk tenor 1 - 3 tahun dan 12,50% per tahun untuk tenor 4 tahun.

Berdasarkan surat dari BNI No. SLN/5/267/R tanggal 27 Desember 2011, Clipan memperoleh perpanjangan sementara jangka waktu fasilitas kredit untuk 3 bulan sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012 dengan tingkat suku bunga 10,00 % untuk tenor 1 - 3 tahun dan 12,50 % untuk tenor 4 tahun. Perpanjangan fasilitas setelah periode tersebut masih dalam proses.

Jumlah biaya transaksi yang belum diamortisasi yang terkait dengan pinjaman dari BNI pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar Rp 462 juta, Rp 832 juta dan Rp 911 juta.

c. Bank Danamon Indonesia (Danamon)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 27 Januari 2011 dari Rismalena Kasri, SH, notaris di Jakarta, Clipan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka (*term loan*) sebesar Rp 200.000 juta dengan suku bunga 10,50%, 10,75% dan 11,00% per tahun, masing-masing untuk jangka waktu 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun. Berdasarkan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. 010/PP/KAB/CBD/I/2012 tanggal 27 Januari 2012, jangka waktu fasilitas kredit Angsuran Berjangka diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Januari 2013. Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011, saldo fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp 123.297 juta dan Rp 156.745 juta.

Berdasarkan surat No. 0107/CBD-FCS/0411 tanggal 6 April 2011 beserta adendumnya yang terakhir No. 0120/CBD-FCS/0411 tanggal 29 April 2011 dari Danamon terdapat perubahan ketentuan suku bunga fasilitas sebesar sebesar 10,75% per tahun untuk jangka waktu 3 tahun.

Berdasarkan akta Perjanjian Kredit No. 25 tanggal 21 Juni 2011, yang dibuat oleh notaris Risma Lena Kasri, SH, Clipan memperoleh fasilitas modal kerja (*working capital*) sebesar Rp 250.000 juta dengan suku bunga tetap untuk 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan pertama sebesar 9,50% per tahun. Fasilitas ini sudah dilunasi Clipan pada tanggal 23 Nopember 2011.

Berdasarkan Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan terhadap Perjanjian Kredit No. 284/PP&PWK/KB/CBD/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011, Danamon mengurangi fasilitas kredit menjadi Rp 50.000 juta dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,50 % per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2013. Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 saldo pinjaman sebesar nihil dan Rp 5.000 juta.

Clipan memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar 100% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit (Catatan 14).

Jumlah biaya transaksi yang belum diamortisasi yang terkait dengan pinjaman dari Danamon pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp 378 juta dan Rp 598 juta.

d. Bank Mandiri (Mandiri)

Pada tanggal 25 Januari 2006, Clipan memperoleh fasilitas kredit dengan jumlah maksimum sebesar Rp 200.000 juta dari Mandiri dalam bentuk fasilitas Kredit Modal Kerja *Revolving* dengan *aflopend per batch disbursement* sebagai tambahan modal kerja untuk pembiayaan alat berat dan/atau kendaraan roda empat merk Mitsubishi.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No. CBC.OTO/105/2006 jangka waktu fasilitas kredit diperpanjang menjadi 4,5 tahun terhitung sejak 27 Januari 2006 sampai dengan 26 Juli 2010. Tingkat bunga per tahun untuk kendaraan (mobil) dengan jangka waktu 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun masing-masing sebesar 15,00%, 15,25% dan 15,50%. Sedangkan tingkat bunga per tahun untuk alat berat dengan jangka waktu 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun masing-masing sebesar 15,50%, 15,75% dan 16,00%. Perubahan suku bunga tersebut berlaku untuk pencairan terhitung sejak 22 Nopember 2006.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja No. CBC.OTO/015/X/2007 tanggal 4 Oktober 2007 jangka waktu fasilitas pembiayaan adalah 54 bulan terhitung mulai tanggal 27 Juli 2007 sampai dengan 26 Januari 2012 dengan rincian sebagai berikut :

a. Jangka waktu penarikan maksimum 18 (delapan belas) bulan sampai dengan tanggal 26 Januari 2009 dan dapat diperpanjang kembali.

b. Jangka waktu angsuran *end user*, maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kredit.

Berdasarkan Surat No. CBC.OTO/042/2007 tanggal 9 Oktober 2007, tingkat bunga per tahun untuk kendaraan (mobil) dan alat berat dengan jangka waktu 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun masing-masing sebesar 10,5%, 10,75% dan 11%. Perubahan suku bunga tersebut berlaku untuk pencairan terhitung sejak 10 Oktober 2007.

Berdasarkan surat No. CBC.OTO/773/VI/2008 tertanggal 12 Juni 2008, tingkat bunga per tahun dengan jangka waktu 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun masing-masing sebesar 12,75%, 13% dan 13,25%. Perubahan suku bunga tersebut berlaku untuk pencairan terhitung sejak 16 Juni 2008.

Berdasarkan surat No.CBC.OTO/1508/IX/2008 tertanggal 19 September 2008, tingkat bunga per tahun dengan jangka waktu 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun masing-masing sebesar 13,25%, 13,75% dan 14,50%. Perubahan suku bunga tersebut berlaku untuk pencairan terhitung sejak 1 Oktober 2008.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Akta Nomor 32 tanggal 14 April 2011, Mandiri memberikan fasilitas kredit KMK sebesar Rp 250.000 juta dengan tingkat bunga per tahun untuk jangka waktu 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun masing-masing sebesar 10,50%, 10,75% dan 11,00%. Jangka waktu kredit 54 bulan, terdiri dari jangka waktu penarikan 18 bulan dan jangka waktu angsuran maksimal 36 bulan.

Berdasarkan surat No. CBC.OTO/1252/2011 tanggal 1 Agustus 2011, tingkat suku bunga per tahun untuk jangka waktu 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun masing-masing sebesar 10,25%, 10,50% dan 10,75%. Perubahan suku bunga tersebut berlaku untuk pencairan terhitung sejak 2 Agustus 2011.

Berdasarkan surat No. CBC OTO/836/2012 tanggal 10 April 2012, tingkat suku bunga per tahun untuk jangka waktu 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun menjadi sebesar 10%. Perubahan suku bunga tersebut berlaku untuk pencairan terhitung sejak 11 April 2012.

Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008, saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp 105.643 juta, Rp 148.839 juta, Rp 828 juta, Rp 27.040 juta dan Rp 166.754 juta.

Clipan memberikan jaminan fidusia berupa investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar 111% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit (Catatan 13 dan 14).

Selama fasilitas kredit belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri, Clipan tidak diperkenankan melakukan tindakan sebagai berikut: memindahtangankan barang jaminan, melunasi utang Clipan kepada pemilik/pemegang saham, membagikan dividen lebih besar 50% dari laba 1 (satu) tahun sebelumnya, mengambil bagian dividen atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi serta tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan pengurus dan pemegang saham yang mewakili saham dan pengurus dari Bank.

Jumlah biaya transaksi yang belum diamortisasi yang terkait dengan pinjaman dari Mandiri pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010 sebesar Rp 397 juta, Rp 629 juta dan Rp 1 juta.

e. Bank International Indonesia (BII)

Pada tanggal 21 Desember 2010, Clipan memperoleh fasilitas kredit dalam bentuk Pinjaman Berjangka (PB) dengan jangka waktu 3 tahun dengan jumlah maksimum sebesar Rp 150.000 juta yaitu PB 1 (untuk pembiayaan otomotif) sebesar Rp 120.000 juta dan PB 2 (untuk pembiayaan alat berat) sebesar Rp 30.000 juta, dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun untuk piutang <= 1 tahun dan 10,75% per tahun untuk piutang > 1 tahun. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, saldo fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp 80.100 juta, Rp 104.533 juta dan Rp 30.000 juta.

Clipan memberikan jaminan fidusia berupa investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar 105% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit (Catatan 13 dan 14).

Jumlah biaya transaksi yang belum diamortisasi yang terkait dengan pinjaman pada BII pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 107 juta, Rp 178 juta dan Rp 72 juta.

f. Bank Permata (Permata)

Berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman atas Piutang Pembiayaan Kendaraan No. 30 tanggal 28 Juli 2010 yang disahkan oleh Sjarmeini S. Chandra, SH, di Jakarta, Clipan memperoleh fasilitas kredit *Consumer Asset Purchase* (CAPR) dari Permata dengan jumlah maksimum Rp 100.000 juta dengan tenor pembiayaan 36 bulan dengan tingkat bunga 10,75% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, saldo fasilitas tersebut sebesar Rp 58.549 juta, Rp 75.268 juta dan Rp 16.491 juta.

Berdasarkan surat No. 087/PB/Multifinance-FI/II/11 tanggal 9 Pebruari 2011 dari Permata terdapat perubahan tingkat suku bunga *receivable financing* menjadi sebesar 11% per tahun untuk tenor 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun.

Berdasarkan surat No. 125/PB/Multifinance-FI/III/11 tanggal 15 Maret 2011 dari Permata terdapat perubahan tingkat suku bunga *receivable financing*, menjadi sebesar 10,75% untuk tenor 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 25 tanggal 8 Agustus 2011 dihadapan Sjarmeini S. Chandra, S.H., notaris di Jakarta, Clipan memperoleh Fasilitas *Money Market Line* (MM) sebesar Rp 200.000 juta dengan tenor pembiayaan sampai dengan 30 Nopember 2011 atau maksimal 6 (enam) bulan dengan tingkat bunga tetap 9,50% per tahun. Pinjaman ini telah dilunasi oleh Clipan pada tanggal 26 Nopember 2011.

Clipan memberikan jaminan fidusia berupa investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar 100% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit (Catatan 13 dan 14).

Berdasarkan Surat Penawaran Kredit No. 007/BP/CRC-WB/I/2012 dari Permata tanggal 16 Januari 2012 dan Akta No. 62 tanggal 24 Pebruari 2012 di hadapan Notaris Sjarmeini S. Chandra, SH, notaris di Jakarta, Clipan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman atas pembiayaan kendaraan sebesar Rp 200.000 juta sehingga fasilitas pinjaman meningkat menjadi Rp. 300.000 juta dengan tenor pembiayaan maksimum 36 bulan.

Berdasarkan surat No. 130A/PB/MF-FI/II/12 tanggal 28 Pebruari 2012 dari Permata terdapat perubahan tingkat suku bunga pinjaman menjadi sebesar 9,75% untuk tenor 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun.

Clipan memberikan jaminan fidusia berupa investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar 100% dari jumlah hutang pokok fasilitas kredit (Catatan 13 dan 14).

Jumlah biaya transaksi yang belum diamortisasi yang terkait dengan pinjaman dari Permata pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 237 juta, Rp 273 juta dan Rp 81 juta.

g. Bank ICBC Indonesia (ICBC)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 157 tanggal 21 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., notaris di Jakarta, Clipan memperoleh fasilitas Pinjaman Tetap untuk modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar Rp 53.000 juta dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun (*floating*). Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, saldo pinjaman tetap masing-masing sebesar Rp 20.611 juta, Rp 29.444 juta dan Rp 47.111 juta.

Berdasarkan surat No. 445/MKT/ICBC-CBII/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 dari ICBC, Clipan memperoleh tambahan fasilitas Pinjaman Tetap dengan jumlah maksimum sebesar Rp 50.000 juta dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan tingkat bunga sebesar 10% (*floating*). Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, saldo pinjaman atas tambahan fasilitas ini sebesar Rp 25.000 juta, Rp 33.333 juta dan 50.000 juta.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 137 tertanggal 25 Juli 2011, Clipan memperoleh fasilitas pinjaman tetap (*Demand Loan*) sebesar Rp 100.000 juta untuk jangka waktu 4 (empat) bulan dengan suku bunga 9,50 % per tahun *floating*. Fasilitas ini telah dilunasi pada tanggal 28 Nopember 2011.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 10 Januari 2012, Clipan memperoleh fasilitas PTD (Demand Loan) dari ICBC sebesar Rp 100.000 juta dengan tenor 36 (tiga puluh enam) bulan dan suku bunga *floating* 10% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2012, saldo pinjaman atas tambahan fasilitas ini sebesar Rp 4.444 juta.

Clipan memberikan jaminan fidusia berupa investasi neto sewa pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar 105% dari jumlah hutang pokok fasilitas kredit (Catatan 13).

Jumlah biaya transaksi yang belum diamortisasi yang terkait dengan pinjaman dari ICBC pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 226 juta, Rp 382 juta dan Rp 885 juta .

h. Bank Hana (Hana)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 23 tanggal 7 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, SH, MKn, notaris di Jakarta, Clipan memperoleh fasilitas pinjaman angsuran dengan jumlah maksimum sebesar Rp 30.000 juta dengan jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga sebesar 11,00% per tahun (*fixed* 1 tahun pertama dan *floating* tahun kedua dan ketiga). Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, saldo fasilitas pinjaman berjangka masing-masing sebesar Rp 10.804 juta, Rp 15.949 juta dan 25.407 juta.

Berdasarkan surat No. 23/504/PN/KRED tanggal 15 Maret 2011, Clipan memperoleh penambahan fasilitas pinjaman angsuran dengan jumlah maksimum sebesar Rp 40.000 juta dengan tingkat suku bunga 11,00% per tahun untuk tenor 3 tahun. Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011, saldo fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp 24.883 juta dan Rp 31.196 juta.

Berdasarkan surat No. 24/0852/PN/KRED tanggal 9 April 2012 terdapat penurunan tingkat suku bunga pinjaman menjadi sebesar 10% per tahun efektif *floating*.

Clipan memberikan jaminan fidusia berupa investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar 100% dari jumlah hutang pokok fasilitas kredit (Catatan 13 dan 14).

Jumlah biaya transaksi yang belum diamortisasi yang terkait dengan pinjaman dari Hana pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 87 juta, Rp 153 juta dan Rp 101 juta.

i. Bank Victoria International (Victoria)

Pada tanggal 29 April 2008, Clipan memperoleh fasilitas kredit dalam bentuk Pinjaman Tetap dengan angsuran *revolving* dengan tenor 1, 2 dan 3 tahun dengan jumlah maksimum sebesar Rp 30.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% per tahun. Pemberian kredit ini maksimal 95% dari investasi neto sewa pembiayaan yang dijaminkan (Catatan 13).

Berdasarkan surat No. 045/SKM-KSP/VIC/XII/09 tertanggal 8 Desember 2009, Clipan memperoleh penambahan fasilitas kredit pinjaman tetap dengan jumlah maksimum menjadi sebesar Rp 55.000 juta dengan tingkat suku bunga 12,00% per tahun *(floating)* untuk tenor 3 tahun dan fasilitas pinjaman rekening koran dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 5.000 juta dengan tingkat suku bunga 12% per tahun, keduanya memiliki jangka waktu fasilitas 1 (satu) tahun sejak pengikatan perjanjian kredit dan dapat diperpanjang. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008, saldo fasilitas pinjaman tetap sebesar Rp 21.928 juta, Rp 28.228 juta, Rp 52.931 juta, Rp 49.319 juta dan Rp 25.278 juta sedangkan fasilitas pinjaman rekening koran bersaldo nihil.

Berdasarkan surat No. 047/SKM-KSP/VIC/XII/09 tertanggal 23 Desember 2009, tingkat suku bunga per tahun sebesar 11,75% untuk penarikan fasilitas kredit *fixed loan* yang dilakukan dari tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.

Berdasarkan surat No. 002/SKM-KSP/VIC/III/10 tertanggal 10 Maret 2010, tingkat suku bunga per tahun sebesar 11,50%.

Berdasarkan surat No. 024/KSM-KSP/VIC/XI/10 tanggal 23 Nopember 2010, Clipan memperoleh perpanjangan fasilitas kredit sebagai berikut :

- Pinjaman Kredit Modal Kerja PTDA *revolving* dengan tenor 1, 2 dan 3 tahun dengan jumlah pinjaman maksimum Rp 55.000 juta dengan tingkat bunga ditentukan pada saat pencairan (pencairan dilakukan dengan tingkat bunga 10,50%);

- Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan jumlah pinjaman maksimum Rp 5.000 juta dengan tingkat bunga 12,00% per tahun.

Berdasarkan surat No. 055/KSM-KSP/VIC/XI/II tanggal 30 Nopember 2011, Clipan memperoleh perpanjangan fasilitas kredit sebagai berikut :

- Pinjaman Kredit Modal Kerja PTDA *revolving* dengan tenor 1, 2 dan 3 tahun dengan jumlah pinjaman maksimum Rp 55.000 juta dengan tingkat bunga ditentukan pada saat pencairan (pencairan dilakukan dengan tingkat bunga 10,00%);

- Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan jumlah pinjaman maksimum Rp 5.000 juta dengan tingkat bunga 10,00% per tahun.

Jangka waktu kedua fasilitas kredit tersebut berlaku sampai dengan 17 Desember 2012.

Clipan memberikan jaminan fidusia berupa investasi neto sewa pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar 105% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit (Catatan 13).

Jumlah biaya transaksi yang belum diamortisasi yang terkait dengan pinjaman dari Victoria pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010 sebesar Rp 65 juta, Rp 105 juta dan Rp 204 juta.

j. Bank CIMB Niaga (CIMB Niaga)

Berdasarkan perjanjian kredit No. 417/CB/JKT/2010 tanggal 29 Desember 2010, Clipan mendapatkan fasilitas kredit berupa Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) dari CIMB Niaga dengan jumlah maksimum Rp 100.000 juta dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan tingkat bunga tetap 11,00% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011, saldo PTK sebesar Rp 6.666 juta dan Rp 8.333 juta.

Berdasarkan surat No. 5582/CBGIII/XII/11 tanggal 12 Desember 2011 tingkat suku bunga per tahun menjadi sebesar 10,75% *fixed* 3 tahun.

Clipan memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar 110% dari jumlah hutang pokok fasilitas kredit (Catatan 14).

Jumlah biaya transaksi yang belum diamortisasi yang terkait dengan pinjaman dari CIMB Niaga pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp 21 juta dan Rp 31 juta.

k. Bank Capital Indonesia (Capital)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 02 tanggal 14 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Arman Lany, SH, notaris di Jakarta, Clipan mendapatkan fasilitas kredit sebagai berikut:

- Pinjaman Rekening Koran dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 5.000 juta dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang berakhir tanggal 14 April 2011. Tingkat bunga sebesar 12,50% per tahun.

- Pinjaman Angsuran Berjangka dengan jumlah pokok yang tidak melebihi Rp 45.000 juta dengan jangka waktu pinjaman 12 (dua belas) bulan yang berakhir tanggal 14 April 2011. Tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun.

Berdasarkan surat dari Bank Capital No. 032/MKT/KP/III/11 tanggal 31 Maret 2011, Clipan memperoleh perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit sebagai berikut:

- Pinjaman Rekening Koran dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 5.000 juta dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan diperpanjang sampai dengan 14 April 2012. Tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun. Saldo pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar nihil.

- Pinjaman Angsuran Berjangka dengan jumlah pokok yang tidak melebihi Rp 45.000 juta diubah menjadi Pinjaman Aksep *Money Market* I sebesar Rp 40.000 juta dan diperpanjang sampai dengan 14 April 2012. Tingkat bunga 10,50% per tahun. Saldo pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar nihil.

- Pemberian Pinjaman Aksep *Money Market* II sebesar Rp 15.000 juta dengan jangka waktu pinjaman 12 (dua belas) bulan yang berakhir tanggal 14 April 2012. Tingkat bunga sebesar 10,50% per tahun. Saldo pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 2.500 juta.

Berdasarkan addendum kedua akta No. 12 tanggal 20 Juni 2012 Clipan memperoleh persetujuan perpanjangan fasilitas sebagai berikut:

- Pinjaman Aksep *Money Market* I sebesar Rp 40.000 juta diperpanjang sampai dengan tanggal 14 April 2013, dan tingkat suku bunga negosiasi per transaksi. Saldo pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar nihil.

- Pinjaman Rekening Koran dengan jumlah *plafond* Rp 5.000 juta dan tingkat suku bunga 10,50% per tahun, yang diperpanjang sampai dengan tanggal 14 April 2013. Saldo pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar nihil.

- Pinjaman Aksep *Money Market* II sebesar Rp 15.000 juta diperpanjang sampai dengan tanggal 14 April 2013 dan tingkat suku bunga negosiasi per transaksi. Saldo pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar nihil dan Rp 2.500 juta.

Clipan memberikan jaminan fidusia berupa investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar 105% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit (Catatan 13 dan 14).

Jumlah biaya transaksi yang belum diamortisasi yang terkait dengan pinjaman dari Capital pada tanggal 2012 dan 2011 adalah nihil.

l. Bank Sinarmas (Sinarmas)

Pada tanggal 21 Januari 2008, Clipan memperoleh fasilitas kredit dalam bentuk fasilitas *term loan* dengan jumlah maksimum sebesar Rp 30.000 juta dengan batas waktu penarikan 6 (enam) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit. Fasilitas kredit jatuh tempo pada tanggal 30 April 2011. Tingkat bunga tetap sebesar 10,50% untuk tahun pertama sedangkan untuk tahun kedua dan ketiga akan ditentukan kemudian. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008, saldo fasilitas pinjaman tetap sebesar Rp 3.817 juta, Rp 14.499 juta dan Rp 24.122 juta. Fasilitas kredit jatuh tempo pada tanggal 30 April 2011 dan telah dilunasi.

Clipan memberikan jaminan fidusia berupa investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar 105% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit (Catatan 13 dan 14).

Jumlah biaya transaksi yang belum diamortisasi yang terkait dengan pinjaman dari Sinarmas pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 5 juta.

m. Bank Windu Kentjana International

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dengan memakai Jaminan No. 19 tanggal 7 Oktober 2009 yang disahkan oleh Notaris Sugito Tedjamulja, S.H., di Jakarta, Clipan memperoleh fasilitas kredit dalam bentuk Pinjaman Tetap dengan jangka waktu 3 tahun dengan jumlah maksimum sebesar Rp 50.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 13,00% per tahun. Saldo pinjaman tetap pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 47.702 juta. Pada tanggal 18 Mei 2010, Clipan sudah melakukan pelunasan atas fasilitas tersebut.

Clipan memberikan jaminan fidusia berupa investasi neto sewa pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar 125% dari jumlah utang pokok fasilitas kredit (Catatan 13).

Clipan telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga, pokok pinjaman dan pelunasan pinjaman sesuai dengan perjanjian.

Verena Multi Finance (VMF)

a. Bank Negara Indonesia (Persero) (BNI)

Pada tanggal 22 Maret 2005 dan 12 Juni 2007, VMF memperoleh fasilitas kredit *channeling with recourse* masing-masing sebesar Rp 50.000 juta dan Rp 500.000 juta, di luar kredit konsumen kemitraan pola *channeling without recourse* sebesar Rp 100.000 juta. Fasilitas ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 9,50% - 12,75%, 12,25%, 12,00% - 17,00% dan 10,75% - 17,00% masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 and 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008. Pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen VMF sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman (Catatan 14).

Perjanjian kerjasama ini telah diubah beberapa kali sehubungan dengan perpanjangan atas fasilitas pinjaman tersebut, terakhir pada tanggal 23 Desember 2010 fasilitas kredit yang diperoleh berubah menjadi fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp 530 miliar dan jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2012. Jangka waktu penarikan pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan 15 Juli 2012 dan akan jatuh tempo dalam 48 bulan sejak pencairan kredit.

Berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut, VMF setuju untuk membuka rekening amanat (*escrow account*) pada BNI, dengan saldo sejumlah Rp 10 juta, Rp 1.374 juta dan Rp 6 juta masing-masing pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010 dan disajikan sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebagai bagian dari akun Aset Lain-lain (Catatan 18).

Sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama pembiayaan, VMF bertanggung jawab untuk, antara lain, melakukan penagihan, serta memelihara pencatatan dan penyimpanan dokumen-dokumen. Sebagai imbalannya, VMF diperbolehkan untuk membebankan suku bunga tertentu kepada pelanggan melebihi suku bunga yang dibayarkan kepada BNI. Berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut, VMF akan menanggung seluruh risiko kerugian yang terkait dengan pembiayaan yang diberikan sesuai dengan perjanjian tersebut dan membukukan piutang pembiayaan konsumen tersebut pada laporan keuangan VMF.

b. Bank Permata (Permata)

Pada tanggal 21 Desember 2011, VMF memperoleh fasilitas kredit konsumen kemitraan *channeling* sebesar Rp 100.000 juta. Suku bunga yang dikenakan adalah sebesar 10,50% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011, saldo fasilitas kredit konsumen kemitraan *channeling* masing-masing sebesar Rp 67.042 juta dan nihil. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen dan investasi neto sewa pembiayaan VMF sebesar 100% dari saldo pinjaman (Catatan 13 dan 14), dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2012.

Selain fasilitas kredit konsumen kemitraan *channeling*, VMF juga memperoleh fasilitas pinjaman tetap dari Permata sebesar Rp 50.000 juta. Suku bunga yang dikenakan adalah sebesar 10,50% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 saldo fasilitas pinjaman tetap masing-masing sebesar Rp 45.582 juta dan nihil. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen dan investasi neto sewa pembiayaan VMF sebesar 100% dari saldo pinjaman (Catatan 13 dan 14) dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2012.

Perjanjian pinjaman di atas mencakup persyaratan tertentu yang harus dipenuhi VMF. Pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011, VMF telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian di atas.

c. Bank Resona Perdania

Pada tanggal 4 Pebruari 2008, VMF mengadakan perjanjian kredit dengan Bank Resona Perdania dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sejumlah Rp 50.000 juta. Fasilitas ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 3,75% di atas suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pada saat penandatanganan perjanjian, dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen VMF kepada pihak ketiga minimal sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman (Catatan 14). Fasilitas ini akan digunakan untuk mendanai transaksi pembiayaan VMF dengan pelanggan dan jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2011 dan telah dilunasi.

Pada tanggal 27 Oktober 2009, VMF memperoleh tambahan fasilitas pinjaman sejumlah Rp 25 miliar. Fasilitas ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 5% di atas *Cost of Loanable Fund (COLF)*, dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen VMF kepada pihak ketiga minimal sebesar 110% dari saldo fasilitas pinjaman (Catatan 14). Fasilitas ini akan digunakan untuk mendanai transaksi pembiayaan VMF dengan pelanggan dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2012.

Pada tanggal 27 Januari 2010, VMF memperoleh tambahan fasilitas pinjaman sejumlah Rp 25.000 juta. Fasilitas ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 5% di atas *Cost of Loanable Fund (COLF)*, dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen VMF kepada pihak ketiga minimal sebesar 110% dari saldo fasilitas pinjaman (Catatan 14). Fasilitas ini akan digunakan untuk mendanai transaksi pembiayaan VMF dengan pelanggan dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2013.

Kemudian pada tanggal 24 Juni 2010 dan 26 Agustus 2010, VMF memperoleh tambahan fasilitas pinjaman masing-masing sejumlah Rp 25.000 juta dan Rp 18.500 juta. Fasilitas ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 5% di atas *Cost of Loanable Fund (COLF)*, dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen VMF kepada pihak ketiga minimal sebesar 110% dari saldo fasilitas pinjaman (Catatan 14). Fasilitas ini akan digunakan untuk mendanai transaksi pembiayaan VMF dengan pelanggan dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 23 Juni 2013 dan 27 Agustus 2013.

Pada tanggal 22 Desember 2010, VMF memperoleh tambahan fasilitas pinjaman sejumlah Rp 50.000 juta. Fasilitas ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 5% diatas C*ost of Loanable Fund (COLF)*, dan dijamin dengan piutang VMF kepada pihak ketiga minimal sebesar 110% dari saldo fasilitas pinjaman (Catatan 14). Fasilitas ini akan digunakan untuk mendanai transaksi pembiayaan VMF dengan pelanggan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Pebruari 2014.

d. Bank Sinarmas (Sinarmas)

Pada tanggal 20 Maret 2010, VMF menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *(demand loan – revolving)* sejumlah Rp 70.000 juta dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 13% dan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2011. Fasilitas ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen sebesar 110% dari saldo pinjaman (Catatan 14). Pada tahun 2011, fasilitas ini telah dilunasi oleh VMF.

Pada tanggal 8 Maret 2011, VMF dan Sinarmas mengubah perjanjian fasilitas *demand loan* tersebut menjadi fasilitas *term loan* dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp 100 miliar dengan suku bunga tahunan sebesar 13% dan akan jatuh tempo 36 bulan sejak pencairan kredit. Fasilitas ini dijamin dengan investasi neto sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen VMF sebesar 110% dari saldo pinjaman (Catatan 13 dan 14).

e. Bank ICBC Indonesia (ICBC)

Pada tanggal 10 Januari 2011, VMF mengadakan perjanjian kredit dengan Bank ICBC dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sejumlah Rp 25.000 juta. Pinjaman ini dikenakan suku bunga mengambang sebesar 11,5% per tahun dan jangka waktu perjanjian kredit adalah 36 bulan sejak tanggal pencairan dana. Pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen VMF sebesar 110% dari saldo fasilitas pinjaman (Catatan 14).

f. Bank Victoria International (Victoria)

Cerukan

VMF mengadakan beberapa kali perubahan perjanjian pinjaman untuk meningkatkan jumlah maksimum fasilitas pinjaman cerukan sampai menjadi Rp 7.500 juta. Berdasarkan perubahan perjanjian pinjaman tanggal 10 Maret 2009, jangka waktu pinjaman diperpanjang sampai dengan tanggal 9 Mei 2010 dan penurunan jumlah fasilitas pinjaman cerukan dari Rp 7.500 juta menjadi Rp 5.000 juta. Pada tanggal 13 April 2010, jangka waktu kembali diperpanjang sampai dengan tanggal 9 Mei 2012. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010 saldo fasilitas cerukan masing-masing sebesar nihil dan pada tanggal 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008 sebesar Rp 230 juta dan Rp 5.516 juta.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, VMF setuju untuk membuka rekening amanat *(escrow account)* di Victoria. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008 masing-masing sebesar Rp 58 juta, Rp 173 juta, Rp 2 juta, Rp 1 juta dan Rp 1 juta disajikan sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada Akun Aset Lain-lain (Catatan 18).

Fasilitas ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 13,00% dan 13,50% untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012, 13,50% untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010, dan 15,00% - 17,00% untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 17% pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008, dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen VMF sebesar 120% dari saldo fasilitas pinjaman (Catatan 14). Fasilitas ini telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang lagi.

Kredit Modal Kerja

Pada tanggal 10 Maret 2009, VMF menerima fasilitas kredit modal kerja *non-revolving* dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman sebesar Rp 52.500 juta. Selanjutnya, berdasarkan perjanjian kredit tanggal 13 April 2010, Victoria setuju untuk meningkatkan jumlah maksimum fasilitas kredit sebesar Rp 20.000 juta dan jangka waktu penarikan pinjaman sampai dengan tanggal 9 Mei 2011. Pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 saldo fasilitas masing-masing sebesar nihil, Rp 22.355 juta dan Rp 35.928 juta. Fasilitas tersebut dikenakan suku bunga tahunan sebesar 12%, 11,50% - 16,50% dan 13,50% - 16,50% masing-masing pada tahun 2011, 2010 dan 2009, dan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen VMF sebesar 105% dari saldo fasilitas pinjaman (Catatan 14). Pada tahun 2011, fasilitas ini telah dilunasi oleh VMF.

g. Bank Royal Indonesia

Pada tanggal 9 Desember 2010, VMF memperoleh fasilitas kredit *demand loan* dari Bank Royal Indonesia dengan jumlah maksimum fasilitas *demand loan* sejumlah Rp 15.000 juta. Fasilitas ini dikenakan suku bunga tagihan sebesar 12% dan dijamin dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (Catatan 14). Fasilitas ini akan digunakan untuk mendanai transaksi pembiayaan VMF dengan pelanggan dan jangka waktu perjanjian kredit adalah 12 bulan sejak penandatanganan perjanjian ini. Pada tahun 2011, pinjaman ini telah dilunasi oleh VMF.

h. Bank Index Selindo

Pada tanggal 26 Januari 2010, VMF mengadakan perjanjian kredit dengan Bank Index Selindo dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman *(fixed loan)* sejumlah Rp 5.000 juta. Fasilitas ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 13% dan dijamin dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor dengan jumlah tagihan minimal sebesar 110% dari saldo fasilitas pinjaman (Catatan 14). Fasilitas ini akan digunakan untuk mendanai transaksi pembiayaan VMF dengan pelanggan dan jangka waktu perjanjian kredit adalah 36 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit.

Kemudian pada tanggal 29 Nopember 2010, VMF memperoleh tambahan fasilitas pinjaman sejumlah Rp 10.000 juta. Fasilitas ini dikenakan suku bunga tahunan 12,5% dan dijamin dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor dengan jumlah tagihan minimal sebesar 110% dari saldo Fasilitas Pinjaman (Catatan 14). Fasilitas ini akan digunakan untuk mendanai transaksi pembiayaan VMF dengan pelanggan dan jangka waktu perjanjian kredit adalah 36 bulan sejak penandatanganan perubahan perjanjian kredit. Pada tahun 2011, pinjaman ini telah dilunasi oleh VMF.

i. Bank Windu Kentjana Internasional

Pada tanggal 1 Desember 2010, VMF mengadakan perjanjian kredit dengan Bank Windu Kentjana International dengan jumlah maksimum fasilitas pinjaman (*installment loan*) sejumlah Rp 5.000 juta. Fasilitas ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 12% dan dijamin dengan tagihan piutang pembiayaan konsumen VMF terhadap pihak ketiga (Catatan 14). Jangka waktu fasilitas adalah 36 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas pinjaman. Pada tahun 2011, pinjaman ini telah dilunasi oleh VMF.

Perjanjian pinjaman di atas mencakup persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh VMF. Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan 2009, VMF telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian pinjaman di atas.

j. BCA Finance

Pada tanggal 26 September 2008, VMF mengadakan perjanjian fasilitas kredit dengan BCA Finance. Fasilitas kredit tersebut akan digunakan oleh VMF untuk keperluan pembelian kendaraan untuk karyawan. Jangka waktu perjanjian 36 (tiga puluh enam) bulan, dimulai dari tanggal 26 September 2008 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 11,76% per tahun. Jumlah fasilitas yang diberikan sebesar Rp 6.146 juta dengan pembayaran uang muka Rp 1.229 juta. Pinjaman ini dijamin dengan kendaraan bermotor yang dibiayai oleh BCA finance. Fasilitas kredit ini tidak diperpanjang.

Pada tanggal 13 Agustus 2009, VMF kembali mengadakan perjanjian fasilitas kredit dengan BCA Finance. Fasilitas kredit tersebut akan digunakan oleh VMF untuk keperluan pembelian atau penyediaan kendaraan untuk karyawan. Jangka waktu perjanjian kredit 24 (dua puluh empat) bulan, dimulai dari tanggal 13 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011 dengan tingkat suku bunga efektif sebesar 11,16% per tahun. Jumlah fasilitas yang diberikan sebesar Rp 1.954 juta dengan pembayaran uang muka Rp 391 juta. Pinjaman ini dijamin dengan kendaraan bermotor yang dibiayakan oleh BCA Finance.

Denda yang diberikan atas keterlambatan angsuran adalah sebesar 0,2% per hari dari angsuran yang tertunggak.

Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh VMF, antara lain mengasuransikan kendaraan, menyerahkan BPKB asli dan tidak diperbolehkan menjaminkan, menjual dan mengalihkan hak kepemilikan kendaraan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA Finance.

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008 VMF telah memenuhi batasan-batasan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman tersebut di atas.

Pada tanggal 13 Juli 2011, fasilitas kredit ini telah dilunasi seluruhnya oleh VMF dan tidak diperpanjang.

k. Bank Akita (Akita)

Pada tanggal 12 Agustus 2005, VMF mengadakan perjanjian fasilitas pinjaman sejumlah Rp 10.000 juta. Pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen VMF dengan jumlah maksimum sejumlah Rp 12.500 juta. Fasilitas pinjaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sampai dengan tanggal 12 Agustus 2006. Berdasarkan perubahan perjanjian kredit pada tanggal 20 September 2006, perpanjangan kredit ini telah diperpanjang sampai dengan 12 Agustus 2007.

Berdasarkan perubahan perjanjian kredit tanggal 14 Maret 2007, Akita setuju untuk meningkatkan jumlah maksimum fasilitas pinjaman menjadi Rp 15.000 juta. Pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen VMF dengan jumlah maksimum sejumlah Rp 18.750 juta (Catatan 14). Berdasarkan perubahan perjanjian kredit tanggal 7 September 2007, Akita setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan tanggal 12 Agustus 2008. Pada tanggal 27 Oktober 2008, jangka waktu fasilitas kredit kembali diperpanjang sampai dengan tanggal 12 Agustus 2009. Setelah berakhirnya masa fasilitas tersebut, VMF tidak memperpanjang fasilitas pinjaman tersebut.

Suku bunga tahunan sebesar 13,00% - 17,00% untuk tahun 2008.

Pinjaman yang diterima Bank dan entitas anak berdasarkan sisa jangka waktu jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember														
	30 Juni 2012			2011			2010			2009			1 Januari 2009/31 Desember 2008		
	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah	Rupiah	Valuta asing	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta/	Rp Juta/	Rp Juta/
< 1 bulan	94.453	234.812	329.265	543.351	181.350	724.701	57.835	-	57.835	392.540	469.750	862.290	-	708.500	708.500
> 1 - 3 bulan	68.796	164.368	233.164	132.221	204.019	336.240	129.293	1.800.432	1.929.725	275	-	275	1.218	1.417.000	1.418.218
> 3 - 12 bulan	526.214	446.143	972.357	583.616	724.192	1.307.808	380.502	-	380.502	71.295	-	71.295	135.483	-	135.483
> 1 - 5 tahun	751.124	750.345	1.501.469	391.284	225.122	616.406	763.827	450.500	1.214.327	228.308	187.900	416.208	711.340	218.000	929.340
> 5 tahun	-	233.390	233.390	-	-	-	-	-	-	-	281.850	281.850	62	-	62
Jumlah	1.440.587	1.829.058	3.269.645	1.650.472	1.334.683	2.985.155	1.331.457	2.250.932	3.582.389	692.418	939.500	1.631.918	848.103	2.343.500	3.191.603

Pinjaman yang diterima diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan, diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif.

Nilai wajar untuk pinjaman yang diterima dengan bunga mengambang didasarkan pada kuotasi harga di pasar. Estimasi nilai wajar dari pinjaman yang diterima dengan bunga mengambang dan bunga tetap tanpa kuotasi harga di pasar didasarkan pada diskonto arus kas menggunakan suku bunga untuk utang baru dengan jangka waktu yang serupa. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, nilai wajar dari liabilitas keuangan ini adalah sebesar Rp 3.275.029 juta, Rp 2.985.866 juta dan Rp 3.587.536 juta (Catatan 52).

Pinjaman yang diterima memiliki suku bunga tetap maupun mengambang, sehingga Bank dan entitas anak terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar *(fair value interest rate risk)* dan risiko suku bunga atas arus kas *(cash flow interest rate risk)*. Rata-rata suku bunga efektif untuk pinjaman yang diterima dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing ini masing-masing sebesar 11,25% dan 2,31% per tahun untuk tahun 2012, 11,22% dan 2,43% per tahun untuk tahun 2011 dan 12,16% dan 1,67% per tahun untuk tahun 2010.

24. UTANG PAJAK

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Bank					
Pajak penghasilan badan (Catatan 41)	142.351	149.881	31.835	139.733	9.573
Pajak Penghasilan					
Pasal 21	6.521	9.974	7.649	5.644	6.532
Pasal 23/26	54.744	59.546	52.444	51.449	63.169
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	213	190	162	160	-
Entitas Anak					
Pajak penghasilan badan	18.629	30.302	30.207	19.904	4.635
Pajak Penghasilan					
Pasal 21	1.107	2.235	3.451	1.751	4.109
Pasal 23/26	945	266	253	160	362
Pasal 25	15.376	16.122	10.204	8.242	6.375
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	88	110	100	9	67
Jumlah	239.974	268.626	136.305	227.052	94.822

25. LIABILITAS LAIN-LAIN

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Bank					
Bunga yang masih harus dibayar	230.124	244.974	250.059	199.279	230.035
Pendapatan ditangguhkan	217.654	216.417	-	-	-
Setoran jaminan	129.581	88.290	92.598	80.546	69.952
Liabilitas imbalan pasca kerja (Catatan 43b)	83.730	77.852	67.627	56.900	46.848
Pendapatan diterima dimuka	44.745	29.202	70.522	111.274	88.777
Liabilitas pada pihak ketiga	21.464	19.930	19.317	10.586	35.624
Setoran angsuran pinjaman dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	285
Lainnya	26.268	52.253	13.802	5.678	1.067
Sub jumlah	753.566	728.918	513.925	464.263	472.588
Entitas Anak					
Liabilitas kontrak asuransi	437.647	331.847	241.468	189.226	180.164
Liabilitas imbalan pasca kerja (Catatan 43b)	42.296	37.825	29.018	23.931	17.833
Lainnya	207.555	192.531	169.247	101.884	58.360
Sub Jumlah	687.498	562.203	439.733	315.041	256.357
Jumlah	1.441.064	1.291.121	953.658	779.304	728.945

Bunga yang Masih Harus Dibayar

Merupakan bunga yang masih harus dibayar atas simpanan, pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan dan obligasi subordinasi.

Estimasi nilai wajar dari bunga yang masih harus dibayar yang merupakan liabilitas tanpa suku bunga dan tanpa jangka waktu adalah jumlah yang harus dikembalikan saat ada permintaan. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, nilai wajar dari bunga yang masih harus dibayar ini adalah sebesar nilai tercatatnya.

Pendapatan Ditangguhkan

Pendapatan ditangguhkan merupakan pendapatan yang ditangguhkan atas pembukuan kembali kredit yang telah dihapuskan dalam bentuk kredit dan penyertaan dalam bentuk saham.

Setoran Jaminan

Merupakan setoran jaminan transaksi L/C, bank garansi dan sewa *safe deposit*.

Setoran jaminan diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan, diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Estimasi nilai wajar dari setoran jaminan yang merupakan liabilitas tanpa suku bunga dan tanpa jangka waktu adalah jumlah yang harus dikembalikan saat ada permintaan. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, nilai wajar dari setoran jaminan ini adalah sebesar nilai tercatatnya.

Pendapatan Diterima di Muka

Merupakan pendapatan provisi kredit yang diterima dan belum diamortisasi dan pendapatan bunga diterima di muka.

Liabilitas Kontrak Asuransi

Merupakan nilai kewajiban kontraktual neto asuradur dalam suatu kontrak asuransi, yang terdiri dari estimasi liabilitas klaim, liabilitas manfaat polis masa depan dan premi belum merupakan pendapatan.

Seluruh liabilitas lain-lain pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008 dilakukan dengan pihak ketiga.

26. OBLIGASI SUBORDINASI – BERSIH

Merupakan obligasi subordinasi yang diterbitkan oleh Bank dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Nilai nominal					
Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010	2.460.000	2.460.000	2.460.000	-	-
Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Obligasi yang beredar	3.960.000	3.960.000	3.960.000	1.500.000	1.500.000
Obligasi yang dibeli kembali *)	(38.500)	(38.500)	(38.500)	-	-
Diskonto yang belum diamortisasi	(26.895)	(29.886)	(35.389)	(8.144)	(10.650)
Bersih	3.894.605	3.891.614	3.886.111	1.491.856	1.489.350
Tingkat bunga rata-rata per tahun	10,9%	10,9%	10,9%	11,6%	11,6%

*) Obligasi yang dibeli kembali merupakan obligasi yang dibeli entitas anak dengan tujuan untuk dijual kembali.

Amortisasi diskonto untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan 2011 (2011-tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 2.991 juta, Rp 2.675 juta, Rp 5.504 juta, Rp 2.581 juta dan Rp 2.506 juta.

Obligasi subordinasi diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan, diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Estimasi nilai wajar dihitung berdasarkan kuotasi harga di pasar. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, nilai wajar dari liabilitas keuangan ini adalah masing-masing sebesar Rp 4.080.704 juta, Rp 4.058.281 juta dan Rp 3.966.108 juta (Catatan 52).

Obligasi subordinasi yang diterbitkan memiliki suku bunga tetap, sehingga Bank dan entitas anak terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar *(fair value interest rate risk).* Suku bunga efektif pada tahun 2012, 2011 dan 2010 dari obligasi subordinasi yang diterbitkan ini adalah 11,15% per tahun.

Bank tidak memiliki tunggakan pokok, bunga atau yang berkaitan dengan obligasi subordinasi selama tahun 2012, 2011, 2010 dan 2009.

a. Obligasi Subordinasi Bank Panin III tahun 2010

Pada tanggal 9 Nopember 2010, Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Bank Panin III Tahun 2010 sebesar Rp 2.460 miliar. Wali amanat dari penerbitan obligasi subordinasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Obligasi subordinasi berjangka waktu 7 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 Nopember 2017. Tingkat bunga obligasi subordinasi menggunakan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% per tahun.

Bank tidak mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali seluruh atau sebagian pokok obligasi subordinasi.

Bunga obligasi subordinasi ini dibayarkan setiap triwulanan mulai tanggal 9 Pebruari 2011 dan terakhir pada tanggal 9 Nopember 2017.

Dalam hal terjadi penutupan usaha, pembagian harta kekayaan Bank hasil likuidasi untuk pembayaran jumlah terutang oleh Bank kepada pemegang obligasi subordinasi hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh liabilitas pembayaran Bank kepada utang senior. Hak tagih sehubungan dengan obligasi subordinasi menempati peringkat paripassu tanpa preferensi di antara para pemegang obligasi subordinasi.

Berdasarkan surat PT Pefindo tanggal 8 Agustus 2011 No. 1027/PEF-Dir/VIII/2011, peringkat Obligasi Subordinasi Bank Panin III tahun 2010 untuk periode 5 Agustus 2011 sampai dengan 1 Agustus 2012 adalah idAA- (*Double A Minus*).

b. Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008

Pada tanggal 9 April 2008, Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Bank Panin II Tahun 2008 sebesar Rp 1,5 triliun. Wali amanat dari penerbitan obligasi subordinasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Obligasi subordinasi berjangka waktu 10 tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 April 2018 atau dalam jangka waktu lebih awal yaitu pada tanggal 9 April 2013 jika dilaksanakan opsi beli. Tingkat bunga obligasi subordinasi menggunakan tingkat bunga tetap sebesar 11,6% per tahun untuk tahun ke-1 sampai dengan ke-5, dan sebesar 20,6% per tahun untuk tahun ke-6 sampai ke-10.

Bank mempunyai hak untuk melakukan pelunasan awal seluruh pokok obligasi subordinasi melalui wali amanat (opsi beli) pada ulang tahun ke-5 sejak tanggal emisi, setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Bunga obligasi subordinasi ini dibayarkan setiap triwulanan mulai 9 Juli 2008 dan terakhir pada tanggal 9 April 2018, atau tanggal yang lebih awal jika terjadi opsi beli pada ulang tahun tanggal emisi tahun ke-5.

Dalam hal terjadi penutupan usaha, pembagian harta kekayaan Bank hasil likuidasi untuk pembayaran jumlah terutang oleh Bank kepada pemegang obligasi subordinasi hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh liabilitas pembayaran Bank kepada utang senior. Hak tagih sehubungan dengan obligasi subordinasi menempati peringkat paripassu tanpa preferensi di antara para pemegang obligasi subordinasi tetapi menempati prioritas terhadap hak tagih para pemegang semua kelompok modal sendiri Bank termasuk para pemegang saham preferen Bank (jika ada).

Berdasarkan surat PT Pefindo tanggal 8 Agustus 2011 No. 1027/PEF-Dir/VIII/2011, peringkat Obligasi Subordinasi Bank Panin II tahun 2008 untuk periode 5 Agustus 2011 sampai dengan 1 Agustus 2012 adalah idAA- (*Double A Minus*).

Untuk keperluan perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR), obligasi subordinasi diperhitungkan sebagai modal pelengkap.

Sehubungan dengan penerbitan obligasi subordinasi diatas, Bank diwajibkan memenuhi batasan-batasan tertentu, antara lain tanpa ijin tertulis dari wali amanat Bank dilarang mengurangi modal ditempatkan dan disetor, mengadakan perubahan dibidang usaha, melakukan penyertaan modal yang secara total melebihi 10% dari pendapatan operasional atau 20% dari total ekuitas dan melakukan penggabungan atau peleburan atau reorganisasi dengan perusahaan lain.

Pada tahun 2012, 2011, 2010 dan 2009, Bank sudah memenuhi semua pembatasan-pembatasan dalam perjanjian wali amanat dan telah membayar bunga sesuai dengan jadwal.

27. MODAL SAHAM

Berdasarkan laporan Biro Administrasi Efek, rincian pemegang saham Bank pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2012		
Nama pemegang saham	Jumlah saham	Persentase pemilikan	Jumlah modal
			Rp Juta
PT Panin Financial Tbk (d/h Panin Life Tbk)	11.065.846.285	45,94%	1.106.584
Votraint No. 1103 Pty Ltd.	9.349.793.152	38,82%	934.979
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.672.006.561	15,24%	367.202
Jumlah	24.087.645.998	100,00%	2.408.765

	31 Desember 2011		
Nama pemegang saham	Jumlah saham	Persentase pemilikan	Jumlah modal
			Rp Juta
PT Panin Financial Tbk (d/h Panin Life Tbk)	10.950.271.285	45,46%	1.095.027
Votraint No. 1103 Pty Ltd.	9.349.793.152	38,82%	934.979
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.787.581.561	15,72%	378.759
Jumlah	24.087.645.998	100,00%	2.408.765

Nama pemegang saham	31 Desember 2010		
	Jumlah saham	Persentase pemilikan	Jumlah modal
			Rp Juta
PT Panin Financial Tbk (d/h Panin Life Tbk)	10.762.771.285	44,68%	1.076.277
Votraint No. 1103 Pty Ltd.	9.349.793.152	38,82%	934.979
Dewan Komisaris - Bambang Winarno	4.247	-	-
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.975.077.314	16,50%	397.509
Jumlah	24.087.645.998	100,00%	2.408.765

Nama pemegang saham	31 Desember 2009		
	Jumlah saham	Persentase pemilikan	Jumlah modal
			Rp Juta
PT Panin Life Tbk	11.060.771.285	45,92%	1.106.077
Votraint No. 1103 Pty Ltd.	9.269.562.652	38,48%	926.957
Dewan Komisaris - Bambang Winarno	4.247	-	-
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.757.307.814	15,60%	375.731
Jumlah	24.087.645.998	100,00%	2.408.765

Nama pemegang saham	1 Januari 2009/31 Desember 2008		
	Jumlah saham	Persentase pemilikan	Jumlah modal
			Rp Juta
PT Panin Life Tbk	9.113.530.544	44,82%	911.353
Votraint No. 1103 Pty Ltd.	6.067.582.293	29,84%	606.758
Dewan Komisaris - Bambang Winarno	4.247	-	-
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	5.154.183.302	25,34%	515.419
Jumlah	20.335.300.386	100,00%	2.033.530

PT Panin Financial Tbk (d/h PT Panin Life Tbk) dimiliki oleh PT Panin Insurance Tbk dan Publik. PT Panin Insurance Tbk dimiliki oleh PT Panincorp, PT Famlee Invesco dan Publik. PT Panincorp dimiliki oleh PT Panin Investment. PT Panin Investment dimiliki oleh Gunadi Gunawan, Mu'min Ali Gunawan, Muljadi Koesumo dan Tidjan Ananto. PT Famlee Invesco dimiliki oleh Gunadi Gunawan dan Mu'min Ali Gunawan. Votraint No. 1103 Pty Ltd sepenuhnya dimiliki oleh ANZ Banking Group.

Agio saham merupakan kelebihan di atas nominal dari penjualan saham perdana, penawaran umum terbatas (*right issue*), pelaksanaan waran, pembagian dividen saham dan *swap share* dengan perincian sebagai berikut:

	Rp Juta
Saldo 31 Desember 2005	1.251.719
Penerimaan dari penawaran umum terbatas VII saham kepada masyarakat sebanyak 4.016.358.393 saham dengan harga penawaran Rp 350 per saham	1.405.725
Nilai nominal saham yang dicatat sebagai modal disetor atas pengeluaran 4.016.358.393 saham	(401.636)
Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penawaran terbatas VII kepada masyarakat	(13.234)
Saldo 31 Desember 2006	2.242.574
Agio saham yang berasal dari pelaksanaan waran Seri IV	38.820
Saldo 31 Desember 2007	2.281.394
Agio saham yang berasal dari pelaksanaan waran Seri IV	37.232
Saldo 1 Januari 2009/31 Desember 2008	2.318.626
Agio saham yang berasal dari pelaksanaan waran Seri IV pada tahun 2009	1.125.704
Saldo 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009	3.444.330

28. SELISIH TRANSAKSI EKUITAS DENGAN PIHAK NON-PENGENDALI

Merupakan selisih antara ekuitas AMAG yang menjadi bagian Bank sesudah pengeluaran saham dengan nilai ekuitas AMAG sebelum pengeluaran saham, sehubungan dengan penawaran umum saham AMAG kepada masyarakat sejumlah 240.000.000 saham pada tahun 2005 dan pelaksanaan Waran Seri I sejumlah 18.742.000 saham pada tahun 2007 dan 217.902.880 saham pada tahun 2010. Penambahan pada tahun 2011 merupakan transaksi ekuitas di Clipan dan AMAG.

29. KEPENTINGAN NON - PENGENDALI

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
a. Ekuitas yang dapat diatribusikan					
PT Clipan Finance Indonesia	1.043.888	992.452	676.234	598.988	536.334
PT Asuransi Multi Artha Guna	587.172	548.631	303.655	228.548	187.140
PT Verena Multi Finance	114.127	105.986	91.901	77.072	67.803
PT Bank Panin Syariah	5	5	5	5	-
Jumlah	1.745.192	1.647.074	1.071.795	904.613	791.277

	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
b. Laba bersih yang dapat diatribusikan					
PT Clipan Finance Indonesia	77.286	61.091	126.124	91.634	68.597
PT Asuransi Multi Artha Guna	57.879	46.238	82.575	49.913	41.362
PT Verena Multi Finance	8.141	8.764	14.085	14.804	9.268
Jumlah	143.306	116.093	222.784	156.351	119.227

30. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM

2012

Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan akta No. 11 tanggal 9 April 2012 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, notaris di Jakarta telah ditetapkan:

a. Bank tidak membayar dividen.
b. Sejumlah Rp 20.000 juta digunakan sebagai cadangan umum sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.

2011

Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan akta No. 65 tanggal 30 Juni 2011 dari Benny Kristianto, SH, notaris di Jakarta telah ditetapkan:

a. Bank tidak membayar dividen.
b. Sejumlah Rp 20.000 juta digunakan sebagai cadangan umum sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.

2010

Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan akta No. 9 tanggal 10 Juni 2010 dari Benny Kristianto, SH, notaris di Jakarta telah ditetapkan Bank tidak membayar dividen.

2009

Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan akta No.11 tanggal 10 September 2009 dari Benny Kristianto, SH, notaris di Jakarta telah ditetapkan Bank tidak membayar dividen.

31. PENDAPATAN BUNGA YANG DIPEROLEH

	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah					
Giro	22.858	22.225	44.930	7.887	444
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain					
Call money	21.679	24.181	71.424	59.230	59.540
Deposito berjangka	211	314	1.319	2.502	684
Kredit	-	-	-	-	1.190
Efek-efek					
Sertifikat Bank Indonesia	365.646	665.870	1.188.435	804.430	648.871
Obligasi	326.708	360.757	660.862	806.963	967.607
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	125.511	16.955	54.885	2.775	5.124
Wesel tagih	354	60	312	969	7.265
Reksadana	-	-	-	-	2.408
Kredit					
Pinjaman tetap	2.345.561	1.905.352	4.038.132	3.567.309	2.974.559
Pinjaman rekening koran	833.625	738.587	1.530.624	1.305.941	1.230.851
Pembiayaan bersama	269.988	184.582	387.706	92.924	35.934
Anjak piutang	90.269	52.345	115.938	44.136	51.880
Kredit program	74.051	57.076	127.386	95.957	-
Kredit lainnya	56.576	57.487	126.012	85.645	143.509
Lainnya					
Pembiayaan konsumen	306.677	231.691	513.403	279.417	183.838
Sewa pembiayaan	96.772	77.555	160.677	150.495	137.100
Lainnya	2.516	3.901	6.139	30.934	24.722
Subjumlah	4.939.002	4.398.938	9.028.184	7.337.514	6.475.526
Valuta asing					
Giro	1.108	234	523	363	3.530
Penempatan pada bank lain					
Call money	22.720	20.338	51.377	51.553	40.911
Deposito berjangka	-	1.092	1.163	733	3.153
Kredit	-	-	-	-	39.504
Efek-efek					
Obligasi	56.749	57.108	131.101	126.506	177.178
Wesel tagih	1.451	848	2.778	1.331	1.071
Surat Berharga Pasar Uang	-	-	-	-	6.782
Kredit					
Pinjaman tetap	180.062	149.611	320.170	395.053	390.951
Pembiayaan bersama	44.057	25.026	63.472	42.997	9.146
Pinjaman rekening koran	1.186	1.023	2.139	1.893	2.280
Kredit lainnya	7.007	2.127	5.589	102	777
Lainnya	2.735	2.094	4.685	6.986	7.563
Subjumlah	317.075	259.501	582.997	627.517	682.846
Jumlah Pendapatan Bunga	5.256.077	4.658.439	9.611.181	7.965.031	7.158.372

Termasuk dalam pendapatan bunga dari kredit adalah pendapatan bunga yang masih akan diterima dari kredit yang mengalami penurunan nilai untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan 2011 (2011 - tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 41.871 juta, Rp 36.395 juta, Rp 107.567 juta dan Rp 26.901 juta.

Jumlah pendapatan syariah yang diperoleh dari transaksi *ijarah* dan pendapatan usaha utama lainnya masing-masing sebesar Rp 55.125 juta, Rp 25.587 juta, Rp 70.262 juta, Rp 21.376 juta dan Rp 1.219 juta masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan 2011 (2011-tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

32. BEBAN BUNGA

	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Rupiah					
Simpanan					
Deposito berjangka	997.987	1.152.132	2.305.903	2.125.326	2.654.419
Tabungan	510.533	347.536	739.411	553.010	400.042
Giro	131.278	101.504	215.079	151.982	138.197
Simpanan dari bank lain					
Call money	79.605	100.041	189.904	157.787	108.155
Deposito berjangka	25.154	30.655	49.844	64.362	55.469
Giro	2.143	2.202	4.975	4.865	3.994
Tabungan	-	-	-	1.540	54
Pinjaman yang diterima	1	2	3	5	805
Surat berharga yang diterbitkan					
Obligasi	259.061	171.209	374.110	268.657	186.632
Obligasi subordinasi	217.243	217.330	434.007	210.286	175.059
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	37.465	99.105	114.774	96.080	11.097
Lainnya	86.432	90.765	204.822	104.040	99.323
Subjumlah	2.346.902	2.312.481	4.632.832	3.737.940	3.833.246
Valuta Asing					
Simpanan					
Deposito berjangka	10.958	13.734	26.891	37.167	80.288
Giro	8.308	8.759	17.443	44.291	73.199
Simpanan dari bank lain					
Call money	8.555	144	1.040	329	27
Giro	2	5	7	12	12
Deposito berjangka	1	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima	20.707	14.443	29.980	24.122	42.899
Lainnya	-	-	-	-	81
Subjumlah	48.531	37.085	75.361	105.921	196.506
Jumlah Beban Bunga	2.395.433	2.349.566	4.708.193	3.843.861	4.029.752

Jumlah beban syariah masing-masing sebesar Rp 18.488 juta, Rp 13.901 juta, Rp 27.513 juta, Rp 9.300 juta dan Rp 109 juta masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan 2011 (2011-tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

33. KEUNTUNGAN BERSIH PENJUALAN EFEK

	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Laba penjualan efek obligasi	91.511	75.395	173.981	294.908	223.227
Laba penjualan efek lainnya	3.951	1.550	11.733	30.485	-
Jumlah	95.462	76.945	185.714	325.393	223.227

34. PENDAPATAN UNDERWRITING

Merupakan pendapatan premi AMAG dengan perincian sebagai berikut:

	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Premi bruto	228.970	175.343	336.080	282.570	236.788
Premi reasuransi	(17.765)	(12.190)	(25.630)	(20.417)	(17.166)
Kenaikan premi yang belum merupakan pendapatan	(44.173)	(15.196)	(34.656)	(18.394)	(2.382)
Kenaikan (penurunan) premi yang belum merupakan pendapatan bagian reasuransi	9.319	1.329	2.437	1.843	(303)
Jumlah Pendapatan Underwriting	176.351	149.286	278.231	245.602	216.937

35. PROVISI DAN KOMISI SELAIN KREDIT - BERSIH

	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Transaksi ekspor - impor	12.628	9.096	17.627	24.005	24.056
Kiriman uang	12.018	9.476	24.801	21.182	20.131
Asuransi	10.925	11.157	17.336	19.181	13.983
Lainnya - bersih	(1.987)	(20.603)	(23.424)	(11.886)	(4.642)
Jumlah	33.584	9.126	36.340	52.482	53.528

36. PENDAPATAN OPERASIONAL LAIN - LAINNYA

	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Pendapatan jasa administrasi	206.020	109.800	291.801	157.537	111.305
Jasa bank lainnya	20.577	17.969	37.900	34.655	25.466
Pendapatan komisi (Catatan 55)	4.600	3.442	9.079	6.869	5.852
Buku cek/giro	3.192	3.078	6.136	5.812	5.649
Pembayaran kartu kredit	190	350	613	1.006	3.671
Lainnya	247.315	306.503	868.709	242.943	80.600
Jumlah	481.894	441.142	1.214.238	448.822	232.543

Pendapatan operasional lainnya antara lain terdiri dari hasil jasa kustodian, deviden yang diterima dan penerimaan kembali kredit yang dihapus buku.

37. BEBAN (PEMULIHAN) KERUGIAN PENURUNAN NILAI DAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET NON PRODUKTIF DAN LAINNYA

	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Aset keuangan					
Giro pada bank lain (Catatan 7)	(1)	-	-	(4)	(3.671)
Penempatan pada bank lain (Catatan 8)	(500)	-	(100)	50	46.552
Efek-efek (Catatan 9)	102.129	-	48.133	-	4.995
Tagihan derivatif (Catatan 10)	-	-	-	-	(1.082)
Kredit (Catatan 11)	340.869	487.582	912.235	1.186.051	862.317
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Catatan 12)	-	-	-	-	(596)
Investasi neto sewa pembiayaan (Catatan 13)	8.390	157	(3.955)	(3.968)	4.868
Piutang pembiayaan konsumen (Catatan 14)	20.885	11.359	40.967	26.829	23.679
Tagihan akseptasi (Catatan 15)	-	-	-	-	(33.485)
Penyertaan dalam bentuk saham (Catatan 16)	-	-	-	-	1.732
Tagihan anjak piutang	(36)	(973)	33	(10.956)	8.570
Pembiayaan *refinancing* dan lainnya (Catatan 18)	257	678	1.043	294	152
Sub jumlah	471.993	498.803	998.356	1.198.296	914.031
Aset Non-Produktif (Catatan 18)					
Agunan diambil alih	(37.939)	(41.340)	(36.489)	18.294	35.897
Jumlah	434.054	457.463	961.867	1.216.590	949.928

38. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Iklan	167.055	485.386	874.685	349.860	122.853
Penyusutan dan amortisasi (Catatan 17 dan 18)	129.783	123.389	265.141	277.817	271.559
Peralatan dan kebutuhan kantor	57.397	50.197	106.798	94.846	77.022
Pemeliharaan dan perbaikan	55.954	41.429	78.569	79.034	64.830
Komunikasi	48.661	51.651	119.777	100.703	80.721
Sewa	37.774	31.824	62.907	46.404	38.218
Pajak	28.934	50.320	131.656	38.016	41.134
Premi asuransi	18.276	17.221	32.500	24.039	19.139
Representasi dan sumbangan	12.972	10.386	22.539	18.207	12.280
Honorarium	12.098	9.844	22.566	22.688	16.130
Lainnya	197.771	167.515	361.835	329.885	223.131
Jumlah	766.675	1.039.162	2.078.973	1.381.499	967.017

39. BEBAN TENAGA KERJA

	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Gaji dan tunjangan	375.179	295.032	691.813	543.629	432.592
Pendidikan dan pelatihan	17.153	21.617	43.051	34.808	16.007
Gratifikasi dan bonus	8.881	5.705	117.465	93.471	77.634
Lainnya	14.751	11.328	22.506	33.382	7.599
Jumlah	415.964	333.682	874.835	705.290	533.832

Rincian gaji dan bonus atas kelompok direksi, dewan komisaris, komite audit dan pejabat eksekutif adalah sebagai berikut:

	2012 (Enam bulan)					
	Jumlah Pejabat	Gaji dan Tunjangan	Bonus	Beban manfaat pensiun	Beban manfaat karyawan	Jumlah
		Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Dewan Komisaris	4	1.064	-	-	22	1.086
Direksi	11	11.618	-	2.198	72	13.888
Anggota Komite Audit	3	244	-	-	-	244
Pejabat eksekutif	77	21.888	-	7.420	425	29.733
Jumlah	95	34.814	-	9.618	519	44.951

	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)					
	Jumlah Pejabat	Gaji dan Tunjangan	Bonus	Beban manfaat pensiun	Beban manfaat karyawan	Jumlah
		Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Dewan Komisaris	4	1.002	-	-	22	1.024
Direksi	11	10.703	-	1.233	74	12.010
Anggota Komite Audit	3	159	-	-	-	159
Pejabat eksekutif	66	5.780	-	3.510	355	9.645
Jumlah	84	17.644	-	4.743	451	22.838

	2011 (Satu tahun)					
	Jumlah Pejabat	Gaji dan Tunjangan	Bonus	Beban manfaat pensiun	Beban manfaat karyawan	Jumlah
		Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Dewan Komisaris	4	2.062	625	-	44	2.731
Direksi	11	23.684	6.830	2.467	151	33.132
Anggota Komite Audit	3	321	44	-	-	365
Pejabat eksekutif	78	37.013	17.279	7.019	724	62.035
Jumlah	96	63.080	24.778	9.486	919	98.263

	2010 (Satu tahun)					
	Jumlah Pejabat	Gaji dan Tunjangan	Bonus	Beban manfaat pensiun	Beban manfaat karyawan	Jumlah
		Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Dewan Komisaris	4	1.915	568	-	30	2.513
Direksi	11	18.477	5.880	1.000	574	25.931
Anggota Komite Audit	2	132	14	-	-	146
Pejabat eksekutif	66	29.195	13.591	4.301	1.511	48.598
Jumlah	83	49.719	20.053	5.301	2.115	77.188

	2009 (Satu tahun)					
	Jumlah Pejabat	Gaji dan Tunjangan	Bonus	Beban manfaat pensiun	Beban manfaat karyawan	Jumlah
		Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Dewan Komisaris	4	1.988	361	-	27	2.376
Direksi	11	14.918	3.225	702	1.440	20.285
Anggota Komite Audit	2	109	9	-	-	118
Pejabat eksekutif	61	24.681	11.152	3.773	1.342	40.948
Jumlah	78	41.696	14.747	4.475	2.809	63.727

40. BEBAN OPERASIONAL LAIN - LAINNYA

	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Beban klaim	78.709	56.258	138.242	106.053	106.623
Komisi	41.149	30.770	64.677	55.009	51.348
Lainnya	76.546	109.921	205.557	159.731	97.079
Jumlah	196.404	196.949	408.476	320.793	255.050

Beban klaim, merupakan beban klaim (*underwriting*) AMAG dengan perincian sebagai berikut:

	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Klaim bruto	83.535	59.692	128.752	120.951	102.646
Klaim reasuransi	(6.163)	(2.020)	(6.131)	(11.527)	(3.994)
Kenaikan (penurunan) estimasi klaim	(2.878)	(4.811)	17.498	(1.675)	11.832
Penurunan (kenaikan) estimasi klaim bagian reasuransi	4.215	3.397	(1.877)	(1.696)	(3.861)
Jumlah Beban Klaim	78.709	56.258	138.242	106.053	106.623

41. PAJAK PENGHASILAN

Manfaat (beban) pajak Bank dan anak Bank terdiri dari:

	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Pajak kini					
Bank	(366.433)	(212.353)	(560.002)	(385.598)	(325.253)
Entitas anak					
Clipan	(51.923)	(44.632)	(87.704)	(64.924)	(47.659)
AMAG	(14.000)	(10.735)	(15.777)	(9.150)	(6.689)
VMF	(5.055)	(5.072)	(9.722)	(11.081)	(5.554)
BPS	(4.482)	-	(374)	-	-
Jumlah	(441.893)	(272.792)	(673.579)	(470.753)	(385.155)

	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Pajak Tangguhan					
Bank	51.172	(10.184)	(8.606)	(30.396)	2.722
Entitas anak					
Clipan	(622)	575	(1.807)	514	(4.252)
AMAG	2.621	729	1.849	716	979
VMF	(16)	269	1.695	1.679	(1.591)
BPS	11	457	(2.803)	3.351	575
Jumlah	53.166	(8.154)	(9.672)	(24.136)	(1.567)
Jumlah	(388.727)	(280.946)	(683.251)	(494.889)	(386.722)

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	1.630.157	1.146.658	2.736.366	1.943.826	1.466.555
Laba sebelum pajak - entitas anak	(338.982)	(259.637)	(520.253)	(357.708)	(278.152)
Laba sebelum pajak - Bank	1.291.175	887.021	2.216.113	1.586.118	1.188.403
Perbedaan temporer:					
Penyisihan penghapusan aset produktif selain kredit dan non produktif	63.537	(42.590)	6.980	12.846	16.574
Beban pensiun	73.597	(347)	(15.796)	(7.680)	(20.678)
Beban imbalan pasca kerja	5.878	4.696	10.225	10.727	10.052
Biaya emisi obligasi subordinasi	2.991	2.675	5.504	(27.245)	2.506
Penyusutan aset tetap	2.595	2.595	5.190	5.197	5.197
Biaya emisi obligasi	1.961	1.866	3.738	(2.671)	(7.959)
Penurunan (kenaikan) nilai efek yang belum direalisasi	55.369	(9.632)	(50.263)	(1.479)	5.197
Jumlah	205.928	(40.737)	(34.422)	(10.305)	10.889
Beban (manfaat) yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:					
Representasi, sumbangan dan denda	12.515	51.524	149.520	29.454	20.179
Kenikmatan kepada karyawan	3.214	4.942	9.495	8.768	8.236
Laba penjualan reksadana	-	-	-	-	(2.408)
Hasil sewa	(6.614)	(6.306)	(12.276)	(11.824)	(11.510)
Bagian laba bersih entitas asosiasi	(30.139)	(30.169)	(58.317)	(69.463)	(43.317)
Lainnya	(10.348)	(16.863)	(30.106)	9.645	(8.852)
Jumlah	(31.372)	3.128	58.316	(33.420)	(37.672)
Laba Kena Pajak Bank	1.465.731	849.412	2.240.007	1.542.393	1.161.620

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Beban pajak kini:					
25% x Rp 1.465.731 juta untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012, Rp 849.412 juta untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2011, Rp 2.240.007 juta tahun 2011 dan Rp 1.542.393 juta tahun 2010	366.433	212.353	560.002	385.598	-
28% x Rp 1.161.620 juta tahun 2009	-	-	-	-	325.253
Jumlah	366.433	212.353	560.002	385.598	325.253
Dikurangi pajak dibayar di muka:					
Pasal 25	(224.082)	(142.033)	(410.121)	(353.763)	(185.520)
Utang Pajak Kini - Bank (Catatan 24)	142.351	70.320	149.881	31.835	139.733

Laba kena pajak dan pajak penghasilan Bank tahun 2011, 2010 dan 2009 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Bank ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pada bulan Mei 2011, Bank menerima beberapa Surat Tagihan Pajak (STP) untuk tahun 2008 yang menetapkan tagihan atas pajak penghasilan karyawan luar negeri dan pajak pertambahan nilai sebesar Rp 606 juta dan 19 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun 2008, yang menetapkan kurang bayar atas pajak penghasilan badan, pajak penghasilan karyawan, pajak atas jasa, pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dan pajak pertambahan nilai sebesar Rp 121.702 juta. Atas seluruh STP dan SKPKB ini Bank telah melakukan pembayaran pada bulan Juni 2011.

Pajak Tangguhan

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Bank dan entitas anak adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2009/ 31 Desember 2008	Eliminasi defisit dalam rangka kuasi reorganisasi	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif	31 Desember 2009	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif	31 Desember 2010	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif	31 Desember 2011	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif	30 Juni 2012
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Bank										
Penyisihan (pemulihan) penghapusan aset produktif selain kredit	56.345	-	4.144	60.489	(24.609)	35.880	1.745	37.625	15.884	53.509
Liabilitas imbalan pasca kerja	11.712	-	2.513	14.225	2.682	16.907	2.556	19.463	1.470	20.933
Penyusutan aset tetap	10.441	-	1.299	11.740	1.299	13.039	1.298	14.337	649	14.986
Beban pensiun	(8.313)	-	(5.170)	(13.483)	(1.919)	(15.402)	(3.949)	(19.351)	18.399	(952)
Biaya emisi obligasi subordinasi	(2.662)	-	627	(2.035)	(6.811)	(8.846)	1.376	(7.470)	748	(6.722)
Biaya emisi obligasi	(978)	-	(1.990)	(2.968)	(668)	(3.636)	934	(2.702)	490	(2.212)
Penurunan (kenaikan) nilai efek yang belum direalisasi	(1.299)	-	1.299	-	(370)	(370)	(12.566)	(12.936)	13.532	596
Jumlah	65.246	-	2.722	67.968	(30.396)	37.572	(8.606)	28.966	51.172	80.138
Entitas anak										
AMAG	3.793	-	979	4.772	716	5.488	1.849	7.337	2.621	9.958
VMF	2.913	-	(1.591)	1.322	1.679	3.001	1.695	4.696	(16)	4.680
BPS	1.830	(880)	575	1.525	3.351	4.876	(2.803)	2.073	11	2.084
Jumlah (Liabilitas) Aset Pajak Tangguhan	73.782	(880)	2.685	75.587	(24.650)	50.937	(7.865)	43.072	53.788	96.860
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - Clipan	5.958	-	(4.252)	1.706	514	2.220	(1.807)	413	(622)	(209)

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 pengganti UU pajak No. 7/1983, tarif pajak badan adalah sebesar 28% yang berlaku efektif 1 Januari 2009 dan sebesar 25% yang berlaku efektif 1 Januari 2010. Aset dan liabilitas pajak tangguhan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode ketika aset direalisasikan dan liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang akan ditetapkan.

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak efektif yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	1.630.157	1.146.658	2.736.366	1.943.826	1.466.555
Laba sebelum pajak - entitas anak	(338.982)	(259.637)	(520.253)	(357.708)	(278.152)
Laba sebelum pajak - Bank	1.291.175	887.021	2.216.113	1.586.118	1.188.403
Tarif pajak yang berlaku	322.794	221.755	554.028	396.530	332.753
Koreksi dasar pengenaan pajak	310	-	-	27.819	-
Pengaruh pajak atas penghasilan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	(7.843)	782	14.580	(8.355)	(10.222)
Beban Pajak - Bank	315.261	222.537	568.608	415.994	322.531
Beban Pajak - entitas anak					
Clipan	52.545	44.057	89.511	64.410	51.911
AMAG	11.379	10.006	13.928	8.434	5.710
VMF	5.071	4.803	8.027	9.402	7.145
BPS	4.471	(457)	3.177	(3.351)	(575)
Jumlah	388.727	280.946	683.251	494.889	386.722

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan.

42. LABA PER SAHAM

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar:

	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Laba bersih					
Laba untuk perhitungan laba per saham dasar:					
Laba bersih	1.098.124	749.619	1.830.331	1.292.586	960.606
Jumlah Saham (dalam angka penuh)	Lembar	Lembar	Lembar	Lembar	Lembar
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba bersih per saham dasar	24.087.645.998	24.087.645.998	24.087.645.998	24.087.645.998	22.323.890.374

43. PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA

a. Program Pensiun Imbalan Pasti

Dengan akta No. 25 tanggal 15 Agustus 1981 dari notaris Hendra Karyadi, S.H., yang disahkan oleh Menteri Keuangan dengan Surat No. S-879/MK.11/1983 tanggal 15 Desember 1983, Bank mendirikan Yayasan Dana Jaminan Hari Tua Pan Indonesia Bank (YDJHT PIB).

Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Bank tanggal 4 Januari 1994 telah menyetujui dan memutuskan untuk menyesuaikan Yayasan Dana Jaminan Hari Tua Pan Indonesia Bank menjadi Dana Pensiun Karyawan Pan Indonesia Bank (DPK PIB). Penyesuaian nama menjadi DPK PIB maupun peraturannya telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan keputusannya No. Kep-069/KM.17/1994 tanggal 4 April 1994, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 10 Juni 1994.

DPK PIB mengelola program pensiun manfaat pasti yang memberikan jaminan hari tua bagi seluruh karyawan yang telah pensiun atau, bila yang bersangkutan meninggal dunia, kepada janda-janda/duda-duda dan anak-anak mereka di bawah usia 21 tahun atau belum menikah.

Pendanaan DPK PIB terutama berasal dari kontribusi pemberi kerja dan karyawan. Kontribusi karyawan sebesar 3% dari gaji pokok.

Beban pensiun terdiri dari:

	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Biaya jasa kini	54.263	31.576	63.151	32.359	22.094
Beban bunga	49.794	36.908	73.816	57.387	43.705
Ekspektasi pengembalian investasi	(21.158)	(27.342)	(54.685)	(37.115)	(24.541)
Amortisasi kerugian aktuarial yang belum diakui	26.240	8.534	17.068	14.370	10.298
Beban pensiun	109.139	49.676	99.350	67.001	51.556

Rekonsiliasi pensiun dibayar di muka adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2012	31 Desember 2011	2010	2009	1 Januari 2009/ 31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Saldo awal periode	(77.404)	(61.608)	(53.928)	(33.250)	(13.545)
Beban pensiun periode berjalan	109.139	99.350	67.001	51.556	17.534
Iuran pensiun dibayar periode berjalan	(35.542)	(115.146)	(74.681)	(72.234)	(37.239)
Saldo akhir periode	(3.807)	(77.404)	(61.608)	(53.928)	(33.250)

Liabilitas aktuaria dan nilai wajar aset program berdasarkan laporan aktuaria terakhir untuk posisi 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2009/31 Desember 2008 dari aktuaris independen, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2012	31 Desember 2011	2010	2009	1 Januari 2009/ 31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Nilai kini liabilitas	1.542.340	1.478.117	843.675	550.917	367.757
Nilai wajar aset program	(658.344)	(609.492)	(564.731)	(335.048)	(210.246)
Kerugian aktuarial yang belum diakui	(887.803)	(946.029)	(340.552)	(269.797)	(190.761)
Aset bersih	(3.807)	(77.404)	(61.608)	(53.928)	(33.250)

Aset DPK PIB terutama terdiri dari deposito berjangka, surat-surat berharga dan investasi jangka panjang dalam bentuk saham dan bangunan.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan biaya manfaat pensiun adalah sebagai berikut:

	30 Juni		31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011 (Tidak diaudit)	2011	2010	2009	31 Desember 2008
Tabel mortalitas	CSO 1980	CSO 1980	CSO 1980	CSO 1980	CSO 1980	CSO 1980
Usia pensiun normal	55 tahun	55 tahun	55 tahun	55 tahun	55 tahun	55 tahun
Kenaikan gaji per tahun	12%	12%	12%	12%	12%	15%
Tingkat diskonto per tahun	6,79%	6,75%	6,75%	8,8%	10,5%	12,0%
Tingkat pengembalian aset program per tahun	6,79%	6,75%	6,75%	8,8%	10,5%	12,0%
Formula perhitungan manfaat pensiun	2,5% x masa kerja x gaji					

b. Imbalan Pasca Kerja Lainnya

Liabilitas imbalan pasca kerja terdiri atas:

	30 Juni 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010	31 Desember 2009	1 Januari 2009/ 31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Bank	83.730	77.852	67.627	56.900	46.848
Entitas anak					
AMAG	22.304	20.155	16.312	13.965	9.986
Clipan	9.962	8.975	6.822	5.279	3.907
VMF	5.838	3.585	3.444	2.689	1.809
BPS	4.192	5.110	2.440	1.998	2.131
Jumlah	126.026	115.677	96.645	80.831	64.681

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Saldo awal periode	115.677	96.645	80.831	64.681
Pengaruh akuntansi atas program pendanaan yang tidak memenuhi memenuhi syarat terhadap saldo awal entitas anak	-	-	-	2.682
Pembayaran manfaat karyawan pada periode berjalan	(1.683)	(2.436)	(1.062)	(1.578)
Eliminasi defisit dalam rangka kuasi reorganisasi	-	-	-	140
Beban periode berjalan	12.032	21.468	16.876	14.906
Saldo akhir periode	126.026	115.677	96.645	80.831

Bank

Bank membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sebanyak 6.152, 5.206, 5.706, 4.996 dan 4.600 karyawan masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan 2011 (2011 – tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi komprehensif adalah:

	30 Juni		31 Desember		
	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Biaya jasa kini	4.583	3.648	7.296	6.400	5.662
Biaya bunga	2.280	2.464	4.928	4.824	4.547
Amortisasi atas biaya jasa lalu yang belum direalisasi - *Non Vested Benefits*	113	107	215	118	168
Jumlah	6.976	6.219	12.439	11.342	10.377

Liabilitas imbalan pasca kerja di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011	2010	2009	31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Nilai tunai liabilitas yang tidak didanai	73.655	70.466	61.397	50.682	42.568
Biaya jasa lalu yang belum diakui - *Non Vested*	(1.905)	(2.099)	(2.485)	(2.872)	(3.258)
Keuntungan aktuarial yang belum diakui	11.980	9.485	8.715	9.090	7.538
Liabilitas bersih	83.730	77.852	67.627	56.900	46.848

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Saldo awal periode	77.852	67.627	56.900	46.848
Pembayaran manfaat karyawan pada periode berjalan	(1.098)	(2.214)	(615)	(325)
Beban periode berjalan	6.976	12.439	11.342	10.377
Saldo akhir periode	83.730	77.852	67.627	56.900

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo aktuaris independen dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

	30 Juni		31 Desember			1 Januari 2009/
	2012	2011 (Tidak diaudit)	2011	2010	2009	31 Desember 2008
Tabel mortalitas	CSO 1980	CSO 1980	CSO 1980	CSO 1980	CSO 1980	CSO 1980
Usia pensiun normal	55 tahun	55 tahun	55 tahun	55 tahun	55 tahun	55 tahun
Tingkat proyeksi kenaikan gaji per tahun	12%	12%	12%	12%	12%	15%
Tingkat diskonto per tahun	6,79%	6,75%	6,75%	8,8%	10,5%	12%
Tingkat ketidakmampuan	10% dari tingkat pertumbuhan					
Tingkat pengunduran diri	5% sampai dengan usia 20 tahun dan menurun secara bertahap sampai dengan 1% pada usia 45 tahun; dan seterusnya 5%					
Porsi dari pengunduran diri dipercepat	100% dari usia pengunduran diri normal					
Usia dari pengunduran diri normal	55 tahun					

44. JASA KUSTODIAN

Bank memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) berdasarkan surat keputusan No. KEP-01/PM/Kstd/2002 tanggal 28 Pebruari 2002. Penyimpanan efek nasabah pada kustodian Bank adalah sebesar Rp 4.645.464 juta dan USD 3 juta pada tanggal 30 Juni 2012, Rp 4.772.058 juta dan USD 8 juta pada tanggal 31 Desember 2011, Rp 4.030.946 juta dan USD 5 juta pada tanggal 31 Desember 2010 dan Rp 3.209.307 juta pada tanggal 31 Desember 2009 yang merupakan obligasi tanpa warkat serta sebesar 73.500.000, 437.500.000, 996.218.992 dan 959.218.992 lembar saham tanpa warkat masing-masing untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

Jasa kustodian yang dilakukan kustodian Bank antara lain meliputi jasa penyelesaian transaksi efek, jasa penyimpanan dan pengadministrasian efek serta jasa-jasa kustodian lainnya misalnya mengurus/menagihkan hak-hak yang melekat pada efek antara lain pembayaran kupon, dividen, bonus, pembayaran efek saat jatuh waktu dan lain-lainnya.

45. TRANSAKSI NON KAS

Bank dan entitas anak melakukan transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan setara kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Kenaikan (penurunan) tagihan dan liabilitas akseptasi	305.917	190.089	346.146	(13.056)	205.262
Kenaikan (penurunan) efek tersedia untuk dijual yang berasal dari perubahan nilai wajar	23.906	18.789	(14.071)	(155.399)	390.527
Peningkatan aset tetap yang berasal dari revaluasi aset tetap	-	-	-	-	2.137

46. SIFAT DAN TRANSAKSI BERELASI

Sifat Berelasi

Pihak-pihak yang berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Bank.

a. Perusahaan - perusahaan di bawah ini yang merupakan pihak yang berelasi sesuai dengan kriteria-kriteria yang dijelaskan pada Catatan 3f.

   – PT Amana Jaya
   – PT Terminal Builders
   – PT Dana Pensiun Karyawan Panin
   – PT Multi Amana Gemilang
   – Pengurus Bank

b. ANZ National Bank Ltd., Wellington merupakan anak perusahaan ANZ Banking Group Ltd., Melbourne.

c. PT Bank ANZ Indonesia (d/h PT ANZ Panin Bank) merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Bank.

d. Reksadana Panin Dana Maksima, Reksadana Panin Dana Unggulan, Reksadana Panin Dana Prima, Panin Dana Utama Plus 2 dan Reksadana Panin Dana Bersama Plus adalah produk-produk reksadana dari Panin Asset Management, anak perusahaan PT Panin Sekuritas Tbk.

e. PT Panin Financial Tbk (d/h PT Panin Life Tbk) merupakan pemegang saham Bank.

f. PT Panin Insurance Tbk merupakan pemegang saham PT Panin Financial Tbk.

Transaksi Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Bank dan entitas anak juga mengadakan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:

1. Giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan penerimaan bunga (Catatan 7, 8 dan 31).

2. Pemberian kredit dan penerimaan bunga (Catatan 11 dan 31).

3. Melakukan investasi dalam efek-efek dan penyertaan dalam bentuk saham (Catatan 9 dan 16).

4. Penempatan dana dari pihak-pihak yang berelasi dalam bentuk simpanan, simpanan dari bank lain dan pembayaran bunga (Catatan 19, 20 dan 32).

5. Sewa gedung dari Dana Pensiun Karyawan Pan Indonesia Bank, PT Multi Amana Gemilang, PT Amana Jaya dan PT Terminal Builders.

6. PT Panin Insurance Tbk dan PT Panin Financial Tbk menyewa ruang-ruang kantor.

7. Asuransi atas aset tetap Bank dan entitas anak, "*Cash-In-Transit*" dan "*Cash-In-Safe*" pada PT Panin Insurance Tbk.

Persentase giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, kredit dan penyertaan dalam bentuk saham dari pihak yang berelasi terhadap jumlah aset adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2012		31 Desember 2011		31 Desember 2010		31 Desember 2009	
	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%
Giro pada bank lain (Catatan 7)								
ANZ National Bank Ltd., Wellington	14.746	0,011	26.520	0,021	23.917	0,022	10.683	0,014
ANZ Banking Group Ltd., Melbourne	14.720	0,011	52.869	0,042	54.823	0,050	25.416	0,032
Penempatan pada bank lain (Catatan 8)								
Bank ANZ Indonesia (d/h PT ANZ Panin Bank)	-	-	-	-	180.200	0,165	490.000	0,623
Efek-efek (Catatan 9)								
Reksadana Panin Dana Maksima	11.681	0,009	-	-	1.008	0,001	-	-
Reksadana Panin Dana Unggulan	9.997	0,007	-	-	-	-	-	-
Reksadana Panin Dana Prima	7.404	0,005	-	-	-	-	-	-
Panin Dana Utama Plus 2	4.954	0,004	-	-	1.030	0,001	-	-
Reksadana Panin Dana Bersama Plus	4.910	0,004	-	-	-	-	-	-
PT Panin Sekuritas	-	-	39.893	0,047	39.613	0,038	40.000	0,051
Kredit (Catatan 11)								
Andi Achmad Radja	3.111	0,002	3.278	0,003	3.611	0,003	944	0,001
Sonny Ishack	1.500	0,001	1.289	0,001	1.493	0,001	1.522	0,002
H. Murdjani HZ	1.338	0,001	1.381	0,001	-	0,000	-	-
Lainnya	7.565	0,006	8.476	0,007	9.096	0,009	11.633	0,014
Penyertaan dalam bentuk saham (Catatan 16)								
PT Panin Sekuritas Tbk	236.057	0,174	226.798	0,182	185.185	0,170	126.162	0,162
PT Bank ANZ Indonesia (d/h PT ANZ Panin Bank)	16.500	0,012	16.500	0,013	7.500	0,007	7.500	0,010
PT First Asia Capital (d/h PT Panin Capital)	750	0,001	750	0,001	750	0,001	750	0,001
Jumlah	335.233	0,248	377.754	0,318	508.226	0,468	714.610	0,910

Persentase simpanan, simpanan dari bank lain dan liabilitas akseptasi, dari pihak yang berelasi terhadap jumlah liabilitas adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2012		31 Desember 2011		31 Desember 2010		31 Desember 2009	
	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%
Simpanan (Catatan 19)	422.960	0,356	424.923	0,390	379.438	0,397	288.374	0,436
Simpanan dari bank lain (Catatan 20)	12.468	0,011	10.155	0,009	30.000	0,031	30.864	0,047
Liabilitas akseptasi (Catatan 15)								
Bank ANZ Indonesia (d/h PT ANZ Panin Bank)	-	-	4.139	0,004	-	-	-	-
Jumlah	435.428	0,367	439.217	0,403	409.438	0,428	319.238	0,483

Persentase pendapatan bunga, beban bunga, beban sewa dan beban asuransi kepada pihak yang berelasi terhadap jumlah pendapatan bunga, beban bunga serta beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2012		30 Juni 2011		31 Desember 2011		31 Desember 2010		31 Desember 2009	
	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%
Pendapatan bunga	2	0,000	2	0,000	961	0,000	246	0,003	148	0,002
Beban bunga	7.660	0,320	9.366	0,383	2.749.585	0,584	11.905	0,299	212.971	5,131
Beban sewa dan asuransi	22.101	2,883	25.886	2,491	4.586.214	2,206	37.950	2,747	32.927	3,405
Jumlah	29.763	3,203	35.254	2,874	7.336.760	2,790	50.101	3,049	246.046	8,538

Manajemen berpendapat bahwa semua transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan tingkat harga, persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga.

47. TRANSAKSI PEMBELIAN DAN PENJUALAN TUNAI VALUTA ASING

Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, pembelian dan penjualan tunai valuta asing yang belum diselesaikan terdiri atas:

	30 Juni	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Pembelian tunai valuta asing				
Dollar Amerika Serikat	454.591	159.153	105.467	263.060
Yen Jepang	150.263	9.099	-	22.588
Dollar Australia	95.526	64.441	18.339	2.536
Euro	76.784	70.289	24.036	36.565
Dollar Selandia Baru	52.490	3.500	-	-
Poundsterling Inggris	7.334	13.975	-	4.549
Franc Swiss	4.753	-	-	-
Dollar Singapura	4.700	13.628	-	1.894
Dollar Hongkong	4.698	-	2.706	32.050
Jumlah	851.139	334.085	150.548	363.242
Penjualan tunai valuta asing				
Dollar Amerika Serikat	470.093	196.777	50.298	118.466
Dollar Australia	152.842	82.852	16.047	592
Yen Jepang	150.199	4.540	5.694	-
Euro	59.065	50.373	36.054	-
Dollar Selandia Baru	56.239	-	-	-
Dollar Singapura	28.236	-	31.773	
Franc Swiss	4.703	18.179	2.720	-
Poundsterling Inggris	-	6.988	13.941	-
Jumlah	921.377	359.709	156.527	119.058

48. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

	30 Juni	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Komitmen				
Liabilitas Komitmen				
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	(20.850.834)	(17.604.732)	(12.462.734)	(8.445.329)
L/C yang *irrevocable* dan masih berjalan dalam rangka ekspor dan impor	(652.028)	(476.274)	(572.448)	(183.880)
Jumlah Liabilitas Komitmen	(21.502.862)	(18.081.006)	(13.035.182)	(8.629.209)

	30 Juni	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Kontinjensi				
Tagihan Kontinjensi				
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	547.905	390.422	151.962	74.952
Liabilitas Kontinjensi				
Bank Garansi	(834.682)	(633.741)	(505.734)	(381.042)
Standby L/C	(60.518)	(3.809)	(8.199)	(5.167)
Jumlah Liabilitas Kontinjensi	(895.200)	(637.550)	(513.933)	(386.209)
Jumlah Liabilitas Kontinjensi - Bersih	(347.295)	(247.128)	(361.971)	(311.257)
Lainnya				
Kredit hapus buku	2.649.993	2.859.844	3.487.153	3.326.290

49. ASET DAN LIABILITAS DALAM VALUTA ASING

Posisi aset dan liabilitas dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Aset				
Kas	115.098	105.434	72.049	44.656
Giro pada Bank Indonesia	1.404.179	1.310.254	175.695	138.107
Giro pada bank lain	515.921	1.092.187	801.885	828.761
Penempatan pada bank lain	2.367.782	2.271.959	4.349.563	5.350.060
Efek-efek	2.514.027	1.874.535	1.695.512	1.541.099
Kredit	9.784.916	8.929.561	8.849.876	5.414.025
Investasi neto sewa pembiayaan	57.474	72.774	77.772	57.962
Tagihan akseptasi	1.100.630	833.027	498.801	500.302
Aset lain-lain	82.092	92.565	89.813	77.814
	17.942.119	16.582.296	16.610.966	13.952.786
Cadangan kerugian penurunan nilai	(342.559)	(256.946)	(188.744)	(223.282)
Jumlah	17.599.560	16.325.350	16.422.222	13.729.504
Liabilitas				
Liabilitas segera	262.147	205.171	83.123	121.930
Simpanan	12.350.772	12.679.408	13.659.005	11.728.264
Simpanan dari bank lain	1.742.635	1.054.754	92.117	353.424
Liabilitas akseptasi	1.104.564	835.503	498.801	500.302
Pinjaman yang diterima	1.829.058	1.334.683	2.250.932	939.500
Liabilitas lain-lain	120.508	97.860	157.892	108.146
Jumlah	17.409.684	16.207.379	16.741.870	13.751.566

Rincian aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2012 adalah sebagai berikut:

		Mata Uang Asing	Ekuivalen dalam Rp Rp Juta
ASET			
Bank			
Kas	USD	11.291.736	106.058
	SGD	1.221.955	9.040
Giro pada Bank Indonesia	USD	149.500.000	1.404.179
Giro pada bank lain			
Pihak berelasi	NZD	1.966.565	14.746
	AUD	1.540.943	14.720
Pihak ketiga	USD	23.273.782	218.599
	SGD	12.871.418	95.223
	EUR	4.441.089	52.462
	JPY	323.658.962	38.243
	CAD	3.309.530	30.325
	CHF	2.432.440	23.919
	GBP	1.394.289	20.451
	HKD	2.670.072	3.234
Penempatan pada bank lain	AUD	78.500.000	749.883
	EUR	48.000.000	567.022
	SGD	71.000.000	525.258
	USD	39.000.000	366.308
	JPY	500.000.000	59.080
	GBP	3.000.000	44.002
	NZD	4.500.000	33.743
	HKD	8.000.000	9.688
Efek-efek	USD	266.145.771	2.499.774
	JPY	1.389.500	164
Kredit	USD	1.030.220.400	9.676.345
	SGD	14.675.734	108.571
Tagihan akseptasi	USD	114.670.398	1.077.042
	JPY	147.363.321	17.412
	EUR	354.190	4.184
	CHF	202.552	1.992
Aset lain-lain	USD	8.509.122	79.922
	JPY	4.846.995	573
	AUD	57.123	546
	SGD	54.609	404
	Lainnya		218
Sub jumlah - Bank			17.853.330
Entitas anak			
Giro pada bank lain	USD	425.745	3.999
Penempatan pada bank lain	USD	1.362.577	12.798
Efek-efek	USD	1.500.000	14.089
Investasi neto sewa pembiayaan	USD	6.119.165	57.474
Aset lain-lain	USD	44.616	419
	SGD	642	5
	Lainnya		5
Sub jumlah - Entitas anak			88.789
Cadangan kerugian penurunan nilai	USD	36.471.507	(342.559)
Jumlah Aset			17.599.560

		Mata Uang Asing	Ekuivalen dalam Rp Rp Juta
Liabilitas			
Bank			
Liabilitas segera	USD	21.660.134	203.443
	EUR	2.147.234	25.365
	SGD	1.507.415	11.152
	JPY	81.747.484	9.659
	AUD	595.461	5.688
	HKD	2.946.561	3.568
	CAD	62.357	572
	Lainnya		2.700
Simpanan			
Pihak berelasi	USD	14.737.304	138.421
	AUD	7.000	82
	NZD	230	2
	EUR	120	1
Pihak ketiga	USD	1.022.909.754	9.607.680
	AUD	106.164.149	1.014.149
	SGD	95.170.428	704.071
	EUR	51.744.967	611.260
	JPY	751.605.892	88.810
	GBP	4.849.510	71.129
	NZD	5.779.406	43.337
	CAD	3.493.132	32.007
	CHF	2.508.176	24.664
	HKD	12.517.171	15.159
Simpanan dari bank lain	USD	185.534.877	1.742.635
Liabilitas akseptasi	USD	115.075.885	1.080.850
	JPY	148.325.710	17.526
	EUR	355.016	4.194
	CHF	202.805	1.994
Pinjaman yang diterima	USD	194.735.981	1.829.058
Liabilitas lain-lain	USD	12.050.651	113.186
	JPY	21.785.161	2.574
	EUR	180.969	2.138
	AUD	202.082	1.931
	SGD	31.111	230
	CHF	21.131	208
	CAD	457	4
	NZD	235	2
	GBP	29	1
Sub jumlah - Bank			17.409.450
Entitas anak			
Liabilitas lain-lain	USD	25.093	233
	Lainnya		1
Sub jumlah - Entitas anak			234
Jumlah liabilitas			17.409.684
Jumlah Aset - Bersih			189.876

Jumlah aset dan liabilitas moneter pada tanggal 30 Juni 2012 dengan menggunakan kurs 14 Nopember 2012 masing-masing sebesar Rp 18.074.576 juta dan Rp 17.899.068 juta.

Bank senantiasa menyiapkan beberapa perangkat dalam pengelolaan risiko mata uang asing, sebagai berikut:

- Membatasi rasio posisi devisa neto baik *limit intraday* maupun *limit overnight*.

- Menetapkan *limit* bagi *risk taking unit*, berupa *limit* kerugian, *limit counterparty* dan *limit* terkait lainnya.

Kurs yang digunakan oleh Bank untuk menjabarkan aset dan liabilitas dalam mata uang asing adalah kurs Reuters jam 16.00 WIB dengan rincian sebagai berikut:

Valuta asing	14 Nopember 2012	30 Juni 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1 Dollar Amerika Serikat	9.625,00	9.392,50	9.067,50	9.010,00	9.395,00
1 Dollar Singapura	7.868,00	7.398,00	6.983,55	7.025,89	6.704,50
1 Yen Jepang	119,95	118,16	116,82	110,75	102,19
1 Euro	12.260,00	11.812,95	11.714,76	12.017,99	13.542,43
1 Dollar Hongkong	1.242,00	1.211,03	1.167,23	1.159,08	1.211,48
1 Dollar Australia	9.982,00	9.552,65	9.205,78	9.169,48	8.453,16
1 Poundsterling Inggris	15.248,00	14.667,33	13.975,29	13.941,18	15.164,94
1 Franc Swiss	10.186,00	9.833,50	9.631,94	9.619,39	9.446,43
1 Dollar Selandia Baru	7.797,00	7.498,51	7.000,57	6.970,14	6.828,29
1 Dollar Kanada	9.592,00	9.162,97	8.885,35	9.024,89	8.965,12

50. SEGMEN OPERASI

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan informasi yang dikaji ulang oleh pengambil keputusan operasional yang digunakan untuk tujuan alokasi sumber daya dan menilai kinerja segmen tersebut.

Bank dan entitas anak melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK 5 (revisi 2009) berdasarkan kegiatan usaha dan informasi wilayah geografis.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha, dibagi menjadi:

1. Bank
2. Pembiayaan
3. Asuransi

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen usaha:

	30 Juni 2012				
	Bank	Pembiayaan	Asuransi	Eliminasi	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
PENDAPATAN					
Pendapatan bunga	4.956.853	501.353	8.130	(32.124)	5.434.212
Pendapatan (beban) lainnya	775.724	79.121	225.155	(81.000)	999.000
Jumlah	5.732.577	580.474	233.285	(113.124)	6.433.212
HASIL					
Hasil segmen dari operasi	1.351.041	194.425	52.747	(51.872)	1.546.341
Bagian laba bersih entitas asosiasi	30.139	290	336	-	30.765
Laba sebelum pajak	1.366.817	240.577	78.294	(55.531)	1.630.157
INFORMASI LAINNYA					
ASET					
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih	8.455.065	378.450	735.982	(119.380)	9.450.117
Efek-efek - bersih	16.406.537	15.406	318.996	(105.506)	16.635.433
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	5.789.023	-	-	-	5.789.023
Kredit - bersih	81.731.012	-	-	(350.188)	81.380.824
Aset tetap - bersih	1.803.192	77.829	12.939	-	1.893.960
Aset lainnya - bersih	14.070.881	6.458.407	181.353	(66.460)	20.644.181
Jumlah Aset	128.255.710	6.930.092	1.249.270	(641.534)	135.793.538
LIABILITAS					
Simpanan	92.882.944	-	-	(95.699)	92.787.245
Simpanan dari bank lain	8.581.265	-	-	(61)	8.581.204
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali - bersih	3.062.667	-	-	-	3.062.667
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	1.577.161	2.418.238	-	(115.406)	3.879.993
Pinjaman yang diterima	1.829.109	1.790.725	-	(350.189)	3.269.645
Liabilitas lainnya	2.451.784	234.884	568.829	(40.082)	3.215.415
Obligasi subordinasi - bersih	3.933.105	-	-	(38.500)	3.894.605
Jumlah Liabilitas	114.318.035	4.443.847	568.829	(639.937)	118.690.774
Pengeluaran modal	129.025	21.653	3.844	-	154.522
Penyusutan dan amortisasi	110.440	8.307	1.465	-	120.212
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai	402.590	31.464	-	-	434.054

	30 Juni 2011 (Tidak diaudit)				
	Bank	Pembiayaan	Asuransi	Eliminasi	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
PENDAPATAN					
Pendapatan bunga	4.492.701	367.480	6.913	(38.684)	4.828.410
Pendapatan (beban) lainnya	672.208	54.901	170.248	(45.880)	851.477
Jumlah	5.164.909	422.381	177.161	(84.564)	5.679.887
HASIL					
Hasil segmen dari operasi	938.863	163.680	46.058	(37.512)	1.111.089
Bagian laba bersih entitas asosiasi	30.169	(130)	238	-	30.277
Laba sebelum pajak	925.049	198.011	63.463	(39.865)	1.146.658

	31 Desember 2011				
	Bank	Pembiayaan	Asuransi	Eliminasi	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
PENDAPATAN					
Pendapatan bunga	9.205.461	802.663	13.437	(75.911)	9.945.650
Pendapatan (beban) lainnya	1.815.976	131.153	353.955	(82.490)	2.218.594
Jumlah	11.021.437	933.816	367.392	(158.401)	12.164.244
HASIL					
Hasil segmen dari operasi	2.272.619	316.775	68.606	(29.937)	2.628.063
Bagian laba bersih entitas asosiasi	58.317	(42)	294	-	58.569
Laba sebelum pajak	2.268.389	398.448	109.395	(39.866)	2.736.366
INFORMASI LAINNYA					
ASET					
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih	15.208.192	186.562	727.159	(153.356)	15.968.557
Efek-efek - bersih	15.413.345	15.261	215.052	(105.883)	15.537.775
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	2.798.161	-	-	-	2.798.161
Kredit - bersih	69.496.763	-	-	(417.452)	69.079.311
Aset tetap - bersih	1.728.373	66.377	10.658	-	1.805.408
Aset lainnya - bersih	13.568.247	6.038.333	99.064	(140.677)	19.564.967
Jumlah Aset	118.213.081	6.306.533	1.051.933	(817.368)	124.754.179
LIABILITAS					
Simpanan	85.955.923	-	-	(207.391)	85.748.532
Simpanan dari bank lain	5.315.407	-	-	(178)	5.315.229
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali - bersih	3.665.163	-	-	-	3.665.163
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	3.051.302	1.685.660	-	(145.261)	4.591.701
Pinjaman yang diterima	1.334.735	2.067.872	-	(417.452)	2.985.155
Liabilitas lainnya	2.065.924	193.665	415.529	(6.464)	2.668.654
Obligasi subordinasi - bersih	3.930.114	-	-	(38.500)	3.891.614
Jumlah Liabilitas	105.318.568	3.947.197	415.529	(815.246)	108.866.048
Pengeluaran modal	227.404	31.963	2.436	-	261.803
Penyusutan dan amortisasi	241.445	13.413	2.933	-	257.791
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai	919.117	42.750	-	-	961.867

	31 Desember 2010				
	Bank	Pembiayaan	Asuransi	Eliminasi	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
PENDAPATAN					
Pendapatan bunga	7.701.161	488.568	37.069	(42.831)	8.183.967
Pendapatan (beban) lainnya	1.119.134	97.707	240.695	(8.135)	1.449.401
Jumlah	8.820.295	586.275	277.764	(50.966)	9.633.368
HASIL					
Hasil segmen dari operasi	1.541.472	240.788	65.680	7.949	1.855.889
Bagian laba bersih entitas asosiasi	69.463	88	435	-	69.986
Laba sebelum pajak	1.575.595	300.435	67.796	-	1.943.826
INFORMASI LAINNYA					
ASET					
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih	16.604.909	20.230	433.315	(69.378)	16.989.076
Efek-efek - bersih	20.641.305	14.906	112.806	(81.316)	20.687.701
Kredit - bersih	56.183.064	-	-	(500.502)	55.682.562
Aset tetap - bersih	1.701.356	50.718	11.206	-	1.763.280
Aset lainnya - bersih	10.229.100	3.569.300	97.030	(22.715)	13.872.715
Jumlah Aset	105.359.734	3.655.154	654.357	(673.911)	108.995.334
LIABILITAS					
Simpanan	75.364.445	-	-	(84.725)	75.279.720
Simpanan dari bank lain	3.567.488	-	-	(162)	3.567.326
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali - bersih	4.653.892	-	-	-	4.653.892
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	2.832.658	-	-	(42.816)	2.789.842
Pinjaman yang diterima	2.251.026	1.831.890	-	(500.527)	3.582.389
Liabilitas lainnya	1.261.876	181.213	303.392	(7.181)	1.739.300
Obligasi subordinasi - bersih	3.924.611	-	-	(38.500)	3.886.111
Jumlah Liabilitas	93.855.996	2.013.103	303.392	(673.911)	95.498.580
Pengeluaran modal	341.271	23.707	2.326	-	367.304
Penyusutan dan amortisasi	261.463	11.848	4.506	-	277.817
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai	1.198.943	17.647	-	-	1.216.590

	31 Desember 2009				
	Bank	Pembiayaan	Asuransi	Eliminasi	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
PENDAPATAN					
Pendapatan bunga	6.971.854	387.123	32.706	(16.016)	7.375.667
Pendapatan (beban) lainnya	725.570	83.741	221.863	(17.320)	1.013.854
Jumlah	7.697.424	470.864	254.569	(33.336)	8.389.521
HASIL					
Hasil segmen dari operasi	1.171.882	161.212	52.269	16.068	1.401.431
Bagian laba bersih entitas asosiasi	43.317	-	194	-	43.511
Laba sebelum pajak	1.186.119	225.533	54.903	-	1.466.555
INFORMASI LAINNYA					
ASET					
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih	7.840.159	1.525	307.299	(41.900)	8.107.083
Efek-efek - bersih	19.028.713	74.372	67.758	(84.372)	19.086.471
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	-	-	8.000	-	8.000
Kredit - bersih	40.127.328	-	-	(160.230)	39.967.098
Aset tetap - bersih	1.655.258	34.156	13.415	-	1.702.829
Aset lainnya - bersih	6.678.944	2.304.679	109.853	(49.240)	9.044.236
Jumlah Aset	75.330.402	2.414.732	506.325	(335.742)	77.915.717
LIABILITAS					
Simpanan	56.311.770	-	-	(77.283)	56.234.487
Simpanan dari bank lain	2.260.382	-	-	(582)	2.259.800
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali - bersih	503.887	-	-	-	503.887
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	2.388.132	-	-	(84.372)	2.303.760
Pinjaman yang diterima	939.625	852.523	-	(160.230)	1.631.918
Liabilitas lainnya	1.356.739	115.308	234.513	(13.275)	1.693.285
Obligasi subordinasi - bersih	1.491.856	-	-	-	1.491.856
Jumlah Liabilitas	65.252.391	967.831	234.513	(335.742)	66.118.993
Pengeluaran modal	285.822	9.031	3.274	-	298.127
Penyusutan dan amortisasi	258.899	10.528	2.132	-	271.559
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai	907.299	42.629	-	-	949.928

Informasi Wilayah Geografis

Operasional utama Bank dan entitas anak di wilayah Indonesia yang memiliki risiko dan imbalan relatif sama. Bank hanya memiliki cabang di Cayman Islands dan kantor perwakilan di Singapura, yang kegiatan operasionalnya tidak signifikan.

Informasi wilayah geografis dikelompokkan menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan di luar DKI Jakarta.

Berikut ini adalah informasi wilayah geografis:

	30 Juni 2012			
	DKI Jakarta	Luar DKI Jakarta	Eliminasi	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Pendapatan bunga	3.508.407	1.957.929	(32.124)	5.434.212
Kredit - bersih	50.955.209	30.775.803	(350.188)	81.380.824
Jumlah Aset	98.665.592	37.767.883	(639.937)	135.793.538
Simpanan	48.842.415	44.040.529	(95.699)	92.787.245
Jumlah Liabilitas	70.314.204	49.016.508	(639.937)	118.690.775

	31 Desember 2011			
	DKI Jakarta	Luar DKI Jakarta	Eliminasi	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Pendapatan bunga	6.590.669	3.430.892	(75.911)	9.945.650
Kredit - bersih	42.615.140	26.881.623	(417.452)	69.079.311
Jumlah Aset	92.163.523	33.405.902	(815.246)	124.754.179
Simpanan	44.768.581	41.187.342	(207.391)	85.748.532
Jumlah Liabilitas	64.133.015	45.548.279	(815.246)	108.866.048

	31 Desember 2010			
	DKI Jakarta	Luar DKI Jakarta	Eliminasi	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Pendapatan bunga	5.465.113	2.761.685	(42.831)	8.183.967
Kredit - bersih	34.852.296	21.330.768	(500.502)	55.682.562
Jumlah Aset	83.928.037	25.741.208	(673.911)	108.995.334
Simpanan	39.164.687	36.199.758	(84.725)	75.279.720
Jumlah Liabilitas	56.086.318	40.086.173	(673.911)	95.498.580

	31 Desember 2009			
	DKI Jakarta	Luar DKI Jakarta	Eliminasi	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Pendapatan bunga	5.082.148	2.309.535	(16.016)	7.375.667
Kredit - bersih	23.998.570	16.128.758	(160.230)	39.967.098
Jumlah Aset	60.065.429	18.186.030	(335.742)	77.915.717
Simpanan	27.905.299	28.406.471	(77.283)	56.234.487
Jumlah Liabilitas	36.756.694	29.698.041	(335.742)	66.118.993

51. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Salinan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1/PLPS/2005 pada tanggal 26 September 2005 tentang Program Penjaminan Simpanan yang menyatakan bahwa sejak tanggal 22 September 2005, Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan yang meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu yang merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat termasuk yang berasal dari bank lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, yang menyatakan bahwa sejak tanggal 13 Oktober 2008 besaran nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula maksimal Rp 100 juta diubah menjadi maksimal Rp 2.000 juta.

Beban premi penjaminan Pemerintah yang dibayar untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan 2011 (tidak-diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 81.307 juta, Rp 70.970 juta, Rp 170.391 juta, Rp 124.346 juta dan Rp 109.449 juta.

52. KLASIFIKASI DAN NILAI WAJAR ATAS ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (KONVENSIONAL)

Tabel di bawah ini menunjukkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan.

		30 Juni 2012						
	Catatan	Diperdagangkan	Dimiliki hingga jatuh tempo	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Tersedia untuk dijual	Biaya perolehan diamortisasi	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar
		Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Aset keuangan								
Kas	5	-	-	1.127.088	-	-	1.127.088	1.127.088
Giro pada Bank Indonesia	6	-	-	8.395.204	-	-	8.395.204	8.395.204
Giro pada bank lain	7	-	-	617.745	-	-	617.745	617.746
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8	-	-	9.450.117	-	-	9.450.117	9.450.117
Efek-efek	9	563.054	12.383.666	-	3.688.713	-	16.635.433	17.800.762
Tagihan derivatif	10	8.839	-	-	-	-	8.839	8.839
Kredit	11	-	-	81.380.824	-	-	81.380.824	81.923.026
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	12	-	-	5.789.023	-	-	5.789.023	5.789.023
Investasi neto sewa pembiayaan	13	-	-	1.419.557	-	-	1.419.557	1.435.984
Piutang pembiayaan konsumen	14	-	-	3.696.266	-	-	3.696.266	3.744.243
Tagihan akseptasi	15	-	-	1.155.133	-	-	1.155.133	1.155.133
Penyertaan dalam bentuk saham	16	-	-	-	18.676	-	18.676	18.676
Tagihan anjak piutang		-	-	1.044.310	-	-	1.044.310	1.045.250
Aset lain-lain	18	-	-	669.542	-	-	669.542	669.542
Jumlah		571.893	12.383.666	114.744.809	3.707.389	-	131.407.757	133.180.633
Liabilitas keuangan								
Simpanan	19	-	-	-	-	92.787.245	92.787.245	92.787.245
Simpanan dari bank lain	20	-	-	-	-	8.581.204	8.581.204	8.581.204
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	21	-	-	-	-	3.062.667	3.062.667	3.062.667
Liabilitas derivatif	10	3.419	-	-	-	-	3.419	3.419
Liabilitas akseptasi	15	-	-	-	-	1.155.912	1.155.912	1.155.912
Surat berharga yang diterbitkan	22	-	-	-	-	3.879.993	3.879.993	3.895.779
Pinjaman yang diterima	23	-	-	-	-	3.269.645	3.269.645	3.921.380
Liabilitas lain-lain	25	-	-	-	-	369.798	369.798	369.798
Obligasi subordinasi	26	-	-	-	-	3.894.605	3.894.605	4.080.704
Jumlah		3.419	-	-	-	117.001.069	117.004.488	117.858.108
Selisih		568.474	12.383.666	114.744.809	3.707.389	(117.001.069)	14.403.269	15.322.525

		31 Desember 2011						
	Catatan	Diperdagangkan	Dimiliki hingga jatuh tempo	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Tersedia untuk dijual	Biaya perolehan diamortisasi	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar
		Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Aset keuangan								
Kas	5	-	-	1.392.325	-	-	1.392.325	1.392.325
Giro pada Bank Indonesia	6	-	-	7.490.081	-	-	7.490.081	7.490.081
Giro pada bank lain	7	-	-	1.185.222	-	-	1.185.222	1.185.224
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8	-	-	15.968.557	-	-	15.968.557	15.969.057
Efek-efek	9	570.951	13.351.174	-	1.615.650	-	15.537.775	15.994.691
Tagihan derivatif	10	3.316	-	-	-	-	3.316	3.316
Kredit	11	-	-	69.079.311	-	-	69.079.311	71.718.473
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	12	-	-	2.798.161	-	-	2.798.161	2.798.161
Investasi neto sewa pembiayaan	13	-	-	1.152.711	-	-	1.152.711	1.157.687
Piutang pembiayaan konsumen	14	-	-	3.533.672	-	-	3.454.100	3.500.772
Tagihan akseptasi	15	-	-	848.825	-	-	848.825	848.825
Penyertaan dalam bentuk saham	16	-	-	-	18.676	-	18.676	18.676
Tagihan anjak piutang		-	-	1.078.015	-	-	1.078.015	1.091.300
Aset lain-lain	18	-	-	696.051	-	-	696.051	696.164
Jumlah		574.267	13.351.174	105.222.931	1.634.326	-	120.703.126	123.864.751
Liabilitas keuangan								
Simpanan	19	-	-	-	-	85.748.532	85.748.532	85.748.532
Simpanan dari bank lain	20	-	-	-	-	5.315.229	5.315.229	5.315.229
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	21	-	-	-	-	3.665.163	3.665.163	3.665.163
Liabilitas derivatif	10	2.951	-	-	-	-	2.951	2.951
Liabilitas akseptasi	15	-	-	-	-	849.994	849.994	849.994
Surat berharga yang diterbitkan	22	-	-	-	-	4.591.701	4.591.701	4.499.680
Pinjaman yang diterima	23	-	-	-	-	2.985.155	2.985.155	2.985.866
Liabilitas lain-lain	25	-	-	-	-	345.426	345.426	345.426
Obligasi subordinasi	26	-	-	-	-	3.891.614	3.891.614	4.058.281
Jumlah		2.951	-	-	-	107.392.814	107.395.765	107.471.122
Selisih		571.316	13.351.174	105.222.931	1.634.326	(107.392.814)	13.307.361	16.393.629

		31 Desember 2010						
	Catatan	Diperdagangkan	Dimiliki hingga jatuh tempo	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Tersedia untuk dijual	Biaya perolehan diamortisasi	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar
		Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Aset keuangan								
Kas	5	-	-	1.076.074	-	-	1.076.074	1.076.074
Giro pada Bank Indonesia	6	-	-	5.403.656	-	-	5.403.656	5.403.656
Giro pada bank lain	7	-	-	868.754	-	-	868.754	868.756
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8	-	-	16.989.076	-	-	16.989.076	16.989.676
Efek-efek	9	102.186	8.005.276	-	12.580.239	-	20.687.701	21.090.253
Tagihan derivatif	10	4.936	-		-	-	4.936	4.936
Kredit	11	-	-	55.682.562	-	-	55.682.562	57.631.584
Investasi neto sewa pembiayaan	13	-	-	926.382	-	-	926.382	944.816
Piutang pembiayaan konsumen	14	-	-	1.949.424	-	-	1.905.074	1.946.924
Tagihan akseptasi	15	-	-	503.849	-	-	503.849	503.849
Penyertaan dalam bentuk saham	16	-	-	-	9.676	-	9.676	9.676
Tagihan anjak piutang		-	-	567.094	-	-	567.094	577.011
Aset lain-lain	18	-	-	668.389	-	-	668.389	670.451
Jumlah		107.122	8.005.276	84.635.260	12.589.915	-	105.293.223	107.717.662
Liabilitas keuangan								
Simpanan	19	-	-	-	-	75.279.720	75.279.720	75.279.720
Simpanan dari bank lain	20	-	-	-	-	3.567.326	3.567.326	3.567.326
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	21	-	-	-	-	4.653.892	4.653.892	4.653.892
Liabilitas derivatif	10	7.216	-	-	-	-	7.216	7.216
Liabilitas akseptasi	15	-	-	-	-	503.849	503.849	503.849
Surat berharga yang diterbitkan	22	-	-	-	-	2.789.842	2.789.842	2.806.146
Pinjaman yang diterima	23	-	-	-	-	3.582.389	3.582.389	3.587.536
Liabilitas lain-lain	25	-	-	-	-	352.640	352.640	352.640
Obligasi subordinasi	26	-	-	-	-	3.886.111	3.886.111	3.966.108
Jumlah		7.216	-	-	-	94.615.769	94.622.985	94.724.433
Selisih		99.906	8.005.276	84.635.260	12.589.915	(94.615.769)	10.670.238	12.993.229

Seluruh efek – efek diperdagangkan dan tersedia untuk dijual pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 setelah pengakuan awal diukur dengan hirarki nilai wajar tingkat I, yaitu harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset yang identik, kecuali efek-efek tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 39.310 juta dan Rp 38.962 juta yang diukur dengan nilai wajar tingkat 3, yaitu input aset yang bukan berdasakan data pasar yang dapat diobservasi (input yang dapat diobservasi).

Nilai tercatat aset keuangan yang menghasilkan bunga dan nilai tercatat liabilitas keuangan yang berbunga adalah sebesar Rp 119.729.911 juta, dan Rp 115.475.343 juta pada tanggal 30 Juni 2012, Rp 109.611.554 juta dan Rp 106.197.343 juta pada tanggal 31 Desember 2011 dan Rp 98.617.682 juta dan Rp 93.759.236 juta pada tanggal 31 Desember 2010.

53. INFORMASI LAINNYA

a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 mewajibkan bank-bank untuk memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8%.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/27/DPNP tanggal 27 Nopember 2006 tentang prinsip kehati-hatian dan laporan dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap entitas anak, mewajibkan bank di Indonesia memperhitungkan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) secara konsolidasian.

Peraturan Bank Indonesia No.9/13/PBI/2007 tanggal 1 November 2007 mewajibkan bank-bank di Indonesia dengan kriteria tertentu untuk memperhitungkan risiko pasar (*market risk*) dalam perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum baik secara individual maupun secara konsolidasian.

Peraturan Bank Indonesia No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 mewajibkan setiap bank di Indonesia untuk memperhitungkan risiko operasional (*operational risk*) dalam perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum baik secara individual maupun secara konsolidasian dan wajib menyediakan rasio kewajiban penyediaan modal inti minimum sebesar 5%.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011mengatur ketentuan pelaksanaan perhitungan aset tertimbang enurut risiko untuk risiko kredit baik secara individual maupun konsolidasian. Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

Rasio kewajiban penyediaan modal Bank dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Konsolidasian				
Modal				
Modal Inti	14.902.122	13.401.586	11.082.970	9.993.950
Modal Pelengkap	4.140.670	4.187.513	1.707.555	1.705.736
Penyertaan	(264.222)	(295.344)	(224.672)	(145.562)
Jumlah Modal	18.778.570	17.293.755	12.565.853	11.554.124
Aset tertimbang menurut risiko:				
untuk risiko kredit	91.710.749	81.796.263	64.419.742	48.218.899
untuk risiko operasional	10.035.588	7.585.650	4.063.850	-
untuk risiko pasar	413.476	466.483	37.149	389.100
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan:				
risiko kredit dan operasional	18,46%	19,35%	18,35%	23,96%
risiko kredit, operasional dan pasar	18,38%	19,25%	18,34%	23,77%
Bank				
Modal				
Modal Inti	13.002.006	11.700.322	9.891.866	9.016.363
Modal Pelengkap	4.062.372	4.110.013	1.667.363	1.678.364
Penyertaan	(1.302.428)	(1.302.428)	(718.672)	(718.672)
Jumlah Modal	15.761.950	14.507.907	10.840.557	9.976.055
Aset Tertimbang Menurut Risiko:				
untuk risiko kredit	85.442.731	75.586.460	61.201.831	46.023.987
untuk risiko operasional	9.169.525	7.170.250	3.869.938	-
untuk risiko pasar	382.582	381.828	55.216	307.703
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan:				
risiko kredit dan operasional	16,66%	17,53%	16,66%	21,68%
risiko kredit, operasional dan pasar	16,59%	17,45%	16,65%	21,53%

b. Rasio aset produktif yang diklasifikasikan terhadap total aset produktif pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar 2,26%, 2,31%, 1,95% dan 2,12%.

c. Berikut ini adalah saldo penyediaan dana kepada pihak berelasi per tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK):

	30 Juni	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Giro pada bank lain	29.466	79.389	78.740	36.099
Efek - efek	-	30.000	30.000	30.000
Kredit	365.246	432.993	515.716	173.385
Penyertaan dalam bentuk saham	134.513	134.513	96.413	96.413
Jumlah	529.225	676.895	720.869	335.897

Batas maksimum pemberian kredit kepada pihak berelasi per tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebesar Rp 1.576.195 juta, Rp 1.450.791 juta, Rp 1.084.056 juta dan Rp 997.606 juta (10% dari modal Bank).

54. MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparties*) dalam memenuhi liabilitasnya.

Penerapan manajemen risiko kredit tidak hanya ditujukan untuk menempatkan Bank sebagai bank yang patuh terhadap regulasi, namun merupakan suatu tuntutan manajemen untuk menerapkan sistem pengelolaan risiko kredit yang baik dan sesuai dengan praktek di perbankan. Penerapan manajemen risiko yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas kredit, namun juga diharapkan mampu mendorong kegiatan bisnis Bank.

Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, Bank memastikan bahwa dalam proses pemberian kredit harus mengikuti prosedur perkreditan yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yang mengacu pada Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank dan Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang antara lain mengatur mengenai wewenang memutus kredit pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang, proses pemberian kredit, penetapan harga, pengelolaan kredit bermasalah, manajemen portofolio, peran dan fungsi pengawasan oleh SKAI dan Biro Kepatuhan, serta keterlibatan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen dalam memberikan opini untuk kredit di atas jumlah yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung implementasi pengukuran risiko kredit sesuai Basel II, saat ini Bank menggunakan internal model yaitu *Internal Credit Risk Rating* (ICRR) untuk kredit/*exposure* debitur dengan *plafond* di atas Rp 50 miliar dan *Credit Scoring* untuk kredit konsumsi.

Pemberian kredit juga tidak mengabaikan konsep Hubungan Total Debitur (*one obligor concept*), pemantauan terhadap Konsentrasi Kredit, pemenuhan terhadap Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) serta penentuan Limit Kewenangan dalam proses pemutusan kredit yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Komite Kredit Cabang sampai tingkat Komite Kredit Direksi, untuk pemberian kredit kepada debitur dengan jumlah *plafond* diatas Rp 50 miliar wajib mendapat Opini dari Biro Manajemen Risiko & Kepatuhan dengan selalu memperhatikan *Legal Lending Limit* atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) serta mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Pembentukan cadangan diatur sesuai dengan ketentuan internal yang ada juga tidak luput dilakukan untuk mengalokasikan kerugian yang mungkin timbul akibat gagal bayar *counterparty* kepada Bank.

Sebagai upaya penyelesaian terhadap kredit bermasalah yang timbul dari aktivitas pembiayaan, Bank telah memiliki sistem dan prosedur penanganan kredit bermasalah termasuk prosedur pelaksanaan restrukturisasi kredit serta pembentukan Satuan Kerja di Kantor Cabang dan Kantor Pusat yang secara khusus bertugas menangani dan mencari solusi atas penyelesaian kredit bermasalah.

Dalam melakukan mitigasi risiko kredit, Bank juga telah melakukan monitoring terhadap portfolio kredit yang ada dan digunakan sebagai *early warning* terhadap penentuan strategi jangka pendek maupun jangka panjang yang akan diambil. Bentuk pemantauan yang telah dilakukan antara lain pemantauan terhadap total kredit berdasarkan Segmen Kredit, Mata Uang, Geografis dan Sektor Industri serta perkembangan terhadap kualitas kredit, *mapping* terhadap 100 debitur terbesar serta skenario *stress testing*.

Penerapan manajemen risiko kredit tidak hanya ditujukan untuk menempatkan Bank sebagai Bank yang patuh terhadap regulasi, namun merupakan suatu tuntutan manajemen untuk menerapkan sistem pengelolaan risiko kredit yang baik dan sesuai dengan praktek di perbankan. Penerapan manajemen risiko yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas kredit, namun juga diharapkan mampu mendorong kegiatan bisnis Bank.

Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, Bank memastikan bahwa dalam proses pemberian kredit harus mengikuti prosedur perkreditan yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yang mengacu pada Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank dan Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang antara lain mengatur mengenai wewenang memutus kredit pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang, proses pemberian kredit, penetapan harga, pengelolaan kredit bermasalah, manajemen portofolio, peran dan fungsi pengawasan oleh SKAI dan Biro Kepatuhan, serta keterlibatan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen dalam memberikan opini untuk kredit di atas jumlah yang telah ditetapkan.

i. Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau peningkatan kualitas kredit lain adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010	31 Desember 2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Laporan posisi keuangan:				
Giro pada Bank Indonesia	8.395.204	7.490.081	5.403.656	2.480.939
Giro pada bank lain	617.746	1.185.224	868.756	865.791
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	9.450.117	15.969.057	16.989.676	8.185.363
Efek-efek	12.530.378	11.618.079	16.243.536	12.496.361
Tagihan derivatif	8.839	3.316	4.936	3.154
Kredit	83.662.354	71.079.802	57.246.019	41.121.422
Tagihan anjak piutang	1.044.480	1.078.345	569.215	285.582
Investasi neto sewa pembiayaan	1.427.527	1.156.765	941.388	892.988
Piutang pembiayaan konsumen	3.734.228	3.576.266	1.977.989	1.109.102
Tagihan akseptasi	1.155.133	848.825	503.849	516.905
Obligasi pemerintah	4.267.273	3.978.447	4.454.783	6.628.426
Aset lain-lain - bersih	2.708.224	2.514.086	2.378.198	1.909.776
Sub Jumlah	129.001.503	120.498.293	107.582.001	76.495.809
Komitmen dan Kontijensi:				
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	20.850.834	17.604.732	12.462.734	8.445.329
Bank garansi yang diterbitkan	895.200	637.550	513.933	386.209
Irrevocable letters of credit yang masih berjalan	652.028	476.274	572.448	183.880
Sub Jumlah	22.398.062	18.718.556	13.549.115	9.015.418
Jumlah	151.399.565	139.216.849	121.131.116	85.511.227

ii. Analisis risiko konsentrasi kredit

Konsentrasi kredit yang diberikan berdasarkan jenis kredit, sektor ekonomi dan wilayah geografis.

Tabel berikut menyajikan konsentrasi kredit berdasarkan jenis kredit yang diberikan:

	30 Juni 2012		31 Desember 2011		2010		2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
	Rp Juta		Rp Juta		Rp Juta		Rp Juta	
Investasi	22.891.129	27,36	20.504.688	28,85	16.460.463	28,75	11.309.174	27,50
Modal Kerja	41.307.730	49,38	34.348.389	48,32	27.721.207	48,43	18.691.301	45,45
Konsumsi	19.463.495	23,26	16.226.725	22,83	13.064.349	22,82	11.120.947	27,05
Jumlah	83.662.354	100,00	71.079.802	100,00	57.246.019	100,00	41.121.422	100,00

Tabel berikut menyajikan konsentrasi kredit berdasarkan sektor ekonomi :

	30 Juni 2012		31 Desember 2011		2010	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
	Rp Juta		Rp Juta		Rp Juta	
Perdagangan besar & eceran	19.185.613	22,93	16.572.672	23,32	12.821.438	22,40
Rumah tangga	18.958.402	22,66	15.741.466	22,14	12.982.118	22,68
Perantara keuangan	10.665.846	12,75	8.710.595	12,25	6.790.911	11,86
Industri pengolahan	8.501.197	10,16	7.738.630	10,89	7.462.107	13,04
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	7.222.884	8,63	6.218.171	8,75	5.853.164	10,22
Konstruksi	3.796.627	4,54	3.255.241	4,58	2.174.143	3,80
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	3.399.804	4,06	2.763.270	3,89	1.546.183	2,70
Transportasi, pergudangan dan Komunikasi	3.069.552	3,67	2.439.812	3,43	1.718.414	3,00
Pertanian, perburuan dan kehutanan	2.621.935	3,13	1.762.179	2,48	1.150.383	2,01
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	1.633.534	1,95	1.602.847	2,25	1.314.068	2,30
Listrik, gas dan air	1.608.328	1,92	1.584.181	2,23	1.161.553	2,03
Pertambangan dan penggalian	1.096.489	1,31	1.100.929	1,55	1.236.461	2,16
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	728.520	0,88	666.875	0,94	507.817	0,89
Jasa pendidikan	298.850	0,36	268.176	0,38	242.427	0,42
Perikanan	78.543	0,09	72.397	0,10	58.703	0,10
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	86	-	95	-	-	-
Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	-	-	557	-
Bukan lapangan usaha lainnya	796.144	0,96	582.266	0,82	225.572	0,39
Jumlah	83.662.354	100,00	71.079.802	100,00	57.246.019	100,00

	31 Desember 2009	
	Jumlah	%
	Rp Juta	
Konsumsi	11.120.947	27,04
Perdagangan	9.606.541	23,36
Jasa	8.972.621	21,82
Perindustrian	5.212.893	12,68
Properti	3.330.635	8,10
Konstruksi	1.428.485	3,47
Lain-lain	1.449.300	3,53
Jumlah	41.121.422	100,00

Tabel berikut menyajikan konsentrasi kredit setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai/penyisihan penghapusan berdasarkan wilayah geografis:

	30 Juni 2012		31 Desember 2011		31 Desember 2010		31 Desember 2009	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
	Rp Juta		Rp Juta		Rp Juta		Rp Juta	
DKI Jakarta	50.602.683	62,18	42.194.325	61,08	34.011.057	61,18	23.838.340	59,65
Jawa Timur	6.769.714	8,32	5.810.241	8,41	4.064.274	7,28	2.854.896	7,15
Sulawesi Selatan	3.594.687	4,42	3.459.470	5,00	3.068.686	5,50	2.246.413	5,62
Jawa Barat	3.573.527	4,39	3.241.030	4,69	2.632.378	4,72	2.013.644	5,04
Sumatera Utara	2.971.163	3,65	2.520.286	3,65	2.238.243	4,01	1.644.356	4,11
Jawa Tengah	2.229.323	2,74	1.989.006	2,88	1.932.576	3,46	1.495.444	3,74
Riau	2.094.082	2,57	1.843.014	2,67	1.503.051	2,69	1.136.601	2,84
Sumatera Selatan	1.349.250	1,66	1.078.256	1,56	905.248	1,62	615.513	1,54
Kalimantan Selatan	892.340	1,10	763.696	1,11	492.843	0,88	475.685	1,19
Kepulauan Riau	855.209	1,05	741.717	1,07	576.981	1,03	456.398	1,14
Kalimantan Timur	834.410	1,03	658.719	0,95	513.930	0,92	308.457	0,77
Lampung	818.140	1,01	725.681	1,05	608.337	1,09	485.988	1,22
Kalimantan Barat	779.784	0,96	665.147	0,96	483.623	0,87	408.048	1,02
DI Yogyakarta	542.837	0,67	491.427	0,71	373.875	0,67	269.273	0,67
Bali	545.717	0,67	452.121	0,66	344.645	0,62	279.993	0,70
Jambi	529.145	0,65	408.484	0,59	310.621	0,56	209.661	0,52
Sulawesi Utara	513.211	0,63	422.339	0,61	314.316	0,56	238.815	0,60
Sulawesi Tenggara	487.310	0,60	433.685	0,63	324.824	0,58	236.569	0,59
Sulawesi Tengah	441.509	0,54	364.008	0,53	253.903	0,45	171.468	0,43
Papua	282.427	0,35	249.255	0,36	178.235	0,32	110.189	0,28
Sumatera Barat	221.198	0,27	217.310	0,32	332.217	0,60	236.571	0,59
Nanggroe Aceh Darussalam	183.259	0,22	144.252	0,21	93.404	0,17	71.987	0,18
Maluku	123.696	0,15	96.027	0,14	41.073	0,07	5.657	0,02
Banten	93.861	0,11	69.682	0,10	69.561	0,12	144.990	0,36
Bangka Belitung	48.362	0,06	40.006	0,06	14.661	0,03	12.141	0,03
Bengkulu	3.267	-	54	-	-	-	-	-
Gorontalo	713	-	73	-	-	-	-	-
Jumlah	81.380.824	100,00	69.079.311	100,00	55.682.562	100,00	39.967.097	100,00

iii. Konsentrasi kredit berdasarkan jenis debitur

	30 Juni 2012										
	Giro pada bank lain dan BI	Penempatan pada bank lain dan BI	Efek-efek	Tagihan derivatif	Kredit	Piutang premi dan aset lain-lain	Tagihan akseptasi	Obligasi Pemerintah	Komitmen dan kontinjensi	Jumlah	%
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	
Bank Indonesia	8.395.204	5.038.581	7.543.325	-	-	-	-	-	-	20.977.110	13,86%
Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	4.267.273	-	4.267.273	2,82%
Bank-bank	617.746	4.411.536	533.270	8.013	2.143.148	-	21.025	-	985.466	8.720.204	5,76%
Entitas Sektor Publik	-	-	2.297.955	-	1.158.598	-	7.024	-	1.341.750	4.805.327	3,17%
Korporasi	-	-	2.155.828	826	54.968.740	8.914.459	1.127.084	-	16.207.004	83.373.941	55,07%
Retail	-	-	-	-	14.781.659	-	-	-	3.463.981	18.245.640	12,05%
Kredit beragun rumah tinggal	-	-	-	-	7.398.232	-	-	-	11.417	7.409.649	4,89%
Kredit beragun properti komersial	-	-	-	-	496.093	-	-	-	198.918	695.011	0,46%
Tagihan yang telah jatuh tempo - selain kredit beragun rumah tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	2.601	2.601	0,00%
Lainnya	-	-	-	-	2.715.884	-	-	-	186.925	2.902.809	1,92%
Jumlah	9.012.950	9.450.117	12.530.378	8.839	83.662.354	8.914.459	1.155.133	4.267.273	22.398.062	151.399.565	100,00%

	31 Desember 2011										
	Giro pada bank lain dan BI	Penempatan pada bank lain dan BI	Efek-efek	Tagihan derivatif	Kredit	Piutang premi dan aset lain-lain	Tagihan akseptasi	Obligasi Pemerintah	Komitmen dan kontinjensi	Jumlah	%
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	
Bank Indonesia	7.490.081	8.808.534	7.330.859	-	-	-	-	-	-	23.629.474	16,97%
Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	3.978.447	-	3.978.447	2,86%
Bank-bank	1.185.224	7.160.523	799.574	2.466	2.306.352		12.971	-	698.144	12.165.254	8,74%
Entitas Sektor Publik	-	-	2.197.357	-	1.152.811	-	-	-	1.449.175	4.799.343	3,45%
Korporasi	-	-	1.290.289	850	28.877.005	8.325.462	835.854	-	8.011.459	47.340.919	34,01%
Retail	-	-	-	-	16.631.402	-	-	-	4.551.073	21.182.475	15,22%
Kredit beragun rumah tinggal	-	-	-	-	9.540.539	-	-	-	12.057	9.552.596	6,86%
Kredit beragun properti komersial	-	-	-	-	106.724	-	-	-	23.017	129.741	0,09%
Lainnya	-	-	-	-	12.464.969	-	-	-	3.973.631	16.438.600	11,81%
Jumlah	8.675.305	15.969.057	11.618.079	3.316	71.079.802	8.325.462	848.825	3.978.447	18.718.556	139.216.849	100,00%

	31 Desember 2010										
	Giro pada bank lain dan BI	Penempatan pada bank lain dan BI	Efek-efek	Tagihan derivatif	Kredit	Piutang premi dan aset lain-lain	Tagihan akseptasi	Obligasi Pemerintah	Komitmen dan kontinjensi	Jumlah	%
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	
Bank Indonesia	5.403.656	11.379.542	12.012.200	-	-	-	-	-	-	28.795.398	23,8%
Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	4.454.783	-	4.454.783	3,7%
Bank-bank	868.756	5.222.704	1.334.571	4.873	1.843.716	-	39.357	-	17.357	9.331.334	7,7%
Entitas Sektor Publik	-	387.430	726.036	-	1.371.124	-	-	-	1.373.915	3.858.505	3,2%
Korporasi	-	-	2.147.715	63	17.651.764	5.866.790	463.241	-	3.743.327	29.872.900	24,7%
Retail	-	-	-	-	25.416.421	-	-	-	7.826.084	33.242.505	27,4%
Kredit beragun rumah tinggal	-	-	-	-	8.761.307	-	-	-	16.788	8.778.095	7,2%
Kredit beragun properti komersial	-	-	-	-	813.059	-	-	-	149.654	962.713	0,8%
Lainnya	-	-	23.014	-	1.388.628	-	1.251	-	421.990	1.834.883	1,51%
Jumlah	6.272.412	16.989.676	16.243.536	4.936	57.246.019	5.866.790	503.849	4.454.783	13.549.115	121.131.116	100%

	31 Desember 2009										
	Giro pada bank lain dan BI	Penempatan pada bank lain dan BI	Efek-efek	Tagihan derivatif	Kredit	Piutang premi dan aset lain-lain	Tagihan akseptasi	Obligasi Pemerintah	Komitmen dan kontinjensi	Jumlah	%
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	
Bank Indonesia	2.480.939	91.034	9.671.620	-	-	-	-	-	-	12.243.593	14,32%
Pemerintah	-	-	-	-	7.130	-	-	6.628.426	-	6.635.556	7,76%
Bank-bank	865.791	5.571.092	633.191	3.108	-	-	-	-	11.887	7.085.069	8,29%
Entitas Sektor Publik	-	2.523.237	649.108	-	2.289.592	-	-	-	391.568	5.853.505	6,85%
Korporasi	-	-	1.542.442	46	12.339.812	4.197.448	516.905	-	1.891.654	20.488.307	23,96%
Retail	-	-	-	-	17.151.623	-	-	-	6.078.736	23.230.359	27,17%
Kredit beragun rumah tinggal	-	-	-	-	5.869.629	-	-	-	64.718	5.934.347	6,94%
Kredit beragun properti komersial	-	-	-	-	1.960.435	-	-	-	282.162	2.242.597	2,62%
Lainnya	-	-	-	-	1.503.201	-	-	-	294.693	1.797.894	2,10%
Jumlah	3.346.730	8.185.363	12.496.361	3.154	41.121.422	4.197.448	516.905	6.628.426	9.015.418	85.511.227	100%

iv. Kualitas kredit dari aset keuangan

	30 Juni 2012									
	Giro pada bank lain dan BI	Penempatan pada bank lain dan BI	Efek-efek	Kredit	Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	Piutang pembiayaan konsumen	Tagihan akseptasi	Investasi neto sewa pembiayaan	Tagihan anjak piutang	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai	-	-	162.168	4.481.801	-	396.315	-	100.265	1.044	5.141.593
Aset keuangan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai										
Jatuh tempo sampai dengan 30 hari	-	-	-	261.664	-	-	-	-	-	261.664
Jatuh tempo 31 - 60 hari	-	-	-	110.750	-	-	-	-	-	110.750
Jatuh tempo 91 - 120 hari	-	-	-	19	-	-	-	-	-	19
Jatuh tempo 151 - 180 hari	-	-	-	75	-	-	-	-	-	75
Jatuh tempo > 270 hari	-	-	-	41.939	-	-	-	-	11.500	53.439
	-	-	-	414.447	-	-	-	-	11.500	425.947
Aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai										
Credit grading 1 - 5	9.012.950	9.450.117	16.635.483	78.766.106	5.789.023	3.337.913	1.155.133	1.327.262	1.031.936	126.505.923
Credit grading 6 - 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credit grading 8 - 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.012.950	9.450.117	16.635.483	78.766.106	5.789.023	3.337.913	1.155.133	1.327.262	1.031.936	126.505.923
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1)	-	(162.218)	(2.281.530)	-	(37.962)	-	(7.970)	(170)	(2.489.851)
Jumlah	9.012.949	9.450.117	16.635.433	81.380.824	5.789.023	3.696.266	1.155.133	1.419.557	1.044.310	129.583.612

	31 Desember 2011									
	Giro pada bank lain dan BI	Penempatan pada bank lain dan BI	Efek-efek	Kredit	Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	Piutang pembiayaan konsumen	Tagihan akseptasi	Investasi neto sewa pembiayaan	Tagihan anjak piutang	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai	-	-	157.407	3.844.163	-	472.414	-	89.155	1.105	4.564.244
Aset keuangan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai										
Jatuh tempo sampai dengan 30 hari	-	-	-	245.405	-	-	-	-	-	245.405
Jatuh tempo > 270 hari	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500	11.500
	-	-	-	245.405	-	-	-	-	11.500	256.905
Aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai										
Credit grading 1 - 5	8.675.305	15.969.057	15.439.119	66.990.234	2.798.161	3.022.860	848.825	1.067.610	1.065.740	115.876.911
Credit grading 6 - 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credit grading 8 - 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.675.305	15.969.057	15.439.119	66.990.234	2.798.161	3.022.860	848.825	1.067.610	1.065.740	115.876.911
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2)	(500)	(58.751)	(2.000.491)	-	(41.174)	-	(4.054)	(330)	(2.105.302)
Jumlah	8.675.303	15.968.557	15.537.775	69.079.311	2.798.161	3.454.100	848.825	1.152.711	1.078.015	118.592.758

Peringkat kredit ditentukan berdasarkan tingkat kemungkinan gagal bayar (*probability of default*) dan berlaku untuk semua debitur. Rentang peringkat ditentukan dari 1 sampai dengan 13 dengan 1 sampai dengan 11 untuk debitur *performing* dimana semakin besar nilai PD semakin tinggi pula ratingnya. Dari 11 rating tersebut diklasifikasikan menjadi *high grade* (rating 1 -2), *standard grade* (rating 3 -5), *substandard grade* (rating 6 – 7) dan *high risk* (rating 8-11) serta rating 12 dan 13 untuk debitur *non-performing*.

v. Agunan

Agunan digunakan untuk memitigasi eksposur risiko kredit dan kebijakan mitigasi risiko menentukan jenis agunan yang dapat diterima oleh Bank. Umumnya jenis agunan yang diterima bank untuk memitigasi risiko kredit diantaranya adalah kas, giro, tabungan, deposito berjangka, rumah tinggal, properti komersial dan industri, garansi bank dan *letters of credit*. Untuk jenis pembiayaan tertentu umumnya kredit pemilikan rumah dan pembiayaan aset - adanya hak untuk mengambil alih aset fisik merupakan hal penting dalam penentuan harga dan pemulihan yang dapat diperoleh dalam hal terjadi kegagalan pembayaran kredit.

Agunan dilaporkan sesuai dengan kebijakan mitigasi risiko Bank dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku, dan menjabarkan antara lain frekuensi penilaian berbagai jenis agunan, berdasarkan tingkat volatilitas harga dari setiap jenis agunan dan sifat dari produk atau eksposur risiko yang mendasarinya. Jika diperlukan, nilai agunan disesuaikan guna mencerminkan kondisi pasar terkini, probabilitas pemulihan agunan dan jangka waktu untuk merealisasikan agunan dalam hal terjadi pengambilalihan.

Persyaratan agunan bukanlah merupakan pengganti faktor kemampuan debitur dalam hal pembayaran kembali kredit, di mana hal ini menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pemberian kredit. Dalam menentukan dampak keuangan agunan terhadap kredit yang belum jatuh tempo dan belum mengalami penurunan nilai, Bank menilai signifikansi agunan terkait dengan jenis pembiayaan yang diberikan.

Agunan non-fisik, seperti garansi dan *letters of credit*, juga dimiliki Bank untuk eksposur korporasi meskipun dampak keuangan untuk jenis agunan ini kurang signifikan dalam hal pemulihan kredit.

Untuk jenis eksposur tertentu seperti *letters of credit* dan garansi, Bank memperoleh agunan seperti kas tergantung pada penilaian internal risiko kredit untuk eksposur tersebut. Akan tetapi, untuk produk *trade finance* seperti *letters of credit*, maka dalam hal terjadi gagal bayar Bank juga memiliki hak hukum atas aset yang mendasarinya.

Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Pengelolaan manajemen risiko operasional di Bank mencakup risiko lainnya yaitu Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Reputasi dan Risiko Kepatuhan.

Manajemen risiko operasional ditujukan untuk mencegah dan meminimalkan dampak kerugian risiko operasional secara finansial dan non finansial melalui mitigasi risiko operasional pada aktivitas operasional Bank antara lain:

a. Meningkatkan *risk awareness* dan *operational risk management culture* pada seluruh unit kerja melalui pelatihan/sosialisasi/*refreshment* risiko operasional dan penggunaan *operational risk tools*. Sosialisasi manajemen risiko operasional dilakukan melalui program pelatihan yang diselenggarakan secara internal oleh Biro Pengembangan & Pelatihan dan Branch Network & Operations Group.

b. Menerapkan pengelolaan risiko operasional melalui penggunaan *Operational Risk Tools* dalam mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian potensi risiko pada setiap aktivitas operasional Bank yang terdiri dari :

   - *Loss Event Management* (LEM), yaitu perangkat yang digunakan dalam melakukan pengelolaan data dan informasi kerugian operasional di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang termasuk Kantor Cabang Pembantu. Pada *Loss Event Management* (LEM) dicatat, diverifikasi dan dikonsolidasikan data kerugian operasional serta pengembaliannya (*recovery*). Hasil analisa konsolidasi *loss event data* digunakan untuk melakukan perbaikan *(action plan)* dalam mengantisipasi pengulangan terjadinya kerugian operasional yang sama di masa datang.

   - *Risk & Control Self Assessment* (RCSA), yaitu perangkat yang digunakan secara *self assessment* oleh masing-masing *risk owner* untuk mengidentifikasi, menilai dan mengukur potensi dari suatu *risk issue* yang berdampak menimbulkan kerugian risiko operasional di setiap unit kerja. RCSA dilakukan secara periodik (triwulanan) di setiap unit kerja yang ada di Kantor Pusat dan Kantor Cabang termasuk Kantor Cabang Pembantu.

   - *Key Risk Indicators* (KRI's), yaitu perangkat yang digunakan untuk mengukur dan memantau parameter risiko tertentu terhadap limit yang telah ditetapkan untuk memperoleh indikasi awal atas potensi risiko yang mungkin terjadi di masa datang berdasarkan analisa *trend* risiko operasional.

     Pengembangan *Operational Risk Tools* dilakukan secara berkesinambungan bekerjasama dengan Biro Teknologi Informasi dan *Risk Taking Unit* baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang. Penggunaan *Operational Risk Tools (RCSA* dan *LEM)* di setiap unit kerja yang ada di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang dikoordinasikan oleh Koordinator Risiko (KR) yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Manajemen. Satuan Kerja Audit Intern/SKAI sebagai unit independent melakukan validasi terhadap hasil RCSA yang dilakukan *risk owner* untuk memperoleh hasil RCSA yang lebih akurat.

   - *Risk Register* Teknologi Informasi

     Risk Register Teknologi Informasi digunakan secara *self assesment* untuk mengidentifikasi, menilai dan mengukur potensi risiko pada aplikasi teknologi informasi yang digunakan oleh penyelenggaran dan user aplikasi teknologi informasi serta melakukan perbaikan (*action plan*) dan menetapkan mitigasi risiko operasional agar aplikasi tetap berjalan dalam mendukung aktivitas Bank dan pelayanan nasabah.

Laporan hasil pengelolaan dan pemantauan risiko operasional dengan menggunakan *operational risk tools* di atas disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko (KMR) dan *IT Steering Committee* secara periodik.

- *Near Miss*

  Near Miss merupakan pencatatan data kejadian kesalahan operasional yang hampir menimbulkan kerugian finansial di setiap unit kerja yang ada Kantor Cabang termasuk Kantor Cabang Pembantu.

c. Melakukan analisis dan kaji ulang serta pengkinian *risk issue* pada seluruh unit kerja Kantor Cabang Utama dan Cabang Pembantu.

d. Melakukan proses analisa dan identifikasi risiko serta pengukuran dan pemantauan risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru/pengembangan untuk persiapan pelaksanaan pemisahan bisnis kartu kredit bank dari ANZ oleh *Sponsoring Unit* serta melanjutkan pemantauan risiko terhadap produk atau aktivitas baru/pengembangan yang telah diluncurkan.

e. Menyusun laporan profil risiko operasional dan risiko lainnya triwulan II 2012 berdasarkan parameter dan indikator risiko yang baru sesuai ketentuan Bank Indonesia yang terbaru sehingga diperoleh gambaran mengenai tingkat potensi risiko bagi Bank secara keseluruhan.

f. Melakukan perhitungan beban risiko operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID) pada perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bagi Bank serta mengalokasikan cadangan risiko operasional sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

g. Bersama unit kerja terkait turut dalam penyusunan Kebijakan Strategi Anti Fraud dan dokumen pendukungnya.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko hukum antara lain pemahaman atas produk yang dijual kurang memadai, konflik dengan pihak nasabah atau pihak lain yang tidak diselesaikan dengan baik, keluhan nasabah yang tidak ditindaklanjuti sampai tuntas dan pengikatan dokumen legal yang lemah.

Untuk memitigasi risiko hukum, Bank memastikan bahwa pengikatan perjanjian antara Bank dengan para pihak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam upaya melindungi kepentingan Bank. Bank melakukan pengumpulan data, analisis, pengukuran dan pemantauan atas perkembangan *outstanding cases* dan *potential claim* dilakukan secara berkala. Satuan Tugas Khusus Kantor Pusat (STKP) bersama-sama unit kerja terkait ditugaskan manajemen untuk menangani dan mengadministrasikan gugatan hukum (litigasi) serta menyelesaikan masalah - masalah hukum yang timbul.

Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko stratejik antara lain visi misi Bank, rencana strategis, target-target keuangan, perubahan kepemilikan, peluncuran produk/aktivitas baru dan perubahan eksternal.

Untuk memitigasi risiko stratejik, Bank telah membentuk, merumuskan, menyusun, dan memantau serta mengevaluasi implementasi strategi bisnis melalui *business plan* untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dari Bank serta melakukan pengumpulan data, melakukan analisis dan melakukan pengukuran serta pemantauan antara lain atas perkembangan pencapaian target total aset, aset produktif, sumber dana, laba sebelum pajak, produk/aktivitas baru, jaringan kantor, seluruhnya dibandingkan dengan realisasi yang dicapai setiap bulannya.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Faktor – faktor yang mempengaruhi risiko reputasi antara lain *image* bank, penyelesaian pengaduan nasabah yang tidak diselesaikan (buruk), pelayanan buruk terhadap nasabah atau pihak lain, konflik internal bank, harga saham dan lain-lain.

Bank mengelola manajemen risiko reputasi dengan menunjuk pejabat yang bertugas mewakili manajemen dalam mediasi perbankan yaitu *Corporate Secretary* dan Kepala Biro Kepatuhan untuk memfasilitasi, menyelesaikan dan mengadministrasikan setiap pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Terkait risiko reputasi, Bank juga telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) seperti program gerakan penghijauan Reforest Indonesia (penanaman pohon) maupun kegiatan sosial lainnya melalui aksi Panin Peduli dan melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Risiko reputasi juga dikelola melalui pemantauan publikasi negatif dan keluhan nasabah yang dimuat di media cetak baik surat pembaca maupun artikel (*bad media report*) dan keluhan nasabah yang disampaikan melalui *call center.*

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku. Ketidakmampuan Bank untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha Bank.
Dalam mengelola manajemen risiko kepatuhan, upaya peningkatan budaya kepatuhan yang terus-menerus dilakukan melalui program kepatuhan antara lain:

- Menilai rancangan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur baru dan melakukan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur berdasarkan informasi yang diperoleh.
- Sosialisasi/pelatihan melalui *regulation update* dan *in-class training* terkait penerapan *Know Your Customer* (KYC), *Anti Money Laundering* (AML)/Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT).
- Uji kepatuhan terhadap produk baru, kebijakan baru dan aktivitas bank.
- Monitor pelaksanaan kepatuhan melalui *compliance matrix*.
- Pengkinian dan penatausahaan database kepatuhan.
- Pelaporan kepatuhan.
- Pemantauan terhadap denda atau sanksi yang diterima dari regulator/pihak eksternal.

Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi keuangan dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Pemantauan risiko pasar senantiasa dilakukan secara rutin dan berkala baik harian, mingguan hingga bulanan. Untuk meningkatkan fungsi pemantauan tersebut Bank telah menggunakan Guava Treasury System yang telah terintegrasi antara *front office* (*Dealer*), *middle office* (BMR), dan *back office* (*Settlement and Control*).

Risiko pasar dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian:

1. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul dari transaksi *forex* baik dari posisi keuangan maupun dari sisi *off balance sheet*. Risiko nilai tukar diukur dengan *Value at Risk* (VaR) dengan memakai metodologi *variance covariance* untuk mengukur *potential loss* maksimum dengan tingkat kepercayaan 99% dan holding period 10 hari dalam keadaan normal. VaR untuk portfolio *forex* posisi bulan Juni 2012 sebesar 3,54% atau sebesar Rp 2,18 miliar.

Untuk posisi terbuka neto atau NOP Bank sampai dengan Juni 2012, baik NOP akhir hari maupun NOP 30 menit tidak pernah melampaui ketentuan BI sebesar maksimal 20% dari modal. Sepanjang triwulan II tahun 2012, NOP Bank berada dalam kisaran antara Rp 49 milliar – Rp 907,21 milliar (atau 0,31% - 5,80% dari total modal). Besarnya NOP Bank masih jauh di bawah ketentuan BI mengenai batas maksimum NOP yaitu 20% dari total modal Bank.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 dan perubahannya, Peraturan Bank Indonesia No. 6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004, No. 7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005 dan No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010, bank-bank diwajibkan untuk memelihara posisi devisa netonya setinggi-tingginya 20% dari modal. Berdasarkan pedoman Bank Indonesia, "posisi devisa neto" merupakan penjumlahan dari nilai absolut atas selisih bersih aset dan liabilitas untuk setiap mata uang asing dan selisih bersih tagihan dan liabilitas, berupa komitmen dan kontinjensi di rekening administratif, untuk setiap mata uang, yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Berikut ini disajikan rincian Posisi Devisa Neto Bank:

	30 Juni 2012		
Mata Uang	Aset dan tagihan komitmen dan kontinjensi	Liabilitas dan liabilitas komitmen dan kontinjensi	Bersih absolut
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Dollar Amerika Serikat	28.972.413	28.997.413	25.000
Dollar Australia	2.405.240	2.385.008	20.232
Euro	1.316.112	1.320.520	4.408
Yen Jepang	357.651	360.670	3.019
Dollar Kanada	62.507	64.757	2.250
Franc Swiss	55.705	57.450	1.745
Dollar Singapura	1.332.178	1.333.637	1.459
Dollar Selandia Baru	144.598	143.346	1.252
Dollar Hongkong	32.864	33.969	1.105
Poundsterling Inggris	143.458	144.288	830
Jumlah	34.822.726	34.841.058	61.300
Jumlah Modal *)			15.753.023
Persentase PDN terhadap modal			0,39%

	31 Desember 2011		
Mata Uang	Aset dan tagihan komitmen dan kontinjensi	Liabilitas dan liabilitas komitmen dan kontinjensi	Bersih absolut
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Dollar Amerika Serikat	26.397.792	26.362.862	34.930
Franc Swiss	69.404	88.167	18.763
Dollar Australia	1.838.391	1.821.137	17.254
Euro	1.317.896	1.311.126	6.770
Dollar Kanada	81.903	86.535	4.632
Dollar Singapura	1.430.787	1.431.895	1.108
Yen Jepang	260.262	259.315	947
Dollar Hongkong	29.987	30.803	816
Poundsterling Inggris	190.108	190.763	655
Dollar Selandia Baru	87.481	86.853	628
Jumlah	31.704.011	31.669.456	86.503
Jumlah Modal *)			14.475.891
Persentase PDN terhadap modal			0,60%

	31 Desember 2010		
Mata Uang	Aset dan tagihan komitmen dan kontinjensi	Liabilitas dan liabilitas komitmen dan kontinjensi	Bersih absolut
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Dollar Amerika Serikat	30.497.185	30.521.782	24.597
Euro	1.423.264	1.426.019	2.755
Dollar Australia	844.586	841.877	2.709
Poundsterling Inggris	212.292	214.422	2.130
Dollar Selandia Baru	46.524	45.324	1.200
Dollar Singapura	1.225.986	1.225.033	953
Yen Jepang	180.009	179.459	550
Dollar Kanada	31.633	31.356	277
Franc Swiss	10.598	10.865	267
Dollar Hongkong	54.049	53.912	137
Jumlah	34.526.126	34.550.049	35.575
Jumlah Modal *)			11.326.861
Persentase PDN terhadap modal			0,31%

Mata Uang	31 Desember 2009		
	Aset dan tagihan komitmen dan kontinjensi	Liabilitas dan liabilitas komitmen dan kontinjensi	Bersih absolut
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Dollar Amerika Serikat	19.445.419	19.155.304	290.115
Dollar Australia	1.374.421	1.371.867	2.554
Dollar Hongkong	54.628	53.941	687
Franc Swiss	25.347	24.781	566
Poundsterling Inggris	160.729	161.252	523
Euro	957.407	957.033	374
Dollar Singapura	1.391.513	1.391.160	353
Dollar Selandia Baru	62.821	63.123	302
Dollar Kanada	35.809	35.599	210
Yen Jepang	410.769	410.694	75
Jumlah	23.918.863	23.624.754	295.759
Jumlah Modal *)			10.200.084
Persentase PDN terhadap modal			2,90%

*) Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, perhitungan persentase PDN terhadap modal menggunakan modal bulan sebelumnya.

Persentase Posisi Devisa Neto terhadap modal pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 masing-masing sebesar 0,39%, 0,60%, 0,33% dan 2,96%.

Sensitifitas Nilai Tukar

Analisa sensitifitas nilai tukar diukur dengan kemampuan kelebihan modal Bank untuk menyerap potential loss dari nilai tukar yaitu membuat asumsi perubahan/fluktuasi nilai tukar yang berlawanan arah dengan masing-masing posisi nilai tukar. Perubahan kurs menggunakan VaR 99% dari volatilitas kurs selama 10 tahun data historis.

Mata uang asing	Sensitivitas dari laba rugi		Sensitivitas dari ekuitas	
	30 Juni 2012	31 Desember 2011	30 Juni 2012	31 Desember 2011
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
USD	53.606	2.289	55.219	581.315
EUR	284	444	-	-
AUD	1.305	1.131	-	-
GBP	54	43	-	-
NZD	81	41	-	-
SGD	94	73	-	-
JPY	195	62	-	-
CAD	145	304	-	-
CHF	113	1.230	-	-
HKD	71	53	-	-

2. Risiko Suku Bunga

Untuk memperkecil dampak perubahan risiko suku bunga terhadap pendapatan Bank, Bank tetap menjaga rasio RSA (*rate sensitivity asset*) terhadap RSL (*rate sensitivity liabilities*) agar tidak terlalu jauh dari 100%. Pada posisi 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 rasio RSA/RSL masing-masing sebesar 102,80%, 102,50%, 103,9% dan 107,9%. Dengan rasio yang tidak jauh dari 100% tersebut apabila terjadi perubahan suku bunga secara paralel pada aset dan liabilitas, Bank tidak terekspos risiko suku bunga yang besar. Bank juga senantiasa memantau *repricing profile* setiap pengelompokan waktu (*time bucket*) untuk mengetahui dampak perubahan suku bunga terhadap NII Bank secara lebih akurat.

Tabel di bawah ini menunjukkan *repricing profile* aset dan liabilitas Bank yang sensitif terhadap suku bunga dan diurutkan berdasarkan rentang waktu suku bunga tersebut akan di-*repricing* (untuk *floating rate*) atau tanggal jatuh temponya (untuk *fixed rate*).

	30 Juni 2012					
	Jumlah	Sampai dengan 1 bulan	> 1 bulan s/d 3 bulan	> 3 bulan s/d 6 bulan	> 6 bulan s/d 1 tahun	> 1 tahun
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Aset						
Penempatan pada BI	26.730.554	10.000.630	7.237.468	7.559.918	1.932.538	-
Penempatan pada bank lain	3.832.926	3.499.117	333.809	-	-	-
Efek-efek	5.328.285	283.361	228	-	24.160	5.020.536
Kredit	83.240.789	2.429.827	6.860.549	6.252.394	15.384.186	52.313.833
Jumlah	**119.132.554**	**16.212.935**	**14.432.054**	**13.812.312**	**17.340.884**	**57.334.369**
Liabilitas						
Simpanan	92.160.368	31.419.881	10.596.049	14.339.754	35.778.690	25.994
Simpanan dari bank Lain	8.559.990	8.289.788	248.167	17.549	4.301	185
Surat berharga yang diterbitkan	1.536.000	-	-	-	-	1.536.000
Obligasi subordinasi	3.960.000	-	-	-	1.500.000	2.460.000
Pinjaman yang diterima	1.831.591	234.813	164.369	446.144	9	986.256
Jumlah	**108.047.949**	**39.944.482**	**11.008.585**	**14.803.447**	**37.283.000**	**5.008.435**

	31 Desember 2011					
	Jumlah	Sampai dengan 1 bulan	> 1 bulan s/d 3 bulan	> 3 bulan s/d 6 bulan	> 6 bulan s/d 1 tahun	> 1 tahun
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Aset						
Penempatan pada BI	18.862.554	3.059.020	10.597.586	1.805.622	3.400.326	-
Penempatan pada bank lain	9.488.320	7.219.522	223.718	268	2.040.235	4.577
Efek-efek	7.991.032	-	166.130	318.481	497.857	7.008.564
Kredit	68.898.244	2.216.149	3.977.694	6.940.694	11.268.547	44.495.160
Jumlah	**105.240.150**	**12.494.691**	**14.965.128**	**9.065.065**	**17.206.965**	**51.508.301**
Liabilitas						
Simpanan	85.536.601	75.888.271	5.902.436	2.329.118	1.389.825	26.951
Simpanan dari bank Lain	10.835.326	8.438.707	702.925	777.019	1.100	915.575
Surat berharga yang diterbitkan	5.541.216	-	-	825.071	-	4.716.145
Obligasi subordinasi	270.000	-	-	-	-	270.000
Pinjaman yang diterima	498.766	-	-	16	11	498.739
Jumlah	**102.681.909**	**84.326.978**	**6.605.361**	**3.931.224**	**1.390.936**	**6.427.410**

	31 Desember 2010					
	Jumlah	Sampai dengan 1 bulan	> 1 bulan s/d 3 bulan	> 3 bulan s/d 6 bulan	> 6 bulan s/d 1 tahun	> 1 tahun
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Aset						
Penempatan pada BI	23.331.742	3.579.723	12.202.320	3.690.002	3.859.697	-
Penempatan pada bank lain	16.020.048	11.499.696	2.029.338	1.691.285	-	799.729
Efek-efek	6.336.807	-	-	98.786	575.510	5.662.511
Kredit	55.819.244	22.798.013	13.272.062	3.055.210	8.053.456	8.640.503
Jumlah	**101.507.841**	**37.877.432**	**27.503.720**	**8.535.283**	**12.488.663**	**15.102.743**
Liabilitas						
Simpanan	75.093.169	26.018.228	36.057.309	12.095.902	896.272	25.458
Simpanan dari bank Lain	9.519.988	4.950.693	4.475.639	92.506	1.150	-
Surat berharga yang diterbitkan	6.245.535	-	-	-	-	6.245.535
Obligasi subordinasi	511.590	-	-	-	-	511.590
Pinjaman yang diterima	450.560	-	180.200	17	16	270.327
Jumlah	**91.820.842**	**30.968.921**	**40.713.148**	**12.188.425**	**897.438**	**7.052.910**

	31 Desember 2009					
	Jumlah	Sampai dengan 1 bulan	> 1 bulan s/d 3 bulan	> 3 bulan s/d 6 bulan	> 6 bulan s/d 1 tahun	> 1 tahun
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Aset						
Penempatan pada BI	9.763.574	4.707.552	5.055.049	973	-	-
Penempatan pada bank lain	9.009.329	7.233.524	420.307	1.036.378	-	319.120
Efek-efek	8.042.018	14.914	34.085	166.250	45.000	7.781.769
Kredit	40.385.922	21.154.416	5.381.346	2.690.678	5.252.893	5.906.589
Jumlah	**67.200.843**	**33.110.406**	**10.890.787**	**3.894.279**	**5.297.893**	**14.007.478**
Liabilitas						
Simpanan	56.349.127	20.926.964	22.417.401	11.860.148	1.126.094	18.520
Simpanan dari bank Lain	3.233.367	3.105.045	120.388	5.831	2.103	-
Surat berharga yang diterbitkan	3.525.000	-	-	50.000	-	3.475.000
Obligasi subordinasi	375.000	-	-	-	-	375.000
Pinjaman yang diterima	471.804	-	-	-	-	471.804
Jumlah	**63.954.298**	**24.032.009**	**22.537.789**	**11.915.979**	**1.128.197**	**4.340.324**

Sensitivitas Suku Bunga

Pengelolaan risiko suku bunga juga didukung dengan pemantauan sensitivitas atas aset dan liabilitas Bank terhadap berbagai skenario suku bunga baik yang standar, maupun yang tidak standar. Skenario standar, yang diuji setiap bulan, mencakup kenaikan dan penurunan kurva imbal hasil 100 basis point (bp) secara paralel. Analisis sensitivitas terhadap pendapatan bunga bersih akibat kenaikan atau penurunan suku bunga, dengan asumsi tidak ada pergerakan asimetris pada kurva imbal hasil dan posisi keuangan stabil, adalah sebagai berikut:

		Sensitivitas dari laba rugi		Sensitivitas dari ekuitas	
Mata uang asing	Kenaikan (Penurunan)	30 Juni 2012	31 Desember 2011	30 Juni 2012	31 Desember 2011
	bps	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
IDR	+100 / -100	-530.380 / + 530.380	-381.980 / + 381.980	+10.349 / - 10.349	+1.625 / - 1.625
USD	+50 / -50	-35.806 / + 35.806	-41.023 / + 41.023	-	+0.221 / - 0.221

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan Bank menyediakan aset untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Bank mengelola risiko likuiditas secara hati-hati (*prudent*) dengan memastikan kecukupan dana secara harian maupun di masa datang baik pada saat kondisi normal maupun kondisi krisis dalam pemenuhan liabilitas secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi. Rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*) telah disusun untuk mempersiapkan Bank jika terjadi krisis.

Bank mengukur dan memantau risiko likuiditas melalui analisis perbedaan jatuh tempo likuiditas dan rasio-rasio likuiditas. Salah satu rasio likuiditas adalah rasio dari aset likuid terhadap liabilitas lancar. Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, rasio dari aset likuid terhadap liabilitas lancar adalah sebagai berkut:

	30 Juni	31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Kas	1.127.088	1.392.325	1.076.074	900.900
Giro, SBI & penempatan BI lainnya	18.448.008	23.629.474	29.604.152	13.101.649
Obligasi Pemerintah	3.719.937	3.978.447	3.273.349	6.628.426
Penempatan pada bank lain dikurangi dengan simpanan dari bank lain	(4.169.865)	1.769.794	2.102.812	5.755.329
Jumlah aset likuid bersih	19.125.168	30.770.040	36.056.387	26.386.304
Simpanan	92.768.401	85.748.532	75.279.720	56.234.487
Rasio	20,62%	35,88%	47,90%	46,92%

Tabel berikut merupakan rincian sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati milik Bank. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas tidak terdiskonto dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal awal di mana Bank harus melakukan pembayaran. Tabel ini mencakup arus kas bunga dan pokok. Apabila arus kas bunga menggunakan tingkat bunga mengambang, maka jumlah terdiskonto berasal dari kurva suku bunga pada akhir periode pelaporan. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal awal di mana Bank melakukan pembayaran.

	30 Juni 2012							
	Lain-lain	Sampai dengan 1 bulan	> 1 bulan s/d 3 bulan	> 3 bulan s/d 12 bulan	> 1 tahun s/d 2 tahun	> 2 tahun s/d 5 tahun	> 5 tahun	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Liabilitas								
Tanpa suku bunga:								
Liabilitas segera	288.088	1.304	85.447	-	-	-	-	374.839
Liabilitas derivatif	-	3.119	300	-	-	-	-	3.419
Liabilitas akseptasi	-	206.178	577.558	372.176	-	-	-	1.155.912
Pinjaman yang diterima	-	-	-	17	-	-	-	17
Utang pajak	-	219.708	-	20.266	-	-	-	239.974
Liabilitas pajak tangguhan	209	-	-	-	-	-	-	209
Liabilitas lain-lain	849.324	46.430	23.234	51.407	1.097	181.200	22.158	1.174.850
Suku bunga variabel:								
Simpanan	-	56.269.650	-	-	-	-	-	56.269.650
Simpanan dari bank lain	-	181.004	-	-	-	-	-	181.004
Pinjaman yang diterima	-	4.922	9.983	61.169	559.617	282.886	234.813	1.153.390
Liabilitas lain-lain	-	121.663	5.664	29.266	34.710	39.444	12.219	242.966
Suku bunga tetap:								
Simpanan	-	27.357.838	5.730.733	3.286.127	142.899	-	-	36.517.597
Simpanan dari bank lain	-	8.296.687	100.650	4.300	-	-	-	8.401.637
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	3.062.667	-	-	-	-	-	3.062.667
Pinjaman yang diterima	-	290.892	277.024	1.007.735	343.771	488.077	-	2.407.499
Obligasi subordinasi	-	-	-	1.709.500	123.000	1.429.000	2.460.000	5.721.500
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	135.000	484.594	1.490.000	-	2.109.594
Liabilitas lain-lain	-	382.682	451.453	1.115.922	803.950	1.017.919	129.150	3.901.076
Sub jumlah	1.137.621	96.444.744	7.262.046	7.792.885	2.493.638	4.928.526	2.858.340	122.917.800
Liabilitas komitmen								
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	-	20.850.835	-	-	-	-	-	20.850.835
L/C yang *irrevocable* dan masih berjalan dalam rangka ekspor dan impor	-	136.381	396.948	118.699	-	-	-	652.028
Sub jumlah liabilitas komitmen	-	20.987.216	396.948	118.699	-	-	-	21.502.863
Liabilitas kontinjensi								
Bank garansi	-	27.948	161	26.062	742.804	37.684	23	834.682
Standby L/C	-	-	-	3.381	44.521	-	-	47.902
Sub jumlah liabilitas kontinjensi	-	27.948	161	29.443	787.325	37.684	23	882.584
Jumlah	1.137.621	117.459.908	7.659.155	7.941.027	3.280.963	4.966.210	2.858.363	145.303.247

Tabel berikut ini menyajikan rincian sisa jatuh tempo kontrak liabilitas keuangan Bank yang disusun berdasarkan arus kas terdiskonto dari liabilitas keuangan:

	31 Desember 2011							
	Lain-lain	Sampai dengan 1 bulan	> 1 bulan s/d 3 bulan	> 3 bulan s/d 12 bulan	> 1 tahun s/d 2 tahun	> 2 tahun s/d 5 tahun	> 5 tahun	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Tanpa suku bunga:								
Liabilitas segera	254.135	1.735	-	92	-	-	-	255.962
Liabilitas derivatif	-	2.555	396	-	-	-	-	2.951
Liabilitas akseptasi	-	99.144	379.965	370.885	-	-	-	849.994
Pinjaman yang diterima	-	-	-	35	-	-	17	52
Utang pajak	-	268.626	-	-	-	-	-	268.626
Liabilitas lain-lain	989.226	79.046	26.861	48.422	10.845	143.127	20.155	1.317.682
Suku bunga variabel:								
Simpanan	-	47.909.759	-	-	-	-	-	47.909.759
Simpanan dari bank lain	-	5.091.413	-	-	-	-	-	5.091.413
Pinjaman yang diterima	-	5.535	9.467	50.159	89.920	766.597	226.545	1.148.223
Suku bunga tetap:								
Simpanan	-	28.136.013	6.018.790	3.668.605	15.364	-	-	37.838.772
Simpanan dari bank lain	-	223.816	-	-	-	-	-	223.816
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	3.364.368	300.795	-	-	-	-	3.665.163
Pinjaman yang diterima	-	82.443	345.757	909.571	420.815	78.293	-	1.836.879
Obligasi subordinasi	-	-	-	-	1.496.457	-	2.395.157	3.891.614
Surat berharga yang diterbitkan	-	55.000	64.952	1.642.110	2.263.218	566.421	-	4.591.701
Jumlah	1.243.361	85.319.453	7.146.983	6.689.879	4.296.619	1.554.438	2.641.874	108.892.607

	31 Desember 2010							
	Lain-lain	Sampai dengan 1 bulan	> 1 bulan s/d 3 bulan	> 3 bulan s/d 12 bulan	> 1 tahun s/d 2 tahun	> 2 tahun s/d 5 tahun	> 5 tahun	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Tanpa suku bunga:								
Liabilitas segera	-	138.272	-	-	-	-	-	138.272
Liabilitas derivatif	-	4.312	2.904	-	-	-	-	7.216
Liabilitas akseptasi	-	87.044	369.883	46.922	-	-	-	503.849
Pinjaman yang diterima					44			44
Utang pajak	-	136.305	-	-	-	-	-	136.305
Liabilitas lain-lain	975.903	-	-	-	-	-	-	975.903
Suku bunga variabel:								
Simpanan	-	37.192.978	-	-	-	-	-	37.192.978
Simpanan dari bank lain	-	1.046.494	2.420.100	-	-	-	-	3.466.594
Pinjaman yang diterima	-	-	451.104	47.405	-	7.921	-	506.430
Suku bunga tetap:								
Simpanan	-	29.237.348	6.684.246	2.156.234	8.914	-	-	38.086.742
Simpanan dari bank lain	-	100.732	-	-	-	-	-	100.732
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	1.621.550	3.032.342	-	-	-	-	4.653.892
Pinjaman yang diterima	-	-	1.407.163	81.888	830.958	755.906	-	3.075.915
Obligasi subordinasi	-	-	-	-	-		3.886.111	3.886.111
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	1.302.076	1.487.766	-	2.789.842
Jumlah	975.903	69.565.035	14.367.742	2.332.449	2.141.992	2.251.593	3.886.111	95.520.825

	31 Desember 2009							
	Lain-lain	Sampai dengan 1 bulan	> 1 bulan s/d 3 bulan	> 3 bulan s/d 12 bulan	> 1 tahun s/d 2 tahun	> 2 tahun s/d 5 tahun	> 5 tahun	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Liabilitas segera	-	164.729	-	-	-	-	-	164.729
Simpanan	-	46.579.330	5.292.186	4.344.458	18.513	-	-	56.234.487
Simpanan dari bank lain	-	2.259.800	-	-	-	-	-	2.259.800
Efek yang dibeli dengan janji dibeli kembali	-	503.887	-	-	-	-	-	503.887
Liabilitas akseptasi	-	152.734	270.320	93.851	-	-	-	516.905
Liabilitas derivatif	-	3.409	433	1.453	-	-	-	5.295
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	-	-	-	49.976	-	2.253.784	-	2.303.760
Pinjaman yang diterima	-	862.290	275	71.295	334.465	81.743	281.850	1.631.918
Utang pajak	-	227.052	-	-	-	-	-	227.052
Liabilitas lain-lain	797.973	-	-	-	-	-	-	797.973
Obligasi subordinasi - bersih	-	-	-	-	-	-	1.491.856	1.491.856
Jumlah	797.973	50.753.231	5.563.214	4.561.033	352.978	2.335.527	1.773.706	66.137.662

Analisa perbedaan jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan

Tabel dibawah ini menyajikan analisis jatuh tempo aset dan liabilitas Bank pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, berdasarkan jangka waktu yang tersisa sampai tanggal jatuh tempo kontrak dan asumsi perilaku (*behavioral assumptions*):

	30 Juni 2012							
	Lain-lain	Sampai dengan 1 bulan	> 1 bulan s/d 3 bulan	> 3 bulan s/d 12 bulan	> 1 tahun s/d 2 tahun	> 2 tahun s/d 5 tahun	> 5 tahun	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Aset								
Tanpa suku bunga								
Kas	-	1.127.088	-	-	-	-	-	1.127.088
Giro pada Bank Indonesia	-	8.395.204	-	-	-	-	-	8.395.204
Giro pada bank lain	-	402.984	-	-	-	-	-	402.984
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain	(1)	-	-	-	-	-	-	(1)
Tagihan derivatif	-	8.503	336	-	-	-	-	8.839
Tagihan akseptasi	-	206.810	578.185	370.138	-	-	-	1.155.133
Penyertaan dalam bentuk saham	-	-	-	-	-	-	430.038	430.038
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai penyertaan dalam bentuk saham	(625)	-	-	-	-	-	-	(625)
Aset tetap - bersih	1.893.961	-	-	-	-	-	-	1.893.961
Aset pajak tangguhan - bersih	96.858	-	-	-	-	-	-	96.858
Aset lain-lain - bersih	2.452.608	24.710	16.187	31.380	1.926	20.504	-	2.547.315
Suku bunga variabel								
Giro pada bank lain	-	214.762	-	-	-	-	-	214.762
Efek-efek	82.944	-	-	-	-	27.367	118.583	228.894
Investasi neto sewa pembiayaan	-	2.987	5.865	23.093	25.529	-	-	57.474
Kredit	-	3.813.289	6.726.281	20.682.226	7.832.995	17.495.191	22.125.401	78.675.383
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai kredit	(2.281.529)	-	-	-	-	-	-	(2.281.529)
Aset lain-lain - bersih	1.952	-	-	-	-	-	-	1.952
Suku bunga tetap:								
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	4.077.720	333.816	5.038.581	-	-	-	9.450.117
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain								
Efek-efek	-	1.155.519	3.318.215	4.797.107	1.199.266	1.312.017	4.786.633	16.568.757
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek	(162.218)	-	-	-	-	-	-	(162.218)
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	1.341.478	4.056.607	390.938	-	-	-	5.789.023
Kredit	-	-	-	-	167	4.986.359	445	4.986.971
Tagihan anjak piutang	-	72.210	78.318	893.952	-	-	-	1.044.480
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai tagihan anjak piutang	(170)	-	-	-	-	-	-	(170)
Investasi neto sewa pembiayaan	-	94.881	129.358	607.808	507.979	30.027	-	1.370.053
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai investasi neto sewa pembiayaan	(7.970)	-	-	-	-	-	-	(7.970)
Piutang Pembiayaan konsumen	-	281.324	311.926	1.306.114	1.670.239	164.626	-	3.734.229
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen	(37.963)	-	-	-	-	-	-	(37.963)
Aset lain-lain - bersih	-	6.072	8.724	34.929	35.455	19.319	-	104.499
Jumlah Aset	2.037.847	21.225.541	15.563.818	34.176.266	11.273.556	24.055.410	27.461.100	135.793.538
Liabilitas								
Tanpa suku bunga:								
Liabilitas segera	288.086	1.304	85.447	-	-	-	-	374.837
Liabilitas derivatif	-	3.119	300	-	-	-	-	3.419
Liabilitas akseptasi	-	206.178	577.558	372.176	-	-	-	1.155.912
Pinjaman yang diterima	-	-	-	17	-	-	-	17
Utang pajak	-	219.707	-	20.267	-	-	-	239.974
Liabilitas pajak tangguhan	209	-	-	-	-	-	-	209
Liabilitas lain-lain	1.078.134	51.494	41.278	51.365	1.097	195.447	22.158	1.440.973
Suku bunga variabel:								
Simpanan	-	56.269.650	-	-	-	-	-	56.269.650
Simpanan dari bank lain	-	179.568	-	-	-	-	-	179.568
Pinjaman yang diterima	-	8.720	17.491	71.541	32.406	787.048	233.390	1.150.596
Suku bunga tetap:								
Simpanan	-	27.351.307	5.727.212	3.420.903	18.173	-	-	36.517.595
Simpanan dari bank lain	-	8.401.636	-	-	-	-	-	8.401.636
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	3.062.667	-	-	-	-	-	3.062.667
Pinjaman yang diterima	-	320.545	215.674	900.817	539.400	142.596	-	2.119.032
Obligasi subordinasi	-	-	-	1.497.786	-	-	2.396.819	3.894.605
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	381.651	2.221.014	1.277.328	-	3.879.993
Liabilitas lain-lain	-	30	61	-	-	-	-	91
Jumlah Liabilitas	1.366.429	96.075.925	6.665.021	6.716.523	2.812.090	2.402.419	2.652.367	118.690.774
Selisih	671.418	(74.850.384)	8.898.797	27.459.743	8.461.466	21.652.991	24.808.733	17.102.764

	31 Desember 2011							
	Lain-lain	Sampai dengan 1 bulan	> 1 bulan s/d 3 bulan	> 3 bulan s/d 12 bulan	> 1 tahun s/d 2 tahun	> 2 tahun s/d 5 tahun	> 5 tahun	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Aset								
Tanpa suku bunga								
Kas	-	1.392.325	-	-	-	-	-	1.392.325
Giro pada Bank Indonesia	-	7.490.081	-	-	-	-	-	7.490.081
Giro pada bank lain	-	731.451	-	-	-	-	-	731.451
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain	(2)	-	-	-	-	-	-	(2)
Tagihan derivatif	-	2.706	610	-	-	-	-	3.316
Tagihan akseptasi	-	6.924	56.626	785.275	-	-	-	848.825
Penyertaan dalam bentuk saham	-	-	-	-	-	-	420.154	420.154
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai penyertaan dalam bentuk saham	(625)	-	-	-	-	-	-	(625)
Aset tetap - bersih	1.805.408	-	-	-	-	-	-	1.805.408
Aset pajak tangguhan - bersih	43.485	-	-	-	-	-	-	43.485
Aset lain-lain - bersih	2.341.809	14.955	2.178	30.752	5.871	9.098	-	2.404.663
Suku bunga variabel								
Giro pada bank lain	-	453.773	-	-	-	-	-	453.773
Efek-efek	58.431	-	-	9.893	50.775	1.014	94.939	215.052
Investasi neto sewa pembiayaan	-	3.236	5.870	25.095	38.572		-	72.773
Kredit	-	3.179.354	3.234.683	19.941.075	7.891.894	14.224.689	18.492.165	66.963.860
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai kredit	(2.000.491)	-	-	-	-	-	-	(2.000.491)
Aset lain-lain - bersih	-	3.658	-	-	-	-	-	3.658
Suku bunga tetap:								
Penempatan pada Bank Indonesia	-		-	-	-	-	-	-
dan bank lain	-	8.377.618	5.756.439	1.835.000	-	-	-	15.969.057
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain	(500)	-	-	-	-	-	-	(500)
Efek-efek	-	1.375.163	2.732.963	4.292.039	1.242.051	1.736.363	4.002.895	15.381.474
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek	(58.751)	-	-	-	-	-	-	(58.751)
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	159.236	2.638.925	-	-	-	-	2.798.161
Kredit	-	-	-	-	3.005	4.112.442	495	4.115.942
Tagihan anjak piutang	-	55.173	141.265	881.907	-	-	-	1.078.345
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai tagihan anjak piutang	(330)	-	-	-	-	-	-	(330)
Investasi neto sewa pembiayaan	-	74.549	95.246	502.335	395.407	16.454	-	1.083.991
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai investasi neto sewa pembiayaan	(4.053)	-	-	-	-	-	-	(4.053)
Piutang Pembiayaan konsumen	-	243.585	275.704	1.152.975	1.709.070	113.940	-	3.495.274
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen	(41.174)	-	-	-	-	-	-	(41.174)
Aset lain-lain - bersih	-	5.201	7.617	30.543	35.490	8.728	1.458	89.037
Jumlah Aset	2.143.207	23.568.988	14.948.126	29.486.889	11.372.135	20.222.728	23.012.106	124.754.179
Liabilitas								
Tanpa suku bunga:								
Liabilitas segera	254.135	1.735	-	92	-	-	-	255.962
Liabilitas derivatif	-	2.555	396	-	-	-	-	2.951
Liabilitas akseptasi	-	99.144	379.965	370.885	-	-	-	849.994
Pinjaman yang diterima	-	-	-	35	-	-	17	52
Utang pajak	-	268.626	-	-	-	-	-	268.626
Liabilitas lain-lain	962.665	79.046	26.861	48.422	10.845	143.127	20.155	1.291.121
Suku bunga variabel:								
Simpanan	-	47.909.759	-	-	-	-	-	47.909.759
Simpanan dari bank lain	-	5.091.413	-	-	-	-	-	5.091.413
Pinjaman yang diterima	-	5.535	9.467	50.159	89.920	766.597	226.545	1.148.223
Suku bunga tetap:								
Simpanan	-	28.136.013	6.018.790	3.668.606	15.364	-	-	37.838.773
Simpanan dari bank lain	-	223.816	-	-	-	-	-	223.816
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	3.364.368	300.795	-	-	-	-	3.665.163
Pinjaman yang diterima	-	82.443	345.757	909.571	420.815	78.294	-	1.836.880
Obligasi subordinasi	-	-	-	-	1.496.457	-	2.395.157	3.891.614
Surat berharga yang diterbitkan	-	55.000	64.952	1.642.110	2.263.218	566.421	-	4.591.701
Jumlah Liabilitas	1.216.800	85.319.453	7.146.983	6.689.880	4.296.619	1.554.439	2.641.874	108.866.048
Selisih	926.406	(61.750.466)	7.801.142	22.797.009	7.075.516	18.668.289	20.370.232	15.888.131

	31 Desember 2010							
	Lain-lain	Sampai dengan 1 bulan	> 1 bulan s/d 3 bulan	> 3 bulan s/d 12 bulan	> 1 tahun s/d 2 tahun	> 2 tahun s/d 5 tahun	> 5 tahun	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Aset								
Tanpa suku bunga								
Kas	-	1.076.074	-	-	-	-	-	1.076.074
Giro pada Bank Indonesia	-	5.403.656	-	-	-	-	-	5.403.656
Tagihan Derivatif	-	1.910	3.026	-	-	-	-	4.936
Tagihan Akseptasi	-	87.044	369.883	46.922	-	-	-	503.849
Penyertaan dalam bentuk saham	-	-	-	-	-	-	277.550	277.550
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai penyertaan dalam bentuk saham	(625)	-	-	-	-	-	-	(625)
Aset tetap - bersih	1.763.280		-	-	-	-	-	1.763.280
Aset pajak tangguhan - bersih	53.157	-	-	-	-	-	-	53.157
Aset lain-lain - bersih	2.226.865	59.760	-	-	-	-	-	2.286.625
Suku bunga variabel								
Giro pada bank lain	-	868.756	-	-	-	-	-	868.756
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain	(2)	-	-	-	-	-	-	(2)
Efek-efek	-	-	-	6	-	236.131	19.356	255.493
Kredit	-	2.279.979	2.274.855	13.820.193	6.915.263	15.175.220	13.277.676	53.743.186
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai kredit	(1.563.457)	-	-	-	-	-	-	(1.563.457)
Suku bunga tetap:								
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	7.840.575	9.149.101	-	-	-	-	16.989.676
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain	(600)	-	-	-	-	-	-	(600)
Efek-efek	-	1.421.958	3.530.707	9.202.397	994.268	1.146.994	4.146.502	20.442.826
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek	(10.618)	-	-	-	-	-	-	(10.618)
Kredit	-	-	-	-	1.071.318	2.421.870	9.645	3.502.833
Tagihan anjak piutang		15.304	10.805	543.106	-	-	-	569.215
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai tagihan anjak piutang	(2.121)	-	-	-	-	-	-	(2.121)
Investasi neto sewa pembiayaan	-	-	-	509.462	305.162	-	126.764	941.388
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai investasi neto sewa pembiayaan	(15.006)	-	-	-	-	-	-	(15.006)
Piutang Pembiayaan konsumen	-	138.533	215.955	546.206	-	551.287	481.401	1.933.382
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen	(28.119)	-	-	-	-	-	-	(28.119)
Jumlah Aset	2.422.754	19.193.549	15.554.332	24.668.292	9.286.011	19.531.502	18.338.894	108.995.334
Liabilitas								
Tanpa suku bunga:								
Liabilitas segera	-	138.272	-	-	-	-	-	138.272
Liabilitas derivatif	-	4.312	2.904	-	-	-	-	7.216
Liabilitas akseptasi	-	87.044	369.883	46.922	-	-	-	503.849
Pinjaman yang diterima					44			44
Utang pajak	-	136.305	-	-	-	-	-	136.305
Liabilitas lain-lain	953.658	-	-	-	-	-	-	953.658
Suku bunga variabel:								
Simpanan	-	37.192.978	-	-	-	-	-	37.192.978
Simpanan dari bank lain	-	1.046.494	2.420.100	-	-	-	-	3.466.594
Pinjaman yang diterima	-	-	451.104	47.405	-	7.921	-	506.430
Suku bunga tetap:								
Simpanan	-	29.237.348	6.684.246	2.156.234	8.914	-	-	38.086.742
Simpanan dari bank lain	-	100.732	-	-	-	-	-	100.732
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	1.621.550	3.032.342	-	-	-	-	4.653.892
Pinjaman yang diterima	-	-	1.407.163	81.888	830.958	755.906	-	3.075.915
Obligasi subordinasi	-	-	-	-	-		3.886.111	3.886.111
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	1.302.076	1.487.766	-	2.789.842
Jumlah Liabilitas	953.658	69.565.035	14.367.742	2.332.449	2.141.992	2.251.593	3.886.111	95.498.580
Selisih	1.469.096	(50.371.486)	1.186.590	22.335.843	7.144.019	17.279.909	14.452.783	13.496.754

	31 Desember 2009							
	Lain-lain	Sampai dengan 1 bulan	> 1 bulan s/d 3 bulan	> 3 bulan s/d 12 bulan	> 1 tahun s/d 2 tahun	> 2 tahun s/d 5 tahun	> 5 tahun	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Aset								
Kas	-	900.900	-	-	-	-	-	900.900
Giro pada Bank Indonesia	-	2.480.939	-	-	-	-	-	2.480.939
Giro pada bank lain	-	865.791	-	-	-	-	-	865.791
Dikurangi: penyisihan penghapusan giro pada bank lain	(8.655)	-	-	-	-	-	-	(8.655)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	5.621.531	658.861	1.904.566	405	-	-	8.185.363
Dikurangi: penyisihan penghapusan penempatan pada bank lain	(78.280)							(78.280)
Efek-efek	-	62.595	9.671.620	607.944	374.883	1.575.811	6.831.934	19.124.787
Dikurangi: penyisihan penghapusan efek-efek	(38.316)	-	-	-	-	-	-	(38.316)
Tagihan derivatif	-	3.154	-	-	-	-	-	3.154
Dikurangi: penyisihan penghapusan tagihan derivatif	(32)	-	-	-	-	-	-	(32)
Kredit	-	1.158.784	2.439.332	12.587.254	2.931.364	11.691.125	10.313.563	41.121.422
Dikurangi: penyisihan penghapusan kredit	(1.154.324)	-	-	-	-	-	-	(1.154.324)
Tagihan anjak piutang	-	43.319	-	242.263	-	-	-	285.582
Dikurangi: penyisihan penghapusan tagihan anjak piutang	(15.237)	-	-	-	-	-	-	(15.237)
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	8.000	-	-	-	-	8.000
Investasi neto sewa pembiayaan	-	90	1.360	67.088	226.569	556.248	41.633	892.988
Dikurangi: penyisihan penghapusan investasi neto sewa pembiayaan	(28.074)	-	-	-	-		-	(28.074)
Piutang pembiayaan konsumen	-	42.109	4.976	62.200	218.245	686.527	80.071	1.094.128
Dikurangi: penyisihan penghapusan piutang pembiayaan konsumen	(24.121)	-	-	-	-	-	-	(24.121)
Tagihan akseptasi		152.734	270.320	93.851	-	-	-	516.905
Dikurangi: penyisihan penghapusan tagihan akseptasi	(5.169)	-	-	-	-	-	-	(5.169)
Penyertaan dalam bentuk saham	-	-	-	-	-	-	215.423	215.423
Dikurangi: penyisihan penghapusan penyertaan dalam bentuk saham	(11.796)	-	-	-	-	-	-	(11.796)
Aset tetap - bersih	1.702.829	-	-	-	-	-	-	1.702.829
Aset pajak tangguhan - bersih	77.293	-	-	-	-	-	-	77.293
Aset lain-lain - bersih	1.237.114	567.103	-	-	-	-	-	1.804.217
Jumlah Aset	1.653.232	11.899.049	13.054.469	15.565.166	3.751.466	14.509.711	17.482.624	77.915.717
Liabilitas								
Liabilitas segera	-	164.729	-	-	-	-	-	164.729
Simpanan	-	46.579.330	5.292.186	4.344.458	18.513	-	-	56.234.487
Simpanan dari bank lain	-	2.259.800	-	-	-	-	-	2.259.800
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	503.887	-	-	-	-	-	503.887
Liabilitas akseptasi	-	152.734	270.320	93.851	-	-	-	516.905
Liabilitas derivatif	-	3.409	433	1.453	-	-	-	5.295
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	-	-	-	49.976	-	2.253.784	-	2.303.760
Pinjaman yang diterima	-	862.290	275	71.295	334.465	81.743	281.850	1.631.918
Utang pajak	-	227.052	-	-	-	-	-	227.052
Liabilitas lain-lain	779.304	-	-	-	-	-	-	779.304
Obligasi subordinasi - bersih	-	-	-	-	-	-	1.491.856	1.491.856
Jumlah Liabilitas	779.304	50.753.231	5.563.214	4.561.033	352.978	2.335.527	1.773.706	66.118.993
Selisih	873.928	(38.854.182)	7.491.255	11.004.133	3.398.488	12.174.184	15.708.918	11.796.724

55. KONTINJENSI, IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA

Kontinjensi

a. Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPh Badan tahun 1993.

Pada tanggal 10 Juni 1999 Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta telah menyerahkan salinan resmi putusan perkara gugatan No. 167/G/1998/PT.TUN.JKT antara Bank dengan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) mengenai Surat Ketetapan Pajak Penghasilan Badan (SKP PPh Badan) tahun 1993 sebesar Rp 9.710 juta, yang isinya adalah:

- Mencabut atau membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas SKP PPh Badan tahun 1993.

- Menyatakan bahwa SKP PPh Badan tahun 1993 adalah “nihil”.

- Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk mengembalikan atau merestitusikan kepada Bank jumlah pokok pajak beserta sanksi bunganya sebagaimana tercantum dalam Surat Setoran Pajak terkait.

BPSP telah mengajukan kasasi atas keputusan tersebut dan ditolak oleh Mahkamah Agung dalam Surat Keputusannya No. 82K/TUN/2000 tanggal 27 Pebruari 2001.

Pada tanggal 10 Desember 2001 PTTUN Jakarta melalui Surat Keputusan No. W7.PT.TUN.Eks.3802.2001 telah menegur BPSP untuk segera melaksanakan Putusan PTTUN No.167/G/1998/PT.TUN.JKT tanggal 10 Juni 1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

PTTUN pada tanggal 30 September 2002 melalui suratnya No. W7.PT.TUN.Eks.319.2002 menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan BPSP melaksanakan keputusan PTTUN yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPh Badan tahun 1994

Sehubungan dengan gugatan Bank mengenai SKP Kurang Bayar PPh Badan tahun 1994, pada tanggal 31 Mei 2000 PTTUN Jakarta melalui Keputusan No. 294/G/1999/PT.TUN.JKT telah menetapkan:

- Mengabulkan gugatan Bank untuk seluruhnya.

- Menyatakan batal surat keputusan BPSP No. PUT-225/BPSP/M.IV/1999 tanggal 10 September 1999 yang hanya mengabulkan sebagian permohonan banding Bank atas SKP PPh Badan tahun 1994.

- Memerintah BPSP untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang berisi:

  a. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas SKP PPh Badan tahun 1994.

  b. Menyatakan SKP Pajak Penghasilan Badan tahun 1994 adalah nihil.

  c. Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk mengembalikan/merestitusikan kepada Bank jumlah pokok pajak beserta sanksi bunganya sebagaimana dalam Surat Setoran Pajak terkait.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, BPSP belum melaksanakan Keputusan PTTUN tersebut atas bagian yang ditolak BPSP sebesar Rp 1.030 juta dan/atau kasasi.

Pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, jumlah yang telah dibayar Bank atas SKP Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) tahun 1993 dan 1994 termasuk bunga denda keterlambatan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun	Rp Juta
SKP PPh Badan	1993	9.710
SKP PPh Badan	1994	1.030
Bunga denda keterlambatan		84
Jumlah		10.824

Karena belum adanya pelaksanaan Keputusan PTTUN oleh BPSP sehubungan dengan gugatan perkara SKP PPh Badan tahun 1993 dan 1994, maka Bank mencatat pembayaran pajak tersebut sebagai pajak dibayar di muka (Catatan 18).

c. Bank mengadakan perjanjian kerjasama penutupan asuransi kendaraan bermotor dengan PT Panin Insurance Tbk berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 2 Januari 2003. Perjanjian tersebut diperuntukkan atas kendaraan bermotor yang dibiayai dengan fasilitas KPM di seluruh kantor cabang dan perwakilan yang menjadi wewenang Bank, dengan syarat dan prosedur penutupan suatu obyek pertanggungan ditentukan oleh PT Panin Insurance Tbk.

d. Bank mengadakan perjanjian kerjasama penutupan asuransi kendaraan bermotor dengan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 1 Januari 2005. Perjanjian tersebut diperuntukkan atas kendaraan bermotor yang dibiayai dengan fasilitas KPM di seluruh kantor cabang dan perwakilan yang menjadi wewenang Bank, dengan syarat dan prosedur penutupan suatu obyek pertanggungan ditentukan oleh PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.

Ikatan dan Perjanjian Signifikan Lainnya

a. Reksa Panin Terproteksi Pasti II adalah Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara PT Panin Sekuritas Tbk selaku Manajer Investasi dan Citibank N.A, Indonesia sebagai Bank Kustodian dan telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) pada tanggal 28 Nopember 2006.

   PT Panin Sekuritas Tbk, selaku Manajer Investasi, menunjuk Bank sebagai agen penjual utama.

   Berdasarkan Perjanjian Penetapan Agen Penjual No. 477/RD/OPR/XI/06 tanggal 28 Nopember 2006, dalam melakukan pemasaran Reksa Panin Terproteksi Pasti II, Bank memperoleh pembagian hasil keuangan yang dibayarkan oleh PT Panin Sekuritas Tbk setiap tiga bulannya. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 30 Juni 2011.

b. Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran produk Bancassurance dengan PT Panin Financial Tbk berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.01/AGR-BNC/06/2006 tanggal 23 Juni 2006.

   Produk Bancaassurance adalah produk-produk asuransi jiwa dengan dilengkapi manfaat pasti yang diterbitkan oleh PT Panin Financial Tbk, yang terdiri atas Produk Panin Dana Pasti, Produk Panin Flexilinked dan Produk Panin Lifevestlink.

   Dalam perjanjian tersebut Bank bertindak sebagai agen pemasaran dengan memperoleh kompensasi berupa komisi, dengan jangka waktu perjanjian selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

c. Bank mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran Bahana Reksa Panin Terproteksi III dan IV dengan PT Bahana TCW Investment Management berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 014/BTIM-BANKPANIN/0808 tanggal 22 Agustus 2008.

   Dalam perjanjian tersebut Bank bertindak sebagai agen penjual dengan memperoleh kompensasi berupa imbal jasa, dengan jangka waktu perjanjian selama 1 tahun dan dapat diperpanjang.

   Pada tanggal 1 September 2010, Bank mengadakan perubahan perjanjian kerjasama, dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah daftar reksadana yang ditawarkan menjadi Bahana Reksadana Panin Terproteksi III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII.

d. Reksa Dana Pendapatan Tetap Berkualitas adalah Reksa Dana Penyertaan Terbatas berbentuk kontrak investasi kolektif antara PT Panin Sekuritas Tbk selaku Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk – Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

   PT Panin Sekuritas Tbk. selaku Manajer Investasi, menunjuk Bank sebagai agen penjual utama.

   Berdasarkan Perjanjian Penerapan Agen Penjual No. 110/RD/OPR/111/08 tanggal 14 Maret 2008, dalam melakukan pemasaran Reksa Dana Pendapatan Tetap Berkualitas, Bank memperoleh pembagian hasil keuangan yang dibayarkan oleh PT Panin Sekuritas Tbk setiap akhir bulannya.

Pada tanggal 14 Maret 2011 Bank mengadakan perubahan perjanjian Penetapan Agen Penjual, dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah jangka waktu perjanjian menjadi tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan 14 Maret 2012.

e. Reksa Dana Pendapatan Tetap Pemerintah adalah Reksa Dana Penyertaan berbentuk kontrak investasi kolektif antara PT Panin Sekuritas Tbk. selaku Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk – Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

PT Panin Sekuritas Tbk selaku Manajer Investasi, menunjuk Bank sebagai agen penjual utama.

Berdasarkan Perjanjian Penerapan Agen Penjual No. 125/RD/OPR/111/08 tanggal 14 Maret 2008, dalam melakukan pemasaran Reksa Dana Pendapatan Tetap Pemerintah, Bank memperoleh pembagian hasil keuangan yang dibayarkan oleh PT Panin Sekuritas Tbk setiap akhir bulannya.

Pada tanggal 14 Maret 2011 Bank mengadakan perubahan perjanjian Penetapan Agen Penjual, dimana kedua pihak sepakat untuk mengubah jangka waktu perjanjian menjadi tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan 14 Maret 2012.

Pendapatan *fee* penjualan Reksa Panin Terproteksi Pasti II dan pemasaran Bahana Reksa Panin Terproteksi III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII dan XIII dan produk Bancassurance dicatat Bank sebagai "Pendapatan operasional lain - lainnya" (Catatan 36).

f. Pada tanggal 10 Desember 2004, VMF memperoleh fasilitas kredit konsumen kemitraan pola *channeling* dari Bank Negara Indonesia (Persero) (BNI) dengan jumlah maksimum fasilitas sejumlah Rp 100 miliar yang akan digunakan untuk mendanai transaksi pembiayaan VMF dengan pelanggan.

Sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut, VMF bertanggung jawab untuk, antara lain, melakukan penagihan, serta memelihara pencatatan dan penyimpanan dokumen-dokumen. Sebagai imbalannya, VMF diperbolehkan untuk membebankan suku bunga tertentu kepada pelanggan melebihi suku bunga yang dibayarkan kepada BNI. Perjanjian kerjasama pembiayaan ini dilakukan dengan dasar *without recourse*.

Berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut, VMF setuju untuk membuka rekening amanat *(escrow account)* pada BNI, dengan saldo sejumlah Rp 10 juta, Rp 1.374 juta, Rp 6 juta dan Rp 4 juta masing-masing pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan disajikan sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebagai bagian dari akun Aset Lain-lain (Catatan 18).

Pada tanggal 31 Desember 2009, saldo fasilitas yang telah disalurkan adalah sejumlah Rp 11 juta.

Pada tanggal 8 Januari 2010, pinjaman tersebut telah dilunasi seluruhnya oleh VMF.

Pinjaman ini dijamin dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor yang dibiayai.

g. Pada tanggal 25 Maret 2009, VMF mengadakan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan Centratama Nasional Bank (CNB) dengan jumlah maksimum fasilitas sejumlah Rp 5 miliar. Sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut, VMF bertanggung jawab untuk, antara lain, melakukan penagihan, serta memelihara pencatatan dan penyimpanan dokumen-dokumen. Sebagai imbalannya, VMF diperbolehkan untuk membebankan suku bunga tertentu kepada pelanggan melebihi suku bunga yang dibayarkan kepada CNB. Perjanjian kerjasama pembiayaan ini dilakukan dengan dasar *without recourse.* Pada tanggal 21 Desember 2009, VMF telah melunasi fasilitas kredit tersebut.

Pinjaman ini dijamin dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor yang dibiayai.

h. Pada tanggal 21 Agustus 2009, VMF memperoleh fasilitas kredit konsumen kemitraan pola *channeling* dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) (BRI) dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp 50 miliar yang akan digunakan untuk mendanai transaksi pembiayaan VMF dengan pelanggan. Jangka waktu perjanjian kredit adalah 12 bulan sejak penandatanganan amandemen perjanjian kredit.

Sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut, VMF bertanggung jawab untuk, antara lain, melakukan penagihan, serta memelihara pencatatan dan penyimpanan dokumen-dokumen. Sebagai imbalannya, VMF diperbolehkan untuk membebankan suku bunga tertentu kepada pelanggan melebihi suku bunga yang dibayarkan kepada BRI. Perjanjian kerjasama pembiayaan ini dilakukan dengan dasar *without recourse*.

Pada tanggal 28 Oktober 2010, VMF melakukan perpanjangan perjanjian kerjasama dengan Bank BRI dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak berakhirnya perjanjian awal dan penambahan plafond menjadi sebesar Rp 145 miliar yang terdiri dari Rp 45 miliar sisa fasilitas *channeling* lama dan Rp 100 miliar fasilitas *channeling* baru. Fasilitas *channeling* sebesar Rp 45 miliar akan jatuh tempo pada tanggal 21 Agustus 2012, sementara fasilitas *channeling* sebesar Rp 100 miliar akan jatuh tempo pada tanggal 28 Oktober 2012.

Berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut, VMF setuju untuk membuka rekening amanat (*escrow account*) pada BRI, dengan saldo sejumlah Rp 80 juta, Rp 149 juta, Rp 13 juta dan Rp 7 juta pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, dan disajikan sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebagai bagian dari akun Aset Lain-lain (Catatan 18).

Saldo fasilitas yang telah disalurkan sebesar Rp 45.422 juta, Rp 75.638 juta, Rp 44.774 juta dan Rp 2.366 juta masing-masing pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

Pinjaman ini dijamin dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor yang dibiayai oleh BRI.

i. Pada tanggal 4 Nopember 2010, VMF memperoleh fasilitas pinjaman *revolving* dari Bank CIMB Niaga sebesar Rp 50 miliar. Jangka waktu pinjaman adalah selama 24 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kredit. Suku bunga yang dikenakan adalah sebesar 12,75% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen sebesar 111% dan 125%, masing-masing untuk objek pembiayaan dalam kondisi baru dan untuk objek pembiayaan dalam kondisi bekas, dari saldo fasilitas pinjaman.

Hingga 30 Juni 2012, VMF belum menggunakan fasilitas pinjaman ini.

j. Pada tanggal 29 Nopember 2010, VMF memperoleh fasilitas pembiayaan murabahah dari Bank Panin Syariah sebesar Rp 50 miliar. Nisbah yang dikenakan adalah sebesar 11,5% per tahun. Pinjaman ini dijamin oleh Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor yang dibiayai dari konsumen dan akan berlaku selama 39 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kredit termasuk didalamnya masa kelonggaran tarik selama 3 bulan.

Hingga 30 Juni 2012, VMF belum menggunakan fasilitas pinjaman ini.

k. Pada tanggal 30 Nopember 2010, VMF mengadakan perjanjian jual beli piutang dengan Bank Victoria International (Victoria) dengan jumlah maksimum harga jual beli piutang senilai Rp 100 miliar. Jangka waktu penyediaan *plafond* jual beli piutang adalah 12 bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Jangka waktu jual beli piutang sesuai dengan jangka waktu perjanjian masing-masing debitur atau maksimal sisa jangka waktu kredit adalah 3 tahun.

Pada berbagai tanggal pada periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010, VMF menjual sebagian piutang pembiayaan konsumen sebesar nilai pokok piutang kepada Victoria masing-masing sejumlah Rp 16.695 juta, Rp 34.757 juta dan Rp 20.318 juta.

l. Pada tanggal 8 Desember 2010, VMF memperoleh fasilitas kredit kerjasama penyaluran pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dari Bank DKI dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp 100 miliar yang akan digunakan untuk mendanai transaksi pembiayaan konsumen dengan VMF. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah 42 (empat puluh dua) bulan sejak penandatanganan perjanjian ini. Pinjaman ini dijamin dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor yang dibiayai.

Saldo fasilitas yang telah disalurkan masing-masing sebesar Rp 7.836 juta, Rp 19.559 juta dan Rp 7.821 juta masing-masing pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010.

m. Pada tanggal 21 Desember 2011, VMF memperoleh fasilitas-fasilitas kredit konsumen kemitraan pola channeling dan fasilitas pinjaman tetap dari Bank Permata masing-masing sebesar Rp 100 miliar dan Rp 50 miliar. Suku bunga yang dikenakan adalah sebesar 10,50% per tahun. Jangka waktu fasilitas masing-masing adalah selama 12 bulan dan 6 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kredit. Pinjaman ini dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen sebesar 100% dari saldo fasilitas.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, VMF belum menggunakan fasilitas ini.

n. VMF mengadakan perjanjian kerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi untuk melindungi kendaraan bermotor, mesin dan alat berat yang dibiayai oleh VMF, antara lain dari risiko kehilangan, kerusakan dan kebakaran.

o. Pada tanggal 24 Oktober 1996, Clipan menandatangani perjanjian sewa gedung kantor Plaza 89 dengan PT Mulialand Tbk untuk jangka waktu 1 Oktober 1996 sampai dengan 30 September 2000. Pada bulan Maret 1998, Clipan telah pindah kantor ke gedung Plaza Panin Palmerah. Sejak bulan April 1998, Clipan tidak melakukan pembayaran sewa ke PT Mulialand Tbk. Sehubungan dengan itu, pada tanggal 27 Januari 1999 PT Mulialand Tbk mengajukan gugatan kepada Clipan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 43/PDT.G/1999/PN.Jak.Sel tanggal 29 Juli 1999, Clipan diwajibkan membayar sisa uang sewa, biaya pelayanan dan biaya lainnya untuk masa 14 April 1998 sampai dengan 30 September 1998 sebesar US$ 518.222 dikurangi dengan deposit telepon Clipan sebesar Rp 58 juta dan ditambah denda keterlambatan 2% per bulan terhitung sejak tanggal 21 April 1998 sampai dengan seluruh kewajiban dibayar lunas oleh Clipan. Atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Clipan telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta, dan selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 977/Pdt/1999/PT.DKI tanggal 25 Pebruari 2000, Clipan sebagai pihak yang dikalahkan.

Dengan adanya hasil putusan tersebut, Clipan telah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI dan telah menyampaikan memori kasasi tertanggal 26 Oktober 2000 sesuai risalah penerimaan permohonan kasasi No.43/PDT.G/1999/PN.Jkt.Sel.

Telah ada surat dari Mahkamah Agung RI kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penyampaian salinan putusan MA No. 2321/K/PDT/2001 tanggal 17 Maret 2003. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, isi Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi (*formil*) kepada Clipan belum diberitahukan sehingga isi Putusan belum diketahui.

p. Kantor Cabang Semarang Clipan menerima gugatan perbuatan melawan hukum dari CV. Bina Usaha (Penggugat) terkait permasalahan hukum atas 9 (sembilan) unit Truk Tangki yang merupakan objek leasing CV. Bina Usaha (selaku *Lessee*) dan permasalahan pembayaran kewajiban leasing CV. Bina Usaha kepada Clipan (selaku *Lessor*). Gugatan tersebut diregister dengan No. 210/Pdt.G/2009/PN.Smg tanggal 7 September 2009.

Dalam petitum gugatan, Penggugat antara lain mengajukan sita jaminan terhadap 9 (sembilan) unit Truk Tangki yang merupakan Objek Leasing, tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp 478 juta dan ganti rugi immateriil sebesar Rp 10.000 juta. Saat ini, perkara dalam proses persidangan dari Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan Putusan PN Semarang No.210/Pdt.G/2009/PN.Smg tanggal 26 Mei 2010 memutuskan, antara lain:

- Dalam Pokok Perkara: menolak gugatan CV. Bina Usaha (Penggugat) untuk seluruhnya;

- Dalam Rekonpensi: mengabulkan gugatan Clipan (selaku Penggugat Rekonpensi) untuk sebagian, menyatakan CV. Bina Usaha (selaku Tergugat Rekonpensi) telah ingkar janji (wanprestasi), memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 2.526 juta dan denda sebesar 0,4% per hari keterlambatan membayar ganti rugi tersebut.

Atas Putusan PN Semarang No.210/Pdt.G/2009/PN.Smg tanggal 26 Mei 2010, CV. Bina Usaha mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Semarang. Telah ada putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 385/Pdt/2010/PN.Smg tanggal 3 Januari 2011 yang memutuskan antara lain memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Mei 2010 No. 210/Pdt.G/2009/PN.Smg yang dimohonkan banding sekedar mengenai pembebanan pembayaran ganti rugi kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi. Atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut clipan telah mengajukan permohonan kasasi tanggal 4 Maret 2011.

q. Kantor Cabang Bandung Clipan selaku Tergugat menerima gugatan perbuatan melawan hukum dari Yudi Heriyanto (Penggugat) terkait permasalahan pembayaran kewajiban serta objek pembiayaan (jaminan) Penggugat selaku Konsumen kepada Clipan (selaku Bank Pembiayaan). Gugatan tersebut teregister di Pengadilan Negeri Bandung No. 299/Pdt.G/2009/PN.Bdg tanggal 27 Agustus 2009.

Dalam petitum gugatan, Penggugat antara lain menuntut untuk penjadwalan utang (*reschedulling*), penetapan sisa utang sebesar Rp 134 juta dengan jangka waktu pembayaran ditambah menjadi 7 tahun sampai dengan 9 tahun, tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp 600 juta dan ganti rugi materiil sebesar Rp 30 juta.

Berdasarkan Putusan PN Bandung No. 299/Pdt/G/2009/PN. Bdg tanggal 7 Juli 2010 memutuskan antara lain:

- Dalam Pokok Perkara: menolak gugatan Yudi Heriyanto (Penggugat) seluruhnya;

- Dalam Rekonpensi: mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi (Clipan) untuk sebagian, menyatakan Tergugat Rekonpensi (Yudi Heriyanto) telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi agar menyerahkan Mercedes Benz yang menjadi Obyek Jaminan Fiducia kepada Penggugat Rekonpensi berdasarkan Sertifikat Fiducia No. W 8.0006364.HT.04.06 Th.2009 tanggal 19 Mei 2009 yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Atas Putusan PN Bandung No. 299/Pdt/G/2009/PN.Bdg tanggal 7 Juli 2010 tersebut Yudi Heriyanto menyatakan banding. Pada saat ini perkara tersebut masih dalam proses banding.

Pihak Penggugat menyatakan banding dan telah ada putusan banding Pengadilan Tinggi Bandung No. 43/Pdt/2011/PT.Bdg tanggal 11 Mei 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 7 Juli 2010 No. 299/Pdt.G/2009/PN.Bdg, atas putusan ini Yudi Heriyanto (Penggugat/Pembanding) mengajukan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2011. Perkara ini masih dalam proses kasasi.

r. Clipan selaku Tergugat II mendapat gugatan perdata dari An Man Oh (selaku Penggugat). Gugatan tersebut teregister di Pengadilan Negeri Bogor dengan No. 61/Pdt.G/2010/PN.Bgr tanggal 9 Juni 2010. Gugatan terkait dengan pelaksanaan lelang eksekusi atas 5 bidang tanah jaminan atas nama Man Oh An (Ah Man Oh) selaku konsumen yang telah wanprestasi (konsumen bermasalah/macet) pada Clipan. Pelaksanaan lelang eksekusi atas jaminan 5 bidang tanah tersebut telah dilakukan pada tanggal 18 Nopember 2009 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor. Dalam petitum gugatan, Penggugat antara lain menuntut untuk menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 5 bidang tanah atas nama Man Oh An dan memerintahkan para Tergugat untuk tidak mengalihkan, menjual, menjadikan jaminan kepada pihak lain/pihak ketiga.

s. Clipan selaku Termohon III dari Permohonan Intervensi No. 61/Pdt.Intervensi/2010/PN.Bgr terhadap perkara perdata No.61/Pdt.G/2010/PN.Bgr tanggal 9 Juni 2010 tersebut diatas, yang diajukan oleh Tati (selaku Pemohon Intervensi) di Pengadilan Negeri Bogor. Dalam petitum permohonan, Pemohon Intervensi memohon agar diputuskan, antara lain: menyatakan menolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima gugatan perkara No.61/Pdt.G/2010/PN.Bgr tanggal 9 Juni 2010 yang teregister di Pengadilan Negeri Bogor, menyatakan Pemohon Intervensi sah sebagai Pemenang Lelang berdasarkan Risalah Lelang No.469/2009 tanggal 2 Desember 2009 serta Pemohon Intervensi berhak atas 5 (lima) bidang tanah yang telah dilelang dalam 1 (satu) paket.

Atas perkara No. 61/Pdt.G/2010/PN.Bgr melalui Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 61/Pdt.G/2010/PN.Bgr tanggal 23 Mei 2012, telah diputuskan antara lain:

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan lunas segala pembayaran atas tagihan Tergugat II kepada Penggugat oleh karena Tergugat II telah menerima pembayaran dari pihak lain untuk kepentingan Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan taat pada putusan ini.

Dalam Perkara Intervensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah berdasarkan hukum pelaksanaan lelang tertanggal 18 Nopember 2009 yang dilaksanakan Termohon III;
- Menyatakan Pemohon Intervensi sah sebagai pemenang lelang berdasarkan Risalah Lelang No. 469/2009 tertanggal 2 Desember 2009, serta Pemohon Intervensi berhak atas 5 (lima) bidang tanah yang telah dilelang;
- Memerintahkan Turut Tergugat Intervensi/Turut Tergugat melakukan roya dan balik nama (lelang) menjadi hak milik Pemohon Intervensi selaku pemenang lelang atas 5 (lima) bidang tanah;
- Menyatakan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima.

Sampai saat ini belum ada pemberitahuan Banding dari pihak Penggugat Tergugat Intervensi I (An Man Oh).

t. Dr. Tommy Sihotang, S.H., LLM dan Dr. Juniver Girsang, S.H., MH selaku Penggugat mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 398/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Juli 2011 terhadap Clipan selaku Tergugat V beserta 6 (enam) Tergugat lainnya dan 2 (dua) Turut Tergugat, berupa gugatan ingkar janji/ wanprestasi dimana Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar *success fee* kepada Penggugat (selaku Kuasa Hukum Para Tergugat dalam perkara kepailitan).

Dalam petitum gugatan, Penggugat antara lain menuntut Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp 4.606 juta ditambah dengan bunga sebesar 3% setiap bulannya sejak gugatan didaftarkan sampai dengan Para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tunai dan sekaligus, meminta Turut Tergugat untuk membekukan (*suspending*) kegiatan usaha dan/atau mendenda Clipan dan 1 (satu) Tergugat lainnya karena sebagai perusahaan publik telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi dan tidak melaporkannya kepada Turut Tergugat sebagai badan-badan yang memberi izin dan mengawasi perusahaan-perusahaan publik.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 398/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Mei 2012, telah diputuskan antara lain:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat I sampai dengan VI telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sita jaminan berdasarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor 398/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 2 April 2012;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII untuk membayar *success fee* kepada Penggugat sebesar Rp 2.605 juta, secara tanggung renteng; ditambah bunga 6% setiap tahunnya, terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan Para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tunai dan sekaligus.

Atas putusan pengadilan tersebut diatas, para Tergugat mengajukan Banding.

u. Perkara perdata yang diregister tanggal 8 Desember 2011 di Pengadilan Negeri Surabaya No. 948/Pdt.G/2011/PN.Sby antara Herman (Penggugat) melawan Perseroan (Tergugat) berupa gugatan perbuatan melawan hukum oleh Clipan sehubungan dengan perjanjian pembiayaan konsumen antara Clipan (perusahaan pembiayaan) dengan Penggugat (konsumen) dimana Penggugat dalam petitumnya antara lain menuntut untuk menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 84206101111 tanggal 21 September 2011 Batal Demi Hukum, menghukum Penggugat membayar kerugian sejumlah Rp 515 juta, (dengan rincian: 1. Immateriil Rp 500 juta, 2. Materiil Rp 5 juta, 3. Jasa Pengacara Rp 10 juta, menyatakan sah dan berharga sita atas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) D No. 7913132 J. Perkara ini masih dalam proses persidangan.

56. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG BERBEDA DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Kendaraan dan inventaris kantor disusutkan dengan metode menurun ganda (*double declining balance method*), kecuali kendaraan dan inventaris kantor milik entitas anak disusutkan dengan metode garis lurus yang proporsi kendaraan dan inventaris kantor yang disusutkan dengan metode tersebut masing-masing sebesar 4,11%, 3,51%, 2,71% dan 3,71% dari jumlah tercatat aset tetap pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

57. REKLASIFIKASI AKUN

Piutang pembiayaan konsumen milik VMF dalam laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 telah direklasifikasi ke aset lain-lain masing-masing sebesar Rp 79.572 juta, Rp 44.327 juta dan Rp 14.822 juta untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012, dengan perincian sebagai berikut:

	Sebelum reklasifikasi			Setelah reklasifikasi		
	31 Desember			31 Desember		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009
	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta	Rp juta
Aset						
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	3.533.672	1.949.590	1.084.829	3.454.100	1.905.263	1.070.007
Aset lain-lain	2.417.786	2.242.464	1.789.395	2.497.358	2.286.625	1.804.217

58. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

a. Pada tanggal 27 September 2012, VMF telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan melalui surat No. 193/VMF/X/IX/12 sehubungan dengan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 1.000.000 juta, dimana dalam Penawaran Umum berkelanjutan tersebut VMF akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I tahun 2012 dengan jumlah pokok Obligasi Tahap I sebanyak-banyaknya sebesar Rp 400.000 juta.

b. Pada tanggal 18 Oktober 2012 telah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Salah satu perubahan PBI tersebut dibandingkan dengan peraturan yang lama adalah perubahan definisi mengenai Pengendalian. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Manajemen Bank sedang mengevaluasi dampak dari PBI tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

c. Pada tanggal 19 Oktober 2012, Bank telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan melalui surat No. 370/DIR/EXT/12 sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 3.000.000 juta, dimana dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut Bank akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I tahun 2012 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 750.000 juta dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 4.000.000 juta, dimana dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut Perusahaan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 2.000.000 juta.

59. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan obligasi dan obligasi subordinasi Bank telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut adalah :

a. Penambahan informasi pada laporan posisi keuangan konsolidasian.
b. Penambahan referensi pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian.
c. Penambahan informasi pada Catatan 1a, 1c, 2a, 2b, 2c, 3g, 3j, 3o, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 26, 28, 36, 49, 52, 54, 57, 58 dan 59.
d. Penambahan informasi tambahan (Daftar V) mengenai investasi dalam entitas anak dan entitas asosiasi.

60. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI ENTITAS INDUK

Informasi keuangan tersendiri entitas induk menyajikan informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas dan arus kas, dimana penyertaan saham pada entitas anak dipertanggungjawabkan dengan metode biaya.

Sebelum 1 Januari 2011, penyertaan saham pada entitas anak dipertanggungjawabkan dengan metode ekuitas. Sehubungan dengan penerapan PSAK 4 (revisi 2009), penyertaan saham tersebut dipertanggungjawabkan menjadi metode biaya.

Informasi keuangan tersendiri entitas induk disajikan pada halaman 201 sampai dengan 207.

61. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN INFORMASI TAMBAHAN

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan obligasi dan obligasi subordinasi, Direksi Bank menyetujui untuk menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian Bank dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2012 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008 pada tanggal 14 Nopember 2012. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan konsolidasian terdahulu dengan laporan keuangan koreksi yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan dalam Catatan 59 atas laporan keuangan konsolidasian mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian.

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk
ENTITAS INDUK SAJA
DAFTAR I: INFORMASI LAPORAN POSISI KEUANGAN TERSENDIRI ENTITAS INDUK *)
30 JUNI 2012, 31 DESEMBER 2011, 2010, 2009 DAN 1 JANUARI 2009/31 DESEMBER 2008

	30 Juni 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010	31 Desember 2009	1 Januari 2009/ 31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
ASET					
KAS	1.118.494	1.385.817	1.073.009	899.011	926.205
GIRO PADA BANK INDONESIA	8.359.601	7.470.883	5.324.515	2.472.083	1.914.131
GIRO PADA BANK LAIN - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar nihil pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, Rp 8.649 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp 13.801 juta pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008					
Pihak berelasi	29.466	79.389	78.740	35.738	72.987
Pihak ketiga	518.453	1.066.846	761.339	814.998	1.287.416
Jumlah	547.919	1.146.235	840.079	850.736	1.360.403
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar nihil pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, Rp 77.730 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp 40.249 juta pada tanggal 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008					
Pihak berelasi	50.000	80.000	180.200	485.100	49.500
Pihak ketiga	8.273.565	15.003.692	16.365.309	7.300.609	5.174.963
Jumlah	8.323.565	15.083.692	16.545.509	7.785.709	5.224.463
EFEK-EFEK					
Pihak berelasi					
Dimiliki hingga jatuh tempo	-	30.000	30.000	30.000	-
Pihak ketiga					
Dimiliki hingga jatuh tempo	12.467.042	13.246.152	7.926.631	4.725.934	12.504.696
Tersedia untuk dijual	3.439.163	1.509.851	12.535.788	14.241.247	247.979
Diperdagangkan	524.108	552.320	100.144	10.070	56.571
Jumlah	16.430.313	15.338.323	20.592.563	19.007.251	12.809.246
Cadangan kerugian penurunan nilai	(162.168)	(58.701)	(10.568)	(38.266)	(34.798)
Bersih	16.268.145	15.279.622	20.581.995	18.968.985	12.774.448
EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar nihil pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan Rp 596 juta pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008	5.789.023	2.798.161	-	-	59.010
TAGIHAN DERIVATIF - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar nihil pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, Rp 32 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp 1.114 juta pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008	8.839	3.316	4.936	3.122	110.268

*) Disajikan dengan metode biaya

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk
ENTITAS INDUK SAJA
DAFTAR I: INFORMASI LAPORAN POSISI KEUANGAN TERSENDIRI ENTITAS INDUK *)
30 JUNI 2012, 31 DESEMBER 2011, 2010, 2009 DAN 1 JANUARI 2009/31 DESEMBER 2008 (Lanjutan)

	30 Juni	31 Desember			1 Januari 2009/ 31 Desember
	2012	2011	2010	2009	2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
KREDIT - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 2.272.598 juta pada tanggal 30 Juni 2012, Rp 1.993.457 juta pada tanggal 31 Desember 2011, Rp 1.296.361 juta pada tanggal 31 Desember 2010, Rp 1.154.308 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp 1.244.127 juta pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008					
Pihak berelasi	363.668	431.679	510.559	171.655	16.776
Pihak ketiga	80.438.514	68.368.676	55.449.935	39.954.075	35.269.835
Jumlah	80.802.182	68.800.355	55.960.494	40.125.730	35.286.611
TAGIHAN AKSEPTASI - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar nihil pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, Rp 5.169 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp 39.200 juta pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008	1.155.133	848.825	503.849	511.736	682.967
PENYERTAAN DALAM BENTUK SAHAM - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 625 juta pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, Rp 11.796 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp 10.064 juta pada tanggal 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008	1.411.457	1.411.457	726.963	715.793	669.532
ASET TETAP - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.686.793 juta pada tanggal 30 Juni 2012, Rp 1.580.435 juta pada tanggal 31 Desember 2011, Rp 1.381.893 juta pada tanggal 31 Desember 2010, Rp 1.229.296 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp 949.130 pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008	1.777.962	1.703.927	1.674.932	1.626.228	1.598.501
ASET PAJAK TANGGUHAN - BERSIH	80.138	28.966	37.572	67.968	65.246
ASET LAIN-LAIN					
Aset tetap yang belum digunakan dalam kegiatan operasional	486.072	523.581	507.874	422.863	409.416
Agunan yang diambil alih - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp 84.499 juta pada tanggal 30 Juni 2012, Rp 91.174 juta pada tanggal 31 Desember 2011, Rp 132.326 juta pada tanggal 31 Desember 2010, Rp 119.479 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dan Rp 88.943 juta pada tanggal 1 Januari 2009/ 31 Desember 2008	238.186	190.132	357.161	370.351	357.132
Lainnya	1.669.270	1.586.947	1.285.608	923.075	1.086.501
Jumlah	2.393.528	2.300.660	2.150.643	1.716.289	1.853.049
JUMLAH ASET	128.035.986	118.261.916	105.424.496	75.743.390	62.524.834

*) Disajikan dengan metode biaya

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk
ENTITAS INDUK SAJA
DAFTAR I: INFORMASI LAPORAN POSISI KEUANGAN TERSENDIRI ENTITAS INDUK *)
30 JUNI 2012, 31 DESEMBER 2011, 2010, 2009 DAN 1 JANUARI 2009/31 DESEMBER 2008 (Lanjutan)

	30 Juni 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010	31 Desember 2009	1 Januari 2009/ 31 Desember 2008
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
LIABILITAS SEGERA	320.427	254.136	137.534	164.212	286.110
SIMPANAN					
Pihak berelasi	518.659	632.315	464.163	365.657	976.898
Pihak ketiga	91.641.720	84.903.837	74.590.519	55.941.557	45.304.121
Jumlah	92.160.379	85.536.152	75.054.682	56.307.214	46.281.019
SIMPANAN DARI BANK LAIN					
Pihak berelasi	12.516	10.333	30.162	31.445	59.554
Pihak ketiga	8.547.114	5.304.089	3.536.722	2.228.936	1.305.125
Jumlah	8.559.630	5.314.422	3.566.884	2.260.381	1.364.679
EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI - PIHAK KETIGA	3.062.667	3.665.163	4.653.892	503.887	-
LIABILITAS DERIVATIF	3.419	2.951	7.216	5.295	94.549
LIABILITAS AKSEPTASI					
Pihak berelasi	-	4.139	-	-	42.042
Pihak ketiga	1.155.912	845.855	503.849	516.905	648.397
Jumlah	1.155.912	849.994	503.849	516.905	690.439
SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN - BERSIH	1.527.161	2.916.302	2.832.658	2.388.132	1.646.091
PINJAMAN YANG DITERIMA	1.829.109	1.334.735	2.251.027	939.625	2.343.694
UTANG PAJAK	203.829	219.591	92.090	196.986	79.274
LIABILITAS LAIN-LAIN	753.565	730.742	516.224	466.802	474.316
OBLIGASI SUBORDINASI - BERSIH	3.933.105	3.930.114	3.924.611	1.491.856	1.489.350
JUMLAH LIABILITAS	113.509.203	104.754.302	93.540.667	65.241.295	54.749.521
EKUITAS					
MODAL SAHAM - nilai nominal Rp 100 per saham Modal dasar - 96.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011 dan 2010, 59.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2009 dan 1 Januari 2009/31 Desember 2008 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 24.087.645.998 saham pada tanggal 30 Juni 2012, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 20.335.300.386 saham pada tanggal 1 Januari 2009/31 Desember 2008	2.408.765	2.408.765	2.408.765	2.408.765	2.033.530
AGIO SAHAM	3.444.330	3.444.330	3.444.330	3.444.330	2.318.626
KOMPONEN EKUITAS LAINNYA - LABA (RUGI) BELUM DIREALISASI DARI PEMILIKAN EFEK	(11.850)	(29.714)	(24.446)	130.574	(259.899)
SALDO LABA					
Ditentukan penggunaannya	140.000	120.000	100.000	100.000	100.000
Tidak ditentukan penggunaannya	8.545.538	7.564.233	5.955.180	4.418.426	3.583.056
JUMLAH EKUITAS	14.526.783	13.507.614	11.883.829	10.502.095	7.775.313
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	128.035.986	118.261.916	105.424.496	75.743.390	62.524.834

*) Disajikan dengan metode biaya

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk
ENTITAS INDUK SAJA
DAFTAR II: INFORMASI LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF TERSENDIRI ENTITAS INDUK *)
UNTUK PERIODE 30 JUNI 2012 DAN 2011 (2011-TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009

	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					
Pendapatan Bunga					
Bunga yang diperoleh	4.723.176	4.296.540	8.799.631	7.460.487	6.752.913
Provisi dan komisi kredit	178.552	170.561	335.568	219.300	217.825
Jumlah Pendapatan Bunga	4.901.728	4.467.101	9.135.199	7.679.787	6.970.738
Beban Bunga					
Bunga yang dibayar	2.188.665	2.232.431	4.429.285	3.739.742	3.949.486
Hadiah	334.968	7.221	67.261	12.907	11.193
Provisi dan komisi yang dibayar	138.386	88.652	207.455	131.219	109.732
Jumlah Beban Bunga	2.662.019	2.328.304	4.704.001	3.883.868	4.070.411
PENDAPATAN BUNGA - BERSIH	2.239.709	2.138.797	4.431.198	3.795.919	2.900.327
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya					
Keuntungan bersih penjualan efek	146.416	94.980	214.403	399.670	223.227
Keuntungan (kerugian) bersih penilaian efek yang diperdagangkan	(55.369)	9.579	50.030	1.572	(5.249)
Pendapatan transaksi valuta asing - bersih	97.058	63.450	256.270	167.688	186.701
Pendapatan dividen	55.592	42.802	42.802	33.865	12.308
Provisi dan komisi lainnya - bersih	33.584	9.126	36.340	52.439	53.528
Pendapatan lainnya	449.783	434.224	1.157.415	390.689	202.680
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	727.064	654.161	1.757.260	1.045.923	673.195
Beban (Pemulihan) Kerugian Penurunan Nilai					
Aset produktif	441.008	485.931	955.355	1.183.817	876.207
Aset non produktif	(39.906)	(42.590)	(41.152)	12.847	30.538
Jumlah Beban Kerugian Penurunan Nilai	401.102	443.341	914.203	1.196.664	906.745
Beban Operasional Lainnya					
Umum dan administrasi	719.156	1.001.113	1.995.664	1.315.558	919.430
Tenaga kerja	357.296	274.960	765.456	588.791	452.280
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	116.115	55.894	111.789	78.343	61.933
Lainnya	72.338	107.040	199.341	147.835	93.516
Jumlah Beban Operasional Lainnya	1.264.905	1.439.007	3.072.250	2.130.527	1.527.159
LABA OPERASIONAL	1.300.766	910.610	2.202.005	1.514.651	1.139.618
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL					
Hasil sewa	8.070	7.798	15.248	14.844	14.486
Lainnya - bersih	7.730	(21.690)	(19.592)	22.880	3.797
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional - Bersih	15.800	(13.892)	(4.344)	37.724	18.283
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	1.316.566	896.718	2.197.661	1.552.375	1.157.901
PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK					
Pajak kini	(366.433)	(212.353)	(560.002)	(385.598)	(325.253)
Pajak tangguhan	51.172	(10.184)	(8.606)	(30.396)	2.722
Jumlah	(315.261)	(222.537)	(568.608)	(415.994)	(322.531)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	1.001.305	674.181	1.629.053	1.136.381	835.370
PENDAPATAN KOMREHENSIF LAIN					
Kenaikan (penurunan) nilai efek yang belum direalisasi	17.864	19.526	(5.268)	(155.020)	390.473
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	1.019.169	693.707	1.623.785	981.361	1.225.843
LABA PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)					
Dasar	41,57	27,99	67,63	47,18	37,42

*) Disajikan dengan metode biaya

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk
ENTITAS INDUK SAJA
DAFTAR III : INFORMASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TERSENDIRI ENTITAS INDUK *)
UNTUK PERIODE 30 JUNI 2012 DAN 2011 (2011-TIDAK DIAUDIT) SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009

	Modal saham	Agio saham	Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali	Komponen ekuitas lainnya - laba (rugi) belum direalisasi dari pemilikan efek	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
					Ditentukan penggunaannya	Tidak ditentukan penggunaannya	
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Saldo per 1 Januari 2009	2.033.530	2.318.626	3.747	(259.899)	100.000	3.747.274	7.943.278
Penyesuaian sehubungan dengan perubahan kebijakan akuntansi	-	-	(3.747)	-	-	(164.218)	(167.965)
Saldo per 1 Januari 2009 setelah penyesuaian sehubungan dengan perubahan kebijakan akuntansi	2.033.530	2.318.626	-	(259.899)	100.000	3.583.056	7.775.313
Pelaksanaan waran	375.235	1.125.704	-	-	-	-	1.500.939
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	835.370	835.370
Laba belum direalisasi dari pemilikan efek	-	-	-	390.473	-	-	390.473
Jumlah laba komprehensif	-	-	-	390.473	-	835.370	1.225.843
Saldo per 31 Desember 2009	2.408.765	3.444.330	-	130.574	100.000	4.418.426	10.502.095
Saldo per 1 Januari 2010	2.408.765	3.444.330	-	130.574	100.000	4.418.426	10.502.095
Pengaruh penerapan awal PSAK No. 55 (revisi 2006)	-	-	-	-	-	400.373	400.373
Saldo per 1 Januari 2010 setelah pengaruh penerapan awal PSAK No. 55 (revisi 2006)	2.408.765	3.444.330	-	130.574	100.000	4.818.799	10.902.468
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	1.136.381	1.136.381
Rugi belum direalisasi dari pemilikan efek	-	-	-	(155.020)	-	-	(155.020)
Jumlah laba komprehensif	-	-	-	(155.020)	-	1.136.381	981.361
Saldo per 31 Desember 2010	2.408.765	3.444.330	-	(24.446)	100.000	5.955.180	11.883.829
Saldo per 1 Januari 2011	2.408.765	3.444.330	-	(24.446)	100.000	5.955.180	11.883.829
Cadangan umum	-	-	-	-	20.000	(20.000)	-
Laba bersih tahun berjalan (tidak diaudit)	-	-	-	-	-	674.181	674.181
Laba belum direalisasi dari pemilikan efek (tidak diaudit)	-	-	-	19.526	-	-	19.526
Jumlah laba komprehensif (tidak diaudit)	-	-	-	19.526	-	674.181	693.707
Saldo per 30 Juni 2011 (tidak diaudit)	2.408.765	3.444.330	-	(4.920)	120.000	6.609.361	12.577.536
Saldo per 1 Januari 2011	2.408.765	3.444.330	-	(24.446)	100.000	5.955.180	11.883.829
Cadangan umum	-	-	-	-	20.000	(20.000)	-
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	1.629.053	1.629.053
Rugi belum direalisasi dari pemilikan efek	-	-	-	(5.268)	-	-	(5.268)
Jumlah laba komprehensif	-	-	-	(5.268)	-	1.629.053	1.623.785
Saldo per 31 Desember 2011	2.408.765	3.444.330	-	(29.714)	120.000	7.564.233	13.507.614
Saldo per 1 Januari 2012	2.408.765	3.444.330	-	(29.714)	120.000	7.564.233	13.507.614
Cadangan umum	-	-	-	-	20.000	(20.000)	-
Laba bersih periode berjalan	-	-	-	-	-	1.001.305	1.001.305
Laba belum direalisasi dari pemilikan efek	-	-	-	17.864	-	-	17.864
Jumlah laba komprehensif	-	-	-	17.864	-	1.001.305	1.019.169
Saldo per 30 Juni 2012	2.408.765	3.444.330	-	(11.850)	140.000	8.545.538	14.526.783

*) Disajikan dengan metode biaya

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk
INDUK PERUSAHAAN SAJA
DAFTAR IV: INFORMASI LAPORAN ARUS KAS TERSENDIRI ENTITAS INDUK *)
UNTUK PERIODE 30 JUNI 2012 DAN 2011 (2011-TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009

	2012 (Enam bulan)	2011 (Enam bulan) (Tidak diaudit)	2011 (Satu tahun)	2010 (Satu tahun)	2009 (Satu tahun)
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Bunga, provisi dan komisi kredit yang diterima	4.792.706	4.484.530	9.036.625	7.626.714	7.026.774
Bunga, hadiah, provisi dan komisi dana yang dibayar	(2.677.931)	(2.335.578)	(4.693.023)	(3.819.391)	(4.109.805)
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	629.783	514.351	1.408.158	635.048	728.927
Pembayaran beban operasional lainnya	(1.095.616)	(1.406.845)	(2.879.744)	(2.082.648)	(1.281.687)
Keuntungan dari transaksi valuta asing - bersih	33.601	15.374	255.018	126.251	101.615
Penerimaan pendapatan non operasional - bersih	12.759	10.166	14.282	267.017	23.850
Pembayaran beban pajak	(373.963)	(173.868)	(441.956)	(493.497)	(195.093)
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	1.321.339	1.108.130	2.699.360	2.259.494	2.294.581
Penurunan (kenaikan) aset operasi					
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.805.623	(1.587.895)	(1.805.623)	-	(1.578.314)
Efek-efek	2.558.292	(11.331.174)	(2.857.427)	601.726	888.391
Kredit	(12.258.251)	(6.127.182)	(13.528.180)	(14.788.084)	(5.860.274)
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(2.990.862)	(894.083)	(2.798.161)	-	59.927
Aset lain-lain	(19.751)	(42.499)	(112.045)	(204.504)	5.829
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi					
Liabilitas segera	66.294	293.541	116.659	(26.677)	(121.896)
Simpanan	6.624.228	2.923.507	10.481.469	18.747.468	10.031.322
Simpanan dari bank lain	3.245.208	1.597.401	1.747.538	1.306.503	890.575
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(602.497)	(3.749.938)	(988.728)	4.150.005	503.887
Liabilitas akseptasi	(391)	2.295	1.170	-	31.728
Liabilitas lain-lain	32.905	365.462	(6.757)	(12.860)	14.950
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(217.863)	(17.442.435)	(7.050.725)	12.033.071	7.160.706
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penerimaan dividen	60	19.640	42.802	33.865	12.313
Hasil penjualan aset tetap	2.217	3.835	5.053	35.015	1.608
Penjualan (pembelian) penyertaan dalam bentuk saham	-	(308.997)	(592.757)	-	3.284
Perolehan aset tetap	(131.427)	(118.415)	(226.755)	(339.275)	(277.771)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(129.150)	(403.937)	(771.657)	(270.395)	(260.566)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Surat berharga yang diterbitkan	(1.400.000)	-	-	3.000.000	800.000
Biaya emisi	-	-	-	(34.943)	(9.539)
Penjualan kembali obligasi yang diterbitkan	9.000	92.905	79.905	-	-
Pembelian kembali obligasi yang diterbitkan	-	-	-	(42.905)	(50.000)
Penerimaan pinjaman yang diterima	1.104.061	499.241	1.912.718	3.148.030	1.290.200
Pembayaran pinjaman yang diterima	(609.686)	(1.571.050)	(2.829.010)	(1.836.630)	(2.694.268)
Pelunasan surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	(50.000)	-
Penambahan modal disetor	-	-	-	-	1.500.939
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(896.625)	(978.904)	(836.387)	4.183.552	837.332
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1.243.638)	(18.825.276)	(8.658.769)	15.946.228	7.737.472
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	27.136.543	35.795.312	35.795.312	19.849.084	12.111.612
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	25.892.905	16.970.036	27.136.543	35.795.312	19.849.084
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN					
Kas dan setara kas terdiri dari:					
Kas	1.118.494	1.087.882	1.385.817	1.073.009	899.011
Giro pada Bank Indonesia	8.359.602	7.019.426	7.470.883	5.324.515	2.472.083
Giro pada bank lain	547.919	738.934	1.146.235	840.079	859.384
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	8.323.565	8.123.794	13.278.070	16.545.509	5.946.986
Sertifikat Bank Indonesia	7.543.325	-	3.855.538	12.012.200	9.671.620
Jumlah	25.892.905	16.970.036	27.136.543	35.795.312	19.849.084

*) Disajikan dengan metode biaya

P.T. BANK PAN INDONESIA Tbk
INDUK PERUSAHAAN SAJA
DAFTAR V: INFORMASI INVESTASI DALAM ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI
UNTUK PERIODE 30 JUNI 2012 DAN 2011 (2011-TIDAK DIAUDIT)
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009

Perincian investasi dalam entitas anak dan entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

	% Pemilikan				
		31 Desember			1 Januari 2009/ 31 Desember
Entitas Anak	30 Juni 2012	2011	2010	2009	2008
Lembaga Pembiayaan					
PT Clipan Finance Indonesia Tbk (Clipan)	54,35	54,35	54,35	54,35	54,35
PT Verena Multi Finance Tbk (VMF)	42,87	42,87	42,87	42,87	42,87
Asuransi					
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (AMAG)	13,50	13,50	13,50	15,92	15,92
Bank Syariah					
PT Bank Panin Syariah (BPS)	99,997	99,997	99,997	99,997	100,00
Entitas Asosiasi					
Sekuritas					
PT Panin Sekuritas Tbk	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Lembaga Pembiayaan					
PT Evergreen Finance (d/h PT Dai-ichi Kangyo Panin Finance	-	-	-	20,00	20,00
Modal Ventura					
PT Epanin Dotcom	-	-	-	-	20,00

Seluruh entitas anak dan entitas asosiasi berdomisili di Jakarta.

Investasi dalam entitas anak dan entitas asosiasi dalam informasi keuangan tersendiri entitas induk disajikan dengan metode biaya.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN EFEK

1. HASIL PEMERINGKATAN

Berdasarkan Peraturan No. IX.C.1 lampiran Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh:

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat No. 1654/PEF-Dir/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012, "Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 " dan surat No. 1655/PEF-Dir/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012, "Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 " untuk periode 5 Oktober 2012 sampai dengan 1 Oktober 2013 telah mendapat peringkat:

id AA (*Double A*) untuk Obligasi dan
id AA- (*Double A Minus*) untuk Obligasi Subordinasi

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang.

2. SKALA PEMERINGKATAN EFEK HUTANG JANGKA PANJANG

Uraian di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek hutang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012.

PEFINDO

- **idAAA** Efek Hutang dengan peringkat **idAAA** merupakan efek hutang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- **idAA** Efek Hutang dengan peringkat **idAA memiliki kualitas** kredit sedikit dibawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.
- **idA** Efek Hutang dengan peringkat **idA memiliki dukungan** kemampuan Obligor yang kuat relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.
- **idBBB** Efek Hutang dengan peringkat **idBBB** didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.
- **idBB** Efek Hutang dengan peringkat **idBB** didukung oleh kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.
- **idB** Efek Hutang dengan peringkat **idB** menunjukan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemapuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
- **idCCC** Efek Hutang dengan peringkat **idCCC** menunjukan Efek Hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.
- **idD** Efek Hutang dengan peringkat **idD** menandakan Efek Hutang yang macet atau Perseroannya sudah berhenti berusaha.

Hasil pemeringkatan dari idAA sampai dengan idB dapat diberi tanda tambah (+) atau kurang (-) untuk menunjukan perbedaan kekuatan atau relatif kemampuan obligor dalam suatu kategori peringkat. Tanda Tambah (+) menunjukan suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat diatasnya. Tanda Kurang (-) menunjukan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat dibawahnya.

Rating Outlook

Berikut ini adalah penjelasan *Rating Outlook* yang diberikan Pefindo untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peringkat Perseroan.

Positive	: Prospek yang berpotensi untuk dapat menaikan peringkat.
Negative	: Prospek yang berpotensi untuk dapat menurunkan peringkat.
Stable	: Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil pemeringkat juga akan stabil.
Developing	: Prospektus yang belum jelas karena keterbatasan informasi sehingga hasil pemeringkatan juga dapat dinaikan atau diturunkan sesuai dengan perkembangan selanjutnya.

Rating Outlook Pefindo merupakan penilaian atas prospek jangka menengah dan panjang atas entitas dan/atau efek hutang yang diperingkat, yang mencakup penilaian atas potensi perubahan keadaan perekonomian dan bisnis mendasar. *Rating Outlook* bukanlah merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkat atau untuk menetapkan tindakan *Rating Alert* dimasa yang akan datang. *Rating Alert* dilakukan karena terjadi perubahan keadaan yang mungkin secara material akan berpengaruh positif, negatif, atau developing terhadap kinerja entitas dan/atau efek hutang yang diperingkat.

Rating Rationale

Pefindo menetapkan kembali peringkat “idAA” untuk PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin atau Perusahaan) serta obligasi-obligasi yang telah diterbitkan Perusahaan. Pefindo juga menetapkan kembali peringkat “idAA-” untuk Obligasi Subordinasi yang telah diterbitkan Perusahaan. Prospek dari peringkat Perusahaan adalah “stabil”. Peringkat mencerminkan posisi Perusahaan yang sangat kuat di segmen kredit komersial, tingkat permodalan yang sangat baik dan profil likuiditas yang sehat. Pefindo juga mengakui dukungan yang kuat dari kelompok ANZ Banking Group sebagai salah satu pemegang saham Perusahaan. Namun peringkat tersebut dibatasi oleh tingkat profitabilitas Perusahaan yang moderat dan potensi tekanan pada kualitas aset.

Perusahaan menyediakan layanan perbankan komersial melalui 450 kantor yang berlokasi di 29 provinsi di Indonesia. Selain itu, Perusahaan juga memiliki kurang lebih 800 unit ATM yang tergabung dengan jaringan ALTO dan ATM Bersama. Untuk mendukung kegiatan usahanya, Bank Panin mempekerjakan 8.101 karyawan. Pada akhir Juni 2012, susunan pemegang saham Bank Panin terdiri dari PT Panin Financial Tbk (45.94%), Votraint No. 1103 PTY Ltd (38,82%), dan Masyarakat (15.24%). Votraint No. 1103 PTY Ltd dimiliki oleh ANZ Banking Group, Australia (mendapat peringkat AA-/Stabil oleh S&P).

Faktor-faktor yang mendukung peringkat tersebut adalah:

- Posisi usaha yang sangat kuat di segmen kredit komersial.
- Tingkat permodalan yang sangat baik
- Tingkat likuiditas yang kuat
- Dukungan yang kuat dari ANZ Banking group sebagai pemegang saham.

Peringkat tersebut dibatasi oleh:

- Tingkat profitabilitas yang moderat.
- Potensi tekanan dalam kualitas aset

XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Anggaran dasar Perseroan ini disusun Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta No. 81 tanggal 25 Juli 2008, persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tanggal 27 Oktober 2008, surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.78480.AH.01.02. Tahun 2008, tangal 27 Oktober 2008, Daftar Perseroan Nomor AHU-0101237.AH.01.09. Tahun 2008, tangal 27 Oktober 2008 dan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 Pebruari 2009 No.13, Tambahan nomor 4248 jo Akta Notaris Benny Kristianto,S.H., Notaris di Jakarta No. 11 tanggal 10 September 2009, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Oktober 2009,surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10.18383 tanggal 22 Oktober 2009, Daftar Perseroan Nomor AHU-0069259.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 dan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 September 2010 No.76, Tambahan No. 1433 jo Akta Notaris Benny Kristianto,S.H., Notaris di Jakarta No. 9 tanggal 9 Juli 2010, persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 Oktober 2010, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU.46590.AH.01.02 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Daftar Perseroan Nomor: AHU 0071414.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 dan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2 Maret 2012 No.18, Tambahan No. 5579.

Bahwa Anggaran Dasar ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama Dan Tempat Kedudukan
Pasal 1

1 Perseroan Terbatas ini bernama:
PT BANK PAN INDONESIA Tbk disingkat PT BANK PANIN Tbk dan bertempat kedudukan serta berkantor pusat di Kota Jakarta Pusat.

2 Perseroan dapat membuka kantor-kantor, mendirikan cabang-cabang dan kantor-kantor perwakilan di tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan mengindahkan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.1 Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah: Menjalankan usaha sebagai bank umum.

3.2. Kegiatan Usaha :
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan.
c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
   i. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.
   ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.
   iii. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
   iv. Sertipikat Bank Indonesia (SBI).
   v. Obligasi.
   vi. Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
   vii. Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek.

k. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat.
m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
n. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan.
o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek,perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet; termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
q. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
r. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut diatas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Jangka Waktu Berdirinya Perseroan
Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya terhitung sejak tanggal 17 (tujuh belas) Agustus 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu).

Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha
Pasal 3

3.3. Kegiatan Usaha Utama :
Untuk merealisasi maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan.
c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
    i. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.
    ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.
    iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
    iv. Sertipikat Bank Indonesia (SBI).
    v. Obligasi.
    vi. Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
    vii. Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek.
i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
j. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

3.4. Kegiatan Usaha Penunjang :
Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
    a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
    b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
    c. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat.
e. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan.
f. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
g. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet; termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
h. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut diatas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

M o d a l
Pasal 4

4.1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.9.600.000.000.000,- (sembilan triliun enam ratus milyar Rupiah), terbagi atas 96.000.000.000 (sembilan puluh enam milyar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).

4.2 Modal ditempatkan dan Modal disetor.
Dari modal dasar tersebut, modal yang ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham adalah sebesar 25,09% (dua puluh lima koma nol sembilan persen) atau sejumlah 24.087.645.998 (dua puluh empat miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.408.764.599.800,- (dua triliun empat ratus delapan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah) dan mengenai nama pemegang saham yang mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang ditempatkan dan disetor sebagaimana disebutkan pada bagian keterangan lain pasal 30 ayat 30.1.

4.3. Penyetoran modal
a. Dalam bentuk Uang Penyetoran atas modal saham yang dilakukan dalam bentuk uang wajib dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah ke kas atau rekening bank Perseroan.
b. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   1) benda yang akan dijadikan setoran modal di maksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
   2) benda yang dijadikan sebagai setoran modal di maksud wajib di nilai oleh Penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK dan tidak ijaminkan dengan apapun juga;
   3) memperoleh persetujuan RUPS;
   4) dalam hal benda yag dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
   5) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba di tahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba di tahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah di muat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
c. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.

4.4 Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas
a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
   1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
   2) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat di konversi menjadi saham,yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
   3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah di setujui oleh RUPS; dan/atau
   4) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1. Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak di ambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang di pesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak di ambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang laksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.
e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak di ambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana di maksud dalam butir d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukarkan dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
g. Penambahan modal di setor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4.5 Penambahan modal dasar :
a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus di setujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25%(dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: 1) Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; 2) Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3) Penambahan modal ditempatkan dan di setor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana di maksud dalam butir 2) di atas; 4) Dalam hal penambahan modal di setor sebagaimana di maksud dalam butir 3) di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya,sehingga modal dasar dan modal di setor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat(2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir 3) di atas tidak terpenuhi; 5) Persetujuan RUPS sebagaimana di maksud dalam butir 1) di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana di maksud dalam butir 4) di atas;
c. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal di setor menjadi paling kurang 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal di setor tersebut.

S a h a m
Pasal 5

5.1 Saham atas Nama:
Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

5.2 Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.

5.3 Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

5.4 Pecahan Nilai Nominal Saham :
a. Jika 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik lebih dari 1 (satu) orang, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan, Direksi dapat melakukan pemecahan nilai nominal saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
b. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham baik sendiri atau bersama-sama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Pemegang pecahan nominal saham tersebut diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama.
c. Pemegang pecahan nilai nominal saham dalam klasifikasi sahamnya sama dengan pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut mempunyai hak yang sama dengan pemegang saham lainnya yang memiliki saham dengan nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi yang sama dengan pecahan nilai nominal saham tersebut.

5.5 Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang

Pasar Modal, dan UUPT.

5.6 Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham, tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

5.7 Jika saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang di tunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

5.8 Selama ketentuan dalam ayat 5.7. di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

5.9 Pemilik satu saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bukti Kepemilikan Saham
Pasal 6

6.1 Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

6.2 Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan,maka Perseroan wajib memberikan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpangan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.

6.3 Terhadap pemilik pecahan nilai nominal saham,maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham pecahan kepada pemegangnya.

6.4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
a. Nama dan alamat pemegang saham;
b. Nomor surat saham;
c. Tanggal pengeluaran surat saham;
d. Nilai nominal saham;
e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

6.5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
a. Nama dan alamat pemegang saham;
b. Nomor surat saham;
c. Tanggal pengeluaran surat saham;
d. Nilai nominal saham;
e. Jumlah saham;
f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

6.6 Pada surat Saham pecahan nilai nominal saham sekurangnya harus dicantumkan:
a. Nama dan alamat pemegang pecahan nilai nominal saham;
b. Nomor surat saham yang mendasari pemecahan nilai nominal saham;
c. Nomor surat saham pecahan nilai nominal saham;
d. Tanggal pengeluaran surat saham;
e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

6.7 Surat saham, surat kolektif saham dan surat saham pecahan nilai nominal saham harus di cetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Direktur Utama.Tanda tangan tersebut juga dapat di cetak langsung pada surat saham, surat kolektif saham dan surat saham pecahan nilai nominal saham yang bersangkutan.

Surat Saham Dan Surat Kolektif Saham Yang Rusak Atau Hilang
Pasal 7

7.1 Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.

7.2 Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.

7.3 Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut.
c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang di pandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan

d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

7.4 Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

7.5 Ketentuan surat saham dalam ayat 7.1., 7.2., 7.3. dan 7.4. pasal ini berlaku bagi surat kolektif saham dan surat saham pecahan nominal saham.

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
Pasal 8

8.1 Direksi wajib mengadakan dan menyimpan dengan sebaik baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

8.2 Dalam Daftar Pemegang Saham itu harus dicatat:
a. Nama dan alamat para pemegang saham;
b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang di miliki para pemegang saham;
c. Jumlah yang di setor atas setiap saham;
d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.3 Dalam Daftar Khusus di catat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

8.4 Pemegang saham harus memberitahukan setiap perubahan alamat dengan surat kepada Direksi Perseoran. Selama pemberitahuan itu belum diterima oleh Direksi, maka semua panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat-menyurat lain, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lain yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir di catat dalam Daftar Pemegang Saham.

8.5 Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

8.6 Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata-usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham.

8.7 Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

8.8 Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus disetujui Direksi dan pencatatan atas perubahan tersebut harus ditandatangani oleh Presiden Direktur. 8.9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan dari Bursa Efek di tempat di mana saham dicatatkan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu gadai saham harus di catat dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus yang di maksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas, dengan cara yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan bukti yang dapat di terima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Bukti mengenai telah dilakukannya pemberitahuan gadai saham kepada Perseroan hanya dapat dibuktikan dengan adanya pencatatan mengenai gadai itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatanganisesuai Anggaran Dasar ini.

Penitipan Kolektif
Pasal 9

9.1 Saham Perseroan dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di catat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan.

9.2 Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang di catat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di maksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan.

9.3 Apabila saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksadan berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Pentiipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

9.4 Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana di maksud dalam ayat 9.1. di atas atau Bank Kustodian sebagaimana di maksud dalam ayat 9.3. di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

9.5 Perseroan wajib memutasikan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian di maksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang di tunjuk Perseroan.

9.6 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

9.7 Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

9.8 Perseroan wajib menolak pencatatan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

9.9 Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau di sita untuk pemeriksaan perkara pidana.

9.10 Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.

9.11 Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang di miliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.

9.12 Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.

9.13 Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipian Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

9.14 Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan kepada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

9.15 Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang di miliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Pemindahan Hak Atas Saham
Pasal 10

10.1 Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.

10.2 Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

10.3 Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

10.4 Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan, satu dan lain hal dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.

10.5 Jika terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham dalam Perseroan, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham Perseroan sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dicatatkan dengan betul dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.

10.6 Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham.
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar, serta dengan memperhatikan ketentuan dari Bursa Efek di mana saham itu terdaftar.

Rapat Umum Pemegang Saham
Pasal 11

11.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan terdiri atas:
- a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini; dan
- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang diadakan menurut kebutuhan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa").

11.2 Istilah "Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)" dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pasal 12

12.1 RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan di tutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu)Desember setiap tahun.

12.2 Direksi berwenang menyelenggarakan RUPS Tahunan.

12.3 Dalam RUPS Tahunan :
- a. Direksi menyampaikan :
  - i. Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 24 ayat 24.4 untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
  - ii. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 24 ayat 24.4 untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- b. Ditetapkan penggunaan laba untuk tahun buku yang baru berakhir dan/atau tahun buku sebelumnya, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
- c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar;
- d. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan;
- e. Dapat diputuskan mata acara lain yang telah dicantumkan dalam panggilan RUPS.

12.4 Persetujuan atas Laporan Tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.

12.5 RUPS Tahunan sebagaimana di maksud dalam ayat 12.2. di atas dapat dilakukan atas permintaan dengan surat tercatat:
- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
- b. Dewan Komisaris

12.6 Surat tercatat sebagaimana di maksud pada ayat 12.5. yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

12.7 Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana di maksud dalam ayat 12.5. dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.

12.8 Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan atas permintaan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.5, maka Dewan Komisaris berhak menyelenggarakan RUPS Tahunan dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan. Hal yang dibicarakan dalam RUPS Tahunan tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam surat tercatat yang dimaksud dalam ayat 12.5

12.9 Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan atas permintaan pemegang saham sebagaimana di maksud dalam ayat 12.5, maka pemegang saham yang bersangkutan mengajukan kembali permintaan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Hal yang dibicarakan dalam RUPS tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disampaikan oleh pemegang saham dalam surat tercatat yang di maksud dalam ayat 12.5.

10.10 Dalam hal Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan atas permintaan pemegang saham sebagaimana di maksud dalam ayat 12.5., maka pemegang saham berhak memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakan RUPS Tahunan dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

12.11 Penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagaimana di maksud dalam ayat 12.10 diatas harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Pasal 13

13.1 Direksi berwenang menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.

13.2 RUPS Luar Biasa sebagaimana di maksud dalam ayat 13.1. di atas dapat dilakukan atas permintaan dengan surat tercatat:
a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
b. Dewan Komisaris

13.3 Surat tercatat sebagaimana di maksud pada ayat 13.2. yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

13.4. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana di maksud dalam ayat 13.2 dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.

13.5. Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan Dewan Komisaris sebagaimana di maksud dalam ayat 13.2, maka Dewan Komisaris berhak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan. Hal yang dibicarakan dalam RUPS Luar Biasa tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam surat tercatat yang di maksud dalam ayat 2. 13.6. Dalam hal Direksi lalai/tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan pemegang saham sebagaimana di maksud dalam ayat 13.2, maka pemegang saham yang bersangkutan mengajukan kembali permintaan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan. Hal yang dibicarakan dalam RUPS Luar Biasa tersebut terbatas pada hal-hal yang telah disampaikan oleh pemegang saham dalam surat tercatat yang di maksud dalam ayat 13.2.

13.7. Dalam hal Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan pemegang saham sebagaimana di maksud dalam ayat 13.2, maka pemegang saham berhak memanggil sendiri RUPS Luar Biasa atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakan RUPS Luar Biasa dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

13.8. Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana di maksud dalam ayat 13.7 di atas harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

Tempat, Pimpinan RUPS Dan Risalah RUPS
Pasal 14

14.1. RUPS diadakan di:
a. Tempat kedudukan Perseroan; atau
b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; atau
c. Tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

14.2 RUPS sebagaimana di maksud dalam ayat 14.1.wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

14.3 Jika Anggaran Dasar tidak menentukan lain, RUPS di pimpin oleh:
a. seorang anggota Dewan Komisaris yang di tunjuk oleh Dewan Komisaris.
b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS di pimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang di tunjuk oleh Direksi.
c. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS;

14.4 Dalam hal berkenaan dengan benturan kepentingan sebagaimana di maksud dalam pasal 16 ayat 10 di bawah ini:
a. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang di tunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan

Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang di tunjuk oleh Dewan Komisaris;

b. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang di tunjuk oleh Direksi;
c. Dalam hal salah satu Direktur yang di tunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas halyang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
d. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang di tunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

14.5 Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS di buat Risalah Rapat oleh Notaris. Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala yang terjadi dalam RUPS.

Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan RUPS
Pasal 15

15.1. a. Pengumuman RUPS dilakukan paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
b. Pengumuman RUPS dilakukan dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua)surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

15.2 a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
b. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
c. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua)surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
d. Dalam panggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali di atur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

15.3 RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)hari dari RUPS pertama. Pemanggilan RUPS tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat 23.4 telah tersedia di kantor Perseroan selambatnya 14 (empat belas)hari sebelum tanggal Rapat dan bahwa salinan dari daftar neraca dan daftar perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.

15.4 Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;
b. Usul yang bersangkutan telah di terima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
c. Menurut pendapat Direksi usul itu di anggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Kuorum, Hak Suara Dan Keputusan
Pasal 16

16.1. a. Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, RUPS terhadap hal-hal yang diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau di wakili.
b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 16.1.a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan untuk RUPS kedua tanpa di dahului dengan pengumuman RUPS kedua terlebih dahulu.
c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau di wakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
d. Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan,pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

16.2 Pemegang saham dapat di wakili dalam RUPS oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus di buat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan lain yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan diselenggarakan.

16.3 Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.

16.4 Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

16.5 Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak di hitung dalam pemungutan suara.

16.6 Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah di keluarkan Perseroan.

16.7 Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

16.8 Semua keputusan di ambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan di ambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, kecuali jika dalam Anggaran Dasar ditentukan lain. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka jika mengenai orang putusannya harus dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani dan jika mengenai hal-hal lain, maka usul yang bersangkutan harus dianggap di tolak.

16.9 RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau di wakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat)bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
b. Jika kuorum sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 ayat 16.9.a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila di hadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dan c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana di maksud dalam ayat 16.9.b. di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran,jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

16.10 RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan di anggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang di setujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
b. RUPS di hadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang di miliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham indpenden yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
c. dalam hal kuorum sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 ayat 16.10.a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila di hadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang di miliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana di maksud dalam ayat 16.10.c. di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran,jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

16.11 RUPS untuk pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau di wakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat)bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

b. Jika kuorum sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 ayat 16.11.a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila di hadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan di setujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dan
c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana di maksud dalam ayat 16.11.b. di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran,jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

16.12 Jika dalam RUPS pertama yang di maksud dalam ayat 16.11 huruf a kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS kedua sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.

16.13 Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.

16.14 Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan;
b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
c. Menurut pendapat Direksi usul itu di anggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. Usul-usul untuk pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sudah harus disampaikan kepada Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat.

D i r e k s i
Pasal 17

17.1 Perseroan di urus dan di pimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota Direksi. Susunan dan nama jabatan anggota Direksi adalah sebagai berikut:
a. Seorang Presiden Direktur;
b. Seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur;
c. Sedikit-dikitnya seorang Direktur atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Direktur.

17.2 Dengan mengingat akan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia pengangkatan, pemberhentian dan perubahan susunan para anggota Direksi diputuskan dalam suatu RUPS Perseroan. Jika RUPS tidak menentukan jabatan Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur dan Direktur maka para anggota Direksi memilih di antara mereka seorang anggota Direksi yang menjabat sebagai Presiden Direktur, seorang atau lebih anggota Direksi yang menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur dan seorang atau lebih anggota Direksi yang menjabat sebagai Direktur.

17.3 Para anggota Direksi di angkat sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Direksi tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat di angkat kembali. Seorang yang di angkat untuk menggantikan anggota Direksi yang mengundurkan diri atau diberhentikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 ayat 17.5 dan

17.4 di bawah ini atau untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang lowong atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada,harus di angkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.

17.4 RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali jika RUPS menentukan tanggal berlakunya pemberhentian yang lain.

17.5 a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam angka waktu 60 (enam puluh hari)setelah diterimanya surat pengunduran diri.
c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu yang di maksud dalam ayat 17.8. huruf b, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

17.6 a. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, dan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimum jumlah anggota Direksi.

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) setelah diterimanya surat pengunduran diri.

17.7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut harus diadakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan di urus oleh Dewan Komisaris.

17.8. a. Besar gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
b. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 17.8. huruf a di atas dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
c. Dalam hal Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 17.8. huruf a di atas dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

17.9. Jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya, jika seorang anggota Direksi:
a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
b. Diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 17.4 Pasal 17 ini; atau
c. Dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
d. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam ayat 17.5 Pasal 17 ini; atau
e. Meninggal dunia.

Tugas Dan Wewenang Direksi
Pasal 18

18.1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah:
a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.

18.2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18.3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan tertulis dari atau surat-surat yang berkenaan harus ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris di mana satu di antara mereka harus Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris diperlukan untuk tindakan-tindakan berikut:
a. menerima pinjaman dari siapapun atau menjadi terhutang kepada siapapun, badan hukum atau perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih dan apabila jumlah pinjaman tersebut untuk 1 (satu) kali transaksi melebihi suatu jumlah yang sama dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal Perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik. Untuk keperluan-keperluan diatas ini keputusan dari akuntan publik adalah mutlak dan mengikat;
b. memberi pinjaman kepada siapapun juga untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila jumlah pinjaman tersebut untuk 1 (satu)kali transaksi melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal Perseroan yang disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana ternyata dari laporan keuangan Perseroan yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik. Untuk keperluan-keperluan diatas ini keputusan dari akuntan publik adalah mutlak dan mengikat;
c. memberi jaminan hutang atau tanggungan untuk seseorang, badan hukum atau perseroan, apabila jumlah yang dijamin itu untuk setiap transaksi yang dijamin melebihi suatu jumlah yang sama dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal Perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik. Untuk keperluan-keperluan diatas ini keputusan dari akuntan publik adalah mutlak dan mengikat;
d. memasang/membebankan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan atau kekayaan-kekayaan Perseroan untuk setiap transaksi yang merupakan suatu jumlah yang sama dengan atau melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai buku dari seluruh jumlah kekayaan Perseroan sebagaimana sewaktu ternyata dari laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik. Untuk keperluan-keperluan diatas ini keputusan akuntan publik adalah mutlak dan mengikat;

e. pelepasan hak atau memperoleh barang-barang tidak bergerak dengan harga perolehan yang sama dengan atau melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal Perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diperiksa, disahkan dan sebagaimana dinyatakan oleh akuntan publik. Untuk keperluan diatas ini keputusan akuntan publik adalah mutlak dan mengikat.

18.4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus disetujui oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 16.9. pasal 16 anggaran dasar Perseroan.

18.5. Perbuatan hukum yang dimaksud dalam ayat 18.4 di atas wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

18.6. Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, disyaratkan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 16.10. pasal 16 anggaran dasar Perseroan.

18.7. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan jika:
   (i) terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
   (ii) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan;

   b. Dalam hal tersebut dalam ayat-ayat (a)diatas, maka Perseroan harus diwakili oleh anggota Direksi lain dan jika semua anggota Direksi Perseroan tersangkut suatu perkara dengan Perseroan dihadapan suatu badan peradilan atau mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka dalam hal demikian Dewan Komisaris Perseroan yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 18 ayat 7 ini.

18.8. a. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

   b. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 18.8. huruf a di atas tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

18.9. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 18 ayat 18.2., 18.3. dan ayat 18.8 Anggaran Dasar Perseroan: 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

18.10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar.

18.11 Direksi tidak dapat menyediakan pinjaman atau meminjamkan uang dalam bentuk apapun juga kepada para pemegang saham Perseroan.

Rapat Direksi
Pasal 19

19.1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan dari Rapat Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah, yang dikeluarkan Perseroan. 19.2. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar.

19.3. Pemanggilan tertulis untuk Rapat Direksi harus disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau disampaikan dengan faksimili yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi diselenggarakan. Jika hal-hal yang hendak dibicarakan dalam Rapat Direksi perlu segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 2 (dua) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi diselenggarakan.

19.4. Pemanggilan untuk Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat RapatDireksi.

19.5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan didalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh anggota Direksi yang memanggil Rapat. Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 19.3. pasal 19 tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

19.6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur,jika Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi harus dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.

19.7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
19.8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir dan/atau diwakili.
19.9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara biasa berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili.
19.10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul tersebut dianggap ditolak.
19.11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
19.12. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut. Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam berita acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus disetujui oleh lebih dari 50%(lima puluh persen) dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat yang hadir. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Jika Risalah dibuat oleh seorang Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
19.13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan, dan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
19.14 Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara lansung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan dia tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Dewan Komisaris
Pasal 20

20.1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang anggota Dewan Komisaris dan jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut sudah termasuk anggota Dewan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Susunan anggota Komisaris adalah sebagai berikut:
a. seorang Presiden Komisaris;
b. seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris; dan
c. sedikitnya seorang Komisaris dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang Komisaris.
20.2. Dengan mengingat akan ketentuan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, pengangkatan, pemberhentian dan pengubahan susunan para anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen diputuskan dalam suatu RUPS.
20.3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang kedua yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan Komisaris tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 20.4 dan ayat 20.5 dibawah ini atau untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.
20.4. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali jika RUPS menentukan tanggal berlakunya pemberhentian yang lain.

20.5 a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 20.5. huruf b, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

20.6 a. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, dan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimum jumlah anggota Dewan Komisaris.
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

20.7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut harus diadakan RUPS untuk mengangkat Dewan Komisaris baru.

20.8 Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima gaji atau honorarium dan tunjangan sebagaimana yang ditetapkan oleh RUPS.

20.9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya, jika seorang anggota Dewan Komisaris:
a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
b. Diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 20.4 Pasal 20 ini; atau
c. Dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
d. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam ayat 20.5 Pasal 20 ini; atau
e. Meninggal dunia.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris
Pasal 21

21.1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi serta melakukan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

21.2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu pada jam kerja kantor Perseroan berhak memeriksa semua pembukuan,surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

21.3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.

21.4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

21.5. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota (-anggota) Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri) mereka.

21.6. RUPS tersebut dalam Pasal 21 ayat 21.5 ini harus dipimpin oleh Presiden Komisaris dan jika Presiden Komisaris tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir di Rapat yang bersangkutan dan jika tidak seorang pun anggota Dewan Komisaris yang hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, RUPS tersebut harus dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham yang hadir di Rapat yang bersangkutan.

21.7. Jika RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dengan sendirinya dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

21.8. Jika semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan tidak seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris wajib untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk sementara waktu memberikan kewenangan kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris
Pasal 22

22.1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku dibidang perbankan.

22.2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Presiden Komisaris, jika Presiden Komisaris tidak ada karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

22.3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, atau disampaikan dengan telex atau telefax, yang segera harus dikonfirmasikan dengan surat tercatat, sekurangnya 10 (sepuluh) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 2 (dua) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.

22.4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.

22.5. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan di tempat yang ditentukan oleh pihak yang memanggil Rapat tersebut.
Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

22.6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, jika Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.

22.7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalama Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

22.8. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili.

22.9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili.

22.10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul tersebut dianggap ditolak.

22.11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

22.12. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Jika Risalah dibuat oleh seorang Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

22.13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan, dan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Dewan Audit/Dewan Pengawas Syariah
Pasal 23

23.1 Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atas persetujuan Dewan Syariah Nasional ditempatkan Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Dewan Syariah Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut. Unit Usaha Syariah Perseroan merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah Perseroan.

23.2 Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan fungsi utama:
a. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan;
b. Bertugas sebagai pengawas kegiatan Kantor Cabang Syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
c. Berfungsi sebagai penasehat dan pemberi sarana kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah;
d. Berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional.

23.3 Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah wajib:
a. Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional.
b. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional;

23.4 Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional;

23.5 Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Rencana Kerja, Tahun Buku, Laporan Tahunan
Dan Laporan Keuangan Tahunan
Pasal 24

24.1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.

24.2 Rancana kerja tahunan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.Rencana kerja tahunan dimaksud harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

24.3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 01 (satu) bulan Januari sampai dengan tanggal 31(tiga puluh satu) bulan Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

24.4 Direksi menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan menyediakan di Kantor Perseroan untuk dapat di periksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

24.5 Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana di atur dalam Peraturan Nomor X.K.2 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

24.6 Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Penggunaan Laba Dan Pembagian Dividen
Pasal 25

25.1 Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan,sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 26 dibawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan; Dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain.

25.2 Jika RUPS tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah di kurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan di bagi sebagai dividen.

25.3 Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen.
Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
Pasal 15 ayat 15.1. huruf b berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.

25.4 Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya yang di ambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

24.5 Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat di tutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap di catat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus di anggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang di catat dalam perhitungan laba rugi

belum di tutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

25.6 Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak di ambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimasukkannya dalam dana cadangan khusus itu, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima baik oleh Direksi Perseroan.
Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 5 (lima) tahun tersebut menjadi milik perseroan.

Penggunaan Cadangan
Pasal 26

26.1 Bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk dana dangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (jika ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26.2 Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang di derita oleh Perseroan.

26.3 Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 1/5 (satu per lima) dari modal yang ditempatkan maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 26.2 digunakan bagi keperluan Perseroan.

26.4 Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

26.5 Setiap keuntungan yang di terima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 27

27.1 RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau di wakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
b. Jika kuorum sebagaimana di maksud dalam Pasal 27ayat 27.1.a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila di hadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5(tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dan
d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana di maksud dalam ayat 27.1.b. di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran,jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

27.2 Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

27.3 Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 27.2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang pengubahan tersebut di ambil.

27.4 Jika dalam RUPS pertama yang di maksud dalam ayat 27.1 huruf a kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS kedua sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.

27.5 Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.

27.6 Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dari sedikitnya 2 (dua)surat kabar harian berbahasa Indonesia dari 1 (satu)diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu)lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.
Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu berlaku tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Dan Pemisahan
Pasal 28

28.1 RUPS untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau di wakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat)bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
   b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 28.1.a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan di setujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dan
   c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana di maksud dalam ayat 28.1.b. di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran,jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

28.2 Jika dalam RUPS pertama yang di maksud dalam ayat 28.1 huruf a kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS kedua sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.

28.3 Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.

28.4 Tanpa mengurangi ketentuan Pasar Modal Rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang telah mendapatkan persetujuan RUPS harus di buat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

28.5 Penggabungan Perseroan yang mengubah ketentuan Anggaran Dasar menyangkut pengubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan di setor, dan/atau status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

28.6 Penggabungan Perseroan yang mengubah ketentuan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam Pasal 28 ayat 28.5 ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

28.7 Apabila penggabungan Perseroan tidak disertai pengubahan Anggaran Dasar maka salinan akta Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk di catat dalam daftar Perseroan.

28.8 Peleburan Perseroan wajib mendapatkan pengesahan badan hukum perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

28.9 Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyangkut pengambilalihan saham Perseroan.

Pembubaran, Likuidasi Dan Berakhirnya
Status Badan Hukum Perseroan
Pasal 29

29.1 RUPS untuk pembubaran dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau di wakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
   b. Jika kuorum sebagaimana di maksud dalam Pasal 29 ayat 29.1.a tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila di hadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan di setujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS; dan
   c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana di maksud dalam ayat 29.1.b. di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran,jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

29.2 Jika dalam RUPS pertama yang di maksud dalam ayat 29.1 huruf a kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS kedua sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.

28.3 Jika RUPS kedua juga tidak mencapai kuorum dapat dilakukan RUPS ketiga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini.

29.4 Apabila Perseroan dibubarkan, karena :
   a. berdasarkan keputusan RUPS
   b. berdasarkan penetapan pengadilan;
   c. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
   d. harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan-pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau

e. dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator.

29.5 Direksi bertindak sebagai likuidator jika dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak menunjuk likuidator.

29.6 Likuidator wajib mendaftarkan pembubaran Perseroan dalam Daftar Perusahaan, mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan yang ditentukan Direksi serta dengan pemberitahuan tentang pembubaran itu kepada para kreditur Perseroan, serta melaporkannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

29.7 Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.

29.8 Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS, berdasarkan persetujuan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

29.9 Sisa bersih perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing berhak menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah di bayar penuh untuk saham-saham yang dimilikinya.

Ketentuan Lain
Pasal 30

30.1 Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan di ambil bagian oleh:

I. PT Panin Life Tbk berkedudukan di Jakarta sebanyak 9.070.209.544 (sembilan milyar tujuh puluh juta dua ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh empat saham, dengan harga nominal seluruhnya sembilan ratus tujuh milyar dua puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus
Rupiah ……..……..Rp. 907.020.954.400,-

II. Votraint No.1103 Pty.Ltd. berkedudukan di Melbourne:
sebanyak 6.067.582.293 (enam milyar enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga) saham, dengan harga nominal seluruhnya enam ratus enam milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus
Rupiah Rp606.758.229.300,-
Masyarakat:
Sejumlah 24.087.645.998 (dua puluh empat milyar delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal dua triliun empat ratus delapan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus
Rupiah…….....Rp.2.408.764.599.800,-

Jumlah 20.256.509.524 (dua puluh milyar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh empat) saham dengan harga nominal seluruhnya dua trilyun dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus
Rupiah…….....Rp2.025.650.952.400,-

30.2 Hal-hal yang tidak atau belum cukup di atur dalam Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh RUPS Perseroan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

XVIII. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI

1. UMUM

Penjelasan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 44 tanggal 18 Oktober 2012 dan Addendum Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 102 tanggal 14 November 2012, yang dibuat di hadapan Kantor Notaris Kumala Tjahjani Widodo S.H., MH, Mkn, Notaris di Jakarta.

Obligasi ini akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dengan nilai nominal dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga dan pelunasan pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi. Perseroan melalui Agen pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

2. JUMLAH POKOK, HARGA PENAWARAN, BUNGA DAN SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

2.1. Jumlah Pokok Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

2.2. Harga Penawaran

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok dengan satuan jumlah Obligasi.

2.3. Bunga Obligasi

Besarnya bunga tetap Obligasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-5 (kelima) adalah sebesar • % (• persen) per tahun.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal • 2013 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal • 2017.

Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-1	:	Bunga Ke-11	:
Bunga Ke-2	:	Bunga Ke-12	:
Bunga Ke-3	:	Bunga Ke-13	:
Bunga Ke-4	:	Bunga Ke-14	:
Bunga Ke-5	:	Bunga Ke-15	:
Bunga Ke-6	:	Bunga Ke-16	:
Bunga Ke-7	:	Bunga Ke-17	:
Bunga Ke-8	:	Bunga Ke-18	:
Bunga Ke-9	:	Bunga Ke-19	:
Bunga Ke-10	:	Bunga Ke-20	:

2.4. Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp.1,- (satu Rupiah).

2.5. Satuan Perdagangan Obligasi

Satuan Perdagangan Obligasi adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

3. JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi berjangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal • 2017.

4. JAMINAN

Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi Subordinasi ini secara pari passu berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, sesuai pasal 1131 dan 1132 kitab undang undang hukum perdata.

5. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)

5.1. 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back)* untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

5.2. Pembelian kembali (*buy back*) hanya dapat dilakukan jika Perseroan tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan kecuali telah mendapat persetujuan RUPO.

5.3. Perseroan dilarang melakukan pembelian kembali (*buy back*) jika pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) tersebut dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian

5.4. Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum dilaksanakannya pengumuman dalam surat kabar, Perseroan wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK mengenai rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut

5.5. Pengumuman tersebut harus mencantumkan :.

(a) Periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dimana Pemegang Obligasi mengajukan penawaran jual atas Obligasi yang dimilikinya dengan menyebutkan harga yang dikehendakinya kepada Perseroan;
(b) Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dan target harga maksimal pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
(c) Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali
(d) Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali (*buy back*)
(e) Tata cara penyelesaian pembelian kembali (*buy back*);
(f) Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual dan tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi.
(g) Tanggal pembayaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut dilakukan selambat lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal terakhir periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
(h) Tata cara pembelian kembali Obligasi
(i) Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi

5.6 Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual kepada Perseroan pada periode penawaran wajib melampirkan:

1. Konfirmasi Tertulis dari KSEI mengenai jumlah Obligasi yang akan dijual yang tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan tanggal pembayaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
2. Bukti jati diri pada saat melakukan penawaran jual;
3. Pernyataan bahwa Obligasi yang akan dijual oleh Pemegang Obligasi yang bersangkutan untuk dibeli kembali (*buy back*) oleh Perseroan adalah bebas dari segala sengketa, tuntutan, ikatan, jaminan dan tidak dapat diperjualbelikan oleh Pemegang Obligasi sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan tanggal pembayaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi.

5.7 Perseroan akan melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi mulai dari harga terendah yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi pada periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, dengan ketentuan apabila terdapat beberapa Pemegang Obligasi yang melakukan penawaran dengan harga yang sama dan jumlah Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi
telah melampaui jumlah maksimal dana untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, maka Perseroan akan membeli Obligasi tersebut secara proporsional. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang bukan merupakan Afiliasi Perseroan.

5.8 Perseroan tidak berkewajiban untuk membeli seluruh Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi untuk dibeli kembali (*buy back*) pada periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, apabila harga penawaran jual yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi tersebut melampaui target harga yang diharapkan oleh Perseroan sebagai mana tersebut dalam poin 5.5 bagian (b) di atas.

5.9 Perseroan wajib menjaga rahasia kepada pihak manapun atas semua informasi mengenai penawaran jual Obligasi yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi.

5.10 Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 5.4 dan 5.5 tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah pembelian kembali (*buy back*) tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Pokok Obligasi dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan;
2. Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
3. Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.

5.11 Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi sebagaimana diatur dalam poin 5.1 sampai dengan poin 5.9 Pasal ini, Perseroan wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK, Wali Amanat, Bursa Efek dan KSEI serta mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional perihal pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut. Dalam pengumuman tersebut harus dicantumkan: .

(i) Jumlah Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) dengan menjelaskan jumlah nominal Obligasi yang telah dilunasi dan/atau jumlah nominal Obligasi yang dibeli kembali (*buy back*) untuk disimpan;
(ii) Harga Pembelian Kembali yang telah terjadi;dan
(iii) Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi.

5.12 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 5.11 tersebut, Perseroan juga wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK seluruh dokumen penawaran jual yang telah disampaikan
oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi selambat lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dilaksanakan.

5.13. Obligasi yang dimiliki Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali tidak berhak memperoleh Bunga Obligasi

5.14. Pemilikan Obligasi oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, wajib dilaporkan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum suatu RUPO diselenggarakan.

5.15. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, dalam waktu 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan memperhatikan peraturan KSEI.

5.16. Obligasi milik Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan/atau milik Afiliasi Perseroan, tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO.

5.17. Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun. Dalam hal Obligasi dilunasi sebagian, maka Perseroan akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi, dengan jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang setelah dikurangi jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.

5.18. Pembelian kembali (*buy back*) oleh Perseroan mengakibatkan:

- hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

- pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

5.19. a. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali (*buy back*) dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijaminkan.
b. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali (*buy back*) wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali (*buy back*) tersebut.
c. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali (*buy back*) wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali (*buy back*) tersebut.

6. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

6.1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat, pemberian ijin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:

(i) Ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
(ii) Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan ijin tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Apabila Wali Amanat telah menerima kelengkapan dokumen pendukung dari Perseroan dan berpendapat masih memerlukan kekurangan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dari Perseroan, maka selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah penerimaan dokumen pendukung tersebut, Wali Amanat dapat meminta kembali kekurangan dokumen pendukung yang diperlukan tersebut dari Perseroan. Apabila dalam 5 (lima) Hari Kerja Wali Amanat tidak meminta dokumen demikian, maka dokumen dianggap telah lengkap. Apabila dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya kelengkapan dokumen terakhir, Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya. Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

6.1.1. Mengurangi Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.
6.1.2. Mengadakan perubahan di bidang usaha.
6.1.3. Melakukan penyertaan modal pada pihak manapun juga yang secara total melebihi 10% (sepuluh persen) dari pendapatan operasional (jumlah pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional lainnya) atau 20% (duapuluh persen) dari total ekuitas berdasarkan laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.
6.1.4. Melakukan penggabungan atau peleburan atau reorganisasi dengan perusahaan lain, kecuali karena adanya ketentuan pemerintah atau Bank Indonesia.
6.1.5. Melakukan pengeluaran Obligasi atau *medium term notes* yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan hutang Obligasi.
6.1.6. Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun juga sebagian atau seluruh Aktiva Tetap Perseroan berupa tanah dan bangunan di atasnya, baik yang sekarang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, kepada pihak ketiga manapun kecuali untuk agunan yang diambil alih/harta eks jaminan dan Aktiva Tetap lainnya yang nilainya dalam 1 (satu) transaksi atau gabungan transaksi yang dalam tahun berjalan selama masa Obligasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.
6.1.7. Menjaminkan atau membebani dengan cara apapun harta kekayaan Perseroan, baik yang sekarang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, kepada pihak ketiga manapun. Pembatasan ini tidak berlaku untuk:

(i) Harta kekayaan yang telah dijaminkan sebelum tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan.
(ii) Jaminan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, termasuk tetapi tidak terbatas pada pinjaman antar bank sehubungan dengan kebutuhan likuiditas, pinjaman pemerintah dan terkait pemerintah dan/atau pinjaman luar negeri sehubungan dengan pengembangan usaha Perseroan dan transaksi repo.
(iii) Harta kekayaan yang dijaminkan untuk pinjaman baru sebagai pengganti pinjaman lama (*refinancing*).

6.2. Perseroan berkewajiban untuk:

6.2.1. Memenuhi semua ketentuan dalam Dokumen Emisi.
6.2.2. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo dan harus sudah tersedia (*in good fund*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke dalam rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotocopy bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh waktu pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi, Perseroan belum menyerahkan

kepada Agen Pembayaran dana-dana sebagaimana tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi sebesar tingkat Bunga Obligasi ditambah premi 1,5% (satu koma lima persen) per tahun.

- Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang telah lewat) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5.14 Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas.
- Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

6.2.3. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya, serta wajib mentaati ketentuan yang berlaku bagi tingkat kesehatan bank umum dengan kriteria sehat.

6.2.4. Memelihara sistim akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.

6.2.5. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap perubahan, kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan sesuai ketentuan Bapepam dan Bank Indonesia.

6.2.6. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya.

6.2.7. Menyerahkan kepada Wali Amanat:

1. Laporan-laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik Perseroan yang terdaftar di Bapepam dan LK selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tiap tahun buku Perseroan atau sesuai ketentuan Bapepam dan LK.
2. Laporan-laporan keuangan intern tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan dalam waktu:
   - 60 (enam puluh) Hari Kalender jika diaudit oleh akuntan publik;
   - 30 (tiga puluh) Hari Kalender jika tidak diaudit oleh akuntan publik; setelah berakhirnya tiap masa semester dari tiap tahun buku Perseroan.
3. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa laporan keuangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Obligasi apabila terjadi pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan maka segera setelah penutupan laporan keuangan tahunan dan/atau semesteran.
4. Laporan-laporan yang disampaikan kepada Bapepam dan LK.
5. Salinan resmi akta Perjanjian Perwaliamanatan dan akta-akta lain yang dibuat sehubungan dengan Emisi Obligasi.

6.2.8. Mempertahankan kecukupan modal (CAR) sesuai dengan ketentuan/peraturan Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang.

6.2.9. Memberi ijin kepada Wali Amanat bilamana terjadi pelanggaran Perjanjian Perwaliamanatan untuk pada saat jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian perjanjian, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Perseroan menerima surat permohonan tertulis dari Wali Amanat dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2.10. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan Anggaran Dasar serta perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Wali Amanat.

6.2.11. Memberitahukan secara tertulis hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kepada Wali Amanat.

6.2.12. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah. Surat Keputusan Menteri Keuangan. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia serta memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.

6.2.13. Melakukan pemeringkatan obligasi 1 (satu) tahun sekali yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) atau pengganti haknya atau pihak lain yang ditunjuk sebagai penggantinya dan menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Wali Amanat. selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah hasil pemeringkatan tersebut diperoleh.

7. KELALAIAN PERSEROAN

7.1. Kelalaian Perseroan dan Akibat Hukumnya.

7.1.1. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

a. Ayat 7.1.2 huruf a dan g poin ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

b. Ayat 7.1.2 huruf f dan h poin ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

c. Ayat 7.1.2 huruf b,c,d dan e poin ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 150 (seratus lima puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat, maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional di tempat kedudukan Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata-cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan serta langkah-langkah yang akan diambil Perseroan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas dan memutuskan langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO memutuskan Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

7.1.2. Kejadian kelalaian atau cidera janji sebagaimana dimaksud dalam poin 7 butir 7.1.1 diatas ini, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut dibawah ini:

a. Perseroan lalai membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau atas Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi;

b. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;

c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang oleh badan peradilan yang berwenang;

d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar (lebih dari 50% (lima puluh persen)) harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

e. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan; atau

f. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan lain yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

g. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya (cross default) yang berupa pinjaman(debt), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, dimana kelalaian tersebut terbukti dengan adanya surat atau pernyataan tertulis dari kreditur yang meminta agar jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Perseroan berdasarkan perintah pengadilan

yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan

7.2. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau dinyatakan pailit dan pernyataan pailit tersebut telah mendapat kekuatan hukum yang tetap, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan perundang undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia,khususnya peraturan perbankan.

8. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk menyelenggarakan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini:

8.1 RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari poin ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:

a. berkaitan menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat;
b. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
c. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang yang dimuat dalam lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010, tanggal 06 September;
d. mengambil keputusan sehubungan dengan usaha Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, persyaratan dari Perjanjian Perwaliamanatan khusus untuk perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana dimaksud dalam PerjanjianPerwaliamanatan;
e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat, untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;
f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan
g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8.2 RUPO dapat diselenggarakan bilamana:

(1) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (buy back) dan/atau milik Afiliasi Perseroan mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
(2) Wali Amanat, BAPEPAM & LK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO. Dalam hal ini Wali Amanat harus melakukan panggilan untuk RUPO dan menyelenggarakan RUPO, selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut.

8.3 Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

8.4 Tata cara RUPO:

(a) RUPO dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;

(b) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO;

(c) Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.
Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
- tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO
- agenda RUPO
- pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO
- Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memilikisuara dalam RUPO; dan
- kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

(d) RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.

(e) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO

(f) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.

(g) Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

(h) Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (buy back) dan/atau milik Afiliasi Perseroan.

(i) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

(j) Pada saat pelaksanaan RUPO:
Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimiliki Afiliasi Perseroan; dan Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan

(k) Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.9 Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggungjawab Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.

(l) Atas Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPO

8.5 Dengan memperhatikan ketentuan dalam dalam poin 8.4.h, kuorum dan pengambilan keputusan:
Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:

(1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   i. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan poin 8.4. h.
   ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
   iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   iv. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
   v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .

(2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   i. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan poin 8.4. h.
   ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
   iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   iv. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
   v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(3) Apabila RUPO dimintakan oleh Bapepam dan LK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan poin 8.4. h..
   ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
   iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
   iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
   v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

8.6 RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan poin 8.4. h..
   ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

8.7 Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO.

8.8 Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

8.9 Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangandibidang Pasar Modal, maka peraturan perundang undangan tersebut yang berlaku.

9. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas Jumlah Terhutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana:
   a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (buy back) dan/atau milik Afiliasi Perseroan mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.
      Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
   b. Wali Amanat atau BAPEPAM & LK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.
5. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari poin ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:
   a. Berkaitan dengan suatu kelalaian:
      (i) Untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau.
      (ii) Mengambil tindakan lain yang diputuskan untuk diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO dan menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat mengenai tindakan-tindakan lain yang diputuskan tersebut;
   b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
   c. Dalam hal Wali Amanat dan Perseroan bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau wewenangnya tidak diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

d. Membahas usulan Perseroan sehubungan dengan perubahan jangka waktu, suku bunga, dan hal penting lainnya yang berkaitan dengan Obligasi dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

10. PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum Obligasi ini.

11. PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan telex.

PERSEROAN
PT Bank Pan Indonesia Tbk
disingkat PT Bank Panin Tbk
Gedung Bank Panin Pusat
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta, 10270. Indonesia
Telepon : (62-21) 2700 545
Faksimili : (62-21) 2700 340

WALI AMANAT
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Plaza Mandiri Lantai 22
JL. Jenderal Gatot Subroto. Kaveling 36-38
Jakarta 12190 Indonesia
Telepon : (62-21) 5268216, 52913212, 5245161, 5275370
Faksimili : (62-21) 5263762

Apabila salah satu pihak mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberikan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

12. HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang behubungan dengan Obligasi ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

XIX. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI SUBORDINASI

1. UMUM

Penjelasan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 48 tanggal 18 Oktober 2012 dan Addendum Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 106 tanggal 14 November 2012, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo S.H., MH, Mkn, Notaris di Jakarta.

Obligasi Subordinasi ini akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi, yang ditawarkan dengan nilai nominal dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan pokok Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi Subordinasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi Subordinasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga dan pelunasan pokok Obligasi Subordinasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi Subordinasi.

Penarikan Obligasi Subordinasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi Subordinasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi Subordinasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

Bagi Pemegang Obligasi Subordinasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi. Perseroan melalui Agen pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.

2. JUMLAH POKOK, HARGA PENAWARAN, BUNGA DAN SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI SUBORDINASI

2.1. Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

2.2. Harga Penawaran

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok dengan satuan jumlah Obligasi Subordinasi.

2.3. Bunga Obligasi Subordinasi

Besarnya bunga tetap Obligasi Subordinasi untuk tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-7 (ketujuh) adalah sebesar •% (•persen) per tahun.

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang untuk pertama kalinya pada tanggal • 2013 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal • 2019. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-1	:	Bunga Ke-15	:
Bunga Ke-2	:	Bunga Ke-16	:
Bunga Ke-3	:	Bunga Ke-17	:
Bunga Ke-4	:	Bunga Ke-18	:
Bunga Ke-5	:	Bunga Ke-19	:
Bunga Ke-6	:	Bunga Ke-20	:
Bunga Ke-7	:	Bunga Ke-21	:
Bunga Ke-8	:	Bunga Ke-22	:
Bunga Ke-9	:	Bunga Ke-23	:
Bunga Ke-10	:	Bunga Ke-24	:
Bunga Ke-11	:	Bunga Ke-25	:
Bunga Ke-12	:	Bunga Ke-26	:
Bunga Ke-13	:	Bunga Ke-27	:
Bunga Ke-14	:	Bunga Ke-28	:

2.4. Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp.1,- (satu Rupiah).

2.5. Satuan Perdagangan Obligasi Subordinasi

Satuan Perdagangan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

3. JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO OBLIGASI SUBORDINASI

Obligasi Subordinasi berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dan jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal • 2019.

4. JAMINAN

Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi Subordinasi ini secara pari passu berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, sesuai pasal 1131 dan 1132 kitab undang undang hukum perdata.

5. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SUBORDINASI (*BUY BACK*)

Obligasi Subordinasi ini tidak mempunyai opsi untuk pembelian kembali (*buy back*) sampai dengan jatuh tempo Obligasi Subordinasi.

6. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Subordinasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

6.1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (ijin Mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar) dan jika jawaban Wali Amanat atas permohonan ijin tersebut tidak diperoleh dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan ijin tersebut diterima oleh Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kalender sejak surat permohonan permintaan dokumen tersebut diterima oleh Perseroan maka ijin tersebut dianggap telah diberikan, Perseroan dilarang yaitu:

6.1.1. Mengurangi Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.
6.1.2. Mengadakan perubahan di bidang usaha.
6.1.3. Melakukan penyertaan modal pada pihak manapun juga yang secara total melebihi ketentuan Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang.
6.1.4. Melakukan penggabungan,peleburan atau reorganisasi dengan perusahaan lain yang bertentangan dengan ketentuan/kebijaksanaan Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang .

6.1.5. Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun juga sebagian atau seluruh Aktiva Tetap Perseroan berupa tanah dan bangunan di atasnya, baik yang sekarang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, kepada pihak ketiga manapun kecuali untuk agunan yang diambil alih/harta eks jaminan dan Aktiva Tetap lainnya yang nilainya dalam 1 (satu) transaksi atau gabungan transaksi yang dalam tahun berjalan selama masa Obligasi Subordinasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

6.1.6. Menjaminkan atau membebani dengan cara apapun harta kekayaan Perseroan, baik yang sekarang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, kepada pihak ketiga manapun. Pembatasan ini tidak berlaku untuk:

(i) Harta kekayaan yang telah dijaminkan sebelum tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan.
(ii) Jaminan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, termasuk tetapi tidak terbatas pada pinjaman antar bank sehubungan dengan kebutuhan likuiditas, pinjaman pemerintah dan terkait pemerintah dan/atau pinjaman luar negeri sehubungan dengan pengembangan usaha Perseroan dan transaksi repo.
(iii) Harta kekayaan yang dijaminkan untuk pinjaman baru sebagai pengganti pinjaman lama (*refinancing*).

6.2. Perseroan berkewajiban untuk:

6.2.1. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang jatuh tempo dan harus sudah tersedia (*in good fund*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi ke dalam rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh waktu pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Perseroan belum menyerahkan kepada Agen Pembayaran dana-dana sebagaimana tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi sebesar tingkat Bunga Obligasi Subordinasi ditambah premi 1,5% (satu koma lima persen) per tahun.

- Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang telah lewat) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5.14 Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas.
- Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi oleh Agen Pembayaran akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

Kewajiban penyetoran dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur di atas, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) butir b PBI Nomor: 10/15/PBI/2008 yang mensyaratkan persetujuan Bank Indonesia untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, dan ketentuan Pasal 17 ayat (2) butir d PBI Nomor: 10/15/PBI/2008, yaitu bahwa penyetoran dana untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasi antara periode (*cummulative*) termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo Obligasi Subordinasi apabila:

(1) Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi tersebut dapat menyebabkan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (selanjutnya disingkat "KPMM") Perseroan secara individual atau KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
(2) Perseroan dalam keadaan rugi; atau
(3) Kondisi profitabilitas Perseroan tidak memungkinkan untuk membayar Bunga Obligasi Subordinasi tersebut.

6.2.2. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya.

6.2.3. Memelihara sistim akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.

6.2.4. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap perubahan, kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan sesuai ketentuan Bapepam dan Bank Indonesia.

6.2.5. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya.

6.2.6. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
1. Laporan-laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik Perseroan yang terdaftar di BAPEPAM & LK selambat-lambatnya 90 (sembilanpuluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tiap tahun buku Perseroan atau sesuai ketentuan BAPEPAM & LK.
2. Laporan-laporan keuangan intern tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan dalam waktu:
   - 60 (enampuluh) Hari Kalender jika diaudit oleh akuntan publik;
   - 30 (tigapuluh) Hari Kalender jika tidak diaudit oleh akuntan publik; setelah berakhirnya tiap masa semester dari tiap tahun buku Perseroan.
3. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa laporan keuangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi apabila terjadi pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan maka segera setelah penutupan laporan keuangan tahunan dan/atau semesteran.
4. Laporan-laporan yang disampaikan kepada Bapepam dan LK.
5. Salinan resmi akta Perjanjian Perwaliamanatan dan akta-akta lain yang dibuat sehubungan dengan Emisi Obligasi Subordinasi.

6.2.7. Menjaga dan mengusahakan tingkat kesehatan Perseroan sesuai dengan kriteria sehat, sesuai dengan ketentuan/peraturan Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang

6.2.8. Menjaga jumlah aktiva yang tidak diagunkan minimal sebesar 150% (seratus limapuluh persen) dari hutang Perseroan yang belum dibayar lunas (*outstanding*) dalam bentuk obligasi dan surat hutang jangka menengah (*Medium Term Note*) dalam mata uang rupiah yang diperdagangkan di pasar modal.

6.2.9. Memberi ijin kepada Wali Amanat bilamana terjadi pelanggaran Perjanjian Perwaliamanatan untuk pada saat jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian perjanjian, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2.10. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan Anggaran Dasar serta perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Wali Amanat.

6.2.11. Memberitahukan secara tertulis hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kepada Wali Amanat.

6.2.12. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah. Surat Keputusan Menteri Keuangan. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia serta memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.

6.2.13. Melakukan pemeringkatan Obligasi Subordinasi 1 (satu) tahun sekali yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) atau pengganti haknya atau pihak lain yang ditunjuk sebagai penggantinya dan menyampaikan hasil pemeringkatan tersebut kepada Wali Amanat. selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah hasil pemeringkatan tersebut diperoleh.

7. KELALAIAN PERSEROAN

7.1. Kelalaian Perseroan dan Akibat Hukumnya.

7.1.1. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

a. Butir 7.1.2 huruf a dan g poin ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

b. Butir 7.1.2 huruf f dan h poin ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

c. Butir 7.1.2 huruf b,c,d dan e poin ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 150 (seratus lima puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat, maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional di tempat kedudukan Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata-cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan serta langkah-langkah yang akan diambil Perseroan sehubungan dengan kelalaiannya

tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas dan memutuskan langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO memutuskan Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi Subordinasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

7.1.2. Kejadian kelalaian atau cidera janji sebagaimana dimaksud dalam poin 7 butir 7.1.1 diatas ini, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut dibawah ini:

a. Perseroan lalai membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau atas Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi;
b. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan
c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang oleh badan peradilan yang berwenang;
d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar (lebih dari 50% (lima puluh persen)) harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan
e. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
f. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan lain yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
g. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman(debt), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, dimana kelalaian tersebut terbukti dengan adanya surat atau pernyataan tertulis dari kreditur yang meminta agar jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan
h. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap *(in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan

7.2. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau dinyatakan pailit dan pernyataan pailit tersebut telah mendapat kekuatan hukum yang tetap, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Subordinasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan perundang undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia,khususnya peraturan perbankan.

8. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI (RUPO)

Untuk menyelenggarakan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini:

8.1 RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari poin ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:

a. berkaitan menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat;
b. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

c. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang yang dimuat dalam lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2010, tanggal 06 September 2010.
d. mengambil keputusan sehubungan dengan usaha Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, tingkat Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan khusus untuk perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, tingkat Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat, untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.
f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan
g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8.2 RUPO dapat diselenggarakan bilamana:

(1) Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih terhutang, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
(2) Wali Amanat, BAPEPAM & LK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO. Dalam hal ini Wali Amanat harus melakukan panggilan untuk RUPO dan menyelenggarakan RUPO, selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut.

8.3 Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Subordinasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada BAPEPAM & LK selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

8.4 Tata cara RUPO:

(a) RUPO dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
(b) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO;
(c) Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional .Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua;

(d) Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
- tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO
- agenda RUPO
- pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO
- Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dan memilikisuara dalam RUPO; dan
- kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

(e) RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.

(f) Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO

(g) Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.

(h) Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi Subordinasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

(i) Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan..

(j) Seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi Subordinasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

(k) Pada saat pelaksanaan RUPO:
Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi Subordinasi yang dimiliki Afiliasi Perseroan; dan Pemegang Obligasi Subordinasi atau kuasa Pemegang Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi Subordinasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan

(l) Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.9 Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggungjawab Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.

(m) Atas Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPO

8.5 Dengan memperhatikan ketentuan dalam dalam poin 8.4.i, kuorum dan pengambilan keputusan:
Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:

(1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan poin 8.4 (i).

ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO .

iv. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO .

(2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan poin 8.4 (i).

ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

iv. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

(3) Apabila RUPO dimintakan oleh Bapepam dan LK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan poin 8.4 (i).

ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO .

iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

8.6 RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan poin 8.4 (i).

ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.

iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

8.7 Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi Subordinasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPO.
8.8 Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
8.9 Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangandibidang Pasar Modal, maka peraturan perundang undangan tersebut yang berlaku.

9. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Subordinasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi Subordinasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi Subordinasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi pada periode Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi tersebut sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi yang berlaku atas Jumlah Terhutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
4. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana:

   a. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (duapuluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.Pencabutan pembekuan Obligasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

   b. Wali Amanat atau Bapepam dan LK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.
5. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:
   a. Berkaitan dengan suatu kelalaian:
      (i) Untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau.
      (ii) Mengambil tindakan lain yang diputuskan untuk diambil oleh Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPO dan menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat mengenai tindakan-tindakan lain yang diputuskan tersebut;
   b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
   c. Dalam hal Wali Amanat dan Perseroan bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau wewenangnya tidak diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
   d. Membahas usulan Perseroan sehubungan dengan perubahan jangka waktu, suku bunga, dan hal penting lainnya yang berkaitan dengan Obligasi Subordinasi dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

10. PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi Subordinasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini.

11. PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan telex.

PERSEROAN
PT Bank Pan Indonesia Tbk
disingkat PT Bank Panin Tbk
Gedung Bank Panin Pusat
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta, 10270. Indonesia
Telepon : (62-21) 2700 545
Faksimili : (62-21) 2700 340

WALI AMANAT
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Plaza Mandiri Lantai 22
JL. Jenderal Gatot Subroto. Kaveling 36-38
Jakarta 12190 Indonesia
Telepon : (62-21) 5268216, 52913212, 5245161, 5275370
Faksimili : (62-21) 5263762

Apabila salah satu pihak mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberikan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

12. HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang behubungan dengan Obligasi Subordinasi ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yuridiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum pada bagian mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dibuat 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan Obligasi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

4. Masa Penawaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Masa Penawaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal 13 - 14 Desember 2012. Jam penawaran akan dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XXI Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi Prospektus ini pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. Penjatahan Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7. Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, penjatahan yang digunakan adalah penjatahan pasti (*fixed allotment*), sehingga jumlah keseluruhan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dipesan tidak akan melebihi jumlah Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan.

Dalam hal Penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. Manajer Pejatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum;
b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki Efek untuk rekening sendiri untuk; dan

c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa Efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase yang akan mendapatkan penjatahan pasti adalah 100% dari jumlah Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan. Pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti adalah antara lain dana pensiun, asuransi, bank, manajer investasi dan pihak lain yang telah mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi pada masa penawaran.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

PT Evergreen Capital, selaku Manajer Penjatahan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7. Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran umum.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikut sertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.7. Lampiran Keputusan No. Kep 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan Obligasi Subordinasi, Pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi selambat-lambatnya tanggal 18 Desember 2012 pada pukul 11.00 WIB (*in good fund*). Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi selambat-lambatnya tanggal 18 Desember 2012 pada pukul 14.00 WIB (*in good fund*) yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi:

Bank CIMB Niaga	**Bank Permata**
Cabang Graha Niaga	**Cabang Sudirman**
No. Rek. : 146 0101 085 009	**No. Rek. : 0701-240804**
Atas nama:PT CIMB Securities Indonesia	**Atas nama : PT Danareksa Sekuritas**
Bank Panin	**Bank Permata**
Cabang Senayan	**Cabang Sudirman Jakarta**
No.Rek. : 1005-641434	**No. Rek : 4001763313**
Atas Nama: PT Evergreen Capital	**Atas nama : PT Indo Premier Securities**

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. Distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal v. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Obligasi Subordinasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi dan Obligasi Subordinasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakanya pendistribusian Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

10. Pendaftaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Obligasi Subordinasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi yaitu tanggal 19 Desember 2012;
b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
d. Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang berhak atas pembayaran bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi, pelunasan pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Obligasi Subordinasi;
e. Pembayaran bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan pelunasan jumlah pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi maupun pelunasan pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang berhak atas bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dibayarkan pada periode pembayaran bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi dan Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/ dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat;
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi wajib membuka Rekening Efek di Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Bapepam dan LK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi telah dibayar, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaaan atau pembatalan tersebut, dengan ketentuan:

- Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Emisi, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi, dengan demikian membebaskan Perseroan dari segala tanggung jawabnya.
- Apabila hal tersebut terjadi setelah Tanggal Emisi maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pembayarannya dilakukan melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dari segala tanggung jawabnya.
  Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar tingkat suku Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk tiap hari keterlambatan, denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah tanggal pengakhiran/pembatalan Penawaran Umum tersebut yang dihitung secara harian.
  Jumlah yang harus dibayar dan denda tersebut harus dibayar sekaligus lunas atas permintaan pertama Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dengan memberitahukan kepada KSEI dan KSEI mengembalikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada Perseroan sesuai dengan jumlah Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan Perseroan.
- Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.
- Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini karena sebab apapun wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan ketentuan yang berlaku.

XXI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012, telah dibuat akta perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Bank Mandiri dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 44 tanggal 18 Oktober 2012, Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 48 tanggal 18 Oktober 2012, Addendum I Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 102 tanggal 14 November 2012 dan Addendum I Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 106 tanggal 14 November 2012 yang seluruhnya dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini yang bertindak sebagai Wali amanat adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang beralamatkan di Plaza Mandiri lantai 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama pemegang Obligasi dalam rangka Penerbitan dan penunjukan Wali amanat obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 17/STTD-WA/PM/1999 Tanggal 27 Oktober 1999 sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-309/BL/2008 Tanggal 1 Agustus 2008 Tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan, Wali Amanat menyatakan tidak akan:

(i) Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang bersifat utang; dan/atau
(ii) Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat telah melakukan uji tuntas dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 sesuai dengan surat tanggal 16 Oktober 2012.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku wali amanat tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

1. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-16561 HT.01.01.Th.98 tanggal 2 Oktober 1998, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No. 6859 Tahun 1998.

Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero) ("BBD"), PT Bank Dagang Negara (Persero) ("BDN"), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) ("Bank Exim") dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) ('Bapindo") (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Bank Peserta Penggabungan").

Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah sehubungan dengan Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan. Perubahan Anggaraan Dasar ini dilaksanakan dengan akta Notaris Ashoya Ratam SH, MKn, Notaris di Jakarta, No. 24 tanggal 21 Mei 2012. Saat ini persetujuan menteri HUM dan HAM masih sedang dalam proses.

2. PERMODALAN

Berdasarkan keputusan Rapat Komisaris yang dikeluarkan berdasarkan pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No 15 tanggal 25 Februari 2011, dibuat di hadapan DR. A. Partomuan Pohan, SH, LLM, Notaris di Jakarta, susunan permodalan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per lembar saham		
	Jumlah lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	Kepemilikan Saham(%)
Modal Dasar:			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0.00
- Saham Biasa Seri B	31.999.999.999	15.999.999.999.500	100.00
Jumlah Modal Dasar	32.000.000.000	16.000.000.000.000	100.00
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0.00
- Saham Biasa Seri B	13.999.999.999	6.999.999.999.500	60.00
Publik (masing-masing di bawah 5%)			
- Saham Biasa Seri B	9.333.333.333	4.666.666.666.500	40.00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	23.333.333.333	11.666.666.666.500	100.0
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.666.666.667	4.333.333.333.500	

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sesuai dengan Akta No. 24 tanggal 21 Mei 2012 dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH, MKn, notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Edwin Gerungan
Wakil Komisaris Utama	: Muchayat
Komisaris	: Cahyana Ahmad Jayadi
Komisaris	: Wahyu Hidayat *
Komisaris Independen	: Krisna Wijaya
Komisaris Independen	: Gunarni Soeworo
Komisaris Independen	: Pradjoto

* Sesuai keputusan RUPS tahunan tanggal 23 April 212 dan masih menunggu persetujuan dari Bank Indonesia atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test)

Direksi

Direktur Utama	: Zulkifli Zaini
Wakil Direktur Utama	: Riswinandi
Direktur Institutional Banking	: Abdul Rachman
Direktur Risk Management	: Sentot A. Sentausa
Direktur Micro & Retail Banking	: Budi Gunadi Sadikin
Direktur Compliance & Human Capital	: Ogi Prastomiyono
Direktur Finance & Strategy	: Pahala N. Mansury
Direktur Corporate Banking	: Fransisca N. Mok
Direktur Commercial & Business Banking	: Sunarso
Direktur Technology & Operations	: Kresno Sediarsi
Direktur Treasury, Financial Institution & Specil Asset Management	: Royke Tumilaar

3. KEGIATAN USAHA

Sesuai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam akta No. 48 tanggal 25 Juni 2008, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ialah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
   b. Memberikan kredit;
   c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
   d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
      - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
      - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
      - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
      - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
      - Obligasi; surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      - Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
   f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
   g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
   h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
   i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
   j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
   k. Melakukan kegiatan anjak piutang. usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
   l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah. sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
   m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

   Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam No. 2 di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat pula:

   a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
   b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha. modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
   c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
   d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun;

e. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Di dalam pengembangan Pasar Modal, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ikut berperan aktif, antara lain dengan bertindak sebagai:

a. Wali Amanat (Trustee) dalam penerbitan obligasi & MTN sebagai berikut:

- PT Al Ijarah Indonesia Finance
- PT Astra International Tbk
- PT Bank Commonwealth
- PT Bank Danamon Tbk
- PT Bank DKI
- PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)
- PT Bank Internasional Indonesia Tbk
- PT Bank Panin Tbk
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Bukopin Tbk
- PT Bank Pembangunan Daerah NTB
- PT Bank Pembangunan Daerah NTT
- PT Bank Pembangunan Daerah Lampung
- PT Bank Pembangunan Daerah Maluku
- PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara
- PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Nagari)
- PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
- PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
- PT Bank Syariah Mandiri
- PT Bahtera Adimina Samudera
- PT Bakrie Finance
- PT Bunas Finance
- PT Berlian Laju Tanker Tbk
- PT Ciputra Development
- PT Ciputra Surya
- PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
- PT Dankos Laboratories
- PT Great River International Tbk
- PT Indosiar Karya Media Tbk
- PT Jakarta International Hotel & Development
- PT Jakarta Propertindo
- PT Jasa Marga (Persero)Tbk
- PT Jawa Pos National Network
- PT Lautan Luas Tbk
- PT Mandiri Tunas Finance
- PT Mayora Indah
- PT Metrodata Electronics
- PT Marga Mandala Sakti
- PT Oto Multiartha Finance
- PT Pam Lyonaise Jaya
- PT Panasia Filament Inti
- PT Papan Sejahtera
- PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)
- PT Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- PT Ricky Putra Globalindo
- PT Sosro
- PT Suba Indah
- Summit Oto Finance
- PT Summarecon Agung
- PT Swadharma Indotama Finance
- PT Tamara Konversi
- PT Tjiwi Kimia
- PT U Finance
- PT Verena Multi Finance Tbk
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
- Perum Perumnas
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“Indonesia Eximbank”)

b. Agen Pembayaran dividen saham perusahaan publik dan MTN :

- PT Sucaco
- PT Merck Indonesia
- PT Asuransi Ramayana
- PT Alumindo Perkasa
- PT Tembaga Mulia Semanan
- PT Semen Gresik
- PT Barito Pacific Timber
- PT Citra Marga Nusapala Persada
- PT Indosat Tbk.
- PT Aneka Tambang Tbk
- PT Unilever Indonesia Tbk.
- PT BAT Indonesia
- PT Sari Husada
- PT Goodyear Indonesia
- PT Surya Dumai Industri
- PT Pan Brothers
- PT Intan Wijaya Chemical
- PT Ekadharma Tape Indonesia
- PT Humpuss
- PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
- PT Al-Ijarah Indonesia

c. Jasa *Receiving Bank* dalam *Initial Public Offering*:

- PT Indofarma Tbk.
- PT Kimia Farma Tbk.
- PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
- PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk.
- PT Mitra Adi Perkasa Tbk.
- PT Bank Himpunan Saudara Tbk.
- PT Sampoerna Agro Tbk.
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- PT Gapura Prima Tbk.
- PT Indotambangraya Megah Tbk.
- PT Elnusa Tbk.
- PT Bumi Serpong Damai Tbk.
- PT Indika Energy Tbk.
- PT Trikomsel Oke Tbk.
- PT Garda Tujuh Buana Tbk.
- PT Metropolitan Kentjana Tbk.
- PT Dian Swastatika Sentosa Tbk.
- PT Latinusa Tbk.
- PT Pembangunan Perumahan (PP)
- PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
- PT Harum Energy Tbk
- PT Tower Bersama Tbk.
- PT Metropolitan Land Tbk.
- PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk.
- PT ABM Investama Tbk.
- PT Garuda Indonesia Tbk.
- PT Kobexindo Tractors Tbk.
- PT Toba Bara Sejahtera Tbk.

d. Mengelola Rekening Penampungan (*Escrow Agent*) & Agen Penjaminan (*Security Agent*)
e. Menyelenggarakan jasa penitipan Efek-efek (Jasa *Custodian*)

4. KANTOR CABANG

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terus meluas. Data per 30 Juni 2012 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah memiliki kantor yang terdiri atas: 1 (satu) Kantor Pusat; 12 (dua belas) kantor wilayah dalam negeri; 1.643 (seribu enam ratus empat puluh tiga) cabang yang tersebar di seluruh Indonesia; 5 (lima) cabang Luar Negeri yang berlokasi di Hongkong, Singapura, Cayman Island,Timor Leste dan Shanghai; dan 2 (dua) anak perusahaan di London (BMEL) dan Malaysia (MIR).

5. TUGAS DAN KEWAJIBAN WALI AMANAT

Sesuai Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukkan Wali amanat Obligasi Berkelanjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 dan Obligasi Subordinasi Berkalnjutan I Bank Panin Tahap I Tahun 2012 No. 44 tanggal 18 Oktober 2012, dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo,SH,MK.MKn Notaris di Jakarta, tugas pokok Wali amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam dan di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak. kewajiban dan kepentingan Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

6. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang mana angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, wibisana & Rekan dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2011	2010
ASET		
Kas	11.357.523	9.521.713
Giro pada BI	36.152.674	24.856.699
Giro pada Bank Lain – bersih	9.816.828	8.559.665
Penempatan pada BI dan Bank Lain – bersih	51.393.062	28.914.035
Efek-efek – bersih	12.002.918	27.247.529
Obligasi Pemerintah	78.459.449	78.092.734
Tagihan Lainnya – Transaksi Perdagangan – bersih	4.811.988	2.575.586
Tagihan atas efek – efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	12.369.885	8.980.757
Tagihan Derivatif – bersih	113.657	37.096
Kredit Yang Diberikan – bersih	298.988.258	232.545.259
Piutang Pembiayaan Konsumen – bersih	3.185.570	2.132.823
Investasi Bersih dalam Sewa Pembiayaan	38.785	0
Tagihan Akseptasi – bersih	6.510.436	3.779.409
Penyertaan Saham – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	6.498	6.248
Investasi Pemegang Polis pada Kontrak *unit-linked*	9.044.266	7.212.113
Aset Tetap – bersih	6.589.594	5.527.000
Aset Lain-lain - bersih	7.249.901	5.384.797
Aset Pajak Tangguhan – bersih	3.800.412	4.401.088
Jumlah Aset	**551.891.704**	**449.774.551**
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	1.830.798	1.415.831
Simpanan Nasabah :		
Giro	92.530.586	68.287.253
Tabungan	149.868.333	123.956.607
Deposito berjangka	142.329.684	145.144.049
Simpanan dari Bank Lain	12.317.885	7.202.683
Liabilitas atas Efek-Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	-	-
Liabilitas Derivatif	165.378	33.246
Liabilitas kepada Pemegang Polis *Unit-Linked*	9.044.266	7.212.113
Liabilitas Akseptasi	6.551.103	3.950.506
Efek-efek yang Diterbitkan	2.211.588	1.491.367
Pinjaman Yang Diterima	11.703.498	5.634.838
Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi	234.364	371.665
Beban yang Masih Harus Dibayar	600.545	606.975
Utang Pajak Kini	761.737	750.432
Liabilitas Lain-lain	15.378.187	10.338.954
Pinjaman Subordinasi	5.851.798	6.056.572
Jumlah Liabilitas	**451.379.750**	**382.453.091**
DANA *SYIRKAH* TEMPORER		
Simpanan Nasabah		
Pihak Berelasi	6.002.057	3.710.526
Pihak Ketiga	31.519.744	21.113.719
Simpanan dari Bank Lain	335.745	427.179
Jumlah Dana Syirkah Temporer	**37.857.546**	**25.251.424**
EKUITAS		
Modal Saham	11.666.667	10.498.247
Tambahan Modal Disetor/Agio Saham	17.195.760	6.960.680
Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	56.794	69.593
(Kerugian)/Keuntungan bersih yang Belum Direalisasi dari Penurunan Nilai Wajar Efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual Setelah Dikurangi Pajak Tangguhan	(631.529)	(427.899)
Saldo laba- bersih	33.505.527	24.442.187
Kepentingan Nonpengendali atas Aset Bersih Anak Perusahaan yang Dikonsolidasi	861.189	527.228
Jumlah Ekuitas	**62.654.408**	**42.070.036**
Jumlah Liabilitas, Dana *Syirkah* Temporer dan Ekuitas	**551.891.704**	**449.774.551**

Laporan Laba Rugi

Keterangan	31 Desember	
	2011	2010
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan Bunga dan Syariah	37.730.019	33.931.650
Beban Bunga dan Syariah	(15.954.037)	(14.413.041)
Pendapatan Bunga dan Syariah – bersih	**21.775.982**	**19.518.609**
Pendapatan premi	4.806.087	1.025.306
Beban Klaim	(2.991.114)	(472.394)
Pendapatan premi – bersih	**1.814.973**	**552.912**
Pendapatan bunga, Syariah dan Premi – bersih	**23.590.955**	**20.071.521**
Pendapatan Operasional Lainnya	11.768.351	8.432.817
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(3.297.670)	(2.986.234)
(Pembentukan)/Pembalikan Penyisihan Estimasi Kerugian atas Komitmen dan Kontinjensi	127.257	(53.358)
(Pembentukan)/Pembalikan Penyisihan Kerugian	285.022	88.778
Keuntungan/(Kerugian) yang Belum Direalisasi dari Kenaikan/(Penurunan) Nilai Wajar Efek-efek, Obligasi Pemerintah dan Investasi Pemegang Polis pada Kontrak *Unit-linked*	69.903	(23.401)
Keuntungan/(Kerugian) dari Penjualan Efek-efek dan Obligasi Pemerintah	117.136	286.870
Beban Operasional Lainnya		
Beban gaji dan tunjangan	(6.766.471)	(5.802.173)
Beban umum dan administrasi	(6.577.643)	(5.467.972)
Lain-lain – bersih	(2.967.907)	(804.828)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(16.312.021)	(12.074.973)
Laba Operasional	**16.348.933**	**13.742.020**
Pendapatan/(Beban) Bukan Operasional – bersih	163.102	230.142
Laba Sebelum Manfaat/(Beban) Pajak dan Kepentingan Nonpengendali	**16.512.035**	**13.972.162**
(Beban)/Manfaat Pajak – bersih	(3.816.150)	(4.602.936)
Laba bersih	**12.695.885**	**9.369.226**

Wali Amanat:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Plaza Mandiri Lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190. Indonesia
Telp. (021) 5245161. 5275370
Faks. (021) 5268201. 5263602

Situs Internet: www.bankmandiri.co

XXII. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk dengan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi masing-masing No. 47 dan No. 51 tanggal 18 Oktober 2012 dan Addendum I Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi masing-masing No. 105 dan No. 109 tanggal 14 November 2012 yang dibuat antara Perseroan dan KSEI pada, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI.

Pelunasan Pokok Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman. Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5299-1099
Faksimili : (021) 5299-1199

XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi berikut ini :

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi

PT CIMB SECURITIES INDONESIA

IDX Bld Tower II, 20th Fl
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telp: (021) 515-1330
Fax : (021) 515-4661

PT DANAREKSA SEKURITAS

Gedung Danareksa
Lt. 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110
Telp: (021) 350-9777
Fax : (021) 350-1817

PT EVERGREEN CAPITAL

Gedung Bank Panin Pusat
Lt. Dasar
Jl. Jend. Sudirman No. 1
Jakarta 10270
Telp: (021) 573-9510
Fax : (021) 573-9508

PT INDO PREMIER SECURITIES

Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Telp: (021) 5793-1168
Fax: (021) 5793-1167

Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Halaman ini sengaja dikosongkan